

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997



SEJARAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penyunting : Sutrisno Kutoyo dkk

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1977

Edisi I 1977

Diterbitkan ulang oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Edisi II 1997

Dicetak oleh : CV. EKA DHARMA



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dari pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta. November 1997

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Sedyawati', written over a horizontal line.

Prof Dr. Edi Sedyawati

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta* adalah satu diantara hasil-hasil pelaksana kegiatan penulisan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977 Proyek Tersebut menerbitkannya pada tahun 1978 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari zaman Prasejarah meliputi asal-usul penghuni yang pertama, teknologi, organisasi masyarakat, kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya serta kepercayaan mereka. Kemudian dilanjutkan ke periode selanjutnya, yaitu zaman kuno, meliputi kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, penyelenggaraan hidup dalam masyarakat, kehidupan seni budaya dan alam kepercayaan/agama. Zaman baru, zaman kebangkitan nasional, zaman pendudukan Jepang dan zaman kemerdekaan juga diuraikan dengan materi yang sama.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "biasa baca" dan "butuh baca" sangat menaruh minat untuk memperolehnya. Sementara itu, persediaan buku hasil cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara instansional.

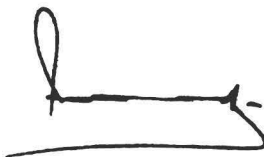
Untuk memenuhi permintaan tersebut, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mempercayai Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-

nilai Budaya Pusat untuk melakukan penyempurnaan, perbanyak, dan penyebarluasan buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kebudayaan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, November 1997

**Pemimpin Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat,**

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop at the top left, followed by a horizontal line, and ending with a small flourish on the right.

Soejanto, B.Sc.

NIP. 130 604 670

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar Cetakan Kedua	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Prasejarah	
2.1 Asal-usul Penghuni yang Pertama	8
2.2 Penyelenggaraan Hidup	9
2.2.1 Pemenuhan Keperluan Hidup primer	10
2.2.2 Perlindungan Terhadap Alam (papan)	13
2.2.3 Perpindahan	15
2.3 Organisasi Masyarakat	16
2.3.1 Pengaturan Masyarakat	16
2.3.2 Kepemimpinan	17
2.4 Kehidupan Seni Budaya	18
2.4.1 Pendidikan	19
2.4.2 Kesenian	20
2.5 Alam pikiran dan Kepercayaan	24
2.5.1 Hidup dan Maut	25
2.5.2 Hubungan Manusia dengan Dunia Gaib	27
2.5.3 Upacara-upacara	29
Catatan	31

Bab III Zaman Kuna

3.1	Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan (politik)	36
3.1.1	Pertumbuhan Negara-negara	36
3.1.2	Kepemimpinan	44
3.1.3	Pengaturan Pemerintahan	47
3.1.4	Hubungan Antar Negara	50
3.2	Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	51
3.2.1	Pemenuhan Kebutuhan Hidup	51
3.2.2	Hubungan Antara Golongan	55
3.2.3	Kepemimpinan	56
3.2.4	Pengaturan Masyarakat	57
3.3	Kehidupan Seni Budaya	57
3.3.1	Pendidikan	58
3.3.2	Kesenian	59
3.4	Alam Pikiran dan Kepercayaan/Agama	70
3.4.1	Perkembangan Agama	70
3.4.2	Bangunan Agama	74
3.5	Hubungan Keluar	75
3.5.1	Bentuk Hubungan	75
3.5.2	Akibat Hubungan	76
Catatan		79

Bab IV Zaman Baru ($\pm$ 1500 M-- 1800 M)

4.1	Kehidupan Pemerintah dan Kenegaraan	83
4.2	Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat	92
4.3	Kehidupan Agama dan Kepercayaan	103
4.4	Hubungan Keluar	107
Catatan		113

Bab V Abad ke-19 ($\pm$ 1800 M -- 1900 M)

5.1	Kehidupan Pemerintah dan Kenegaraan	117
5.2	Penyelenggaraan Kehidupan dalam Masyarakat	144
5.3	Kehidupan Seni Budaya	148
5.4	Alam Fikiran dan Kepercayaan	155
Catatan		163

Bab VI Zaman Kebangkitan Nasional (1900--1942)

6.1	Keadaan Pemerintah dan Keagamaan	165
6.1.1	Kerajaan-kerajaan	165
6.1.2	Pemerintahan Hindia Belanda	182
6.2	Kaum Pergerakan di Daerah	187
6.2.1	Budi Utomo	187
6.2.2	Gerakan Muhammadiyah	190
6.2.3	Gerakan Taman Siswa	194
6.2.4	Timbulnya Kepanduan di Yogyakarta	198
6.3	Penyelenggaraan Kehidupan dalam Masyarakat	200
6.3.1	Pengaruh Kekuatan Eropa	200
6.3.2	Pemenuhan Kebutuhan	203
6.3.3	Keadaan Masyarakat serta Partisipasinya kepada Pergerakan Kebangsaan	209
6.4	Kehidupan Seni Budaya	214
6.4.1	Keadaan Seni Budaya serta Pengaruh Asing di dalamnya	214
6.4.2	Pendidikan	239
6.5	Alam Fikiran dan Kepercayaan	260
6.5.1	Perkembangan Agama	266
6.5.3	Kehidupan Intelektuil	279
6.6	Hubungan Keluar	280
Catatan		283

Bab VII Zaman Pendudukan Jepang (1942--1945)

7.1	Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	287
7.1.1	Kerajaan-kerajaan	287
7.1.2	Pemerintah Jepang	293
7.1.3	Sikap Terhadap Pemerintah Jepang	296
7.2	Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	308
7.3	Kehidupan Seni Budaya	311
7.3.1	Pendidikan	313
7.3.2	Kesenian	316
7.3.3	Pengaruh Seni Budaya Jepang	319
7.4	Alam Fikiran dan Kepercayaan	324
Catatan		329

Bab VIII Zaman Kemerdekaan (1945--1975)	
8.1 Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	331
8.1.1 Tumbuhnya Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta	333
8.1.2 Perjuanga Mempertahankan Kemerdekaan	336
8.1.3 Keadaan Sesudah Penyerahkan Kedaulatan	354
8.2 Penyelenggaraaan Hidup.....	363
8.2.1 Kehidupan Sosial Ekonomi Pada Masa Revolusi Fisik	363
8.2.2 Kehidupan Sosial Ekonomi Sesudah Penyerahan Kedaulatan	365
8.3 Kehidupan Pendidikan dan Sosial Budaya.....	366
8.3.1 Perkembangan Pendidikan	366
8.3.2 Perkembangan Seni Budaya	369
8.4 Alam Fikiran dan Kepercayaan.....	370
8.4.1 Perkembangan Agama	370
8.4.2 Kehidupan Intelektuil	372
8.5 Hubungan keluar	372
Catatan	375
Penutup	383
Daftar Pustaka	389

BAB I

PENDAHULUAN

Sejarah telah mencatat, bahwa kota Yogyakarta kota perjuangan pergerakan, kota revolusi, kota pendidikan, kota bagi kehidupan mental/spritual dan kota kebudayaan.

Kita mengetahui bahwa sejak Proklamasi Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Yogyakarta mempunyai sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun dalam memberikan andil perjuangan menegakkan cita-cita Revolusi Bangsa Indonesia. Yogyakarta sudah dikenal oleh dunia baik keluar maupun ke dalam. Semua bangsa di dunia ini telah mengetahui peranan Yogyakarta. Yogyakarta di samping mempunyai kedudukan atau peran penting dalam perjuangan sejarah bangsa Indonesia, yang merupakan salah satu pusat kegiatan dalam usaha mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, juga banyak unsur persatuan perjuangan bangsa Indonesia yang ditemukan di Yogyakarta. Sudah barang tentu Kota Yogyakarta dan rakyatnya mempunyai beban dan pertanggung jawab yang tidak ringan, apalagi waktu Kota Yogyakarta memangku kewajiban Ibukota Negara Republik Indonesia. Kenyataan di atas dapat memberi kemungkinan keepada kita untuk mengatakan bahwa, "Yogyakarta merupakan Gudang Sejarah Bangsa Indonesia."

Mengingat pentingnya arti sejarah Yogyakarta, khususnya Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka oleh Departemen P dan K melalui

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah dilakukan penelitian dan pencatatan kebudayaan di daerah-daerah pada umumnya, khususnya sejarah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa penting mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pencatatan ini sudah seharusnya dilaksanakan oleh para peneliti bangsa Indonesia sendiri.
2. Penelitian dan pencatatan tersebut sangat diperlukan dalam rangka proses pembangunan sekarang ini. Hal ini disebabkan pembangunan tidak hanya menyangkut faktor pembiayaan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti budaya. Untuk ini kita dapat mengambil dari kejadian sejarah, termasuk kejadian bersejarah di Yogyakarta.
3. Penelitian dan penulisan Sejarah daerah ini mempunyai peranan penting dan merupakan dasar dari pada penulisan Sejarah Nasional.
4. Penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah, termasuk Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta penting artinya dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan nasional.

Di samping hal-hal tersebut di atas, diadakannya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah ini berdasarkan pada suatu pemikiran, bahwa :

1. Kebudayaan Nasional perlu dibina dan dipelihara. Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan Nasional, termasuk pula usaha-usaha penggalian dan pemupukan kebudayaan daerah. Kesemuanya itu untuk diwariskan kepada generasi muda.
2. Warisan budaya bangsa perlu diselamatkan. Dalam usaha penyelamatan itu termasuk kegiatan penelitian, pendokumentasian dan penerbitan karya-karya seni budaya Nasional dan daerah. Kegiatan tersebut juga merupakan usaha pembinaan kelangsungan dan pengembangan kebudayaan nasional, serta pembinaan ketahanan kebudayaan nasional.

3. Guna mendapatkan hasil yang dicita-citakan sesuai dengan pernyataan-pertanyaan tersebut di atas, di pan-dang perlu untuk mengadakan proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Pelaksanaan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah ini berdasarkan pada masalah-masalah, sebagai berikut:

1. Masih banyak warisan budaya bangsa terutama sekali yang bersumber dan bertebaran di daerah, belum diteliti dan dikembangkan.
2. Bangsa Indonesia masih belum kenal benar akan kebudayaannya sendiri, terutama yang bersumber dan hidup di daerah-daerah.
3. Masih kurangnya, bahan budaya terutama yang ber-sumber dan hidup di daerah-daerah untuk meramu ke-budayaan nasional.
4. Mengenai masa lampau bangsa Indonesia terutama yang berkenan dengan daerah, masih belum tergarap secara sempurna.

Sedangkan asas dan tujuan dari pada Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah ini, terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum yakni:

1. Menyelamatkan kebudayaan nasional.
2. Membina kelangsungan dan pengembangan kebudayaan nasional.
3. Membina ketahanan kebudayaan nasional.
4. Memperkuat kepribadian bangsa.

Tujuan khusus yakni:

1. Memelihara dan menyusun sejarah daerah sebagai bagian dari keseluruhan sejarah nasional.

2. Memelihara dan menyusun adat istiadat (tradisi) daerah sebagai aspek dari keseluruhan kepribadian bangsa.
3. Memelihara dan menyusun ceritera rakyat daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
4. Menyusun aspek geografi budaya daerah sebagai bagian dari wawasan nusantara.
5. Menyusun ensiklopedi seni musik daerah dan senitari daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.

Berdasarkan pertimbangan dan tujuan peenelitian dan pencatatan seperti di atas, maka pelaksanaan penelitian dan pencatatan untuk aspek sejarah terbatas pada bidang "sejarah daerah", khususnya "Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta."

Dalam penelitian dan pencatatan daerah khususnya "Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta" ini, dilaksanakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antaranya meliputi wilayah Kabupaten-kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan Kotamadya Yogyakarta.

Lokasi penelitian ditentukan seperti di atas sehubungan dengan:

1. Adanya penemuan dan peninggalan benda dan peristiwa bersejarah yang terdapat di sekitar daerah-daerah tersebut.
2. Kraton merupakan sumber dari pada kebudayaan Jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ruang lingkup penelitian dan pencatatan sejarah dengan ini meliputi seluruh periode yang terjadi di dalam sejarah, yaitu:

- a. Pra Sejarah
- b. Zaman Kuno (abad 1 - 1500 m)
- c. Zaman Baru ($\pm$ 1500 - 1800 m)
- d. Abad ke - 19 ($\pm$ 1800 - 1900 m)
- e. Zaman Kebangkitan Nasional ($\pm$ 1900 - 1942)
- f. Zaman Pendudukan Jepang ($\pm$ 1942 - 1945)
- g. Zaman Kemerdekaan (1945 - 1975).

Dalam penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan data yang berdasarkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (library research), yang dilakukan di beberapa Perpustakaan dan diterapkan dapat memberikan data untuk memperjelas pengungkapan.
2. Penelitian lapangan (field research), dalam hal ini akan dilakukan pewawancara dengan pamong atau beberapa orang yang ditentukan sebagai informan, agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga penelitian data.

Dengan berdasarkan pelaksanaan kerja seperti tersebut di atas, maka diharapkan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari data yang terkumpul itu kemudian diadakan seleksi. Maksudnya data yang tidak relevan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dibuang. Juga dalam tahap diadakan pengelompokkan data sesuai dengan periodisasinya. Selesai tahap ini kemudian diadakan penyusunan dan pengolahan data, dan akhirnya penulisan serta editing.

BAB II

PRA SEJARAH

Jaman prasejarah¹⁾ Indonesia ialah jaman semasa belum ada keterangan tertulis tentang bangsa Indonesia, baik yang ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri maupun oleh bukan bangsa Indonesia. Sedangkan jaman setelah adanya keterangan tertulis disebut jaman sejarah. Waktu bermulanya jaman prasejarah Indonesia, ialah sejak adanya jenis manusia tertua di Indonesia, yaitu *Meganthropus Paleo Javanicus*, atau manusia besar dari Jawa jaman kuno yang peninggalannya ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941 di desa Sangiran, lembah Benggawan Solo Jawa Timur. Kemudian disusul oleh *Pithecanthropus Erectus* atau manusia kera yang berjalan tegak, yang peninggalannya ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di desa Trinil, Jawa Timur²⁾. Masa hidupnya diperkirakan pada jaman Pleistosen kira-kira pada tahun 600.000 sebelum Masehi. Sedangkan berakhirnya jaman prasejarah Indonesia sejak adanya keterangan tertulis yaitu adanya Yupa-yupa di Kutai Kalimantan Timur yang bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sansekerta, yang diperkirakan berasal dari tahun 400 Masehi. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, jaman prasejarah pun juga seperti ketentuan di atas, semasa adanya keterangan tertulis tentang sejarah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai kepada kita. Jadi bermulanya juga sejak adanya manusia tertua yang bertempat tinggal di daerah ini; sedang berakhirnya juga sejak adanya keterangan tertulis yang sampai kepada kita.

2.1 Asal-usul Penghuni Yang Pertama

Berdasarkan penelitian peninggalan zaman prasejarah yang berlangsung hingga sekarang ternyata menunjukkan bahwa peninggalan tertua yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah peninggalan berupa pecahan-pecahan keramik atau tembikar yang terdapat di Gunung Wingka, di pantai Samas, yang membentang antara desa Gadingarjo dan desa Tirtaharaga³⁾. Menurut perkiraan para ahli purbakala, antara lain Van Stein Callenfels, pecahan-pecahan tembikar ini berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi, jadi semasa zaman Ratu muda atau jaman Neolitikum. Tempat peninggalannya membentang antara pantai Yogyakarta selatan hingga pantai Pacitan⁴⁾. Seperti halnya dengan zaman Neolitikum Indonesia, pendukung budaya Neolitikum adalah orang-orang yang kemudian lebih dikenal dengan nama orang Indonesia.

Orang-orang ini menurut penyelidikan Von Heine Geldern dan Prof. H. Kern yang berdasarkan pada perbandingan wilayah dan penyelidikan bahasa ternyata berasal dari daerah Yunnan di Cina Selatan. Penyebarannya ke Indonesia melalui dua jurusan. Jurusan barat melalui Indo Cina, Semenanjung, kemudian masuk ke Indonesia, yaitu ke Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan. Sedang yang jurusan timur melalui daratan Asia, ke Jepang, pulau-pulau Taiwan, Filipina, kemudian masuk ke Indonesia melalui Minahasa terus ke timur⁵⁾.

Dengan demikian, maka penghuni pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peninggalan tertuanya dari jaman Neolitikum, adalah orang-orang Austronesia yang kemudian lebih dikenal dengan nama bangsa Indonesia, yang berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Memang banyak kemungkinannya, bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, sebelum didatangi orang-orang Indonesia, telah didiami oleh orang-orang dari jaman sebelum Neolitikum. Percampuran darah di antara mereka tentunya tidak dapat dapat dielakkan lagi, sehingga lahirlah suatu bangsa yang kemudian mendiami wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2 Penyelenggaraan Hidup

Orang-orang Indonesia, sebagai pendukung budaya Neolitikum Indonesia, dengan sendirinya juga menjadi pendukung budaya tembikar, seperti peninggalan yang terdapat di Gunung Wingko pantai Samas Yogyakarta. Orang-orang Indonesia ini telah hidup dalam alam “food producing”, jadi sudah mampu untuk menghasilkan bahan makanan. Teranglah bahwa mereka telah meninggalkan hidup menurut alam “food gathering” atau alam hidup mengembara, seperti pada zaman Neolitikum ataupun zaman Paleolitikum. Dalam fase “food producing” ini mereka telah menetap jadi tidak lagi berpindah-pindah. Perubahan hidup mengembara menjadi hidup menetap ini suatu perubahan hidup yang sangat besar, dan yang menyebabkan pula tumbuhnya berbagai persoalan hidup, sehingga menjadi semakin berkembangnya budaya mereka. Jadi tepatlah apabila dikatakan pada jaman Neolitikum ini terjadi suatu “revolusi kehidupan”, ialah suatu perubahan besar dari cara hidup “food-gathering” menjadi “food-producing”. Meskipun perubahan itu tidak seberapa nampaknya, tetapi sungguh besar artinya apalagi dilihat akibatnya yang sangat mendalam dan luas di dalam kehidupan sosial ekonomi dan budaya. Dalam tingkat hidup menetap ini, akan kita dapati berbagai hal. Mereka kemudian mengenal bercocok tanam, berternak. membuat rumah pembentukan suatu masyarakat yang tentu memerlukan peraturan kerja sama bermasyarakat, telah mengenal berbagai macam kerajinan, misalnya menenun untuk bahan pakaian, pembuatan benda keramik, dan sebagainya. Bahkan menurut keterangan Pemimpin Penelitian dan Penggalan Purbakala Yogyakarta, pada bulan Oktober 1976 yang berhasil menemukan dua kerangka manusia, pecahan gerabah berbagai hiasan, perunggu, besi, manik-manik, tulang binatang dan sebagainya, orang-orang, pada zaman Neolitikum telah dapat membuat pondok-pondok (tempat tinggal mereka), menjinakkan binatang seperti babi, anjing, kerbau dan sebagainya. Karena itu, pada jaman Neolitikum inilah terdapatnya dasar-dasar pertama bangsa Indonesia untuk kehidupan manusia sebagai manusia (sebagai makhluk tertinggi) seperti kita dapati hingga sekarang. Maka tidak salah kiranya apabila dikatakan bahwa bangsa Indonesia telah menemukan corak kepribadian budaya bangsanya, sejak zaman Neolitikum. Apalagi setelah mengalami zaman logam, dalam hal ini

logam perunggu, yang berasal dari pengaruh kebudayaan Dongson di Tonkin, akan semakin nampaklah perkembangan budaya kita. Bagaimana pentingnya penemuan biji logam sebagai bahan mentah ini kiranya dapat kita pahami, sebab pada dewasa ini boleh dikatakan orang tidak dapat hidup tidak dengan logam⁶⁾.

2.2.1 *Pemenuhan keperluan hidup primer*

Telah disebutkan di muka bahwa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini hidup orang-orang Indonesia yang merupakan penghuni tertua. Sudah dengan sendirinya, bahwa mereka ingin mempertahankan dan melangsungkan hidupnya. Untuk melangsungkan hidupnya ini mereka memerlukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini ada yang merupakan kebutuhan utama, dan ada yang hanya merupakan pelengkap, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, agar sempurna hidupnya. Yang termasuk kebutuhan hidup utama ini, menurut masyarakat Jawa terdiri dari : sandang pangan dan papan.

2.2.1.1 Pangan

Berdasarkan peninggalan tertua yang terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penghidupan utama dari orang Indonesia di pantai Samas Yogyakarta, ialah menangkap ikan, baik ikan laut maupun ikan sungai. Sedang alat yang mereka pakai berupa jala, wuwu, seser dan anco. Semua itu mengingatkan kita tentang cara menangkap ikan dari jaman Neolitikum di daerah mana saja. Selain dari hasil menangkap ikan, karena mereka hidup pada jaman Neolitikum, maka berdasar atas peninggalan alat kerja mereka yang berupa berbagai macam kapak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tanggung, ada yang halus dan ada yang kasar, maka jelaskah bahwa mereka telah mengenal bercocok tanam. Jadi mereka telah mengenal berladang, walaupun dalam bentuk yang sederhana, dengan menanam, berbagai macam jenis tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, umbi, dan lain-lainnya yang dapat dimakan. Sehingga dalam masa perkembangan selanjutnya, pada jaman perunggu misalnya, mereka telah mengenal bersawah dengan berbagai macam peralatan, perlengkapan alat kerja, perhitungan musim, penguasaan binatang dan sebagainya, yang semuanya menuju ke arah kesempurnaan hidup bertani. Di samping bersawah mereka hidup pula dari berburu binatang, dan berternak, baik

binatang yang dipergunakan untuk membantu bersawah maupun beternak yang dipersiapkan untuk bahan makan mereka, seperti kambing, ayam, anjing, babi, itik dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya misalnya pada jaman-jaman perunggu, mereka telah mempergunakan binatang-binatang sebagai kendaraan, misalnya kuda, kerbau dan lembu. Ketiga binatang ini juga telah berfungsi sebagai alat pengangkutan.

Cara mereka menikmati hasil penangkapan ikan, hasil perburuan, hasil ladang dan hasil ternak mereka, ada yang secara langsung dimakan, misalnya buah-buahan yang telah masak. Untuk jenis ikan pun mungkin ada pula yang dimakan secara langsung, sebagai disebutkan dengan adanya peninggalan di bukit karang atau jokkenomoddingen tanpa dimasak. Selain itu ada pula yang dimasak baik dengan jalan dibakar di atas api, dengan jalan direbus maupun dengan cara lain. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan yang berupa barang tembikar. Jelas bahwa mereka telah mengenal budaya merebus. Apalagi nantinya, setelah mereka mengenal pembuatan peralatan hidup dari perunggu. Tembikar yang ada pada masa itu, berdasarkan penemuan, cara pembuatannya masih sederhana. Mereka belum mengenal putaran sehingga barang keramiknya belum mengenal bagian alas yang paling datar, tetapi masih melengkung, dari orangnyalah yang berputar dalam membuatnya ⁷⁾. Tembikarnya ada yang polos dan ada yang berhias ⁸⁾. Hiasannya ada yang dengan jalan digores dan ada yang menunjukkan suatu bekas anyaman. Hiasan yang berupa goresan bermotif hiasan garis-garis lurus berjejer-jejer, garis-garis berpotongan disebut hiasan jala, dan sebagainya. Tembikar-tembikar yang berhias ini, kiranya tidak sebagai alat untuk memasak, tetapi untuk menempatkan makanan yang telah dimasak, karena itu dihias, supaya kelihatan menarik dan indah ⁹⁾.

Di dalam zaman kebudayaan perunggu hal ini akan nampak jelas sekali, dan berbagai macam bentuk hiasan pada berbagai macam benda perunggu akan kita jumpai, seperti hiasan geometri hiasan kedok, hiasan binatang, hiasan tumbuhan, baik yang secara naturalis maupun secara disetilir ¹⁰⁾.

Mengingat bahwa setiap makhluk selalu ingin hidup enak, ingin menikmati sesuatu yang enak, maka pada masa itu merekapun pasti telah mengenal bahwa air laut itu asin. Sebab itu masakan mereka

itupun tentu telah diberinya bumbu-bumbu, air laut misalnya atau yang kemudian berupa garam. Demikian pula bumbu-bumbu lain, baik yang berasal dari daun-daunan, maupun dari buah-buahan, misalnya gula, asam, dan juga yang berasal dari umbi-umbian. Memasak dengan cara menggoreng kiranya merupakan perkembangan lebih lanjut dari memasak dengan merebus.

2.2.1.2 Sandang

Berdasarkan adanya peninggalan yang berupa pecahan barang tembikar yang terdapat di Gunung Wingko pantai Samas Yogyakarta, menunjukkan adanya gambar-gambar bekas barang tenunan dan anyaman. Tenunan-tenunan ini jelas dari bahan tenunan yang cukup halus, seperti kain lurik yang ada jaman ini. Dengan demikian maka dapat diperkirakan bahwa penghuni pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang termasuk orang-orang Austronesia atau Indonesia ini, telah mengenal dan mengenakan serta telah mampu membuat bahan pakaian yang berupa barang tenunan.

Dalam perkembangan selanjutnya, daerah Yogyakarta Selatan, Kulon Progo Selatan hingga daerah Kutoarjo, adalah daerah yang terkenal menghasilkan barang tenunan, kain lurik, bahan stagen dan sebagainya. Di daerah Yogyakarta selatan ini terdapat tumbuh-tumbuhan tom (tarum), yang menghasilkan bahan pewarna biru tua, untuk bahan pewarna kain lurik. Dan hingga sekarang masih ada daerah yang menanam pohon tom, untuk bahan pewarna kain batik (wedelan). Pada masa dahulu hampir setiap orang apalagi petani, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, gemar memakai bahan kain yang terbuat dari kain lurik, yang kemudian diberi warna biru tua. Bahkan salah satu peninggalan yang masih ada hingga sekarang ialah baju yang dipakai oleh abdi dalem kraton Yogyakarta (baju dinas kraton yang terbuat dari bahan lurik yang diberi warna biru). Nama pakaian tersebut ialah "*baju pranakan*".

Mengingat lukisan-lukisan yang terdapat pada pecahan benda keramik selalu bercorak geometrik atau ilmu ukur, apalagi hiasan yang terdapat pada benda logam perunggu, maka ada kemungkinan bahwa pada zaman Neolitikum telah dirintis pembuatan kain batik. Bahan kain

adalah kain lurik, motif batik bercorak ilmu ukir seperti pada hiasan keramik, pewarnaan hanya satu jenis ialah biru tua (tom= wedelan).

Alat cantingnya semula sangat sederhana, hanya dari bilah bambu dengan bahan lilin dawon. Tentunya setelah jaman logam perunggu, pembatikan ini juga mengalami perkembangannya, baik bahan kainnya, motifnya maupun proses pembuatannya. Hingga kini daerah Yogyakarta selatan masih terkenal sebagai daerah kerajinan batik, seperti daerah Wanakrama, khusus motif-motif batik bercorak ilmu ukur ¹¹⁾, kemudian Imogiri khusus daerah motif semen ¹²⁾, Sanden khusus motif pohon-pohonan ¹³⁾, Jodog Legi, Mangiran, Srandakan, Sentolo dan sebagainya ¹⁴⁾.

Bahan pakaian tradisional penduduk daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kain lurik dan kain batik. Kain lurik untuk baju orang laki-laki, baju orang perempuan, untuk setagen, dan juga untuk kain orang perempuan serta selendang orang perempuan. Sedangkan kain batik untuk ikat kepala orang laki-laki, kain orang laki-laki, penutup dada (*kemben*) orang perempuan, selendang orang perempuan dan untuk kaain orang perempuan. Pakaian semacam ini masih banyak dipakai oleh orang-orang Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang bertempat tinggal di puncak gunung. maupun di dalam istana (kraton) Yogyakarta.

2.2.2 *Perlindungan terhadap Alam (papan)*

Selain satu cara untuk melindungi diri dari bahaya alam yang berupa panas dan dingin adalah menggunakan pakaian. Kecuali itu "papan"¹⁵⁾ atau tempat tinggal merupakan faktor-faktor penting pula.

Pada zaman Neolitikum penghuni Daerah Istimewa Yogyakarta telah hidup menetap, jadi tidak lagi seperti pada jaman Palaeolitikum yang masih hidup mengembara atau hidup berteduh di gua-gua. Karena menetap, mereka tentu telah mempunyai tempat tinggal yang tetap, yang untuk mudahnya kita sebut *rumah*. Tempat tinggal penghuni pertama Daerah Istimewa Yogyakarta bisa jadi di Gunung Wingko, dekat sungai lebar yang mengalir ke timur paralel dengan pantai Samas. Di daerah Gunung Wingko inilah diketemukannya peninggalan berupa alat-alat tembikar.

Tempat tinggal pada zaman Neolitikum yang terdapat di daerah lain, umumnya berbentuk kerucut, dengan sebuah tiang bekas pohon di tengah-tengahnya, dan dengan dinding dari tanah yang ditinggikan, dengan pintunya terdapat di atas, sehingga memerlukan tangga. Bahannya dari pohon-pohonan dan daun-daunan.

Demikian juga kiranya di daerah tertua Daerah Istimewa Yogyakarta ini, rumah didirikan di atas tanah dengan bahan dari bambu, kayu dan daun-daunan yang banyak dihasilkan di daerah itu. Sedang bentuknya kita tak dapat mengetahuinya. Baru sesudah masuknya pengaruh seni budaya India kita dapatkan gambar bentuk rumah pada relief-relief candi, misal di percandian Loro Jonggrang.

Rumah-rumah itu mengelompok, dan kelompok-kelompok rumah itu kemudian membentuk suatu pedukuhan. Pedukuhan ¹⁷⁾ yang ada, pada mulanya dihuni oleh penghuni-penghuni yang ada ikatan keluarga, sebagian besar dari mereka itu mempunyai kehidupan yang sama. Tetapi setelah mengadakan pedukuhan-pedukuhan baru, dengan jalan membuka hutan misalnya, mereka belum tentu terdiri dari suatu ikatan darah. Tentang nama pedukuhan itu, sebagian besar ada hubungannya dengan nama pohon yang banyak tumbuh di daerah pedukuhan itu, misalnya : Karangnangka, Karangturi, Plasa, Kepuh dan sebagainya.

Perlu kita ketahui, bahwa di samping rumah selalu ada bangunan kandang. Bentuk bangunan kandang ini kemungkinan tak banyak mengalami perubahan, Dapatlah kita perkirakan, bahwa bangunan yang ada pada masa itu, tidak jauh bedanya dengan cara pembuatan dan bentuk bangunan kandang ¹⁶⁾ zaman sekarang yang selalu dengan cara *slorokan, sundukan dan sebagainya*. Apakah bentuk-bentuk pokok rumah Jawa seperti: *panggang pe, gedang selirang, pacul gowang, kampung, limasan, joglo* ¹⁸⁾ dan segala variasi serta komposisinya sudah ada sejak pada zaman prasejarah, kita tak dapat memastikan. Tetapi kalau bangunan rumah dengan kayu ataupun bambu, pasti sudah ada pada masa itu. Mereka telah mempergunakan anyaman bambu untuk bahan dinding, pintu, sekat ruang dan sebagainya, karena pada barang-barang tembikar ¹⁹⁾ peninggalan mereka diketemukan gambar bekas anyaman bambu. Peralatan rumah tangga pada masa itu tentunya juga terbuat dari bahan bambu dan kayu. Bale-bale, kursi, *lincak* ²⁰⁾ (semacam dipan), perlengkapan dapur, semuanya terbuat dari bambu.

Barang-barang anyaman pada masa itu terkenal sekali, ini terbukti pada gambar-gambar yang terdapat di bekas benda-benda keramik. Sedang perlengkapan pertanian seperti : sisir, bajak, tugak dan sebagainya, seluruhnya dibuat dari bahan kayu, belum menggunakan bahan logam. Pada zaman perunggu mereka mulai menggunakan bahan logam perunggu, misalnya untuk : tempat lampu, gelang, nekara, beliung, Candrasa, bajak²¹⁾, ceremin dan sebagainya yang bukti-bukti peninggalannya ada pula yang kita jumpai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berupa candrasa.

Candrasa yang ditemukan di daerah Yogyakarta, dekat pada tangkainya terdapat suatu lukisan yang menarik perhatian, ialah seekor burung terbang memegang sebuah candrasa yang tangkainya pendek. Mungkin sekali gambar ini dianggap sebagai petunjuk bagaimana cara menggunakan candrasa itu.

2.2.3 *Perpindahan*

Penghuni tertua di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil penelitian yang ada, adalah pendukung budaya Neolitikum, yang lokasi kehidupannya di daerah Gunung Wingko di pantai Selatan Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya penghuni daerah itu turut pula mengalami masa perkembangannya, sehingga masyarakat daerah itu ada kemungkinan tidak mengalami masa perpindahan. Seperti diketahui perpindahan suatu masyarakat itu terjadi, karena terjadinya bahaya alam, misalnya peletusan gunung, air bah, tanah longsor, masuknya air laut ke daerah daratan, sehingga terpaksa penduduk daerah itu meninggalkan daerah tinggalnya, dan sering dipaksa pula meninggalkan kehidupan-kehidupan yang lama, untuk pindah ke daerah lain dan dengan cara hidup yang baru. Misalnya dari alam hidup sebagai nelayan ke alam hidup berladang. Hal semacam ini memang sering terjadi. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, bahaya alam yang sering menimbulkan perpindahan adalah letusan Gunung Merapi dan gempa bumi dari dasar laut. Peristiwa besar macam ini pernah terjadi pada jaman kekuasaan Sailendrawangsa dan Sanjayawangsa. Pusat pemerintahan Sanjayawangsa yang sebelumnya berada di Jawa Tengah pindah ke daerah Jawa Timur. Cara mereka berpindah tempat tentunya tidak sendiri-sendiri, melainkan bersama-

sama, seperti "mbedol deso", bahkan binatang-binatangnyapun ikut dibawa serta.

Apabila terjadi peristiwa *mbedol desa*, maka untuk pengangkutan mereka, selain berjalan kaki, juga menggunakan ternak mereka sebagai alat pengangkut, seperti menggunakan *jaran gendeng* serta juga dengan menggunakan kendaraan pengangkut yang lain seperti gerobak. Alat pengangkut gerobak ini biasanya dihela oleh lembu, kuda atau oleh binatang lainnya. Pada zaman perunggu, alat-alat pengangkut untuk keperluan perpindahan sudah jelas telah digunakan²²⁾. Dan kepindahannya selalu dapat diperkirakan yaitu menuju ke suatu yang lebih baik.

2.3 Organisasi Masyarakat

Kelompok masyarakat yang terdiri terkecil atas suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam kehidupannya, maka kelompok masyarakat terkecil ini pun sudah menunjukkan adanya pembagian tugas pekerjaan, yang pada mulanya ditentukan oleh keadaan kodrat alamnya. Kerjasama antara kelompok-kelompok masyarakat terkecil itu mewujudkan suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa keluarga, yang bertempat pada suatu daerah tertentu, serta mempunyai kepentingan bersama. Dalam hal ini pembagian pekerjaan di masyarakat sudah barang tentu tumbuh dengan sendirinya, setelah mereka mengalami kesulitan hidup ataupun setelah menghadapi berbagai macam problema kehidupan. Pada tingkat masyarakat yang lebih besar, maka diperlukan pembagian tugas pekerjaan yang semuanya ditujukan untuk keselamatan seluruh anggota masyarakat baik untuk kebutuhan lahiriyah, seperti keamanan, pencaharian hidup, kesehatan, dan sebagainya, maupun untuk kebutuhan batiniah, seperti berbagai upacara adat misalnya.

2.3.1 Pengaturan masyarakat

Untuk mengatasi segala kesulitan dan problem kehidupan itu, perlulah adanya suatu pengaturan masyarakat. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang daerah tertuanya terdapat di pantai selatan Yogyakarta, maka dapat diperkirakan, berdasar penemuan

peninggalannya, mereka hidup dari hasil laut, hasil sungai, menganyam, berladang dan bertani secara sederhana. Untuk menjaga atau mempertahankan serta untuk melestarikan hidup serta melestarikan budayanya, maka keselamatan dan ketentraman hidup mereka merupakan persoalan pokok. Untuk ini haruslah ada orang yang bertanggung jawab.

Dalam masyarakat primitif orang yang bertanggung jawab disebut cikal-bakal merupakan orang tertinggi dan terhormat. Orang-orang inilah yang diangkat sebagai pemimpin. Untuk dapat dilaksanakan segala yang telah dipercayakan kepadanya, maka diperlukan pembantu-pembantunya. Orang yang tertua bersama para pembantu inilah yang mengatur kehidupan masyarakat.

Untuk mempertanggung jawabkan segala tindakannya, dan juga untuk menampung pendapat umum, maka pada waktu-waktu tertentu diadakan pertemuan bersama. Dalam pertempuran semacam ini dibicarakan juga seluk beluk pertanian, perikanan, perladangan, perumahan, perlengkapan seperti perahu, cangkul, rumah dan sebagainya. Hal ini semuanya akan dapat kita lihat pada hiasan yang terdapat pada barang perunggu, pengaruh dari budaya Dongson, seperti nekara atau nobat, kapak candrasa benjana, gelang, dan sebagainya. Sehingga dapat diperkirakan bahwa dalam perkembangan selanjutnya setiap orang tertua suatu kelompok masyarakat, yang kemudian kita kenal sebagai seorang kepala desa, telah mempunyai pembantu-pembantu yang mempunyai tugas tertentu, misalnya bidang pertanian, perlengkapan perikanan, keamanan, upacara keagamaan, dan sebagainya²³⁾.

2.3.2 *Kepemimpinan*

Kedudukan pemimpin di dalam masyarakat pada zaman Neolitikum hingga jaman kebudayaan logam perunggu, hendaknya kita mulai dan kita lihat dari bawah yaitu mulai dari kedudukan di dalam kesatuan masyarakat yang paling kecil, ialah rumah tangga atau keluarga.

Kewajiban yang utama dari kepala rumah tangga, ialah memimpin upacara agama yang ada di dalam batas-batas rumah tangga, misalnya

memimpin upacara menghormat roh nenek moyang yang merupakan syarat mutlak untuk keselamatan rumah tangga. Apabila hal ini belum dipenuhi, maka lain-lain fungsi rumah tangga sebagai bagian masyarakat dan sebagai kesatuan ekonomi tak dapat berjalan. Dalam hal yang terakhir itu, artinya dalam hubungan masyarakat dan di dalam urusan hak milik dan pemenuhan hidup, seorang kepala rumah tangga mewakili rumah tangganya.

Dari beberapa keluarga terbentuklah masyarakat yang lebih besar. Kewajiban pemimpin masyarakat pada dasarnya sama dengan kepala keluarga, hanya batas kewajiban dan tanggung jawabnya yang luas.

Apabila persekutuan itu merupakan persekutuan teritorial, maka seorang pemimpin akan membutuhkan kepandaian-kepandaian lain yang nyata, misalnya memimpin perang dan sebagainya, tetapi selalu akan kita lihat bahwa ia tetap mempunyai peranan penting di dalam upacara agama. Oleh pengikutnya seorang pemimpin dianggap seorang sakti, artinya ia dianggap mempunyai kekuatan gaib di dalam tubuhnya. Karena itu pengikutnya ia tak mempunyai kekuasaan mutlak, artinya ia harus memperhatikan hasil permusyawaratan dari seluruh anggota persekutuan yang dipimpinnya. Memang persekutuan berdasarkan kekeluargaan atau persekutuan berdasarkan teritorial yang tidak terlampaui luas, pada umumnya bersifat demokratis²⁴⁾.

2.4 Kehidupan seni budaya

Dari peninggalan yang kita jumpai dari jaman Palaeolitikum di Indonesia, belum ada tanda-tanda unsur kesenian. Barulah dari jaman Mesolitikum dengan dijumpainya peninggalan yang berupa gambar babi hutan pada dinding gua Leang-leang di Sulawesi selatan, dan juga hiasan yang berupa goresan-goresan pada pecahan tembikar, di daerah Galumpang Sulawesi tengah, nampak dengan jelas telah adanya unsur seni budaya Indonesia. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, karena peninggalan yang tertua sudah berasal dari jaman Neolitikum, juga dengan adanya pecahan barang tembikar yang telah berhias pula dengan goresan-goresan maka jelaslah bahwa sejak itu pula sudah nampak adanya unsur seni budaya.

2.4.1 Pendidikan

Seseorang demikian juga sesuatu bangsa yang memiliki seni budaya, selalu berhasrat untuk melestarikan seni budaya yang telah dimilikinya itu. Untuk ini mereka harus menyampaikan hasil kebudayaannya itu kepada keturunannya. Itulah yang disebut pendidikan. Pendidikan dalam bentuk yang paling sederhana, diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Cara pendidikan itu kemudian mengalami bentuk perkembangannya, misalnya dengan adanya tukar-pikiran di antara sesama mereka, juga dengan datangnya pengaruh baru yang berasal dari luar.

Seperti kita ketahui pada zaman Neolitikum banyak terdapat bengkel tempat pembuatan alat kerja kapak persegi yang biasa disebut *Atelia Neolith* tempat ini sesungguhnya juga merupakan tempat pendidikan untuk pembuatan kapak persegi dari yang kasar hingga yang halus. Demikian pula dalam pembuatan gelang dari batu indah, yang berasal dari bentuk bulat, dipipihkan dibuat lobang dengan gurdi dari bahan batu juga yang kemudian dihaluskan, sehingga berbentuk gelang dari bahan batu yang sangat halus lagi indah. Jelas sekali bahwa, cara pembuatan benda-benda ini tentu membutuhkan pendidikan yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan harus dijalankan dengan penuh hati-hati.

Kemudian nampak lagi datangnya pengaruh budaya baru dari Dongson, ialah pembuatan alat kerja yang semula dari bahan batu, kemudian dengan menggunakan bahan logam perunggu. Pengenalan bahan baru yang berupa logam perunggu ini, jelas pula merupakan hasil pengembangan pendidikan. Untuk mendapatkan alat kerja yang lebih sempurna guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sudah barang tentu, cara pendidikan tidak dilakukan secara formal klasikal, tetapi secara ikut kerja, sambil mendapat petunjuk dari orang-orang yang lebih tinggi kepandaianya, yang biasanya orang tuanya sendiri. Akibat dari cara pendidikan yang demikian itu, maka pada umumnya anak dari seorang yang memiliki keahlian tertentu, akan menjadi penerus utama dari keahlian yang dimiliki oleh orang tuanya itu. Sehingga sekarang pun masih kita jumpai misalnya, seorang dalang, biasanya juga berasal dari keturunan keluarga dalang (ayah atau neneknya). Hal ini tidak semata-mata karena anak itu, mempunyai bakat dalam seni pedalangan,

tetapi karena ayah atau neneknya yang menjadi dalang telah menyampaikan keahliannya kepada salah seorang keturunannya. Anak yang mewarisi keahlian orang tuanya semacam itu dalam bahasa Jawanya disebut "nunggak semi"²⁵.

2.4.2 Kesenian

Macam hasil seni budaya yang ada sejak zaman Neolitikum hingga pada jaman perunggu pada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi : seni rupa, seni tari dan seni suara. Dalang jaman pra sejarah, hasil kesenian yang berupa seni sastra belum ada. Karena pada masa itu tulisan atau huruf belum dikenal.

2.4.2.1 Seni Rupa

Berdasarkan hasil peninggalan yang ada dari jaman Neolitikum, yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain yang berupa barang keramik dan hiasan yang terdapat pada barang keramik itu, dapat kita ketahui bagaimana keadaan, mutu dan tingkat perkembangan seni rupa pada masa itu. Dari hasil pahatan dan lukisan tersebut, dapat kita ketahui, bahwa mutu seni rupa pada masa itu sudah cukup baik. Mereka sudah mengenal akan lukisan yang berbentuk geometris dan bentuk lain yang beraturan. Apabila kita berdasarkan hasil budaya dari zaman Neolitikum di Indonesia pada umumnya, masih banyak yang dapat kita ketengahkan misalnya gambar babi hutan pada dinding gua Leang-leang, macam-macam hiasan pada barang keramik di Galumpang, juga gambar badak, bermacam bentuk kapak yang indah dan halus, gelang batu dan sebagainya.

Seperti kita ketahui pada peninggalan barang keramik di daerah Gunung Wingko pantai Samas Yogyakarta, banyak terdapat hiasan yang bermotif garis-garis lurus, sejajar, garis-garis berbentuk hiasan duri ialah bersudut meruncing, juga bermotif hiasan jalan, dan sebagainya. Cara membuatnya dengan menggoreskan benda-benda tajam dan runcing pada barangnya sewaktu masih lunak, jadi sebelum dibakar. Pada peninggalan tembikar Galumpang, motif hiasanya lengkap sekali.²⁶⁾ dan bahkan ada yang bermotif kedok atau *masker*. Cara pembuatannya selain dengan cara menggoreskan benda tajam dan runcing, ada pula yang menggunakan kulit kerang (kece) dan juga

dengan menekankan suatu tali sehingga menunjukkan gambar bekas tali. Hiasan yang terbanyak pada benda keramik Gunung Wingko adalah yang berupa bekas anyaman atau tenunan, dari yang kasar hingga yang halus. Anyaman atau tenunan ini coraknya sebagian besar anyaman "nam kepang", baik anyaman tunggal maupun anyaman rangkap. Dan bahan anyaman ini diperkirakan dari gebang, bambu, pandan, mendong, dan bahkan ada kemungkinan dari kain, ini mengingat bekas tenunan yang sangat halus.²⁷⁾

Dari zaman logam perunggu, yang pengaruhnya berasal dari Daerah Dongson di Tonkin, terdapat berbagai macam benda peninggalan, antara lain yang disebut : nekara (atau genderang nobut, moko), kapak corong atau kapak sepatu, cedarasa, dan berbagai macam benda perunggu lainnya, yang peninggalannya banyak terdapat di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Benda-benda ini memiliki hiasan timbul yang bermotif hiasan geometris, hiasan binatang terutama burung, hiasan kedok atau *masker*, bahkan ada hiasan yang berupa *hatah* berbentuk patung kecil dan motif lain-lainnya. Sudah barang tentu hiasan-hiasan ini mempunyai arti tertentu, yang berkaitan erat dengan benda serta penggunanya.

Tentang pembuatan barang perunggu ini, memang mungkin tidak dibuat di Indonesia, jadi di luar Indonesia, ialah di daerah Dong Son di Tonkin. Tetapi di Bali terdapat sisa-sisa pecahan alat untuk pembuatan nekara. Kalau seandainya betul di buat di Indonesia, mungkin bahannya merupakan barang impor. Sedang tehnik pembuatan benda perunggu ini selain menanggungkan tehnik *bivalse*²⁸⁾ juga tehnik "*a'cire perduc*"²⁹⁾ ialah dengan menggunakan cetakan hilang. Bahkan ada kemungkinan bahan dalam pembuatan nekara itu menggunakan tehnik campuran "*bivalse*" dan "*a'cire perduc*". Dari benda-benda perunggu ini, jelaslah bahwa nilai seni budaya yang telah dicapai cukup tinggi, dan dari gambar-gambarnya yang serba simbolis, terang menunjukkan latar belakang yang bersifat unsur kepercayaan.

Baik berdasarkan motif hiasan pada benda keramik atau tembikar, maupun motif hiasan pada benda perunggu, lagi pula adanya pembuatan bahan pakaian dari kulit kayu atau dari tenunan, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dewasa itu telah ada seni batik. Sebab motif seni batik yang termasuk tua, tidak jauh berbeda dengan motif hiasan barang

tembikar dan benda-benda perunggu. Sudah barang tentu bahwa baik macam maupun proses pembuatan masih secara sederhana. Tetapi di dalam jaman-jaman berikutnya, mesti mengalami perkembangannya menuju kesempurnaan.

Macam peninggalan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa: kubur batu yang berisi kerangka yang telah rusak dan juga alat perunggu dan besi serta manik yang diketemukan di daerah Wonosari. Berdasarkan penelitian, peninggalan kubur batu itu termasuk kebudayaan megalit, ialah kebudayaan batu besar, yang berasal dari zaman sebelum zaman perunggu, mungkin sudah sejak jaman Neolitikum. Kebudayaan megalit itu tumbuhnya memang pada jaman Neolitikum, tetapi perkembangannya pada jaman perunggu. Macam peninggalan dari jaman Megalit itu misalnya berupa: menhir,³⁰⁾ dolmen,³¹⁾ sarcofagus, atau keranda,³²⁾ kubur batu, punden³³⁾ dan arca.³⁴⁾ Ujud peninggalan kubur batu yang terdapat di Wonosari itu terdiri atas papan-papan batu yang mengelilingi lubang kubur dengan alas dan tutupnya. Pada umumnya peninggalan kebudayaan megalit itu hanya dikerjakan secara sekedar saja, jadi keadaannya agak kasar.³⁵⁾

Perlu diketahui bahwa hasil kebudayaan Megalitikum itu selalu ada hubungannya dengan keagamaan, ialah yang berkisar kepada pemujaan roh nenek moyang. Misalnya apabila seorang kepala suku yang berjasa meninggal, maka dibuatlah sebuah menhir, sebagai lambang dari jasanya, yang kemudian menjadi lambang dari dirinya. Kenangan dan penghargaan terhadap jasa-jasa tadi beralih menjadi pemujaan terhadap dirinya, yang tetap masih dianggap sebagai pelindung masyarakat.

Untuk rohnya didirikanlah sebuah menhir, dan untuk raganya disediakanlah berbagai macam kuburan, keranda, kubur batu, pandusa atau lainnya. Kecuali jasa yang dibawa ke akhirat maka dalam kuburan itu disertakan kepada si mayat bermacam-macam benda, alat-alat dan perhiasan sebagai bekalnya.

2.4.2.2 Seni Tari

Berdasarkan peninggalan yang kita jumpai dari zaman Neolitikum di Indonesia, kita tidak mendapatkan bukti telah adanya unsur seni tari, baik dalam bentuk gambar maupun benda lainnya. Tetapi di luar Indonesia, banyak kita jumpai gambar yang menunjukkan suatu gerak

tari. Tetapi apabila kita perhatikan gambar babi hutan, yang bercorak naturalitis yang terdapat pada dinding gua Leang-leang di Sulawesi Selatan, dapatlah di perkirakan bahwa gambar-gambar itu dipergunakan untuk upacara penangkapan binatang, yang pada umumnya dilakukan dengan menari-nari. Sudah barang tentu gerak tari yang ada pada masa itu, sangat sederhana, baik gerak tangan, gerak kaki maupun gerak kepalanya yang kemungkinan menggambarkan harapan, gerakan-gerakan orang menangkap atau memanah binatang, serta gerakan kesukaria apabila berhasil menangkap binatang, dan gerakan kekecewaan apabila tidak berhasil menangkap binatang, dan sebagainya.³⁶⁾

Apabila pada jaman logam perunggu, telah kita ketahui alat bunyi-bunyian genderang atau nekara yang dipergunakan untuk berbagai upacara misalnya upacara minta hujan, pemberangkatan pasukan, pemberangkatan jenazah, dan sebagainya, kiranya juga diikuti dengan taria-tarian. Dengan sendirinya tari-tarian yang ada pada masa itupun tentunya disesuaikan dengan tujuannya masing-masing, baik untuk meminta hujan, pemberangkatan jenazah, maju perang, maupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Mengingat untuk upacara yang bersifat massal ini, maka tari-tarian inipun bersifat massal, dan umumnya termasuk tarian magis, yaitu suatu tarian upacara yang ada hubungannya dengan kepercayaan.

Setelah adanya keterangan tertulis pada piagam, kitab kesustraan dan gambar orang menari pada relief di percandian, barulah kita dapatkan suatu bukti nyata tentang seni tari di Indonesia. Sebagaimana pendukung budaya Neolitikum di Sulawesi Selatan yang sudah mengenal tarian, maka dapat kiranya kita simpulkan bahwa pendukung budaya Neolitikum di Daerah Istimewa Yogyakarta kemungkinan besar juga sudah mengenal tarian.

2.4.2.3 Seni suara

Dari peninggalan yang berasal dari jaman Neolitikum, belum kita jumpai benda yang menunjukkan sebagai alat bunyi-bunyian. Apabila yang langsung berasal dari manusianya, sama sekali tidak kita ketahui. Tetapi karena pada zaman Neolitikum itu yang namanya kesenian sudah tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dapat ditarik kesimpulan,

bahwa seni suara pada masa itupun sudah ada dan sudah tumbuh. Tidaklah mungkin apabila orang yang menari waktu akan menangkap binatang, tidak dengan mengeluarkan suara. Sudah barang tentu tari-tarian itu diiringi dengan nada yang bermacam-macam, dan dengan irama yang telah ditentukan pula. Hal semacam ini terus berkembang hingga zaman logam perunggu, terbukti adanya alat bunyi-bunyian yang berupa genderang perunggu, yang dipergunakan untuk upacara pemberangkatan jenazah minta hujan, maju perang dan sebagainya. Walaupun bukti gambar alat bunyian tidak ada, dapat kita kirakan, bahwa pada waktu itu telah banyak pula alat-alat bunyi-bunyian yang terbuat dari bahan bambu, seperti kentongan, suling dari bahan kayu secara dipukul seperti gambang, alat bunyian dari bahan kulit seperti kendang, dan alat bunyi yang lain. Semua itu akan nampak jelas terlihat pada masa pengaruh kebudayaan Hindu, dengan terlukisnya pada relief bangunan candi, seperti pada candi Borobudur, Lara Jonggrang, Kalasan, Sari dan lain-lainnya.

Sedang seni suara yang disuarakan langsung oleh manusia, yang berupa nyanyian, jelas sekali bahwa kita tidak mendapatkan bukti. Tetapi dapat kiranya kita pastikan, mengingat budaya lain yang berkembang dan tumbuh pada jaman Neolitikum, bahwa pada masa itu telah ada pula seni suara yang berupa nyanyian, misalnya sewaktu seorang ibu menimang anaknya, sewaktu seorang ibu menimang anaknya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin hal ini berasal dari zaman yang lebih tua lagi.

2.5 Alam Pikiran dan Kepercayaan

Pikiran manusia selalu ingin mengetahui segala seluk beluk yang ada di dalam alam sekelilingnya. Dan alam pikiran nenek moyang kita di dalam jaman prasejarah masih amat sederhana. Setiap manusia sadar, akan adanya alam dunia yang tak nampak, yang ada di luar batas pancainderanya, diluar batas pikirannya. Bagi manusia yang masih hidup di dalam suatu alam pikiran yang sederhana, sudah barang tentu batas pandangannya lebih sempit. Lebih banyak hal-hal di dalam alam yang gaib baginya. Dunia gaib itu lebih besar baginya. Demikian juga bagi nenek moyang kita di dalam zaman

prasejarah. Bagi mereka dunia yang gaib itu didiami oleh bermacam-macam makhluk dan kekuatan-kekuatan gaib. Kekuatan-kekuatan gaib itu ada dua macam, ialah :

- a. Rokh-rokh yang baik maupun yang jahat.
- b. Kekuatan sakti yang memberi bahagia maupun yang memberi sengsara. Yang dimaksud dengan rokh yang baik ataupun jahat ialah kepercayaan bahwa segala yang ada di dalam alam semesta seperti: batu, binatang, pohon, perempatan jalan, kuburan dan sebagainya memiliki rokh. Rokh-rokh itu dekat hubungannya dengan manusia, tetapi mereka tak kelihatan, karenanya manusia takut kepadanya.

Manusia sering melihat banyak keajaiban dan keanehan. Hal yang luar biasa itu menurut anggapan mereka disebabkan karena adanya sesuatu kekuatan sakti. Di daerah lain ada yang menyebut kekuatan sakti itu dengan "Dema, Sahala, Kere, Mana." "Mana yang berada di dalam tubuh manusia, menyebabkan tubuh itu bertenaga luar biasa. Bangsa-bangsa yang masih hidup dalam alam pikiran sederhana, menganggap kekuatan sakti itu sebagai suatu kekuatan yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Banyak bangsa yang dengan sengaja mencari kekuatan sakti. Pusaka, suatu benda yang sudah lama tinggal ada satu keluarga, dianggap masih amat percaya kepada kekuatan pusaka itu. *Jimat* misalnya, adalah sebuah benda yang dipakai orang pada tubuhnya dengan maksud menambah kekuatannya. Demikian juga kapak persegi dari jaman Neolitikum yang terbuat dari batu indah ataupun kapak corong jaman perunggu, oleh nenek moyang kita, dianggap sebagai benda tempat timbunan kekuatan sakti, sebagai pusaka dan benda upacara.

Demikianlah alam pikiran masyarakat kita pada jaman prasejarah. Bagi masyarakat tua di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak zaman Neolitikum sampai zaman perunggu dan kemungkinan juga pada zaman berikutnya kedudukan Gunung Merapi, Laut Kidul, Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Oyo, pohon beringin, pohon kemuning, makam dari benda pusaka memegang peranan dalam alam pikiran.

2.5.1 *Hidup dan Mati*

Alam pikiran manusia tentang hidup dan maut ini kita khususnya, karena bagian ini memegang peranan penting. Bagi tiap manusia, hidup itu suatu rahasia yang maha besar.

Pada umumnya pikiran sederhana menganggap hidup itu gerak. Manusia bergerak, manusia itu hidup. Binatang itu bergerak, binatang itu hidup. Sungai bergerak sungai itu hidup, matahari bergerak, matahari itu hidup. Sebaliknya hal yang tidak bergerak itu mati. Hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh manusia. Ia mempunyai hasrat akan gerak, hasrat akan hidup. Itulah sebabnya manusia selalu merawat dan memelihara mayat atau tubuh yang mati itu dengan penuh perhatian dan dengan bermacam-macam upacara. Tak ada manusia yang seperti binatang membiarkan mayatnya demikian saja kepada alam. Cara merawat mayat itu pada berbagai-bagai bangsa sudah tentu berbeda. Mengubur adalah salah satu cara merawat mayat yang paling lazim. Demikian juga di Indonesia. Fosil Homo Wajakensis, yang berasal dari zaman Palaeolitikum lapisan atas, juga telah menunjukkan tanda-tanda penguburan. Yang terang ialah, bahwa periuk-periuk berisi tulang-belulang manusia yang terdapat di Melolo (Sumba) dan yang berasal dari jaman Neolitikum, menunjukkan bahwa sejak dahulu kala bangsa Indonesia mengenal adanya penguburan.

Apakah kiranya yang menyebabkan hidup atau gerak yang ajaib itu? Matahari, sungai, gunung, bumi bergerak karena ada kekuatan yang maha kuasa, yaitu dewa-dewa. Apakah yang menyebabkan dirinya sendiri bergerak? Kekuatan yang ada di dalam pusat tubuhnya, yang kemudian disebut jiwa. Oleh manusia, jiwa ini dibayangkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yang membayangkan sebagai orang kecil sekali, sebagai laba-laba, sebagai burung dan sebagainya.

Manusia tidak suka akan maut, manusia takut akan maut. Karena itu manusia berusaha menyangkal maut. Maut ialah, jika jiwa itu telah meninggalkan tubuhnya untuk mencari tempat tinggal yang lain. Tubuh itu akan busuk dan hilang, tetapi jiwa akan hidup terus, sehingga ada anggapan bahwa maut itu tak ada. Jiwa yang telah meninggalkan tubuh, biasanya disebut rokh. Pada berbagai bangsa, tempat tinggal rokh itu ada tiga macam :

1. Ada anggapan bahwa rokh itu pergi ke tempat rokh dan disana hidup langsung bersama-sama rokh lain.
2. Ada pula yang menganggap bahwa rokh itu mencari tempat tinggal baru di dalam tubuh kita.
3. Ada pula yang menganggap bahwa rokh itu tinggal di dalam alam sekeliling tempat tinggal manusia, menempati pohon-pohon besar, batu-batu, gua atau sering juga di dalam kalangan rumah tangga.

2.5.2 *Hubungan Manusia dengan Dunia Gaib*

Manusia menghadapi dunia gaib dengan berbagai perasaan, misalnya percaya, cinta, hormat, takut, ngeri, dan sebagainya. Perasaan itu menjelma di dalam berbagai perbuatan yang ada hubungannya dengan dunia gaib, yang disebut upacara. Upacara-upacara ini selalu terikat oleh: tempat yang khusus, waktu yang tertentu, dan kemampuan orang yang istimewa.

2.5.2.1 Tempat Upacara

Upacara yang biasanya dilakukan di tempat yang terpisah, yaitu tempat yang dibatasi dengan halangan. Tempat ini seolah-olah dikhususkan dan tidak boleh didatangi oleh barang siapa yang tak berkepentingan. Tempat-tempat upacara ini misalnya :

- a. Pusat kekuatan gaib seluruh rumah tangga atau keluarga.
- b. Pusat keluarga pada peristiwa-peristiwa atau perlatan-peralatan keluarga.
- c. Tempat untuk mengundang rokh nenek moyang agar manusia dapat berhubungan dengan mereka itu.

Kubur misalnya juga merupakan suatu tempat upacara. Hal ini mudah dimengerti karena kubur dianggap sebagai tempat orang dapat berhubungan dengan rokh-rokh yang meninggal. Penghormatan kubur nenek moyang adalah suatu adat istiadat yang kita kenal tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia.

2.5.2.2 Waktu Upacara

Waktu yang dipergunakan untuk berhubungan dengan dunia gaib adalah waktu-waktu yang mengandung budaya gaib yang tetap, yang sejajar dengan irama gerak alam semesta. Misalnya pada waktu pergantian siang dan malam, waktu pergantian musim, juga waktu kejadian penting di dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan lain sebagainya.

Waktu-waktu upacara ini penting sekali di dalam kehidupan masyarakat. Lebih-lebih di dalam alam kehidupan masyarakat yang masih sederhana tingkat berfikir dan hidupnya, maka waktu-waktu upacara yang dipakai untuk berhubungan dengan dunia gaib itu dianggap sangat penting, sehingga kadang-kadang dapat menghambat kelancaran kehidupan masyarakat.

2.5.2.3 Orang-orang yang melakukan Upacara

Perebuatan untuk berhubungan dengan dunia gaib, harus dilakukan oleh orang yang ahli. Segala perbuatan upacara harus dilakukan dengan teliti. Kesalahan yang kecil dapat membatalkan maksud dari seluruh upacara, bahkan dapat menimbulkan bahaya. Tiap perbuatan di dalam upacara membutuhkan pengetahuan dan latihan. Orang yang dengan sengaja mendapat didikan untuk pekerjaan itu, disebut pendeta. Kaum pendeta merupakan golongan masyarakat yang terhormat, dan mereka itu karena tugasnya juga menguasai berbagai macam ilmu, misalnya: ilmu pembintangan, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu bahasa, dan sebagainya.

2.5.2.4 Pemimpin Masyarakat sebagai Pelaku Upacara.

Seorang pemimpin masyarakat, atau seorang pemimpin keluarga dan rumah tangga, mempunyai kewajiban penting, yang berhubungan dengan dunia gaib atas nama seluruh golongan yang dipimpinnya. Kepala rumah tangga dan kepala keluarga merupakan orang yang juga mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan dunia gaib adalah dukun sihir. Dukun tidak mempunyai kedudukan sosial yang sederajat dengan pendeta. Namun mereka dihormati juga oleh umum, karena kekuatan dan kepandaian gaibnya. Mereka umumnya juga memiliki pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, karena mereka sering

mempergunakannya untuk membuat obat-obatan. Kecuali itu seorang dukun atau syaman mampu pula mengundang rokh di dalam tubuhnya dengan berbagai cara, antara lain dengan menari. Salah satu upacara keagamaan yang bersifat penyembahan kepada nenek moyang yang dilakukan seorang syaman sebagai pemimpin upacara, ialah berupa wayang, yang mula-mula berbentuk arca batu, kemudian dibuat dari kulit binatang. Diperkirakan bahwa wayang sudah ada di Indonesia sejak prasejarah yaitu sekitar tahun 1500 S.M. Sesuai dengan kepercayaan animisme dan dinamisme dari masyarakat pada waktu itu, wayang merupakan salah satu aspek upacara keagamaan.³⁷⁾

Pada sementara bangsa, dukun umumnya terdiri dari perempuan. Berlawanan dengan jabatan pendeta kepandaian dukun tak dapat dicapai dengan latihan saja, tetapi membutuhkan bakat yang istimewa.

2.5.3 *Upacara-upacara*

Manusia dapat berhubungan dengan dunia gaib dengan dua macam cara :

1. Dengan mengundang rokh-rokh dengan menyediakan "tempat undangan rokh" atau medium" misalnya: patung, syaman dan sebagainya.
2. Datang sendiri ke alam rokh, jadi dengan jalan mendekati rokh, untuk meminta segala yang di butuhkan oleh manusia di dunia.

Manusia menghadapi dunia gaib dengan berbagai perasaan yang dapat kita masukkan dalam dua macam:

Pertama dengan menghormati dan meminta kepada rokh-rokh dengan mendoa, berkorban, bersaji dan upacara tabu, untuk mencapai sesuatu maksud.

Kedua, memaksa dan menguasai rokh-rokh supaya mereka mengabdikan maksud yang hendak dicapai, dengan melakukan perbuatan yang magis. Dalam kenyataannya kedua cara itu sering dilakukan bersama-sama.

Catatan

1. Prasejarah, sering disebut pula : *prachistory*, *nirleken*.
2. Koentjaraningrat, (Drs) : Sejarah Kebudayaan Indonesia, Jilid I, Kebudayaan Prahistory di Indonesia, RI Yogyakarta, 1954 halaman 26.
3. Geonadi Nitihaminoto, (Drs), Pikiran Pembaca, S.R. Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober 1976 Yogyakarta halaman 4.
4. Van der Hoop, Dr. A. Th. Keom (Prof. Dr. N.J.) Kern, R.A. Geschiedenis van Nederlandsch Indie, deel I, Joost van den Vondel Amsterdam, 1938, halaman 34.
5. Soekmono (Drs. R.) Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, Jilid I. Kebudayaan Indonesia jaman prasejarah cetakan ke-3, halaman 49.
6. Idem no.5 halaman 54.
7. Van Stein Callenfels (Dr. P.V.) Pedoman singkat untuk pengumpulan Prasejarah. A.C. Nox & Co Bandung halaman 25.
8. Yang polos atau tidak berhias, disebut "*atype*"
9. Macam hiasannya dapat dilihat pada gambar-gambar No.4
10. Dari kata: *gestyleerd*, yang pengertiannya : diperbahas.

11. Ilmu ukur : istilah daerah setempat : nitik misalnya motif-motif: *jonggrang*, *limaram*, *tirtateja*, *trutum*, *grampol*, dan sebagainya.
12. Semen : dari kata: semian, yang berarti gambar-gambar tunas pohon, seperti motif-motif: *sidamukti*, *sidaasih*, *kaladuh manis*, *sekarini*, dan sebagainya.
13. Pohon-pohon : istilah daerah setempat : *boketan*, dari kata: *bouquette* dengan akhiran an ialah berupa gambar pohon utuh dengan daun, bunga buah, burung atau kupu dengan warna dasar biru tua.
14. Sentolo : nama kota kecamatan di kabupaten Kulon Progo, yang terkenal sebagai daerah produsen anyaman bagor hingga sekarang.
15. Papan, istilah bahasa Jawa Baru, yang berarti tempat, di sini berarti tempat tinggal.
16. Gambar kandang, sebuah rumah kandang yang konstruksinya khusus.
17. Pedukuhan : Perkampungan pertama biasanya disebut *trukon*, barulah kemudian pedukuhan, lalu desa dan barulah kemudian tingkat kelurahan.
18. Bentuk rumah Jawa, ada lima macam bentuk pokok, dan karena variasi serta perbedaan komposisi serta konstruk-sinya, lalu mempunyai nama-nama bentuk (dapur) tersendiri.
19. Motif anyaman yang terkenal, disebut motif *anam ke pang* dan anyaman ini dapat memberikan berbagai macam bentuk hiasan.
20. Lincak : istilah untuk tempat duduk dari bahan bambu, yang mempunyai bentuk tertentu, dapat memuat 3 atau 4 orang. Yang terkenal dibuat dari bahan bambu tutul.
21. a. Nama bentuk beliung dari bahan perunggu yang diperpanjang bagian matanya, serta berhias. Sekiranya tidak merupakan alat kerja, hanyalah sebagai benda perhiasan.
21. b. Soekmono (Drs R.) Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia jilid I Kebudayaan Indonesia Prasejarah, catatan ke 3, halaman 57.

22. Pada nekara, ada yang terdapat gambar binatang kuda dengan orang berdiri di sampingnya, yang menunjukkan pengaruh budaya Cina (Tartar).
23. Lihat Piagam Papringan yang berangka tahun 804 C (882 M), yang berisikan nama-nama pejabat pada berbagai bidang tugas pekerjaan.
24. Seperti pada No. 2 - halaman ; 92.
25. Istilah kata “nunggak semi”, berarti sesuatu yang yang menurun, misalnya: nama anaknya, sama dengan nama ayahnya; pekerjaan anaknya sama dengan pekerjaan ayahnya; keahlian anaknya sama dengan keahlian ayahnya dan sebagainya.
26. Macam hiasannya seperti berikut; hiasan tali, hiasan tangga, hiasan tumpal, hiasan gigi belalang, bulatan bulatan, meander tegak, meander lengkung, motif kawung, seperti ayaman, *masker* (topeng) dan sebagainya, (lihat lampiran gambar).
27. bekas ayaman dan tenunan yang sangat halus ini berdasarkan penglihatan langsung pada pecahan-pecahan tembikar di Gunung Wingko. Hanya bekas tenunan yang sangat halus, apakah betul-betul dari jaman neolitikum dan jaman perunggu akhir tidaklah dipastikan.
28. Teknik *bivalse*, adalah suatu teknik mencetak logam yang menggunakan dua alat cetakan yang dikatubkan seperti kece (kerang). Alat utuh macam ini dapat dipakai terus menerus.
29. Teknik *a cire perdue*, dilakukan dengan teknik dahulu membuat barang yang akan dicetak dari bahan lilin. kemudian barulah membuat alat cetaknya dengan membungkusnya, misalnya dari bahan gips, Setelah dipanaskan lilin meleleh dan keluar, barulah cairan logam dituangkan sampai penuh. Setelah membeku dan menjadi dingin, alat cetaknya dipecah. Alat cetak macam ini hanya dapat dipakai sekali.
30. Menhir, seperti tiang atau tugu, yang didirikan sebagai tandaperingat dan melambangkan nenek moyang sehingga menjadi benda pujaan.



BAB III

ZAMAN KUNA (± ABAD I HINGGA 1500 M)

Yang dimaksud dengan zaman Kuna di sini, ialah zaman Indonesia Hindu. Seperti kita ketahui bangsa Indonesia hingga abad I Masehi, telah memiliki kebudayaan dari zaman Prasejarah, yang merupakan dasar utama budaya bangsa Indonesia. Kebudayaan ini telah menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Kebudayaan yang telah dimiliki ini meliputi berbagai segi kehidupan, antara lain perumahan, mata pencaharian, pakaian, kerajinan tangan, pelayanan, hubungan dengan kekuatan alam yang lebih tinggi, bermacam-macam kepercayaan, berbagai macam upacara, dan lain-lainnya.

Sejak abad pertama, masuklah ke Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta suatu budaya baru dari India, yang mempunyai corak lain pada budaya asli bangsa Indonesia. Budaya yang baru ini berpusat pada kraton, bercorak kerajaan. Sehingga kraton merupakan pusat kebudayaan, karenanya pendukung kebudayaan itu hanyalah pada orang-orang yang berkuasa atau hanya pada lapisan atas, yang sedikit sekali jumlahnya. Saling pengaruh antara budaya bangsa Indonesia asli dengan budaya baru ini mengakibatkan tumbuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak kehidupan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya kerajaan-kerajaan yang timbul di Kutai, Kalimantan, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya

kerajaan-kerajaan itu ada yang mengalami kehancurannya, tetapi ada pula yang mengalami masa kejayaan Majapahit bertahan sampai abad ke 15. Dengan demikian maka zaman kuna yang berlangsung sejak abad pertama hingga abad ke 15 merupakan zaman, sewaktu bangsa Indonesia mendapat pengaruh budaya India.

Daerah tempat pertumbuhan, perkembangan dan masa kejayaan Hindu Indonesia sebagian besar di Jawa, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur serta Bali. Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, hanyalah antara abad ke 8 hingga permulaan abad ke 10. Sebelum dan sesudah masa itu semuanya berlangsung di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.1 Kehidupam Pemerintahan dan Kenegaraan

Dari uraian di atas kita ketahui bahwa tumbuhnya pemerintahan atau kenegaraan di tanah air kita ini, terjadi setelah bangsa Indonesia mendapatkan pengaruh kebudayaan India. Maka sudah barang tentu sifat kehidupan pemerintahan atau kenegaraan di Tanah air kita ini merupakan campuran antara sifat-sifat kehidupan masyarakat asli bangsa Indonesia yang pada dasarnya dapat kita sebut bersifat kegotong-royongan, dan sifat budaya India yang pada dasarnya bersifat kerajaan. Sebab itu dapat kita simpulkan, bahwa sifat kehidupan pemerintahan atau kenegaraan itu demikian :

- a. Kekuasaan dan pemerintahan berpangkal pada kraton.
- b. Seringkali raja memberi hak tanah kepada bangsawan- bangsawan, yang mendirikan kerajaan kecil.
- c. Kraton akhirnya juga merupakan pusat kebudayaan dan kekuasaan Hindu. Para bangsawan mempelajari segala sesuatunya yang bersifat kehidupan, misalnya dalam hal pemerintahan, kesusasteraan, keagamaan dan lain sebagainya.
- d. Desa-desa yang dekat dengan kraton terpengaruh oleh kraton, karena adanya hubungan langsung, misalnya dalam hal pajak, kerja paksa, dan lain-lainnya.

- e. Desa-desa yang jauh letaknya, tak akan merasakan kekuasaan negara-negara Hindu itu.
- f. Rakyat kebanyakan yang besar jumlahnya, hidup di desa-desa dengan segala kesederhanaannya.
- g. Dalam lapisan masyarakat yang banyak ini, terdapat golongan masyarakat, seperti pande mas, tukang perak dan besi, dan berbagai masyarakat tukang lainnya. Pertukangan ini bersifat turun-temurun, sehingga seolah-olah merupakan golongan sosial tersendiri, yang hidup dengan adat istiadat sendiri.

Hal ini semuanya akan dapat kita ketahui pada prasasti-prasasti ataupun pada hasil kesusasteraan yang berasal dari zaman itu. Juga pada peninggalan bangunan yang penuh dengan hiasan, cerita reliefnya serta arca-arcanya yang diletakkan pada peninggalan bangunan itu.

Seperti kita ketahui, dibuatnya suatu prasasti itu, antara lain berkenaan dengan : pemberian tanah menjadi tanah pendidikan, peringatan pendirian suatu bangunan penting dan lain-lainnya. Adapun maksudnya antara lain memberikan persaksian kepada anak cucu, bahwa segala upacara agama sudah dipenuhi, jadi benar-benar sah.

- a) Mantra-mantra untuk menuju dewa.
- b) Keterangan atau sebab-sebabnya sesuatu peristiwa.
- c) Tanggal terjadinya peristiwa itu, yang sering diwujudkan berupa sangkala atau khronogram.
- d) Nama raja, lengkap dengan segala gelar-gelarnya.
- e) Nama-nama pegawai dan pendeta yang ikut berkepentingan.
- f) Nama-nama saksi
- g) Penjelasan tentang terjadinya peristiwa itu.
- h) Upacara yang dilakukan berkenaan dengan terjadinya peristiwa itu dan lain sebagainya.

Maka dengan prasasti-prasasti itu orang akan dapat mengetahui kegunaannya, antara lain :

- a) Orang dapat mengetahui tahun atau lamanya masa pemerintahan.
- b) Dapat mengetahui nama dan gelar raja yang berkuasa semasa itu.
- c) Dapat mengetahui pekerjaan pegawai dan hubungannya yang satu dengan yang lain.

- d) Dapat mengetahui susunan dan administrasi pemerintahan .
- e) Dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah.

Baiklah diketahui bahwa keterangan yang bersumber dari prasasti ini, merupakan keterangan yang paling dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan akan nilai kebenarannya, dibandingkan dengan keterangan-keterangan yang lain.

Sedang tentang kehidupan pemerintahan dan ketatanegaraan dapat pula kita ketahui dari hasil kesusasteraan yang ada pada waktu itu. Perlu pula diketahui bahwa semacam kesusasteraannya pun pasti tidak terlepas dari skema susunan masyarakat pada waktu itu ialah :

- a) Yang termasuk kesusasteraan kraton biasanya berbentuk kakawin, dan menggunakan kata-kata sukar, sehingga hanya lapisan cendekiawan yang mampu mengetahui isinya.
- b) Yang termasuk kesusasteraan rakyat, ialah kesusteraa yang bersifat primitif atau sederhana, yang menggunakan bentuk prosa dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ini banyak diketahui isinya oleh masyarakat lapisan bawah, yang besar sekali jumlahnya.
- c) Yang termasuk kesusasteraan terpencil atau kesusasteraan mandala, ialah yang bersifat keagamaan, suatu kesusteraan yang berunsurkan kepercayaan daerah-daerah setempat.

Untuk dapat mengenal tentang kehidupan pemerintahan dan kenegaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa-masa itu, terutama pada abad ke 8 sampai abad ke 10 permulaan, maka prasasti hasil kesusasteraan serta peninggalan bangunan yang khusus terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah penting artinya. Tentu dapat pula ditambah dengan keterangan yang berasal dari luar.

3.1.1 *Pertumbuhan negara.*

3.1.1.1 Sanjayawangsa

Kekuasan Sanjayawangsa di Jawa Tengah mula-mula kita ketahui dengan adanya prasasti Canggal yang ditemukan dekat candi Cangkal di gunung Wukir, daerah Muntilan. Prasasti ini memuat angka tahun yang

berbentuk kata-kata, yaitu Khronogram atau candrasangkala, yang berbunyi : *Crutendriyarasa*, atau angka tahun 654 saka atau tahun 732 Masehi.

Prasasti Canggal memakai huruf Pallawa, berbahasa Sansekerta, yang berisi tentang :

- a) Pemujaan terhadap dewa-dewa Trimurti (Siwa, Brahma, Wisnu). Dewa Siwa mendapatkan tempat yang diutamakan.
- b) Pujian terhadap kesuburan Tanah Jawa.
- c) Keterangan tentang didirikannya sebuah lingga di Sthirangadesa, sebagai tempat pemujaan.
- d) Keterangan peristiwa sejarah bahwa :
Mula-mula yang memerintah bernama Sanna: beliau memerintah dengan adilnya. Kemudian kerajaan ini mengalami kerusakan. Kemudian beliau digantikan oleh Sri Sanjaya, putra Sannaha, dan Sannaha adalah saudara perempuan Sanna. Raja Sanjaya ini memerintahkan dengan segala kemasyhurannya.

Berita kemasyuran raja Sanjaya ini terdapat pula dalam kitab Parahyangan. Diperkirakan karena daerah tempat kekuasaan raja Sanjaya ini di Kunjarakunjadega, atau daerah hutan gajah, atau daerah atas liman, maka kemungkinan di daerah Salaman atau Sleman itulah daerah tempat menetapnya kekuasaan raja Sanjaya.

Candi Cangkal, yang terletak di puncak gunung Wukir, itulah bangunan yang didirikan oleh beliau, sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa Mahadewa yang diwujudkan berupa sebuah lingga-Yoni, untuk memperingati berdirinya kerajaan Mataram.

Kekuasaan keluarga Sanjaya ini berlangsung hingga permulaan abad ke 10, dan nama-nama raja penggantinya selain dari prasasti yang masing-masing dibuat oleh raja-raja yang menggantikan terutama dari prasasti raja Balitung yang berangka tahun 829 Saka atau 907 Masehi di Kedu. Dari prasasti ini kita dapatkan deretan nama-nama keluarga Sanjaya hingga raja Balitung yaitu :

- a) Rakai Mataram sang ratu Sanjaya 732 -- $\pm$ 780
- b) Sri Maharaja rangkai Panangkaran 778 -- $\pm$ 780
- c) Sri Maharaja Rakai Panunggalan $\pm$ 780 -- $\pm$ 800
- d) Sri Maharaja Rakai Wuruk $\pm$ 800 -- $\pm$ 819
- e) Sri Maharaja Rakai Garung $\pm$ 819 -- $\pm$ 838
- f) Sri Maharaja Rakai Pikatan $\pm$ 838 -- $\pm$ 851
- g) Sri Maharaja Rakai Kayuwangi $\pm$ 851 -- $\pm$ 882 ¹⁾
- h) Sri Maharaja Rakai Watuhumalang $\pm$ 886 -- $\pm$ 900

Rakai Watuhumalang ini nantinya digantikan oleh Raja Balitung yang namanya terdapat juga pada piagam Kedu yang berangka tahun 907 M itu.

Sedang nama-nama raja yang menggantikan raja Balitung selanjutnya ialah :

- a) Raja Daksa (910-919 M)
- b) Raja Tulodong (919-921 M)
- c) Raja Wawa (921-929 M)

Setelah raja Wawa, berita tentang kekuasaan Sanjayawangsa di Jawa Tengah tidak lagi kita dapati, karena sejak itu Mpu Sindok, yang semula juga keluarga raja Wawa, dengan nama: Rakryan Mapatih i hino mpu Sri Isnawikrama, kemudian memindahkan kerajaan ke Jawa Timur. Dan untuk seterusnya sejak dipindahkannya ke Jawa Timur, mulai $\pm$ tahun 929 M hingga akhir abad ke-15, selalu berpusat di Jawa Timur, oleh karena berita tentang keadaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya sampai pada masa pemerintahan Wawa di Jawa Tengah $\pm$ th. 929 M.

3.1.1.2 Sailendrawangsa.

Seperti kita ketahui, yang berkuasa di Jawa Tengah pada abad kedelapan hingga abad ke-9, selain keluarga Sanjaya, juga keluarga Sailendra. Menurut penelitian J.G. de Casparis, dapatlah diketahui bahwa nama-nama raja keluarga Sailendra yang berkuasa di Jawa Tengah, urutannya sebagai berikut:

- a) Bhani (752 M)
- b) Wisnu (Daharmatunggu) ($\pm$ 775 -- $\pm$ 782)
- c) Indra (Sanggramadhananjaya) ($\pm$ 782 -- $\pm$ 824)

- d) Samaratunga ($\pm 824 -- \pm 832$)
- e) Pramodawardhani (± 842)
- f) Balaputradewa (± 856)

Berita tentang keluarga Sanjaya dapat kita ketahui dari prasasti Canggal. Keluarga Sanjaya menganut agama Hindu dengan dewa Siwa sebagai dewa tertinggi. Keluarga Sailendra dapat kita ketahui dari prasasti Kalasan yang berangka tahun 700 Saka atau 778 M, menggunakan huruf pranagari, dan bahasa Sansekerta. Agama yang dianutnya adalah agama Budha Mahayana. Prasasti ini tidak menyebutkan nama raja keluarga Sailendara, tetapi nama raja keluarga Sanjaya, ialah Panangkaran. Karenanya, maka ada yang berpendapat bahwa raja Panangkara adalah sama dengan Wisnu (Dharmatunga),⁴⁾ Dan apabila Panangkara memang benar-benar keluarga raja Sanjaya, maka dapatlah diketahui, bahwa keluarga raja-raja ini bekerja bersama-sama, mendirikan sesuatu bangunan suci atau menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan agama.

3.1.2.3 Hubungan Sanjayadewa dengan Sailendrawangsa.

Pada mulanya sekitar pertengahan abad ke 8, nampak sekali bahwa yang berkuasa lebih dahulu adalah keluarga Sanjaya. Tetapi setelah tumbuhnya kekuasaan Sailendrawangsa di Jawa Tengah, tampak adanya perubahan politik, keluarga raja-raja Sanjaya harus tunduk dan mengundurkan diri ke daerah yang mudah untuk dipertahankan terhadap keluarga raja-raja Sailendra yang datang dari luar Jawa dan kemudian berkuasa di Jawa Tengah.⁵⁾

Pusat pemerintahannya dapatlah diperkirakan di sekitar Prambanan Kalasan.⁶⁾ Hubungan antara kedua wangsa itu tetap baik, ini dapat dibuktikan baik pada prasasti Kalasan yang berangka tahun 778 M, bahwa seorang raja keluarga Sailendra meminta bantuan beberapa tenaga pekerja kepada raja Panangkaran dari keluarga raja Sanjaya. Demikian pula pada prasasti Karangtengah yang berangka tahun 824 M⁷⁾

Tetapi kemudian semasa pemerintahan raja Garung nampaknya keluarga Sanjaya dapat mengimbangi kekuasaan keluarga Sailendra, bahkan akhirnya keluarga Sailendra nampak mengalami kemundurannya. Bukti nyata akan hal ini terlihat pada prasasti yang

terdapat di Plaosan, yang disamping menyebut nama Sri Kahulunan yang juga terkenal dengan nama Pramodhawardhani, juga menyebut Sri Maharaja Rakai Pikatan. Berdasarkan atas bukti ini dapat ditentukan, bahwa untuk menghindarkan kehancuran keluarga Sailendra, Pramodhawardhani kawin dengan Rakai Pikatan yang kemudian menjadi raja keluarga Sanjaya yang sangat besar kekuasaannya. Untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya, Rakai Pikatan harus merebut sisa-sisa kerajaan Sailendra di Jawa Tengah, dibuktikan dengan perangnya yang dasyat melawan Balaputera-dewa,⁸⁾ yang diperkirakan adik Pramodha-wardhani. Akhirnya Balaputera-dewa meninggalkan Jawa Tengah dan kemudian dengan cara yang tidak diketahui, berkuasa di Suwarnabhumi, ialah Sumatra. Mulai dengan Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, pengganti Rakai Pikatan, yang kemudian digantikan oleh Rakai Watuhumalang, adalah keturunan keluarga raja-raja Sanjaya Sailendra.

Pada permulaan abad ke 10, muncullah nama Rakai Watukara Dyah Balitung, berasal dari daerah Jawa Timur, yang kemudian menggantikan Rakai Watuhumalang dan berkuasa baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Menurut pengakuannya, yang kita ketahui dari prasasti Kedu, beliau adalah keturunan keluarga Sanjaya. Bagaimana jalan yang ditempuhnya sehingga dapat menggantikan Rakai Watuhumalang, mungkin karena memperisteri putra Rakai Watuhumalang.⁹⁾

Raja Balitung dianggap sebagai salah seorang raja yang besar, terutama karena ialah raja yang pertama-tama berhasil menyatukan daerah yang luas. Setelah Balitung wafat maka kerajaannya masih dapat dipertahankan beberapa waktu. Kira-kira duapuluh tahun kemudian para raja-raja membatasi kekuasaannya, dan mereka hanya memerintahkan Jawa Timur.

3.1.2.4 Berakhirnya Kerajaan di Jawa Tengah

Penggantian raja Balitung adalah raja Daksa, yang memerintahkan sejak tahun 910--919. Sejak pemerintahan raja Balitung nama Daksa telah kita ketahui dari piagam-piagam semasa raja Balitung. Salah satu tindakan raja Daksa yang perlu kita ingat ialah, bahwa ia mulai menggunakan tarikh baru, yaitu Tarikh Sanjaya, ialah tarikh yang

dimulai sejak raja Sanjaya mulai memerintah, tahun 732 M. Tindakan ini dapat kita anggap sebagai tindakan yang berdasarkan rasa kebangsaan. Ia tidak lagi menggunakan tarikh Saka, yang berasal dari luar. Tetapi dapat juga tindakan Daksa ini dimaksudkan untuk kepentingan dinastinya, seperti halnya raja Balitung, untuk menegaskan keepada dunia luar bahwa ia keturunan raja Sanjaya, maka dituliskanlah daftar nama raja-raja Sanjaya sampai kepada raja Balitung sendiri. Raja Daksa ini, sering pula dihubungkan dengan sebuah percandian di daerah Prambanan yang sangat besar ialah pencandian Lara Jonggrang. Hanya akhir-akhir ini, diperkirakan bahwa percandian tidak berasal dari permulaan abad ke-10, melainkan dari permulaan abad ke-9.¹⁰⁾ semasa raja Pikatan.

Pengganti raja Daksa adalah raja Tulodong yang memerintah dari tahun 919 hingga tahun 921, selama tiga tahun, dan tak banyak hal yang penting semasa pemerintahannya. Raja berikutnya bernama Wawa, yang memerintah sejak tahun 921 hingga tahun 929, dan rupa-rupanya juga masih memerintah baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Hanya piagam-piagam yang dikemukakan selalu menunjukkan berasal dari Jawa Timur. Dengan demikian kiranya kedudukan Jawa Tengah sudah sangat berkurang artinya.

3.1.2.5 Kepindahan Pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.

Sesudah berakhirnya pemerintahan raja Wawa, tahun 929 raja Sindok yang menggantikannya hanya memerintah Jawa Timur. Dengan demikian pada masa pemerintahan raja Sindok pusat kerajaan Mataram telah berada di Jawa Timur. Mengapa pusat kerajaan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur. Karenanya, maka peristiwa kepindahannya, orang tak dapat mengetahui dengan pasti. Karena itu timbullah beberapa hipotesa. Ada yang mengatakan karena bahaya atau bencana alam, seperti gunung berapi, banjir besar dan sebagainya, yang mengakibatkan pemerintahan perlu dipindahkan ke Jawa Timur. Yang lain mengatakan bahwa keturunan Balaputradewa yang menetap di Suwarnabhumi, menginginkan pula untuk menguasai kembali daerah Jawa Tengah yang subur itu. Untuk mengamankan diri dari ancaman politik ini, maka raja Sindok lalu memerintahkan untuk pindah ke Jawa Timur. Ada pula yang berpendapat bahwa kepindahan itu sudah semestinya dijalankan karena sejak raja Wawa kedudukan Jawa Tengah

sudah tidak begitu berarti lagi, sehingga kepindahannya ke Jawa Timur oleh Raja Sindok ini telah dilakukan dengan penuh perhitungan berdasar pengalaman semasa mengu-asai daerah Jawa Timur. Jadi tidak berjalan secara mendadak atau tergesa-gesa. Dan kenyatannya memang demikian. Setelah berpindah ke Jawa Timur kedudukannya semakin kuat. Kekuasaannya tidak lagi hanya Jawa, tetapi meliputi seluruh Nusantara, bahkan masuk dalam percaturan internasional. Demikian pula dalam kesusasteraan, seni bangunan pelayaran, pemerintahan, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke Jawa Timur bukan suatu tindakan yang tergesa-gesa atau sekonyong-konyong untuk menghindarkan diri dari bencana alam ataupun serangan dari luar, bahkan sebaliknya; pemindahan ibu kota itu nampak pada kita sebagai suatu tindakan yang telah masuk dipertimbangkan dan kemudian mempengaruhi akibat yang luas.¹¹⁾

Dengan dipindahkannya pusat pemerintahan ke Jawa Timur, maka Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mungkin pada waktu itu merupakan daerah pusat pemerintahan Sanjayawangsa dan Sanjayawangsa di sekitar abad ke 9 dan permulaan ke-10, akhirnya menjadi daerah yang sepi, dan tidak lagi menjadi perhatian orang.

Peninggalan-peninggalan yang terdapat di daerah ini makin lama semakin terlantar dan rusak. Untuk waktu yang tidak kurang dari lima abad daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak masuk dalam percaturan sejarah Jawa (Indonesia). Jawa Timur berganti memegang peranan penting, yang lebih besar, lebih agung dan lebih berwibawa dari pada semasa di daerah Jawa Tengah.

Barulah nanti pada permulaan abad ke-17, setelah terjadinya pemerintahan baru yang bercorak agama Islam Daerah Istimewa Yogyakarta akan tampil lagi dengan nama kerajaan Mataram Islam, yang berpusat di Kotagede, Yogyakarta dengan nama pimpinan tertingginya Panembahan Senopati.

3.1.2 Kepemimpinan

Pada pemerintahan keluarga Sanjaya maupun keluarga Sailendra, di Jawa Tengah, dapat kita ketahui dari piagam-piagam antara lain

tentang: nama, sebutan dan gelar, bahkan sikap seorang raja atau pembesar terhadap hamba sahayanya. Apabila pada jaman Majapahit, maka hal ini akan dapat banyak kita ketahui dari kitab Nagarakertagama dalam kitab ini diuraikan satu persatu secara terperinci.

3.1.3.1 Nama sebutan dan gelar

Raja Sanjaya, sebagai pendiri dinasti Sanjaya, dalam prasasti Kedu yang dibuat oleh Raja Balitung, disebut : Rakai Mataram sang ratu Sanjaya, ialah pembesar di Mataram sang raja Sanjaya. Mataram adalah nama daerah sedang nama raja sendiri adalah Sanjaya. Raja-raja yang menggantikannya tidak memakai sebutan ratu, melainkan Sri Maharaja, barulah pembesar di daerahnya, seperti :

- Sri Maharaja Rakai Panangkaran
- Sri Maharaja Rakai Panunggalan dan sebagainya sampai pada:
- Sri Maharaja Rakai Watu Huradyah Dhamodaya Mahacambau; yang pada permulaan piagamnya disebut :
- Sri Maharaja Rakai Watu Hura dyah Balitung Sri Dharmodaya Manasambhu, kata : Sridhammodaya mahasambhu ini adalah gelar.

Setelah raja, maka pembesar-pembesar negara berikutnya disebut Rakyen Mahamatri Katrini, ialah : Rakyen Mahamatri I Hino, Rakyen Mahamantri I Halu, Rakyen Mahamantri I Sinkan. Yang memakai sebutan Rakyen Mahamatri I Hino, adalah orang nomor dua yang berarti apabila raja yang berkuasa berhalangan maka orang nomor dua itulah yang berhak menggantikannya.

Anehnya, pada waktu pemerintahan Raja Wawa Mpu Sindok memakai sebutan : Rakyen Mahamatri I Hino. Tetapi sampai beliau menjadi raja sebutan beliau adalah : *Sri Maharaja Rake Mpu Sindok Sri Iacanawijaya Dharmotunggadewa*, barulah disusul oleh *Rakyen Mahamatri I Halu* dan seterusnya.¹²⁾ Selanjutnya, pejabat : *Rakyat Mahamantri I Hino*, pernah juga seorang putri, ialah semasa raja Airlangga yang berbunyi : *I nyika diwasanyajua sri maharaja rakai halu sri lokoswara dharmangsa airlangga nanta wikramotunggadewa, tinadah de rakyen mahamantri hino sri sanggramawijaya dharmaprasadottunga dewi*.¹³⁾

Ketiga Rakyan Mahamantri ini, nampaknya merupakan tangan kanan raja yang menentukan gerak langkah negara di masa itu dan terdiri dari keluarga raja sendiri. Sedang pelaksana pemerintahannya ada di tangan orang-orang yang memakai sebutan: Rakyan, yang menjabat tugas tertentu bidang pemerintahan, seperti istilah menteri-menteri sekarang. Pimpinan menteri atau ketua Rakyan dijabat oleh seorang Rakyan Mapatih yang dapat kita samakan dengan perdana menteri. Kemudian Rakyan Mapatih dibantu oleh *Rakyan Demang*, *Rakyan Kamurukan*, *Rakyan Rangga*, dan pembesar-pembesar lain berdasar jabatan-jabatannya. Susunan pemerintahan ini juga menurun sampai pada tingkatan pemerintahan, desa yang dipimpin oleh Rama Desa. Rama Desa dibantu oleh pejabat-pejabat menurut tugasnya masing-masing seperti: *Tuha-alas*, *Tuha waton*, *Hulu air*, *Mapekan*, dan lain-lainnya. Urusan keagamaan mendapat perhatian khusus dari raja. Pada jaman Majapahit, urusan keagamaan dipegang oleh seorang *Dharmadhyaksa*.

3.1.3.2 Sikap pimpinan pemerintahan

Untuk menunjukkan bagaimana sikap seorang pimpinan pemerintahan di jaman kekuasaan Sanjayawangsa terhadap kesejahteraan rakyatnya, dapatlah kita baca pada suatu piagam yang isinya sebagai berikut. Sebuah desa mengemukakan keberatannya tentang pajak yang harus mereka bayar untuk sawah gaga-gaga, tegalan-tegalan dan sebagainya, kepada patih Daksa. Beberapa pegawai disertai kewajibannya untuk menyelidiki hal ini, hal ini diselidiki lebih lanjut, karena pajak tanah ini tidak hanya tergantung kepada luas tanah, melainkan juga letaknya, kesuburannya, pengairannya dan hal-hal lainnya.

Karena itulah maka ada pegawai yang khusus disertai untuk memeriksa hal-hal semacam itu. Tanahnya mula-mula harus diukur lagi dan kemudian diperiksa lagi bagaimana kualitas dan pengairannya. Sesudah itu maka tanah-tanah itu dibagi atas kelas-kelas. Sebagian dari semua tanah yang diusahakan orang itu tak termasuk pada tanah yang dibagi atas kelas-kelas, karena kualitasnya sangat rendah. (tidak subur, tidak mendapat air, atau karena hal-hal lain). Dengan demikian maka jumlah tanah seluruhnya yang diusahakan orang itu menurut catatan pendaftaran jadi jauh lebih kecil daripada dugaan semula.¹⁴⁾

Nyatalah bahwa selalu diusahakan adanya hubungan yang sehat antara pemerintah, dengan semua yang ada di bawah pemerintahannya, dengan desa-desa, dan sebagainya. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menarik pajak, untuk memperkaya kraton. Kewajiban pemerintah terutama ialah memperhatikan kepentingan rakyat seperti berusaha menaikkan tingkat kemakmurannya. Hal semacam ini telah berlaku pada masa pemerintahan raja Balitung di Jawa Tengah dan Jawa Timur antara tahun 900--910, 10 abad yang lampau.

Apabila didasarkan pada hasil kesusasteraan yang ditulis pada jaman Sanjayawangsa ialah dari kitab Ramayana kakawin, ataupun juga didasarkan relief cerita Ramayana pada percandian Lara Jonggrang, maka terdapatlah suatu ajaran tentang sikap seorang raja yang memimpin suatu pemerintahan ialah ajaran yang diberikan oleh Rama kepada Bharata, yang akan menjadi raja di Ayodyapala, dan ajaran Rama kepada Wibhishana yang akan menggantikan Rawana sebagai raja di Alengka. Ajaran itu disebut Astabrata¹⁵⁾ ialah tindakan delapan dewa mata angin, yang harus diikuti oleh seorang raja. Kedelapan dewa mata angin itu ialah, Indra, Yama, Surya, Suci, Bayu, Kuwera, Baruna, dan Agni. Dewi Indra, yang menempati arah mata angin sebelah timur, sebagai dewa hujan yang bila memberi air hujan selalu merata, demikian juga seorang raja, apabila memberi rezeki kepada hambanya harus merata, tidak pilih kasih. Misalnya lagi Dewa Surya, sebagai Dewa Matahari. Pagi hari di sebelah timur dan kelihatannya tidak bergerak tetapi nyatanya bila telah sore hari selalu sudah sampai di sebelah barat. Pagi terbit dan sore terbenam, ini tidak pernah diingkari, selalu tepat pada waktunya. Demikian juga raja harus pula berpedoman tindakan Dewa Surya, selalu bertindak tepat pada waktunya, tidak pernah mengingkari janji, dan bekerja tidak usah mengatakan kalau bekerja. Yang penting adalah buktinya. Demikian juga mengenai tindakan dewa-dewa yang lain, yang hendaknya dapat ditiru oleh seorang raja yang memegang suatu pemerintahan.

3.1.3 *Pengaturan Pemerintahan*

Dari periode Sanjayawangsa dan Sailenderawangsa ini, pemerintahan Sanjayawangsa mempunyai peranan yang besar terutama sekali pada zaman pemerintahan Raja Kayuwangi dan Balitung.

3.1.4.1 Macam Peraturan

Prasasti-prasasti masa pemerintahan Rakai Kayuwangi hanya diketemukan di Jawa Tengah, terutama di daerah Prambanan, dan Kedu. Dari prasasti-prasasti tersebut dapat kita ketahui selain nama raja yang memerintah pada masa itu juga masa pemerintahannya serta cara memerintah, para pegawai-pegawainya, peraturan-peraturan dan perundang-perundangan, misalnya; hak sesuatu desa terhadap desa yang lain, hak sesuatu desa terhadap pemilik tanah desa itu terhadap raja, tentang perhubungan kaum agama, tentang peraturan uang logam, tentang berbagai upacara, tentang hukum adat, tentang adat-istiadat, tentang hal-hal yang mengenai perdagangan, dan lain sebagainya.¹⁶⁾

3.1.4.2 Urusan Pemerintahan Pusat

Dari prasasti-prasasti itu pula akan dapat kita ketahui tentang hubungan desa dengan Pemerintahan Pusat. Ternyata bahwa desa-desa itu mempunyai kebebasan yang cukup luas. Pemerintahan Pusat hanya mengurus keadaan negara yang sebenarnya. Seperti jalan besar, terusan, pekerjaan irigasi yang besar, misalnya bendungan besar, pemeliharaan candi-candi kerajaan dan kraton juga termasuk kewajibannya Pemerintahan Pusat.¹⁷⁾

3.1.4.3 Desa Perdikan

Pada masa pemerintahan Raja Kayuwangi, banyak desa yang mendapat status perdikan. Desa perdikan. Desa perdikan adalah suatu desa yang "bebas" dari kewajiban membayar pajak kepada raja dan para pegawainya, tidak perlu mengerjakan kerja paksa untuk memperbaiki jalan-jalan ataupun jembatan-jembatan atau untuk bekerja di kraton. Desa semacam itu hingga batas tertentu diperkenankan menjalankan pengadilan sendiri, dan sebagainya.

Hal-hal istimewa itu ditentukan dengan piagam raja yang mengatur segala sesuatu hingga garis-garis yang sekecil-kecilnya.¹⁸⁾

3.1.4.4 Penarik Pajak

Tentang pengumpulan pajak pada masa itu dapat dituturkan sebagai berikut : Ada sejumlah besar golongan pegawai pajak, yang atas pemerintahan raja mengunjungi desa-desa, untuk mengumpulkan pajak tertentu. Hal ini rupanya diselenggarakan dengan penggadaian. Raja

menguasakan kepada beberapa orang untuk mengumpulkan pajak-pajak yang tertentu. Pajak-pajak itu meliputi pajak pengangkutan beras atau hasil bumi lainnya, pajak penangkapan ikan, pemburuan binatang, pajak tanah, dan lai sebagainya. Penarik pajak harus menyerahkan jumlah yang tertentu kepada raja, sedangkan sisa penarikannya adaka untuk si penarik pajak. Pajak yang diterima oleh raja dipergunakan untuk kepentingan rakyat, misalnya untuk perbaikan jalan, jembatan, bendungan, dan sebagainya.¹⁹⁾

3.1.4.5 Kedudukan wanita

Tentang kedudukan wanita dalam hukum, dapat kita temui dari isi prasasti pada jaman. Raja Balitung yang pada pokoknya demikian: Seorang laki-laki bernama Dharma meminjamkan uang kepada seorang perempuan, Tiba-tiba perempuan ini meninggal, sehingga Dharma datang kepada suami perempuan itu untuk menangis. Sang suami tak mau membayar kembali hutang itu Dharma minta pertolongan kepada pihak yang lebih tinggi. Hal ini dijadikan perkara, dan hadir suatu dewan yang terdiri atas para hakim, juga hdir banyak orang sebagai saksi, supaya putusan dapat diambil secara obyektif. Para hakim tak meluluskan permintaan Dharma. Seorang suami tak dianggap bertanggung jawab terhadap hutang yang dibuat oleh istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan kaum wanita, dilihat dari sudut hukum adalah sangat baik.²⁰⁾

3.1.4.6 Macam Pajak

Pada jaman Raja Balitung pembayaran pajak sudah lebih terperinci. Pajak tidaklah seluruhnya dipikul oleh penduduk desa. Ada pajak perusahaan, pajak pengangkutan khusus darat dan khusus air, pajak tontonan, dan sebagainya. Misalnya para pandai besi dibebani pajak, yang besarnya tergantung pada besarnya perusahaan, dihitung menurut banyaknya alat peniup api.

Jika seorang mengangkut itik, maka sejumlah itik tertentu besar dari pajak. Jika itik yang diangkut melebihi batas yang ditentukan, maka kelebihanannya itu yang dikenakan pajak. Dengan demikian maka orang desa biasa, bukan pedagang, bebas dari pembayaran pajak, karena umumnya mereka umumnya mereka hanya membawa beberapa ekor.²¹⁾

3.1.4 Hubungan Antar Negara

Apabila antara Sanjayawangsa dengan Sailendrawangsa dipandang sebagai negara sendiri, maka telah kita ketahui, bahwa hubungan kedua negara itu pada mulanya baik-baik saja. Hal ini telah dibuktikan dengan isi piagam-piagam Kalasan dan Gandasuli, bahwa dinasti Sanjaya selalu membantu dinasti Sailendra dalam soal keagamaan. Keluarga Sailendra dalam usaha membangun candi-candi yang jumlahnya cukup banyak, telah mengakibatkan beban rakyat bertambah berat, rakyat menderita. Hal ini menimbulkan hubungan antara keluarga Sanjaya dan Sailendra menjadi buruk. Selanjutnya kita kenal terjadinya peperangan antara Balaputra dengan Raja Pikatan. Ini bukan peperangan agama, karena di Jawa, bahkan di seluruh Indonesia, jarang terjadi suatu peperangan yang dapat disebut benar-benar peperangan agama.

Dengan adanya piagam-piagam yang berbahasa Sansekerta dan bahkan ada yang dengan menggunakan huruf Pranagari, serta didirikannya berpuluh-puluh candi sebagai hasil perkembangan agama yang pesat pada pada waktu itu, maka sudah barang tentu ada hubungan yang ramai dengan tanah India. Hanya bagaimana lalu lintas perhubungannya kita tidak dapat mengetahui dengan pasti. Menilik perginya Balaputra dewa dari Jawa Tengah, kemudian dapat berkuasa di Sumatera, dan lagi hubungan Balaputra dewa dengan tempat ziarah agama Budha dengan bukti piagam Nalanda, jelaslah bahwa keluarga Sailendra ada hubungannya dengan negara di luar Jawa Tengah.

Demikian pula dengan adanya macam kain "kwat keling" menunjukkan pula suatu bukti, bahwa ada hubungan dagang antara Jawa Tengah dengan India. Bukti nyata adanya hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya, barulah nanti setelah pemerintahan berpusat di Jawa Timur.

Memang ada perkiraan, bahwa pindahnya Kerajaan Jawa Tengah ke Jawa Timur, disebabkan karena adanya ancaman politik yang berasal dari Sriwijaya, sebagai pembalasan dendam peristiwa terusirnya Balaputra dewa dari Jawa Tengah. Tetapi hal ini agak sukar kita terima.

3.2 Penyelenggaran Hidup dalam Masyarakat

Kedaaan sosial-ekonomi masyarakat pada masa kekuasaan raja-raja keluarga Sanjaya dan Sailendra di Daerah istimewa Yogyakarta, akan kita bicarakan, berdasarkan isi suatu prasasti, yang ditemukan di desa Papringan. Letak desa Papringan ditepi Sungai Gajah Uwong, sebelah utara rumah pelukis terkenal Affandin di tepi jalan Yogya-Sala, persis sebelah timur daerah Kotamadya Yogyakarta sekarang. Prasasti Papringan ini berangka tahun 804 Saka atau 882 M, jadi masa pemerintahan Raja Kayuwangi, yang bertakhta antara tahun 851 M--882 M. Bunyi piagam itu adalah sebagai berikut :

Swasti Sakawarstita 804 karti. Kemasa artinya Suklapasamawutu paking somawara tatkala sang pangat balakaspu balahara manusuk sima iga alas i saliat umehaken hikanang Imah ramanta i kandang. Kadang si wama, gusti ngai si patih si pingul si liwih kalima marwuwut si ithi wikil si buru. Gusti ing wualu si pupul. Parujar si panamwan si mula partaya pidah winkas si nadah, wariga si dari, si tiruan wariga galah singgir. hulair si wli si rudra. tuha buru si mahi s̃ guwai si pandol tuhalas i tangkil sikan si pulung. Si bantal si wuhung. Tahalas hadian si dikah si samplur si madyas si wayang tuha padahi si hli. Manga si hli, mapkan si awit, wahuta si agya, hulu kuwu si mujul, hulu wuatan si wuallak marhyang si barhma si randa si thibang. Si marhyang i patahunan si jubung wihara swami si tiruan si (twor) // O//.²²⁾

Dari prasasti yang letaknya dekat sekali dengan Kota Yogyakarta, kita dapat nama-nama jabatan yang menunjukkan tugas kewajiban mereka masing-masing. Dan dari jabatan-jabatan ini pula akan dapat kita ketahui keadaan sosial ekonomi masyarakat pada masa itu.

3.2.1 Pemenuhan Kebutuhan Hidup

Kebutuhan hidup bagi anggota masyarakat dapat kita bedakan menjadi dua macam, primer dan sekunder. Yang termasuk primer, adalah yang meliputi : sandang, pangan, dan papan. Sedang yang termasuk sekunder, adalah kebutuhan hidup yang lain, yang bertujuan untuk kesempurnaan hidupnya.

3.2.1.1 Pangan

Sumber pangan yang utama adalah dari hasil pertanian. Usaha untuk ketertiban dan kelancaran usaha pertanian, dapat kita ketahui dengan adanya pejabat yang bernama : hulu air, ialah seorang pejabat pamong desa yang bertugas untuk mengatur pembagian air bagi suatu desa untuk sawah, ladang, dan sebagainya, agar tidak terjadi perkecokan. Karena air merupakan hidup matinya tanaman padi. Dengan adanya pejabat: Wangsa ialah seorang ahli ilmu falak desa, dan pejabat ini selalu ada pada setiap desa, ia harus mengurus tentang menentukan hari-hari yang baik untuk menyelenggarakan berbagai pekerjaan.²³⁾ Sehingga pada musim-musim mana orang harus menanam padi, palawija, sayur-mayuran, buah-buahan dan sebagainya, Wangalah yang berhak mengaturnya.

Pemasaran hasil pertanian dilakukan, pula di pasar-pasar, yang semuanya diatur oleh seorang pejabat: mapekan. Dialah yang mengatur segala sesuatunya tentang pasar, juga pajak-pajak berjualan telah dikuasakan untuk memungutnya diatur pula dan dilakukan oleh orang-orang yang tertentu yang telah dikuasakan untuk memungutnya. Untuk alat beli, telah beredar pula uang logam emas, perak dan perunggu. Nilai uang emas dan perak tertulis pada uang itu sendiri yang umum sekali ialah yang disebut uang ma (1 masa emas = 1/16 suwuma emas, ataupun 1 masa perak = 1/16 dharma perak. Di tengah-tengah sekali dengan jelas dapat kita baca perkataan "ma" Jadi nilainya telah ditentukan.²⁴⁾

Alat-alat pertanian, cangkul, tragal bajak sisir, dan lain-lainnya pada waktu itu telah digunakan, dan pada mulanya semua dari kayu kemudian dicampur disertai alat-alat pertanian yang memakai bahan logam. Berdasar piagam-piagam masa kekuasaan Sanjawangsa, Raja Kayuwangi usaha perluasan daerah pertanian sangat mendapatkan perhatian. Usaha ini kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Raja Belitung.

3.2.1.2. Sandang

Dari prasasti-prasasti maupun dari gambar-gambar relief pada percandian di Jawa Tengah telah kita ketahui bahwa pada masa itu orang mengenakan kain. Kain untuk laki-laki disebut *Wedakan*, sedang

untuk wanita kain. Untuk penutup badan bagian atas, atau baju, memang tidak kita dapati. Kain-kain yang mahal dengan tenunan benang emas atau perak juga telah dikenal pada masa itu. Kain semacam itu biasanya disebut nama tempat kain itu dibuat, jadi sama dengan pada mas sekarang. Kain buatan luar negeri pun ada diantaranya. *Bwat Keling* yang berarti buatan Keling adalah nama yang diberikan pada kain buatan India.

Tentang motif gambaran kainnya, dari arca-arca yang kita dapati maka pada kain Dewa Siwa Mahadewa di percandian Lara Jonggrang, telah ada gambar-gambarnya berupa hiasan bunga-bunga. Mungkin ini untuk mewujudkan gambaran kain yang menggunakan hiasan tenunan benang emas. Sedang yang benar-benar menunjukkan corak hiasan ilmu ukur seperti motif kawung sekarang, terdapat pada kain Raja Kertarajasa dari Candi Arca. Kain yang dikenakan oleh masyarakat banyak, kiranya juga kain lurik, dengan berbagai corak dan warna. Dan warna yang paling digemari adalah warna biru tua, dari bahan tom, yang kini biasa disebut *Wedelan*. Selain mengenakan kain, orang-orang pada masa itu telah mengenakan berbagai macam perhiasan. Perhiasan-perhiasan ini dikenakan pada : telinga, leher, tangan, dan kaki. Dengan telah adanya pandemas, pande besi, dan sebagainya, maka perhiasan-perhiasan subang, kalung, gelang, binggel, dan cincin ini, tentunya juga ada yang emas, perak, perunggu, dan ada yang telah memakai permata dari batu-batu yang berharga.

3.2.1.3 Papan atau Tempat Tinggal

Tempat tinggal orang-orang pada masa itu, jelas terlihat pada gambar-gambar relief candi-candi di daerah Prambanan. Rumah-rumah pada masa itu mempergunakan bahan kayu, ada yang berkolong. Umumnya memakai *sunduk*, dan cara memasangnya tidak berbeda dengan bangunan rumah Jawa sekarang. Bentuk rumah seperti bentuk kampung dan bentuk limasan sekarang. Dari gambaran-gambar di relief candi-candi daerah Prambanan belum kita dapati bentuk rumah seperti, joglo, taju, dan sebagainya. Pada zaman Jawa Timur hingga abad XV, kita dapati bentuk-bentuk rumah *meru*, seperti yang kita jumpai di Bali. Istana Ratu Baka, pendapatnya dari bahasa kayu, seperti apa bentuknya, kita tak dapat menggambarkan, apakah berbentuk seperti kampung, limasan atau joglo. Untuk urusan rumah ini pada piagam-piagam kita

jumpai nama jabatan *Kalang*.²⁵⁾ Pada piagam-piagam yang lain kita jumpai jabatan *undahagi*,²⁶⁾ yang kiranya tidak berbeda tugas, kewajibannya dengan *kalang*. Pejabat *kalang* inilah kiranya yang mengurus segala sesuatunya tentang perumahan masyarakat di masa itu. Seperti kita maklumi hingga sekarang pembuatan rumah masih dilakukan secara gotong royong, maka pada masa itu pasti juga dengan cara demikian, dan pejabat *kalang* lah yang mengatur segala sesuatunya. Sudah barang tentu pejabat *kalang* ataupun *undahagi* ini lebih bertugas pada pendirian bangunan resmi desa, seperti tempat peribadatan, candi, dan sebagainya. Bangunan-bangunan ini supaya tahan lama menggunakan bahan batu, baik batu merah, batu putih maupun batu alam. Sedang buku pedoman pembuatan bangunan candi ini, adalah dari India yang disebut *Silpasastra*. Sedang untuk bangunan rumah biasa disebut *Wastuwidya*. Khusus untuk bangunan-bangunan candi ini selalu dibuat agung, megah, indah, karena candi merupakan bangunan tempat tinggal para dewa, para leluhur di alam sorga.

3.2.1.4 Kebutuhan hidup yang lain

Macam kebutuhan hidup yang lain pada masa itu, misalnya saja alat pengangkutan. Alat pengangkutan baik di darat maupun di air telah ada dan pajak pengangkutan pada tiap perbatasan daerah juga telah diadakan, yang dilakukan oleh petugas-petugas pemungut pajak lalu-lintas. Alat pengangkutan yang kita lihat pada relief-relief candi berupa: kuda, dan kereta yang juga ditarik oleh kuda, untuk didaratan. Untuk pengangkutan di air berupa rakit untuk lalu-lintas sungai, dan kapal untuk lalu-lintas lautan.²⁷⁾

Untuk keselamatan setiap anggota masyarakat dari bahaya yang mengancamnya, telah kita dapati gambar-gambar berbagai macam *senjata*, seperti: pedang, tombak, panah, serta alat kerja seperti: cangkul, parang, sabit alat menuai (ani-ani) dan sebagainya. Bentuknya ada bermacam-macam jenis, panjang, pendek, lurus, melengkung, melebar atas, dan sebagainya.

Dari gambar-gambar pada relief-relief percandian di Jawa Tengah ini, memang belum kita jumpai keris seperti bentuknya yang sekarang ini.

Jadi nama-nama jabatan, pande besi, ada yang bertugas membuat alat-alat kebutuhan hidup manusia dari bahan besi, ada pula yang khusus membuat berbagai macam senjata, yang kemudian lebih dikenal dengan nama, empu. Golongan ini mempunyai kedudukan yang tersendiri dan berpengaruh besar pada masyarakat di sekitarnya, juga dalam bidang kepercayaan. Karena empu oleh masyarakat dipandang pula sebagai orang sakti. Dan umumnya mereka itu keturunan orang-orang yang sejak dahulunya telah berpengaruh besar pada masyarakat daerah setempat (mandala).

3.2.2 *Hubungan antar golongan*

Apabila kita dengan seksama mempelajari prasasti-prasasti dan hasil kesusastraan abad XIII hingga abad XV, akan kita ketahui bahwa masyarakat Jawa Kuno terdiri atas tiga golongan. Golongan pertama, yang terbesar jumlahnya, ialah penduduk desa yang seluruhnya, yang merupakan anasir-anasir yang pasif dalam berbagai macam perubahan. Golongan kedua ialah raja dengan segenap kaum keluarganya dan mereka yang langsung tergantung pada raja, yang dapat kira sebut golongan kraton. Sedang golongan ketiga ialah golongan agama, pedanda-pedanda yang tinggal di candi-candi, dan wihara-wihara beserta pegawai-pegawai rendahnya.²⁸⁾ ketiga golongan ini satu dengan yang lain terpisah dengan keras.

Di samping ketiga golongan yang terpisah dengan jelas itu masih ada banyak lagi, betul tidak merupakan satu kesatuan tetapi dapat dipersatukan dalam satu istilah umum, yaitu golongan pedagang dan pengusaha. Yang kita maksudkan dengan itu ialah segala macam perusahaan yang sering disebutkan dengan daftar yang panjang lebar di dalam prasasti-prasasti. Pandai emas pandai perak, pandai perunggu, pandai besi, tukang kayu, tukang anyam, tukang kulit, tukang celup, dan sebagainya pembuat periuk belanga, tukang kapur, pembuat gula, tukang sirih, dan sebagainya, mereka yang mengangkut barang-barang dagangan di darat maupun di air, pemukul gamelan, penyanyi, pengidung dan lain-lainnya. Juga pedagang-pedagang yang sebenarnya, ialah yang membeli hasil-hasil dari desa untuk kemudian menjualnya di tempat yang lain, sering juga disebut dalam prasasti. Semua perusahaan-perusahaan itu ada di luar kesibukan desa yang biasa.

Dengan demikian seolah-olah pembagian masyarakat Jawa pada waktu itu sama dengan caturwarna di India: golongan pendeta, golongan kraton, golongan rakyat banyak, dan golongan pedagang. Macam-macam golongan itu tentunya telah ada pada zaman Sanjayawangsa maupun Sailendrawangsa. Jalinan kerjasama antara golongan yang satu dengan yang lain, sudah barang tentu ada, demi kepentingan desa, ataupun kepentingan negara.

3.2.3 *Kepemimpinan*

Berdasar pada prasasti-prasasti yang ada, maka suatu masyarakat desa, selalu dipimpin oleh rama-desa, yang terdiri dari beberapa orang, dengan jabatan-jabatan dan tugas sendiri-sendiri. Di dalam memimpin desanya seorang rama desa dibantu oleh lima orang pamong desa (*Halima Marwwud*) = *lima prabot desa*) yang membantu jalannya pemerintahan desa. Sadang untuk kesejahteraan anggota-anggota desanya serta untuk gotong-royong demi raja (buat haji), para rama desa dibantu oleh *Mapadahi*, misalnya, ialah seorang pemimpin gamelan, yang rupanya memimpin semacam kumpulan gamelan resmi, yang bermain, pada per-alatan desa dan sebagainya. Rama desa, juga dibantu oleh *Wineka*, ialah pesuruh desa, yang berkewajiban memelihara perhubungan antara desa-desa mengenai kepentingan-kepentingan bersama. Segala sesuatu yang menyangkut desa oleh rama desa dibicarakan bersama dengan para pembantu-pembantunya, dan pelaksanaannya selalu dijadikan dengan cara gotong-royong. Cara-cara macam ini berasal dari jaman sebelum kedatangan pegolongan yang jumlahnya besar, dan tak mudah mengalami perubahan, maka unsur-unsur macam ini, seperti sifat kegotong-royongan, hingga sekarang pun masih dapat kita lihat.

Sedang kerja bagi raja atau negara sudah merupakan suatu kewajiban anggota desa, karena itu perlu ada pejabat yang disertai tugas mengatur kerja untuk raja itu. Di suatu daerah perdikan yang dipimpin oleh seorang pembesar keagamaan, segala sesuatu tentang desa itu diatur dan dipimpin oleh pembesar keagamaan itu bersama para pembantu-pembantunya. Pengangkat rama desa berdasarkan pilihan dari anggota-anggota desa, biasanya mereka yang telah lanjut usianya,

luas pengetahuannya dan memiliki rasa tanggung-jawab yang dipilih, menjadi rama desa.

3.2.4 *Pengaturan Masyarakat*

Pengaturan pada masyarakat desa lebih ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri, bersifat otonom. Sedang urusan yang langsung ditangani pemerintahan pusat hanya soal pemungutan pajak, bangunan suci, dan urusan keagamaan.

Masyarakat desa sendiri berkewajiban mengatur segala sesuatu yang memang diperlukan oleh desa itu sendiri, misalnya soal-soal: keamanan, lalu-lintas, pertanian, perburuan, dan sebagainya. Hanya sekali-sekali masyarakat desa dikenakan perintah kerja gotong royong untuk raja atau pemerintahan pusat. Semuanya telah diatur secara terperinci. Ada peraturan tentang kejahatan lengkap dengan hukum-hukumannya, peraturan tentang jual beli, pinjam-meminjam, harta pusaka, dan lain sebagainya.

Tentang kedudukan kaum wanita di dalam hukum maupun dalam keanggotaannya dalam masyarakat telah ditentukan pula. Kedudukan wanita sebagai istri, tidaklah harus bergantung pada suami, ia dapat berdiri sendiri. Jadi sama dengan kaum lelaki juga partisipasinya dalam pemerintahan. Kaum wanita berhak pula menjabat kedudukan yang tinggi. Pada zaman Sailendrawangsa kita kenal nama Pramodhawardhani, zaman Dharmawangsa ada wanita yang bergelar Rakyau Mahamantri I Hino, sedang pada jaman Majapahit ada yang menduduki jabatannya, yaitu Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani.

3.3 *Kehidupan Seni Budaya*

Hasil seni budaya bangsa Indoesia, khususnya bangsa Jawa dari abad I hingga abad XV sudah tinggi. Seni rupa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hingga abad XV, tidak kurang dari seratus buah bangunan candi besar-kecil, telah didirikan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di antaranya ada yang sangat mengagumkan, seperti Candi Borobudur, Kalasan, dan Prambanan.

Dalam bidang seni tari juga demikian. Hingga abad XV, relief, piagam, serta hasil kesusasteraan telah menunjukkan adanya berjenis-jenis seni tari. Raja Hayam Wuruk yang bertahta di Majapahit sejak tahun 1350 hingga tahun 1389 M, dikenal pula sebagai penari ulung.

Demikian pula halnya dengan seni sastra dan seni suara. Jaman Kediri yang berlangsung sejak abad XI permulaan hingga abad XIII permulaan; merupakan zaman keemasan seni sastra Jawa Kuna, dengan tokoh-tokoh seperti Mpu Kanwa pengarang Arjunawiwaha, Mpu Sedah, dan Mpu Panuluh pengarang Bharatayudha, Mpu Prapanca pengarang Nagarakertagama, dan masih banyak lagi.

Tentang seni suara memang kita tak mendapatkan rekamannya. Tetapi apabila kita lihat dari relief-relief candi, baik dari daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, akan dapat kita ketahui berbagai macam jenis alat bunyi-bunyian. Dari gambar-gambar kita ini dapat kita lihat mana yang berasal dari pengaruh seni budaya India, dan mana-mana yang asli Indonesia.

Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kita batasi pada masa kekuasaan Sanjayawangsa dan Sailendrawangsa saja, jadi hanya sampai permulaan abad X.

3.3.1 Pendidikan

Berdasar atas gambar pada relief candi, terdapatnya bangunan wihara, serta bunyi tulisan pada piagam-piagam yang menyebut pula para *Marhyang* pada wihara-wihara tertentu, maka jelaslah bahwa pada masa itu telah ada semacam pendidikan yang bercorak klasikal, di bawah asuhan seorang guru atau pendeta. Tempat belajar ini juga merupakan tempat tinggal sang Guru serta para siswanya. Istilah kemudian : *padepokan* atau *pacrabakan*. Di sekolah ini para siswa mendapatkan pelajaran berbagai ilmu pengetahuan, antara lain: bahasa dan kesusteraan, keagamaan, tata pemerintahan, keprajuritan, dan juga bidang pertanian.²⁹⁾

Siapakah guru-gurunya itu? Kalau kita dasarkan pada piagam Paringan, maka guru-gurunya adalah orang-orang Indonesia asli. Sebagaimana kita ketahui piagam Papringan menyebutkan tentang: *marh-yang i patahanan si jubung, wihara swami si tirwan*. Nama-nama

jubung dan tirwan adalah asli Indonesia, Pada mulanya, abad I sampai abad V mungkin ada guru yang bukan bangsa Indonesia, seperti Jnanabhadra, atau John-no-po-te-lo menurut istilah cina. Siapakah siswa-siswanya? Kalau menurut tata tertib India, yang berhak menjadi siswa hanyalah dari golongan Brahmana, Kestria, dan Waidya. Dari golongan Sudra tak diperkenankan.

Apakah di Indonesia ada juga golongan yang tidak diperkenankan mengikuti pelajaran? Di depan telah diuraikan, bahwa masyarakat Jawa terbagi atas empat golongan, akan tetapi bukanlah empat sistem kasta seperti di India. Sehingga rakyat kebanyakan, tidaklah dapat kita samakan dengan Sudra. Karenanya maka siapa saja boleh menuntut pelajaran, tak ada bedanya.³¹⁾

Selain pendidikan yang bercorak klasik pada suatu *padepokan*, ada lagi pendidikan yang bersifat non-formal, ialah belajar dengan jalan ikut kerja. Langka-langkanya harus mulai dari tingkatan yang paling bawah, kemudian berangsur-angsur meningkat menurut kemampuannya masing-masing. Pendidikan macam ini kita dapati pada: pande besi, pande mas, pande perunggu, tempat-tempat pembuatan alat pengangkutan, para kalang atau undahagi, tempat-tempat pembuatan gamelan, senjata, dan lain sebagainya. Demikian juga pendidikan pemahat batu untuk bangunan candi. Ini pun juga secara ikut kerja, dari setapak demi setapak akhirnya meningkat menjadi pemahat. Jadi pemahat-pemahat bangunan candi kita adalah pasti orang Indonesia asli. Kalau pimpinannya atau buku pedomannya berasal dari luar (Cilpacastra serta Widyawasta). Sistem yang dipakai adalah pertama : *menirukan*, kedua *menghafal*;, dengan mengerjakan berulang kali sampai mahir. Barulah: *mengerti*, dan akhirnya *menguasai* sistem pendidikan ini berlaku baik yang bersifat ilmu pengetahuan teori (pendidikan pada padepokan-padepokan), maupun yang bersifat praktek (pendidikan dengan jalan ikut kerja).

3.3.2 Kesenian

Tentang kesenian di Daerah Istimewa Yogyakarta dari permulaan abad Masehi hingga abad XV ini, hanyalah kita batasi sampai abad X, ialah berakhirnya kekuasaan Sanjayawangsa di Jawa Tengah. Sedang sumber-sumbernya dari bangun-bangunan candi yang terletak di sekitar

Yogyakarta, dari piagam-piagam di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kitab-kitab kesusasteraan.

3.3.2.1 Seni rupa

Tingginya pengetahuan seni rupa, penguasaan serta kemampuannya, dapatlah kita proyeksikan pada hasil seni bangunan yang dibuat pada masa itu dan yang kini masih dapat kita saksikan bersama. Pada masa itu sudah pasti ada buku pedomannya yang dikuasai dan dipatuhi. Demikian pula pasti ada pimpinannya sehingga pekerja membangun candi dilakukan dengan teliti seluruh pekerjaan ini dilakukan oleh tangan-tangan bangsa Indonesia sendiri.

3.3.2.2 Lukisan

Di dalam cara melakukannya, dapatlah kita bedakan menjadi dua macam:

pertama: *bercorak naturalistis*. Relief-relief yang menggambarkan orang binatang, pohon, rumah, air dan sebagainya, baik pada candi-candi sekitar Prambanan maupun Borobudur, semuanya menunjukkan seperti dalam alam senyatanya, jadi dapatlah kita sebut : *naturalistis*. Relief Ramayana pada Candi Siwa di Percandian Lara Jonggarang misalnya, benar-benar menakjubkan.

kedua: *bercorak gestyleerd*. Relief yang berupa hiasan, baik yang besar maupun yang kecil, umumnya *gestyleerd* (dibuat bergaya). Misalnya saja dalam melukiskan bunga, daun dan buah yang terdapat pada berbagai hiasan, seperti: rekalsitrante, lambang kemujuran, Ragam hias Prambanan: kala, makara *antefix*, *guirlande*, dan sebagainya. Bahkan hiasan-hiasan Kala Makara, pada candi-candi Sari dan Plaosan, nampak lebih *gestyleed* dari candi-candi yang lain, seperti Kalasan dan Lara Jonggarang.

Tentang pemakaian warna. Dari bekas-bekas warna merah, seperti yang terlihat pada bangunan Candi Sewu, menunjukkan telah digunakannya cat berwarna. Hanya dahulunya warna apa, dan bahan apa yang digunakannya kita tidak mengetahui dengan pasti.

3.3.2.3 Seni bangunan

Tentang seni bangunan pada masa kekuasaan keluarga Sanjaya dan Sailendra yang peninggalan-peninggalannya terletak di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dari jaman abad VIII hingga permulaan abad X. Bangunan-bangunan itu ada yang bercorak agama Budha aturan aliran Mahayana, ada pula yang bercorak agama Siwa (Hindu).

Letak

Daerah yang merupakan komplek percandian adalah daerah Prambanan. Selain itu juga di beberapa tempat lain yang umumnya selalu di tepi sungai, puncak gunung atau bukit, dekat mata air, dan sebagainya. Seperti kita ketahui, menurut pandangan masyarakat masa itu air selalu berasal dari gunung, sedang gunung merupakan tempat tinggal para dewa yang bersifat suci. Karenanya air yang mengalir, dipandanginya sebagai air suci. Karena itu menurut mereka bangunan candi yang bersifat suci harus diletakkan pada suatu tempat yang suci pula.

Bahan

Bahan yang dipergunakan untuk membuat suatu bangunan candi, pada dasarnya selalu menggunakan bahan yang terdapat di daerah itu. Untuk daerah Daerah Istimewa Yogyakarta banyak dipergunakan batu alam, selain itu juga batu putih, dan batu merah (bata). Umumnya untuk bagian luar, selalu menggunakan batu alam. Sedang pada bagian dalam, ada pula yang menggunakan batu putih. Juga untuk fondasi bangunan-bangunan rumah, banyak pula yang menggunakan batu putih. Sedang di samping batu putih, untuk fondasi rumah atau wihara masa dulu, banyak pula yang menggunakan batu merah. Seperti tembok keliling Candi Canggal, dari batu merah, fondasi bangunan wihara di dekat Candi Borobudur, juga dari batu merah. Seperti baru-baru ini, peninggalan candi di daerah Gunung Kidul, banyak pula menggunakan bahan batu merah.

Di samping bahan utama yang berupa batu alam ada pula bahan-bahan lain, yang dipergunakan untuk membuat inti atau induk suatu bangunan candi.

Bentuk dan Susunan

Bangunan candi di daerah Jawa Tengah yang termasuk tua, seperti yang terdapat di Dieng, pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Silpasastra. Bentuk candi di Jawa Tengah biasa di katakan tambun, sedangkan candi-candi Jawa Timur berbentuk lagsing atau ramping.

Denah percandian Jawa Tengah umumnya berbentuk bujur sangkar dengan ditambah penampil-penampil pada keempat sisinya, sehingga berbentuk salib. Titik pusat terletak di tengah-tengah, jadi simetris. Janjang terdapat pada salah satu sisinya, atau keempat sisinya. Ruang candi mungkin sebuah ruang saja, atau sebuah ruang tengah dengan empat buah ruang samping dan salah satu ruang sampingnya menjadi ruang pintu. Atap candi meninggi dan berpuncak stupa, lingga, ratna atau kebenaran. Pada Candi-candi yang besar, terdapat lorong keliling, dengan pagar temboknya, yang biasa disebut *balustrade*.

Fungsi

Kegunaan bangunan candi ada bermacam-macam. Ada yang benar-benar suatu bangunan candi, yang berarti makam, ialah sebagian tempat untuk memakamkan atau menyimpan abu jenazah. Ada pula digunakan sebagai tempat tinggal, tempat mengajar dan tempat menyimpan alat-alat upacara keagamaan, yang disebut bangunan Wihara. Ada lagi yang merupakan suatu tempat pemujaan kepada seorang Dewi yang dianggap luar biasa, jadi hanya merupakan tempat pemujaan. Adapula yang menurut perkiraan khalayak ramai sebagai istana, seperti Candi Ratu Baka. Dan masih ada pulka macam kegunaan suatu bangunan candi, tetapi masyarakat umum memberikan nama untuk semua bangunan peninggalan yang dari bahan batu dengan sebutan candi.

Peninggalan-peninggalannya

Nama-nama bangunan, candi yang terdapat di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini cukup banyak. Di antaranya masih banyak yang merupakan tanda tanya, belum ada kepastian tentang bangunan apa itu. Bahkan masih ada yang dalam proses penggalian dan penelitian, misalnya Candi Sambisari. Peninggalan-peninggalan candi itu ialah :

a. *Candi Gebang*, sebuah candi kecil terletak di Kecamatan Depok, Sleman. Candi ini bercorak agama Siwa, terdapat arca-arca: Yoni mestinya juga lingga, Siwa Mahabala dan Siwa Wandi Swara yang terdapat pada ceruk kiri kanan pintu masuk, serta arca-arca Durga, Ganesa dan siwa Mahaguru.

b. *Candi Sambisari*, di dekat Desa Kadiraja, daerah Sleman, sebelah timur Kota Yogyakarta, juga bercorak agama Siwa dengan lingga Yoni serta patung-patung Durga, Ganesa, dan Siwa Mahaguru. Di depan candi itu terdapat lagi candi-candi pewara, yang mungkin berjumlah tiga buah.

c. *Candi Kalasan* terletak di sebelah selatan jalan Yogyasala, merupakan sebuah candi besar yang merupakan tempat pemujaan Dewi Tara, dibuat pada tahun 778 M. candi dikelilingi oleh lima puluh dua stupa berwarna, memiliki ruang-ruang yang mungkin berisikan arca-arca perunggu. Arca perunggu Dewi Tara kira-kira setinggi enam meter.

Pada atap candi terdapat arca-arca batu berupa: Dhyani Budha yang terletak pada keempat arah mata angin, *Aksobhya Amogjasodaha*, *Amitabha*, dan *Ratnasambhawa*. Konon candi ini dilapis dengan : bajralepa, yang berwarna putih perak.

d. *Candi Sari atau Candi Bendah*

Menurut bentuk susunannya, bangunan ini digolongkan pada bangunan wihara, yang berfungsi untuk tempat tinggal para pendeta, tempat mengajar para siswa, serta tempat menyimpan alat upacara keagamaan. Bangunan ini berlantai dua, dan pada bagian lantai atas ini yang dipergunakan untuk menyimpan alat upacara keagamaan. Atap candi berpucuk sembilan buah stupa sama besar, berderet tiga, dan tiga karena candi ini memang memiliki tiga hubungan, Pada candi ini tak terdapat relief ceritera ataupun patung-patung, hanyalah relief tinggi para Dhayani Bodhisattwa putra maupun putri. Tidak berbeda dengan Candi Kalasan, Candi Sari juga dilapis dengan bajralepa.

e. *Percandian Lara Jonggarang*

Percandian ini merupakan percandian yang terbesar di daerah Jawa Tengah dan kini candi induknya dipugar, hingga keadaannya telah utuh kembali. Peresemian penyelesaian pemudaran dilakukan oleh Presiden

Republik Indonesia pertama pada tanggal 20 Desember 1953. Pembangunannya kembali itu telah dipersiapkan sejak tahun 1918 dan mulai dikerjakan sejak tahun 1934. Percandian ini terdiri atas tiga buah halaman yang berpusat, halaman pertama kosong tak berisi candi-candi, halaman kedua berisi candi-candi pewara sebanyak dua ratus dua puluh empat buah, berderet empat mengelilingi halaman ketiga. Sedang halaman ketiga berbentuk bujur sangkar dengan sisi-sisi sepanjang 110 meter, merupakan halaman utama, berisi delapan candi besar dan enam belas candi-candi kecil, yang terdiri atas candi-candi sudut dan candi renteng serta candi-candi kiri-kanan janjang Candi Siwa.

Candi-candi utamanya ialah : Candi Brahmana, Candi Siwa, Candi Wisnu, Candi Nandi, candi yang belum diketahui sisinya, dan Candi Siwa di depan Candi Wisnu. Dua buah candi lainnya disebut Candi Apit atau Candi Taman. Hiasan yang terkenal pada Candi Siwa, disebut Ragam Hias.

Prambanan yang berupa sebuah arca singa dalam ceruk, artefex dan makara, serta kalpataru dengan kinuara-kirari. Pada kaki candi terdapat juga hiasan permadani yang sangat indah. Relief pada balustrade luar, berupa relief Taman Siwa yang disebut Tandawa, sedang pada sisi dalam terpahatkan ceritera Ramayana yang sangat indah, sebanyak empat puluh dua adegan. Relief ceritera lanjutanya terdapat pada sisi dalam balustrade Candi Brahmana. Pada balustrade sisi dalam Candi Wisnu, dipahatkan ceritera masa muda Nayaoran dan Kakrasana.

Patung-patung yang terdapat pada percandian ini ialah: Siwa Mahadewa, diruang utama Candi Siwa, Siwa Mahaguru, diruang samping selatan.

Ganesa di ruang samping belakang, menghadap ke barat.

Durga, di ruang samping utara, dengan nama lengkap : Durga Mahisasurmardhii, dan yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Lara Jonggrang.

Siwa Mahakala dan Siwa Nandiswara, yang terletak pada candi bilik kanan pintu masuk Candi Siwa.

Wisnu, terletak pada ruang Candi Wisnu.

Brahmana, terletak pada ruang Candi Brahmana.

Lembu Nandi, terletak pada ruang Candi Nandi, didepan Candi Siwa.

Soma dan Surya, terletak di belakang Arca Nandi, Soma berkendaraan kereta berkuda sepuluh ekor, sedang Surya sepuluh ekor, sedang Surya berkendaraan kereta berkuda tujuh ekor.

Akhirnya pada candi sebelah depan Candi Wisnu terdapat arca tanpa kepala ialah Arca Siwa.

Selain Candi Siwa yang telah dipugar ialah: pintu gerbang sebelah utara dan dua buah candi perwara, sebuah candi perwara sudut yang berpintu dua buah, dan candi perwara yang terletak pada sebelah timur.

f. Ratu Boko

Peninggalan ini terletak di dataran tinggi sebelah selatan Percandian Lara Jonggrang. Nama Ratu Boko, dihubungkan dengan ceritera Lara Jonggrang, ratu Boko adalah ayah Lara Jonggrang. Dan peninggalan ini dianggap merupakan istana Ratu Boko. peninggalan kraton Ratu Boko ada dua tempat, sebelah barat dan sebelah timur. Yang sebelah barat terdiri atas kelompok gapura yang besar yang tak ada bandingannya mengenai susunannya yang serba cermat dan belum pernah ditemukan baik pada tempat-tempat suci lainnya maupun pada kraton-kraton pada jaman Jawa kuna.³²⁾ Gapura-gapura ini ada yang berganda tiga, ada pula yang berganda lima. Di samping gapura, terdapat pula peninggalan yang diperkirakan sebagai tempat pembakaran mayat. Selain itu terdapat pula bekas kolom, bekas tembok, parit, dan pintu gerbang lainnya.

Sedang yang sebelah timur berupa : sebuah batur berukuran 20 x 20 yang berlantai batu-batu besar dan yang masih memperlihatkan bekas tempat tiang-tiang kayu sebuah pandopo besar. Di sebelah timur batur ini terdapat lagi sebuah batur persegi panjang dan sebelah timurnya lagi terdiri atas gapura, tembok, dan kolam, yang sangat menarik perhatian. Sedang bagian yang paling timur sering disebut "keputren", terdapat batu-batu yang berbentuk seperti genderang (sebanyak enam belas buah), dihias dengan gambar-gambar binatang berjajar. Ukiran-ukiran ini berbeda-beda untuk tiap batu. Mungkin batu-batu ini adalah labik-labik arca.³³⁾

g. *Banyunibo*

Di sebelah selatan peninggalan Ratu Boko, di dataran rendah terletak di tepi sungai, terdapatlah peninggalan Banyunibo. Peninggalan ini semula terediri atas sebuah bangunan besar di tengah, dengan bangunan stupa keliling sebanyak enam buah. Pemugaran bangunan induknya sudah dilakukan sedang stupa-stupa kelilingnya sudah sangat rusak. Berfungsi sebagai apa bangunan ini, kita tak dapat memastikan. Hanya perlu dicatat bahwa ukiran yang terdapat pada bangunan utama ini sangat baik dan indah sekali, sedang pada dinding ruang menghadap ke pintu masuk terdapat relief yang tidak kita jumpai di candi lain. Atap bangunan utama ini berupa stupa, jadi jelas bahwa bercorak agama Budha Mahayana.

Candi-candi lain yang terdapat di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak, seperti yang terdapat di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan lain-lainnya, tetapi kurang penting. Selain peninggalan yang berupa bangunan candi di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pula peninggalan yang berupa barang perhiasan, perunggu, bahkan barang dari bahan emas, yang semuanya kini tersimpan baik di Museum Sana budaya Yogyakarta.

3.3.2.4 Seni Tari

Dengan adanya suatu relief yang menggambarkan gerak orang menari, maka dengan mudah dapat dikatakan bahwa pada masa itu telah ada seni tari. Seperti kita ketahui pada relief ceritera Lalitawistara di Candi Borobudur, pada waktu adik-adik perempuan raksasa Mara menggoda Sidhartha Gautama yang duduk di bawah pohon Bodhi, mereka menunjukkan gerakan tarian. Tari apa yang dimainkannya kita tidak mengetahui. Demikian juga pada relief cerita Ramayanan di Percandian Lara Jonggrang. Waktu Bharata dinobatkan sebagai calon raja, juga diramaikan dengan tarian, oleh seorang gadis dengan membawa *badge* dan sebuah perisai. Tari apakah itu, kita pun tak mengetahui, hanya nampak sekali suatu gerakan yang gagah.³⁶⁾ Juga pada *balustrade* Candi Siwa sisi luar, terdapat relief tarian Siwa yang disebut Tandawa. Tarian Siwa Nataraja ini, adalah suatu tarian magis tarian penciptaan dunia.

Apabila kita membaca pada piagam-piagam, misalnya piagam Kedu yang berangkat tahun 907 M dan dibuat oleh Raja Belitung, maka pada akhir baris sisi pertama terbaca : *widu si majadut, matapukan si bambuh, juru pada hi si nanja, maganding si Krsni rawanahasta si (mandal)*.³⁵⁾ Kata *matapukan*, tidaklah berbeda dengan kata *matapelan*, *haraketan*, yang berarti pertunjukan wayang orang yang para pemainnya mengenakan topeng.

Jadi pada kekuasaan Sanjayawangsa dan Sailendrawangsa di Jawa Tengah, termasuk juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ada seni tari. Pemain-pemainnya dapat putra ataupun putri. Gerak tariannya nampak jelas pada relief-relief candi, baik yang putra maupun yang putri. Bila orang menjajarkan relief Tandawa pada Percandian Lara Jonggrang, maka akan terlihatlah suatu rangkaian gerak langkah orang menari.

Setelah pemerintahan dipindahkan ke Jawa Timur, maka seni tari berkembang dengan cepatnya. Hal ini dapat dibaca pada piagam-piagam dan juga pada kitab-kitab kekawin hasil kesusastraan. Jaman Kadiri dan jaman-jaman berikutnya, yang sebagian besar berupa ceritera. Menari lagi keluarga kraton, nampaknya merupakan suatu keharusan. Seperti kita ketahui, Raja Hayamwuruk adalah seorang penari. Dan sampai sekarang pun, keluarga raja Yogyakarta umumnya juga pandai menari.

3.3.2.5 Seni Sastra atau Suara

Hasil seni sastra kekuasaan Sanjayawangsa dan Sailendra-wangsa, berdasar kitab kepustakaan Jawi karangan Prof. Dr. R.M. Ngb. Poerbacaraka ada dua buah, yaitu : Kitab Candakarana dan Kitab Ramayana.

Kitab Candakarana adalah sebuah kitan Dasanama, jadi seperti sebuah kitab kamus, dan juga berisi keterangan tentang hukum, puisi kakawin. Kitab ini menyebutkan nama raja keluarga Sailendra, jadi berasal dari antara tahun 778 dan 856 M ialah masa kekuasaan Sailendrawan di Jawa Tengah.³⁶⁾

Sedang Kitab Ramayana adalah sebuah ceritera epos yang berbahasa Jawa Kuna atau kawi, yang berbentuk kawin. Kitab

Kakawin Ramayana terdiri atas dua puluh enam sarga, dan tiap sarga terdiri atas dua puluh enam sarga, dan tiap sarga terdiri atas beberapa bait, yang tidak sama jumlahnya. Pengarangnya belum dapat diketahui, hanya karena pada bagian akhir ceritera menyebut nama Yogiswara, ada yang berpendapat bahwa Yonigiswara penulis Kakawin Ramayana.

Bilamana ditulisnya, juga tidak diketahui dengan pasti. Menurut Prof. R.M. Ngb Poerbatjaraka, kira-kira bersamaan dengan dibuatnya Percandian Lara Jonggarang, masa pemerintahan Raja Balitung, seorang raja besar yang menguasai baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur, yang bertakhta di negeri Mataram antara tahun 820 = 832 Saka.³⁷⁾ Isi ceritanya tidak berbeda dengan cerita Ramayana, yang dipahatkan pada Percandian Lara Jonggarang, tetapi berbeda dengan isi ceritera Ramayana karangan Pujangga Walmiki. Karangan Pujangga Walmiki terdiri atas tujuh kanda sedang kakawin Ramayana hanya mengisahkan kanda pertama hingga kanda keenam, tanpa kanda ketujuh, ialah cerita Uttara kanda. Diduga Kakawin Ramayana ini bersumber pada cerita Rama karangan Pujangga Bhatti yang biasa disebut Bhatti Kawya, sedangkan nama kitabnya Ramanawadha. cerita Ramayana termasuk kesusasteraan agama Wisnu, dan Rama adalah penjelmaan Dewa Wisnu yang ketujuh.

Ketujuh kanda cerita Ramayana adalah :

Ballakanda, yang mengisahkan Rama sewaktu masih muda.

Ayodhya kanda, yang mengisahkan ketika Rama di Negeri Ayodhya hingga mendapatkan Dewi Sinta.

Wana kanda, mengisahkan Rama ketika di hutan, hingga tercucinya Dewi Sinta oleh raksasa Rahwana.

Kishinda kanda, mengisahkan pada waktu Rama bersahabat dengan Sugriwa hingga terbunuhnya Subali.

Sundara kanda, mengisahkan waktu Hanoman diperintahkan ke Negeri Langka dan mengagumi keindahan Negeri Langka.

Yudha kanda, mengisahkan pembuatan jembatan yang berakhir dengan peperangan antara tentara dengan kera. Melawan rakyat dari Langka.

Kisah Ramayana ini dapat dilihat pada relief Percandian Lara Jonggrang.

Tentang perkembangan seni suara pada zaman kekuasaan Sanjayawangsa dan Sailendrawangsa, telah dapat kita ketahui berdasar gambar-gambar pada relief Percandian di daerah Jawa Tengah dan juga dari kata-kata pada parasati-prasasti di Jawa Tengah dan khususnya di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Seni suara pada masa itu kita bedakan menjadi dua macam, vokal dan instrumental.

Seni suara vokal

Pada prasasti Kedu, buatan Raja Balitung terdapat kata-kata *Widu si majadut, Maganding si Krsni*.³⁹⁾ Dari kata-kata itu dapat kita ketahui, bahwa pada masa itu telah ada seorang *Widu*, ialah seorang tukang cerita, atau seorang dalang dan *Maganding* ialah seorang lurah gending. Sedang pada piagam Gata, berangka tahun 693 C, masa Raja Sanjaya, terdapat kata: *widu mangidung*, yang berarti seorang penyanyi kidung. Kata *widu mangidung* ini terdapat juga pada piagam Candi Lor dan Siman. Hanya bagaimana dan apakah yang dinyanyikan kita tak dapat mengetahui. Dengan berpegang kepada ketentuan-ketentuan puisi kakawin, orang dapat mengetahui bagaimana cara membaca dan melagukan Kakawin Ramayana itu. Hal ini mungkin sama dengan pembacaan kitab-kitab Kakawin yang dilakukan oleh orang Bali sekarang.

Sedang dari relief Tandawa pada Percandian Lara Jonggrang selain relief Siwa menari, juga terdapat relief orang wanita penghuni surga. Kemungkinan besar menggambarkan tiga orang bidadari yang bertugas menyanyi untuk mengiringi tarian Siwa, bersama para penghuni surga lainnya yang berjenis laki-laki, yang bertugas memukul bunyi-bunyian.

Seni suara intrumental

Tentang perkembangan seni suara instrumental ini tidak ada ubahnya dengan seni suara vokal, sumber-sumbernya tidak didapatkan dari relief-relief candi dan piagam-piagam. Alat bunyi-bunyian yang ada pada masa itu kebanyakan dibunyikan dengan cara dipukul, ada pula dipetik dan ditiup. Yang dengan cara digesek, belum kita dapati.

Bahan yang digunakan macam-macam, dari keramik kayu, bambu, dan logam.

Nama alat bunyi-bunyian yang ada pada dalam jaman kekuasaan Sanjayawangsa dan Sailendrawangsa antara-lain: kecapi batang, kecapi dengan tiga senar, keroncong, seruling , lurus maupun seruling melintang, genta besar, genta kecil. kendang, saron, dan lain-lainnya ⁴⁰⁾ Bagaimanakah lagu atau gending yang dibawakannya, hingga sekarang orang tidak dapat mengetahuinya.

3.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan/Agama

Telah kita ketahui bahwa jaman kuna ini adalah semasa bangsa Indonesia yang telah memiliki kebudayaan seperti diuraikan pada jaman Prasejarah, kemudian mendapatkan pengaruh budaya dari India. Dengan sendirinya alam pikiran dan kepercayaan agama bangsa Indonesia pada jaman itu merupakan campuran dari alam pikiran dan kepercayaan bangsa Indonesia jaman Prasejarah dengan alam pikiran dan kepercayaan orang India yang dibawa masuk ke Indonesia.

Bagaimanakah proses percampuran ini, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti. Hanya hasil percampuran ini dapat kita kira-kira berdasarkan peninggalan yang ada pada masa itu, baik dari tulisan pada prasasti dan kitab-kitab hasil kesusastraan, maupun dari peninggalan bangunan yang ada. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sumber-sumber itu terutama hanya yang berasal dari jaman kekuasaan Sanjayawangsa dan Sailendrawangsa.

3.4.1 Perkembangan Agama

Dari piagam tertua yang terdapat di daerah Jawa Tengah, kita ketahui bahwa agama Siwa telah ada pada waktu itu. Piagam Canggal menunjukkan bahwa yang dianut oleh Rake Mataram sang Ratu Sanjaya, adalah memuja kepada Dewa-dewa Siwa, Brahma dan Wisnu, hanya Dewa Siwa nampaknya menduduki tempat yang terpenting. Seperti kita ketahui Dewa Siwa pada piagam itu dipuja dengan syair pujaan yang terdiri atas satu bait. ⁴²⁾ Selain dari piagam-piagam Canggal,

terlihat pula gambar-gambar pada Percandian Dieng dan Percandian Lara Jonggrang.

3.4.1.1 Agama Hindu

Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, agama yang berkembang pada jaman kuna, khususnya pada jaman kekuasaan Sanjayawangsa, sumber utamanya adalah peninggalan pencandian Lara Jonggrang dan hasil kesusasteraan : Kakawin Ramayana. Di sini dapat diketahui, bahwa kepercayaan asli bangsa Indonesia, ialah: pemujaan kepada roh nenek-moyang, telah diperpadukan dengan pemujaan terhadap Trimuti, ialah Siwa, Brahma, dan Wisnu.

Dewa Siwa dalam perwujudannya ada beberapa macam ialah: Siwa Mahadewa, sebagai dewa tertinggi, merajai semua dewa. Siwa Mahaguru, atau Agastya, yang dalam perwayangannya sebagai Narada, guru umat manusia. Siwa Mahakala, sebagai dewa pemusnah segala sesuatu yang di dalam pewayangannya diwujudkan sebagai Batara Kala. Siwa Nandiswara, sebagai dewa raja ternak. Sedang Dewa Wisnu, adalah sebagai dewa pembina ketentraman dunia, tempat berlindung umat manusia, dan yang selalu menjelma manusia, untuk memberantas kekacauan dunia. Adapun Dewa Brahma, adalah sebagai pencipta dunia, tepatlah seperti sejarah asal-usul terjadinya Dewa Brahma.

Peninggalan kitab suci agama Hindu barulah kita jumpai dari jaman kekasan Raja Sindok, yang bernama : Brahmanapurana. Kitab ini berbahasa Jawa kuna, dan berbentuk prosa. Kemudian pada abad XIII, terdapatlah pula Brahmanapurana dalam bentuk kakawin. Kitab Brahmanapurana ini tidak berbeda dengan kitab purana yang lain, terbagi atas pancalaksana, ialah *Sarga*, *Pratsisarga*, *Wamsa*, *Manwantarani*, dan yang terakhir *Wamsanucanta*. Juga berisi keterangan tentang Caturwarna (Brahamana, Ksatriya, Waisya, Sudra), tentang Catur asrama (Brahmacarri, Ghrhastha, Wana prasatya, Samyasin), tetang Catur yuga (*Krtayuga*, *Traitayuga*, *Dwiparayuga*, *Kaliyuga*), tentang weda dan lain-lainnya.⁴³⁾

Sebagai tujuan hidup manusia pada masa itu adalah untuk tercapainya apa yang disebut: *Triwarga*, atau tiga golongan ialah:

Dharma, Artha, dan Kama. Dari ketiga tujuan hidup ini, berdasar kitab-kitab yang berbahasa Jawa Kuna, maka Dharma yang menduduki tempat yang pertama, dan barulah menyusul Artha, dan kemudian Kama. Untuk ini, ada kutipan dari Ramayana kakawin, pada bagian permulaan ajaran Rama yang ditunjukkan kepada Bharata, mengenai kewajiban raja yang berupa ringkasan arti Triwarga untuk raja yang jujur.

Terjemahannya:

Gedung-gedung dewa, biara-bara dan yayasan-yayasan sesama untuk pekerja baik peliharakan juga olehmu.

Kumpulkan emas yang banyak dan simpan itu dengan seksama untuk diabdikan kepada pekerjaan baik.

Nikmati kesenangan dengan memberi kesempatan untuk bersenang-senang kepada rakyatmu,

Itulah yang disebut orang: *dharma, artha, dan kama.*

Dharma bagi raja itu berarti memberi kesempatan pada rakyatnya untuk dapat memenuhi kewajiban ibadat dan susila mereka, dengan jalan kebaktian dan melakukan hidup kebatinan.

Kekayaan (*artha*) bagi raja hendaknya dipergunakan untuk menjaga kehidupan orang lain hingga luput dari kesukaran. Dan kenikmatan (*kama*) bagi raja hendaknya diperoleh dengan jalan memberi kesempatan kepada orang lain untuk dapat merasakan kenikmatan. Semangat menguntungkan diri sendiri yang biasanya terletak dalam perjuangan untuk memperoleh harta-benda dan kenikmatan, harus dijauhkan. Raja harus menjaga dan memberi orang lain kesempatan untuk menjaminnya. Triwarga untuk raja yang bijaksana memungkinkan rakyatnya untuk dapat mencapai Triwarga.⁴⁴⁾

Demikianlah perkembangan agama Siwa di Jawa Tengah pada masa Sanjayawangsa yang tentunya berpengaruh juga pada masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masa itu.

3.4.1.2 Agama Budha

Pada masa kekuasaan Sailedarwangsa di Jawa Tengah yang ternyata peninggalannya sebagai besar terletak di daerah Jawa Tengah sebelah barat, termasuk juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkembanglah agama Budha aliran Mahayana. Seperti kita ketahui

berdasarkan berita Cina, pada abad VI di Jawa Tengah pernah tersebar luas kepercayaan agama Budha Hinayana, dengan nama pendeta besarnya: Jnanabhadra. Dan dikatakan pula bahwa kisah Sang Budha Gautama dalam ceritera Buddhacarita telah tersiar luas pada masyarakat Jawa Tengah masa itu.

Tetapi kemudian datanglah pengaruh budaya baru, yang diperkirakan berasal dari India Utara, yang bercorak agama Budha Mahayana, pada masa kekuasaan Sailendrawangsa.

Tentang agama Budha Mahayana yang berkembang pada masa itu, pada kita lihat pada corak, bentuk, dan relief serta arca-arcaanya dari peninggalan bangunan yang terdapat pada masa itu, seperti: Candi Borobudur, Mendut, Kalasan, Sari, Plaosan, Sewu, Banyuniba, dan lain-lainnya. Sedang kitab agama Budha Mahayana dari jaman itu, barula kita jumpai dari jaman Raja Sindok, yang bernama: Sang Hyang Kamahayanikan, yang disusun oleh Sri Sambharasuyawarna, Kitab Sang Hyang Kamahayanika ini termasuk ajaran Tantrayana, yang menguraikan tentang *mandala*, *samadhi*, latihan, pernafasan, perbandingan antara bermacam-macam Budha dan Dwinya, nama-nama aliran dan ajarannnya serta perwatakan, tempat, warna, dan sikap tangan Dewa agama Budha yang tertentu.⁴⁵⁾

Kitab ini juga berisikan : Lima pokok Landasan Agama Budha, ialah:

- a. Mengikuti sang Tri Ratna (Budha, Dharmam Sangala)
- b. Mengikuti Empat Kasunyataan Mulia (Aryasatyani) dan Dalam Arya Beruas Delapan (Astanyhikamarga)
- c. Mengikuti tiga corak universal
- d. Mengakui Prasetya Samutpada (Hukum kejadian yang saling bergantung), dan
- e. Mengakui karma (*Parwakarama dan Karmapala*) dan *Tumimbal laksi*⁴⁶⁾

Kelima landasan agama Budha ini dalam Kitab Sang Hyang Kamahayanikan diterangkan dengan jelas cara pengamalannya semuanya sesuai dengan relief yang terdapat di Candi Borobudur. Agama Budha yang berkembang pada masa itu telah mendapat pengaruh aliran Sahtisme. Dengan terjadinya perkawinan antara Pramodhawadbani dari

keluarga Sailendra dengan sang Ratu Pikatan dari keluarga Sanjaya terjadi pula saling mempengaruhi antara agama Budha Mahayana dengan agama Siwa.

3.4.2 *Bangunan Agama*

Bangunan agama atau kepercayaan yang dimiliki rakyat banyak yang bertempat tinggal di desa-desa, dipelosok-pelosok dan di puncak-puncak gunung adalah berupa bangunan Dunden, yang menunjukkan lanjutan dari zaman prasejarah, Bangunan-bangunan macam ini tidak mengalami banyak perubahan. Juga dalam perkembangan pada zaman-jaman selanjutnya, bahkan hingga sekarang. Ujud bangunan punden ini pun tidak selalu sama, ada yang berupa batu, pohon besar, danau, telaga atau beji, dan lain sebagainya.

Bangunan agama yang bercorak agama Siwa tentunya selain yang menggunakan bahan sungai seperti yang masih dapat kita lihat hingga sekarang, juga dari bahan yang tidak permanen, seperti bambu, kayu, dan lain-lainnya. Tempat-tempat ini dapat merupakan tempat menuju kepada Dewa Tertinggi Siwa Mahadewa, yang sering pula diwujudkan berupa Lingga-Yoni. Dapat pula berfungsi sebagai tempat makam, yang kemudian berfungsi pula sebagai tempat pemujaan kepada sang Dewa Tertinggi, atau juga tempat pemujaan kepada Roh nenek moyang yang telah menjadi Dewa. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Percandian Lara Jonggrang itulah suatu bangunan agama Siwa yang sangat megah dan mengagumkan. Keindahan dan keagungan Percandian Lara Jonggrang di Prambanan sukar dicari bandinganya.

Sedang untuk agama Budha selain berupa bangunan Wihara baik yang dari bahan permanen maupun tidak permanen, juga bangunan Chaitya dan bangunan lainnya, yang berfungsi untuk tempat pemujaan kepada dewa-dewa ataupun dewi-dewi agama Budha. Bangunan Chaitya yang terindah dan terbesar di Indonesia yang juga merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia ialah Chaitya Borobudur, Sedang bangunan agama Budha yang terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Candi Kalasan, tempat pemujaan kepada Dewi Tara, seorang dewi yang sangat terkenal dalam patheon agama Budha. Bangunan agama Budha yang tidak kalah kasar dan indahnya dengan

bangunan lain adalah bangunan pemujaan Candi Sewu, yang terletak di daerah daratan Prambanan, termasuk daerah Tingkat II Klaten.

Peninggalan-peninggalan bangunan wihara yang merupakan tempat kegiatan penganut agama Budha dalam usaha mengembangkan agamanya, selain wihara Sari dan Plaoson, juga peninggalan wihara yang terbuat dari bahan tidak permanen yang terletak di sebelah selatan Candi Kalasan dan di sebelah barat Candi Borobudur.

3.5 Hubungan ke Luar

Sudah sejak permulaan jaman Kuna, Indonesia telah mempunyai hubungan dengan India dan Cina. Hal ini dapat diketahui berdasar atas piagam tertua di Indonesia, dengan melihat pada huruf yang dipergunakannya, bahasa, nama orang, kepercayaan yang dianutnya dan sebagainya, yang jelas berasal dari India, baik India Selatan maupun India Utara. Hubungan ini nampaknya berlangsung terus hingga abad IX. Sedang hubungan Indonesia dengan Cina dapat diketahui dari berita-berita yang berasal dari Cina. Hubungan dengan Cina ini ternyata berlangsung terus hingga zaman Majapahit. Seperti kita ketahui, di Negeri Cina, ada suatu kebiasaan, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masa dinasti-dinasti yang berkuasa selalu dicatat.

Dengan demikian, pada masa kekuasaan Sanjayawangsa dan Sailendrawangsa Jawa Tengah mempunyai hubungan dengan India ataupun Cina.

3.5.1 Bentuk Hubungan

Indonesia yang terletak di antara India dan Cina menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari India yang akan berlayar ke Cina atau sebaliknya, untuk menambah bahan bakar dan untuk istirahat.

Kemudian beberapa tempat di Indonesia merupakan tempat koloni perdagangan orang India. Tempat-tempat koloni ini kemudian berubah menjadi pusat-pusat kebudayaan orang India. Sehingga hubungan yang mula-mulanya bersifat perdagangan berubah menjadi hubungan kebudayaan, termasuk kepercayaan, seni bangunan, kesusasteraan dan sebagainya.

Pada masa Sanjayawangsa dan Sailendarawangsa hubungan kebudayaan ini nampak dalam hal kepercayaan, seni bangunan kesusasteraan dan sebagainya. Secara tidak langsung inskripsi Nalanda juga menunjukkan adanya hubungan dengan Jawa. Raja Dewapaladewa yang memerintah India Utara antara tahun 853 sampai 893, menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa, seorang raja di Suwarmadwipa, dilahirkan dari Dewi Tara, putri Dharmaseta, yang mempersuamikan seorang raja, putra Sri Wirawairimathana Raja Yawabhumi, seorang Sailendrawangsatilaka ⁴⁷⁾.

Dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan, nampaklah bahwa hubungan Sanjayawangsa dengan India, hanyalah terpengaruhnya oleh kebudayaan India. Tanda-tanda sebagai tanah jajahan, jelas tidak kita sepakati.

Tentang Sailendrawangsa memang ada tanda-tanda, bahwa mempunyai hubungan keluarga dengan Sriwijaya, bahkan mungkin dengan kerajaan lain diluar Indonesia. Diperkirakan bahwa keluarga Sailendra itu asalnya dari luar Jawa, karenanya maka setelah Balaputradewa dikalahkan oleh Rakai Pikatan, seperti disebutkan dalam inskripsi tahun 856 yang diketemukan di Bukit Ratu Baka, akhirnya Balaputradewa meninggalkan Jawa Tengah dan kemudian dengan cara yang tidak diketahui berkuasa di Suwarnabhumi, ialah Sumatra. Jadi nampaklah adanya perbedaan antara kedudukan Sanjayawangsa dan Sailendrawangsa di Jawa Tengah, hubungannya dengan daerah di luar Jawa ataupun di luar Indonesia.

Tentang hubungannya keluarga Sanjaya dan Sailendra dengan negara Cina, hanyalah dapat kita ketahui berdasarkan berita dari Cina, yang antara lain menerangkan, bahwa pada masa dinasti Tang (618-906), pada tahun 831,827,835,860,873, Kaling (Jawa) mengirimkan utusan ke Cina. ⁴⁸⁾ dengan membawa bingkisan, sebagai tanda persahabatan. Jadi hubungan ini berbentuk hubungan kenegaraan, yang bersifat hubungan perdagangan.

3.5.2 *Akibat hubungan*

Akibat hubungan dengan India itu, di Jawa Tengah banyak terdapat peninggalan dan hasil kesenian, yang menunjukkan adanya pengaruh

kebudayaan India. Sehingga ada yang menyebutkan zaman Jawa Tengah itu dengan istilah Zaman Hindu Jawa, karena unsur budaya India sangat menonjol sedang zaman Jawa Timur, disebut zaman Jawa Hindu, karena unsur budaya Jawa lebih menonjol.

Sedang dari kebudayaan Cina nampaknya tak berbekas. dari hasil budaya zaman Jawa Tengah ini, ternyata bahwa unsur Jawa, atau corak budaya Indonesia aslinya, tidaklah lenyap. Unsur seni budaya, alam pikiran, dan corak masyarakat zaman Prasejarah, selalu masih nampak hasil percampuran budaya itu.

Catatan

1. Sutjipto Wirjosuparto. *Sejarah bangunan kuno Dieng*, Kalimosodo, Jakarta, 1957, halaman : 10
2. Sutjipto Wirjosuparto. *Kursus Sejarah tertulis*, nomor 14. Kementerian PP dan K Jakarta, halaman: 1.
3. Sutjipto Wirjosuparto. *Sejarah bangunan kuno Dieng*, Kalimosodo, Jakarta, 1957, halaman 11.
4. *Ibid* halaman : 11
5. *Ibid* halaman : 10
6. *Ibid* halaman : 11
7. *Ibid* halaman : 11
8. Hal ini disebutkam dalam prasasti tahun 856 M yang berbentuk syair dan berbahasa Jawa Kuno dan tiga prasasti yang diketemukan di Bukit Ratu Baka yang ketiganya mempergunakan bahasa Sansekerta.
9. Watuhumalang yang kedudukannya sebagai raja, menghadapi persitiwa yang sangat mengurangi kekuasaannya (ingatlah pada Dyah Dewendra), tak mempunyai putra mahkota, karenanya beliau mengambil menantu Dyah Balitung yang menguasai daerah Jawa Timur (Kursus Sejarah tertulis nomor 15 Indonesia Kementerian P dan K Jakata, halaman 2)

10. Bernet Kemoers A.J. dan Soekarno Seri Peninggalan Purbakala III-
Candi-candi di sekitar Prambanan, Ganaco H. V. Bandung),
Djakarta tahun 1974, halaman 16.
11. Kursus Sejarah tertulis Nomor 16 Indonesia Kementerian PP dan K
Jakatya, halaman 8.
12. Brades, Y.L.A. *Quud Javaansche Oorkonden*, Verth v/h. Bat
Gen. van Kunstenen Wetenschappen, Deel LX Ecrste Stuk,
Albrecht & Co, Batavia, 1913 halaman 74.
13. *Ibid* halaman : 120
14. -----, Kursus Sejarah tertulis Nomor 15 Indonesia,
Kementerian PP dan K Jakarta, halaman 74.
15. *Astrabata*, ialah tuntutan bagi seorang raja yang diharapkan
mengikuti jalannya delapan orang dewa mata angin. Dalam
Ramayana dituliskan menjadi delapan bait.
16. -----, *Kursus Sejarah tertulis* nomor 14 Indonesia,
Kementerian PP dan K Djakarta, halaman : 3
17. *Ibid*, nomor 13 halaman:6
18. *Ibid* nomor, 14 halaman :2
19. *Ibid* nomor 13 halaman :6
20. *Ibid* nomor 15 halaman :6
21. *Ibid* nomor 15 halaman :7
22. Stutttrheim W.F. *Inscriptie opeen zuiltje van Papringan*. Tijds,
voor Taal-landen Volkekunden, Deel LXXIII, 1933, halaman: 99.
23. -----, *Kursus Sejarah tertulis* nomor 13. Indonesia
Kementerian P dan K Jakarta, halaman :6
24. *Ibid* nomor 14 halaman: 7
25. Kalang, sering juga disebut: Kambeng, ialah istilah untuk sebutam
seorang ahli bangunan rumah. Kawruh kalang, berarti ilmu
tenang bangunan rumah (Arsitektur).
26. Undahagi, atau disingkat: undagi, pada jaman sekarang khusus
untuk ahli-ahli pembuatan barang-barang (meja, kursi, almari, dan

- sebagainya) dari bahan kayu (meubel, maker). Kampung tempat tinggal para undagi, disebut Dangen-(undagi-an = undagian=dagen)
27. Kapal dewasa itu dapat kita lihat pada relief di Borobudur yang memakai layar lebih dari sebuah, memakai candik (sayap), kiri-kanan, yang boleh karenanya tidak dapat terbalik.
 28. de Casparis, Y.G. *Sedikit tentang golongan-golongan di dalam masyarakat jawa Kuno*, Amerta 2, Dinas Purbakala Republik Indonesia, 1954, halaman 46.
 29. *Padepokan*, merupakan sistem persekolahan, yang juga dianut oleh Taman Siswa, ialah bahwa tempat anak bersekolah juga harus ada tempat tinggal guru, dan tempat tinggal siswa.
 30. Pada *Pacrabakan*, didalam pedalangan siswa-siswinya terdiri atas putri maupun putra, dengan nama : Cantrik, mentrik, jejanggan, manguyu dan sebagainya.
 31. Cerita penolakan seorang siswa karena keturunan dari seorang Sudra, terdapat pada cerita. Ekalaya, dalam Adiparwa. Dalam cerita padalangan kita demikianlah halnya, sehingga unsur penolakan karena keturunan sudra tidaklah ada lagi.
 32. Bernet Kernepers, A.J dan Soekomono, *Candi-candi di sekitar Prambanan*, Seri Peninggalan Purbakala III, Ganaco NV. Bandung. 1974, halaman :55
 33. *Ibid*- halaman :57
 34. Gambar gadis menari pada relief Ramayana di Percandian Lara Jonggrang ini pernah dipakai sebagai lambang pada *Seminar Sejarah Nasional* pertama tahun 1955 di Yogyakarta.
 35. Strutterhein, W.E. *Een belangrijke Oorkonde uit de Kedu Tyds voor, Taala, Land en Volcknkunde*, Kon dat Gen van Kunsten en Wetenschappen Deel LXVII alf 1 en 2 1927. Halaman: 209
 36. Purbacaraka/R.M/ Ngb. *Kapustakaan Djawi*, Djambatan Djakarta, 1952, halaman:2
 37. *Ibid* - halaman :2

38. Berg C.C. Kidung Sundayana, De Bliksem, Surakarta 1928, halaman:54
39. Stutterheim W.F. *Een belangrijke Oorkonde uit de Kedu* Tijdsch voor taal Land en Volkenkunde, Kon Bat Gen. van Kusten en Wetenschappen, Deel LXVII alf I en 2, 1927, halaman :209
40. Kunst, J, *Hindoe Javaansche Muzeik Instrument*, Kon. Bat Geen van Kunsten en Weltevreden 1926. halaman :138 sampai dengan 141.
41. Kern, H. *Het Sanskrit-inschrift van Tuk Mas (Dakawu, res Kedu:± 500 A.P.) versoreide Geschriften zevende deel*, Martinus Nyhoft's Gravenhage, 1917-halaman :203.
42. Kern, H. *De Sanskrit ins riptie van Canggal (Kedu), uit-654 Saka. Versp. Geschriften, zevende deel*, Bijdr tot de Taal-Land en Volkenkunde van Ned. Indie, 4 e volgrees, Deel X 's Gravenhage, 1885-halaman:121.
43. Purbatjaraka, R.M. Ngb. *Kapustakaan Djawi*, Djamabatan, Djakarta, 1952, halaman:6.
44. Zoetmulder, P.J. *Triwarga dalam kesusasteraan Djawa Kuna*, masyarakat Sana budaya, Tahun Ke I Nomor 1, Yogyakarta 1955, halaman:8.
45. Kats,J. Sang Hyang Kamahayanikan, Kon. Inst.Voor Taal, Land-volkenkunde van Ned. Indie, Martinus nijhoff s'Gravenhage, 1910-halaman:4.
46. Jasmin, S Saduran: *Kitab Suci Sang Hyang Kamahayanikan*, UPD Perbuddhi Jawa Tengah, 1971, halaman:2.
47. Norder, J. *Inleiding tot de oude gesschiedinis van den Indris chen Archipel*.H.P. Leoplds Uitgeverij. My.N.V.Den Haag, 1948, halaman:57.
48. Groeneveldt,W.P.*Historical notes on Indonesia and Malaya complited from Chinese Sources*.CV. Bharata, Jakarta, 1960, halaman:14 dan 15.

BAB IV

ZAMAN BARU ($\pm$ 1500 M - 1800 M)

4.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan

Karena mempunyai jasa yang sangat besar terhadap Sultan Pajang, Kyai Ageng Pemanahan mendapat daerah Mataram sebagai hadiah. Daerah yang berpusat di Kota Gede itu sangat makmur dan ramai dalam perdagangan. Dalam perkembangan selanjutnya daerah tersebut menjadi daerah yang penting dan menggantikan kedudukan Pajang. Pada tahun 1575 Kyai Ageng Pemanahan mangkat dan digantikan oleh putranya Sutowijoyo. Tokoh muda itu mengetahui adanya kelemahan kerajaan Pajang dan karena itu bermaksud mengambil keuntungan dari kelemahan tersebut. Ia menyatukan beberapa daerah yang tidak suka berlindung di bawah kekuasaan Pajang, dan menghalang-halangi para bupati daerah-daerah yang letaknya di sebelah barat Mataram yang akan mempersembahkan upeti ke Pajang. Tentu saja Sultan Pajang tidak suka terhadap tindakan Sutowijoyo itu, sehingga terjadilah perang antara Pajang dan Mataram, yang dimenangkan oleh fihak Mataram. Setelah dapat merobohkan ke-rajaan Pajang, Sutowijoyo memindahkan segala alat upacara kebesaran kerajaan Pajang ke Mataram. Sejak itu (tahun 1586) berdirilah kerajaan baru, kerajaan Mataram dengan Sutowijoyo sebagai raja pertamanya yang bergelar Senopati ing Alogo Sayidin Panotogomo.

Kekuasaan raja Mataram yang pertama itu hanya meliputi daerah Mataram, Kedu dan Banyumas. Sebenarnya Pajang dikuasainya juga, tetapi daerah-daerah yang dulu termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Pajang tidak mau tunduk. Malahan daerah-daerah yang dulu dikuasi oleh kerajaan Demak pun tidak mau tunduk. Sementara itu daerah-daerah pesisir juga selalu menentang senopati. Dengan demikian secara ringkas dapatlah dikatakan bahwa Raja Mataram tersebut harus selalu berhadapan dengan partai Pajang, yang terdiri atas Pajang dan semua Pelabuhan Jawa Timur, dan Pantai demak, yang terdiri atas Demak, yang terdiri atas Demak dan sekitarnya. Kelompok Pajang selalu dibantu oleh Surabaya yang sudah menjadi bandar yang besar serta kuat, Adanya lawan-lawan itu menyebabkan masa Pemerintahan Senopati selalu terisi dengan kegiatan peperangan sebab pemberontakan selalu timbul meskipun setiap pemberontakan selalu dipadamkan dengan kekerasan.

Sebenarnya Senopati bercita-cita mempersatukan Pulau Jawa, termasuk Banten. Tetapi terlebih dahulu ia akan berusaha mempersatukan daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sesudah itu baru berusaha menundukkan Banten. Selanjutnya, jika cita-cita itu sudah tercapai, Mataram akan berusaha terus, sehingga dapat menguasai perdagangan internasional di Asia Selatan.

Sebagai langkah pertama ke arah tujuan tersebut, pada tahun 1595 Mataram menundukkan Cirebon dan menempatkan daerah ini di bawah kekuasaan Mataram.

Pada tahun 1601 Penembahan Senopati mangkat dan digantikan oleh putranya yaitu sultan Anyokrowati. Pada awal masa pemerintahan Sultan yang baru itu Mataram belum kuat dan mengalami beberapa kesukaran, sebab pada waktu itu banyak daerah yang tidak mau tunduk kepada kekuasaannya. Sementara itu bangsa Belanda telah datang ke Indonesia.

Pada tahun 1613 Sultan Anyokrowati mangkat di desa Krapyak, Kedu, dan sejak itu disebut Panembahan Sedo Krapyak, sesudah itu muncullah Sultan Agung Anyokrokusuma pada tahun 1613. Pada waktu itu Indonesia tidak merupakan kesatuan, tetapi terpecah-pecah atas beberapa daerah yang masing-masing berdiri sendiri, malahan saling

bertentangan. Di pulau Jawa saja ada beberapa kerajaan, yaitu Mataram, Banten, Cirebon, Surabaya dan Giri. Sultan Agung Anyokrokusuma bercita-cita mempersatukan Indonesia dan menguasai perdagangan internasional di Asia Tenggara. Sebagai langkah pertama ke arah tujuan tersebut, lebih dulu ia harus mempersatukan pulau Jawa dan Madura. Oleh sebab itu, secara berturut-turut ditaklukanlah : Wirosobo pada tahun 1615, Lasem pada tahun 1615 juga, Pasuruhan pada tahun 1616, Gresik pada tahun 1618 (kemudian juga pada tahun 1622), Tuban pada tahun 1619, Sukadana di Kalimantan (karena sekutu Surabaya) pada tahun 1622, dan Surabaya pada tahun 1625. Kemudian usaha itu dilanjutkan dengan penaklukan Balambangan pada tahun 1635, malahan juga bermaksud menaklukan Bali pada tahun 1639 tetapi tidak berhasil. Sementara itu Sultan Agung harus memadamkan pemberontakan Pati pada tahun 1627. Peperangan yang terus menerus dilakukan oleh Mataram itu mengakibatkan nasib yang menyedihkan bagi perdagangan laut Jawa. Kota-kota pantai yang mau tunduk kepada Mataram dihancurkan, sehingga banyak saudagar pantai Utara Jawa pindah ke Makasar dan Banjarmasin, Hal tersebut berarti matinya perdagangan, termasuk perdagangan rempah-rempah yang melalui Jawa.

Selanjutnya, supaya dapat menguasai seluruh Jawa Sultan Agung harus pula bergerak ke barat, sebab disitu ada kekuatan-kekuatan yang dapat menjadi penghalang tercapainya cita-cita persatuan, yaitu kesultanan Banten dan orang-orang Belanda di Batavia. (sebenarnya, kesultanan Banten itu bermusuhan juga dengan orang-orang Belanda yang bercokol di Batavia tersebut. Tetapi karena takut pada ancaman dari Mataram, untuk sementara waktu Banten membiarkan saja Batavia). Sementara itu karena Batavia menolak ajakan Mataram untuk memukul Banten bersama-sama, hubungan antara Mataram dan Batavia menjadi tegang, akhirnya malah berubah menjadi perang secara terbuka.

Pada tahun 1628 Batavia diserbu oleh tentara Mataram, tetapi Batavia yang dipimpin oleh J.P. Coen itu dapat mempertahankan diri. Pada tahun 1629 Batavia mendapat serbuan yang kedua kalinya dari Mataram. Meskipun Belanda masih dapat mempertahankan diri tetapi, konon karena serbuan tersebut J.P. Coen mati tertembak.

Jelaslah bahwa usaha Sultan Agung merebut dan menaklukan Batavia tidak berhasil. Tetapi, raja yang berpendirian teguh itu tidak

terputus asa, akan berusaha terus ke arah tercapainya cita-cita, meskipun harus dengan jalan lain, yaitu jalan politik dan jalan ekonomi. Beliau mengusahakan hubungan yang lebih baik dengan bangsa Portugis yang berkedudukan di Malaka, sementara itu beliau melarang rakyat Mataram menjual beras kepada pihak Belanda. Dalam hal impor dan ekspor, Mataram menggunakan Malaka sebagai jalan atau pintu gerbang.

Pada tahun 1645 Sultan Agung mangkat dan digantikan oleh putranya, Amangkurat I, yang memerintahkan pada tahun 1646--1677. Raja baru itu bersikap lemah terhadap Belanda. Dalam perjanjian pada tahun 1646 Mataram mengakui kedaulatan Belanda di Batavia, sebaliknya Mataram boleh berdagang secara bebas kecuali di ternate, Ambon, dan Banda. Sejak itu Mataram dibatasi kegiatannya dalam perdagangan, sedangkan Belanda makin dapat bergerak dengan leluasa, khususnya dalam perdagangan.

Di dalam negeri, Raja Amangkurat I tidak populer sebab ia tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat kepada utusan VOC Rijcklof van Guns, ia pernah mengatakan bahwa rakyatnya tidak mempunyai hak untuk hidup makmur bahwa ia tidak pernah memperhatikan kemakmuran rakyat itu, dan bahwa kemakmuran rakyat itu hanya akan merupakan bahaya bagi kekuasaannya. Amangkurat I takut terhadap tumbuhnya kekayaan para bangsawan (terutama bangsawan pasisir), yang dapat dipakai sebagai bekal untuk mengadakan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Adapun langkah yang diambil untuk membatasi kekayaan para bangsawan itu ialah mengadakan monopoli beras dan mengadakan larangan pelayaran. Akibat peraturan tersebut perdagangan di pantai Jawa Timur, pada tahun 1657 orang-orang Jawa tidak lagi dapat mengurus sendiri pengiriman beras ke Batavia dengan kapal, dan pada tahun 1677 orang-orang Jawa sudah boleh dikatakan tidak lagi mempunyai kecakapan di luar, Raja Amangkurat I juga bersikap tidak bijaksana terhadap para alim ulama, sehingga para alim ulama itu menentang kekuasaannya. Oposisi terhadap raja, tidak saja datang dari pihak yang di luar istana, tetapi juga datang dari putra mahkota, Adipati Anom, yang bersekutu dengan Trunojoyo, seorang pangeran dari Madura. Dalam kedudukannya sebagai sekutu Trunojoyo Adipati Anom dibantu oleh Kraeng Galesong, seorang tokoh pejuang

dari Sulawesi Selatan yang karena tidak dapat menyetujui perjanjian Bungaya, menyeberang ke Jawa, dan kemudian bermukim di Jawa Timur dengan para pengikutnya. Kecuali itu masih ada pula pendukung putra mahkota Mataram tersebut, yaitu Pangeran Giri seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan bersikap anti kepada Mataram. Pada tahun 1674 timbullah pemberontakan yang dipimpin oleh Trunojoyo dengan bantuan Pangeran Puger dan Kraeng Galesong. Pemberontakan itu berlangsung dengan hebatnya, dan dalam waktu yang singkat Madura dan Jawa Timur dapat dikuasai oleh para pemberontak.

Sementara itu Adipati Anom, yang semula bersekutu dengan para pemimpin pemberontakan, karena takut akan nasibnya dikemudian hari, lalu menjauhi Trunojoyo. Melihat sikap putra mahkota Mataram yang ragu-ragu itu, Trunojoyo menjadi sangsi, kurang percaya bahwa sahabatnya itu tetap setia pada persekutuan yang telah dibuat bersama. Karena itu tokoh dari Madura itu segera menduduki Kerta pada tahun 1677 dan membawa alat-alat tanda legitimitas kerajaan ke Jawa Timur, tempat ia mendapat dukungan yang besar dan mendirikan kerajaan yang berpusat di Kota Kediri.

Pada waktu Kerta diduduki oleh pasukan Trunojoyo maka raja Amangkurat I dan Adipati Anom serta para pengiring yang masih setia melarikan diri dengan tujuan ke Batavia untuk meminta bantuan kepada pihak Belanda. Tetapi di dalam perjalanan itu, di desa Tegalarum, wilayah Tegal, raja Mataram tersebut mangkat, dan sejak itu ia terkenal dengan sebutan Sultan Tegawangi. Sebelum mangkat, raja Amangkurat I menunjuk Adipati Anom sebagai pengganti dengan gelar Amangkurat II. Ketika itu Amangkurat II mendapat pesan agar pergi ke Batavia minta pertolongan kepada Belanda. Amangkurat II tidak pergi ke Batavia, tetapi hanya ke Jepara. Di situ ia bertemu dengan Cornelis Speelman yang mewakili pemerintahan Batavia. Dalam pertemuan tersebut raja Mataram yang baru itu bersedia menandatangani sebuah perjanjian yang sangat merugikan pihak Mataram. Dalam perjanjian tersebut (1678) ditentukan bahwa:

1. Semua pelabuhan di pesisir utara dari Karawang sampai di ujung Jawa yang paling Timur di gadaikan kepada VOC

2. Pelabuhan - pelabuhan itu dikembalikan kepada raja Mataram, jika semua hutangnya sudah dibayar.
3. Semua daerah yang terletak di sebelah barat garis kali Pamanukan hingga Laut Selatan diakui termasuk daerah Belanda.
4. VOC memegang monopoli pemasukan kain dari India dan Persia serta beras di seluruh Mataram.
5. Kartasura diberi pengawal tentara Belanda.

Bupati Jepara, Wongso Dipo menolak permintaan VOC, karena Bupati itu merasa tak dapat menyerahkan Kerawang dan Priangan, di samping itu ia berpendapat bahwa perjanjian tersebut sangat, menghina Mataram.

Sesudah penandatanganan perjanjian tersebut tentara Belanda menyerang pertahanan Trunojoyo di Kediri. Tentara Belanda dipimpin oleh Anthony Hurl, yang mendapat bantuan dari orang Bugis dan Ambon di bawah pimpinan Jongker. Karena serangan tersebut Trunojoyo terdesak, kemudian menyerah di Ngantang dan akhirnya mendapat hukuman mati, sesudah Trunojoyo, Pangeran Giri mendapat gilirannya pula.

Dengan padanya pemberontakan tersebut maka padam pula sinar kejayaan Mataram, Mataram menjadi vasal Belanda. Semetara itu, karena Kerta pernah diduduki oleh musuh, tidak dipakai lagi sebagai ibu kota. Ibu kota Mataram dipindahkan ke Kratosuro.

Sesudah itu dengan alasan untuk menjaga Keraton dari serangan musuh, Belanda menempatkan satu Batalyon tentaranya di Kartosuro. Dengan siasat ini Belanda dapat mengawasi segala gerak-gerik Mataram.

Pada tahun 1684 datanglah ke Mataram Untung Suropati dengan pasukannya. Kedatangan musuh Belanda itu telah menyebabkan Raja Amangkurat II menjadi sedikit berani terhadap Belanda raja Mataram yang menyesali perjanjian yang telah dibuat dengan Belanda itu, bersikap membantu Untung Suropati. Ketika Belanda dibawah pimpinan Kapten Tack datang ke Mataram untuk menyelesaikan hutang piutang pasukan senopati dibiarkan bertindak bebas terhadap pasukan

asing itu. Dengan demikian terjadilah pertempuran terjadi antara dua pasukan tersebut, sehingga Kapten Tack mati terbunuh. Tetapi sesudah peristiwa itu raja Amangkurat II menjadi bimbang. Ia ragu membantu dan melindungi pasukan Suropati. Untung Suropati yang mengetahui sikap Amangkurat II itu bersama-sama dengan pasukannya meninggalkan Kartosuro menuju ke Jawa Timur.

Pada tahun 1703 Raja Amangkurat II mengangkat dan digantikan oleh putranya yang sebagai raja bergelar Amangkurat III atau Sunan Mas. Jika dibandingkan dengan ayahandanya, maka Sunan Mas itu lebih bersikap berani terhadap Belanda dan karena itulah dia tidak disukai oleh Belanda. Sehubungan dengan politiknya yang bersifat anti Belanda Sunan Mas mengadakan pembersihan di dalam negeri. Akibatnya pamannya sendiri yaitu Pangeran Puger melarikan diri ke Semarang untuk minta bantuan kepada VOC. VOC menyatakan kesanggupannya untuk memberi perlindungan dan bantuan kepada Pangeran Puger sampai menjadi raja, asal ia mau menandatangani perjanjian baru. Sementara itu Sunan Mas mengirimkan utusan ke Batavia meminta kepada VOC untuk menepati perjanjian tahun 1646, yang berisi ketentuan bahwa Belanda akan mengakui dan membela Mataram bila Mataram menepati perjanjian itu juga.

Tetapi karena Batavia tidak percaya lagi kepada Sunan Mas yang dianggap memusuhi VOC, permintaan ini ditolaknya, segala hubungan dengan Sunan Mas diputuskan. Belanda melanjutkan pembicaraan dengan Pangeran Puger. Pangeran Puger bersedia menandatangani perjanjian di Semarang (1704) yang isinya sebagai berikut :

1. Semua daerah di Jawa, di sebelah barat sungai Cilosari dan Silodona (Cilacap) diserahkan kepada VOC sehingga badan dagang asing itu berdaulat sepenuhnya di daerah-daerah tersebut.
2. Madura Timur juga diserahkan kepada VOC dengan ketentuan seperti di atas.
3. Jika Raja Mataram, menepati semua perjanjian dengan VOC terutama jika pemasukan dan pengeluaran barang di Mataram tetap menjadi monopoli VOC, semua hutang Mataram dinyatakan hapus.

4. Mataram harus membayar 800 koyan beras setiap tahun dalam jangka waktu 25 tahun
5. Duaratus orang tentara Belanda dalam benteng menjaga keselamatan Sunan di Kartosuro.

Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, Belanda mengirimkan tentara ke Kartosuro untuk menaklukkan Sunan Mas. Tentara itu dibantu oleh tentara Pangeran Puger, sehingga mencapai jumlah 4.000 orang untuk menangkis serangan tersebut, Sunan Mas menggerakkan tentara sebesar 40.000 yang dipusatkan di Ungaran. Tetapi tentara Mataram yang mendapat perintah dari Sunan Mas itu tidak bergerak sama sekali, sebab panglimanya adalah pengikut Pangeran Puger. Sementara itu di Semarang baik Belanda maupun Pangeran Puger dapat mempengaruhi kejadian-kejadian di Kartosuro, sehingga mereka dapat memperhambat gerak-gerik Sunan Mas. Dengan demikian tentara gabungan Belanda-Puger yang hanya berjumlah 4000 orang itu dapat mencapai kemenangan. Pada tahun 1705 Kartosuro diduduki tentara gabungan tersebut, dan segera sesudah itu Pangeran Puger dinobatkan menjadi raja Mataram dengan gelar Paku Bowono I.

Karena tidak dapat lagi bertahan di Kartosuro, Sunan Mas meninggalkan kota tersebut dan menggabungkan diri pada fihak Untung Suropati. Tetapi sementara itu Belanda juga bergerak ke timur mengejar musuh-musuhnya. Dalam pertempuran di Bangil Untung Suropati luka berat, dan dalam perjalanannya ke Pasuruhan pahlawan tersebut gugur. Sejak itu pertahanan demi pertahanan yang diadakan oleh para pengikutnya dapat dihancurkan oleh Belanda. Setelah pertahanan pasukan Untung Suropati hancur. Sunan Mas merasa tidak lagi berdaya, lalu menghentikan perlawanan, malahan kemudian datang ke Batavia. Di Batavia ia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sri Langka. (1708).

Setelah paku Bowono I naik tahta, maka diadakan konsolidasi kerajaan, supaya kerajaan menjadi lebih kuat. Pada tahun 1714 diadakan musyawarah itu Jayengrono, bupati Suroboyo yang sangat dibenci dan ditakuti oleh Belanda. Tatkala musyawarah sedang berlangsung bupati Suroboyo itu dibunuh oleh kaki tangan Belanda. Tetapi Suroboyo

berpendapat bahwa Mataramlah yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

Peristiwa tersebut menyebabkan timbulnya perlawanan di pesisir Jawa Timur pada tahun 1714, di mana Surabaya dan sampang memegang peranan yang terpenting. Karena bantuan Belanda, Mataram dapat mematahkan perlawanan tersebut, Tetapi pada tahun 1719, tatkala ketenteraman belum dapat dipulihkan, Paku Buwono I mangkat.

Pengganti Paku Buwono I adalah Pangeran Prabu, dengan gelar Sunan Prabu, kadang-kadang juga disebut Sunan Amangkurat III, sebab Sunan Mas tidak diakui sebagai Amangkurat III. Dalam penggantian tahta itu Belanda ikut campur tangan secara terang-terangan. Hal itu menyebabkan timbulnya perasaan tidak puas di kalangan kaum bangsawan itu lalu menyingkirkan diri ke dataran tinggi Malang dan sekitarnya di Jawa Timur, di tempat tersebut mereka bersama-sama dengan anak cucu Suropati mengadakan perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1723. Tetapi perlawanan tersebut dapat dipatahkan. Di natara mereka banyak yang dibuang ke Sri Langka.

Pada tahun 1727 Sunan Prabu mangkat lalu diganti putranya. Sebagai raja, putra tersebut bernama Paku Buwono II. Pada masa pemerintahannya (1727-1749) timbul pemberontakan orang Cina terhadap kekuasaan Belanda. Pemberontakan tersebut mula-mula timbul di Batavia, kemudian menjalar ke Jawa Tengah. Benteng-benteng Belanda di Jepara, Demak, Rembang dan lain-lain diserbu oleh para pemberontak sampai saat timbulnya pemberontakan tersebut, rakyat di Kartosuro menaruh dendam kesumat terhadap Belanda. Karena itu ketika pemberontakan sampai di sana, segera mendapat sambutan dari rakyat. Benteng Belanda di ibukota Mataram itu diserbu, dan tentaranya dibunuh semua.

Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh rakyat di Kartosuro itu mendapat bantuan dari raja mereka. Tetapi, setelah pemberontakan rakyat itu berkecamuk dengan hebatnya, raja Paku Buwono II menjadi ragu-ragu, dan kemudian malahan menentang pemberontakan tersebut. Oleh sebab itu, para pemberontak lalu mengangkat raja baru, yaitu Mas Garendi, yang sering pula disebut Sunan Kuning. Tetapi ternyata bahwa pengangkatan itu menimbulkan pertentangan di kalangan para

pemberontak, sehingga dari para pemberontak ada yang memiliki Paku Buwono II.

Pada masa itu penguasa Madura Cakraningrat memihak Belanda, sebab ia mempunyai perhitungan, jika kelak Belanda mencapai kemenangan, maka ia tentu dapat berkuasa di daerah pesisir Jawa Timur, yaitu Tuban, Gresik dan sebagainya. Tatkala pada tahun 1742 Kartosuro diserbu oleh para pemberontak, Cakraningrat segera membebaskan ibu kota Mataram itu dari kekuasaan para pemberontak.

Ketika Kartosuro diserbu para pemberontak, Paku Buwono II melarikan diri ke Ponogoro. Dalam situasi yang gawat itu Belanda berperan sebagai penolong bagi Mataram lagi. Tetapi setelah menerima bantuan militer dari pihak Belanda pada tahun 1743 Mataram harus mengadakan perjanjian yang baru dengan "penolongnya" itu. Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa VOC memperoleh hak untuk mengangkat pegawai-pegawai pemerintah (rijksbestuurder) dan bupati-bupati (hoofregenten). Kecuali itu ditentukan pula bahwa Mataram harus menyerahkan daerah-daerah pantai, yaitu Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Ujung Timur Jawa dan juga sisa Madura. Sementara itu kewajiban penyerahan baru mengenai beras, nila dan katun harus dipikul pula oleh Mataram. Dalam tahun 1755, setelah perang-mahkota Jawa yang ketiga, Raja Mataram menyerahkan seluruh kerajaan Mataram kepada VOC, yang dengan demikian lalu menjadi tuan tanah (lenheer) Mataram. Dalam tahun itu juga kerajaan Mataram dibagi menjadi dua buah kerajaan, yaitu, Surakarta dan Yogyakarta. Pada tahun 1757 Surakarta dibagi menjadi dua kerajaan yaitu Mangkunegaraan dan Kasunanan. Pada tahun 1812 Yogyakarta juga dibagi menjadi dua kerajaan yaitu Kesultanan dan Pakualaman.

4.2 Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat

Gambaran yang lengkap tentang penyelenggaraan hidup dalam masyarakat Yogyakarta di antara tahun 1500 - 1800 belum dapat dilukiskan. Oleh sebab itu di sini hanya diuraikan tentang penyelenggaraan hidup dalam masyarakat Mataram dalam periode Kartosuro dengan menitik beratkan pada masalah pengaturan. Pada zaman Kerta sampai zaman Kartosuro kerajaan Mataram terbagi-bagi

atas: Daerah Kutonegoro, Daerah Negoro Agung, Daerah Monconegoro dan Daerah Pasisir.

Daerah Kutonegoro adalah pusat wilayah kerajaan. Di situ tinggalah raja beserta keluarganya dan para pejabat tinggi kerajaan. Daerah tersebut juga disebut Daerah *Norowito*, berarti tempat orang mengabdikan. Daerah Negoro Agung adalah daerah yang ada di sekitar Kutogoro. Beresama dengan Kutorogo daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah inti kerajaan. Di situ terdapat *tanah-tanah lungguh* para bangsawan Kartom atau para pejabat tinggi Kartan. Semula daerah itu hanya terdiri atas empat bagian, yakni : *Daerah Bumi*, *Daerah Siti Sewu*, *Daerah Siti Ageng* dan *Daerah Penumping*. Kemudian empat bagian itu masing-masing dipecah menjadi dua bagian. Dengan demikian seluruh Negara Agung lalu menjadi delapan buah daerah.

Adapun delapan buah daerah tersebut adalah :

1. Daerah bumi : Kedu di sebelah barat sungai Progo, 6000 cacah.
2. Daerah Bumijo: Kedu. di sebelah timur sungai Progo, 6000 cacah.
3. Daerah Siti Ageng Kiwa: Daerah yang terletak di sebelah kiri alam besar antara Pajang dan Demak, 10.000 cacah.
4. Daerah Siti Ageng Tengen: Daerah yang terletak di sebelah kanan jalan besar antara Pajang dan Demak, 10.000 cacah.
5. Daerah Sewu: Daerah Begelen yang terletak antara Sungai Bogowonto dan sampai Sungai Progo 6000 cacah.
6. Daerah Numbak Anyar: daerah yang terletak antara Sungai Bogowonto dan Sungai Progo 6000 cacah.
7. Daerah Panumping : Daerah Sukawati, 10.000 cacah.
8. Daerah Pasekar: Daerah Pajang, 10.000 cacah.

Daerah Monconogoro adalah daerah yang terletak di luar Neegoro Agung. Di situ terdapat tanah-tanah lungguh para pembesar kerajaan. Tetapi pada waktu-waktu tertentu daerah tersebut diwajibkan menyerahkan pajak ke Kraton. Karena kedudukannya yang seolah-olah hanya sebagai pembayar pajak itu, maka daerah tersebut pula Siti Dalem Pamaosan. Adapun perincian daerah Monconogoro itu adalah sebagai berikut:

1. Daerah Monconagoro Kulon:

Banyumas, Banjar, Pasir (Purwokerto) dan Ngayah 5000 karga. Kalibeber dan Rono (Karanganyar) 800 karga. Karangbolong, 400 karga. Merden, 400 karga. Warah, Tersono dan Karencang 300 karga. Bobotsari dan Kertonegoro 100 karga, Lebaksiu dan Balapulung, 102 karga. Bantar dan Jogoluhur, 600 karga.

2. Daerah Monconagoro Wetan.

Ponogoro, 16.000 karga. Kediri, 4000 karga. Madiun 16.000 karga. Pacitan, 1000 karga. Kaduwang 1500 karga. Pace, 300 karga, Karsono, 600 karga. Sarengat dan Blitar, 1000 karga. Jipang, 8000 karga. Gerobogan, 5000 karga. Warung, 3000 karga. Selo, 500 karga. Blora, 3000 karga. Rowo (Tulungagung), 800 karga, Kalangbret, 600 karga. Japan (Mojokerto), 600 karga. Wirosobo, (Mojoagung), 1000 karga.

Daerah Pesisiran adalah daerah yang berada di luar negara Agung pula, dan itu juga terbagi atas dua bagian;

1. Pesisiran Kulon, terdiri atas daerah-daerah mulai dari ke barat.
2. Pesisiran Wetan, terdiri atas daerah-daerah mulai dari Jepara ke timur:

Pejabat-pejabat negara di kerajaan Mataram di susun sebagai berikut :

1. Pejabat-pejabat dalam Kraton dan Daerah Kutonegoro

Administrasi Kartan diurus oleh empat orang Wedana Lebet. Dulu diatas keempat jabatan tersebut terdapat patih lebet. Pada jaman Kerto yang menjadi patih Lebet adalah Adipayti Monconoroko, sedang pada masa pemerintahan Amangkurat I ialah Tumegung Singoranu. Tetapi sejak tahun 1755 jabatan-jabatan tersebut dihapuskan. Adapun ke empat *wedana Lebet* tersebut adalah :

1. *Wedana Gedong Kiwa.*
2. *Wedana Gedong Tengen*
3. *Wedana Keparak Kiwa*
4. *Wedana Keparak Tengen.*

Wedana Gedong bertugas mengurus masalah keuangan dan pembendaharaan Karton, sedang Wedana Keparak bertugas mengurus masalah keprajuritan dan pengadilan. Gelar para Wedana lebet itu biasanya adalah Tumenggung, dan jika masih termasuk keluarga Raja, Pangeeran. Sebelum tahun 1628 para Wedana Lebet kerajaan Mataram adalah : P. Mandurorejo, P. Teposono (Keduanya Wedana Keparak) P. Mandugoneng. P. Sujonopuro (kedunya Wedana Gedong). Para Wedana Lebet tersebut masing-masing dibantu oleh seorang Kliwon, seorang Kebayan dan 40 orang Mantri jajar. Kliwon itu biasanya disebut pula *Papatih* atau *Lurah Carik* yang bergelar *Ngabehi*, sedang kebyan biasanya bergelar *Ngbehi*, *Ronggo* atau *Raden*.

Kutonegoro diurus oleh dua orang Wedana Miji. Kedua orang Wedana itu langsung bertanggung jawab kepada Raja dan kedudukan mereka hampir sama dengan Walikota pada jaman sekarang.

Di sini dapat disebutkan beberapa nama Wedana Miji, Pertama, Tumenggung Danupojo, yang menjabat pada akhir pemerintahan Sultan Agung. Kedua dan ketiga, adalah Wiroyogo dan Nitinegoro, yang menjabat pada masa pemerintahan Amangkurat I. Sebelum itu terkenal pula nama Tumenggung Endronoto dan Kayi Demang Yudoprono. Para Wedana Miji bersama-sama dengan para Wedana Lebet meeerupakan anggota Dewan Tertinggi Kerajaan.

2. *Pejabat-peejabat dalam Neeegara Agung*

Pejabat tertinggi yang bertugas mengurus administrasi pemerintahan Negara Agung adalah Patih Jawi. Dialah yang bertanggung jawab atas kebesaran pemerintahan di luar Kutonegoro, termasuk urusan pajak dan penyerahan tenaga laskar.

Di bawah kedudukan Patih Jawi terdapatlah para Wedana Jawi yang jumlahnya sama dengan jumlah bagian-bagian yang ada di dalam Negero Agung, sedang namanya menurut nama daerah yang menjadi wewenanganya. Dengan demikian pula Wedana Bumi, Wedana Bumijo, Wedana Siti Ageng Kiwa, Wedana Sewu, Wedana numbak anjar, Wedana Penumping, Wedana Siti Ageng Tengen, Wedana Sewu, Wedana Numbak Anyar, Wedana Panumping, Wedana Panekar. Para Wedana itu semuanya tinggal di Kutonegoro dan masing-masing

dibantu oleh seorang Kliwon, seorang Kebayan dan 40 orang Mantri Jajar.

Selanjutnya di tiap daerah dalam Negara Agung ada Bupati dengan pejabat-pejabat bawahannya. Sedang di tiap tanam lungguh milik bangsawan Kraton oleh bangsawan yang bersangkutan diangkatlah seorang pejabat dengan gelar *Demang* atau *Kyai Lurah*.

3. *Pejabat-pejabat di wilayah Monconagoro*

Di daerah-daerah Monconagoro ada jabatan *Bupati*, yang biasanya dengan gelar Tumenggung atau Raden Aryo. Jumlah Bupati di setiap daerah tidak sama, tergantung pada luasnya wilayah, misalnya Kediri, yang luasnya 4000 karga dikepalai oleh seorang Bupati, Madiun yang luasnya 16.000 karga dikepalai oleh dua orang Bupati. Daerah yang tidak luas, cukup dikepalai seorang Mantri atau seorang Kliwon. Para Bupati di Monconagoro. Pada tahun 1677 Mas Tumapel yang semula menjabat Bupati Gresik diangkat menjadi Wedana Bupati Monconagoro yang berkedudukan di Jipang. Pada tahun 1709 Tumenggung Surowijoyo diangkat Wedana Monconagoro Wetan.

4. *Pejabat-pejabat di daerah Pasisiran*

Tiap daerah di Pasisiran juga dikepalai oleh seorang Bupati atau Syahbandar yang berpangkat Tumenggung, Kyai Demang atau Kyai Ngabehi. Beberapa buah nama dapat disebutkan, yaitu Ngabehi Martonoto (1657) Bupati Pasisiran Jepara, Kyai Ngabehi Wongsorejo Bupati Pasisiran Semarang Tumenggung Suronoto Bupati Pesisir Demak. Pada tahun 1618 Bupati Pesisiran Jepara adalah Keyah Ulubalang (Keturunan India),, sedang pada tahun 1631--1636 Kyai Demang Leksomono.

Para Bupati atau Syahbandar mempunyai kekuasaan pemerintah dalam daerah wewangannya, tetapi mereka berada di bawah pengawasan para pejabat tinggi yang berkedudukan di Kutonagoro. Sebagai contoh pada tahun 1622-1623 Pemalang di bawah kekuasaan Pangeran Purboyo, yang di tempat tersebut diwakili oleh Kyai Lurah sebagai *Stads houder*. Pada tahun 1622 Pekalongan berada di bawah

Di setiap daerah tanah lungguh itu terdapat Demang atau Kyai lurah, yang bertugas mengurus tanah-tanah tersebut sebagai wakil bangsawan penguasaannya masing-masing. Mungkin sekali tanah-tanah lungguh ini merupakan tanah-tanah *Enclave* yang terdapat di dalam daerah wedana-wedana di Negara Agung. Tanah-tanah tersebut bersifat otonom, meskipun dalam beberapa hal tertentu, misalnya mengenai keamanan dan kepolisian, masih diawasi oleh wedana yang

palingga	:	pembuatan batu merah
wegeng	:	pembuatan batu nisan
marakeh	:	pembuatan genteng
jlagra	:	pembuatan barang-barang dari batu, untuk alas, tiang dan sebagainya.
undagi	:	pengukir kayu
gerji	:	tukang jahit

Jabatan-jabatan yang sudah banyak itu, makin lama tampaknya makin bertambah banyak juga, sehingga pada pertengahan abad 19 jumlahnya tidak kurang dari 150.

4.2.2 *Pengaturan tanah bersangkutan dengan jabatan*

Para pejabat di kerajaan Mataram tidak mendapat gaji, tetapi sebagai penghargaan terhadap jasa mereka para pejabat itu oleh kerajaan diberi gaduhan tanah sebagai tanah lungguh atau apanage. Karena mendapat tanah lungguh itu, mereka lalu disebut patuh. Para pejabat atau para patuh tersebut hidup dari hasil tanah lungguh mereka masing-masing, tetapi tidak semua hasil tanah lungguh mereka masing-masing boleh mereka ambil, sebagian harus dipersembahkan kepada raja atau kepada atasan mereka sebagai pajak dan sebagian lagi harus dibagikan kepada orang-orang yang turut mengurus tanah lungguh mereka mengurus tanah-tanah mereka masing-masing, misalnya orang-prang tani, bekel dan sebagainya.

Adapun perincian hasil tanah lungguh itu biasanya sebagai berikut:

Untuk para petani penggarap	40%
Untuk para bengkel (kepala desa)	20%
Untuk para demang dan Ngabehi	8%
Untuk para Bupati	8%
Untuk kas Kraton atau pajak	24%

Pernah di daerah Kediri, Manconogoro wetan, tanah lungguh seluas 4000 karya dikepalai oleh seorang Bupati. Ada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan urusan kepamongprajaan, misalnya: panewu, penatus, panekat, panalawe (Panglawe), paniganjung, panabekel.

Di samping itu ada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan urusan keagamaan, misalnya : penghulu, khatib, modin, marbot naib, Suronoto. Para pejabat itu biasanya disebut abdi dalem pametakan (mutihan).

Ada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan pengadilan: jaksa, martolulut, singonagoro, Martolulut bertugas melaksanakan hubungan hukuman gantung, sedang singonagoro bertugas melaksanakan hukuman dengan senjata tajam. Sementara itu ada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan urusan keuangan misalnya pemasan, meladang. Pemasan bertugas mengumpulkan pajak tanah sedang meladang bertugas memungut hasil bumi berupa padi, polowijo dan sebagainya untuk dipersembahkan ke kraton.

Dan ada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan perlengkapan misalnya :

pande	:	pembuatan barang-barang dari besi
kemas	:	pembuatan barang-barang dari emas
genjang	:	pembuatan barang-barang dari selaka
surawedi	:	pembuatan barang-barang dari intan
gemblak	:	pembuatan dari barang-barang kuningan
sayang	:	pembuatan barang-barang anyaman
gajah mati	:	pembuatan cemeti, barang-barang anyaman, balai-balai (dipan) dan sebagainya
gending	:	pembuatan gamelan
inggil	:	Perawatan gamelan
blandong	:	pencari kayu
kemit bumi	:	pekerja bersih dalam <i>cepuri</i> dan penjaga air mandi
gladag	:	pekerja pembersih luar <i>cepuri</i> dan pengangkatan barang-barang

Karena itu diadakanlah pengadilan yang anggotanya terdiri atas alim ulama. Kepada pengadilan tersebut diserahkan juga perkara kriminal, yang sampai pada masa itu diputuskan oleh Raja sendiri atau pengganti-penggantinya. Perkara perkawinan dan warisan diadili dengan peraturan-peraturan agama. Tetapi sementara itu hukum adat masih dihormati juga. Kecuali itu ada kitab undang-undang baru bahasa Jawa yang terkenal dengan nama *Suryo Alam*. Kitab tersebut pada hakekatnya merupakan kompromi antara hukum Islam dan hukum Indonesia asli.

4.3 Kehidupan Agama dan Kesenian (Perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan)

Pada abad ke-16 Agama Islam sudah mendapat tempat yang penting di daerah yang sekarang disebut Yogyakarta. Seperti di daerah-daerah lain di tanah Jawa, agama tersebut tersebar atau diajarkan kepada rakyat di Yogyakarta melalui langgar-langgar dan pesantren-pesantren.

Pengajaran di langgar hanya bersifat peemberian dasar yang diutamakan hanya pemberian pelajaran membaca Qur'an sedang gurunya adalah kaum atau modim. Rencana pelajaran tidak tersusun secara baik. Gurunya tidak mendapat pembayaran tertentu, tetapi hanya sekedar menerima hadiah berupa uang atau makanan yang diberikan oleh para orang tua murid secara suka rela baik dalam hal nilainya maupun waktunya. Disiplin dalam pengajaran di langgar itu tidak ketat, sehingga baik guru maupun muridnya dengan mudah membolos atau datang terlambat. Tetapi dalam hal hubungan antara guru dan murid, boleh dikatakan sangat baik, dan hubungan itu berlangsung terus sampai mereka meninggal dunia. Kalau ada murid yang tamat belajar, maka orang tua murid yang bersangkutan biasanya mengadakan kenduri di rumah sang guru.

Pengajaran di pesantren lebih mendalam daripada pengajaran di langgar. Pelajaran yang diberikan kepada para murid atau para santri terutama adalah : ilmu tentang kepercayaan dan ilmu tentang kewajiban. Dalam pelajaran itu, kecuali Qur'an, dipakai pula buku-buku yang ditulis dalam bahasa Arab, juga yang ditulis bahasa Jawa. Pemberian pelajaran biasanya sebagai berikut : guru membaca ayat

menterjemahkan dan sesudah itu menerangkan. Bagi para murid atau para santri itu biasanya dibuat jadwal sebagai berikut Jam 5 pagi menjalankan ibadat. Sesudah itu bekerja untuk gurunya : mengambil air, membersihkan halaman, mengurus tanaman dan sebagainya. Sesudah pekerjaan itu selesai, menerima pelajaran. Menjelang dan sesudah makan siang, beristirahat, tetapi setelah itu belajar lagi dengan selingan-selingan istirahat. Di waktu malam secara bergantian ada beberapa orang santri yang ditugaskan menjaga keamanan.

Ada pesantren yang besar, ada pesantren yang kecil, yang besar mempunyai ratusan murid, Dalam hal bahan pelajaran pesantren yang satu mempunyai bahan pelajaran yang berbeda dengan bahan pelajaran pesantren yang lain. Dalam hal lama pendidikan juga terdapat perbedaan-perbedaan di antara pasantren-pasantren itu. Tetapi dalam hal persaudaraan antara para santri boleh dikatakan terdapat persamaan. Di dalam setiap pesantren kegotong royongan hidup dengan suburnya.

Mulai zaman Kartosuro kekuasaan kerajaan menjadi terbatas sekali. Lapangan pengajaran dan pendidikan diurus oleh masyarakat sendiri. Pemerintah kerajaan tidak lagi berkuasa untuk memajukan pondok pesantren, sedang pemerintah Belanda boleh dikatakan menjadi penghalang usaha mencari kemajuan tersebut. Tetapi di kerajaan Mataram tidak sedikit orang-orang yang dapat membuat dan menulis dengan huruf Jawa; berkat usaha masing-masing, sementara para Raja mengenal dengan baik kesusteraan dan bahasa Jawa. Malahan ada beberapa orang raja yang mengarang buku berisi pendidikan. Kecuali itu di dalam lingkungan Kraton selalu ada orang yang mendapat tugas untuk mempelajari bahasa dan kesusteraan yang disebut pujangga.

Adapun kitab-kitab yang ada dalam masyarakat Mataram pada masa itu di antaranya adalah : kitab yang sekarang biasa di sebut *Het boek van bonang*, *Een Javasch Geschrift uit de 16 e eeuw*, *Suluk Sukarsa*, *Koja Jajahan*, *Suluk Wajib* , *Suluk Ma Manng Sumirang*. Tetapi karena kitab-kitab tersebut pada umumnya berisi ajaran tentang filsafat atau kebatinan dan agak terlarang bagi rakyat kebanyakan, maka tidak banyak dikenal dalam masyarakat.

Kitab-kitab yang lebih dikenal oleh masyarakat di antaranya adalah: *Nitisruti*, *Nitipraja*, *Sewaka*, *Rengganis*, *Manikmaya*, *Ambiya*,

Kanda. Kitan Nitistruti di tulis pada zaman Panembahan Seda Krapyak, sedang penulisannya menurut dugaan banyak orang adalah Pangeran Karanggayam yang tinggal di pajang. Adapun isinya mengenai ajaran-ajaran kebaikan.

Kitab Nitipraja adalah kitab yang dipandang sebagai adik kitab Natistuti, sebab hampir segala-galanya meniru kitab Nitistruti tersebut. Isinya berupa petuah kepada orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam negara mengenai ketatanegaraan dan cara memimpin rakyat.

Kitab sewaka ditulis pada tahun 1699, yaitu pada zaman Sunan Amangkurat II Kakanda Pangeran Puger (Paku Buwono I). Bahasanya adalah bahasa Jawa baru, sedang cara penuturannya lancar. Adapun isinya adalah petuah bagi orang yang mengabdikan, khususnya mengabdikan Raja.

Kitab Menak yang terhitung paling tua pada waktu itu ialah kitab yang ditulis pada tahun 1639 Jawa atau pada tahun 1714 Masehi atas kehendak Kanjeng Ratu Mas Balitar, permaisuri Sri Paduka Paku Buwono I atau pangeran Puger di Kraton Kartosuro. Yang mengerjakan adalah carik Norowito menantu Carik Wolodono. Tetapi kitab tersebut bukan kitab yang asli. Kitan yang asli lebih tua lagi.

Cerita di dalam kitab Menak Kartosuro masih dekat sekarang deengan Hikayat Amir Ambyah, sedangkan kat-kataya masih kelihatan sebagai kata-kata bahasa pesisir. Lagunya masih berbau juga kidung Jawa Tengahan. Hal itu terbukti dari seringnya dipakai kata-kata *reke, reka, tan asari, tan asantun* dan katengsun dan sebagainya. Baris ketiga tembang sinomnya masih sering jatuh pada suara "O" Bentuk cerita kitab Menak pada dasarnya serupa benar dengan bentuk cerita dalam kitab Panji. Demikian pula inti sari kitab Menak kita sama dengan inti kitab Panji, hanya nama-nama tokoh pentingnya saja yang berbeda.

Dalam Zaman Jawa Islam kitab Menak itu amat digemari orang. Karena besarnya jumlah penggemar ceritera Menak, timbullah banyak cerita tersebut, yang kemudian tersebar pula ke Lombok dan Palembang. Kitab Menak yang ke Lombok dan Palembang yang tua, masih berbahasa Jawa murni, tetapi yang mudah sudah terpengaruh oleh bahasa setempat. kitab rengganis adalah salah satu cabang kitab Menak.

Yang dikisahkan adalah seorang pendeta yang bertapa di bukit Argapuro.

Pendeta tersebut dulunya adalah seorang Raja di negeeri Jamineeran, yang sesudah mempunyai seorang putri, maka putrinya itu diberi nama Dewi Rengganis. Sebagi putri pertapa Dewi Rengganis itu mempunyai sifat seorang bertapa pula. Pada suatu ketika ia bertemu dengan Pangeran Kelan, yang sebenarnya sudah berisikan Dewi Jusulul Asikim dari Jamintaran, Sambutan sang Dewi kepada Pangeran Kelan mengedapkan. jenak-jenak menempati, menyekalkan hati. Sementara itu Pangeran Kelan panas hatinya, tetapi tidak gusar malahan berkobar-kobat api cintaya. Lukisan tentang perteman antara Panji dengan Dewi Angeni. Adapun pengarang Kitab Rengganis itu, menurut tradisi, adalah Ronggo Janor Pujanggo Kraton Kartosuro. Bahasanya masih amat dekat dengan bahasa Kitab Menak kartosuro tersebut di atas.

Kitab Manikmaua menurut tradisi masih termasuk hasil karya pada jaman Kartosuro juga, sedang penulisanya adalah Kartomarsadah, seorang yang mungkin sekali berasal dari daerah Pasundan, memang sejak permulaan jaman Kartosuro, banyak orang yang datang dari daerah Pasundan yang tinggal di pusat pemerintahan Kraton Jawa dengan tujuan mempelajari adat istiadat dan bahasa Jaeam sambil mencari ilmu agama Islam para ulama yang bertempat tinggal dekat Karton. Di antara mereka banyak yang masih termasuk kerabat kerja bupati Priangan. Dengan demikian mungkin juga Kartamursada termasuk salah seorang kerabat bupati Priangan.

Menurut Poerbotjataka, yang diceritakan dalam kitan Manikmaya tersebut sebagian besar adalah kutipan dari kitab Tatu Panggelaran di tambah dengan dongeng-dongeng Jawa yang pada waktu itu sudah menjadi milik umum.

Dalam Kitab Manikmaya sang Manik menjadi Batara Guru sedang sang Maya mejadi Semar, semetara itu bagawan Kanekaputro atau Narada disebut pula dalam bagian satu, bait 29--30. Sebelum tahun 1600 bahasa Jawa kira-kira sama dengan bahasa Sunda sekarang, yakni hanya mempunyai tingkat yang lebih sederhana, kata-kata bahasa tinggi (tembangkromo) yang dimilikinya juga sangat terbatas dan tidak begitu diwajibkan pemakaiannya. Baru sesudah tahun 1600 dalam bahasa Jawa

timbul beberapa tingkatan dan perbedaan dalam pemakaian kata, sehingga ada kata-kata kekeluargaan, kata-kata sopan dan kata-kata yang sangat sopan. Menurut Ronffaer, dalam periode Kartosuro tata cara Kraton dan bahasa Kraton Jawa yang mudah memperoleh kesempurnaannya.

Segi lain yang perlu diutarakan di sini adalah perhitungan tahun. Sebelum Islam masuk di Indonesia perhitungan tajunnya yang bisa dipakai oleh orang Jawa adalah perhitungan tahun Saka yang berdasarkan peradaan matahari. Tahun matahari itu terdiri atas 365 hari. Pada waktu agama Islam sudah meluas di Indonesia, khususnya di kerajaan Mataram, perhitungan tahun Islam atau tahun Hijrah juga masuk ke kerajaan tersebut. Tahun itu memakan perhitungan yang berdasarkan perjalanan bulan dan terdiri atas 354 hari. Pada tahun Saka 1555 atau tahun Masehi 1633 kehendak Sultan Agung diciptakan sebuah perhitungan tahun yang baru. Sebenarnya raja Mataram ini dapat mengambil tahun Hijriah begitu saja, sebab rakyat telah memeluk agama Islam. Tetapi dalam menciptakan perhitungan tahun itu Sultan Agung hanya menambahkan kepada tahun Saka yang telah berjalan 1555 itu sebagai perhitungan tahun hijrah yang berdasarkan peredaran bulan. Perhitungan tahun yang baru, yang bersifat paduan antara tahun Saka dan tahun Hijrah itu di sebut Tahun Jawa.

Demikian pula disebutkan corak islam dalam pewayangan. Sebagaimana kita ketahui permainan wayang sangatlah digemari oleh orang Jawa.

4.4 Hubungan ke Luar

Hubungan dengan dunia luar yang ada pada kerajaan Mataram terutama adalah hubungan dengan bangsa Belanda telah mengirimkan utusan-utusannya menghadap Raja Mataram. Setelah Sultan Anyokrowati, bangsa Belanda telah mengirimkan utusan-utusannya menghadap Raja Mataram. Setelah Sultan Anyokrowati mangkat pada tahun 1613, yang memerintah di Mataram adalah *Adipati Martopuro*. Tetapi raja tersebut tidak lama memerintah, lalu diganti saudaranya, yang terkenal dengan Sultan Agung Anyokrokusumo (1613--1645). Raja itu merupakan raja Mataram yang paling besar. Sultan Agung

berusaha agar dapat menguasai seluruh pulau Jawa. Karena ia tahu bahwa usaha tersebut tidak akan berhasil jika Batavia tidak ditaklukan, maka sebelum dapat persatukan Banten dengan Mataram, ia bermaksud menggempur lebih dulu Batavia. Gempuran tersebut dilakukan pada tahun 1628 dan 1629, tetapi keduanya tidak berhasil. Satu-satunya hasil yang dapat dicapai oleh tentara Mataram adalah terbunuhnya J.P. Coen.

Setelah Sultan Agung mangkat pada tahun 1645, naiklah di atas tahta Mataram Amangkurat I (1646--1677). Berlainan dengan ayahandanya yang anti Belanda, Amangkurat I bersikap lemah terhadap bangsa asing tersebut. Pada tahun 1646 raja yang lemah itu mengadakan perjanjian dengan Belanda, yang pada pokoknya sebagai berikut : Mataram mengakui kedaulatan VOC di Batavia, tetapi Mataram boleh berdagang secara bebas kecuali di Ternate, Ambon, Banda dan sebagainya. Itu berarti bahwa VOC mendapat pengakuan de facto dari Mataram atas kehadirannya di Batavia. Itu berarti pula bahwa Mataram tidak akan menyerang lagi Batavia seperti pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sementara itu perjanjian tersebut berarti pula bahwa kegiatan perdagangan terbatas, sedangkan pihak Belanda makin leluasa melakukan hal yang sama sebab saingannya berkurang.

Ketika pada tahun 1674 terjadi pemberontakan Trunojoyo di Mataram, dan ibu kota Karta diduduki pihak pemberontak, maka Amangkurat I dan putra mahkota Adipati Anom beserta para pengiring yang setia melarikan diri menuju ke Batavia untuk minta bantuan kepada Belanda. Dalam perjalanan tersebut Amangkurat I mangkat di Tegalarum dekat Tegal. Karena itu maka atas desakan para bupati yang masih setia kepada Mataram Adipati anom minta bantuan VOC yang berada di Tegal. Pada tahun 1677 Adipati Anom dinobatkan menjadi Amangkurat II, dan kemudian bersama-sama dengan Spelman pergi ke Semarang. dari Semarang itu Amangkurat II yang dibantu Belanda berusaha merebut kembali mahkota Mataram yang sudah jatuh ke tangan Trunojoyo.

Hingga tahun 1677 VOC mendapat beras dengan pembelian biasa. Sebagai upah atas bantuan militer yang diberikannya, pada tahun tersebut VOC mendapat dari Mataram monopoli untuk mengimpor barang tekstil dan gandum dan juga monopoli untuk mengeksport gula

dari Semarang dan Jepara, dan hak beli untuk beras, serta hak menguasai dan menerima pendapatan dari pelabuhan Pantai Utara.

Dalam pada itu karena Karta sudah hancur akibat pemberontakan, ibu kota dipindahkan ke Kartosuro. Di ibu kota yang baru itu Belanda diperbolehkan mendirikan Benteng. Tetapi akhirnya raja Amangkurat II merasa pula bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan VOC sangat berat bagi kerajaannya. Karena itu timbullah keinginan untuk melepaskan diri dari tekanan Belanda. Ketika pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Tack datang ke Mataram untuk menyelesaikan masalah hutang Mataram, maka pasukan Suropati dibiarkan bertindak bebas terhadap pasukan asing tersebut. Hal itu telah menyebabkan terjadinya perkelahian di antara kedua pasukan tersebut, yang berakibat terbunuhnya Kapten Tack.

Raja Amangkurat II mangkat pada tahun 1703, lalu di ganti oleh Mangkurat Mas atau Sunan Mas. Raja yang baru itu lebih bersikap berani terhadap Belanda, dan hal itu menyebabkan bangsa asing tersebut tidak suka terhadap beliau. Karena itu maka Belanda mendorong paman beliau, yaitu Pangeran Puger, yang berambisi untuk duduk di atas tahta. Dengan sokongan Belanda berhasillah Pangeran Puger menjadi raja dengan gelar Paku Buwono I. Dibawah pemerintahan Paku Buwono I itu Mataram menyerahkan kepada VOC beberapa daerah di Priangan, Cirebon dan Madura, dan setiap tahun Mataram wajib menyerahkan beras dalam jumlah yang tertentu kepada VOC.

Ketika Paku Buwono I mangkat, maka yang menjadi pengganti sebagai raja adalah Amangkurat IV yang juga terkenal dengan nama Sunan Prabu. Banyak di antara para bangsawan di Kartosuro yang memberontak, di antaranya Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkunegoro dan sebagainya. Dengan susah payah Amangkurat IV dengan bantuan VOC dapat mengalahkan para bangsawan yang memberontak itu. Kaum pemberontak yang menyerah diasingkan ke Sri Lanka dan Afrika Selatan.

Sunan Prabu mangkat pada tahun 1727, dan penggantinya adalah Paku Buwono II. Dalam masa pemerintahan raja yang baru itu, pada tahun 1742 terjadilah Pemberontakan Cina terhadap Belanda.

Pemberontakan tersebut mula-mula meletus di Batavia, tetapi kemudian menjalar juga ke Jawa Tengah. Di Kartosuro rakyat yang sudah lama menaruh dendam terhadap Belanda, melibatkan diri dalam pemberontakan tersebut. Sementara itu Paku Buwono II yang semula menyokong pemberontakan tersebut, berganti haluan, memusuhi kaum pemberontak. Karena itu para pemberontak mengangkat Mas Garendi atau Sunan Kuning sebagai rajanya. Di pihak Belanda berdiri Cakraningrat, penguasa Madura, yang sejak semula memihak bangsa asing tersebut dengan perhitungan, jika Belanda mencapai kemenangan, ia tentu mendapat upah yang berupa daerah pesisir Jawa Timur: Tuban Gresik dan sebagainya. Ketika Kartosuro diduduki pasukan pemberontak pada tahun 1742, Cakraningrat dapat membebaskannya. Pada waktu itu pula Paku Buwono II melarikan diri ke Ponorogo. Dalam keadaan yang kacau itu Belanda muncul sebagai "juru selamat".

Pada tahun 1743 VOC dan Mataram mengadakan perjanjian baru, yang memberi hak kepada VOC untuk mengangkat pegawai-pegawai pemerintah (rijksbestuurde) dan para bupati (hoofdregenten). Di samping itu perjanjian tersebut juga menyebabkan VOC mendapat dari Mataram daerah-daerah pantai yaitu Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Ujung Timur Jawa dan juga sisa Madura. Malahan dalam perjanjian itu juga ditentukan bahwa Mataram harus memikul kewajiban-kewajiban baru mengenai beras, nila dan katun.

Dengan diserahkannya daerah-daerah pantai Jawa tersebut oleh Mataram, maka VOC dapat mencapai tujuannya, yaitu mematikan pelayaran bangsa Jawa yang berpusat di Tegal, Pekalongan, Kendal, Tuban, Juwono, dan sebagainya. Sebelum ada peyerahan daerah-daerah tersebut, para pelaut dari pantai Jawa itu menentang peraturan monopoli dagang Belanda, sehingga VOC mendapat kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Setelah VOC menerima daerah pantai Jawa utara, diadakanlah peraturan-peraturan yang keras. Karena peraturan peraturan tersebut maka rakyat yang tinggal di pantai utara Jawa yang berjiwa pelaut itu beralih menjadi petani atau nelayan.

Kemudian pada akhir tahun 1745, Paku Buwono II membuat pengumuman, bahwa siapa saja yang dapat membasmi pemberontakan yang dikepalai oleh Mas Said dan Martopuro, akan diberi hadiah, yaitu daerah Sukawati. Di antara para pangeran dan para Bupati hanya

Pangeran Aryo Mangkubumi yang Sanggup menjalankan pekerjaan itu. Pengeran tersebut berhasil, keamanan dapat dipulihkannya, meskipun hanya untuk sementara waktu. Tetapi ternyata raja Paku Buwono II tidak menepati janji. Karena itu, Pangeran Aryo Mangkubumi lalu mengadakan pemberontakan terhadap raja dan VOC bersama-sama dengan Mas Said, Pangeran Adipati Manghkunegoro dan Martopuro.

Setelah perang berjalan tiga tahun lamana, Paku Buwono sakit keras, dan pada waktu itu tibalah Belanda di Surakarta untuk berunding dengan raja yang malang itu. Dalam perundingan itu, fihak Belanda medesakkan konsepsinya tentang status Mataram, yaitu bahwa kerajaan Mataram harus diserahkan kepada fihak Belanda tanpa syarat apa pun dan bahwa putra mahkota akan mendapat pengakuan fihak Belanda, perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 1749.

Pada tahun 1755 fihak Belanda sudah menyadari betapa sukarnya mematahkan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said dan betapa banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk memerangi para pelawan tersebut. Sementara itu kerajaan Mataram sendiri sudah tak mungkin mampu membiayai perang yang akan memakan waktu lama. Karena itu fihak Belanda mendekati Mangkubumi untuk mengadakan perundingan perdamaian tanpa Mas Said. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Giyanti (1755), yang isinya antara lain, bahwa Mangkubumi akan diberi sebagian daerah Mataram, dan bahwa bangsawan tersebut akan diakui sebagai raja di kerajaan Yogyakarta Adiningrat dengan nama Sultan Hamengku Buwono I.

Dua hari sudah ditandatanganinya perjanjian tersebut, berlangsunglah sebuah pertemuan ramah-tamah antara raja Surakarta dan raja Yogyakarta sebagai tanda berakhirnya permusuhan antara kedua belah fihak.

Catatan

1. Sutjipto Wirjosuparto, *Dari Lima Zaman Penjajahan menuju Zaman Kemerdekaan*, Indera, 1953 halaman 16.
2. Moh. Ali. *Perjuangan Feodal*, Ganeca N.V. Bandung, 1963, halaman 100.
3. Sutjipto Wirjosuparto, *Op cit* halaman 17.
4. *Ibid*, halaman 20.
5. Pitono, I Nyoman Dekker, Wagiono, *Sejarah Indonesia* Penerbit Utama, Malang, 1972, halaman 46.
6. Burger. d.H. dan Prajadi. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, J.B. Wolter, Djakarta, 1957 halaman 64.
7. Moh Ali. *op cit*, halaman 102 - 103.
8. *Ibid*, halaman 103 - 104.
9. Pitono, I Nyoman Dekker, Wagiono, *op cit*, halaman 47 - 48
10. Burger, D.H. dan Prajadi, *op. cit* halaman 66 - 67.
11. Pitono, I Nyoman Dekker, Hugiono, *op cit*, halaman 49 - 50
12. Moh. Ali, *op cit*, halaman 135.
13. Pitono, I Nyoman Dekker, Hugiono, *op cit*, halaman 50 - 51
14. *Ibid*, halaman 52.

15. Moh. Ali, *op cit*, halaman 154.
16. *Ibid*, halaman 155.
17. *Ibid*, 10 c *cit*.
18. *Ibid*, halaman 157.
19. Pitono, I Nyoman Dekker, Hugiono, *op. cit*, halaman 53 - 54.
20. Burger, D.H dari Prajadi, *op cit* halaman 77 - 78.
21. Sutjipto, F.A. "Struktur Birokrasi Mataram", *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia I & II* Maret/Djuni, 1968, halaman 51 - 70.
22. Berg. H.J. v.d. *Asia dan Dunia Sejak 1500*. J.B. Wolter Djakarta, 1954, halaman 235 - 236.
23. Imam Bernadib, Sutari, *Pengantar Sejarah Pendidikan*, Yayasan Penerbit FIP - IKIP Yogyakarta, Yogyakarta halaman 17 - 18.
24. *Ibid*, halarnan 20.
25. Poerbotjaroko, *Kepustakaan Djawa*, Penerbit Djembatan Djakarta, 1952, halaman 96 - 112.
26. *Ibid* halaman 97 - 137.
27. Burger, D.H. dan Prajadi, *op cit* halaman 93 - 94.
28. Sutjipto Wirjosuparto, *Bunga Rampai Sejarah Budaya Indonesia*, Penerbit Djembatan, 1964, halaman 18 - 19.
29. *Ibid* halaman 19.
30. Sutjipto Wirjosuparto, *op cit*, halaman 17.
31. Pitono I Nyoman Dekker, Hugiono, halaman 45.
32. Sutjipto Wiijosuparto, *op cit* halaman 23.
33. Pitono I Nyoman Dekker, Hugiono *op cit* halaman 49.
34. *Ibid* halaman 50.
35. Sutjipto Wiriosuparto, *op cit* halainan 31..
36. Burger D.H. dan Prajudi, *op cit* halaman 77.

37. Sutjipto Wirjosuparto, *op cit* halaman 32.
38. *Ibid* halaman 34,
39. Pitono I Nyoman Dekker, Hugiono, *op cit* halaman 51 - 52.
40. *Ibid* halainan 52.
41. Burger D.H. dan Prajodi, *Op cit* halaman 77.
42. Sutjipto Wirjosuparto, *op cit* halaman 35.
43. Pitono I Nyoman Dekker, Hugiono, *op cit* halaman 54 - 55.
44. Burger D.H. dan Prajodi, *op cit* halaman 77 - 78.
45. Pitono I Nyoman Dekker, Hugiono, *op cit* halaman 57.
46. Soekanto, *Sekitar Yogyakarta*, Mahabarata Jakarta, 1952, Halaman 5 - 6.
47. Moh Ali, *op cit* halwnan 189 - 191.
48. Pitono I Nyoman Dekker, Hugiono, *op cit* halaman 56 - 57.

BAB V

ABAD KE - 19 (1800 M - 1900 M)

5.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan

Sesudah tahun 1755 hubungan antara pemerintahan Belanda dengan raja-raja Jawa berubah secara menyolok. Karena pembagian Mataram menjadi kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, juga karena diakuinya Pangeran Arya Mangkunegoro di Surakarta sebagai raja ketiga yang merdeka, VOC memcapai kekuasaan yang besar. Tetapi, karena kelemahan angkatan perangnya, VOC banyak mengalah terhadap raja-raja Jawa. Menurut kontrak-kontrak dan menurut apa yang disebut Akta-Ikatan, baik Susuhunan maupun Sultan hanya berkedudukan sebagai peminjam tanah VOC. Tetapi dalam praktek, raja-raja Jawa tersebut tidak mengakui kekuasaan tunggal VOC sepenuhnya. Para raja hanya mengakui kekuasaan VOC yang ada sangkut pautnya dengan pengakuan perkumpulan dagang tersebut terhadap kepentingan para raja itu sendiri. Kecuali itu pegakuan para raja tersebut hanya karena mereka diliputi oleh rasa takut antara yang satu dengan yang lain.

Wakil-wakil VOC di kedua buah kerajaan tidak dihormati oleh raja-raja yang bersangkutan. Malahan mereka disuruh mengerjakan pekerjaan yang bertendens penghinaan. Sementara itu raja-raja Jawa tersebut juga memberi kesempatan kepada para wakil VOC untuk aktif dalam kegiatan menguntungkan kedua belah pihak, misalnya kegiatan

mengurus sarang burung Karang bolong, mengurus pajak pasar dan cukai.

Marsekal Daendels, yang dalam tahun 1808 menjadi Gubernur Jenderal, dengan cara yang radikal telah mengangkat wakil-wakilnya di Keraton-keraton Jawa dengan sebutan Menteri. Menteri raja Belanda, dan menginginkan wakil-wakil tersebut diperlakukan sama dengan raja-raja. Susuhan di Surakarta tunduk pada peraturan tersebut, tetapi Sultan di Yogyakarta tidak. Malahan Raja Yogyakarta itu juga menentang hal-hal lain yang diinginkan oleh Daendels, dan mengatakan, bahwa Gubernur Jenderal telah melanggar batas-batas kekuasaannya. Akibatnya pada tahun 1810 Sultan didatangi oleh ekspedisi militer yang dipimpin oleh Daendels sendiri dan dipaksa dewan turun tahta serta diganti oleh putranya Hamengku Buwono III.

Kemudian Sultan yang baru itu menetapkan batas-batas wilayah kerajaan yang baru, yang antara lain menyebabkan sebagian Kedu jatuh kepada pemerintahan Belanda. Kecuali itu Hamengku Buwono III juga memenuhi keinginan Daendels dalam hal upacara dan hal-hal lain, dan akhirnya malahan membayar ongkos-ongkos ekspedisi sejumlah f. 196.320.

Setelah pula Jawa ditaklukkan oleh Inggris dengan kekuatan senjata, maka raja Surakarta dan Yogyakarta mengira bahwa saatnya telah tiba untuk mencapai kembali kekuasaannya yang telah hilang. Maka setelah ada surat menyurat antara raja Surakarta dan raja Yogyakarta, tercapailah kesimpulan bahwa kedua orang raja itu akan bersama-sama menentang Inggris. Setelah pemberontakan betul-betul meletus kraton Yogyakarta diserbu oleh sebuah ekspedisi pada tahun 1812, harta kekayaan kraton disita, Sultan Hamengku Buwono II dibuang dan diganti dengan Sultan Hamengku Buwono III kembali. Karena raja Surakarta juga dianggap bersalah, berdasarkan surat-surat yang dapat ditemukan, bersama-sama dengan raja Yogyakarta juga mendapat hukuman dari pemerintahan Inggris. Hukuman yang dijatuhkan Inggris kepada kedua raja itu berupa keharusan untuk menyerahkan tanah-tanah yang kemudian disebut Karesidenan Kedu, dan sebagian dari Karesidenan Semarang, Rembang dan Surabaya.

Menurut ketentuan-ketentuan lain, raja Surakarta dan Yogyakarta berkewajiban mendirikan pos-pos polisi yang permanen dan mengadili kawula Gubernur yang berdasar hukum yang benar. Kedua orang raja itu harus mengakui kekuasaan tertinggi orang Eropa atas pulau Jawa, meyerahkan hutan-hutan jati, menyerahkan sarang burung, menyerahkan pasar dan rumah-rumah cukai, menghilangkan semua hukuman siksaan dan menurut nasehat-nasehat. Perlu dicatat bahwa dalam hal penyerahan rumah-rumah cukai, raja mendapat ganti rugi yang berupa uang. Adapun naskah yang berisi semua ketentuan tersebut adalah naskah perjanjian yang bertanggal 1 Agustus 1812. Maka sejak itu kekuasaan tertinggi Eropa di atas kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dikokohkan. Kalau dua kerajaan Jawa itu melanggar perjanjian yang ada, dapat ditindak dengan kekuatan senjata.

Sementara itu Pangeeran Notokusumo, saudara muda Sultan Hamengku Buwono II dan putra Sultan Yogyakarta yang pertama, diangkat menjadi raja yang berdiri sedniri dengan nama Pangeran Adipati Paku Alam. Pada tahun 1816 seluruh pulau Jawa, termasuk kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, kembali kepada kekuasaan Belanda. Hal tersebut menyebabkan raja-raja di tanah Jawa gembira, sebab mereka berharap bahwa kembalinya pemerintahan Belanda berarti kembalinya mereka kepada keadaan semula. Tetapi setelah ternyata bahwa orang-orang Belanda menganggap perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Inggris tetap berlaku, mereka menjadi kecewa. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, pada masa pemerintahan Inggris raja-raja itu menderita kerugian-kerugian dan mendapat penghinaan-penghinaan. Sekarang, pada masa pemerintahan Nederland, tidak ada usaha perbaikan yang dilakukan. Hal itu menyebabkan raja Surakarta Paku Buwono IV, pada tahun 1820 bersikap bermusuhan kepada Belanda. Beliau mengatakan bahwa dirinya tak lagi terikat oleh perjanjian-perjanjian yang menghina, yang mengurangi kekuasaan serta kewibawaan raja, yakni perjanjian yang dibuat pada masa pemerintahan Daendels. Tetapi sikap yang bermusuhan itu dapat dikendalikan oleh Overste Nahuys, Residen Yogyakarta, yang diutus dengan kuasa penuh ke Surakarta.

Pada masa itu pemerintahan Belanda melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memindahkan jalan militer besar di Pekalongan, mengambil alih daerah-daerah Mancanegara dengan memberi ganti rugi kepada raja Surakarta dan Yogyakarta. Dengan Karangobar dimasukkan di dalam rencana ini.
2. Memberi perintah kepada beberapa orang pegawainya untuk mengadakan perjalanan inspeksi ke daerah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, dengan tugas untuk mengambil alih rumah-rumah pemungutan cukai.

Kegiatan tersebut bersama-sama dengan ucapan-ucapan yang tak berhati-hati, misalnya ucapan yang bersifat pengakuan bahwa Banyumas, dan daerah-daerah lain adalah miliknya, telah menyebabkan benih kekawatiran yang sudah ada sebelumnya tumbuh menjadi besar. Pangeran Diponegoro, Wali Sultan Yogyakarta yang masih di bawah umur, putra Sultan Rojo dengan istri yang bukan permaisuri, seorang pria yang taat kepada agama, mengatakan tidak senang terhadap Pemerintah Belanda serta pegawai-pegawainya. Ia menyusun rencana untuk menentang Belanda dengan kekuatan senjata. Sebelum melakukan aksinya, pangeran tersebut telah membuat persiapan batin, tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di Surakarta. Di Surakarta Pangeran Diponegoro berusaha, agar raja Paku Buwono VI jangan benar-benar bersikap netral terhadap rencana-rencananya tetapi hendaknya sudi memberi perintah kepada pasukan-pasukan Surakarta yang berkedudukan di antara Surakarta dan Yogyakarta untuk membantunya.

Kyai Mojo, seorang ulama di Solo, banyak memberikan bantuan kepada Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran tersebut mencapai hasil-hasil yang baik dalam awal usahanya. Ulama tersebut oleh umum dianggap sebagai wakil raja Surakarta. Sementara itu raja Surakarta sendiri dengan beraninya telah mengatakan kepada kolonel Nahuys, yang ketika itu Residen Surakarta, bahwa jika Gubernur Jenderal De Kock tidak segera datang ke Surakarta, maka beliau dan semua pangeran di Surakarta pasti sudah menjadi pemberontak pula.

Pada masa itu sebagian besar tentara Belanda berada di Makasar, dan para pegawai Belanda yang di Yogyakarta, menurut pihak Belanda sendiri, banyak melakukan keesalahan. Hal tersebut telah memungkinkan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 meninggalkan Yogyakarta untuk menyusun basis pemberontakan. Rencana Pangeran Diponegoro mengajak Sultan yang masih muda itu tidak berhasil, tetapi para pangeran dan sebagian besar para pembesar di antaranya Wali pertama, Mangkubumi, mengikuti jejaknya. Dalam pada itu, karena perlawanan pihak Belanda bersifat lemah, maka Pangeran Diponegoro dapat mencapai hasil-hasil yang gemilang, sehingga banyak daerah termasuk daerah-daerah yang langsung diperintah Belanda mengakui kekuasaan Pangeran tersebut.

Uraian yang terperinci tentang perang itu tidak diutamakan di sini. Tetapi dengan singkat dapatlah dikatakan, bahwa akibat peperangan itu banyak korban yang berupa jiwa dan harta. Pada awal tahun 1830 Pangeran Diponegoro dapat ditangkap oleh pihak Belanda. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, kekuasaan Belanda makin kokoh. Akibatnya, dalam waktu yang singkat daerah-daerah yang subur yang semula dimiliki oleh kedua kerajaan di Jawa Tengah itu dijadikan daerah yang langsung diperintah oleh Belanda, dan raja-raja diturunkan derajatnya sehingga menjadi raja-raja yang tak lagi berdaulat. Kedudukan yang tidak lagi berdaulat itu, telah menyebabkan raja-raja Jawa tersebut tidak lagi dapat bertindak ke luar. Sementara itu, karena kerajaan Yogyakarta yang dianggap menjadi sumber peperangan, maka oleh Belanda, kerajaan tersebut diberi status yang berbeda dengan kerajaan Surakarta.

Menurut pihak Belanda, raja Yogyakarta yang masih muda itu memang mempunyai hak perlindungan dari pemerintah Belanda. Tetapi kepadanya tak mungkin diberikan kekuasaan yang tak terbatas, seperti yang pernah dimiliki oleh para moyangnya. Sebab kekuasaan yang tak terbatas itu pasti akan dipakai oleh raja tersebut untuk menimbulkan peperangan lagi. Dalam pada itu timbulah masalah di hadapan pemerintah kolonial Belanda, yakni, bagaimana cara menangani segala urusan yang bersangkutan dengan para pangeran yang besar jumlahnya, yang mungkin akan memberontak atau menimbulkan kesulitan. Demikian pula, bagaimana dapat mengetahui sebelumnya, mana- mana

diantara para bangsawan tersebut yang akan memberontak, dan mana-mana yang akan tetap setia. Atau bagaimana dapat memenuhi keperluan hidup mereka, yang kebanyakan sudah lemah ekonominya itu.

Dalam hal pemenuhan keperluan hidup pra bangsawan tersebut, di fihak Belanda ada pendapat, bahwa pembebasan terhadap penduduk Jawa yang lain tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu daerah-daerah mancanegara dimasukkan ke dalam pemerintahan Belanda, agar dengan demikian dapat diperoleh sarana untuk memenuhi keperluan hidup para pangeran dan memperkokoh perdamaian. Adapun sarana-sarana itu seharusnya bukan berupa pembebanan penduduk dengan pungutan-pungutan, tetapi berupa pelaksanaan ketertiban dalam pemerintah, pencabutan pajak yang dibenci rakyat, dan pemberian perlindungan kepada rakyat dari penindasan dengan cara-cara yang sedapat mungkin mirip dengan cara-cara yang sudah berlaku di daerah Priangan.

Raja Yogyakarta yang muda itu tetap digemari Sultan, dan selanjutnya ditentukan bahwa raja mendapat penghormatan dari para pangeran atau para kerabat raja. Kecuali itu kepadanya diberikan jaminan bahwa akan memperoleh pendapat-pendapat yang cara pelaksanaannya serta jumlahnya akan ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu kepada para pembesar kerajaan dan para pangeran akan diberikan gaji yang bersifat tetap dan besar jumlahnya.

Pemerintah Belanda akan memperoleh semua daerah milik kerajaan Yogyakarta, kecuali daerah pajang, Mataram, Sukawati dan Gunung Kidul, dengan memberi ganti rugi kepada kerajaan itu, pertama berupa pembebasan dari kewajiban membayar biaya perang yang menurut perjanjian tanggal 17 Agustus 1826 sudah ditentukan bahwa harus dibayar oleh kerajaan tersebut dan kedua, berupa pembayaran uang sebesar f.210.000 seetiap tahun. Kecuali hasil-hasil seperti yang sudah disebutkan itu pemerintah Belanda masih mendapat hasil-hasil lain yang sangat menguntungkan. Hasil-hasil lain itu berupa ketentuan, bahwa pengadilan serta polisi diserahkan kepadanya, dan janji dari raja Yogyakarta, bahwa raja tersebut memberi izin kepada pihak pemerintah Belanda untuk membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu supaya terjamin ketentraman dalam negara.

Pada masa itu ketentraman dalam negara sudah kelihatan baik. Sejak pangeran Mangkudiningrat dan Pangeran Prabuningrat ditangkap dan dibuang, pemerintah Belanda tidak lagi merasa takut bahwa akan ada lagi kekacauan yang ditimbulkan oleh kerajaan Yogyakarta. Meskipun kemiskinan yang meliputi para pembesar kerajaan dapat menjadi faktor penyebab timbulnya, peperangan lagi, tetapi hal itu tidak perlu ditakutkan, sebab mereka yang bermaksud menimbulkan peperangan itu tentu masih ingat betapa hebatnya senjata Belanda. Asal ada perlakuan yang baik terhadap mereka, dan asal Belanda selalu berjaga-jaga, tentulah ketentraman akan tetap terjamin, demikianlah pikiran yang ada di pihak Belanda.

Terhadap raja Surakarta, pihak Belanda mempunyai pandangan, bahwa sedikit-tidaknya pada awal terjadinya pemberontakan yang dipimpin Pangeran Diponegoro raja tersebut telah bersikap mendua atau ragu-ragu. Karena keragu-keraguannya itu pihak Belanda, menuduh raja tersebut telah mengkhianati persekutuan atau melanggar perjanjian. Perbuatan beliau itu telah menyebabkan, bukan saja para bangsawan menginginkan beliau turun tahta, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan di kalangan pemerintahan Belanda. Namun akhirnya perbuatan raja Surakarta itu dimanfaatkan juga oleh pemerintahan Belanda. Sementara itu, karena pengaruh serta janji-janji Jenderal De Kock, raja Surakarta itu kembali setia kepada Belanda.

Tetapi, kecuali kembali menjadi setia, di kemudian hari raja tersebut juga menyatakan dihadapan Belanda, bahwa sebenarnya ia telah membantu Belanda, tatkala Belanda sedang berusaha menudukkan Pangeran Diponegoro. Pada waktu itu, beberapa pangeran, di antaranya Pangeran Kusumoyodo dengan pasukan kerajaan telah melawan pasukan Diponegoro di tempat-tempat yang jauh. Maka, karena memang berbeda dengan keraton Yogyakarta, Susuhannya merasa sama sekali tidak berdosa, karena itu ia mengharapkan adanya hadiah yang sudah sepatutnya diterima dari pihak Belanda, yakni hadiah yang berupa perluasan daerah kerajaan atau hadiah lain yang bagus.

Sebaliknya pemerintahan Belanda mempunyai pandangan yang berbeda sekali dengan pandangan raja Surakarta itu. Pemerintahan Belanda berpendapat bahwa pengalaman, terutama yang berupa peristiwa-peristiwa dalam peperangan yang lima tahun lamanya itu

telah membuktikan, bahwa pemerintahan di daerah-daerah yang letaknya jauh dari ibu kota Surakarta, kurang mendapat perhatian, sehingga kewibawaan raja tak diakui dan kekuasaannya hampir-hampir tidak lebih daripada nama saja. Sementara itu penduduk di daerah-daerah tersebut menderita dibawah kesewenang-wenangan kepala daerah mereka masing-masing. Di tiap-tiap daerah itu tak ada keamanan atau perlindungan. Badan penduduk masing-masing, juga hasil kerja mereka masing-masing selalu menjadi korban ketamakan serta keborosan kepala daerah mereka masing-masing. Tidak mengherankan jika keadaan-keadaan yang demikian itu berakibat hilangnya secara berangsur-angsur kewibawaan raja Surakarta. Sementara itu kerajaan Surakarta memang makin lemah, sedangkan banyak pemberontakan masih tetap ada. Maka jika hal sedemikian itu berlangsung terus itu berarti bahwa Belanda akan terus menerus diancam bahaya, atau terpaksa memberikan pengorbanan yang lebih besar dari pada kesanggupannya demi kerajaan Surakarta. Oleh karena itu Belanda merasa mempunyai hak mutlak untuk mendapat ganti rugi atas jasanya secara tetap daerah-daerah yang diserahkan kepadanya. Dalam hubungan ini, VOC memberikan perlakuan sama terhadap kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada raja Surakarta diberikan juga kepada raja Yogyakarta. Sebaliknya peraturan-peraturan yang dikenakan terhadap kerajaan Yogyakarta, dikenakan juga terhadap kerajaan Surakarta. Peraturan-peraturan tersebut, kemudian ternyata menimbulkan kesukaran-kesukaran di Surakarta, maka untuk menghilangkan keberatan-keberatan raja di negeri itu, pihak Belanda mengadakan persetujuan dengan raja tersebut.

Berdasarkan asas-asas yang sudah diuraikan di atas pada tahun 1830 terjadilah persetujuan yang garis besarnya seperti berikut: Pihak Belanda mengizinkan raja Surakarta tetap memiliki kebesaran lahir sesuai dengan kedudukannya sebagai raja, menjamin pendapatan-pendapatan keraton dan pendapatan-pendapatan pangeran tetapi menyerahkan daerah-daerah yang terletak di sebelah barat Sungai Bogowonto dan yang terletak disebelah timur deretan Gunung Lawu dan Bligo, kepada pemerintahan Belanda. Sementara itu, kepada kedua kerajaan diberikan daerah-daerah: Mataram dan Pajang, Sukawati dan

Gunung Kidul sebagai milik penuh, sehingga daerah tempat lahir kerajinan Mataram itu tidak termasuk daerah yang diserahkan kepada pihak Belanda.

Adapun daerah-daerah yang jatuh ke tangan Belanda adalah daerah-daerah yang dalam Perang Diponegoro sedikit menderita, atau daerah yang telah sembuh dari akibat perang tersebut misalnya Bagelen dan Banyumas yang dipandang sebagai daerah yang terkaya dan subur. Selanjutnya oleh pihak Belanda raja Surakarta dituntut supaya bertanggung jawab atas semua perbuatan sanak keluarganya mengamati para pangeran, dan memperlakukan para pangeran tersebut sebagaimana mestinya. Sementara itu raja dilarang melakukan kerja sama dengan para pangeran yang dinilai jahat oleh pemerintah Belanda. Ketika perundingan tentang syarat-syarat perjanjian itu berlangsung pada bulan Juni 1830 raja Surakarta meninggalkan keraton dengan diam-diam untuk melepaskan diri dari urusan kerajaan.

Bertentangan dengan perintah Jenderal De Kock, yang kemudian diulangi oleh Residen, raja Surakarta pergi kemakam leluhurnya di Imogiri, dan dari sana ke pantai Salarong. Hal itu oleh pihak Belanda dipandang sebagai pertanda bahwa raja tersebut akan melakukan perlawanan terbuka terhadap pemerintahan Belanda, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro pada waktu yang lalu. Tetapi, setelah raja Surakarta itu ditahan di Mancingan, pantai selatan, kekawatiran bahwa akan timbul lagi gerakan yang menentang pemerintah Belanda menjadi hilang. Meskipun demikian tindakan raja Surakarta Paku Buwono VI, yang menyebabkan dilakukannya penahanan di Mancingan itu, telah menyebabkan pihak Belanda memperoleh kepastiaan, bahwa beliau memang perlu diganti. Pada tanggal 14 Juni 1830 Pangeran Purboyo, saudara laki-laki raja atau pewaris terdekat untuk jabatan raja, diangkat dan dinobatkan menjadi raja dengan nama Paku Buwono VII sedang raja Paku Buwono VI sendiri dibuang ke Maluku.

Pengangkatan itu dilaksanakan dengan syarat bahwa raja Paku Buwono VII menyetujui penyerahan daerah Bagelen, Banyumas serta daerah-daerah mancanegara lainnya. Induk Mataram diadakan perbatasan yang memisahkan secara tegas negara Yogyakarta dan Negara Surakarta. Persetujuan raja Surakarta itu tercantum di dalam

akte persetujuan yang ditandatangani oleh Paku Buwono VII dan waktu pemerintahan Belanda pada tanggal 22 Juni 1830.

Dalam perjanjian tersebut antara lain disebutkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemerintahan di daerah-daerah diserahkan kepada pemerintah Belanda berlangsung atas nama Susuhunan.
2. Kepala daerah-daerah tersebut, setiap tahun, yakni pada waktu Grebeg, diwajibkan menghadap Susuhunan sebagai penghormatan.
3. Pengangkatan kepala daerah tersebut akan selalu dilakukan dengan memperhatikan nasihat Susuhunan mengenai hal yang bersangkutan.
4. Mengenai pengadilan dan polisi tak diadakan ketentuan-ketentuan khusus, oleh sebab itu cabang-cabang administrasi ini masih menurut perjanjian yang sudah dibuat pada tahun 1812.

Pada waktu dibuat perjanjian tersebut, seperti hanya raja Yogyakarta, raja Surakarta pun dibujuk menyerahkan daerah-daerah di luar daerah Mataram, Pajang, Sukawati dan Gunung Kidul kepada pemerintah Belanda, dengan menerima pembayaran ganti rugi berupa uang yang besar jumlahnya dan pelunasan semua hutang raja.

Kemudian, dalam perjanjian yang diadakan atas usaha Belanda, antara Belanda di satu pihak dengan raja Surakarta dan raja Yogyakarta di lain pihak, di Klaten pada tanggal 27 September 1830, diadakanlah pemisahan batas dan pembagian kembali daerah Surakarta dan Yogyakarta. Akibat perjanjian itu maka kerajaan Surakarta hanya memiliki daerah Pajang dan Sukawati, sedang kerajaan Yogyakarta memperoleh daerah Mataram dan Gunung Kidul. Dengan demikian kerajaan Surakarta, hanya dalam waktu kira-kira 80 tahun, dari kerajaannya sebagai penguasa sebagian besar pulau Jawa, merosot menjadi pemilik dua daerah tersebut.

Selanjutnya, karena meninggalnya Panembahan Arya Bumiharto, wakil putra mahkota di kerajaan Surakarta dan saudara laki-laki Paku Buwono IV, jaminan akan adanya ketentraman di Surakarta, dilihat dari kepentingan Belanda, menjadi lebih besar. Sementara, dilihat dari segi lain meninggalnya bangsawan tersebut berarti hilangnya garis menurun

raja-raja Mataram yang sebenarnya, kecuali raja yang pada waktu itu masih bertahta.

Setelah raja Paku Buwono V mangkat pada tahun 1823 Pemerintahan Hindia Belanda waktu itu beranggapan bahwa tahta di kerajaan Surakarta kosong sama sekali, sebab raja tersebut tidak pernah mengangkat salah seorang pangeran menjadi putra mahkota yang kemudian diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kecuali itu diantara sekian banyak anak raja tersebut tak terdapat seorang pun yang laki-laki, kecuali yang lahir dari Garwa, Ampeyan. Dalam pada itu sebelum mangkat, raja sendiri hanya meninggalkan surat wasiat yang bersifat perintah kepada patihnya agar sesudah beliau mangkat, yang diduduki di atas tahta ialah R.M. Supardan, yaitu putranya dari Garwa amperan.

Pengangkatan anak laki-laki dari istri yang bukan permaisuri menjadi raja, meskipun jarang, pernah juga terjadi di masa lampau. Kecuali itu, menurut pertimbangan Pangeran Arya Buminoto, yaitu paman raja Paku Buwono V, yang dipandang sebagai kerabat terdekat raja, memang sebaliknya keinginan raja itu dipenuhi, Atas dasar pertimbangan yang demikian itu, R.M. Supardan yang baru berusia 17 tahun diangkat menjadi raja dengan nama Paku Buwono VI.

Tetapi, dasar yang dipakai untuk mengangkat R.M. Supardan menjadi raja itu menjadi sasaran beberapa pemikiran, Ada pemikiran, bahwa sesudah Paku Buwono V mangkat, sebenarnya tahta tak dapat dikatakan kosong, sebab pada waktu itu ada pangeran Purboyo, yaitu adik raja yang juga putra Paku Buwono IV dari permaisuri. Di samping itu ada pula pemikiran bahwa pangeran Arya Buminoto yang hanya paman raja, tidak dapat dipandang sebagai kerabat terdekat raja jadi nasehatnya mengenai pengangkatan raja tidak dapat dipandang sebagai nasehat kerabat terdekat. Dengan demikian, pengangkatan R.M. Supardan menjadi raja menimbulkan dugaan, bahwa hal tersebut hanya karena usul residen Mc Gillivrij, yang disesuaikan oleh raja Paku Buwono V dengan melampaui Pangeran Purboyo, yang sebenarnya berhak naik tahta. Oleh sebab itu, pengangkatan Pangeran Purboyo menjadi raja dengan nama Paku Buwono VII, menurut pendapat pihak Belanda, berarti mengembalikan hak pangeran tersebut.

Pada tanggal 27 April 1835 menikahlah raja Paku Buwono VII dengan Raden Ayu Sarijah, putri Sultan Madura. Itu berarti bahwa, jika raja itu mangkat tanpa meeninggalkan keturunan laki-laki garis menurun yang sebenarnya di kerajaan Mataram sudah lenyap. Oleh sebab itu jika di kemudian hari ada lowongan, maka hak untuk menentukan siapa yang pantas menjadi raja, diserahkan kepada pihak Belanda.

Dalam hubungan ini Pangeran Adipati Hangabei saudara laki-laki tertua Paku Buwono VII yang lahir dari garwa ampeyan, menurut pedapat Belanda mempunyai hak untuk duduk di atas takhta, atau setidak-tidaknya lebih berhak dari pada pangeran Deksono, putra Paku Buwono VI. Sebab, Pangeran Deksono itu lahir dari ayah dan ibu yang kedua-duanya tidak menurut hukum, malahan ayahnya pernah naik tahta dengan meninggalkan Pangeran Purbaya. Sebagaimana kita ketahui pada tahun 1755 Susuhunan dan Sultan mengadakan perjanjian perdamaian. Kemudian pada tahun 1757 Mas Said juga mengadakan perjanjian perdamaian di Salatiga dan diangkat menjadi Pangeran merdeka dengan gelar Pangeran Adipati Manngkunegoro, ia mendapat wilayah kekuasaan seluas 4000 cacah. Sesudah pangeran Adipati mangkat, pada tahun 1776 cucunya menjadi penggantinya dengan gelar Mangkunegara II. Pada zaman pemerintahan Mangkunegara II ini wilayah kekuasaan Mangkunegara oleh pemerintah Inggris di tambah 1000 cacah. Pada zaman kekuasaan Dandels Mangkunegoro II diangkat ,menjadi kolonel dan mempunyai legiun sendiri. Pada waktu kekuasaan Belanda sudah kembali di Indonesia; pemerintah Belanda bermaksud menggunakan Pangeran Mangkunegoro, untuk mengimbangi kekuasaan Susuhunan. Pada tahun 1833 Pangeran Mangkunegoro mangkat. Karena tidak mempunyai putra mahkota, maka penggantinya adalah cucunya, Arya Prangwadono, yang bergelar Aryo Adipati Prabu Prangwadono. Di Yogyakarta sesudah Sultan Hamengku Buwono mangkat maka putranya yang sudah diangkat menjadi putra mahkota diumumkan menjadi Sultan dengan nama Hamengku Buwono V. Karena Sultan yang baru itu berusia 2 tahun ditetapkan bahwa sebelum ia dewasa dan mampu memimpin pemerintahan sendiri, cap kerajaan berada di tangan residen, Kecuali itu, ditetapkan pula, bahwa patihnya bertugas menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat umum, sedang

para wali yang diangkat atas nama Sultan, bertugas mengurus uang sebesar 1.000.000 mas Spanyol, yang diterima setiap tahun dari Gubernur sesuai dengan perjanjian yang ada pada waktu itu.

Setelah Sultan Hamengku Buwono V mencapai usia 16 tahun pada tanggal 2 Juni 1836, ia disertai cap kerajaan dan dibebaskan dari perwalian, sesuai dengan putusan no. 11, tanggal 30 Desember 1819, yang dikeluarkan oleh Sulta Hamengku Buwono IV. Pada waktu dinobatkan Sultan Hamengku Buwono V menyatakan dengan tertulis, bahwa ia menyetujui dan menguatkan persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh Sultan Sepuh, Panji dan Majelis Pemerintahan tentang negara Yogyakarta dengan Gubernemen Hindia Belanda. dengan berjanji bahwa tak akan mengadakan perubahan didalam segala hal yang sudah ditetapkan itu atas kehendak sendiri.

Pada tanggal 14 Nopember 1834 Sultan Hamengku Buwono V menikah dengan Raden Ajeng Suradinah, putri Tumenggung Purwokusumo dan Ratu Anom, putri Sultan Sepuh. Pada mas itu di kerajaan Yogyakarta ada beberapa orang pangeran yang berdaulat, yakni :

- a. Pangeran Adipati Paku Alam ia adalah utri seorang raja, yang bergelar Paku Alam dan yang oleh pemerintah Inggris pada tahun 1812 diangkat menjadi pangeran berdaulatan dan mangkat pada tahun 1829. Kepada pangeran Adipati Anom itu oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan 4000 cacah tanah termasuk hak mempunyai semua hasilnya. Pemberian itu disertai sebuah ketetapan bahwa beliau akan memelihara pasukan. Dulu pada tahun 1812, ayahandanya juga pernah membuat perjanjian seperti itu dengan pemerintah Inggris. Pada waktu itu dalam perjanjian tersebut ditetapkan pula, bahwa Paku Alam (Senior) akan digaji f. 1000 setiap bulan. Jika uang itu kurang, maka kekurangannya akan dipikul sendiri oleh pangeran tersebut. Selanjutnya Pangeran paku Alam (Junior) itu berkewajiban memelihara pasukan berkuda menurut cara yang diterapkan di dalam perjanjian pada tahu 1912.
- b. Pangeran Adipati Notoprojo.
Pangeran ini adalah putra satu-satunya. Pangeran Mangku mingrat, yang telah menuntut haknya atas tahta Yogyakarta dan yang

dengan ayahnya Sultan Sepuh dibuang ke Amboina oleh orang Inggris sampai keduanya meninggal di tempat pembuangan tersebut. Kekuasaan dan kebesaran Pangeran Adipati Notoprojo ini tidak dapat disamakan dengan kekuasaan serta kebesaran Paku Alam. Menurut perjanjian pada tanggal 24 Desember 1832 ia memiliki daerah-daerah seluas 500 cacah di antara sungai Progo dan Sungai Bogowonto yang pernah dimiliki oleh Pangeran Mangkudingrat yang dibuang itu. Kecuali itu ia mendapat tunjangan 500 golden sebulan dan masih menerima pula apa uang diperlukannya untuk memberi penghidupan para pembesar dan pangeran. Kedudukan para pangeran berdaulat yang terpisah dari lingkungan keraton, merupakan jaminan bahwa para bangsawan itu tak akan memberontak terhadap raja atau menuntut menjadi penguasa tunggal. Kecuali itu, para pangeran berdaulat itu dapat mejadi sekutu yang wajar bagi penguasa Belanda. Hal itu terbukti dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh para bangsawan tersebut kepada Belanda tatkala berlangsung pemberontakan yang dipimpin Pangeran Diponegoro.

Tetapi para pangeran berdaulat di Yogyakarta dilarang memerintahkan ibu kota kecuali jika ada ijin khusus dari Residen, padahal ijin itu tak pernah diberikan kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Kalau ijin untuk bepergian itu sudah dikeluarkan, maka para bangsawan yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan perjalanannya kepada Gubernur Jenderal. Para pangeran dan pembesar negara di kerajaan Gubernur Jenderal. Para pangeran dan pembesar negara di kerajaan Yogyakarta, diantaranya para bekas pemberontakan, dipandang oleh pemerintah Belanda perlu mendapat pengawasan. Adapun kerajaan Surakarta meskipun kelihatan tenang-tenang saja, di dalamnya bayak terkandung bahan bakat yang secara cepat dan lambat dapat menyala dan membahayakan perdamaian. Yang dimasukkan bahan bakar disini adalah penyelesaian-penyelesaian yang dibuat oleh pihak Belanda dengan kerajaan tersebut, diantaranya penyelesaian mengenai pembagian tanah kerajaan yang masih tersisih. Oleh sebab itu menurut pihak Belanda, tak ada alasan untuk memandang raja Surakarta, raja Yogyakarta dan Mangkubunegoro memiliki hak yang sama. Kepentingan raja Surakarta harus dianggap lebih tinggi dari pada

kepentingan raja Yogyakarta, sebab di mata Belanda Surakarta tak memiliki banyak catatan seperti Yogyakarta yang telah menyebabkan perang sehingga terhadapnya perlu diadakan tindakan-tindakan.

Sesudah perang berlangsung pada tahun 1825-1830, karena peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, maka kerajaan Yogyakarta bukan saja berkurang dalam hal luasnya, melainkan juga dalam kekuasaan, kebesaran serta kekayaannya. Sejak tahun 1830 kerajaan Yogyakarta hanya memiliki dua buah daerah, yakni daerah Mataram dan daerah Gunung Kidul, yang menurut perjanjian adalah tahun 1830 dan tahun 1836 daerah-daerah itu hanya dapat dimiliki oleh kerajaan tersebut sebagai pinjaman. Hal yang semacam itu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para bangsawan, baik para kerabat keraton yang masih ingat akan kebenaran masa lampau, maupun para aktivitas dalam kini hidup dalam kemiskinan. Meskipun demikian sejak tahun 1839 sampai tahun 1848 para bangsawan itu tidak bertindak apa pun yang dapat merusak ketenangan, sehingga kerajaan Yogyakarta boleh dikatakan dalam keadaan damai.

Tetapi dalam bulan Februari tahun 1840 terjadi pemberontakan kecil yang dikorbankan oleh seorang tokoh yang tak terkenal, Sarip Prawirosentono alias Amad Sliman, sesorang keturunan Arab yang dilahirkan di Yogyakarta. Pemberontakan itu semula terlihat sebagai aksi yang dilakukan secara tiba-tiba, tetapi sebenarnya menurut rencana yang sudah lama disiapkan. Dengan janji-janji, dengan memakai gelar-gelar raja, dengan mengaku dirinya mendapat perintah dari Mekah dan dengan bantuan dua orang Cina yang mengaku Arab, Prawirosentono memperkenalkan dirinya sebagai tokoh yang bertugas mendirikan sebuah negara baru yang berdaulat. Pada waktu ada pesta besar di ibu kota banyak kepala daerah yang pergi ke pesta tersebut, Akibatnya banyak rakyat yang memiliki kaum pemberontakan sehingga dalam waktu yang singkat keturunan Arab itu dapat memperoleh pengikut sebanyak 1600 orang dari daerah-daerah yang ditinggalkan kepalanya. Adapun daerah yang dapat disukai oleh para pemberontak adalah daerah yang terletak di antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto, meliputi daerah milik Pangeran Adipati Paku Alam dan daerah Pangasih serta Sentolo milik Sultan. Setelah mengetahui adanya pemberontakan tersebut, sebelum pemberontakan itu meluas ketempat-tempat lain, dan

dengan alasan demi ketentraman kerajaan Yogyakarta dan daerah-daerah di sekitarnya, maka pemerintah Belanda, dengan bantuan pasukan Pangeran Adipati Paku Alam dan barisan kepala distrik Nanggulan, mengambil tindakan keras. Dengan demikian, pada hari keempat sesudah meletusnya, pemberontakan itu dapat dipadamkan, pelaku-pelakunya ditangkap dan kemudian dihadapkan ke muka pengadilan, Prawirosentono dan dua orang Cina pembantunya dihukum mati, sedang pembantu-pembantunya yang lain ada yang dijatuhi hukuman pembuangan.

Adanya pemberontakan tersebut, bagi pemerintah Belanda merupakan petunjuk perlunya menduduki lagi daerah yang terletak di antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto. Karena itu dalam bulan Maret tahun 1840 dimulai mempersenjatai dan menduduki benteng Sentolo. Dengan demikian, meskipun pada tahun 1840, 1841 dan 1842 kadang-kadang masih ada usaha untuk menimbulkan pemberontakan yang dipimpin oleh kepala-kepala atau ulama-ulama, karena adanya penangkapan-penangkapan dan pembuangan-pembuangan yang dilakukan pemerintah kolonial tepat pada waktunya terhadap para pelakunya, maka boleh dikatakan bahwa pemberontakan-pemberontakan itu tak mempunyai akibat yang berarti. Hal itu menyebabkan Yogyakarta sampai tahun 1848 dalam keadaan tenang-tenang saja tanpa gangguan.

Dalam bulan Januari tahun 1840, jadi kira-kira sebulan sebelum meletusnya pemberontakan Prawirosentono, sesuai dengan kehendak raja dan pembesar-pembesar neegara yang terpenting, oleh residen Yogyakarta diutarakan betapa baiknya jika tiga orang putra Diponegoro yang tinggal di Yogyakarta dibuang ke tempat lain. Sebab meskipun para putra Pangeran Diponegoro itu tidak terlihat dalam pemberontakan yang lampau, karena para bangsawan itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Pangeran Diponegoro, seorang tokoh yang sangat dihormati rakyat dan mempunyai nama yang selalu disebut-sebut setiap kali ada gangguan keamanan, maka dapatlah dipastikan bahwa ketiganya berbahaya bagi keamanan di kedua kerajaan.

Sesudah pemberontakan Prawirosentono berakhir, maka permintaan residen tersebut disetujui oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian dalam bulan April tahun 1840 ditentukan bahwa tiga orang

pangeran, yakni Pangeran Dipodiningrat, Pangeran Dipokusumo dan R.M. Raip dibuang ke Maluku dan agar tetap tinggal di sana dengan menerima tunjangan, tetapi di bawah pengawasan seperlunya supaya tidak melarikan diri.

Selanjutnya pada tahun 1848 pemerintah Belanda masih menganggap perlu untuk membuang seorang Jawa yang menyebut dirinya Amad Dio, dengan alasan bahwa orang itu telah menyusun rencana pemberontakan sambil mengaku dirinya sebagai putra pangeran Surakarta, Mangkubumi, dan yang sudah 19 tahun lamanya pergi tanpa pamit dari rumah ayahnya dan tak pernah ditemukan kembali.

Dalam pada itu meskipun sesudah selesai Perang Diponegoro diadakan pengaturan keadaan di Yogyakarta, pemerintah Belanda masih mempertahankan penguasaannya atas polisi dan hukum acara pidana di negeri tersebut. Oleh pemerintah kolonial didirikan pengadilan pidana di mana Residen bertugas sebagai ketua pengadilan dan asisten residen sebagai sekretarisnya. Adapun pengadilan mengenai perkara-perkara perdana diserahkan kepada Sultan dan pengadilan-pengadilan bumiputra.

Pada tahun 1846 ada seorang anggota Dewan Hindia Belanda dengan fungsi sebagai komisararis datang ke Surakarta memberi perintah agar diadakan perubahan peraturan. Tetapi pihak pemereintah memandang perintah tersebut tak perlu bagi Yogyakarta, sebab pihak pemerintah tidak melihat adanya alasan untuk mengadakan perubahan peraturan di Karesidenan tersebut, karena selama berlakunya peraturan-peraturan yang sudah ada disitu diberitakan selalu aman, pengadilan serta kepolisian di tempat mengunjungi Yogyakarta dan menyaksikan keadaan di sana, ia mengatakan, bahwa kepolisian di daerah itu juga kurang baik. Karena itu pemerintah lalu memberi kuasa kepadanya untuk merencanakan peraturan umum kepolisian bagi karesidenan tersebut.

Kemudian oleh komisararis dikatakan bahwa acara di Yogyakarta perlu diatur seperti di Surakarta. Tetapi karena hal itu tak dapat terjadi tanpa dihapuskannya pengadilan yang telah ada dan peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh pengadilan tersebut, maka pemerintah lalu mengambil putusan bahwa akan mempertahankan pengadilan pidana di

Yogyakarta. Hanya disarankan oleh pemerintah adanya perubahan-perubahan di dalam cara bekerja pengadilan. Mereka itu di dalam bulan Mei tahun 1847 oleh komisariss diajukan ketetapan-ketetapan rencana mengenai pelaksanaan pengadilan dan kepolisian. Tetapi sementara itu bagi penguasaan kepolisian di daerah yang dikuasai oleh Pangeran Adipati Paku Alam dan Pangeran Notoprojo, sampai tahun 1848, tidak ada ketetapan. Adanya campur tangan komisariss mengenai pengantian patih dan perbaikan dalam bidang pengadilan serta kepolisian, di daerah Yogyakarta dapat dilaksanakan secara lebih tegas dan lebih teratur daripada sebelumnya.

Menurut pendapat pihak Belanda, Sultan Yogyakarta pada masa itu yang usianya tiga puluh tahun selalu menunjukkan sikap yang baik dan patuh sekali terhadap Gubernemen. Akan tetapi ia berwatak; lemah dan tak berdaya menghadapi bujukan-bujukan dan hasutan-hasutan, baik yang berasal dari para pangeran yang lebih tua usia dan pengalamannya, maupun yang datang dari orang-orang rendahan saja. Sifatnya yang demikian itu menyebabkan ia sering membuat kesalahan-kesalahan. Tetapi raja Yogyakarta ini mau mendengarkan nasehat dan mudah diinsafkan dari kesesatan dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Dalam hubungan ini, pemerintah yang telah diperbuatnya. Dalam hubungan ini, pemerintah Belanda yang mendapat dukungan dari pangeran tua yang setia kepada Gubernemen menuntut agar raja bersikap waspada terhadap segala pengaruh yang datang dari para pangeran yang tak puas dan kurang baik sikapnya terhadap raja.

Pada tahun 1839 atas usul pemerintahan Hindia Belanda, Sultan Yogyakarta diangkat menjadi Panglima Singa Nederland/ Alasan yang menjadi dasar usul tersebut adalah, seperti halnya raja Surakarta dan Madura yang pernah mendapat penghargaan, sudah selayaknyalah jika Sultan Yogyakarta juga mendapat penghargaan yang sama. Sebab jika perlakuan terhadap Sultan atau raja Madura, akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap Gubernemen yang dianggapnya kurang suka terhadap raja Yogyakarta tersebut. Sebaliknya sikap simpatik terhadap raja Yogyakarta itu akan mempererat hubungan antara Sultan dengan Gubernemen.

Pada tahun 1846, pada waktu komisariss tiba di Yogyakarta olehnya ditemui banyak kesalahan dan hal-hal yang tidak pantas, baik di dalam

cara pemerintahan residen yang ditetapkan di sana, maupun di dalam cara raja Yogyakarta memerintah. Pada waktu itu komisariss mendapat pengaduan dari segala pihak, terutama dari patih dan dari beberapa orang pangeran tua yang mempunyai hubungan baik dengan Gubernemen, tentang perlakuan bentuk yang dialami pembesar-pembesar negara oleh raja, tentang hubungan raja dengan orang-orang yang berasal dari golongan rendah dan memiliki nama buruk tentang berbagai perbuatan lainnya yang bertentangan dengan hukum keraton, kebiasaan-kebiasaan pembesar keraton dan kewajiban raja Jawa. Dalam pengaduan itu disampaikan pula keterangan tentang adanya ketidakpuasan di kalangan para pembesar-pembesar dan pegawai rendah karena adanya di kalangan para pembesar-pembesar dan pegawai rendah karena adanya hal-hal yang buruk tersebut. Kecuali itu disampaikan pula keterangan tentang hutang raja yang menyebabkan raja itu dibawah pengaruh negatif orang-orang yang berpiutang, diantaranya yang terpenting adalah seorang kapten orang-orang yang berpiutang, di antaranya yang terpenting adalah seorang kapten orang-orang Cina di Yogyakarta. Akhirnya dalam pengaduan disebut pula nama sebuah perkumpulan di keraton Yogyakarta yakni *Tumenggung Sedodin*, perkumpulan itu sebutan-sebutan rendah, yang menginjak-injak rasa hormat yang tinggi terhadap pangkat dan kelahiran. Di dalam perkumpulan itu sebutan-sebutan diobral, sedang raja hanya memakai sebutan Tumenggung Kliwon Sosronegoro.

Pada waktu diterima menjadi anggota, setiap orang harus bersumpah akan tetap setia selamanya kepada raja. Sesudah itu raja berkesan memberi hadiah yang berupa tombak dan keris seharga f.15.000 kepada setiap anggota tersebut. Sementara itu raja juga minta kepada para pangeran serta bupati keraton, supaya keris pusaka warisan dari jaman kuno yang oleh orang Jawa dihargai sekali serta dipandang keramat dibagi-bagikan kepada para anggota sedodin tersebut. Maka, setelah kebenaran pengaduan tersebut dibuktikan, dan raja sendiri mengakuinya, komisariss, atas nama pemerintah Belanda secara sungguh-sungguh serta tegas memberi peringatan, agar raja kembali menepati kewajibannya sebagai raja, dan tidak lagi membuat kesalahan yang bertentangan dengan ketatanegaraan.

Karena peringatan komisariss itu, penghapusan lembaga Tumenggung Sedosin dan pengembalian keris pusaka segera dilaksanakan sebelum komisariss pulang, meskipun dengan hati yang berat. Sesudah itu pada tanggal 18 November 1946 raja membuat surat kepada Gubernur, minta agar segala perbuatannya yang salah dapat diampuni, kemudian berjanji, bahwa selanjutnya dalam segala hal berbuat secara tertib sesuai dengan kebiasaan dan kehendak Gubernemen.

Kemudian, agar Sultan mempunyai kesempatan membayar hutangnya dan dapat bebas dari pengaruh buruk orang-orang yang berpiutang, kepadanya diberikan uang muka yang diambilkan dari kas negara sejumlah f. 189.000, dengan perjanjian bahwa akan dibayar kembali dengan menahan f.5.000 dari ganti rugi yang akan diterimanya. Di dalam bulan April tahun 1847, pemerintah Belanda memberi izin kepada Sultan Yogyakarta untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis berusia 14 tahun bernama Raden Ajeng Handillah, putri Pangeran Suryaning Ngalogo. Mertua Sultan ini adalah putra Sultan Hamengku Buwono III dari *garwa ampeyan*, jadi saudara Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Makasar itu. Sementara itu pemerintah Belanda juga memberi izin kepada Sultan untuk menyerahkan permaisuri belia yang Pertama kepada orang tuanya. Permaisuri yang dimaksudkan di sini adalah ratu Kencono, putri pangeran Purwonegoro dan masih saudara sepupu Pangeran Adipati Paku Alam. Adapun sebabnya maka permaisuri tersebut diceraikan adalah, karena dengan permaisuri itu Sultan tak pernah dapat hidup dengan rukun.

Menurut keterangan lain, sebelum perkawinan antara Sultan dan raden Ajeng Handaliah dilaksanakan. ratu Kencono diperlakukan oleh Sultan dengan cara yang sangat menghina, sehingga orang tua dan ahli waris raja Yogyakarta itu takut akan pembalasan dari pihak kerabat Ratu Kencono. Sementara itu, untuk mempercepat urusan perkawinan, raja tersebut minta tolong kepada komisariss, yang ternyata dapat memenuhi permintaan itu, sehingga pada tanggal 19 April 1847 perceraian terjadi, kemudian dengan cara yang pantas menurut adat Jawa, Ratu Kencono dengan nama Ratu Sasi, dikembalikan kepada orang tuanya. Perkawinan antara Sultan dan Raden Ajeng Handillang dilangsungkan dalam bulan Agustus 1847. Karena perkawinan tersebut

nama istri Sultan yang baru itu diganti dengan dengan nama Ratu Kedaton. Dalam pada itu, ratu Sasi, atas izin raja tersebut menikah lagi dengan Pangeran Suradiningrat, putra bungsu Pangeran Adipati Paku Alam.

Pada waktu itu karena Sultan tidak mempunyai putra dari permaisuri, maka menurut adat Jawa, jika beliau mangkat, yang dipandang berhak menggantikan beliau sebagai raja adalah Pangeran Adipati Mangkubumi, yaitu saudara raja satu-satunya yang lahir dari permaisuri. Pangeran yang pada tahun 1839 mendapat pangkat Letnan Kolonel, dan pada tahun 1847 mendapat pangkat Kolonel itu berkedudukan sebagai putra mahkota. Ketika komisaris datang ke Yogyakarta pangeran tersebut sudah berusia 28 tahun, tetapi ia belum pernah menikah secara sah. Masalah perkawinan pangeran tersebut menjadi bahan pemikiran yang serius di keraton maupun di kalangan Belanda.

Kemudian, baik sultan maupun pangeran itu sendiri menyatakan keinginan masing-masing, dan dengan alasan bahwa putra mahkota tersebut tidak dapat memilih dari antara sekian banyak putri di Yogyakarta untuk calon istrinya komisaris mengajukan usul, supaya sang putra mahkotaizinkan menikah dengan putri, Pangeran Adipati Ngabehi Surakarta. Adapun pangeran ini adalah pulang sulung Susuhan Paku Buwono IV dari garwa ampeyan, dan saudara tertua Susuhan Surakarta yang duduk di atas tahta. Maka karena usul komisaris, dalam bulan Maret tahun 1847 pemerintah Belanda memberikan izinnya.

Tetapi ketika pihak-pihak yang akan berbesan itu sampai pada perundingan mengenai tempat dan upacara yang akan dilaksanakan, terjadi lagi ketegangan. Semula orang-orang Yogyakarta menghendaki agar upacara dilaksanakan di Yogyakarta. Kemudian orang-orang Yogyakarta itu dapat menyetujui jika upacara dilaksanakan di Surakarta, tetapi mereka menghendaki agar kedatangan Pangeran Adipati Mangkubumi sebagai mempelai laki-laki ke Surakarta itu diiringi oleh 5.000 orang. Ketika pemerintah Belanda mendengar berita tersebut segera menyampaikan penolakannya. Penolakan pemerintah Belanda tersebut didasarkan alasan, tersiarnya berita tentang adanya ramalan bahwa akan timbul bencana apabila munculnya saudara Sultan Yogyakarta di wilayah Surakarta dengan pengiring yang sekian

besarnya dan yang sebagian besar bersenjata dan dapat membahayakan perdamaian. Dalam pada itu pemerintah Belanda mengemukakan keinginannya, agar Pangeran Adipati Mangkubumi datang ke Surakarta hanya dengan pengiring 300 orang tetapi pihak Yogyakarta menolaknya, dengan pengiring 300 orang, tetapi pihak Yogyakarta menolaknya. Akhirnya terjadi pula kata sepakat di antara dua pihak yang akan berbesan itu, yaitu bahwa upacara perkawinan akan dilangsungkan di Yogyakarta dan bahwa Pangeran Adipati Ngabehi akan antarkan putrinya ke Yogyakarta disertai Asisten Raseiden Surakarta, dengan 250 sampai 300 orang pengiring dan beberapa orang pangeran Surakarta.

Meskipun penyelesaian itu tak sesuai sepenuhnya dengan adat-adat raja Jawa, Upacara perkawinan yang berlangsung di istana Yogyakarta pada tanggal 11 September 1848 itu, berjalan dengan tenteram dan teratur. Penyelesaian yang telah dibuat oleh Susuhan Surakarta dan Sultan Yogyakarta mengenai perkawinan tersebut adalah suatu tanda bahwa pada masa itu baik keraton Surakarta maupun Yogyakarta cenderung kepada usaha itu ke arah perdamaian dan ketertiban. Dalam jangka pendek, usaha itu dimaksudkan untuk meredakan gejolak yang timbul di kalangan penduduk sebagai akibat berita-berita yang bersifat mengacaukan. Hal itu bagi pemerintah Belanda adalah sesuatu tanda bahwa kedua kerajaan beritikad baik, dan itu dipandang sangat memuaskan.

Selanjutnya, pemerintahan Belanda yang tidak hendak tinggal diam saja dalam menyatakan simpatinya, kepada kedua belah pihak, itu telah memberikan bantuannya untuk meringankan biaya upacara menurut adat Jawa yang keras itu dengan jalan memberikan uang muka ganti rugi, yang biasanya dibayarkan setiap tahun kepada kedua orang raja Jawa tersebut.

Pada tahun 1846 karena kedatangannya ke Yogyakarta komisararis menjadi faham benar-benar, bahwa pengadilan dan kepolisian di Yogyakarta tidak dapat bekerja dengan baik, dan bahwa di Yogyakarta banyak terjadi kesalahan-kesalahan serta penyalahgunaan. Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa sebaiknya patih Yogyakarta Raden Adipati Danurejo yang sudah lanjut usia dan karenanya tidak lagi mempunyai kemampuan melaksanakan kewajiban itu, diganti. Lebih lanjut

komisaris itu mengatakan, kalau patih tersebut tidak diganti, maka jika peraturan-peraturan mengenai pengadilan serta polisi yang baru sudah berlaku nanti, mungkin akan ditemui hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan dari pihak pembesar kerajaan tersebut, pada hal sebenarnya yang diharapkan daripadanya adalah bantuan yang kuat.

Dalam pada itu, meskipun tidak segera dapat menyetujui usul komisaris tersebut, pemerintah Belanda mendapat keyakinan bahwa patih yang tua itu tidak lagi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sebab telah megingkari tugas yang diberikan oleh raja dan menyia-nyiaikan kepercayaan pemerintah Belanda dengan mengizinkan berdirinya perkumpulan Tumenggung Sedosin. Kecuali itu, ia juga telah menyalagunakan pengaruhnya dan tidak menjalankan peraturan kepolisian yang diadakan pada tahun 1831/. Kemudian ia juga telah menyelahgunakan pengaruhnya untuk merampas hasil rakyat baik yang berupa jasa maupun uang bagi keuntungan sendiri, dengan mengharap uang biaya pembuatan jembatan dan jalan-jalan sehingga cabang di atas tersebut terlantar. Tambahan pula telah menarik pajak yang berlangsung dari rakyat dan mengaku sebagai milik sendiri hasil gunung kapur di Gamping serta hasil hutan di Gunung Kidul dengan cara yang bertentangan dengan kontrak yang ada.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan berdasarkan pengakuan pilih itu sendiri, yaitu bahwa beliau sudah tidak memenuhi kewajiban terhadap pemerintahan Belanda, maka sesuai dengan keinginan Sultan pula dalam bulan pebruari tahun 1847 patih tersebut di bebaskan dari tugasnya sebagai patih. Mengingat masa kerjanya yang lama, jasa-jasanya di masa yang lampau dan hubungan-hubungannya yang baik di masyarakat, kepadanya diberikan pensiun f. 1.000 sebulan dari kas negara, ditambah dengan sebutan pangeran dan izin menggunakan nama Kusumoyudo.

Keputusan terhadap patih itu diambil oleh pemerintah Belanda terutama dengan harapan, agar ia makin tunduk kepada keinginan pemerintah Belanda yang berarti bahwa ia tidak akan bertempat tinggal di atas dekat dengan tempat tinggalnya yang lama, yang berkat lamanya tinggal di situ memperoleh banyak hubungan sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, jika ia tetap berada di tempat tersebut, dianggap sangat membahayakan.

Sementara itu pemerintah Belanda menegaskan bahwa pihaknya tidak berkeberatan jika bekas patih tersebut pindah ke Mojokerto, tempat asalnya.

Karena peringatan itu maka bekas patih tersebut segera pindah ke Mojokerto bersama dengan kerluarga serta pengiring sebanyak 200 orang. Akan tetapi karena diketahui bahwa ia suka berada di dekat daerah-daerah kerajaan, dalam bulan Juni tahun 1847 Residen Surabaya mendapat surat agar ia tidak mengizinkan bekas pembesar Yogyakarta itu pergi ke karesidenan-karesidenan lain.

Kemudian atas usul komnisatis dan atas permohonan Sultan Yogyakarta diangkatlah Raden Tumenggung Gondokusumo menjadi patih di Yogyakarta dengan gelar Raden Adipati Danurejo. Patih yang baru itu adalah putra Patih Danurejo yang pada tahun 1912 dibunuh atas perintah Sultan. Agar pengangkatan tersebut tidak menyinggung perasaan Raden Tumenggung Yudonegoro dan Raden Tumenggung Martonegoro, begitu pula supaya Raden Tumenggung Martonegoro yang mejabat patih dipandang kurang tepat itu merasa puas, maka atas permohonan Sultan pemerintah Belanda memutuskan Raden Tumenggung Yudonegoro menjadi pangeran, sedang Raden Tumenggung Martonegoro menjadi komando prajurit-parjurit sultan dengan pangkat letnan kolonel.

Adapun upacara wisuda patih yang berlangsung pada tanggal 22 Pebruari 1847, di mana komisariss bertindak sebagai perwisudanya.

Dalam pada itu Raden Tumenggung Yudonegoro yang sudah diangkat mejadi pangeran, dan yang pada tahun 1846 diangkat mejadi letnan kolonel tituler, kemudiann pada tahun 1847 ketika Menteri Negara Gubernur Jenderal berada di Yogyakarta diperbolehkan mengenakan seragam staf Gubernur Jenderal sebagai bukti, adanya perkenan pembesar Belanda tersebut. Tetapi sesudah itu, karena menurut pandangan pemerintah Belanda tuntutan-tuntutan pangeran teresebut berlebihan-lebihan dan nafsunya akan kehormatan dan kesombongan yang melampaui batas, demikian pula karena sikapnya yang dipandang tidak senonoh terhadap Sultan dan Patih, memberi banyak alasan kepada kalangan pemerintah Belanda untuk merasa tidak puas, sehingga pemerintah Belanda mengancam jika di kemudian hari

beliau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, ia pasti dipecat dari kedudukannya sebagai ajudan Gubernur Jenderal. Malahan mungkin tidakan yang pasti merendahkan diri bangsawan tersebut akan segera dilaksanakan dengan mengusirnya dari Yogyakarta. Kemudian ternyata bahwa ancaman itu bukan tanpa hasil.

Adapun Pangeran Adipati Paku Alam selalu menunjukkan kesetiaan yang tulus ikhlas kepada pemerintahan Belanda, karena itu ia mendapat hak-hak istimewa dari pemerintahan Belanda, sebagai perkecualian. Pada tahun 1839, sebagai peringatan cinta pemerintah Belanda, oleh raja Belanda diangkatlah pangeran tersebut menjadi Ridder golongan Singa Nederland, dan putra tertuanya yang masih hidup diangkat menjadi letnan kolonel, sedang putra sulungnya dari permaisuri pada tahun 1841 diberi setunan Pangeran dan nama Aryo Suryoningrat.

Pada tahun 1843 Pangeran Adipati Paku Alam mengatakan keinginannya agar putra mahkota yang tampaknya sakit ingatan, digantikan oleh salah seorang dari kedua orang putranya yang lain, yang lahir dari permaisuri pula. Kecuali itu ia juga mengatakan agar pemilihan itu dilakukan oleh pemerintah Belanda.

Untuk menentramkan hati Pangeran Adipati Paku Alam itu, pemerintah Belanda berjanji, bahwa jika ia mangkat dan putra mahkotanya tidak dapat sembuh sama sekali, salah seorang dari putranya akan dipilih oleh pemerintah Belanda menggantikan pangeran yang sakit itu.

Selanjutnya, pangeran merdeka Yogyakarta yang lain, Pangeran Adipati Notoprojo, meskipun dulu pernah ikut secara aktif dalam pemberontakan yang dipimpin Pangeran Diponegoro, sekarang bersikap setia sekali kepada pemerintah Belanda. Maka untuk memelihara kesetiiaannya itu, pemerintah Belanda mengangkat putranya menjadi pangeran dengan nama Ngabdul Kamar Sayidina.

Sementara itu karena adanya laporan dan sesudah diadakan pemeriksaan diketahui oleh pemerintah Belanda bahwa ada kekacauan dalam hal penyewaan tanah kepada orang-orang Belanda partikelir di wilayah kerajaan Jawa, khususnya di Yogyakarta. Karena itu, dalam

bulan Nopember tahun 1948 pemerintah Belanda merasa berkewajiban mengeluarkan peraturan bagi para penyewa tanah berkebangsaan Eropa yang isinya bahwa untuk sementara waktu mereka dilarang menetap di Yogyakarta. Peraturan itu dipandang perlu dikeluarkan bagi para penyewa tanah yang berkebangsaan Eropa dan yang berstatus sebagai penduduk Yogyakarta, lebih-lebih setelah adanya pergolakan politik di Eropa sejak bulan Pebruari 1948, sebab pada masa itu kelihatan adanya semangat untuk memberontak yang dapat membahayakan kepentingan Nederland di Jawa, khususnya di daerah-daerah kerajaan. Di Yogyakarta masalah penyewaan tanah kepada orang-orang Eropa adalah masalah yang sangat penting, sebab masalah tersebut dapat mempengaruhi keadaan kenegaraan di kerajaan ini.

Karena meningkatnya nafsu di kalangan penduduk yang berkebangsaan Eropa di Jawa untuk memperoleh tanah-tanah di daerah kerajaan dengan jalan menyewa, perhatian pemerintah Belanda di tahun 1839 khusus ditujukan kepada masalah penyewaan tanah itu. Dalam hubungan ini pemerintah Belanda memandang perlu untuk mengadakan pembatasan sementara, agar penyalahgunaan dapat dicegah, dan agar kepentingan para raja serta rakyat mereka dan kepentingan rakyat di luar kerajaan dapat dilindungi. Oleh sebab itu maka dibuatlah peraturan tentang sewa menyewa tanah di daerah kerajaan, baik di Surakarta maupun di Yogyakarta yang harus ditati oleh para penyewa tanah berkebangsaan Eropa dan keturunan mereka.

Pada tahun 1841, berkenaan dengan masalah sewa menyewa tanah itu pemerintah Belanda menyatakan pendapatnya. Menurut pendapat itu, memang benar bahwa pemberian tanah di Jawa kepada orang-orang Eropa untuk perkebunan dan pertanian hampir selalu berakibat terganggunya hak-hak dan lembaga-lembaga kemasyarakatan penduduk desa. Oleh sebab itu, dalam hal tersebut sebaiknya dibuat persyaratan, bahwa pemberian tersebut hanya dapat dilaksanakan, jika tanah yang diberikan itu berada langsung di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Hal itu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda dengan para raja, yaitu perjanjian yang menjamin kebebasan para raja tersebut untuk menentukan nasib tanah yang sudah diterima dari pemerintah Belanda sebagai pemberian. Jadi, jika diperlukan pemerintah penghentian sewa menyewa tanah di daerah kerajaan,

seharusnya perintah itu berasal dari para raja yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu maka dalam bulan Maret tahun 1841 residen Surakarta dan Yogyakarta diperintahkan, agar berusaha meyakinkan raja di kedua kerajaan tersebut, bahwa akan baik sekali jika penyewaan tanah kepada orang Eropa untuk sementara waktu atau untuk seterusnya dihentikan, atau sekurang-kurangnya dibatasi. Tetapi, sementara itu para residen tersebut diberi kebebasan untuk tidak mengindahkan perintah tersebut, jika mereka melihat adanya keberatan-keberatan dalam pelaksanaannya. Kemudian ternyata bahwa kedua orang residen itu menggunakan haknya masing-masing untuk menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Sementara itu, untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan pemerintah di negeri Belanda menyetujui pokok pikiran, bahwa perluasan sewa menyewa tanah di daerah-daerah kerajaan akan dicegah, jika hal itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Pada waktu itu timbul masalah-masalah yang disebabkan oleh sewa menyewa tanah yang menyulitkan pemerintah Belanda misalnya: masalah kekacauan yang banyak terjadi, masalah penghasilan kaum buruh, masalah kerugian secara langsung dan tidak langsung yang dialami oleh para raja dan rakyat serta pemerintah sendiri sebagai akibat tidak berhasilnya perusahaan. Karena itu maka pada tahun 1844 diadakan penyelidikan dan pertimbangan mengenai masalah tersebut.

Kemudian, pada tahun 1845, setelah mengadakan pertimbangan secara masak, pemerintah Belanda mengambil keputusan bahwa tidak akan memperbolehkan perluasan sewa menyewa tanah. Tetapi, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada, asal dalam kontraknya ditentukan batas waktu berakhirnya, dapat membuat kontrak yang baru. Jika kontrak yang sudah dibuat oleh salah satu perusahaan banyak jumlahnya, dan batas waktu berakhirnya berbeda-beda, maka kontrak yang baru dapat dibuat, sesudah batas waktu kontrak yang lama habis seluruhnya. Selanjutnya, jika batas waktu berakhirnya kontrak yang lama masih dua tahun lagi (dihitung sejak tahun 1845) maka kontrak yang baru dapat melampaui tahun 1859.²⁾

5.2 Penyelenggaraan Kehidupan Dalam Masyarakat

Di sekitar tahun 1800 dalam masyarakat Jawa umumnya atau dalam masyarakat Yogyakarta khususnya para petani mampu menghasilkan barang-barang bagi pemuasan langsung kebutuhan-kebutuhan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan dan cara produksi mereka ditentukan oleh tradisi. Dalam kehidupan ekonomi tersebut, jika seorang petani membutuhkan tenaga orang lain, maka bantuan yang diperolehnya selalu bersifat menolong sifat gotong royong dalam pergaulan hidup di desa menjamin setiap orang dapat memperoleh pertolongan yang diperlukannya, tetapi sebaliknya, hal tersebut juga mewajibkan setiap orang untuk menolong orang lain. Menyewakan tanah jarang terjadi tetapi membagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah agak lebih banyak terlihat. Kerajinan tangan tidak mempunyai arti sedang dalam bidang petukangan terdapat spesialisasi menurut desanya. Perdagangan dan lalu lintas belum tampak ramai, sementara pertukaran hasil tanah antara desa yang satu dengan yang lain sudah ada, malahan beberapa daerah sudah mengenal pasar. Pemindahan hak atas tanah, hubungan kerja dan penyerahan hasil dilakukan tanpa perjanjian.

Di atas kehidupan desa yang sederhana itu terdapat kehidupan ekonomi yang teratur, yang berkewajiban memenuhi kebutuhan pemerintah pribumi dan pemerintah Belanda. Alat organisasi kehidupan ekonomi yang teratur itu terutama terdiri atas hubungan-hubungan kekuasaan dan ketaatan yang timbul dari kekuasaan raja-raja dan bupati-bupati, juga kepala-kepala yang termasuk dalam lingkungan raja-raja dan bupati-bupati, atau setidaknya-tidaknya yang berada lebih tinggi daripada lingkungan desa. Hubungan-hubungan kekuasaan dan ketaatan itu disebut *ikatan feodal*. Alat organisasi kehidupan ekonomi teratur yang kedua adalah ikatan desa, yaitu ikatan antara sesama orang desa yang berdasarkan kegotong-royongan seperti yang sudah dilukiskan di atas. Ikatan feodal dan ikatan desa itu bersama-sama disebut *ikatan adat*.³⁾

Sejak dulu dalam masyarakat Jawa dapat dibedakan empat macam tingkatan, yaitu: raja, bupati, kepala desa dan orang desa. Mula-mula orang Belanda mengadakan hubungan dengan raja, sebab raja bersama dengan bangsawan mempunyai pengaruh yang besar dalam perdagangan. Kemudian pada akhir abad ke-18 Belanda sudah

mempunyai hubungan langsung dengan bupati yang daerahnya sudah jatuh ke dalam kekuasaan Belanda. Tetapi pada waktu itu raja Yogyakarta dan raja Surakarta masih mempunyai kemerdekaan, meskipun terbatas. Di kedua kerajaan tersebut pengaruh Belanda hanya sampai pada raja atau pegawai pemerintah kerajaan.⁴⁾

Jika kita melihat perkembangan sejarah yang pernah berlangsung di Indonesia, maka tampak pada kita bahwa pengaruh Barat senantiasa bertambah mendalam. Pengaruh Barat yang kira-kira pada tahun 1600 mencapai raja-raja, dan antara tahun 1750 sampai tahun 1800 mencapai para bupati, dalam pertengahan abad ke-19 telah mencapai para kepala desa dan kira-kira pada tahun 1900 sudah sampai pada rakyat desa. Setelah tahun 1800 pengaruh Barat sangat bertambah, dan pengaruh itu menjalar makin cepat dan luas serta lebih dalam daripada waktu sebelumnya. Sesudah tahun 1800 Jawa yang feodal itu dalam beberapa hal diubah menjadi pergaulan hidup yang modern.⁵⁾

Pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Daendels, di Hindia Belanda para pegawai diberi gaji tetap, tetapi mereka dilarang menerima pemberian-pemberian, dan sebagian dari mereka malah dilarang melakukan perdagangan. Pada waktu itu larangan melakukan perdagangan belum dapat dikenakan secara mutlak kepada para pegawai, sebab belum ada golongan pedagang yang sesungguhnya. Karena tindakan Daendels itu maka korps pegawai warisan dari VOC yang bercorak kuna itu mendapat sifat-sifat korps pegawai yang modern. Proses modernisasi yang berlangsung dalam abad ke-19 itu dimulai oleh Daendels dengan modernisasi lapisan atas orang-orang Eropa.

Di bawah Daendels semua penyerahan masih tetap penyerahan wajib dan semua pekerjaan masih tetap pekerjaan wajib. Dengan demikian pergaulan hidup masih tetap terikat oleh adat.

Peraturan-peraturan Daendels memerlukan lebih banyak perhatian dan pengawasan oleh orang-orang Eropa di daerah pedalaman. Pemerintah Daendels yang bekerja secara sentral itu agaknya menyebabkan pengaruh Eropa pada waktu itu menjadi bertambah dalam.⁶⁾

Mengenai pemerintahan Daendels, dapatlah dikatakan bahwa ia tidak mengganggu struktur ekonomi pergaulan hidup yang tradisional, melainkan mengaturnya, dan bahwa pengaruh Barat di bawah pemerintahannya telah mulai menyampingkan para bupati.⁷⁾

Adapun tindakan yang dilakukan Daendels dalam masa pemerintahannya meliputi: bidang politik, bidang pertanian dan bidang ekonomi. Di bidang politik, khususnya di bidang administrasi pemerintahan, pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur di mana setiap prefektur dikepalai oleh seorang prefek-prefek. Sementara itu ia sangat membenci sistem kerajaan, meskipun ia sebenarnya adalah pengangum kaisar Napoleon. Di bidang pertanian ia memerintahkan pembuatan jalan yang menghubungkan Anyer di Jawa Barat dan Panarukan di Jawa Timur. Pembuatan itu dilaksanakan dengan paksaan yang disertai kekerasan dan kekejaman. Daendels juga memerintahkan pembuatan pangkalan angkatan laut yang teratur di Ujung Kulon dan Surabaya, meskipun kemudian ternyata bahwa yang berhasil hanya yang di Surabaya. Di bidang ekonomi, khususnya di bidang keuangan, ia berusaha menambah kas negeri. Dalam hal tersebut ia lebih mengintensifkan pelaksanaan sistem Contingenten dan sistem penyerahan wajib kecuali itu ia juga menjual tanah-tanah yang luas kepada orang partikelir.

Terutama karena kekerasan yang selalu dipakai dalam tindakannya, maka Daendels menimbulkan ketakutan dan kebencian di mana-mana, di antaranya di Yogyakarta.

Pada masa itu di kerajaan Yogyakarta (1810) telah lama berlangsung pergolakan politik. Pergolakan tersebut timbul sebagai akibat adanya pertentangan antara dua partai, yaitu antara partai anti Belanda yang dipimpin oleh Raja Hamengku Buwono II dan partai yang pro Belanda di bawah pimpinan patih Danurejo. Dalam pergolakan tersebut, pihak raja yang dibantu oleh Pangeran Notokusumo, mencapai kemenangan, sehingga patih Danurejo dipecat dari jabatannya.

Kemenangan partai anti Belanda di Yogyakarta itu menyebabkan pihak Belanda merasa khawatir. Kemudian dengan maksud supaya partai pro Belanda di Kraton Yogyakarta menjadi kuat lagi dan mencapai kemenangan, Daendels mengajukan tuntutan yang dibuat-

buat terhadap raja Yogyakarta. Malahan pada tahun 1810 Daendels mengerahkan tentara sebesar 1500 orang untuk mengepung istana Yogyakarta, memaksa raja menyerahkan Pangeran Notokusumo dan mengangkat kembali Patih Danurejo.

Politik Daendels yang selalu menimbulkan pertentangan dengan para raja hanya menghasilkan dendam dan kebencian dan akibatnya yang lebih lanjut hanya memudahkan datangnya kekuasaan asing yang lain ke Indonesia.⁸⁾

Sejak tahun 1811 Indonesia menjadi jajahan *East Indian Company* yang berpusat di Calcuta dan dikepalai oleh seorang Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Calcuta pula. Pulau Jawa dan sekitarnya, demikian istilah yang dipakai untuk menyebut Indonesia pada masa itu, diperintah oleh Thomas Stamford Raffles dengan pangkat Letnan Gubernur.⁹⁾

Raffles mempunyai pendapat tentang kenegaraan yang pada pokoknya dikuasai oleh fikiran tentang kebebasan dan kepastian hukum. Yang dimaksudkan dengan kebebasan adalah hal yang bertentangan dengan monopoli dan paksa. Yang dimaksudkan dengan monopoli adalah yang diberikan kepada perdagangan Kompeni, yang menutup pintu terhadap perdagangan-pedagangan Eropa lainnya. Sedang yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan yang dikenakan terhadap penduduk Jawa untuk melakukan penyerahan paksa dan rodi. Paksaan feodah itu harus diganti dengan kebebasan orang dan benda, jadi juga kebebasan bertanam dan bekerja, serta kebebasan dalam mengusahakan hasil usahanya. Dengan perkataan lain, penduduk Jawa harus diemansipasikan.¹⁰⁾

Hal yang penting yang dilakukan Raffles ialah mengadakan sistem pajak tanah. Adapun dasar hukum pajak tanah tersebut adalah sebagai berikut: Pada masa yang lalu tanah-tanah adalah milik raja. Karena raja-raja yang memiliki tanah itu kemudian takluk kepada Inggris, dengan sendirinya, maka rakyat yang di masa lalu membayar sewa tanah dalam bentuk upeti kepada raja sekarang rakyat sewa tanah kepada Inggris dalam bentuk pajak tanah.

Hal yang lain yang dapat dianggap penting pula ialah keadaan Raffles dalam penyelidikan sejarah tanah Jawa. Dalam keadaan tersebut

bantuan saleh alias Raden Notodiningrat memberikan banyak bantuan dengan bertindak sebagai juru bahasanya. selanjutnya, dengan bantuan Notokusumo II dari Sumenep ia dapat menyelesaikan buku karangannya yang berjudul History of jaya yang terdiri atas dua jilid. Semenntara itu Reffes juga banyak memberi kepada John Crawford, yaitu residen Yogyakarta pada masa itu, sehingga residen tersebut dapat pula menyelesaikan buku karangannya yang berjudul History of East Indian Archipelago yang terdiri atas tiga jilid.

Pada waktu Raffles berkuasa di Indonesia, yang menjadi raja di Yogyakarta adalah Sultan Sepuh atau Sultan Hamengku Buwono II. Rajate rsebut, yang dulu diturunkan dari tahtanya oleh Daendels, setelah Daendels meninggalkan Jawa segera mengambil kembali tahtanya. Orang-orang yang pro Belanda juga dengan segera disingirkan. Hamengku buwono II mempunyai dugaan bahwa penguasa baru itu bersifat lemah. Dugaan ini ternyata meleset sebelum ia dapat memperkuat diri secara maksimal, Yogyakarta sudah diserang oleh tentara Inggris (1812). Pertahanan Yogyakarta dihancurkan, meskipun pertahanan tersebut diprkuat dengan 8000 prajurit. Sultan diturunkan dari tahta, lalu dibuang; mula-mula ke pulau Pinang, kemudian dipindahkan ke Ambon. Harta kekayaannya dirampas. Sebagai raja yogyakarta naiklah di atas tahta Sultan Rojo, dengan gelar Sultan Hamengki Buwono III. Adapun Pangeran Notokusomo, seorang tokoh yang pro Inggris dan yang dulu pernah akan dihukum mati oleh Daendels, diangkat menjadi raja di daerah Yogyakarta dengan gelar Paku Alam. daerah kekuasaannya disebut Paku Alam. daerah tersebut diambilkan dari daerah kesultanan Yogyakarta.¹¹⁾

5.3. *Kehidupan Seni Budaya.*

Di sekitar tahun 1800 kebudayaan Jawa pada umumnya atau kebudayaan yang hidup di kerajaan Yogyakarta khususnya dapat disebut kebudayaan kepahlawanan sebab kebudayaan ini sngat dipengaruhi oleh cita-cita kepahlawanan atau cita-cita kesatriaan. Kebudayaan itu sangat menjunjung tinggi bentuk hidup kebangsawanan, yang bersumber karya sastra klasik Jawa dan wayang.

Karya sastra klasik Jawa dan wayang itu dapat dipandang sebagai ensiklopedi nilai hidup kuno, yang memberikan pegangan hidup, pandangan dunia dan padangan hidup kepada orang Jawa. Karena pemberian atau pelajaran itu maka orang Jawa dapat terbantu dalam pembentukan sifat serta peradaban batin dan memperoleh kecakapan untuk mengetahui kebaikan maupun kejahatan hati orang.

Bagi pendidikan Jawa yang baik, pengetahuan tentang kesusastraan dan wayang adalah hal yang penting karena pendidikan Jawa yang tulen selalu menghendaki perkembangan kepribadian yang sempurna.

Karya sastra dan wayang itu kaya dengan sifat hidup, sikap hidup dan teladan yang selalu menarikhati orang Jawa untuk mengikutinya. Di dalamnya terkandung pendidikan supaya orang memiliki cita-cita untuk menjadi pahlwan yang suci yang tanpa rasa takut dan sifat tercela, yang tabah, sederhana, teguh, dan dapat menguasai diri sendiri dengan cara yang sempurna.

Wayang berbicara kepada semua orang, kepada golongan tinggi, golongan rendah, orang tua, orang muda, kaum pria maupun wanita. Wayang itu mengandung juga teladan dan pelajaran mengenai roman muka, sikap gerak-gerik badan serta anggota-anggotanya dan juga mengenai cara-cara bergerak. Misalnya, orang yang bersifat lalim digantikan dengan sikap kedua kaki terbuka, tetapi orang yang budiman digambarkan dengan sikap kaki yang agak rapat. Dengan demikian, wayang dapat disebut sebagai ensiklopedi tata cara kesopananan hidup.¹²⁾ Ada berjenis-jenis pertunjukkan wayang kulit di Jawa Tengah, khususnya di Yogyakarta, yaitu wayang Purwo, Wayang Ledog dan wayang Madya. Wayang Purwo selalu berkisar pada lakon-lakon yang bersumber Mahabharata, Ramayana dan Arjuna Sastrabahu. Wayang Ledog ialah pertunjukan wayang kulit dengan ceritera Panji. Adapun wayang Madya menggunakan ceritera yang bersumber puisi epik karya pujangga Ronggowarsiro.

Ada juga wayang dalam bentuk lain, yaitu Wayang Klitik atau Wayang Krucil. Wayang ini dibuat dari kayu yang berbentuk gepeng atau pipih terulir serta tersungging, tetapi lengannnya di buat dari kulit. Di Jawa Tengah termasuk di Yogyakarta juga, lakonnya diambil dari ceritera Damarwulan.

Kecuali yang disebutkan di atas, ada pula Wayang Legok, yang berwujud boneka kayu berdimensi tiga dan diberi berpakaian. Di Jawa Tengah wayang golek mengambil cerita Menak, yang berkisar pada diri Amir Hamzah, yaitu paman Nabi Muhammad.¹³⁾

Selanjutnya, perlu dibicarakan pula apa yang disebut Wayang wong ini, sebagai pertunjukan istana sudah ada sejak abad ke-18, diciptakan oleh Sultan Hamengku Buwono I (1755--1792). Mula-mula yang dipergelarkan hanya lakon-lakon yang diambil dari Mahabharata, tetapi kemudian pada awal abad ke-20 dipergelarkan juga lakon-lakon yang diambil dari cerita Ramayana.¹⁴⁾

Wayang wong Yogyakarta, adalah drama tari Jawa klasik yang berdialog dengan bahasa prosa. Karena sifat klasiknya itu, maka tehnik tarinya harus benar-benar dikuasai oleh para penarinya. Standarasasi yang mengikat meyebabkan para penarinya harus benar-benar berdisiplin Ekspresi emosi juga sangat dibatasi oleh standar-standar yang ada. Dengan demikian konsekrasi dan disiplin penari harus diarahkan kepada pedoman dan hal tehnik tarinya maupun isi kejiwaannya, Dalam jiwa, tari Jawa gaya Yogyakarta sudah mempunyai landasan fukosofis sejak lama. Landasan filsufis itu ialah *Sawiji*, *gaged*, *sengguh* dan *ora mingkuh*. *Sawaji* berarti pemusatan perhatian, *gaged* berarti dengan penuh kemauan, *sengguh* berarti percaya pada kemauan diri, sedang *ora mingkuh* berarti pantang mundur¹⁵⁾.

Mengenai istilah *wayang wong*, secara etimologi berasal dari kata *wayang* dan *wong*. Wayang berarti boneka kulit atau bayangan, sedang wong berarti orang. Dalam arti yang terakhir, wayang wong adalah drama tari yang dibawakan oleh manusia. Jadi, kata didalam istilah wayang oleh mausia. Jadi, kata wayang di dalam istilah wayang wong sudah berubah artinya, tetapi kata itu masih menggantikan orang pada istilah wayang kulit, yang mendasari timbulnya wayang wong.¹⁶⁾

Pertunjukkan wayang wong di istana Yogyakarta selalu diadakan di Tratat Bangsal Kencono yang biasa disebut pula *tratat wetan* (tratat timur). *Tratat* tersebut adalah sebuah ruangan yang tidak ber dinding dengan tiang-tiang besi di bagian tepinya, dan berbentuk segi panjang. Semula *tratat* tidak berlantai, jadi hanya beralas tanah dan pasir saja.

Tetapi setelah wayang wong mengalami perkembangan yang baik, maka *tratak* tersebut lalu diberi lantai marmer.¹⁷⁾

Kemudian setelah *wayang wong* dipertunjukkan di luar istana, pertunjukkan tersebut biasanya diadakan di pendopo, di samping itu sering di atas panggung.¹⁸⁾

Petugas karawitan biasanya terdiri atas tiga atau empat grup yang bermain bergantian. Peranan-peranan utama biasanya juga dibawakan oleh dua orang penari secara bergiliran. Sampai tahun 1940 wayang wong di Yogyakarta tidak pernah dimainkan oleh penari wanita. Peranan puteri selalu dibawakan oleh pemuda oleh penari wanita. Peranan puteri selalu dibawakan oleh pemuda belasan tahun yang berwajah serta berwatakan mirip wanita.¹⁹⁾

Untuk meningkatkan kemahiran para penari, latihan-latihan terus diadakan setiap hari di istana, kecuali pada hari Jum'at dan dalam bulan puasa. Semetara itu supaya pertunjukkan makin semarak, kemudian diciptakan kostum wayang wong yang disesuaikan dengan wayang kulit. Penciptannya adalah Tumenggung Joyodipuro, kepala sebuah badan yang bertugas khusus membuat pakaian *wayang wong*. Badan tersebut bernama *Kawedanan Hageng Gladag lan Kriyo*.²⁰⁾

Dalam pembicaraan mengenai wayang wong sebagai drama tari, rasanya perlu pula diketengahkan jenis drama arti yang lain yang tumbuh dan berkembang di Yogyakarta, yaitu *Langen Mondro Wanoro*. Itu adalah drama tari opera yang lahir dan berkembang di luar istana dan mempunyai ciri unik sekali. Dialognya mempergunakan *tembang macapat*, sedang tarinya dilakukan dengan posisi berjongkok. Lakon-lakonnya diambil dari epos Ramayana atau Lokapala. Adapun penciptanya adalah Patih Kesultanan Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Danurejo VII, sedang tahun penciptannya adalah 1890.²¹⁾

Istilah *Langen Mondro Wanoro* terbentuk dari kata-kata *Langen* (lelangen) yang berarti hiburan, *mondro* yang berarti banyak, dan *wanoro* yang berarti hiburan banyak kera, atau lebih jelasnya berarti bahwa dalam pertunjukkan tersebut banyak dipertunjukkan tarian kora.²²⁾

Dalam hal karakterisasi, maka dapatlah dikatakan, bahwa karakterisasi yang terdapat di dalam wayang wong terpengaruh oleh karakterisasi yang terdapat di dalam wayang kulit. Sedang karakternya yang terdapat di dalam *Langen Monaro Wanoro* terpengaruh oleh karakterisasi yang terdapat di dalam wayang wong.²³⁾

Dalam pada itu baiklah kita tumbuhkan sebuah catatan bahwa sebelum lahir *Langen Mondro Wonori*, di Yogyakarta sudah hadir dulu jenis irama tari yang disebut *langen Driyo*, yang diciptakan oleh Tumenggung Purwodingrat pada tahun 1876. Drama tari itu mementaskan cerita *Damarwulan*, sedang posisi penarinya juga berjongkok. *Langen Driyo* yang berarti hiburan hati itu, kemudian tidak dapat berkembang, sebab terdesak oleh *Langen Mondro Wanoro*.²⁴⁾

Uraian tentang kehidupan seni dan budaya di Yogyakarta, tidak lengkap rasanya jika tidak disinggung pula tentang *Sekaten*, yang sampai sekarang masih terdapat perhatian besar dari rakyat di daerah tersebut. *Sekaten* itu diadakan setahun sekali dalam bulan Mulud. Pada waktu itu gamelan tua *Saketi* dibawa dari tempatnya di bangsal Srimenganti di dalam kraton Yogyakarta untuk dibunyikan selama seminggu di halaman Mesjid Besar.

Hanya setelah ulangan-ulangan yang mendalam para pemain gamelan kraton *Kawedanan Hageng Krido Mardowo* memainkan gelamelan *Sekati*. Sebab menurut tradisi dari jaman Demak kira-kira 500 tahun yang lampau gamelan *Sekati* harus dibunyikan selama *Sekaten* yang berlangsung selama satu minggu, mulai malam ke-6 hingga malam ke-12 bulan Jawa ketiga atau bulan Maulud, kecuali pada hari *Kamie* malam Jum'at pagi. Pesta itu mendahului *Grebeg Mulud* yang jauh pada tanggal 12 Maulud, yaitu hari lahir Nabi Muhammad s.a.w.

Sementara itu perlu diketahui bahwa kalender Jawa mempunyai satu siklus 8 tahun yakni: *Alip*, *Ehe*, *Jimawal*, *Je*, *Dal Bel*, *Wawu* dan *Jimakir*. Tahun *Dal* mempunyai kedudukan yang khusus, sebab menurut tradisi Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan pada tanggal 12, bulan Maulud tahun *Dal*. Karena itu maka *Sekaten* dan *Greebeg Maulud* di tahun *Dala* dirayakan dengan kebesaran yang istimewa. Sebagai contoh pada tahun 1971 pasar malam di alun-alun Utara ditambah dengan

pameran-pameran kebudayaan dan pangeran-pangeran dari Kraton Yogyakarta, Mangkunegara, Pakulamaan, Cirebon dan Bali yang semuanya diselenggarakan di Pagelaran.

Pada tanggal 6 Maulud pukul tujuh malam, gamela Sekaten Kyai Gunturmadu dan Kyai Nojowilogo dibunyikan di Keban, yaitu sebuah halaman di alam kraton, Kemudian di tengah malam kedua pasang gamelan itu dibawa ke Mesjid Besar diringi pasukan kraton yang berpakaian adat.

Gamelan-gamelan Sekati yang tua itu yang oleh Jawa dianggap pusaka-pusaka kraton yang bersifat keramat, sangat menarik dan mempunyai nilai sejarah yang besar. Pangeran Kusumodilogo dalam tulisan beliau yang berjudul *Paken Satramiruda* (1930) menunjukkan, bahwa gamela Sekati yang pertama dibuat pada tahun 1555 Masehi. Pekerjaan berat ini dilakukan para wali yang berjumlah sembilan orang, yang merupakan penasehat Sulta Demak. Selanjutnya sesudah Sultan Demak mengalahkan ayahandanya, raja Majapahit yang beragama Hindu, ia mengeluarkan gamelan Kyai Sekar Dekino dari Kraton untuk dibunyikan di halaman Mesjid siang dan malam untuk menarik perhatian rakyat agar mereka menjadi penganut agama Islam.

Gemelan Sekati kraton Yogyakarta dikenal oleh rakyat dengan nama Kyai Sekati dan Nyai Sekati. Akan tetapi hal itu sebenarnya keliru, sebab pusaka-pusaka tak pernah disebut dengan sebutan Nyai, melainkan selalu dengan sebutan Kyai atau Kanjeng Kayi.

Adapun gamelan Sakti yang tua, yakni Kyai Gunturmadu, adalah nama Kyai dari kerajaan Demak, sedang yang muda yakni Kyai Nogowilogo, yang dipandang, sebagai putera Kyai Guntur madu, dibuat pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I jadi kira-mira 200 tahun yang lalu.

Berbeda dengan gamelan modern, yang terdiri atas alat-alat untuk membawakan lagu-lagu keras dan lembut, gamelan Sekati hanya mempunyai jumlah alat-alat yang terbatas yang hanya dapat dipakai untuk membawakan lagu-lagu yang keras. Sesuai dengan sifatnya yang sedemikian itu, maka gamelan tersebut hanya dimainkan secara instrumental tanpa iringan pesinden atau penyanyi.

Cara memukulnya pun mempunyai gaya yang khas, misalnya permainan bonang dilakukan secara tunggal dan pukulan-pukulan saron dilakukan pada akhir tiap-tiap bait lagu yang dimainkan oleh bonang. Oleh karena itu, kerangka lagunya, yang dimainkan secara lamban sekali oleh saron tersebut, pada mulanya sukar diikuti. Sementara itu suara bedug atau genderang yang besar, yang dapat dipandang sebagai pengganti suara gendang yang biasa itu, juga memberikan sifat yang khas kepada gamelan Sekati.

Pemukulan gamelan Sekati yang unik itu berlangsung siang dan malam selama satu minggu. Dari padanya diperdengarkan selusin lagu sekaten yang eksklusif yang tak terdapat dalam gamelan lain, mislnya lagu-lagu : *Rambu*, *Ragkung*, *Andong-andong Lunggadungpel*, dan masing-masing berlangsung selama setengah jam.

Pada waktu gamelan Sekati ditabuh, hampir semua gamelan kraton yang lain tidak boleh ditabuh. Itu berarti bahwa gamelan Sekati mempunyai tempat yang peting di antara gamelan kraton Yogyakarta lainnya. Tetapi, ada sebuah gamelan yang lebih tinggi kedudukannya daripada gamelan Sekati itu, yaitu gamelan Muggang, yang menurut tradisi adalah pusaka dari kraton Majapahit. Jika, gamelan tersebut ditabuh, gamelan yang lain-lain termasuk gamelan Sekatipun tidak pernah ditabuh.

Hal yang menarik bagi kita ialah berbeda dengan gamelan modern yang lengkap yang terdiri atas sepasang gamelan pelog dan sepasang gamelan slendro, maka kedua pasang gamelan Saketi itu pelog semuanya.

Adapun nama Sekati menurut etimologi umum berasal dari kata *Sesek ati*. *Sukaati*, *se kati* dan *Syahadatain*. *Sesek ati*, yang berarti hati tegang untuk melukiskan hati yang tegang pada waktu gamelan Sekati mulai dimainkan. Sedang sekati, yang berarti hati yang bahagia, untuk menginkan orang pada peristiwa kemenangan yang dicapai Demak pada waktu melawan Majapahit. Kemudian sekati atau satu kati, dimaksudkan untuk mengatakan berat salah sebuah belahan saron. Akhirnya kata Syahadatain di pakai untuk mengingatkan atau menenangkan banyak orang yang pergi ke mesjid dan masuk Islam dengan mengucapkan syahadat.²⁵⁾

5.4 Alam Fikiran dan Kepercayaan

Semula bangsa India dengan agamanya, yaitu agama Siwa dan Buda, memasuki ke Jawa dan Kekayaan rohaninya diterima oleh orang Jawa. Kemudian datanglah agama Islam dengan kekayaan rohaninya, yang juga diterima oleh orang Jawa. kedua macam sumber pikiran keagamaan itu digali dan di masak oleh orang Jawa, dan hasilnya dicerminkan dalam kepustakaan Jawa.

Ada banyak macam pusakta Jawa, tetapi di sini hanya diutarakan serat Centhini dan *Serat Wirid*. Serat Centhini itu ditulis atas perintah Paku Buwono V, kira-kira pada permulaan abad ke-19. Sebenarnya buku tersebut hasil karya bayak orang, tetapi penghimpunannya adalah Yosodipuro II dan Ronggotresono. Ajaran yang terdapat di dalamnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah ajaran yang diberikan secara umum ditunjukkan kepada mereka yang belum maju, dan kedua adalah ajaran yang ditunjukkan kepada mereka yang sudah maju. Yang pertama adalah ajaran yang bersifat Eksateris sedang yang kedua adalah ajaran yang bersifat Isoteris. Ada pun Serat Wirid yang dimaksudkan di sini adalah hasil karya R. Ng. Ronggowarsito pada pertengahan abad ke-19. Menurut penulisnya, buku tersebut berisi ajaran asli yang pernah diajarkan oleh para wali, yang kemudian diterbitkan sebagai ajaran kesatuan atas perintah Sultan Agung. Buku tersebut semula dimiliki oleh Sunan Paku Buwono VII, tetapi kemudian dihadiahkan kepada putera serta cucu raja tersebut pada tahun 1850.²⁶⁾

Dalam buku Wirid karangan R. Ng. Ronggowarsito itu terdapat lima bab, dan bab yang pertama terbagi atas enam bagian. Bagian yang pertama berisi ajaran tentang persiapan yang harus dilakukan oleh guru dan calon murid sebelum pelajaran dimulai. Di situ diterangkan, bahwa guru dan calon murid harus mengambil wudhu, yaitu melakukan penyucian ritual terhadap dirinya supaya bersih dari segala sesuatu yang bersifat najis, juga bahwa guru dan calon murid harus mengucapkan niatnya seperti orang yang hendak bersolat. Selanjutnya diterangkan pula bahwa calon murid harus berpakaian secara pengantin, artinya: tubuh bagian atasnya terbuka, memakai mahkota seperti raja, mengenakan untaian bunga pada leher (dikalungkan) dan pada telinganya (digantungkan), di samping itu juga mengunyah bahan yang berbau harum. Tetapi, berbeda dengan pengantin yang sebenarnya,

calon murid itu tidak boleh mengenakan perhiasan. Berpakaian secara pengantin itu berarti bahwa persekutuan dengan Tuhan dipandang sebagai perkawinan dengan Tuhan. Kemudian calon murid itu sebagai pengantin harus pula memberikan srikawinnya yang disertai bau-bauan yang harum dan kemenyan, yang ditaruh di dalam sebuah wadah yang tertutup dengan mori putih. Kecuali itu ia harus pula menyerahkan pisang dan sirih, yang ditaruh pula di dalam sebuah wadah dengan tutup mori putih. Dengan disertai bunga sejodoh kedua buah wadah itu ditempatkan di ruang belajar. Akhirnya, bila malam sudah tiba dan keadaan sudah sunyi senyap, karena rerumputan dan dedaunan sudah tidur nyenyak, datanglah calon murid dan guru ke ruang belajar, dan dengan demikian mulailah pelajaran, yang dihadiri pula oleh empat orang saksi yang seilmu. Adapun ajaran yang diberikan dalam tahap persiapan itu hanya ajaran pendahuluan saja.²⁷⁾

Sesudah bagian pertama atau bagian persiapan berakhir diteruskan dengan bagian kedua yang berisi pelajaran tentang dalil-dalil, yaitu sebagai berikut: Dalil yang pertama, yang disebut "Bisikan tentang keadaan zat", berbunyi: "Sebenarnya tiada suatu apapun, sebab ketika masih kosong belum ada sesuatu, yang pertama adalah Aku, tiada Tuhan kecuali Aku, hakekat zat yang Mahasuci, meliputi sifatKu, mendapat bagian dalam namaKu, menandai karyaKu" Jelaslah di sini bahwa zat yang Mutlak itu dilukiskan sebagai keadaan yang kosong. Mengenai "keadaan yang kosong" itu, Centini memakainya dalam dua arti, yang pertama dalam arti ahahadiyu yaitu pangkat penjelmaan pertama dari zat yang Mutlak, dan kedua dalam arti zat yang Mutlak sendiri. Sementara itu Dr. Zoetmulder berpendapat, bahwa bukannya tidak mungkin uraian mengenal Allah secara negatif itu dipengaruhi oleh gagasan umum di Jawa sebelum kedatangan agama Islam.

Dalil *kedua*, yang disebut "Penguraian tentang keadaan zat" berbunyi: "Sebenarnya Akulah yang Mahakuasa, yang kuasa menciptakan segala sesuatu, jadi ketika itu juga, sempurna karena kuasaKu, di situ sudah menjadi nyata tanda karyaKu, pertama Aku menciptakan pohon *sa jaratulyakin*, tumbuh dalam *alam adam makdam* azali abadi, kemudian cahaya, disebut nur Muhammad, kemudian cermin, disebut *miratul kha-yati*, kemudian nyawa, disebut *roh ilahi*, kemudian diam disebut *roh ilafi*, kemudian disebut *kandil*, kemudian

permata disebut darah, kemudian dinding jalan disebut *hijab*, yang menjadi selubung "kemuliaanKu" jadi, zat yang Mutlak itu menciptakan segala sesuatu dengan kemaha-kuasaannya dan bahwa segala makhluk menjadi tanda atau bukti karya-nya. Dengan demikian tampaknya dalil yang kedua itu untuk menunjukkan bahwa Diri zat yang Mutlak itu "yang semula masih tersembunyi, sekarang mulai menyatakan diri sebagai Pencipta atau Asal segala sesuatu.

Dalil *ketiga*, yang disebut "Pembentangan keadaan zat", berbunyi: "Sebenarnya manusia adalah rahasiaKu, dan Aku adalah rahasia manusia, sebab Aku menciptakan Adam, berasal dari empat anasir, bumi, api, angin, air yang menjadi wujud sifatku, yang Ku taruh di dalamnya lima mudah: *nur raksa, roh, nafsu*, budi, yang berfungsi sebagai tutup wajahKu yang Mahasuci". Jelaslah bahwa dalam dalil ini manusia dinyatakan sebagai rahasia Allah, dan Allah sebagai rahasia manusia. Sementara itu dinyatakan juga bahwa manusia dijadikan dari empat anasir" kasar: bumi, air, api dan angin, yang kemudian dimasukkan ke dalamnya lima anasir halus: *nur, rahsa, roh, nafsu* dan budi. Dengan demikian sepias lalu dalil yang ketiga ini bertujuan untuk menerangkan kejadian manusia. Tetapi agaknya dengan dalil tersebut penulis tidak bermaksud menerangkan penciptaan manusia itu sendiri, tetapi bermaksud menyatakan ide atau gagasan tentang manusia, yang memandang manusia sebagai bayang-bayangan atau gambar Allah, atau manusia sebagai nama atau sebutan Allah.

Dalil *keempat*, yang disebut 'Pembukaan tata mahligai di dalam *Bait al ma'mur*, berbunyi: Sebenarnya Aku mengatur mahligai di dalam bit ma'mur, yaitu rumah tempat keramaianKu, berada di kepala Adam. Yang ada di dalam kepala adalah *dimak*, yaitu otak yang ada di dalam otak adalah manik, di dalam manik ada budi, di dalam budi ada nafsu, di dalam nafsu ada sukma, di dalam sukma ada rahsa, di dalam rahsa ada Aku, tiada Tuhan kecuali Aku, zat yang meliputi keadaan jadi." Bait al ma'mur adalah sebutan bagi Ka'bah sargawi, atau Bait Allah, yang berada dalam diri manusia, yaitu di kepalanya.

Dalil *kelima*, yang disebut "Pembukaan tata mahligai di dalam *Bait al Maharram*" berbunyi: Sebenarnya Aku mengatur mahligai di dalam Bait al maharram, yaitu rumah tempat laranganKu berada di dada Adam, yang ada di dalam dada adalah hati, yang ada di dalam hati

adalah jantung, di dalam jantung ada budi, di dalam budi ada jinem yaitu angen-angen, di dalam angen-angen ada suka, di dalam suka ada rahsa, di dalam rahsa ada Aku, zat yang meliputi keadaan jati."

Dalil *keenam*, yang disebut "Pembukaan tata makhligai di dalam Bait al Muqaddas," berbunyi. "Sebenarnya Aku mengatur makhligai di dalam Bait al Muqaddas, yaitu rumah tempat kesucianKu, berada di dalam pelir Adam, yang ada di dalam pelir adalah buah pelir, yang ada di dalam buah pelir adalah *nutfah*, yaitu mani, di dalam mani ada madi di dalam madi ada wadi, di dalam wadi ada manikem, di dalam manikem ada rahsa, di dalam rahsa ada Aku, tiada Tuhan kecuali Aku, zat yang meliputi keadaan jati, berdiri sebagai nukat gaib, turun menjadi johar awal, disitulah berada *alam ahadiyya, alam wahda, alam wahidiyya, alam arwah, alam mithal, alam ajsam, alam insan kamil*, terjadinya manusia sempurna, yaitu sifatKu yang sebenarnya."

Bait Allah, dalam dalil keempat dipandang berada di kepala, dalam dalil kelima dipandang berada di dada, sedang dalam dalil keenam itu dipandang berada di pelir. Bait al makmur, yang berada di kepala dipandang sebagai bait Allah yang pertama, karena bait Allah itu dipandang sebagai berada di lapisan langit yang teratas. Bait al muharram, yang berada di dada, dipandang sebagai bait Allah yang kedua atau di tengah, karena bait Allah itu dipandang sebagai berada di pusat susunan dunia, yang terdiri atas tujuh lapisan langit dan tujuh bumi. Kemudian Bait al muqaddas yang berada di pelir, dipandang sebagai bait Allah yang ketiga, disejajarkan dengan alam ajsam, dihubungkan dengan segala macam spekulasi atau pemikiran yang khayali tentang proses perkembangan kelahiran dan pertumbuhan bagi ketiga dalil itu agaknya sejajar dengan penjelmaan zat mutlak di dalam dunia ini. Dengan demikian dalil keempat sejajar dengan alam arwah, dalil kelima sejajar dengan alam mithal, sedang dalil keenam sejajar dengan alam ajsam. Sementara itu dapat pula dikatakan, bahwa ajaran tentang tiga *bait* itu sebenarnya membicarakan manusia sebagai modal pertama.

Dalil *ketujuh*, yang disebut "Peneguhan imam", berbunyi: "Aku bersaksi, sebenarnya tiada Tuhan kecuali Aku, dan bersaksilah Aku, sebenarnya Muhammad adalah utusanKu" Jelaslah bahwa dalil ini mirip dengan syahadat Islam.

Dalil *kedelapan*, yang disebut "Kesaksian", berbunyi: "Aku bersaksi di dalam zat KU sendiri, sebenarnya tiada Tuhan kecuali Aku, dan bersaksilah Aku, sebenarnya Muhammad adalah utusanKu, memang sebenarnya yang disebut Allah adalah diriku, rasul adalah rahsaKu, Muhammad adalah cahayaKu, Akulah yang hidup tak terkena mati, Aku ingat tak terkena lupa, Akulah yang kekal tidak berubah dalam keadaan jati. Akulah yang menguasai, yang kuasa bijaksana, tak kekurangan pengertian, byar; sempurna terang benderang, tak terasa apa-apa, tak tampak apa-apa hanya Akullah yang meliputi alam semesta dengan kodrrat-Ku".

Bersama-sama dengan dalil ketujuh, maka dalil kedelapan itu dapat diringkaskan sebagai ucapan bahwa "Sebenarnya yang disebut Allah adalah diriKu". Kedua dalil tersebut tidak saja berfungsi sebagai penutup, tetapi tertera sebagai puncak ajaran yang *eksoteris*, yang sekaligus berfungsi sebagai pendahuluan kepada ajaran yang *esoteris*.

Sesudah pelajaran tentang delapan dalil itu selesai, maka menyusullah bagian ketiga, yaitu pelajaran tentang pengetrapan kesatuan dengan zat Allah. Dalam pelajaran itu para murid diberi bekal untuk menjadikan intisari ajaran yang sudah diterima menjadi realitas atau kenyataan di dalam hidupnya. Dengan pengetrapan kesatuan dengan zat Allah itu para murid benar-benar menjadi satu dengan Allah.²⁸⁾

Berakhimya bagian ketiga digantikan oleh bagian keempat yaitu keterangan tentang sumpah yang harus dilakukan oleh murid terhadap gurunya. Dalam keterangan tersebut disinggung pula sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa selama gurunya masih hidup, atau jika keadaan tidak benar-benar memaksa, masing-masing murid tidak boleh menampilkan dirinya menjadi guru.

Selanjutnya, sampailah giliran bagian kelima dan bagian keenam, yang secara berturut-turut menguraikan perihal selamatan yang harus diadakan oleh para murid sebagai korban upacara syukur, dan petunjuk yang harus diketahui oleh guru dan murid. Dengan demikian selesailah bab yang pertama.²⁹⁾

Sesudah itu mula-mula menyusullah bab ke II, yang membicarakan dalil-dalil seperti yang sudah disebutkan dalam bab pertama dengan

cara yang lebih mendalam. Kemudian menyusul pula bab ke III, yang membicarakan perjalanan kembali kepada Tuhan, juga bab ke IV, yang berisi petunjuk bagaimana orang memperoleh kemuliaan sesudah mati, akhirnya sampailah bab ke V, yang berisi ajaran tentang penyempurnaan asal dan tujuan hidup manusia.³⁰⁾

Kesimpulan dari uraian yang terdapat dalam Serat Wirid karangan R. Ng. Ronggowarsito adalah sebagai berikut:

1. Ajaran Serat Wirid berpusat kepada manusia. Jika dalam kitab tersebut ada uraian tentang Allah seperti yang diajarkan di dalam ajaran yang bersifat eksoteris, maka hal itu oleh penulisnya hanya dimaksudkan sebagai batu loncatan dalam usahanya untuk menempatkan keadaan manusia dalam terang yang seterang-terangnya.
2. Jika ada uraian tentang Allah, maka Tuhan Allah dipandang sebagai zat yang Mutlak, yang sifatnya tidak dapat dinyatakan, kecuali secara negatif, misalnya: bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci dan sebagainya. Secara positif hanya dapat dikatakan, bahwa Allah kekosongan, "*awang-awang* atau "*suwung*". Penguraian tentang Allah lebih mendekati ajaran agama Buda tentang sunyatan.
3. Bagian terdalam dari manusia, yaitu *atma*, sejajar dengan atma di dalam agama Hindu. Atma ini dianggap sesama atau identik dengan Allah sebagai zat yang Mutlak. Kesamaan itu sedemikian rupa, hingga Allah melihat, mendengar dan sebagainya hanya dengan perantaraan manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah Allah yang menjadi "*daging*".
4. Penjelmaan Allah sebagai zat yang Mutlak pada hakekatnya adalah penjelmaan manusia. Dapat dikatakan dengan penjelmaan itu bagian terdalam dari manusia, atma, seolah-olah menyembunyikan diri ke dalam selubung berlapis-lapis yang makin jauh dari pusatnya makin besar. Menurut ungkapan Jawa: Manusia itu seperti kitab berselimutkan liangnya. Allah berada di dalam manusia, karena manusia pada hakekatnya adalah Allah sendiri.

5. Manusia sempurna adalah manusia yang sadar akan keadaannya yang sebenarnya, manusia yang kenal akan "*sangkan parannya*" atau asal dan tujuan hidupnya, dengan mengenal akan dirinya. Dengan pengenalan diri dan dengan penyulapan *lafal*, Allah dijadikan nyata di dalam manusia, atau Allah direalisasikan di dalam manusia.
6. Sebagai tokoh di mana Allah menjadi nyata, manusia sempurna memiliki juga segala sifat Allah. Ia adalah *Khalik* serta penyelamat dunia. Ia adalah yang Mahakuasa, yang Mahatinggi serta Mahasuci. Segala sesuatu mungkin baginya, sebab segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Ia tidak terikat pada hukum apapun, sebab ia sendiri adalah hukum bagi segala sesuatu.
7. Sebagai tokoh di mana Allah menjadi nyata, manusia sempurna juga dapat menggulung keadaannya sendiri untuk dikembalikan kepada asalnya, yaitu pada saat ia meninggalkan dunia ini. Ia adalah "juru selamat"-nya sendiri, sekalipun ia bukan juru selamat dunia manusia.
8. Jika manusia sempurna sudah kembali kepada asalnya ia menjadi sama dengan Allah, yaitu dapat meliputi serta mengalami segala sesuatu yang dijemakan. Pada waktu itu manusia sempurna adalah seperti katak yang menyelimuti liangnya.³¹⁾

Sifat pertama dan utama dari gerakan kebatinan adalah sifat batin. Batin berada di dalam manusia sendiri. Menurut asal katanya batin adalah *lafal* Arab yang berarti: perut, rasa mendalam, tersembunyi, rohani, asasi. Batin itu terutama dipakai dalam ilmu jiwa dan rohani untuk menunjukkan sifat yang diikuti manusia tatkala ia merasa berada pada dirinya sendiri, bersatu tak terbagi, terintegrasi, nyata, sebagai pribadi benar. Oleh sifat batin itu, manusia merasa diri lepas dari segala yang sama, yang berganda, yang memaksakan padanya suatu bentuk hidup serba dua yang tak dapat dihayati secara otentik.

Sifat kedua dari kebatinan erat hubungannya dengan yang pertama yaitu: rasa, tegasnya pengalaman rohani subyektif. Ini jelas sifat reaksi juga. Reaksi atas tradisi kolot, di mana hidup agama terdiri dari penghayatan bahasa yang tidak dimengerti artinya, ketaatan kepada peraturan yang tidak dilihat gunanya, iman kepada wahyu yang

dilantarkan orang lain dan sebagainya. Dalam pada itu latihan-latihan diadakan untuk menyiapkan manusia menerima wahyu sendiri, mendengar suara di dalam hati, melukiskan hal yang membuat rasa tenteram dan puas.³²⁾

Sifat ketiga gerakan kebatinan adalah keaslian. Terhadap gejala pengasingan bangkitlah hasrat untuk memperkembangkan kepribadian asli. Ancaman pengasingan menempuh berbagai bidang dan kawasan. Tersangkutlah bidang mental, pemikiran, kelakuan dan bahasa. Daerah dan suku asal tidak luput juga dari ancaman itu. Dalam hubungan dengan Indonesianisasi, maka kebatinan mengutamakan bahasa daerah dan terdiri suku. Sejumlah aliran memakai predikat: *Jawa asli*, *Sunda asli*, dan sebagainya. Dalam hubungan dengan internasionalisasi, diutamakanlah gaya hidup dan kesopanan timur. Dalam hubungan dengan ibadat agama dalam bahasa, simbol-simbol dan sikap badan yang asing diutamakan ungkapan dan gaya asli. Itu dipandang lebih mesra dan lebih kena.³³⁾

Catatan

1. "Laporan Politik Tahun 1877" (Statkundir Overzicht van Nederlandsch - Indie 1877), *Penerbitan Sumber-sumber Sejarah Arsip Nasional IV*, hal 51 -- 64
2. Ichtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839 -- 1848. *Penerbitan Sumber-sumber Sejarah V*, hal. 56 -- 68.
3. Burger, D.H dan Prajudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, J B. Wolter, Jakarta, 1957 hal. 105 -- 108.
4. *Ibid* hal 138 -- 139
5. *Ibid* hal 141
6. *Ibid* hal 142 -- 143
7. *Ibid* hal 143
8. Pitono. I. Njoman Dekker, Hagiono, *Sejarah Indonesia*, Penerbit Utara. Malang, 1972 hal. 73 -- 78.
9. Sutjipto Wirjosuparto, *Dari Lima Zaman Penjajahan Menuju Zaman Kemerdekaan*, Indira, 1953, hal 45.
10. Burger, D.H. dan Prajudi, *op cit*, hal. 144 -- 145.
11. Pitono, I Njoman Dekker, Hagiono, *op cit* hal. 80 -- 84.

12. Soedarsono, *Beberapa Catatan Tentang Seni Pertunjukan Indonesia*, Konservatori Tari Indonesia, Yogyakarta, 1974, hal. 86 - 87.
13. *Ibid* hal. 25
14. *Ibid* hal. 9
15. *Ibid* hal. 16
16. *Ibid* hal. 7
17. *Ibid* hal. 15 - 16
18. *Ibid* hal. 16
19. *Ibid* hal. 15
20. *Ibid loc. cit*
21. *Ibid* hal.. 10
22. *Ibid, loc. cit*
21. *Ibid* hal 16
24. *Ibid* hal. 10
25. Wasisto Surjadinigrat, *Gamelan Dance and Wayang in Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1971, 57 -58.
26. Harun Hadiwijono, *Kebatinan Jawa dalam Abad 19 B.P.K.* Sunan Mulia, Jakarta. hal. 7 - 9.
27. *Ibid* hal. 9 - 10
28. *Ibid* hal. 10
29. *Ibid loc. cit*
30. *Ibid* hal. 10 - 11
31. *Ibid* hal. 59 - 60.
32. Rahmat Subagyo, "*Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kajiwaan dan Agama*" Reprint dari Majalah "*Spectrum*" no. 3 1973 hal. 129.
33. *Ibid*, 132.

BAB VI

ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (1900 - 1942)

6.1 Keadaan Pemerintahan dan keagamaan

6.1.1 Kerajaan-kerajaan

Yogyakarta terkenal baik di dalam maupun di luar negeri sebagai kota perjuangan yang bersejarah. Memang sebagaimana kita ketahui, bahwa Yogyakarta seringkali tampil dalam sejarah sebagai pusat perjuangan. Di samping itu pun Yogyakarta memegang peranan penting pula dalam kebangunan Nasional. Berbagai peristiwa penting terjadi di sana, misalnya perjuangan dari pahlawan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pangeran Diponegoro, Kyai Haji Ahmad Dahlan dan juga Ki Hajar Dewantoro. Kesemuanya itu adalah putra Yogyakarta. Bahkan pada jaman revolusi mempertahankan kemerdekaan, Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan dan perjuangan. Karenanya pantaslah apabila Yogyakarta diberi sebutan sebagai Kota Perjuangan.

Pada waktu semangat kebangkitan Nasional sedang tumbuh, Yogyakarta diperintah oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII, beliau mulai memangku jabatannya pada tanggal 13 Agustus 1877 dan turun tahta 29 Januari 1921.¹⁾

Dalam pemerintahan Kraton Yogyakarta jabatan Sultan merupakan jabatan yang tertinggi dan turun-menurun. Dalam menjalankan pemerintahan, Sri Sultan dibantu oleh putra mahkota yang bertugas mengurus *pengadilan darah dalem* dan urusan keluarga; penghulu mengurus soal agama; patih mengurus soal kenegaraan; para pangeran mengurus kraton dan komandan prajurit mengurus soal ketentaraan.

Dewasa ini pengadilan darah dalem; jabatan patih dan komandan prajurit ditiadakan. Sistem pemeritahan di keraton Yogyakarta mengalami perubahan-perubahan karena disesuaikan dengan zamannya. Peraturan yang sudah lama dan kurang sesuai diperbaiki.

6.1.1.1 Susunan pemerintahan Kasultanan dan paku Alam.

Susunan pemerintahan mulai berdirinya Kraton Yogyakarta pada tahun 1755 (Perdamaian Ganti) yang dipimpin oleh S.P. Sultan Hemangu Buwono I adalah seperti berikut.²⁾

Nayoko urusan dalam terdiri atas

- Kanayakan Keparah Kiwa dan
- Kanayakan Keparah Tengen, mengurus soal-soal yayasan dan pekerjaan umum.
- Kanayakan Gedog Kiwo dan
- Kanayakan Gedog Tengen, mengurus soal-soal hasil
- Kanayakan dan keuangan.

Nayoko urusan luar terdiri atas:

- Kanayakan Siti sewu, mengurus soal-soal tanah dan praja.
- Kanayakan Penumping dan
- Kanayakan Numbakanyar, mengurus soal-soal pertahanan.
- Kanayakan Bumijo. mengurus soal-soal seperti Siti Sewu.

Kedelapan *Nayoko* ini mewujudkan Dewan Manteri diketahui oleh Papatih Dalem, yang memegang pimpinan di dalam negeri. Susunan di atas diadakan sejak tahun 1755 ketika kerajaan Mataram dibagi dua menurut perjajian Ganti. Pada waktu itu segala sesuatunya juga dibagi dua seperti keadaan daerah pegawai, pusaka Keraton dan sebagainya.

Kanayakan ada waktu itu juga dibagi dua, Salam mendapat empat *Nayoko* dan Yogya juga mendapat empat *Nayoko*. Kemudian jumlah

pegawai-pegawainya ditambah sendiri oleh kerajaan masing-masing kerajaan sehingga lengkap. Nayoko menjadi panglima, mempunyai pemerintahan sendiri dan apabila perlu masing-masing Nayoko pergi ke medan pertempuran.

Pegawai Karton yang sekarang masih *Caos* (bermalam di Karton) dahulu bertugas menjaga keamanan negeri. Lama-lama menurut perkembangan jaman, maka para Nayoko hanya memegang pemerintahan sipil, dan selanjutnya staf Kenayakan diperkecil hingga tinggal empat puluh orang pegawai terdiri dari Bupati Kliwon, Panewu Sepuh perintah, Panewu Gebayan, Mantri, Carik, Gebayan dan sebagainya.

Nayoko urusan dalam mengurus daerah Kota Yoyakarta dan Keraton, sedang Nayoko urusan luar menjalankan pemerintahan di luar kota dan mereka dibantu oleh Bupati Tamping.

6.1.1.2 Jalannya Pemerintahan

Semua surat dari Kanayakan yang aka disampaikan kepada Sri Sultan terlebih dahulu harus Kanayakan Keparah Kiwa, karena Nayoko Keparak Kiwo menjadi kepala dari semua Nayoko.

Untuk membantu pekerjaan Papatih Dalem, maka tiap Nayoko urusan luar mengirimkan bantuan tenaga 10 orang. Kantor Papatih Dalem di danurejan, sedang kantor Nayoko bertempat di masing-masing Kanayakan. Jika para Nayoko sedang berapat di Bale Mangu, maka pekerjaan masing-masing dijalankan oleh Bupati Kliwon. Adapun tugas Mayoko mengesahkan peraturan-peraturan. Semua peraturan baru boleh berlaku bilamana telah diputuskan dalam rapat Nayoko.

6.1.1.3 Gaji Pegawai

Dalam pemerintahan Sri Sultan I sampai VII para pegawai diberi gaji berupa tanah dan sawah. Sedang uang *tetempuh* besarnya menurut tingkatan jabatan. Uang *tetempuh* tersebut berasal dari Pemerintahan Belanda, ialah sebagai pengganti hasil Daerah Mataram yang berada di luar Yogyakarta. Tanah sawah yang disediakan untuk Pepati Dalem dan para pegawai terletak di daerah Mentawis (antara kali Progo dan Opak), sedangkan sawah yang terletak di daerah Kabupaten Kulon Progo disediakan untuk S.P Sultan, yang ada di daerah Kabupaten Gunung

Kidul disediakan untuk Pangeran Adipati Anom. Peraturan gaji tersebut di atas belaku sampai tahun 1914, pada waktu “apanange stelsel” dihapuskan dan dibentuk Kalurahan-kalurahan sebagai badan hukum.

Pada waktu pemerintahan Sri Sultan H.b. VIII terdapat lembaga pemerintahan yang disebut Parentah Luhur Keraton; Komatabilitet yang bertugas mengurus mandat dan menyimpan yang Keraton; Kawedanan Keparah para Gusti yang dikepelai Nyai Tumenggung dan Nyai Riyo, Kas Keraton. Juga terdapat abdi dalem yang disebut Punalawam, punakawan bedaya dan Bedanya putri. Parentah Luhur Keraton didirikan pada tahun 1934 Pegawainya terdiri dari pegawai yang digaji negeri dan yang digaji keraton. Pegawai yang digaji keraton adalah abdi dalem. Parentah Luhur Keraton bertugas mengurus perpustakaan, majalah dan perhubungan dengan masyarakat luar. Pada tahun 1940 lembaga pemerintahan itu diganti namanya dengan Kawedanan Kori yang merupakan bagian dari Keraton dan termasuk dalam urusan Keraton. Setelah Sri Sultan berkantor di luar tembok Keraton. Kawedanan Kori bagian negeri disebut Parentah Luhur Keraton lagi, sedang bagian Keraton terbagi dua : *Kewedanan Ageng Punakawan* yaitu Widyabudaya yang bertugas mengurus perpustakaan dan surat menyurat. Pembesar Pemerintahan Luhur Keraton memangku/mewakili jabatan patih yang bertugas menadatangni gaji-gaji pegawai pemerintaha daerah Istimewa Yogyakarta, dan mengurus jual beli tanah dalam kota. Kewajiban ini berlangsung sampai adanya DPD dan Sekretariat Daerah. Akhirnya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Perintah Luhur Keraton diganti nama kantor Penghubung Keraton Yogyakartaatau disebut Tegas Dwarapura.

Sultan, putra mahkota dan patih mempunyai abdi dalem Punakawan. Abdi dalem Punakwan milik putra mahkota disebut Punakawan Kadipaten, sedang milik Patih disebut Punakawan Kapatihan. Abdi dalem Punakwan milik Sri Sultan terdiri dari beberapa kesatuan. Tiap-tiap kesatuan mempunyai tugas masing-masing. Kesatuan-kesatuan itu ialah Punakawan Putra bertugas membersihkan istana; Punakawan Langenastran bertugas membawa tombak; Prajurit Mantri Jero; Punakwan Ordonas, mengurus surat dari Sultan ; Punakawan bertugas mengurus penerangan lampu; punakawan Patehan membuat minuman teh; Punakwan Kaji; Punakawan Nyireplatu

bertugas memadamkan kebakaran dalam Keraton; Punakawan. Selain abdi dalem Punakawan Sri Sultan masih mempunyai abdi dalem yang disebut Punakawan Bedanya, Punakawan terdiri dari lima kesatuan yang tiap-tiap kesatuan mempunyai tugas sendiri-sendiri. Kesatuan-kesatuan itu adalah Ngidralika bertugas melayani Sri Sultan setiap hari; Punakarwa Retno sebagai utusan tanaman menjaga pintu taman. Puyuh bertugas memelihara binatang dan abdi dalem Punakawan Miji Perintah yang menjadi pembesar Punakawan Bedaya.

Tentang keuangan disimpan di kas Keraton, sedang mandat-mandat diurus oleh Komtabiliter Keraton. Pada jaman Pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII diadakan kontrak politik dengan Belanda yang berisi masalah, penyimpanan uang. Setelah diadakan kontrak politik uang disimpan di Kasultanan sehingga Sultan mendapat biaya Kasultanan. Anggaran belanja ini ditetapkan buat setiap tahun.

Segala sesuatu yang akan disampaikan kepada Sri Sultan oleh penghulu dan patih harus melalui suatu Lembaga Pemerintahan Keraton yaitu Parentah luhur Keraton. Adapun dalam hal pengandian darah dalem dan keluarga Sri Sultan dibantu oleh putra Mahkota yang dapat berhubungan langsung dengan Sultan. Dalam urusan keluarga, Putra Mahkota dibantu Lurah Pangeran dan Komandan Prajurit.

6.1.1.4 Organisasi alat-alat pemerintahan

Dahulu Organisasi alat-alat pemerintahan Keraton Yogyakarta terdiri atas abdi dalem, prajurit lurah pangeran/putri pangeran, putra mahkota, patih, penghulu. Dewasa ini putra mahkota belum ada, patih tidak ada sedang prajurit tidak aktif lagi. DIY diperintah oleh Wakil Kepala daerah, Sri Paku Alam.

Abdi dalem merupakan istilah untuk menyambut orang-lain bekerja di Keraton. Mereka terdiri dari laki-laki dan wanita yang jumlahnya kurang lebih 1140 orang. Abdi dalem wanita disebut Kaparah. Semua orang menjadi abdi dalem tetapi harus mendaftarkan diri di Kawedanan Ageng Punakawan Purakarsa belum mendapat gaji, Para abdi dalem dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Tiap-tiap bagian termasuk anggota salah satu departemen/Lembaga pemerintahan Kawedanan dan Tepas. Masa magang merupakan masa percobaan. dalam masa magang mendalem dilihat kerajinan dan keahliannya.

Setelah menjadi abdi dalem diangkat menjadi jajar. Biasanya yang menjadi abdi dalem keturunan abdi dalem juga. Pangkat abdi dalem yaitu, Jajar, Bekel, Enon, Carik, Bekel Tuwa, Lurah, Wedana, Riyo Bupati Anom, Bupati Kliwon, Bupati, Nayaka.

Jalannya pengangkatan abdi dalem sebagai berikut; Pada waktu mereka masih berstatus magang, kalau ada lowongan dari salah satu kawedanan atau tepas maka kepala dari Kawedanan atau Tepas yang bersangkutan minta kepada Kawedan Ageng Punakawan Puraraksa. Kepala Kawedanan Ageng Punakarwan Puraraksa tersebut memilih salah seorang magang yang rajin dan mempunyai keahlian sesuai dengan Kawedanan yang membutuhkan dan diangkat Jajar. Pengangkatan abdi dalem dari pangkat Jajar sampai wedana hanya diurus oleh parentah Ageng Keraton yang mengeluarkan surat pengkatan. Perangkatan itu bersangkutan permintaan dari Kepala Kawedanan Ageng atau tepas yang bersangkutan dengan membuktikan kesetiaan terhadap Sri Sultan. Untuk pangangkatan Riyo Bupati Enom Bupati Nayakara harus melalui sekretariat yang diadakan Panitia. Panitia ini terdiri dari pembesar-pembesar Keraton yang dikepalai Pangeran Ageng Keraton. Keputusannya diajukan Sri Sultan. Kalau Sri Sultan menyetujui, maka Parentah Ageng Keraton mulai mengeluarkan surat pengangkatan, dengan kata lain pengangkatan mereka menunggu persetujuan Sri Sultan.

Keparak menjadi anggota Keparak para Gusti yang dikepalai permaisuri atau selir yang tertua. Kebanyakan yang menjadi abdi dalem terdiri dari orang tua yang sangat setia sehingga mereka tidak mau bekerja di luar Keraton.

Pada jaman dahulu Keraton mempunyai prajurit. Prajurit juga termasuk abdi dalem yang bertugas menjaga keselamatan Keraton, prajurit terdiri dari laki-laki dan wanita. Dalam pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII mempunyai delapan kesatuan prajurit yaitu Wirabaja, Demang, Patangpuluh, Jagakarya, Prawiratama. Nyutra merah dan hitam, Ketanggung, Mantri Jero dan Langenastra. Tiap-tiap kesatuan prajurit menempati satu kampung yang diberi nama sesuai dengan kesatuan mereka (misalnya: prajurit Wirabaja menempati satu kampung yang bernama Wirabajan) dan mempunyai bendera sendiri. Tiap kesatuan mempunyai seorang pemimpin yang disebut Kapten, yang kekuasaannya di bawah Komandan Prajurit. Komandan Prajurit

bertanggung jawab langsung kepada Sri Sultan. Pada hari besar Keraton (misalnya: Grebeg, penobatan Sri Sultan) prajurit keluar dan sebelumnya diadakan persiapan selama 10 hari di Alun-alun Selatan. Sri Sultan mempunyai prajurit yang bertugas sebagai pengawal, yaitu prajurit Somoatmojo. Selain Sri Sultan, putra mahkota dan patih juga mempunyai kesatuan prajurit. Kesatuan prajurit milik putra mahkota bernama Surakarsa, sedang milik Patih disebut Bugis. Dewasa ini prajurit-prajurit tidak aktif lagi, hanya nama abdi dalem bekas prajurit-parjurit masih ada. Nama itu menunjukkan bahwa mereka termasuk kesatuan prajurit tertentu. Tugas mereka masih menjaga keamanan Keraton tetapi kalau ada kejadian dalam Keraton yang menyelesaikan ialah abdi dalem Pawala dari kawedanan Ageng Punakawan Purakarsa.

Saudara, putra dan menantu Sri Sultan dipimpin oleh saudara tertua dan putra tertua dari permaisuri. Kalau permaisuri tidak mempunyai putra, kedudukannya diganti oleh saudara atau putra tertua dari permaisuri yang mendapat bantuan dari lurah. Lurah ada dua macam yaitu Lurah Pangeran yang mengepalai pangeran dan Lurah putri yang mengepalai putri. Biasanya yang menjadi lurah adalah putra-putri tertua selain putra mahkota. Tugas Lurah mengurus uang belanja dan menjadi panghubung antara Sri Sultan dengan keluarga Keraton, hubungan ini harus melalui Kawedanan Ageng Sri Wandana (misalnya: dalam hal ijin untuk bepergian). Lurah tidak hanya satu dan tiap Lurah mempunyai beberapa bawahan yang sudah ditentukan oleh Sri Sultan. Dengan ini terdapat empat orang Lurah terdiri dari dua Lurah pangeran yang satu mengurus angkatan tua dan suami saudara Sri Sultan, yang satu mengurus saudara laki-laki Sri Sultan dan Lurah putri.

Putra Sri Sultan yang dipandang sudah cukup umumnya diangkat menjadi pangeran. Pangeran ada dua macam yaitu, pangeran putra dan pangeran sentana. Pangeran sentana untuk menyebut sanak keluarga Sri Sultan yang mendapat ganjalan sentana. Para pangeran putra menjadi pembantu Sri Sultan dalam urusan pemerintahan Keraton dan mereka mengepalai Kawedanan Ageng Punakawan atau Tepas dibantu oleh Budanan ageng Punakawan atau Tegas dibantu oleh seorang Bupati. Pengangkatan pangeran dilakukan oleh Sri Sultan dengan suatu upacara.

6.1.1.5 Jalannya pengangkatan

Sebelum pangakatan terlebih dahulu calon pangeran menghadap Sri Sultan di *Gedog Jene* sedang Sri Sultan berada di Bangsal Kencana dihadap oleh sanak keluarga. kemudian Sri Sultan memerintahkan calon pangeran menghadap di Bangsal Kencana. Dahulu patih yang membacakan surat pernyataan pengangkatan di hadapan sanak keluarga Sri Sultan. Dewasa ini yang membaca surat tersebut abdi dalem bupati yang terlama. Selesai pembaca itu calon pangeran menjadi pangeran dengan mendapat nama baru. Di depan nama baru terdapat titel Bendera pangeran Harya (BHP) misalnya BPH Purbaya. Setelah menjadi pangeran lalu berjabat tangan dengan Sri Sultan. Sesudah itu kedudukan pangeran baru sejajar dengan pangeran yang lain, hanya tempatnya menurut lain, yang tertua di muka sendiri yang termuda di belakang.

Putra tertua Sri Sultan dari permaisuri yang cukup umur diangkat menjadi putra mahkota dan berhak menjadi Sultan Putra mahkota mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Hanom Hamengku Nagara Sudibya Raja Putra Naredra Mataram. Pengangkatan putra mahkoya dilakukan Sri Sultan yaitu di bangsal mengunturtangkil dan dilakukan Sri Sultan. Tugas putra mahkota ialah mengetahui {Pengadilan darah Dalem mengurus saudara-saudaranya yang mendapat bantuan dari lurah pangeran putri, serta mewakili Sri Sultan kalau berhalangan.

Pada waktu pemerintahan Belanda, yang membaca keputusan pengangkatan putra mahkota wakil dari pemerintah Belanda yaitu Sekretariat Daerah yang berkebangsaan Belanda. Andai kata permaisuri tidak berputra maka yang diangkat menjadi putra mahkota ialah tertua dari istri yang lain.

Keraton Yogyakarta dipimpin oleh seorang raja. Setelah kena pengaruh agama Islam raja bergelar Sultan. Jabatan sultan tumurun menurun yaitu putra dari permaisuri yang tidak bercacat (misalnya lemah ingatan) dan andaikan Sultan Gusti tidak berputra, maka yang dicalonkan menjadi Sultan Gusti Bei (putra Sri Sultan tertua yang hidup) Syarat-Syarat itu tidak diubah-ubah dan diganggu gugat karena sudah merupakan kebiasaan/tradisi yang harus ditaati. Di dalam keraton

Sri Sultan mempunyai kedudukan yang istimewa karena jabatan Sultan merupakan jabatan yang tertinggi dan dianggap keramat.³⁾

Sultan juga mempunyai masyarakat, maka seorang sultan harus mempunyai dua unsur yaitu kekuasaan dan kewibawaan.⁴⁾ Kedua unsur itu harus saling membantu karena untuk menambah kekuatan diperlukan kewibawaan yang besar, Selain itu sultan harus mempunyai tanda pimpinan menurut adat yang berwujud benda-benda pusaka kerajaan.

Pada zaman penjajahan Belanda yang mejadi sultan terlebih dahulu harus mengadakan pernyataan politik dan juga diadakan kontrak politik mengenai kekuasaan sultan, antara lain tetang status keraton dan pencalonan sultan. Isi kontrak politik ini ditentukan oleh Gubernur Jenderal dengan persetujuan dari Sultan. Pengangkatan sultan merupakan hari bersejarah bagi keraton karena itu diadakan upacara demi keselamatan sultan dan rakyat.

Upacara penobatan dilakukan oleh Gubernur dan tempatnya di Bangsal Wisnu Sitihiinggil. Yang membacakan surat keputusan pengangkatan dari pemerintahan Belanda ialah Sekretariat Daerah, orang Belanda. Surat itu menyatakan bahwa putra mahkota dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Ing Ingkang Sinuwan Kangjeng Sultan hamengku Buwono Senipati Ing Alaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah yang ke Setelah dinobatkan sultan duduk di dampar Kencana, Gubernur menyelamatkan bintang pusaka Kerajaan yogyakarta di dada Sri Sultan. Upacara ini diakhiri dengan pembacaan doa kesejahteraan oleh penghulu. Setelah selsesai upacara di Sitihiinggil Sri Sultan kembali ke Keraton untuk mengucapkan sumpah dan menada tangani kontrak politik di muka Gubernur.

Pada zaman dulu di tiap kerajaan atau keraton selalu ada jabatan Patih yaitu Patih jero dan Patih Jaba. Patih Jero bertugas membantu Sri Sultan dalam pemerintahan kerajaan Sendiri, sedangkan patih jaba mengadakan hubungan dengan kerajaan lain. Pada zaman Belanda Calon patih harus diusulkan terlebih dahulu oleh Sri Sultan kepada Gubernur Jenderal; melalui Gubernur . Setelah memdapat persetujuan calon patih baru boleh diangkat menjadi patih. Dengan kata lain, pengangkatan patih tidak dapat lepas dari persetujuan Gubernur

Jenderal dari bangsa Belanda, karena patih mendapat gaji dari kesultanan dan dari pemerintahan Belanda. Pada waktu pelantikan merupakan ikaatan tertinggi di Kasultanan, tetapi tidak turun-temurun, karena itu Calon Patih harus orang yang cakap dalam bidang kenegaraan. Patih juga merupakan orang kedua setelah Sultan. Patih yang terakhir dipensiun pada pertengahan zaman Jepang dan tugasnya diserahkan kepada Paniradya, karena jabatan patih ditiadakan. Dewasa ini keraton Yogyakarta tidak ada patih dan urusan kenegaraan dipegang langsung oleh Sri Sultan dibantu para pangeran.

Dalam urusan keagamaan Sri Sultan dibantu penghulu, pada zaman dahulu patih yang mengajukan calon-calon penghulu kepada Sri Sultan, tetapi setelah jabatan Patih ditiadakan yang mengajukan calon-calon itu Kantor Urusan Agama. Kalau calon penghulu itu diterima oleh Sri Sultan ia diangkat menjadi abdi dalem penghulu Keraton. Calon penghulu bekerja di kantor. Urusan Agama dan setelah menjadi abdi dalem, penghulu masih menjadi pegawai kantor Urusan Agama. Abdi dalem penghulu mengepalai kawedanan, jabatan ini tidak turun-temurun. Dewasa ini jabatan penghulu masih ada. Tugas penghulu ialah membacakan doa pada waktu ada upacara dalam Keraton dan merulakan pemuka Agama Keraton.

6.1.1.6 Sumber Keuangan dan peraturan kesejahteraan Keraton

Masa kerja para abdi dalem tidak terbatas. Dengan kata lain tidak mengenal masa pensiun, hanya kalau para abdi dalem merasa sudah tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya misalnya karena sudah lanjut usia dapat mengajukan permohonan untuk menjadi abdi dalem suraya.

Para abdi dalem saudara, selir, putra dan cucunya terbatas kepada yang mengabdikan Sri Sultan. Cucu laki-laki mengambil gaji pada Kawedanan Ageng Punakawan Sri Wandawa, sedang cucu wanita menerima dari permaisuri atau selir yang tertua. Banyak sedikitnya gaji abdi dalem tergantung pada tinggi rendahnya pangkat dan dibedakan antara abdi dalem yang caros serta abdi dalem yang berkantor di Keraton.

Gaji di Keraton sangat kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, para badi dalem diperbolehkan bekerja di luar,

misalnya menjadi anggota Ketoprak RRI dan sebagainya tetapi tidak melalaikan kewibawaannya di Keraton. Walaupun gaji kecil, tetapi mereka sangat rajin dan patuh menjalankan kewajiban sehingga sering mereka tidak mau berkerja di luar Keraton. Menurut mereka bekerja di Keraton tidak mencari gaji semata-mata, Menurut untuk memperlihatkan ketaatannya kepada sri Sultan yang dianggap telah memberi perlindungan terhadap mereka. Dengan kata lain taat dan patuh merupakan hal yang utama, sedangkan gaji merupakan hal yang kedua, Abdi dalem yang meninggal mendapat uang pralenan dan masih mendapat gaji penuh sebulan yang disebut alip. Urusan kesejahteraan pada abdi dalem dipegang oleh Tepas Wadudarma berarti bahwa mereka yang menerima gaji dari keraton dapat meminjam uang dengan bunga yang ringan sekali, maminta ganti pengobatan dokter. Tugas Wadudarma mempunyai cabang yang disebut Banda Kasmala yang mengurus kesejahteraan abdi dalem.

Dalam pemerintahan Sri Sultan VII semua keuangan negeri menjadi satu di tangan Sri Sultan dan disimpan di kas Keraton. Tiap bulan Patih mengambil gaji para abdi dalem di Kas Keraton menurut ransuman.

Pada jaman pemerintahan Sri Sultan VIII uang disimpan di Kasultanan. Sri Sultan mengambil gaji kesultanan dan gaji pribadinya menurut anggaran belanja yang setiap tahun ditetapkan dan tercantum dalam kotrak politik yang telah ditentukan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada waktu penobatan Sultan.

Dewasa ini keuangan Keraton diperoleh dari Kementrerian Dalam Negeri dengan jalan mandat. Keuangan Keraton meliputi gaji Sri Sultan, gaji sanak saudara dekat, gaji abdi dalem, pengeluaran uang upacara Keraton, Pembiayaan kesenian, kendaraan dan sebagainya. Urusan keuangan dipegang oleh Tepas Ratam Arta sedang urusan-urusan mandat dan penyimpanan uang di Kas keraton di lakukan oleh Tepas Danartupura.

6.1.1.7 Peraturan Keraton

Di dalam Keraton, untuk menghindari ketegangan sosial diadakan pengadilan dan peraturan. Pada jaman pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII terdapat dua pengadilan Keraton darah dalem

untuk mengadili orang dari grat I dan II dan pengadilan Kepatihan darah dalam untuk mengadili orang dari grat III dan IV. Orang yang termasuk grat satu yaitu putra-putri Sri Sultan, istri/selir Sri Sultan menantu Sri Sultan dan grat II yaitu cucu Sri Sultan, suami/isteri. Grat III yaitu buyut dengan suami/istri mereka dengan grat ke IV canggah ke bawah. Kedua pengadilan tersebut kemudian dijadikan satu disebut pengadilan Keraton darah dalam uang dikepalai oleh Sri Sultan dan dilakukan oleh putra mahkota. Surat keputusan pengasilan ini harus ada persetujuan Residen atau Gubernur Belanda. Sejak jaman kemerdekaan pengadilan darah dalam diadakan dan diserahkan kepada Negara republik Indonesia, lalu diadakan satu degan pengadilan negeri. Hal ini berarti bahwa sanak keluarga Sri Sultan yang bersalah diadili dipegadilan negeri.

Peraturan-perturan yang dikeluarkan harus sesuai dengan adat-istiadat yang lazim, sehingga kalau ada penyimpangan adat istiadat dianggap salah.⁵⁾ pada zaman pemerintahan Belanda peraturan-peraturan Keraton dikeluarkan Patih dengan persetujuan Gubernur Jenderal Belanda. Sedang pada zaman kemerdekaan peraturan-peraturan negeri/daerah dan Keraton terpisah.

Keraton mengenai juga hukum waris yang berdasarkan adat istiadat Keraton. Kekayaan milik kerajaan, misalnya benda-benda yang dianggap keramat, merupakan banda warisan dari nenek moyang.⁶⁾ Benda ini dianggap berasal dari Sultan Demak turun temurun sampai Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Kekayaan milik kerajaan berarti benda itu hanya kepunyaan orang yang menjadi rajin. Dengan kata lain, orang yang tidak menjadi raja tidak berhak atas benda itu sehingga tidak dapat mengganggu gugat dan raja tidak boleh menjual serta mewariskan kepada putra-putranya. Lebih-lebih benda pusaka juga merupakan lambang kekuasaan.⁷⁾

Selain benda pusaka juga tanah merupakan kekayaan milik kerajaan, karena itu tanah hanya boleh dipinjamkan atau diberikan oleh Sri Sultan kepada pihak lain. Dewasa ini masih terdapat tanah milik kerajaan misalnya tanah digedung DPR Alun-alun, tanah bekas Jagang dan sebagainya. Tanah-tanah dapat dipergunakan oleh Kotamadya Yogyakarta, tetapi apabila ingin mengadakan perubahan-perubahan, harus melapor kepada Sri Sultan terlebih dahulu. Dalam urusan tanah

Sri Sultan dibantu Tepas Wanakriya. Semua benda milik Sri Sultan pribadi boleh diwariskan kepada putra-putrinya. Kelurga Sri Sultan yang tidak mempunyai anak, harta warisan jatuh ke tangan saudara-saudaranya se ayah se ibu, tetapi apabila tidak mempunyai saudara se ayah se ibu, maka warisan jatuh ke tangan se ayah. Jika sebelum meninggal sudah membuat pernyataan yang diperkuat dengan akte notaris maka harta kekayaan itu dapat jatuh ke tangan pihak yang telah ditetapkan dalam akte notaris. Dahulu anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan tetapi sekarang kebanyakan sama.

6.1.1.8 Pengabdian di Yogyakarta

Pada waktu berdirinya Kasultanan Yogyakarta dalam tahun Masehi 1755 pengadilan yang berlaku di Yogyakarta ialah :

1. Pengadilan Pradata : mengadili perkara-perkara pidana dan perdata.
2. Pengadilan Surambi : mengadili perkara-perkara perdana, hukum perkawinan dan perceraian serta perkara-perkara warisan.
3. Pengadilan Bale Mangu adalah pengadilan untuk perkara-perkara pidana dan "adminiatratif: dan kemudian juga pengadilan agraria untuk perkara antara "patuh" dan para bekelnnya serta antara priyayi tinggi dan priyayi rendah.

Tempat pengadilan Pradata itu di "Pekapala" atau gedung paseban di alun-alun utara sebelah barat, pintu gerbang Mesjid Besar. Pengadilan Surambi di Surambi Mesjid tersebut, sedang Pengadilan Bale Mangau di Kepatihan.

Pada tahun 1818 terjadi perubahan mengenai kekuasaan mengabdi pada tiga pengadilan tersebut di atas, karena pada tahun 1818 di Yogyakarta diadakan pengadilan baru ialah perkara pidana campuran yang memeriksa dalam instansi kedua (pengadilan bandingan) untuk segala perkara Campuran lainnnya. Sehabis perang Diponegoro diadakan perubahan besar mengenai kepolisian dan Pengadilan. Sejak 1893 terhadap Surakarta, Gubernur berhak mengatur bekas soal justisi dan polisi, sedang Sultan Hamengku Buwono VII pada waktu penobatannya menyatakan kesediannya akan tunduk pada peraturan-peraturan yang akan dibuat oleh Gubernur di daerahnya mengenai

perbaikan polisi, dan Justirisi serta pengadilan tentang perkara-perkara polisi atau perkara-perkara pidana, misalnya dengan menempatkan asisten-asisten residen di tanah pedalaman.

Pada tahun 1903 diadakan reorganisasi, Surambi, maka keadaan Pengadilan di Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Di Ibu kota Yogyakarta Pengadilan Surambi, Pradata dan Bale Mangu yuang ketiga-tiganya sejak 1813 hanya mengadili perkara perdata (Civiel) sedang pengadilan Surambi mulai 1903 diubah hanya mengadili perkara perceraian menurut hukum Islam atas permohonan cerai dari istri yang bertentangan dengan kemauan suami.
- b. Pengadilan terhadap putra-putra dan Santana Dalem (keluarga sederhana dan semenda dari raja-raja) dan terhadap pegawai-pegawai tertinggi yang disebutkan dalam stbl 1903 No. 8 Di situ ditegaskan yang diadili oleh pengadilan tersebut, ialah: "keluarga sedarah dan semenda dari Raja-raja baik yang masih bertakhta mampu yang tidak lagi bertakhta, sampai keturunan keempat.
- c.
 - I. Dua pengadilan di dalam keraton ialah pengadilan Kori dan pengadilan Kadipaten yang Keputusan keputusannnya dapat dimintakan bandingan ("hooger beroep") kepada Pradata atau "Pradata Dalem".
 - II. Pradata-pradata Kabupaten 4 di Ibukota dan 8 di Kabupaten-kabupaten luar kota.
 - III. Pradata-pradata Kedistrikan
 - IV. Pengadilan Kadanurejan yang disebut juga Pengadilan Gedog Regol
 - V. Pengadilan yang dilakukan oleh para Wadono golongan atau para Bupati Nayaka terhadap para pegawai di lingkungannya masing-masing yang keputusan-keputusannya dapat dimintakan bandingan pada Pradata Dalem.

Selanjutnya tahun 1917 dengan persetujuan Sri Sultan diadakan ketentuan, bahwa semua peraturan mengenai urusan pengadilan ke Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta dicabut dan pengadilan-pengadilan asli yang ada di karesidenan-karesidenan itu diadakan. Untuk kawula Sultan Yogyakarta masih di langsungkan Pengadilan

Bale Mangu untuk mengadili perkara-perkara tanah yang bukan perkara perdata dan Pengadilan Surambi, untuk mengadili perceraian atas permohonan istri yang bertentang dengan kemauan suaminya. Terhadap keputusan ini dapat dimintakan bandingan pada Papatih Dalem, dan terhadap keputusan ini dimohonkan banding pada Sri Sultan. Pengadilan Bale Mangu itu kenyatannnya merupakan pengadilan-pengadilan administratif mengenai perkara tanah antara Patih dan para Bekel dan kulinya.

Untuk melaksanakan fasal ini maka *kawula* Sultan, yang menjadi pegawai Gubernur Hindi Belanda, dianggap sebagai *kawula* Gubernemen. Kecuali perkara-perkara Pengadilan Surambi yang belum ada putusnya, maka sengekal perdata terhadap *kawula* Sri Sultan Yogyakarta, yang pada waktu berlakunya ordonisasi ini, belum ada putusnya pada pengadilan untuk ordonansi ini, belum ada putusnya pada pengadilan untuk perdata-perdata (Pengadilan Pradata, pengadilan Bale Mangu dan Pengadilan Wadono-wadono Golongan) berpindah menurut hukum kepada pengadilan-pengadilan, yang berwenang memutuskannya.

Jadi mulai berlakunya ordonisasi dalam Stbl. 1917 No. 127 pada Juni 1917 boleh dikatakan habislah semua pengadilan asli di Surakarta dan Yogyakarta, kecuali yang tersebut di atas. Sejak tahun 1917 keadaan pengadilan-pengadilan di Yogyakarta sama dengan di Karesidenan lain-lainnya di Jawa dan Madura. Dengan lain perkataan; para *kawula* Sultan termasuk Yudisdiksi Gubernemen. Hanya Sri Sultan masih mempunyai kekuasaan mengadili perkara-perkara keluarga sedarah dan semenda seperti telah disebutkan di atas.

Berhubungan dengan itu maka oleh S.P. Sultan diadakan dua pengadilan ialah :

1. Pengadilan Keraton terhadap keluarga sedarah dan semenda turunan pertama dan kedua.
2. Pengadilan Kapatihan Darah Dalem, yang mengadili perkara-perkara yang sama terhadap keluarga sedarah dan semenda turunan ketiga dan keempat darah Dalem, yang mengadili perkara-perkara pidana dan perdata.

Dengan prantara dalam Rijktsblad 1927 No. 35 maka kedua Pengadilan tadi dijadikan satu dan diberi nama Pengadilan Keraton Darah Dalem yang tempat bersidangnya di tentukan di bagian Keraton, yang disebut Sri Menganti.

6.1.1.9 Keadaan Keagamaan.

Keluarga raja-raja di Yogyakarta sejak Sultan Hamengku Buwono I memeluk agama Islam. Demikian pula mayoritas masyarakat Yogyakarta mengakui Islam sebagai agamanya. Namun kehidupan agama Islam di Yogyakarta pada awal abad dua puluh tidak menyenangkan, karena dalam prakteknya telah banyak tidak menyenangkannya, karena dalam prakteknya bercampur dengan perbuatan-perbuatan syirik dan bad'ah. Pada umumnya Umat Islam memeluk agamanya bukan karena keyakinan hidupnya, melainkan karena hidup yang diwarisi dari nenek moyangnya. Dan Islam uang diputuskannya itupun telah bercampur dengan ajaran-ajaran Animisme, Budayanisme dan sebagainya. Pada waktu itu agama Islam tidak nampak cahaya kebesarannya. Masyarakat dalam mempelajari Islam bukan sebagai bekal dalam hidupnya, melainkan mereka mempelajari Islam sebagai dogma yang mati dan mereka kerjakan amalan-amalan yang dipusakai dari nenek moyangnya meskipun hal itu bukan menjadi suruhan ajaran agama. Keadaan yang demikian itu menimbulkan tafsiran dan tanggapan yang salah terhadap tiap-tiap ajaran agama. Di samping itu mengakibatkan terjadinya kekolotan (konservatisme), taklid, mengerjakan apa saja yang dipusakai dari nenek moyangnya, meskipun hal itu sudah tenang bukan ajaran dalam (tradisionelisme). Maka K.H. Akhmad Dahlan, yang dididik serta dilahirkan dalam lingkungan dan suasana keagamaan menyaksikan dalam hatinya untuk mengajak rasa sedih. Maka tergeraklah dalam hatinya untuk mengajak umat Islam kembali kepada kemurnian ajaran agamanya. Diajaknya umat Islam menegakkan kembali tauhid ke Maha Esaan Tuhan Robbul Alamin, karena Taulid inilah tiang dasar atau "saka guru" dari agama Islam. Manakala tiang dasar ini retak, maka goyahlah sendi-sendi hidup menurut tuntunan agama.

Dalam hubungan ini dapatlah diambil kesimpulan, bahwa cita-cita dan perjuangan K.H. Akhmat Dahlan, ialah mengantarkan umat Islam kembali hidup menurut ajaran agama Islam.

Adapun yang menjadi sebab-sebab kemunduran Islam di tanah air kita pada umumnya, termasuk di Yogyakarta antara lain disebabkan :

a. Mistik

Seperti diketahui jauh sebelum kedatangan agama Islam di Jawa umumnya masyarakat kita telah mengenal ajaran-ajaran mistik. Sesudah Islam datang ke mari, maka terjadilah perkawinan atau akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Peyiaran dan perkembangan agama Islam di tanah Jawa khususnya berjalan demikian lancar dan dalam suasana damai.

Sedangkan agama yang hidup di sini sebelum Islam adalah agama Syiwa Budha yang berasal dari India. Ajaran mistik sangat mendalam di kalangan masyarakat kita. Para wali yang dikenal penyebar agama Islam di Jawa ingin meluruskan ajaran mistik yang tidak sesuai dengan agama Islam. Syekh Siti Jenar, yang lantaran mistik yang dianggap oleh para wali sesat dan menyesatkan, dihukum mati. Ini membuktikan, bahwa rupa-rupanya ajaran dan pengaruh mistik yang hidup di kalangan masyarakat berjuang, melainkan ajaran-ajaran mistik itu melumpuhkan semangat perjuangan. ajaran-ajaran mistik menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam, karena hanya berdasarkan pada soal-soal kebatinan dan keakhiratan serta mejauhkan diri dari pergaulan masyarakat ramai. Pengaruh ajaran mistik yang demikian ini sudah barang tentu bertentangan dengan ajaran islam yang mengutamakan ajaran Tauhid dan semangat jihad (perjuangan).

b. Hindu/Budha

Di samping adanya pengaruh mistik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana digambarkan di atas, juga pengaruh animisme dan sisa-sisa agama hindu maupun Budha masih ada di kalangan rakyat. Sebagai contoh misalnya dalam upacara-upacara perkawainan maupun kematian, tampak dengan jelas masih adanya pengaruh Hindu dan Budha, Percampuran uang demikian ini menyebabkan sukar untuk membedakan mana yang sebenarnya ajaran Islam dan mana yang bukan Islam. Masih adanya pengaruh sisa-sisa Hindu dan Budha ini menyebabkan ketidaksuburan tumbuhnya kebudayaan Islam.

c. Feodalisme

Selain daripada apa yang telah kita sebutkan di atas, ada juga faktor lain yang menyebabkan kemunduran Islam ialah masih adanya pengaruh feodalisme yang tebal di kalangan rakyat umumnya, dan para bangsawan khususnya. Sebagaimana di ketahui, di Jawa Tengah misalnya ada dua kerajaan, Surakarta dan Yogyakarta, yang lahir sebagai warisan dari zaman Mataram dan Pajang dahulu. Dua kerajaan yang secara formal rajanya mengaku beragama Islam akan tetapi dalam prakteknya justru bertentangan dengan kaidah-kaidah dari ajaran Islam sendiri. Adapun cara hidup dari para sultan atau raja-raja itupun menunjukkan pula adanya pertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian pula adanya feodalisme yang masih hidup di kalangan rakyat yang mendewa-dewakan orang bangsawan dan raja, di samping praktek hidup dari raja-raja tersebut menyebabkan pudarnya cahaya Islam.

d. Penjajahan

Adanya penjajahan di Indonesia selama 350 tahun itupun mengakibatkan pada kemunduran umat Islam, baik di bidang sosial ekonomi, maupun di bidang kultural. Malahan kadang-kadang untuk kepentingan politik kolonialnya, Belanda tidak segan-segan menggunakan kegiatan misi dan zending. Penjajahan telah melumpuhkan potensi islam. Meskipun secara lahiriah jumlah pemeluk Islam merupakan mayoritas, namun pada hakekatnya Islam telah dilumpuhkan serta dirusak dari dalam.

Keadaan agama selain Islam misalnya Kristen dalam Katholik di Daerah Yogyakarta pada periode 1900--1942 belum begitu meluas. Sebagian besar dianut oleh orang-orang Belanda serta pegawai-pegawainya.

6.1.2 Pemerintahan Hindia Belanda

Tindakan-tindakannya Daendels di daerah kerajaan telah menimbulkan bentrokan dengan Sultan hamengku Buwono II. Sebelum ada peraturan baru ditetapkan oleh Daendels, para Residen Yogyakarta berjalan kaki, tidak boleh naik kereta jikalau melewati Alun-alun Utara Keraton pada waktu akan berkunjung ke karaton. Mereka tidak

diperbolehkan pula memakai payung. Dalam upacara resmi Residen harus berdiri dan mempersembahkan sirih atau minuman kepada Sultan, sedang Sultan tetap duduk. Selain dari itu Residen harus duduk di tempat yang lebih rendah dari empat Sultan. Semuanya sudah menurut pandangan Daendels sangat merendahkan derajat kekuasaan Belanda. Oleh karena itu Daendels mengadakan perubahan-perubahan dan menetapkan peraturan upacara yang baru (28 Juli 1808). Residen di kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta diberi gelar "Minister", karena mereka mewakili pemerintah Belanda di kerajaan-kerajaan itu. Jikalau Residen dan Minister lagi berkunjung kepada sultan Wakil pemerintahan Belanda itu tidak lagi berjalan kaki melalui Alun-alun Utara. Residen datang dengan kereta dan diantar atau dikawal oleh seseorang "komandan" dengan dua belas orang prajurit berkuda (*dragon-ders*). Jikalau Residen turun dari kereta maka ia harus dipayungi. Wakil pemerintahan Belanda itu tidak lagi mempersembahkan sirih atau minuman kepada Sultan yang tetap saja duduk pada tempatnya, seorang pelayan yang berpakaian bagus secara berganti-ganti mempersembahkan minuman kepada Sultan dan kepada Wakil pemerintahan Belanda itu. tempat duduk Minister sebagai wakil pemerintahan Belanda tidak boleh lebih rendah daripada tempat duduk Sultan dan sebagainya. Perubahan peraturan ini tentu saja menimbulkan perasaan tidak senang di kalangan-kalangan orang-orang keraton. Sultan Hamengku Buwono II tidak setuju dengan peraturan baru yang ditetapkan oleh Daendels itu.

Sementara itu di daerah kerajaan Yogyakarta terjadi kekacauan. Kesempatan ini dipergunakan oleh Daendels untuk mengambil suatu keuntungan. Kekeruhan dalam keraton dipertajam oleh pihak pemerintah Belanda dengan memajukan beberapa tuntutan yang bertujuan melemahkan keraton Yogyakarta. Peraturan baru yang diterapkan Daendels harus diterima oleh Sultan dan Sultan dipaksa turun dari takhta kerajaan. Ia diganti dengan putranya yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono III yang juga terkenal dengan sebutan nama Sultan Raja. Di sini dapatlah kita menggambarkan betapa keruhnya keadaan di dalam dan sekitar keraton Yogyakarta. Bahkan memang suasana itu dengan sengaja diciptakan oleh Belanda untuk memudahkan mereka melaksanakan politik, "*divide et imperanya*".

Susana keruh dan kekecauan di dalam keraton Yogyakarta, terutama pada zaman pertentangan antara Sultan Sepuh dan Sultan Raja inilah yang sangat erat sekali hubungannya dengan peperangan Dipanegara. Suasana yang sangat buruk dan kacau ini disaksikan dan dialami sendiri oleh Pangeran Dipanegara. Pangeran Dipanegara mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan. Kecuali adanya penetapan-penetapan baru, Belanda juga mengurangi pula beberapa daerah dan hak serta kekuasaan Yogyakarta. Kerajaan Yogyakarta diharuskan menyerahkan beberapa daerahnya kepada Gubernemen Belanda dan uang pantai yang seharusnya di bayar Gubernemen Belanda di hapuskan. Untuk mengisi kas negara Belanda maka tanah-tanah di Yogyakarta banyak dijual kepada orang-orang Partikelir, biasanya orang Eropa dan Cina. Inilah asal mulanya ada tanah-tanah partikelir pada 16 Mei 1811 Daendels di tarik dari Pulau Jawa. Demikian politik campur tangan dan memecah belah Belanda telah membawa suasana keruh bagi kerajaan Yogyakarta. Karena penindasan kaum penjajah penderitaan rakyat makin lama makin bertambah hebat Penyewaan tanah, kepada orang-orang partikelir, terutama orang-orang Eropa makin lama makin menjadi dan dilakukan secara besar-besaran. Bahkan Residen Yogyakarta pun turut juga menyewa tanah. Akibat penyewaan tanah dan kekuasaannya terhadap rakyat asing makin besar pengaruh dan kekuasaannya terhadap rakyat jelata yang sangat patuh itu. Keluh kesah rakyat terdengar di mana-mana. Penyewaan telah membawa akibat yang sangat buruk terhadap nasib dan hidup rakyat. Belanda terlalu banyak turut campur dalam urusan intern kerajaan Yogyakarta. Belanda selalu menuduh para Pangeran yang sekiranya berani melawan dan memimpin rakyat dengan tuduhan melawan pada pemerintahan Belanda. Di daerah Yogyakarta baik golongan atasan atau bangsawannya. Maupun rakyat jelatanya amat banyak mengalami penghinaan dan perlakuan yang menurut adat istiadat pada waktu itu sangat menyinggung perasaan. Rakyat diperas dan ditindas secara sewenang-wenang. Rakyat diwajibkan membayar pajak yang amat banyak macamnya. Disamping itu rakyat dipungut pembayaran bea. Jadi rakyat jelata makin menderita dan menjadi sapi perahan untuk memuaskan dahaga orang-orang asing yang loba dan tamak. Bahkan anak kecil yang didukung ibunya dianggap sebagai barang dan harus di kenakan bea. Akibat penjajahan Belanda,

masyarakat atau bangsa Indonesia mengalami kemuduran di segala bidang, dibidang politik, ekonomi sosial budaya maupun pendidikan.

Di lapangan pemeritahan misalnya, segala jabatan penting dipegang oleh orang-orang asing sedang bangsa kita tidak lebih hanya sebagai pegawai rendah. Di lapangan kemasyarakatan kenal dengan istilah "divide et impera" diadunya golongan yang satu dengan lainnya, antara kaum bangsawan dan rakyat dan seterusnya. Di lapangan ekonomi, keadaan bangsa kita pun menyedihkan sekali. Perekonimian rakyat berada di tangan bangsa Belanda. Bangsa kita menjadi korban rentenir, tuan tanah asing. Perekoniman kita baik di atas maupun di bawah kesemuanya dikuasai oleh orang-orang asing.

Di lapangan pendidikan, bangsa kita tidak padai membaca dan menulis, sehingga buta huruf merajaleja di mana-mana. Pendidikan tingkat menengah dan atas, hanya terbuka bagi kaum bangsawan dan priyanyi.

Krisis ekonomi akibat adanya penjajahan Belanda yang beratus tahun telah melanda dan berkecamuk di seluruh tanah air dari kota yang paling besar sampai dipelosok yang terpencil. Kelaparan merajalela di daerah minus seperti gunung Kidul. Demikian juga di daerah lain terjadi seperti yang dialami rakyat Gunung Kidul di daerah Bojonegoro. Karena adanya krisis ekonomi sampai-sampai banyak desa yang sepi kehilangan penduduk. Penghuninya mati kelaparan atau mati kena penyakit kolera dan disentri. Beberapa desa hanya didiami oleh dua tiga keluarga, yang tidak lagi lengkap. Bahkan ada yang sama sekali ditinggalkan. Di Gunung Kidul pun banyak yang mati kelaparan atau kena penyakit kolera dan disentri daerah itu memang daerah minus, tanahnya tandus.

Kehidupan rakyat di daerah Sleman dan pakem, wilayah Yogyakarta, yang dahulunya makmur sangat menyedihkan. dalam satu desa hanya beberapa keluarga saja yang setiap hari makan nasi dua kali sampai kenyang. Kelurga lainnya makan nasi sekali pada waktu siang, sorenya makan gaplek. Yang di katakan sayur tidak lagi daun-daunan dari pekarangan direbus dengan air bercampur garam dan santan sekedarnya. Lauk-pauk ikan tak pernah dikenalnya. Tempe dan tahu

merupakan lauk istimewa. Hanya prabot desa yang dapat makan hasil sampai kenyang dengan sekedar sayur dan lauk-pauk tahu tempe.

Masalah pendidikan pun sangat menyedihkan. Pendidikan bagi rakyat masih terbatas. Hanya lurah yang mampu melaksanakan anaknya ke HIS yang berbahasa Belanda. Lainnnya menyekolahkan anaknya ke sekolah desa, sekolah Angka Dua. Kebanyakan anak petani tidak bersekolah.

Keadaan yang buruk ini merupakan akibat langsung dari politik kolonial Belanda. Kesempatan melanjutkan ke sekolah tinggi masih terbatas pada keluarga bangsawan dan keluarga priyayi.

Hubungan dengan Gubernur Hindia Belanda.

Kekuasaan yang diberikan kepada Gubernur Jenderal menurut pasal 34 ayat (1) IS (Indische Staat sgelang) yaitu kekuasaan untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja, menelorkan politiek-contracts yang terakhir dengan kesultanan tertanggal 18 Maret 1940 (*overenkomst tussche het Gouvernebt van Nederlandsch-Indie enhet Sultanaat Yogyakarta van 18 Maret 1940*) dan diundangkan dalam Staatsblad 1941 No. 47, sedang dengan Pakualaman disebut "*Zelfbesturregelen Pakualaman*" dan diundangkan dalam Staatsblad 1941 No. 577 menyebabkan adanya hubungan dengan Gubernemen Hindia Belanda.⁸⁾ Sekali pun nama dari perjanjian tersebut di atas berlainan, tetapi jiwa dan isinya adalah sama. Isi perjanjian tersebut pada garis besarnya mengatur hubungan politik diantara Daerah Swapraja dan Gubernemen Hindia Belanda. Pasal 21 ayat (2) IS berlaku untuk Daerah daerah Swapraja sepanjang sesuai dengan hak Swapraja itu. Selanjutnya hubungan politik ini diatur lebih jauh lagi dalam *Politiek Contract/Zelfbestuurregelen*. Beberapa pokok pikiran yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Penegasan tentang kedudukan hukum (*rech sponsitie*/Daerah Swapraja.
2. Penjelasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan alat-alat kekuasaannya (*orgamen*) dan kekuasaan kepala Daerah Swapraja.

- 3 Tambahan kekuasaan kepada Kepala Daerah Swapraja dalam lapangan perundang-undangan, sehingga lambat laun tidak akan ada dualisms (hal-hal yang dulu diatur dalam *reglementen dan keuren van politie* oleh Residen/Gubernur lambat laun akan hilang, karena Kepala Daerah Swapraja diberi kekuasaan untuk membuat peraturan yang berlaku terhadap golongan *Gouvernements Onderhoarigen*," sepanjang hal-hal yang diatur di dalamnya sama dengan urusan-urusan yang sudah diserahkan kepada Daerah otonomi di daerah Gubernemen.

Dalam politik kontrak tidak disebutkan satu persatu (nominatief) tentang urusan-urusan yang dapat diatur oleh Kepala Daerah Swapraja, melainkan. di *site tifornuleer* urusan-urusan apa yang tetap akan diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda sendiri.

Dalam lampiran yang dimaksud ditentukan 22 jenis urusan yang kompetensinya, untuk mengatur tetap berada pada Pemerintah Hindia Belanda, diantaranya urusan pertahanan, urusan senjata api dan bahan peledak, urusan kewarganegaraan Belanda dan lain-lainnya. Di samping itu masih ada beberapa pasal yang menentukan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yaitu pasal 27 tentang hak memberi grasi, amnesti dan abolisi, pasal 33 ayat (1) tentang acciynzen, pasal (2) tentang pengajaran, pasal 28 ayat (2) tentang pencegahan atau pemberantasan penyakit menular, pasal 39 ayat (1) tentang hak tanah kepada bangsa asing, pasal 42 ayat (1) tentang perusahaan pertanian besar, pasal 43 ayat (1) tentang pertambangan, pasal 44 tentang kekuasaan.

6.2 *Kaum Pergerakan di Daerah.*

6.2.1 *Budi Utomo*

Pada awal abad kedua puluh keadaan bangsa Indonesia sangat menyedihkan. Kesempatan memasuki sekolah belum terbuka secara luas bagi rakyat. Hanya mereka yang tergolong anak priyayi dapat diterima di sekolah. Baru pada tahun 1901 diperdengarkan seruan raja Belanda agar Pemerintah Hindia Belanda mulai memperhatikan pendidikan orang Indonesia. Keadaan yang sangat menyedihkan itu

disadari juga oleh para pelajar Jawa, yang pada waktu itu sedang menjalani pendidikan di STOVIA. (*School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen* = sekolah pendidikan dokter bumiputera).

Kemudian timbullah hasrat untuk mendirikan suatu perhimpunan pelajar yang bertujuan mempercepat usaha kearah ke majuan rakyat. Kebetulan pada akhir tahun 1907 dokter pensiunan Wahidin Sudirohusodo mengadakan ceramah di muka para pelajar STOVIA yang berisi anjuran untuk mendirikan Badan Bantuan Pendidikan atau Studiefonds. Tujuannya ialah untuk menolong para pemuda Indonesia agar dapat menuntut pelajaran di perguruan tinggi. Ceramah dokter Wahidin itu mendapat sambutan baik dari para pelajar.

Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 dibentuklah perkumpulan Budi Utomo di Sekolah Kedokteran Jakarta Ikut aktif dalam pembentukan Budi Utomo ialah M.Suraji, Mohamad Saleh, Mas Suwarno, Muhamad Sulaiman, Gunawan dan Gumbreg. K.H.Dahlan dari Yogyakarta pun tidak ketinggalan aktif dalam perjuangan Budi Utomo. Demikian berita berdirinya perkumpulan Budi Utomo tersiar dalam surat kabar, para pelajar di Yogyakarta, Magelang dan Probolinggo segera mendirikan cabang Budi Utomo ditempatnya, masing-masing. Sebagai langkah lanjut berdirinya Budi Utomo, maka pada tanggal 3, 4 dan 5 Oktober 1908 di Yogyakarta diselenggarakan kongres Budi Utomo yang pertama. Sebagai tuan rumah, penyelenggara kongres tersebut masyarakat Yogyakarta menyambutnya dengan gembira. Para pelajar para priyayi di Yogyakarta aktif mengambil bagian untuk suksesnya konggres Budi Utomo. Jalannya konggres ini berbeda sekali dengan rapat pembentukan BO tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Stovia. Memang ini dapat dimengerti, karena rapat 20 Mei sifatnya tertutup dan masih rahasia untuk umum, sedangkan rapat bulan Oktober di Yogyakarta terbuka untuk umum, Verslag Koggres Budy Utama (begitu Budi Utomo pada waktu itu ditulisnya dan dibuat oleh Cabang Yogya serta ditanda tangani oleh "MNGD Sewaya" sebagai Sekretarisnya). Seruan para pelajar Stovia telah menggugah semangat untuk melawan dan memberontak terhadap Pemerintah kolonial Hindia Belanda. Demikian dikemukakan Dr. Wahidin sebagai pengurus Budi Utama Cabang Yogyakarta.

Cabang Yogya yang beranggotakan penduduk bumi putera, pegawai pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pakualaman bersenang hati mendengar kabar yang baik itu. Di samping kegembiraan mereka juga merasa khawatir karena para pemuda itu dirasa terlalu berani menempuh jalan yang gawat (banyak bahaya). Pada bulan Agustus 1908 didirikan Cabang Yogya dengan maksud sedapat-dapatnya menolong berikhtiar supaya maksud para pelajar Stovia itu tercapai dengan selamat. Yang hadir dalam konggres Budi Utomo di Yogya itu lebih dari 400 utusan. Mereka datang dari Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, Probolinggo dan Yogya sendiri. Ikut menunjukkan perhatian pada konggres itu para bangsawan Pakualaman, pembesar-pembesar Belanda, para Bupati Temanggung, Blora dan Magelang. Juga kelihatan di antara para hadirin 6 opsir dari Legiun Mangkunegaran Solo. Untuk pertama kalinya bangsawan, priyayi tinggi dan menengah serta kaum intelek Jawa bangkit dan berkumpul untuk bersatu. Mereka telah dibangkitkan, dan dipersatukan oleh pemuda-pemuda pelajarnya. Konggres dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Untuk mencapai tujuannya konggres Budi Utomo pertama di Yogyakarta itu telah menelorkan beberapa keputusan :

1. Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Sebagai usaha pertama yang akan dijalankan untuk mencapai kemajuan bangsa ialah memperluas pengajaran.
2. Memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan. Jadi sudah dipertimbangkan pula usaha pada bidang perekonomian.
3. Memajukan tehnik-industri. Jadi kemajuan dibidang ini pun telah dicita-citakan Budi Utomo ketika itu.
4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Jadi masalah kebudayaan telah dipersoalkan di dalam konggres Budi Utomo itu. Demikian pula tentang usaha untuk mempertinggi cita-cita kemanusiaan.

Pada tanggal 9 September 1909 di Yogyakarta diselenggarakan rapat Pengurus Besar Budi Utomo. Dalam rapat itu Dr. Cipto Mangunkusumo mengajukan usul, supaya Budi Utomo memperluas keanggotaannya dengan membuka pintu bagi Indears "Anak Hindia,"

bagi semua orang yang lahir, hidup, mati dan dikubur di tanah Hindia. Akibat usul tersebut timbul perdebatan sengit antara dokter Cipto Mangunkusumo sebagai pemuka politik dan dokter Rajiman Wedyodipuro (kelak Wedyodiningrat) sebagai pemuka kebudayaan. Usul Dr.Cipto mendapat tantangan dari aliran tua, yang dengan pelbagai alasan menolak usul tersebut.

Pada tahun 1911 Pangeran Aryo Noto Dirojo dari istana Paku Alam tampil dan terpilih sebagai ketua Budi Utomo, menggantikan R.T. Tirtokusumo yang meletakkan jabatan. Di bawah pimpinan baru ini kelihatan adanya kemajuan dalam keanggotaan, meskipun belum seperti yang diharapkan oleh dokter Cipto Mangunkusumo. Kaum terpelajar memberikan kepercayaan kepada kaum bangsawan untuk memimpin pergerakan. ini merupakan suatu kehormatan besar bagi kaum bangsawan, sehingga sebagian besar bangsawan Surakarta dan Yogyakarta menaruh simpati kepada Budi Utomo. Dengan bantuan para bangsawan Budi Utomo mampu mendirikan tiga sekolah netral, satu di Sala dan yang dua lagi di Yogyakarta, Sultan Yogya memberi bantuan tanah lapang seharga f.100.000,- dan uang sebanyak f.45.000,-. Cita-cita Wahidin Sudirohusodo untuk mendirikan badan dana belajar atau studiefonds karenanya dapat dilaksanakan. Berdirilah Studie fonds "Darma Wara". Usaha ini disokong pula dari pemerintah sebesar f.50.000,-

6.2.2 *Gerakan Muhammadiyah.*

Gerakan Muhammadiyah secara resmi berdiri pada 18 Nopember 1912 atau bertepatan dengan tgl. 18 Zulhijjah 1330 H di Yogyakarta. Sebenarnya idea untuk mendirikan Muhammadiyah itu telah lama ada. Cita-cita untuk mengadakan pembaharuan Islam, telah dimulai sejak tahun 1316 H atau 1896 M yaitu mengenai pembetulan arah Qiblat dari langgar-langgar dan Mesjid-mesjid di Yogyakarta yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan.

Pada tanggal 20 Desember 1912, yaitu sesudah Muhammadiyah berdiri dengan resmi, maka K.H. Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan "*rechtspersoon*" bagi Muhammadiyah kepada Gubernur Jendral Belanda di Jakarta. Permintaan ini dikabulkan dengan surat ketetapan (Gouvernement Besluit No. 81 tanggal 22 Agustus 1914)⁹

Pengakuan Muhammadiyah sebagai badan hukum mula-mula hanya berlaku di daerah Yogyakarta. Ditilik dari masa kelahirannya, maka Muhammadiyah terhitung salah satu organisasi Islam yang dilahirkan dalam masa kebangunan nasional. Sebagai organisasi yang lahir dalam masa kebangunan, membawa pula sifat-sifat sebagai perintis. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang dilahirkan sebagai manifestasi daripada kehendak dan tuntutan jamannya. Jaman dimana kehidupan agama Islam menunjukkan kepudaran dan kesuraman. Demikian pula umat Islam hidup dalam alam kekolotan dan kebekuan. Karenanya Muhammadiyah merasa terpenggil untuk membebaskan umat Islam dari alam fikiran dan alam perasaan yang diliputi oleh kebekuan dan kekolotan. Dengan kata lain, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang hendak mengadakan reformasi dan modernisasi, menumbangkan segala sisa tradisionalisme dan Konservatisme di kalangan masyarakat Islam. Karena tradisionalisme dan konservatisme yang menyebabkan kebekuan dan kemunduran, bertentangan dengan isi ajaran-ajaran Islam yang bersifat dinamis dan revolusioner. Adapun kedinamisan Islam terletak pada terbukanya pintu ijtihad. Selama pintu ijtihad tertutup, tidak akan ada kemajuan cara berpikir umat Islam. Ijtihad merupakan kunci daripada pintu segala kemajuan dan kejayaan Islam. Muhammadiyah membuka pintu yang selama itu tertutup rapat.

Dalam memperjuangkan cita-citanya, ditempuhlah berbagai jalan. Muhammadiyah dalam perjuangannya tidak hanya memusatkan kegiatan dan usahanya di lapangan "tabligh/dakwah" melainkan juga memberikan kursus-kursus dan pelajaran-pelajaran agama Islam mendirikan sekolah-sekolah umum di samping mendirikan madrasah-madrasah, yang memberikan pelajaran agama secara mendalam dengan tidak melupakan pengetahuan umum. Dengan perkataan lain, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah membentuk manusia Muslim yang berpendidikan intelek, atau mendidik manusia intelek yang bediwa Muslim. Di bidang kemasyarakatan lainnya, Muhammadiyah mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit-rumah sakit, memelihara anak-anak yatim-piatu, menerbitkan buku-buku agama dan buku bacaan lainnya, menerbitkan surat kabar, majalah dan sebagainya. Dengan demikian ditinjau dari segi idiologis,

perjuangan Muhammadiyah untuk memoderenisasikan cara menyiarkan dan mengembangkan agama Islam dapat dikatakan berhasil.

Meskipun secara formal, Muhammadiyah bukanlah merupakan suatu partai politik, namun segala amal usaha Muhammadiyah, ditinjau dari segi politis amat merugikan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena segala langkah dan usaha yang dijalankan oleh Muhammadiyah untuk menolong meringankan beban penderitaan rakyat, serta mencerdaskan rakyat dengan jalan memberikan pelajaran yang dapat menjadi bekal hidup mereka, baik di dunia maupun di akhirat, adalah bertentangan dengan tujuan politik-kolonial yang pada pokoknya bertujuan untuk tetap memperbodoh rakyat, agar mereka dapat untuk selama-lamanya hidup di bawah telapak kaki serta cengkeraman kaum kolonial. Dengan demikian langsung atau tidak langsung perjuangan Muhammadiyah akhirnya menuju ke arah tercapainya kemerdekaan bangsa dan negara.

Dengan demikian perjuangan Muhammadiyah ditinjau dari rangka perjuangan nasional, mempunyai arti yang dalam, baik ditinjau dari segi politis maupun ideologis.

Adapun yang mendorong Muhammadiyah berdiri ada beberapa sebab antara lain :

- a. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al Qur'an dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah dan khurafat. Akibatnya umat Islam tidak merupakan suatu golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi.
- b. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat.
- c. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan jaman.
- d. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaqlid buta serta berfikir secara dogmatis. Kebudayaan umat

Islam boleh dikatakan masih dihinggap konservatisme, formalisme dan tradisionalisme.

- e. Karena keinsafan akan bahaya yang mengancam kehidupan agama Islam, akibat usaha missi dan zending Keristen yang giat pengaruhnya di kalangan rakyat Indonesia.
- f. Adanya tantangan dan sikap acuh tak acuh (*onverschilling*) atau rasa kebencian di kalangan intellegensia kita terhadap agama Islam, yang up to date lagi.
- g. Ingin membentuk suatu masyarakat, di mana di dalamnya benar-benar berlaku segala ajaran dan hukum-hukum Islam.

Pendek kata kelahiran Muhammadiyah disebabkan faktor-faktor intern dan extern.

Ketika Muhammadiyah belum diperkenankan membuka cabang dan rantingnya di luar daerah Yogyakarta, kepada masyarakat yang berada di luar Yogyakarta dianjurkan untuk mendirikan perkumpulan Muhammadiyah dengan nama lain. Sesuai dengan anjuran itu di Pekalongan berdiri Nurul Islam, di Makasar Almunir, di Garut Alhidayah. Sedangkan di Sala berdiri perkumpulan "Sidik Amanat Tabligh Fathonah" (S.A.T.F.) yang hampir bersamaan waktunya dengan berdirinya Muhammadiyah di Yogyakarta. Sidik Amanat Tabligh Fathonah merupakan cabang Muhammadiyah di Sala pada waktu itu. Bahkan di dalam kota Yogyakarta sendiri K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan-perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam menurut kemampuannya, dengan nama masing-masing yang mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, seperti: Ikhwatul-Muslimin, Taq wimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Khayatul-Qulub, Priya-Utama, Dewan Islam, Thaharatul-Qulub, Thaharutul-Aba, Ta' awana alal birri Ta'rifu bima kana, Wal-Fajri, Wal-Asri, Jamiyatul Ummahat, Jamiatul Muslimin, Syarihatal Mabtabi dan lain-lain, yang akhirnya banyak yang bergabung menjadi Grup (Ranting) atau dijadikan nama Bahagian atau urusan dalam Muhammadiyah.

Karena banyak daerah di luar Yogyakarta yang ingin membuka cabang Muhammadiyah di daerahnya. Maka K.H. Ahmad Dahlan

mengajukan permohonan izin, untuk berdirinya Muhammadiyah di luar daerah Yogyakarta, yang dikabulkan dengan besluit dari Pemerintah Hindia Belanda No. 40 tanggal. 16 Agustus 1920.¹¹⁾

Kemudian pada tanggal 7 Mei 1921 K.H. Ahmad Dahlan mengusulkan permohonan izin lagi untuk kesempurnaan maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah serta ketegasan berdirinya Cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia (dulu Ned Indie). Usul ini disetujui oleh Gubernemen dengan Besluit no. 3 tanggal 2 September 1921.

Dengan lahirnya Muhammadiyah tercatatlah dalam sejarah bahwa gerakan ini adalah merupakan pelopor kebangunan Islam Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari segi nasional, maka Muhammadiyah pun terhitung pelopor kebangunan nasional pula.

Sudah jelas bahwa Muhammadiyah berakar pada masyarakat dari lapisan bawah sampai lapisan atas yang berada di seluruh pelosok tanah air di kota maupun di desa. Cara mengikis penjajahan Belanda dilakukan dengan meningkatkan kecerdasan dan kesadaran rakyat melalui segala macam usaha. Muhammadiyah tidak hanya dikenal di Indonesia saja, akan tetapi juga di luar Negeri. Banyak para sarjana maupun orientalis yang tertarik kepada Muhammadiyah, dan tidak sedikit pula di antara mereka yang sengaja mempelajari gerakan Muhammadiyah secara mendalam.

6.2.3 Gerakan Taman Siswa.

Pada tanggal 3 Juli 1922, berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta. Saat itu adalah saat besarnya hasrat orang (Indonesia) akan pengajaran, sedangkan Departemen Pangajaran (Pemerintah Hindia Belanda M.T.), tidak mampu/mau memenuhinya. Tak terbilang banyaknya anak yang minta masuk sekolah terpaksa kecewa, tidak bisa diterima. Tak ada tempat bagi mereka.

Terutama terhadap pengajaran barat (Belanda) sangat besar hasrat orang. Banyak orang yang ingin belajar bahasa Belanda dengan tujuan untuk mendapat jabatan yang baik, dan gaji yang baik. Sedang usaha meningkatkan kebudayaan bangsa belum terpikirkan.

Kaum menengah, priyayi-priyayi Jawa, yang anaknya tidak berhak memasuki sekolah-sekolah barat, banyak yang memasukkan anaknya ke sekolah swasta yang mengajarkan bahasa Belanda. Di mana-mana berdiri “sekolah swasta” sebagai “perusahaan sekolah” dari guru-guru pensiunan yang memberi pelajaran privat, dengan tarif bayaran sekolah yang tinggi. Mulailah timbul keberanian beberapa orang Indonesia, untuk mendirikan sekolah-sekolah sendiri, tanpa subsidi Pemerintah. Memang tidak mudah waktu itu orang mendirikan sekolah yang bisa mendapat subsidi, karena untuk itu tidak tercantum dalam anggaran, belanja Pemerintah (Hindia Belanda, M.T). Jumlah “Sekolah-sekolah barat” swasta, yang diusahakan oleh orang Indonesia makin banyak.

Datanglah jaman kesadaran Nasional. Di mana-mana, di seluruh dunia, orang menjadi sadar bahwa tugas pendidikan dan pengajaran adalah untuk memasakkan jiwa dan menyiapkan anak-anak buat masyarakat nasionalnya sendiri. Semboyan mereka ialah “Kembali kepada yang nasional”. Ini tidak berarti bahwa kita harus melempar pengetahuan dan metode barat. Kita mempergunakan pengetahuan dan teknik barat untuk membina, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Itulah pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pendiri-pendiri Taman Siswa, untuk mendirikan “Lembaga pengajaran nasional” di Yogyakarta. Itulah antara lain isi tulisan Ki Hajar Dewantara dalam “Een en ander over Nasionale Opvoeding” (Pendidikan Nasional) Brochuren serie Wasita” 1938 yang dikutip Moch Tauchid dalam bukunya Ki Hajar Dewantara Pahlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional halaman 25--26)

Pilihan Ki Hajar Dewantara untuk mengambil perjuangan dalam lapangan pendidikan didorong oleh hasrat ingin turut bertanggung-jawab atas nasib bangsa serta kemanusiaan umumnya berdasarkan faktor-faktor obyektif yang ada dan terjadi dalam masyarakat kolonial, serta faktor-faktor subyektif yaitu hasrat dan tekad bangsa Indoneia, untuk terus berjuang mencapai kemerdekaan.

Analisisnya menghasilkan kebulatan tekad, bahwa usaha mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, tidaklah cukup hanya dicapai dengan

pergerakan politik, tetapi menyiapkan tenaga-tenaga perjuangan kemerdekaan harus juga dikerjakan dan diutamakan sesuai dengan dasar-dasar dan maksudnya. Maka pendidikan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa harus berlandaskan semangat dan jiwa nasional, jiwa merdeka dan kerakyatan, untuk menghadapi kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita kemerdekaan menurut Taman Siswa, untuk mencapai manusia merdeka lahir batin, hidup, aman dan bahagia, untuk membangun masyarakat tertib damai.

Dalam keseluruhan perjuangan rakyat Indonesia, Taman Siswa merupakan "Badan Perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat."

Sebelum Taman Siswa sudah ada pula usaha beberapa orang Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai sarana perjuangan. Gagasan untuk memajukan bangsa dengan pengajaran memang sudah ada, seperti yang diinginkan oleh Dokter Wahidin Sudiro Husodo.

Konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional sebagai hasil kupasan keadaan masyarakat dan politik, kritiknya terhadap pendidikan barat yang kolonialistis dan intelektualistis, disertai dengan peletakan asas dasar, sistem serta gigihnya pembelaan kemerdekaan dalam pelaksanaan sistem itu, tidak mau menerima campur tangan Pemerintah Hindia Belanda, dengan penolakannya kepada subsidi Pemerintah yang akan mengganggu pelaksanaan dasar kemerdekaannya, dengan hak berdiri sendiri dengan sistem bertanggung jawab sendiri serta dengan metodik dan didaktik pendidikan, yang tidak hanya konsepsi, tetapi melaksanakan, memimpin dan memelihara dengan segala akibat yang bagaimanapun beratnya bagi dirinya, itulah yang menetapkan Ki Hajar Dewantara sebagai Pelopor Pendidikan Nasional.¹²⁾

Kenasionalan Taman Siswa terbukti tidak hanya dengan nama akan tetapi menurut makna, maksud dan kenyataan pelaksanaannya. Dengan tiada menolak yang asing, yang berguna dan menambah kekayaan jiwa bangsanya, didasarkannya semua usahanya atas dasar dan kepentingan bangsa dan rakyat.

Azas kemerdekaannya dilaksanakan dengan menolak segala ikatan. Menolak segala bantuan, dari manapun datangnya yang akan mengikat kemerdekaan hidupnya. Kemiskinan sebagai akibat hidup berdiri sendiri, hidup hemat dan sederhana, diterimanya sebagai konsekwensi orang yang ingin merdeka, tidak mau diikat.

Cita-citanya mewujudkan masyarakat aman dan bahagia tertib damai, diwujudkan dalam pembentukan hidup kekeluargaannya.

Dasar kerakyatannya diwujudkan dengan asas kekeluargaan yang tidak mengenal perbedaan sosial di antara keluarga Taman Siswa. Demokrasi politiknya diwujudkan dalam sistem organisasinya, di mana tidak ada perbedaan antara sesama anggota dalam hak mengatur rumah tangganya. Demokrasi sosialnya diwujudkan dalam kekeluargaan, dengan tak membedakan derajat sosial antara satu anggota dengan lainnya, dengan melenyapkan segala derajat susunan dan gelarnya. Demokrasi ekonomi diwujudkan dengan dasar pembagian rejeki dalam hidup kekeluargaan, dengan tak dikenalnya hubungan buruh dan majikan.

Kepeloporan Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam pendidikan nasional, tidak hanya dalam konsepsi itu, bagaimanapun besarnya rintangan dan halangan, dan bagaimanapun besarnya korban yang harus diberikan untuk melaksanakan. Dalam hal konsepsi, Ki Hajar banyak berguru dari pengalaman-pengalaman Montessori, Frobel, Togore, Dalton, pondok Pesantren, dan asrama-asrama di jaman kuno, yang semua dimasak, dengan teori "nasi goreng"-nya, yang dengan memakai bahan-bahan sendiri, ditambah dengan mentega dari Belanda, dimasak hingga menjadi makanan orang Indonesia yang lezat dan bermanfaat.¹³⁾

Semua itu dapat diteliti dari sejarahnya, dilihat dalam ketentuan dasar-dasarnya yang tertulis sejak dulu sampai sekarang dan dapat dilihat dari pelaksanaan dan tindakan-tindakannya.

Sistem pendidikan Taman Siswa besar pengaruhnya dalam perjuangan nasional. Ini dapat dibuktikan :

- a. Berkembangnya Taman Siswa meskipun mendapat rintangan hebat dari pemerintah kolonial di waktu itu;

- b. Pendidikan Taman Siswa mempengaruhi juga masyarakat dan organisasi-organisasi rakyat dalam perjuangan nasional waktu itu;
- c. Banyaknya pejuang-pejuang nasional yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh Taman Siswa dalam perjuangan kemerdekaan.

Dalam perjuangan itu tokoh pribadi Ki Hajar Dewantara merupakan pusat, lebih-lebih waktu menghadapi Ordonansi Sekolah Liar di tahun 1931. Bukti nyata bahwa perjuangan menghadapi ordonansi itu adalah perjuangan nasional ialah bahwa seluruh pergerakan nasional, politik, agama, maupun sosial, serentak berdiri di sekeliling Saudara Ki Hajar Dewantara. Demikian pernyataan Prof.Dr. Sarjito Rektor Universitas Gajah Mada atas nama Universitas Gajah Mada.¹⁴⁾

6.2.4 Timbulnya Kepanduan di Yogyakarta.

Hampir bersamaan waktunya, pada permulaan tahun 1922 di Yogyakarta dibentuk: Nasionale Padvinderij di bawah pimpinan Daslan Adiarsita Wiro Tamtomo dengan promotornya A Zakarsi; Hisbul Wathan diasuh oleh Yumaeni, Hisbul Anzar dengan Muslimin almarhum sebagai pemukanya dan Sarekat Pemuda di bawah komando Suyar. Di Yogyakarta terdapat juga Cabang De Nederlands Indische Padvindes Vereniging yang pusatnya berada di Betawi (Jakarta).

Perkembangannya.

Sesudah perkumpulan pelajar yang hampir semuanya berpusat di Jakarta seperti Yong Yava, Yong Indonesia, Yong Islamictenbond, membentuk bagian kepanduan sendiri-sendiri, di tempat-tempat di mana ada cabang-cabangnya, berdiri pula cabang-cabang dari kepanduan itu. Demikian pula di Yogyakarta yang tidak mau ketinggalan. Sampai akhir tahun 1929 di Yogyakarta terdapat kepanduan-kepanduan :

- 1 . Nasionale Padvinderij (akhirnya meluluhkan diri ke dalam NIPV).
2. Sarekat Islam Afd-Padvindrij (penjelmaan dari Wiro Tamtomo).
3. Hisbul Wathan.
4. Indonesisch Padvindere Organisatie (peleburan dari YIPO dan NPO).

5. Pandu Kebangsaan (gantinya YYP).
6. National Islameesische Padvinderij (Natipij).
7. Al Kasyaaf.
8. Tri Darma (dari golongan Protestan)
9. Kepanduan Anak Katholik Indonesia (KAKI).
10. NIPV.

Kepanduan Sarekat Pemuda Hisbul Ansor terpaksa bubar karena selalu mendapat rintangan dari pihak yang berwajib. Dengan berdirinya KBI dalam tahun 1930 di Jakarta Cabang INPO dan PK menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) Cabang Yogyakarta.

Dari sekian banyak perkumpulan kepanduan Indonesia yang ada di Yogyakarta dapat kita bagi menjadi tiga golongan menurut asasnya yaitu : keagamaan, kebangsaan, dan yang bekerja sama dengan kepanduan Belanda.

Di kalangan pelajar puteri yang ikut dalam perkumpulan banyak juga yang terjun dalam kepanduan. Bahkan tidak hanya terbatas pada pelajarannya, beberapa orang guru puteri ikut aktif memimpin. Di Yogyakarta yang terkenal sebagai pelopor pandu puteri antara lain Siti Rakhmah, Hafnizarah, Ismudiati, Mugarumah (alm) dan juga Bu Ruswo. Beliau berkecimpung dalam kalangan KBI.

Suatu keuntungan bagi kemajuannya pergerakan pemuda di Yogyakarta termasuk kependuannya, bahwa di sini banyak berdiam para pemimpin rakyat seperti : Mr. Suyudi, Ki Hajar Dewantara, Rujito, B.P. Suryodiningrat, Gondoatmojo, Dr. Sukirnan, Cokroadikusumo dan masih banyak lagi.

Mereka inilah yang menjadi pendukung dan pendorong, sumber segala kekuatan lahir dan batin bagi hidupnya pergerakan pemuda di Yogyakarta umumnya.

Cita-cita Indonesia bersatu, yang dilahirkan di Medan Kerapan Besar Pemuda di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928 dengan pernyataan Satu Bangsa, Satu Bahasa, dan Satu Tanah Air Indonesia disambut oleh kepanduan-kepanduan di Yogyakarta dengan mendirikan Badan Persaudaraan Kepanduan Mataram (BPKM). Pada tahun 1930 BPKM berganti nama PAPIM (Persaudaraan Antara Pandu Indonesia Mataram).

Pada zaman penjajahan tidak hanya organisasi politik yang dibatasi gerakannya melainkan juga kependuan. Larangan yang sangat berat dirasakan di kalangan kependuan, umpamanya tidak boleh mengadakan api unggun, dilarang berbaris; pada waktu latihan tidak boleh mengibarkan bendera Sang Merah Putih, tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilarang berziarah ke makam-makam pahlawan dan lain-lain sebagainya. Pendek kata segala tindakan dan ucapan yang meresapkan dan menebalkan perasaan kebangsaan dikenakan larangan. Mamang dari pihak pemerintah kolonial ada tendens akan mengadakan kependuan-kependuan yang berazas kebangsaan. Ini semua dialami oleh kependuan-kependuan di Yogyakarta.

Dengan adanya larangan-larangan itu kependuan tidak makin mundur melainkan semakin berani. Hubungan antara para pemimpin di Yogyakarta dengan yang ada di Jakarta makin bertambah erat. Demikian pula kerjasama antara perkumpulan kependuan di daerah bertambah rapat bahkan anggotanya makin bertambah besar jumlahnya. Dalam menggalang kesatuan dan persatuan menghadapi kekejaman penjajah Belanda, maka pemuda-pemuda di Yogyakarta telah tampil ke depan dan bergabung dalam perkumpulan kependuan.

Putusan-putusan yang disepakati bersama belum lagi dapat dikerjakan, karena pecahnya perang Asia Timur Raya, yang mengakibatkan perubahan-perubahan keadaan di seluruh tanah air kita.

6. 3 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat.

6.3.1 Pengaruh Kekuatan Eropa.

Sejak tahun 1905 pemerintah Belanda memperkenalkan imperialisme internasional kepada rakyat Indonesia, karena sejak tahun itu pemerintah Belanda mengizinkan penanaman modal kapitalis-kapitalis dari pelbagai negara seperti Jerman, Perancis, Belgia, Italia, Inggris, Amerika, Jepang dan lain-lain di Indonesia. Pemerintah Belanda menjalankan politik "pintu terbuka" untuk penanaman modal asing di wilayah jajahan Indonesia, yang disebut dengan istilah Belanda "opendeur politiek" Sejak itu Indonesia, termasuk Daerah

Yogyakarta tidak lagi merupakan monopoli tempat penanaman modal swasta Belanda, melainkan sudah menjadi wilayah internasional untuk penanaman modal. Kaum kapitalis dari berbagai negara beramai-ramai menanamkan modalnya di Indonesia. Pengedukaan kekayaan Indonesia oleh orang asing makin intensif, sampai di lereng-lereng gunung dibuka perkebunan. Dengan terbukanya penanaman modal, maka bermacam-macam perkebunan dapat diselenggarakan baik di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luarnya, di antaranya : kopi, teh, kelapa, tebu, tembakau, ketela, kapuk dan lain-lain. Pada tahun 1931 luas perkebunan di Jawa dan Madura 6999.905 hektar, di luar Jawa 548.108 hektar. Ini semuanya adalah milik asing, dalam bidang pertanian. Belum lagi dalam bidang-bidang yang lain seperti perusahaan pengangkutan, pertambangan dan lain-lain.

Pengawasan kerja dilakukan lebih cermat lagi dari waktu-waktu yang sudah, karena perusahaan swasta mengharapkan untung lebih besar. Banyak pegawai Belanda ditempatkan di kota-kota kecil dan di desa-desa untuk mengawasi jalannya perusahaan. Karena adanya perkebunan, irigasi perlu dikerjakan dan jaringan jalan diusahakan. Sekolah pun didirikan demi kepentingan perusahaan, yang memerlukan tenaga-tenaga bumiputera yang sanggup mengabdikan dirinya kepada kepentingan perusahaan.

Perkebunan memerlukan tenaga-tenaga bumiputera, yang dapat menggunakan bahasa Belanda. Perkebunan juga membuka klinik untuk menjaga kesehatan para pekerjanya. Semua itu dilaksanakan demi kepentingan perkebunan, bukan untuk kepentingan rakyat desa, meskipun rakyat desa dapat juga mengambil keuntungan dari hal-hal tersebut. Irigasi yang pada hakekatnya dikerjakan demi kepentingan perkebunan, dimanfaatkan juga oleh rakyat desa untuk kepentingan ladang dan sawahnya. Tidak ada larangan untuk menggunakan jalan yang diusahakan oleh perkebunan. Semuanya itu bersifat menumpang, karena pembuatan jalan dan irigasi itu tidak diperuntukkan bagi mereka. Akibat penggunaan irigasi itu pertanian rakyat menjadi lebih baik. Namun tidak boleh mupakan bahwa peningkatan pertanian rakyat itu dapat menjadi saingan perkebunan. Hal itu pasti tidak menyenangkan kaum pengusaha. Oleh karena itu dengan pelbagai tindakan usahawan-usahawan swasta itu berusaha menghambat

kemajuan rakyat, melalui peraturan perpajakan atau pemborongan/pembelian/penyewaan. Kaum tani kecil tidak berdaya menghadapi kaum kapitalis.

Sudah sejak jaman Majapahit di tanam keyakinan bahwa tanah adalah milik Raja. Rakyat hanya mempunyai hak pakai. Raja-raja dan pembesar daerah adalah pemilik tanah. Rakyat hanya berhak menggarapnya. Demikianlah dalam soal sewa tanah perusahaan tidak langsung berhubungan dengan rakyat penggarapnya, tetapi dengan para raja dan pembesar daerah (bupati) yang pada waktu itu sudah menjadi pangreh praja kolonial. Dengan perantaraan pangreh praja itu perusahaan berhasil menguasai sawah-sawah subur. Rakyat tidak berani membantah kemauan para pembesar. Rakyat terjepit antara kapitalis asing dan pembesar daerah. Sawah yang semestinya ditanami sayur-mayur dan padi untuk kepentingan masyarakat desa, dijadikan tanah perkebunan dengan tanaman untuk kepentingan perdagangan. Karena sawahnya telah menjadi tanah perkebunan, sedangkan pada umumnya rakyat tidak mempunyai kepandaian lain daripada menggarap sawah, maka tidak ada jalan lain bagi mereka daripada menjadi pekerja perkebunan turun-temurun. Dari petani bebas merosot menjadi buruh pabrik atau buruh perkebunan. Sebagian besar waktunya dicurahkan untuk kerja perkebunan. Hidupnya juga banyak bergantung kepada perkebunan.

Modal asing yang sudah menyusup di desa-desa pada hakekatnya membawa kemelaratan kepada rakyat desa. Demikianlah eksploitasi modal swasta terhadap bangsa Indonesia umumnya dan rakyat Yogyakarta khususnya. Pangreh praja dari raja/bupati sampai bekel-bekel di desa diperalat oleh modal kolonial.

Akibat dari pengaruh kekuatan Eropa itu masyarakat kita menjadi terbelakang karena eksploitasi pemerintah kolonial meliputi segala bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pendidikan. Adu domba dan pemecah-belah di mana-mana dilakukan oleh pihak penjajah, antara kaum bangsawan dan rakyat, antara golongan yang satu dengan lainnya, dan antara keluarga-keluarga raja sendiri agar dengan demikian mereka dapat mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian juga di lapangan budaya kaum penjajah. berusaha menanamkan nilai-nilai kebudayaannya.

6.3.2 *Pemenuhan Kebutuhan.*

Dari sudut geografis Indonesia terletak di daerah panas tropis. Tanahnya sebagian besar merupakan tanah pertanian, sehingga sebagian besar kehidupan masyarakat Yogyakarta juga bercocok tanam, tetapi sebagian tanah pertanian dipergunakan untuk perkebunan asing. Perkembangan penduduk yang terlalu cepat, menghendaki perluasan sawah. Perluasan sawah di luar desa terbentur pada tanah perkebunan. Hanya tanah tandus di bukit-bukit yang masih, karena tanah itu tidak dapat dipergunakan untuk perkebunan. Semua tanah yang menurut peraturan pemerintah sejak tahun 1870 menjadi tanah milik negara, telah disewakan kepada para pengusaha perkebunan. Keadaan yang demikian itu jelas tidak menguntungkan perkembangan masyarakat desa. Kehidupan di desa makin merosot. Rakyat desa makin terlantar.

Kerajinan tangan yang sejak nenek moyang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa di samping pertanian, terpaksa mati karena menghadapi saingan berat dari pemasukan barang industri dari Nederland. Banjir barang yang berupa hasil tehnik modern dari negeri Barat mendesak hasil kerajinan tangan di pedusunan. Untuk membuat industri, tidak ada modal. Untuk berdagang mendapat banyak kesulitan, karena di lapangan perdagangan mereka menghadapi bangsa Tionghoa dan Arab yang sengaja dilindungi oleh bangsa Belanda, sehingga tidak mungkin timbul pedagang bumiputera yang kuat. Bahkan dagang eceran pun jatuh di tangan bangsa Tionghoa. Bangsa Tionghoa terbesar sampai ke pelosok-pelosok. Perekonomian bangsa kita berada di tangan bangsa asing.

Modal asing sudah menyusup sampai ke desa-desa yang akhirnya membawa kemelaratan kepada rakyat desa. Sebagian besar dari rakyat desa karenanya terjun menjadi buruh perkebunan, hidupnya banyak bergantung kepada upah yang diterimanya. Sebagian kecil saja dari tenaganya yang digunakan untuk mengerjakan sawahnya sendiri. Hidupnya semata-mata bergantung kepada perkebunan. Yang dijadikan mandor perkebunan pada umumnya adalah pembesar desa. Dengan jalan demikian maka perabot desa itu baik di desanya maupun di perkebunan mempunyai kewibawaan terhadap rakyat desa lainnya

yang bekerja sebagai buruh harian. Pemerintah kolonial memperlakukakan para pangreh praja dan bekel-bekel untuk keuntungan modalnya. Ialah yang menentukan nasib rakyat desa. Pada umumnya rakyat desa karena kemiskinannya tunduk patuh kepada para mandor-bekel itu, taat kepada Perintahnya dan patuh kepada segala keputusan yang diambilnya.

Tidak ada pikiran dari kaum kapitalis untuk mengubah keadaan. Mendirikan industri di negara jajahan berarti mengurangi pasaran hasil industri di negara induk. Negara jajahan harus dipertahankan sebagai pasaran hasil industri dan penghasil bahan untuk kepentingan industri di negeri induk. Negara jajahan dijadikan tempat menanam modal, keuntungan diangkut ke negara induk. Tanah dan, tenaga-tenaga manusia harus dimanfaatkan demi kepentingan modal. Mulai dari Bekel, Wedana dan para Bupati pada waktu tanam paksa menjadi alat pemerintah untuk mentrapkan tanam paksa, yang kemudian dilanjutkan dengan sistem perkebunan swasta modal kolonial. Pada hakekatnya, Kuwu, Demang dan Bekel adalah pelaksana langsung pengetrapan kedua sistem tersebut. Mereka itulah yang diserahi tugas mengerahkan tenaga kerja. Tenaga Belanda yang serahi pengawasan, mengadakan kontrol terhadap pekerjaan mereka. Rakyat tidak berani melawan pemerintah kolonial, karena rakyat materiil sangat lemah.

Rakyat yang diperas tenaganya, akibat tidak adanya pendidikan, tidak mempunyai kemungkinan lain daripada tetap bekerja dalam perkebunan. Anak rakyat yang tidak mendapat pendidikan, terpaksa mengikuti orang tuanya sebagai kuli dalam perkebunan. Demikianlah ditinjau dari sudut materi kehidupan rakyat desa merosot, ditinjau dari segi mental mereka bodoh. Masa depan anak rakyat gelap. Rakyat yang materiil dan spiritual lemah tidak mempunyai kemauan apa-apa segala perintah atasan baik yang disetujui maupun yang tidak, terpaksa dijalankan. Semua undang-undang dan peraturan pemerintah baik yang disetujui maupun yang tidak, ditaati sungguh-sungguh. Peraturan yang tidak disukai, hanya dilawan secara diam-diam, dilakukan dengan hati yang berat. Namun menentang secara terang-terangan tidak berani. Hanya secara bisik-bisik dikemukakan kepada kawan karib dalam pertemuan yang sangat terbatas. Orang takut kalau keluhannya terdengar oleh atasan. Oleh karena kehidupan rakyat diliputi ketakutan,

maka rakyat menjadi pendiam. Segala perintah atasan disambut dan dilaksanakan.

Pamong desa telah meninggalkan tugasnya sebagai pemimpin rakyat yang berkewajiban memajukan dan membina ekonomi desa, tetapi malah turut menghisap rakyat desa yang sudah sangat miskin. Rakyat takut membantah atau melawan, karena takut kehilangan tempat tinggal. Rakyat tidak boleh membangun rumah yang lebih baik daripada rumah pangreh desa. Untuk memperoleh simpati pangreh desa, rakyat yang sudah sangat miskin itu masih harus memberikan sesuatu, yang kiranya dapat menyenangkan hati pangreh desa yang bersangkutan.

Penghidupan sebagian besar rakyat sebagai buruh pada pelbagai macam perusahaan asing. Rakyat desa yang tinggal di desanya sebagai petani, menjadi petani kecil. Jika menjadi pegawai pemerintah, biasanya juga menjadi pegawai kecil, yang gajinya terlalu kecil apabila dibandingkan dengan gaji orang Belanda yang sama pendidikannya. Menurut perwtungan Dr. Huender yang dikutip oleh Ir. Sukarno rata-rata penghidupan petani seharinya per orang 8 sen. Satu keluarga yang terdiri dari ibu, bapa dan tiga anak, biaya penghidupan yang dipungut dari hasil kerjanya di sawah, untuk segala-galanya tidak lebih daripada 40 sen sehari.

Suatu daerah Kabupaten di Yogyakarta ialah Daerah Kulon Progo mengandung bahan tambang penting yaitu mangaan. Mangaan merupakan bahan penting, bukan saja bahan penting untuk keperluan nasional, tetapi juga penting bagi kebutuhan internasional. Karena itu banyak pengusaha yang ingin menguasai pertambangan tersebut, dengan maksud dapat memperdagangkan bahan itu guna mengambil keuntungan yang besar. Memang di daerah Kulon Progo banyak lapisan-lapisan tanah yang mengandung biji mangaan.

Pertambangan di daerah Kliripan ini dibuka sejak jaman penjajahan Belanda oleh NVAIME. Kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah pendudukan Jepang dan akhirnya sekarang ini (jaman kemerdekaan) timbul banyak pengusaha yang mengerjakan secara belum teratur, baik mengenai soal-soal perijinan maupun tehnik penggaliannya, bahkan boleh dikata sebagian besar dari cara-cara eksploitasi masih bersifat liar.

Melihat keadaan yang demikian itu Pemerintah Daerah pada saat ini mulai memusatkan perhatiannya, hingga diharapkan pertambangan mangaan dapat diusahakan secara teratur sesuai dengan peraturan yang masih ada dan syah. Dengan demikian akan dapat dikurangi korban-korban kecelakaan akibat kurangnya alat-alat penggalian. Juga segi sosial ekonomi dapat terjamin, dan selanjutnya pemerintah dapat mengontrol dan memudahkan pemungutan pajak dan sebagainya. Keteraturan dari semua segi maka keuntungan dapat dirasakan baik secara langsung oleh rakyat pekerja. Demikian pula income daerah pun akan bertambah baik.

Penghidupan rakyat Kulon Progo meliputi : a. bertani, b. berdagang, c. deres kelapa, d. buruh, e. pegawai kecil, f. mencari ikan laut, g. membuat garam tamper di pantai selatan, h. menggali mangaan. Sebagian daerah Kulon Progo baik untuk penanaman panili kapulogo, cengkeh, lada dan kopi. Hasil perkebunan ini merupakan barang dagangan yang bernilai. Daerah-daerah yang cocok iklimnya untuk jenis tanaman ini adalah daerah Kapanewon Sarnigaluh, Kenteng Kalibawang dan Kokap.

Kecuali mangaan, maka kekayaan alam yang terkandung dipegungan-pegunungan Kulon Progo itu ialah : a. uranium, b. volksaarde, c. batu jamping d. bahan cat dan sebagainya.

Menurut penyelidikan ahli ada sebagian daerah yang diduga mengandung bahan mas/intan. Adapun daerah-daerah yang mengandung bahan tersebut di atas meliputi 6 Kapanewon ialah : 1. Kokap, 2. Pengasih, 3. Sentolo, 4. Nanggulan, 5. Kalibawang, 6. Samigaluh.

Di daerah Penggung Kliripan yang terletak di Kapanewon Kokap pada tahun 1912 juga telah dibuka sebuah tambang mangaan oleh perseorangan bernama Ir. Van Delsen. Usahanya telah mendapat ijin dari Kasultanan yang diberikan oleh Sri Sultan Yogya dengan akte tertanggal 30 Mei 1893 yang disetujui oleh pemerintah Belanda dengan Gouvemements-besluit 12 September 1893 No.26. Pertambangan mangaan ini dikenal dengan Konsesi Panggung-Kliripan, yang mengetakan sebuah areal seluas ± 3600 ha, meskipun daerah Kulon Progo itu yang mengandung mangaan luasnya

± 214156 ha. Oleh karena Van Delsen meninggal dunia pada tahun 1918, maka eksploitasi tambang mangaan ini dilanjutkan oleh sebuah badan yang bernama NVAIME pada tahun itu juga, yang direksinya terdiri dari Krainers Cs dari Banka Tiwiniring. Di antara anggota direksi terdapat Ir. Fermin. Mulai saat itu Kliripan dikerjakan dan pengambilan ditujukan pada mangaan di desa Krengseng yang dieksploiter s/d tahun 1928 secara besar-besaran.¹⁵⁾

Kemudian eksploitasi dilanjutkan di Penggung, Kembang dan Sumpel, di mana terdapat mangaan yang mutunya lebih tinggi. Mengenai mutu mangaan perlu diadakan perincian sebagai berikut :

1. Kliripan/Krengseng nino 40--45 %
2. Sumpel/Kembang nino 80--92 %

Sementara daerah yang hanya mengandung 40%--50% dibekukan eksploitasinya, karena mangaannya dalam perdagangan kurang laku. Sedangkan yang berasal dari Kembang/Sumpel yang bermutu 80% -- 90% dieksploiter secara besar-besaran dan dengan alat-alat yang agak sempurna sampai pada tahun 1934.

Pada tahun 1934 AIME berhenti usahanya, dan dalam tahun 1935 tambang dikerjakan oleh seorang yang bernama Yong Yan Pin secara borongan. Hasil produksi memuaskan juga. Kemudian AIME bekerja kembali kira-kira tahun 1938--1939 Penggung-Kliripan mulai ramai dikerjakan lagi sekalipun dengan alat-alat yang tidak begitu sempurna (tidak secara maksimal). Meskipun demikian hasilnya banyak juga. Tetapi baru saja usaha ini berjalan beberapa waktu, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang.

Mulai AIME berdiri sampai dengan penutupannya telah dapat dihasilkan beribu-ribu ton mangaan, yang langsung dikirim ke negara-negara leropa, hanya sebagian kecil saja digunakan dalam negeri. Selama itu jumlah tenaga buruh yang dikerahkan ada sebanyak 6000 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan sebagian besar buruh ini berasal dari penduduk desa setempat. Hanya sebagian kecil berasal dari luar daerah Kulon Progo. *Standard* upah buruh yang digunakan oleh AIME lebih tinggi kalau dibandingkan dengan upah buruh di luar pertambangan.

Setelah Indoneka Merdeka maka pertambangan mangaan konsesi Penggung-Kliripan ini tidak lagi diusahakan oleh modal asing, tetapi dikuasai oleh Pemerintah RI. Selanjutnya oleh Pemerintah dikuasakan pada BETN (Badan Eksploitasi Tambang Negara) yang pada waktu itu dipimpin oleh Sdr. Subardi (bekas pegawai AIME).

Ditinjau dari sejarah berdirinya secara melihat perkembangannya maka dapatlah diambil suatu kesimpulan.

1. Mangaan adalah, sejenis bahan galian yang penting, baik untuk pemakaian dalam negeri maupun ekspor. Di antara sekian banyak barang-barang produksi yang dibuat dari mangaan ialah : batery lampu, pensil, mangaan, semen dan lain-lain.
2. Daerah Kulon Progo yang mengandung biji-biji mangaan merupakan gudang kekayaan yang terpendam bagi daerah Yogyakarta.
3. Jika cara-cara eksploitasi mangaan dapat diatur baik, maka ada harapan besar bahwa daerah Kulon Progo yang terkenal sebagai daerah minus itu akan menghadapi masa depan yang baik :
 - a. Daerah itu sebagai daerah otonom akan dapat membeayai urusan rumah tangganya sendiri.
 - b. Masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kepadatan penduduk, pengangguran, penempatan tenaga, kekurangan tanah untuk pertanian. akan dapat berangsur-angsur diselesaikan sehingga persentase pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin.

Pertambangan mangaan ini mempunyai pengaruh bagi penghidupan dan kehidupan rakyat di daerah-daerah yang diambil mangaannya. Bagi segi ekonomi sosial memberi pertolongan bagi rakyat sekitarnya, sekalipun belum mencapai taraf yang boleh dikatakan baik, sebab paling sedikit mengurangi pengangguran. Dengan kurangnya pengangguran suatu daerah berarti juga mengurangi beban pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya.

6.3.3 *Keadaan Masyarakat serta Partisipasinya kepada Pergerakan Kebangsaan.*

Partisipasi masyarakat di Kasultanan Yogya dan Kasultanan Sala, terutama yang belum mendapat pengaruh banyak dari aliran-aliran modern akan kita ketahui, bahwa dalam soal pemerintahan orang-orang masih hidup dalam suasana dan jaman lain daripada suasana jaman kita sekarang ini. Apa yang bagi kita telah jadi sejarah, sudah ada di belakang kita, bagi mereka masih merupakan kenyataan di dalam kehidupan masyarakat dan di dalam pemerintahan, masih merupakan rangkaian kesatuan dengan jaman sekarang. Sejarah bangsa kita tidak banyak diajarkan baik kepada kita maupun kepada anak-anak di sekolah angka dua, berapa jauh pengetahuan kita tentang nenek moyang kita, jika dibandingkan dengan pengetahuan para raja dan bangsawan tentang hal itu. Di kesultanan dan kesultanan orang tahu, bagaimana keadaan pulau Jawa pada jaman dahulu, orang tahu bahwa Jawa ditakuti oleh negara-negara asing, tetapi orang pun tahu betapa berat penderitaan yang menimpa bangsa Jawa. Diketahuinya juga, bahwa para raja yang kekuasaannya dan pengaruhnya makin tertekan, diejek dan dihina oleh bangsa Belanda. Oleh karena itu cinta kepada tanah air "adalah" cinta kepada bangsa dan pulau Jawa, "cinta kepada tumpah darah sungguh-sungguh mendalam. Memang jaman dahulu ada hubungan antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, tetapi Jawa tidak masuk di dalam kerajaan besar itu, bagi mereka kerajaan besar adalah Jawa, pulau-pulau lainnya di seberang lautan diperintah oleh Jawa. Kebangsaan Jawa atau nasionalisme Jawa adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan Jawa, jadi juga keinginan menghancurkan pemerintahan asing. Itulah makna kebangsaan Jawa atau nasionalisme Jawa yang sebenarnya.

Nasionalisme, yang demikian itu masih berkobar dalam tiap dada para bangsawan dan rakyat Jawa. Setiap saat mereka masih mengharapkan timbulnya Ratu Adil Herucokro yang menurut ramalan Jayabaya akan melepaskan Pulau Jawa. Harapan kepada kebebasan membuktikan bahwa orang tidak suka dijajah. Istilah sebabnya maka ramalan Jayabaya masih selalu disiarkan dari mulut ke mulut. Di dalam pertemuan dibicarakan, buku-buku sejarah tentang kebesaran raja dari jaman yang sudah silam untuk mengingatkan bahwa anak

cucu masih mempunyai tugas yang belum dipenuhi, yakni mengembalikan kebesaran kerajaan nenek moyang. Itulah didikan yang dapat memberikan watak kepahlawanan dan dapat menaburkan benih cinta kepada tanah air, yang sedang dirundung duka nestapa. Pada jaman itu pendidikan yang demikian memang perlu, karena di ruang sekolah pendidikan yang demikian tidak diberikan. Para pelajar dihindarkan sejauh-jauhnya dari pengetahuan sejarah nenek moyangnya. Apa yang disebut "Vanderlandse Geschiedenis" (Sejarah Tanah Air) adalah sejarah bangsa Belanda di negaranya. Orang-orang Indonesia tidak mengenal sejarah bangsanya, oleh karena itu orang-orang Indonesia adalah orang asli, tetapi asing di negaranya sendiri.

Pada awal abad dua puluh makna kebangsaan itu masih gelap. Rakyat berfikir tidak lebih jauh daripada batas sawahnya yang biasanya terbentang di sekitar desanya saja. Yang diketahuinya hanya orang-orang di sekitar desanya saja. Yang diketahui hanya orang-orang dalam keluarganya sampai tingkat misan atau mindo dan tetangganya. Di luar misan dan mindo sudah dipandang orang lain, karena menurut anggapan hubungan kekeluargaan itu sudah jauh. Dalam lapangan kesejahteraan, rakyat hanya berfikir sampai kepada kesuburan tanamannya sendiri, bagaimana caranya memperoleh hasil panen yang lebih banyak. Pikirannya hanya sampai di pasar tempat petani menjual hasil buminya dan membeli keperluan hidupnya. Ringkasnya petani hanya tahu tentang keadaan di sekitar rumah dan ladangnya. Paling jauh ia mengetahui bahwa beberapa puluh kilo meter dari tempat kediamannya ada kota. Kota menurut mereka tempat diam para pembesar, tetapi jumlah petani yang pernah mengunjungi kota, kecil sekali. Semua yang ada di luar Jawa disebutnya tanah seberang. Di mana letaknya tidak diketahui. Soal kebangsaan belum pernah masuk dalam otaknya.

Soal kebangsaan adalah soal kaum terpelajar, yang pada waktu itu masih sangat sedikit. Orang yang dapat membaca dan menulis 1 1/2%. Soal kebangsaan adalah soal segelintir manusia terpelajar saja. Bahkan karena itulah maka soal kebangsaan pada waktu itu perlu dibangkitkan terutama pada hati kaum terpelajar, yang belum menyadarinya. Untuk sampai kepada rakyat, rakyat harus dibebaskan dahulu dari buta huruf dan kepicikan berfikir. Itulah yang mendorong

Sutomo dan kawan-kawannya untuk mendirikan perkumpulan Budi Utomo. Perkumpulan telah terbentuk di antara empat dinding. Rakyat yang menjadi sasarannya, belum mengetahuinya. Memang mereka tidak perlu tergopoh-gopoh diberi tahu.

Kehidupan dalam masyarakat belum tampak. Tetapi berdirinya Budi Utomo telah menggoncangkan hati para pendukungnya. Sutomo dan kawan-kawannya, setelah perkumpulan itu berhasil dibentuk segera masuk keluar kampung mengadakan propaganda tentang cita-citanya kepada para pedagang kecil, pegawai rendahan dan orang-orang partikelir yang agak mampu. Propaganda itu mendapat sambutan meriah. Kebanyakan di antara mereka yang mendengar propaganda itu, bersedia memberi bantuan sekuat tenaganya. Para pelajar, Yogyakarta setelah mendengar kabar baik ini, segera mendirikan cabang Budi Utomo di tempatnya masing-masing tanpa memberi tahu para pendirinya.

Gerakan Taman Siswa pun yang terang-terangan melawan penjajahan Belanda didukung oleh rakyat Yogyakarta khususnya dan bahkan bangsa Indonesia umumnya. Taman Siswa mengadakan pembangkangan tidak mau mematuhi larangan pemerintah Belanda yang dikenal dengan Ordonansi sekolah liar. Bantuan dan sambutan mereka dibuktikan dengan kegiatan para guru untuk memasuki rumah-rumah perguruan masing-masing serta melakukan peketaan seperti biasa, seolah-olah tidak ada ordonansi sekolah liar. Para guru di pelbagai tempat tetap taat kepada instruksi Majelis Luhur. Perlawanan Taman Siswa itu mendapat sambutan baik sekali dari para pemimpin rakyat. Semua partai politik dan perkumpulan sosial bersimpati kepada Taman Siswa. Seruan Ki Hajar untuk memberikan bantuan materiil kepada para korban pembangkangan disambut baik oleh perkumpulan wanita Isteri Sadar dan PSII. Mereka semua mencap ordonansi itu sebagai penghalang usaha rakyat dalam bidang pendidikan.

Masyarakat membenarkan kebijaksanaan pemimpin Umum Taman Siswa. Dalam menghadapi ordonansi sekolah liar masyarakat telah seia-sekata. Mereka menyionkong penuh perjuangan Ki Hajar baik moril maupun materiil. Semuanya : sepakat mencap ordonansi itu sebagai penghalang kemajuan rakyat Indonesia. Bahkan pelbagai

badan pendidikan nasional bersiap mengikuti jejak Taman Siswa, di antaranya Perguruan Kebangsaan Indonesia di Jakarta. Moh Hatta mengajukan usul untuk mengkoordinir aksi pembangkangan yang sedang dilakukan. Bahkan pada saat aksi tersebut dijalankan Sukarno telah memberikan petunjuk untuk menjalankan aksi pembangkangan dengan mengambil contoh aksi seperti yang dilakukan Gandhi sebagai pemimpin pergerakan Hindustan dalam menghadapi monopoli garam. Masyarakat Timur asing Tionghoa dan Arab juga mencela ordonansi tersebut. Pers Belanda pada umumnya takut akan akibat pembangkangan itu. Oleh karena itu lalu menganjurkan kepada para pegawai untuk sekedar menunjukkan keluwesan dalam tindakan-tindakannya. Maksudnya agar aksi pembangkangan itu menjadi reda.

Sikap masyarakat yang demikian itu di luar dugaan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah cepat-cepat mengeluarkan surat edaran yang berisi, bahwa penolakan ijin bagi sekolah swasta itu hanya akan dilakukan bila jelas kalau sekolah/perguruan swasta itu akan membahayakan ketenteramn umum. Surat edaran itu sebenarnya berupa pancingan, kalau-kalau dengan demikian lembaga pendidikan Taman Siswa dan suara masyarakat menjadi agak reda. Namun surat edaran itu tidak mencapai sasarannya PPPKI mengambil keputusan untuk menjalankan massa aksi, sedangkan Parkindo siap untuk mengintensifikan perjuangan melawan imperialis. Muhammadiyah terang-terangan mencela ordonansi tersebut. Ki Hajar Dewantara makin gigih menentang pelaksanaan ordonansi. Para guru swasta siap untuk menjalankan aksi pembangkangan. Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda menjadi kalang kabut menghadapi aksi rakyat. Sebagian besar dari badan pendidikan swasta akan bersikap solider terhadap Taman Siswa. Badan-badan tersebut segan minta ijin untuk mendirikan sekolah-sekolah, meskipun para pengurusnya pun tahu pula bahwa permohonan ijin tidak akan ditolak. Bagaimana sikap pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang dibuka tanpa ijin. Apakah sekolah itu akan ditutup, guru-gurunya dikenakan pidana, dipenjarakan atau dibiarkan begitu saja? Hal-hal serupa itu membuat bingung pemerintah Hindia Belanda. Dalam menghadapi ordonansi sekolah liar ini nampak adanya kesatuan antara semua partai dan perkumpulan bumi putera, semuanya berdiri di belakang Ki Hajar Dewantoro. Di

manamana berdiri Panitia dari bermacam-macam perkumpulan baik politik maupun sosial untuk menentang ordonansi sekolah liar. Pada tanggal 5 Pebruari mengalir protes dari pelbagai pihak dengan pernyataan bahwa maksud kaum imperalis memang untuk menghambat kemajuan rakyat. Tidak lama kemudian ordonansi itu dibekukan. Delapan bulan kemudian dicabut. Dengan bangga dan puas Ki Hajar Dewantoro berkata :

"Terbuktilah dari apa yang telah kami uraikan di atas itu, bahwa bersatunya massa dengan pemimpinnya, berikhtiarnya pemimpin untuk menyerahkan putusannya kepada pihak yang dipimpin untuk menerima koreksi perlu, ditambah pula dengan taatnya segenap anggota keluarga yang semuanya menetapi disiplin dengan taat bersyarat, sungguh besar memberi kekuatan lahir batin yang luar biasa, sehingga mendatangkan kemenangan yang gilang-gemilang."¹⁵)

Peristiwa ini memang pantas dicatat dalam sejarah, bahwa pada jaman penjajahan pembangkangan terhadap peraturan pemerintah, terang-terangan melawan pemerintah yang dilakukan oleh pihak yang terjajah bebas dari pidana, bahkan malah membawa kemenangan kepada pihak yang terjajah. Pemerintah terpaksa tunduk. Ki Hajar Dewantoro menunjukkan watak kepahlawanannya.

Demikian besar partisipasi masyarakat dari segala golongan tidak hanya terbatas yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Kerjasama antara masyarakat dengan pemimpin pergerakan kebangunan demikian pula antara organisasi yang satu dengan lainnya menunjukkan suatu kesadaran dan kekompakan dalam menghadapi kekejaman serta penindasan pemerintah kolonial Belanda. Dukungan masyarakat tidak hanya ditujukan terhadap gerakan Taman Siswa tetapi juga terhadap pergerakan kebangsaan lainnya, terutama mereka yang telah terpelajar dengan mudah menanggapi dan menunjukkan partisipasinya terhadap pergerakan kebangsaan yang akan rnelepaskan bangsanya dari belenggu penjajahan.

Keadaan masyarakat umumnya pada permulaan abad dua puluh masih tampak gelap terhadap cita-cita untuk kemerdekaannya, tetapi

berkat timbulnya organisasi pergerakan baik Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah maupun atas usaha Taman Siswa setapak-demi setapak kesadaran masyarakat mulai berkembang. Timbulnya berbagai macam organisasi yang kesemuanya ingin memajukan masyarakat merupakan suatu bukti bahwa masyarakat menghendaki adanya perubahan. Kesadaran tersebut tumbuh akibat penderitaan yang dialami puluhan dan bahkan ratusan tahun, hidup dalam belenggu pemerintahan kolonial. Penderitaan yang makin berat menindih, betul-betul mulai terasa pada rakyat. Sebagian rakyat yang ingin maju tidak mendapat kesempatan memasuki bangku-bangku pendidikan. Tetapi himpitan dan tekanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kolonial tidak dapat mematikan semangat rakyat bahkan menambah gigit dan berani menghadapi segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial meskipun mereka akan menerima risikonya juga. Mereka rela masuk penjara untuk membela rakyat. Ini telah dialami oleh para pemimpin pergerakan, yang keluar masuk kamp untuk diinteren terpisah dari tengah-tengah rakyat banyak dan sanak keluarganya.

Suasana dunia yang menghendaki adanya perubahan jaman dari alam penjajahan ke jaman kemerdekaan yang sedang berkembang di Asia dan benua-benua lainnya telah menambah kuatnya semangat berjuang pada bangsa Indonesia termasuk masyarakat Yogyakarta. Semangat yang menyala itu direalisasi di Yogyakarta pada th. 1908 sebagai ajang Kongres Budi Utomo dan pada tahun 1922 konggres Kaum Ibu. Sumpah pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 telah membuka lebih luas kesadaran rakyat.

6.4 Kehidupan Seni Budaya.

6.4.1 Keadaan Seni Budaya serta Pengaruh Asing di Dalamnya.

Sejarah perkembangan kebudayaan suatu bangsa atau suku bangsa erat sekali dengan sejarah daerah di mana mereka hidup atau berada. Demikian pula kebudayaan dan kesenian yang tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kerajaan Yogyakarta lahir dari tercapainya perdamaian antara Susuhunan Paku Buwono III dan Pangeran Arya Mangkubumi yang

berlangsung pada tanggal 13 Pebruari 1755 di desa Gianti daerah Karanganyar Surakarta. Dengan terbaginya Kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta timbullah suasana baru, hidup baru, aliran baru dan corak baru. Hal yang demikian itu meliputi pula dalam alam kebudayaan dan kesenian di kerajaan Yogyakarta khususnya.

Mulai dari berdirinya kerajaan Yogyakarta sampai tahun 1830 orang kurang sekali melapangkan kesempatan untuk mencurahkan perhatiannya atas tumbuhnya kebudayaan/kesenian peninggalan leluhurnya. Kurangnya perhatian terhadap hal tersebut dapat dimengerti, karena pada waktu itu sumbu wadah kebudayaan tadi masih menderita dan menghadapi bermacam-macam kesulitan antara lain timbulnya pemberontakan yang dilakukan oleh R.M. Guntur alias Pangeran Suryokusumo bersama-sama R. Sudiraputra, Pangeran Ngabehi Warih Kusumo di Gunting Kidul, Ki Secoyudo alias Panembahan Kawah di Kedu, R. Suwajo ipar Ki Tumenggung Mertoloyo dan sebagainya.

Jadi kurang lebih selama 75 tahun pertumbuhan kebudayaan kesenian baru belum tampak terang. Tambahan pula hal itu akibat dari kurangnya tersiar catatan-catatan serta kesusastaan-kesusastraan yang dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan yang demikian itu lebih terasa lagi di wilayah manca nagara yang jauh dari pusat kerajaan. Baru sejak bertahtanya Sri Sultan Hamengku Buwono V tampaklah buah seni budaya Yogyakarta teratur rapi sampai sekarang.

Pada tahun 1885 di Yogyakarta telah berdiri sebuah Badan yang disebut *Archaelogische Vereniging* yang usahanya selaras dengan Yava Institut dengan catatan sangat terbatas. Badan tersebut bertujuan mengumpulkan bahan-bahan yang penting bagi penyelidikan sejarah seperti benda-benda peninggalan jaman bahari, bahan-bahan lainnya yang perlu bagi pengetahuan tentang Negara dan bangsa di sekitar daerah kerajaan (*Vorstenlanden*) Benda-benda yang telah terkumpul itu disimpan, dipelihara di sebuah bangunan darurat di halaman kediaman Residen. Niat atau pikiran untuk mendirikan museum di kota Yogyakarta pada waktu itu sudah ada, tetapi oleh karena bermacam-macam ragam kesukaran maka niat yang baik itu tak dapat dilaksanakan, bahkan badan yang sudah berdiri tadi menjadi bubar berantakan.

Pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 1935 jadi tepat 50 tahun berdirinya Archacologische Museum, maka di Yogyakarta diresmikan pembukaan Museum Sana Budaya milik Yava Instituut oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Keputusan untuk mendirikan sebuah museum di Yogyakarta ini sebenarnya sudah ada pada tahun 1924, ketika diadakan sidang Konggres Yava Instituut, yang dimeriahkan dengan pameran bangunan-bangunan Yava serta susunan rumah tangga.

Sabda Sri Sultan Hamengku Buwono pada peresmian pembukaan Museum Sana Budaya tersebut seperti di bawah ini :

"Tuan Voorzitter, tuan-tuan Bestuur dari Yava Instituut dan dari Sana, Budaya. Saya merasa senang sekali, saya mempunyai hati yang ini hari saya dapat hadir untuk membuka Museum ini dengan officieel/resmi. Sebab saya percaya, bahwa Museum ini tidak sedikit artinya bagi kemajuan kultur Bumiputra, lebih-lebih untuk kesenian dan bacaan buku-buku. Oleh karena itu sudah sepantasnya, Museum ini dapat bantuan dari mana-mana. Tuan Voorzitter, tadi Tuan menyerahkan kepada saya Beschermheerschap dari Museum ini. Maka penyerahan itu saya terima dengan segala senang hati. Begitu juga dari sebab hari membukanya Museum ini kebetulan hari kelahiran saya Rebo-Wage, Tuan-tuan Bestuur memberi selamat kepada saya, maka ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pemberian selamat dari Tuan-tuan itu.

Kemudian saya pujikan, mudah-mudahan Museum ini akan hidup subur dan dapat tercapai apa yang dimaksudkan, sehingga buahnya akan menambah kemajuan Negeri dan penduduknya.

Nyonya-nyonya dan Tuan-tuan, atas permintaan Tuan-tuan Bestuur dari Yava Instituut supaya membuka Museum ini, maka permintaan ini saya kabulkan dengan segala senang hati dan sekarang saya nyatakan, bahwa Museum ini saya buka."¹⁶⁾

Sri Sultan Hamengku Buwono VIII besar sekali perhatiannya terhadap perkembangan serta kemajuan kebudayaan di wilayahnya. Oleh karena itu maka tidak sedikit sumbangan yang telah diberikannya

kepada badan-badan yang bertujuan memajukan buah seni budaya bangsa seperti kepada Sana Budaya, Krida Beksa Wirama, Habiranda, dan sebagainya.

Di samping pemeliharaan Museum Sana Budaya, dibuka pula sekolah Seni kerajinan (*Kunstambachtschool*) beserta asramanya pada tahun 1939. Sekolah tersebut dimaksudkan untuk mendidik serta menyempurnakan keahlian orang-orang dewasa yang telah bekerja. Pelajaran-pelajaran diutamakan yang praktis sehingga dengan demikian pertukangan akan makin maju. Lama kursus dua tahun, dan untuk sementara waktu baru meliputi pertukangan emas dan perak serta kayu.

Juga di Kota Gede telah terdapat sebuah sekolah Menggambar (*Teekenschool*), akan tetapi atas keputusan “Pakaryan Ngayogyakarta” pada tanggal 11 Oktober 1934 untuk sementara waktu sekolah itu terpaksa ditutup.

Hal-hal yang telah disebut di atas merupakan sepintas lintas tentang perkembangan kebudayaan/kesenian sekitar lingkaran dalam dinding Keraton. Maka perkembangan di luar Keraton pun maju pula sampai di pelosok-pelosok.

Pada waktu tumbuhnya rasa kesadaran kebangsaan, maka di sana-sini tumbuh dan timbul beberapa badan kebudayaan/kesenian yang bertujuan akan membina, memelihara, memupuk serta memajukan kebudayaan peninggalan leluhurnya selaras dengan alam dan jamannya. Badan-badan yang tumbuh dan berkembang di Yogyakarta dari tahun 1900--1942 antara-lain:

6.4.1.1 Seni Karawitan

Setelah Sri Sultan Hamengku Buwono I pindah dari Pasanggahan Gunung Tlaga Nganibar Ketawang Gamping ke Keraton Yogyakarta yang telah selesai dibangun pada tahun 1757, maka dimulailah mengisi prabot kewibawaan Keraton seperti gamelan-gamelan, tari-tarian, wayang, dan lain sebagainya seimbang dengan Keraton Surakarta. Mula-mula yang diperlukan ialah gamelan monggang yang diberi nama Kangjeng Kyai Kebo Ganggang. Gamelan Sekaten diberi nama Kyai Guntur Madu yang kemudian dibuatkan timbangan yang diberi nama Kangjeng Kyai Nagawilaga.

Masyarakat ramai telah maklum tentang pemakaian gamelan tersebut di atas seperti di bawah ini :

Kyai Guntur Laut (Monggang) dibunyikan setiap Hari Garebeg serta watangan sebagai penghormatan kedatangan Sri Sultan.

Kangjeng Kyahi Kebo Ganggang (Kodok ngorek) dibunyikan setiap hari Garebeg, adu-adu hewan atau merampok harimau.

Pada waktu pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII R.T. Kertonegoro, Bupati Nayoko Lurah Bumijo mengayunkan langkah pertama memulai meneliti serta menghimpun segala gending slendro dan pelog, berikut kendangan-kendangan, diabadikan dalam kitab peringatan. Di kala itu tanda-tanda titi laras masih berupa huruf Jawa.

Selain itu ada pula yang disebut titi-raras rantai atau noten balk, ciptaan R.T. Wiroguno dengan bantuan M.L. Puspaganti, M.L. Brantamara, M. Panewu Demang Mangun gending R.L. Babarlayar.

Gubahan-gubahannya gending antara lain Lagu pembukaan dan penutup MAVRO, Vedera serta NIROM.

Ia juga menyesuaikan gending-gending untuk tari golek di antaranya golek Jangkung kuning, Layangsari dan lain-lainnya.

Gubahannya yang terakhir ialah gending Prabu Mataram yang kini dipakai penghormatan Sri Sultan.

Titi-raras Keraton Yogyakarta yang baru, ciptaan P. Purwodiningrat yang kemudian disempurnakan oleh R.T. Wiroguno, tertera dalam kitab "Pakem Wirama Walet gending berdangga."

Untuk keperluan pelajaran seni suara Jawa, maka Ki Hajar Dewantara telah menciptakan suatu titi-raras yang tidak berdasarkan atas namanya wilahan, melainkan atas dasar suara, yang disebut titi-raras sari swara.

Pada tahun 1908 sebuah Badan yang disebut "Her-mani" telah didirikan oleh R.M. Jayadipura bersama-sama R.M. Prawiradipura, R.L. Prawiraatmaja dan Lie Jeng Kien yang bertujuan membina dan memajukan kesenian dan seni kerajinan. Pada tahun 1919 Badan tersebut diganti nama "Mardi Guna" dan pada tahun 1926 di samping

pemeliharaan kerawitan, dicantumkan pula pelajaran tari-menari. Pameran yang pertama berupa wayang orang berlangsung pada tahun 1930. Usaha-usaha untuk mempersingkat waktu pertunjukkan wayang yang biasanya memakan waktu dua belas jam atau lebih telah dilakukan. Untuk menarik perhatian para touris atas seni tari serta kerawitan Yogyakarta maka "Mardi Guna" telah mencoba di dalam waktu - jam, para touris sudah dapat kesan bermacam-ragam tari-tarian baik yang gagahan maupun yang alusan. Begitu juga agar supaya tari-tarian klasik yang sepanjang sejarah tidak dipertunjukkan kepada khalayak ramai dapat dikenal dan dinikmati oleh umum, maka atas ijin Sri Sultan, usaha yang baik itu dapat dilaksanakan.

Adanya siaran dari NIKOM, SRVI, MAVRO, dan lain-lain terasa oleh para ahli dan pencinta seni, perlunya untuk berlomba-lomba memajukan kesenian daerahnya masing-masing sesuai dengan kemajuan masa.

Dalam masa mendahsyatnya siaran radio itu, maka berdirilah di Yogyakarta sebuah Badan Karawitan yang disebut Dayapradangga di bawah pimpinan Badan Lie Yang Kiem. Dayapradangga ini merupakan suatu per satu paduan yang kuat antara penabuh-penabuh dari Keraton, Paku Alaman, dan Kepatihan. Dayapradangga inilah yang secara tegas berani mengayunkan langkahnya untuk mempelajari serta membunyikan gending-gending dari Daerah Kedu dan Surakarta. Tiap-tiap lagu gending yang boleh didahului dengan bawa swara, maka dimulailah dengan bawa swara dan selanjutnya diselang-seling dengan suara merdu dari suarawati (sinden) serta seni suara pria bersama (gerong) ria-gembira sampai sekarang.

Dengan lahirnya perkumpulan Dayapradangga yang radikal ini, maka tak lama kemudian timbullah pelbagai badan-badan kesenian :

1. *Laras madya* anggota-anggotanya terdiri atas niyaga dari amateur.
2. *Nindya-Yatmoko*, anggota-anggotanya terdiri atas niyaga abdi dalem Kadipaten yang bertujuan mempertahankan corak klasik.
3. *Mardagawita* lalu ganti *Madu Langen Swara*, di bawah pimpinan R.B. Hastokuwala, bercorak aliran baru.

4. Murbararas, perkumpulan abdi dalem Keraton ditambah anggota-anggota Dayapradangga, beraliran umum.
5. Krusuk raras, perkumpulannya pemuda-pemuda abdi dalem Keraton dan Ngabean. Perkumpulan ini beraliran umum tetapi mempertahankan ragam Keraton.
6. Mardi Wirama, perkumpulan para abdi Dalem Paku Alaman beraliran umum termasuk ragam Yogyakarta dan Surakarta.

Gamelan Studio RRI Yogyakarta adalah penjelmaan daripada perkumpulan-perkumpulan kesenian Jawa (gamelan) di Yogyakarta yang sudah terkenal semenjak berkembangnya siaran Radio di Indonesia ini.

Semenjak di Yogyakarta didirikan perkumpulan Radio partikelir oleh Bangsa Indonesia ialah MAVRO (Mataramse Vereniging Voor Radio Omroep) yakni pada tahun 1934 maka perkumpulan-perkumpulan gamelan (karawitan) di Yogyakarta membantu dengan sukarela kepada MAVRO dengan gratis. Di antara perkumpulan-perkumpulan karawitan yang membantu Mavro ialah : 1. Murbararas, 2. Dayapradangga, 3. Saripradangga, 4. Brantararas, Maduraras dan lain-lain.

Pada waktu itu perkumpulan kesenian Jawa tersebut membantu usaha-usaha penyiaran Radio Nasional. Untuk kemajuan kesenian Jawa pada umumnya. Dalam hal ini perkumpulan-perkumpulan tersebut tidak luput dari penderitaan konsekwensi daripada cita-citanya, membantu usaha-usaha penyiaran Radio Nasional. Seandainya pada waktu itu di antara perkumpulan-perkumpulan tersebut ada yang suka membantu siaran dari Radio Nerom Ketimuran, maka niscaya dapat melemahkan kedudukan Mavro.

Pada waktu itu terjadi persaingan penyiarannya antara Mavro dengan Nirom. Nirom ingin sekali dapat menyiarkan kesenian Jawa langsung dari perkumpulan-perkumpulan kesenian Jawa di Yogyakarta tiada dengan perantaraan Mavro, meskipun harus mengeluarkan pembayaran yang lebih tinggi. Tetapi usaha tersebut tiada berhasil, sehingga Nirom dalam menyiarkan kesenian-kesenian Jawa dari Yogyakarta harus minta pertolongan Mavro. Dengan bantuan dari

perkumpulan kesenian Jawa tersebut Mavro menjadi populer di seluruh Indonesia.

Kemudian semenjak Jepang berkuasa di Indonesia maka penyiaran Radio diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang yakni Yogyakarta *Hosokiyoku*. Oleh karena pada masa pendudukan Jepang segala perkumpulan Radio partikelir dilarang maka perkumpulan kesenian di Yogyakarta, pembantu-pembantu siaran Mavro, dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan suasana tersebut oleh Yogya Hosokooku yang pada waktu itu pemimpin umumnya seorang bekas *omroepleder* Mavro maka susunan dan penghargaan Yogya Hosokiyoku terhadap perkumpulan-perkumpulan kesenian Jawa melanjutkan usaha-usaha yang pernah dikerjakan oleh Mavro dulu. Maka dengan sendirinya perkumpulan-perkumpulan gamelan yang sudah banyak jasanya terhadap perjuangan Radio Nasional mendapat perhatian selayaknya.

6.4.1.2 Sekitar Seni Tari

Yang dimaksud seni tari di sini ialah seni tari yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu seni tari yang asalnya dari Keraton Yogyakarta. Semuanya itu adalah buah hasil usaha perkumpulan Krida Beksa Wirama, suatu perkumpulan seni tari yang didirikan sejak tanggal 17 Agustus 1918. Sebelum itu seni tari kita, terutama tari bedaya dan serimpinya, yang dipelihara di dalam istana hidup terbatas dikelilingi oleh empat dinding tebal dan tinggi menjadi larangan besar untuk keluar dari usaha perkumpulan itu, kini di Yogyakarta masih tegak berdiri perkumpulan tari di tengah-tengah masyarakat kita.

Dorongan untuk mendirikan perkumpulan seni tari Krida Beksa Wirama, adalah karena sejak berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918 tidak ada seorang pun yang berniat memberi pelajaran seni beksa itu. Atas desakan dari Pergerakan Pemuda “Yong Java” yang minta diberi pelajaran tari dan gamelan, kemudian mengirimkan utusannya yang terdiri dari dua pemuda, ialah R. Wiwoho dan R.M. Notosutarso maka akhirnya berdirilah KBW dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

- P.A. Suryadiningrat sebagai Ketua
- P.A. Tejakusuma sebagai Pemimpin Pelajaran Tari.

- B.T. Wiroguno sebagai Pemimpin pelajaran Gamelan.
- R.M. Jayadipura sebagai Pemimpin Kapujanggaan.
- R.W. Suryamurcita (K.R.T. Wiranegara) sebagai Sekretaris.
- R.T. Puspadinigrat sebagai Bendahara.
- R.T. Atmawijaya, R.W. Pupadirja, R.W. Sastrasuprpta R.B. Jayapragola, dan P.A. Atmawijaya sebagai Komisaris-komisaris.

KBW dan Yong Java bekerjasama dalam menyelenggarakan seni tari ini, KBW menyediakan guru-guru dan Yong Java yang menyiapkan muridnya dari sekolah-sekolah lanjutan. Selain memberikan pelajaran seni tari wayang orang KBW juga memberi pelajaran tari Bedaya-Serimpi, dan tidak lupa pula mengajarkan tari wayang orang, yang digubahnya setelah mengadakan pertunjukkan Wayang orang Topeng oleh penari-penari dari desa-desa di bawah pimpinan para dalang.

Dari G.P. Tejokusumo yang menjadi anggota pengurus perkumpulan tari Krida Beksa Wirama didapat keterangan tentang perkembangan seni tari di Yogyakarta sebagai berikut :

Mulai tahun 1922 Krida Beksa Wirama atau disingkat menjadi KBW membuka kesempatan bagi penggemar seni tari untuk memperdalam pengetahuan itu. Pada tahun itu KBW menerima murid putra dan putri Sri Paku Alam VII yaitu :

1. R.M. Suryosularso, yang sekarang menjadi Sri Paku Alam VIII
2. R.M. Suryosutikno (P.A. Nototaruno).
3. R.A. Sulastri (Nyonya Sugriwo).
4. R.A. Kussaban (Nyonya Ir. Kusumaningrat).
5. R.A. Kuspinah (Nyonya Mr. Hapsara).

Selain dari itu Paku Alam VII juga mengirimkan seorang bedaya untuk mengikuti pelajaran tari bersama-sama dengan putra dan putri tersebut.

Kepada para putri agung itu diberikan pelajaran tari serimpi "Merak Kasimpir", sedang kepada pula diberikan pelajaran "Enjeran". Ternyata hasil dari pelajaran memuaskan.

Pada tahun 1925 KBW menerima murid seorang wanita bangsa Amerika, bernama Zella Thomas, dan seorang wanita dari Rusia

bernama Veramirowa. Dalam ujian penghabisan mereka mendapat nilai empat.

Pada tahun 1926 Sri Mangkunegoro VII mengirimkan putri-putrinya R.A. Siti Nurul dan R.A. Partinah, bersama delapan putri mengikuti pelajaran tari. Kepada mereka diberikan pelajaran tari Sari Tunggal, Serimpi Merak Kasimpir, serimpi Pande Lori, Serimpi Putri Cina, dan Bedaya Sinom. Partinah lulus dalam ujian ini dengan nilai tujuh.

Pada tahun 1937 R.A. Siti Nurul oleh ayahnya dikirim ke negeri Belanda (Den Haag) untuk membawakan seni tari, Sari Tunggal diiringi dengan gending Pande Lori. Pertunjukan disambut dengan rasa kagum oleh orang-orang Barat. Sejak waktu itu tari serimpi mulai dikenal dan memperoleh nama di Eropa. Dengan sendirinya nama Indonesia membumbung derajatnya.

Pada tahun 1926 KBW menerima seorang wanita Rusia bernama Helen Litman menjadi muridnya. Wanita ini mempelajari tari Sari Tunggal.

Pada akhir pelajarannya Helen Litman mempertunjukkan kepandaianya menari di pendapa Taman Siswa dan pendapa Tejokusuman. Dalam pesamuan itu hasilnya memuaskan.

Pada tahun 1927 daung di Yogyakarta sebagai murid tari seorang wanita dari perkumpulan Kleinrunhell. Wanita ini diberi pelajaran tari Sari Tunggal. Hasilnya memuaskan. Sesudah belajar di Yogyakarta Kleinrunhell mengadakan perjalanan keliling di negeri Amerika dan Eropa, untuk mempropagandakan seni tari Jawa Sari Tunggal, dengan diringi oleh bunyinya gending dari plaat gramapun yang spesial dibuat untuk keperluan itu.

Sehabis menari lima menit Helen Litman berhenti sebentar untuk menerangkan namanya dan gending yang dipertunjukkan.

Pada tahun 1928 Sri Sultan Pati Buwono X Surakarta mengirimkan delapan orang bedaya serimpi Keraton Sala ke Yogyakarta di bawah pimpinan R.T. Wiryodiningrat, untuk mempelajari tari merak Kasimpir. Murid-murid dari Keraton Sala ini memperoleh hasil baik.

Kepandaian menari oleh mereka dipertunjukkan pada hari ulang tahunnya Sunan Paku Buwono X.

Pada tahun 1929 KBW menerima seorang putri India Mrinalini. Putri ini mempelajari tari Sari Tunggal. Atas permintaan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, Mrinalini mempertunjukkan kepadanya menari tari Sari Tunggal di Bangsal Manis Keraton Yogyakarta disaksikan oleh para bangsawan dengan istrinya. Hasil pelajarannya memuaskan.

Pada tahun 1939 seorang wanita dari Maroko Ny. Patmapani, mempelajari tari Sari Tunggal. Hasilnya cukup. Pada tahun yang sama pula KBW menerima murid seorang wanita bangsa Vietnam, istri pemimpin redaksi harian Locomotief.

Pada tahun 1938 dua orang putri bangsawan dari Pura Paku Alaman R.A. Kusdarinah (Ny. Mr. Harjono) dan R.A. Kusbinah (Ny. Ir. Sugoto) dan delapan orang bedaya masuk menjadi murid KBW. Mereka mendapat pelajaran tari Sari Tunggal dan bedaya Rengawati, hasilnya baik. Pada tahun 1943 murid-murid bangsawan itu mempertunjukkan kepandaiannya menari pada pesta perkawinan R.A. Upomo (istri Dr. Utomo) di pendapa Tejokusuman.

Pada tahun 1940 berhubung dengan penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX oleh KBW diadakan pertunjukkan tari bedaya sinom di Gedung Negara.

Di antara tahun 1922 sampai 1942 KBW menerima murid bangsa Belanda, akan tetapi pada umumnya hasilnya kurang begitu memuaskan. Hanya beberapa orang saja dari mereka memperoleh nilai sedang, misalnya Nona Tuty Elbers, Tuan Reineker. Tuan ini menerima pula pelajaran kala kinantang. Tuan Tommie Resink, Professor Dr. Can Cu Sin, dan Nyonya bangsa Australia turut belajar juga, tetapi hasilnya tidak memuaskan.

Demikianlah KBW terus berkembang dari tahun ke tahun Bahkan setelah Indonesia merdeka, maka berkali-kali KBW mengadakan kunjungan ke luar negeri.

Tari Topeng

Tari topeng di wilayah Yogyakarta mendapat tempat yang layak juga dalam masyarakat, serta mempunyai sejarah perkembangan, pula. Seni tari topeng mempunyai sejarah yang lama. Bahkan di dalam Kitab Brahmana purana telah dikatakan tentang adanya topengan. Juga dalam kitab pararaton diterangkan bahwa Sang Hayam Wuruk sering dan mahir menari tari topeng. Seni tari topeng ini tidak saja terdapat di Yogyakarta dan Surakarta melainkan di seluruh Pulau Jawa, Madura, dan Bali.

Tari Bedaya

Seni tari Keraton Yogyakarta itu dapat dibagi atas tiga golongan:

- 1 . Tari Bedaya dan Serimpi.
2. Beksan, dan
3. Wayang orang (ringgit tiang).

Jumlah penari bedaya itu di dalam Keraton harus senantiasa enam puluh orang. Kecuali itu ada Carik bedaya yang mengurus hal ikhwal Bedaya, dan tidak perlu ikut serta dalam latihan-latihan. Kalau ada seorang Bedaya mengundurkan diri karena kawin dan sebagainya maka lowongan Bedaya itu lalu diisi megangan Bedaya (calon).

Latihan-latihan Bedaya itu senantiasa dilakukan pada malam hari ditratag Prabayeksa di bawah pimpinan beberapa orang guru tari-tarian yang berpengalaman. Bedaya-bedaya yang sudah mahir ditempatkan di bagian tengah sebagai contoh adik-adiknya. Apabila pada suatu ketika akan ada perayaan atau hari besar, maka diadakanlah latihan-latihan tiap-tiap malam berturut-turut berikut latihan penghabisan. Tari Bedaya ini biasa dilakukan di bangsal Kencana setiap hari besar.

Tari Bedaya itu dilakukan sembilan orang putri atau putra. Di luar Keraton oleh tujuh orang. Pada jaman sebelum Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Bedaya putri tidak berbaju kotang, kebalikannya Bedaya putra malahan berbaju kotang Sanggul Bedaya putri diatur seperti pengantin wanita. Bedaya lelaki tidak memakai sanggul lagi sejak Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dilantik.

Tari Bedaya itu isi ceritanya diambilkan dari cerita-cerita Tambo, sejarah, dan cerita-cerita lainnya. Biasanya Tarian Bedaya itu terbawa

oleh gending yang dipakai untuk mengiringi. Bedaya Semang besutan dari Bedaya Ketawang menurut tradisi adalah gubahan Sri Sultan Hamengku Buwono II yang menggambarkan pertemuan Sultan Agung Hanyakrakusuma dengan Kangjeng Ratu Nyai Rara Kidul.

Adapun tari Serimpi itu dilakukan oleh empat orang putri yang menggambarkan perangnya pahlawan-pahlawan dalam cerita Menak purwa dan lain-lain. Dalam penyelenggaraannya tari Serimpi ini dipilihkan putri-putri yang seimbang segala-galanya.

Serimpi Renggawati itu dilakukan oleh lima orang. Sebenarnya Serimpinya sendiri empat orang ditambah seorang putri Renggawati. Serimpi Renggawati ini diambilkan dari kisahnya Angling Darma, adalah seorang putra Mahkota yang masih teruna remaja yang pada suatu ketika terkena upata menjadi seekor burung mliwis. Mliwis itu nantinya bisa kembali menjadi manusia apabila badannya tersentuh tangan seorang putri cantik jelita. Peristiwa itu diungkapkan dalam tari-tarian Setimpi Renggawati. Cerita Angling Darma ini berakhir dengan happy end.

Sebelum Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Bedaya ini memakai senjata pistol, sedangkan hingga sekarang tidak lagi dan diganti dengan keris serta jebeng (dadap) atau panah beserta busur.

Beksan Trunajaya

Terciptanya beksan Trunajaya tersebut di atas mungkin sekali digerakkan oleh suatu tradisi yang tiap-tiap hari Sabtu sore diadakan, yaitu latihan-latihan perang dengan watang di atas kuda yang disebut watangan. Pada latihan-latihan ini maka dipalulah gamelan Kangjeng Kyai Guntur laut dengan gending satu-satunya monggang. Beksan Trunajaya ini tidak dapat dipertontonkan setiap saat, melainkan hanya pada waktu-waktu yang penting saja.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian pada beksan Trunajaya ialah tentang bahasanya. Bahasa yang digunakan di sini ialah Bahasa campuran Madura dari Jawa.

Beksan Wayang Orang

Di Keraton Yogyakarta sejak Sri Sultan Hamengku Buwono I beksan wayang orang sudah ada, bahkan sudah pernah diberikan ke

Surakarta untuk dipertunjukkan di dalam Keraton. Cerita-cerita yang sudah pernah dipertunjukkan misalnya: Gandawardaya, Pragolamurti, Jyasemadi, Petruk jadi Ratu, Sri Suwela, Pregiwati, Samba sebit, Ciptaning (dari wayang purwa). Cerita-cerita wayang gedog seperti, Joyolengkoro, Kudonowongso, Panji Leleyan, dan sebagainya. Untuk keperluan wayang orang ini diperlukan pemain sampai beberapa ratus. Seperti yang berlaku dalam pertunjukan wayang kulit maka dalam pertunjukan wayang orang pun di Keraton menggunakan Gunungan yang dibuat daripada papan. Konon gunungan semasa Sri Sultan Hamengku Buwono I dalam pertunjukan wayang orang pada tanggal 18, 19, dan 20 Maret 1939 masih dipakai juga. Semua peranan di dalam lakon itu dilakukan oleh laki-laki.

Pada kira-kira tahun 1943 maka dimulailah oleh angkatan muda untuk dari sedikit demi sedikit meninggalkan tradisi kuno dalam mengadakan tari-tarian bersama putra-putri di dalam peranan tari-tarian wayang, beksan petilan, dan sebagainya. Untuk melancarkan tari-tarian yang berbentuk cerita atau sebagian dari suatu cerita tidak lagi dari wayang purwa, wayang gedog atau Menak, melainkan dari kitab-kitab sejarah atau kesusastraan seperti Pararaton Lutung Kasarung, dan sebagainya.

6.4.1.3 Ketoprak dan Dagelan Mataram

Di samping perkembangan kesenian yang diusahakan oleh golongan masyarakat pertengahan itu, maka perkembangan setambul Jawa yang selanjutnya menjadi sandiwara ketoprak, di daerah Yogyakarta tampak maju pesat. Harnpir di tiap-tiap kampung berkembang pula dagelan Mataram.

Ketoprak dan dagelan Mataram dikenal orang melalui udara, terutama yang berarti bahasa Jawa semenjak tahun 1934, bersamaan dengan munculnya penyiaran Radio MAVRO (Mataramse Vereniging Voor Radio Omroep) di Yogyakarta. Mula-mula dagelan Mataram itu digunakan untuk pertunjukan tambahan dalam pertunjukan-pertunjukan ketoprak di Yogyakarta diberi nama "Extra."

Oleh karena lelucon itu suatu hiburan yang sehat dan semua manusia gemar akan lelucon-lelucon (penggeli hati) maka oleh Mavro para ahli komiek (pemain penggeli hati) dikumpulkan dalam satu

rombongan dinamakan "Dagelan Mataram" untuk dijadikan siaran di samping siaran ketoprak, uyon-uyon dan lain sebagainya. Usaha ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat di masa itu sampai terkenal di seluruh Indonesia. Pada mulanya banyak reaksi dari pihak pendengar yang tidak suka pada dagelan tersebut karenamula-mula isinya hanya menggambarkan percekocokan suami-istri, serta disiarkan terpisah dari ketoprak. Tetapi di samping itu pun lebih banyak pula pernyataan-pernyataan yang memberikan persetujuannya.

Dari hari ke hari dagelan tersebut dibimbing ke arah perbaikan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi penggemar dagelan Mataram. Penyiar Radio membutuhkan kesenian tersebut untuk perkembangan kesenian Radio umumnya.

Setelah mendapat banyak petunjuk-petunjuk dan pengamalan-pengamalan ditentang perlunya dagelan dalam ketoprak maka kemudian dagelan dan ketoprak menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dipandang dari sudut paedagogis, maka isi dan ialahnya cerita dagelan dan ketoprak itu sering mengandung nilai-nilai paedagogis yang baik bagi masyarakat. Bahkan kadang-kadang ini ceritanya berupa kritikan-kritikan, sindiran-sindiran dan teladan terhadap keadaan-keadaan masyarakat pada jamannya, baik tentang hal-hal yang buruk maupun yang baik. Dari sudut seni maka dagelan dan ketoprak itu mempunyai nilai yang tersendiri. Sedangkan dari sudut "hiburan," maka dagelan dan ketoprak mempunyai nilai hiburan yang sehat bagi masyarakat. Oleh karena itu dagelan dan ketoprak perlu mendapatkan penghargaan yang layak.

Karena seni semacam itu memang sukat dipelajari sebab bila orangnya tidak mempunyai pembawaan lucu dan jenaka, tidak mungkin ia akan menjadi lawak menarik.

Bagi orang yang sudah memiliki anleg lucu semacam pemain dagelan Mataram dan memainkan peranan sebagai pemain ketoprak, haruslah memperluas dan mempertinggi pengetahuannya sehingga memberi manfaat kepada masyarakat dalam segala lapisan.

Arti dagelan Mataram

Dagelan berasal dari perkataan "dagel" (bahasa Jawa) yang artinya setengah masak. Jadi dagelan artinya mainan setengah masak,

Mataram adalah nama tempat. Jadi arti kata seluruhnya ialah permainan setengah masak model Mataram."

Ditinjau dari namanya dagelan tidak memiliki unsur paedagogis, melainkan hanya kesenian. Tetapi meskipun demikian tak boleh dibiarkan begitu saja melainkan harus dipelihara agar dapat berguna bagi masyarakat untuk hiburan yang sehat. Memang ada kalanya dagelan isinya penerangan-penerangan yang ringan, tetapi untuk isi penerangan-penerangan yang berat, misalnya soal politik dan lain-lain kurang tepat.

Dalam jaman Jepang misalnya, dagelan diisi macam-macam soal penting. Oleh karena basis pengetahuan pemain-pemainnya belum sampai ke situ, maka akibatnya mengurangi lucunya dan akibatnya kurang menarik.

Di samping dagelan, maka di daerah Yogyakarta pun terkenal kesenian ketoprak Mataram. Ketoprak Mataram sebagai hiburan juga memberi pendidikan dan bimbingan terutanya dalam lapangan budipekerti.

Dalam perjuangan nasional dagelan dan ketoprak Mataram punya andil pula. Pada tahun 1935-1938 dagelan dan ketoprak Mataram sedikit banyak juga membantu perjuangan Nasional, yaitu pada waktu sedang hebat-hebatnya konkurensi siaran antara Nirom Ketimuran dengan Mavro.

Apabila para pemain dagelan dan ketoprak Mataram yang pada waktu sedang populer bekerja pada Nirom, niscaya mereka akan mendapat honorarium yang cukup, dibandingkan dengan bebeda di Mavro. Tetapi karena insaf, bahwa Mavro adalah usaha Nasional, dan pula yang membimbing mereka ke arah populeritetnya, maka mereka tidak mau membantu Nirom kalau tidak dengan perantaraan Mavro.

Sikap demikian itu merata ke seluruh pembantu-pembantu siaran Mavro. Hal mana menyebabkan Nirom tak dapat mengadakan siaran ketimuran sendiri langsung dari Yogyakarta, kalau tiada dengan perantaraan Mavro di Yogyakarta.

Oleh karena pada masa itu pendengar-pendengar dari siaran Ketimuran gemar sekali akan siaran ketoprak, dagelan dan uyon-uyon

dari Mavro, inaka thokkode Mavro dalani kesenian tersebut dapat memberikan backing kepada PPRK yang pada masa itu berjuang dalam Volksraad untuk mengambil over siaran-siaran Ketimuran dari Nirom. Jadi sedikit banyak dagelan dan ketoprak Mataram juga turut dalam perjuangan Radio Nasional.

6.4.1.4 Perkembangan pedalangan

Menurut K.R.T. Jayadipura semenjak Sri Sultan Hamengku Buwono I pedalangan telah ada. Setelah Perang Dipanegara, maka mulailah diperhatikan perihal pedalangan. Sebelum itu, ialah sejak jaman Sultan Raja (Sultan Iiamengku Buwono III) tidak banyak perkembangan dalam bidang pedalangan. Atas jasa Sri Sultan Hamengku Buwono V seni pedalangan mulai berkembang lagi. Pada jaman ini pulalah terciptanya "Serat Purwakanda" atas inisiatif Sri Sultan Iiamengku Buwono V yang ditulis oleh seorang Pangeran bemama Kangjeng Gusti Pangeran Adhipati Mangkubumi di Yogyakarta, putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono VI dan cucu dari Sri Sultan Hamengku Buwono V. Sejak itu jumlah keturunan dalang bertambah banyak.

Di antara dalang yang terpilih diangkat menjadi abdi dalem dan tidak diperkenankan mendalang di sembarang tempat. Dalang-dalang pada tahun 1830 sampai dengan 1925 M yang memiliki kemahiran yang istimewa, misalnya:

- a. Ki Rediguna di Sanasewu, panah wayang dapat terpaku di tiang rumah, dan dapat mendatangkan hujan. Walaupun sudah lumpuh masih laku.
- b. Ki Jayengtaryana dalang Paku Alainan, termashur bagus pakelirannya.
- c. Ki Somataruna Dagen, termashur lucunya.
- d. Ki Lurah Girisa I termashur pengetahuan dan kecakapannya mendalang.
- e. Ki Sapawira Sambilegi termashur dengan ilmu kebatinnannya.
- f. El Somakariya termashur kecakapannya membawakan/ menceritakan adegan percintaan dan menjalankan wayang putri.
- g. Ki Citramengeng termashur dengan tehnik pakelirannya.

- h. Ki Gandapawira, (Mantap) sabetannya, tak ada dalang melebihinya.

Perlu dikemukakan di sini bahwa dalang tersebut alinia f.g.h adalah dalang pada zaman Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Setelah dalang yang terkenal itu wafat maka Sri Sultan Hamengku Buwono VIII berusaha mencari dalang yang memuaskannya tetapi tidak ada. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII juga ahli dalam seni pedalangan.

Untuk meningkatkan pengetahuan para dalang maka pada tahun 1925 di Yogyakarta didirikan kursus Dalang bernama "Hafiranda" singkatan = Ha-murwani, Bi-wara, Ran-cangan, Da-lang. Kursus ini didirikan atas inisiatif K.R.T. Jayadipura, dengan tunjangan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Sebagai pelaksana ditunjuk B.P.H. Suryadiningrat, dan K.R.T. Jayadipura. Setelah segala sesuatu siap maka pada hari Minggu Wage tanggal 5 Mukarom tahun Be 1856 atau tahun 1925 M, diadakan pertemuan yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- a. Mufakat adanya kursus dalang di Yogyakarta.
- b. Kursus itu diberi nama "Hafiranda:"
- c. Kursus dimulai pada hari Senen-Kliwon (esok harinya) tanggal 6 Mukarom Be 1856 atau tanggal 27 Juli 1925 M.
- d. Menetapkan Pengurus Pendirian Kursus tersebut Ketua R.M. Riya Gandaatmaja, Penulis K.R.T. Jayadipura; Bendahari R. Rujita; Pembantu G.P.H. Tejakusuma, dan B.P.H. Suryadiningrat.
- e. Pamong kursus: Direktur K.R.T. Jayadipura merangkap mengajar Pengetahuan (Kawruh) pedalangan umum; Guru sejarah R.W. Prawiradipura; Guru Sulukan R.T. Madubranta; dan Guru Pakeliran R.B. Cermawicara.
- f. Sebagai donateur tetap : Pemerintah Belanda, Pemerintah Kasultanan, Pemerintah Pakualaman Adon Pabrik Karanggayam, dan masih banyak lagi.
- g. Komisi untuk membuat *Statuten* dan *Huisho udelijk .Reglement* adalah Kontrolleur Dr.L. Adam G;P.H. Tejakusuma, B.P.H. Suryadiningrat, K.R.T. Jayadipura.

- h. Sejak berdiri hingga sekarang, kursus itu baru dapat memberikan pelajaran pedalangan tingkat pertama, ialah hanya dapat "mayang."

Setelah ketua Habiranda R.M. Gandaatmaja wafat, tidak ada lagi gantinya dan pengurus seluruhnya menjadi macet. Jabatan ketua organisasi pada waktu itu ada di tangan R.W. Sastrasuprpta yang kemudian menjadi Bupati bernama K.R.T. Pancakusuma.

Sejak pengurus berada di tangan K.R.T. Pancakusuma almarhum maka R.W. Madukusuma tidak lagi memberi pelajaran di kursus tersebut.

Dengan demikian, maka pelopor Guru Kursus "Habiranda" tersebut hanyalah tinggal R.B. Cermawicara saja. Sesudah K.R.T. Pancakusuma wafat, maka Ketua Pamong dipegang oleh B.P.H. Pakuningrat almarhum. Dan R.B.Certnawicara dibebaskan dari tugasnya.

Perkembangan pedalangan antara tahun 1925 sampai dengan 1945 sebagai berikut : Sesudah K.R.T. Pancakusuma wafat, maka B.P.H. Pakuningrat memegang ketua Pengurus Habianda, disini K.R.T. Madukusuma muncul lagi sebagai Bendahara. Dalam fase ini Habiranda mulai dihidupkan lagi, dengan mengambil tempat kursus di Pakapalan alun-alun Utara Yogyakarta. Selama pendudukan Belanda (Clash II) kursus tersebut berhenti. Dalam perkembangannya, kursus pedalangan Habiranda dilengkapi pula dengan mengambil tehnik Surakarta. Kursus tersebut diadakan oleh Himpunan Siswa Budaya dan Marsudi Wirama.

Kursus dalang ini tidak hanya tersebar di sekitar keraton saja, melainkan meluas ke pelbagai daerah di sekitar kota antara lain di Gunung Kidul, Bantul dan Sleman.

Dapat dikatakan, bahwa pada umumnya dalang itu berpendirian kolot. Tidak suka berorganisasi. Sudah pernah diadakan percobaan, untuk mendirikan persatuan dalang Yaitu Eka Mardi Bujangga pada tahun 1937, tetapi bubar juga. Meskipun demikian berdirinya Habiranda telah meningkatkan pengetahuan para dalang, yang berguna dalam perjuangan bangsa.

Wayang

Sejak Yogyakarta diperintah oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I kerajinan menatah wayang telah dimulai. Banyak para empu penatah wayang yang terkenal, seperti : Jayaprana Ki Maraguna, Empu Riwing dan Resopanatas, Empu Jayaprana dan Ki Resopanatas penatah wayang yang terkenal sejak Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Sepeninggal Empu Riwing maka Empu Resopanatas telah mempunyai kader yang telah dididik menatah wayang, antara lain Kertiwanda. Ketika Resopanatas meninggal dunia Ki Kertiwanda menjadi abdi dalem penatah, di kala Sri Sultan Hamengku Buwono VI.

Di samping melayani pekerjaan Sri Sultan, Ki Kertiwanda juga menjadi penatah wayang kepatihan (Danureja Danudiningrat), dan K.G. Paku Alam VII. Ia termasuk penatah yang baik pada jaman itu. Selain itu Ki Sasrawinangun, Bekel Sri Sultan Hamengku Buwono VII terkenal pula sebagai penatah wayang yang bagus yasan Sri Sultan. Adapun penyungging yang terkenal ialah Ki Brajaguna.

Pada jaman pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII dan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII banyak kemajuan di lapangan kesenian, termasuk pula pembuatan wayang. Waktu Sri Sultan Hamengku Buwono VIII disusun Kitab "Bratayuda," cerita wayang yang termashur itu. Empu-empu yang terkenal pada waktu itu ialah G.P.H. Tejokusumo, B.P.H. Suryadiningrat, K.R.T. Wiroguno, K.R.T. Jayadipura, dan masih banyak lagi.

Sri Sultan Hamengku Buwono VIII juga mendirikan kursus dalang Habiranda.

Di lingkungan Paku Alaman kemajuan dalam kesenian tidak ketinggalan pula, baik berupa kesusastraan, seni tari maupun karawitan. Begitu pula tentang pembuatan wayang. Macam-macam wayang hasil karya di lingkungan keraton Yogyakarta pada permulaan abad XX antara-lain :

1. Wayang "Tretes" yaitu wayang yang memakai brelian, adalah yasan almarhum Kangjeng Gusti Putro, dan Sri Sultan Hamengku

Buwono VIII. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII juga membuat wayang yang bergegel emas. Beliau berjasa pula dalam membuat yasan wayang-wayang kera yang berkepala sama dengan wayang raksasa bala tentara Prabu Maesosuro.

2. Wayang "Lokapala" adalah yasan Kangjeng Gusti Akhdiyat (Gusti Putra) putra Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
3. Wayang "Panji" adalah yasan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Wayang ini adalah gambar prajurit, tetapi hanya diambil yang berpangkat Panji saja.
4. Wayang "Gedog," wayang "Rama", wayang "Madya" dan wayang "Klitik", terdapat di Keraton Yogyakarta dan di Pura Paku Alaman.

Di luar Keraton sudah barang tentu terdapat pula wayang purwa yang dimiliki para bangsawan, kaum hartawan para dalang berikut gamelannya. Ada pula orang asing yang memiliki beberapa kotak wayang purwa yang lengkap.

Berhubung dengan beberapa hal maka ternyata bahwa beberapa buah wayang asli Keraton Yogyakarta pernah berpindah-pindah tangan ke luar jauh dari Keraton. Oleh karena itu, maka tidaklah mengherankan bahwa di sana-sini terdapat bentuk-bentuk wayang yang sempurna berkat contoh-contoh wayang yang sangat indah itu.

Pada permulaan hari Proklamasi, seni pedalangan Yogyakarta kelihatan lesu, tidak seperti pada jaman Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

6.4.1.5 Pencak Silat

Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal sebagai daerah pusat kebudayaan. Pencak Silat termasuk salah satu kebudayaan nasional, maka dengan sendirinya rakyat tertentu dari daerah ini merasa wajib memeliharanya agar jangan sampai pencak/silat itu lenyap dari muka bumi ini.

Walaupun pada jaman pemerintahan Colonial Belanda pencak/silat mendapat tekanan, namun kebudayaan Indonesia di antaranya pencak/silat tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia umumnya dan

rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya. Memang kebudayaan itu berurat berakar di dalam jiwa, dan jiwa itu tidak dapat mati karena tekanan dari luar. Demikianlah keadaan dan kehidupan pencak/silat di Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak jaman dahulu jaman Sultan Agung pada abad XVII, dan Pangeran Dipanegara abad XIX hingga sekarang abad XX ini, tetap hidup dan dimiliki oleh rakyat, bahkan pada abad yang terakhir ini perkembangan pencak/silat di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat pesat, baik dilihat dari sudut organisasinya, maupun sistem idiloginya.

Pada waktu pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, pencak/silat ditekan oleh pemerintah. Pemerintah Kolonial tahu, apabila rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mahir dalam ilmu pencak/silat tentu berbahaya bagi pemerintahannya. Setidak-tidaknya (sulit) untuk memerintahnya.

Kecuali pencak/silat itu berbahaya langsung bagi pemerintah Belanda, juga berbahaya secara tidak langsung karena melalui pencak/silat akan dapat tumbuh rasa cinta kepada kebudayaan sendiri. Apabila orang sudah cinta kepada kebudayaan bangsanya, maka dalam diri orang itu pun akan timbul rasa cinta kepada bangsanya. Kalau orang cinta kepada bangsanya, dengan sendirinya suka membela kepentingan bangsanya. Jikalau orang Indonesia suka membela kepentingan bangsanya barang tentu langsung atau tak langsung merugikan atau membahayakan pemerintah Kolonial Belanda.

Karena adanya tekanan, banyak rakyat takut, bahkan ada yang malah membantu Belanda dan membenci pencak/silat. Mereka itu sungguhpun bangsa Indonesia berpendapat seperti orang Belanda juga, merendahkan dan menghina pencak/silat, warisan nenek-moyangnya sendiri. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Oleh karena tekanan itu, bahkan insyaf, bahwa pencak-silat dan lain-lain kebudayaan Indonesia harus dihidupkan agar dapat mengadakan latihan dengan leluasa tidak ada gangguan dari pihak pemerintah Belanda.

6.4.1.6 Perkembangan Kesusastaan

Sesudah Hamengku Buwono V naik takhta kerajaan, kesusastaan Keraton mulai berkembang. Perjalanan kesusastaan di negeri mana

pun juga, selalu berhubungan dengan keadaan masyarakat. Kesusastaan lama di Yogyakarta, seperti kesusastaan lama di daerah lainnya juga, berkembang di dalam keraton. Apabila kita menyusun kembali riwayat Keraton Yogyakarta sejak lahirnya, masyarakat Keraton Yogyakarta selalu diselubungi oleh kepentingan politik. Pengacauan pemerintah Belanda terhadap Keraton Yogyakarta, tidak memberi kesempatan untuk berkembangnya kesusastaan.

Kesusastaan keraton berkembang dalam masyarakat tidak dengan dicetak, melainkan hanya kutip-mengutip, dan yang memiliki biasanya orang-orang yang masih ada hubungannya dengan raja atau kepala-kepala desa.

Sesudah Hamengku Buwono V naik takhta kerajaan kesusastaan berkembang. Karangannya yang terkenal ialah "Purwakanda" dan Hamengku Buwono VII mengarang "Serat Asal-Usul."

Dalam masa kebangkitan Nasional pengaruh bangsa Barat sangat terasa pula dalam kesusastaan daerah di Yogyakarta. Prosa-prosa yang berbentuk baru timbul, meskipun tidak banyak. Biasanya hanya terdapat dalam majalah dan merupakan cerita pendek, yang berbentuk roman. Isinya pun hanya bersifat propaganda. Orang memuja-muja tanah airnya. Buku-buku yang bersifat kesusastaan boleh dikata tidak ada lagi. Memang ada buku-buku kesusastaan Jawa yang terbit, tetapi biasanya bukan karangan orang Yogyakarta, melainkan Surakarta.

Setelah timbulnya bahasa Indonesia, perhatian kepada bahasa daerah menjadi berkurang. Tetapi kesusastaan masih tetap hidup dalam masyarakat. Kekuatan pengaruh buku-buku lama masih mendalam dalam masyarakat. Tetapi kesusastaan Jawa baru di daerah-daerah boleh dikata tidak bernafas.

Pengaruh Pura Paku Alaman terhadap perkembangan kesusastaan daerah Yogyakarta ini besar sekali. Ketika Keraton Yogyakarta terlibat dalam kegelapan kabut politik, kesusastaan di Pura Paku Alaman berkembang dengan suburnya. Bahkan sebenarnya peletak dasar pertama daripada kebiasaan yang bersifat kesenian dan kesusastaan dalam keraton adalah Pura Paku Alaman. P. Notokusumo (PAI) adalah penganjur kesusastaan Pura Paku Alaman. Kecuali itu masih ada figur-figur yang historis.

Pada masa Paku Alaman VI ada perubahan besar. Sekolah dijadikan masalah yang terpenting, sehingga kehidupan seni agak terdesak Paku Alaman VI tidak lama naik takhta, ia sakit setengah tahun kemudian wafat.

Sesudah Paku Alaman VI hasil kesusastraan dari Pura Paku Alaman tidak ada lagi, kehidupan kesusastraan mempunyai jalan yang lain. Kesusastraan hanya berkembang di antara keluarga Paku Alaman saja.

Kesusastraan Pura Paku Alaman ini, besar pula pengaruhnya terhadap masyarakat.

Selama penjajahan Belanda, setiap orang akan mengakui bahwa hidup bangsa Indonesia berpisah-pisah, tidak saja dalam arti kemasyarakatan, namun juga dalam arti politik dan kebudayaan. Kepulauan-Kepulauan Nusantara terdiri dari beribu-ribu pulau yang satu sama lain dipisahkan oleh laut. Tanahnya terdiri dari pegunungan-pegunungan, sehingga ini menyukarkan hubungan lalu-lintas bagi penduduknya. Dengan demikian maka asosiasi, bahkan asimilasi antara kebudayaan daerah yang satu dengan lainnya tak gampang terlaksana. Inilah pula yang menyebabkan adanya perbedaan bentuk-bentuk corak-corak dan isi antara kebudayaan daerah satu dengan lainnya. Berkat majunya teknologi modem hubungan melalui pos telegraf, telepon, radio, televisi, hubungan kapal laut dan udara, dan lain-lainnya menjadi lancar. Maka untuk menciptakan kesatuan yang kokoh kuat yang terkandung dalam tiap-tiap kebudayaan daerah perlu adanya pengetahuan tentang kebudayaan daerah itu. Hal ini tidak hanya penting untuk menjernihkan akan tetap adanya kebudayaan-kebudayaan daerah yang lama dan yang bernilai tinggi, namun juga untuk menjamin kelangsungan antara jaman lama dengan jaman baru atau konvergensi antara keduanya. Demikianlah dikemukakan Ki Hajar Dewantara.

Kebudayaan yang berkembang di seluruh daerah Indonesia itu tidak seluruhnya peninggalan nenek-moyang kita, tetapi berkembang pula bentuk-bentuk kebudayaan baru, yang tidak merupakan lanjutan langsung dari kebudayaan-kebudayaan daerah, karena merupakan ciptaan-ciptaan baru. Ciptaan-ciptaan baru ini kebanyakan berasal dari

atau dapat pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan. asing, baik dari Eropa, Amerika maupun Asia, yang kemudian bercorak warna Indonesia.

Masuknya orang-orang asing ke Indonesia, membawa pula kebudayaannya sehingga menimbulkan corak-corak dan bentuk-bentuk baru yang menyelubungi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh itu dapat dilihat dalam tata-cara hidup mereka, cara berpakaian, cara bergaul, cara makan dan pula dalam lapangan kesenian pemakaian onot balok yang kemudian diambil oleh mereka yang telah mendapat pendidikan Barat. Saluran kebudayaan asing tersebar di kalangan masyarakat terutama mereka yang telah maju melalui pendidikan di sekolah-sekolah.

Di antara mereka yang telah mendapat pengaruh asing itu ada pula yang kurang memperhatikan kebudayaannya sendiri. Kebudayaan kaum Kolonial Belanda yang menjajali bangsa Indonesia dalam waktu yang cukup lama itu hampir-hampir menghancurkan kebudayaan kita.

Di antara kita ada yang lupa daratan dan tenggelam dalam lembah kehidupan secara Barat, menganut dan meniru kebudayaan mereka, namun masih banyak orang yang menyadari pentingnya memelihara kebudayaan kita sendiri, seperti Ki Hajar Dewantara. Ia selalu memperingatkan bangsa Indonesia di dalam menanggapi kebudayaan baru dari asing itu, agar kita jangan hanya "foto copy" belaka dari kebudayaan garat itu. Tetapi kebudayaan asing harus diseleksi mana-mana yang dapat diadapkan di Indonesia. Konvergensi kebudayaan kita dengan kebudayaan asing harus merupakan kebudayaan yang bernilai dan bercorak serta berjiwa nasional. Dalam pada itu berulang-ulang pemimpin pusat Taman Siswa menganjurkan pemeliharaan kebudayaan daerah. Sebagai contoh untuk Jawa Tengah pada umumnya, khususnya untuk Yogyakarta, dimulai dengan memelihara segala bentuk kebudayaan yang bernilai tinggi seperti bahasa dan kesusastraan daerah, seni suara, baik yang bersifat vokal maupun instrumental. Demikian juga seni tari, seni lukis (membatik dan menyungging sejarah dalam bentuk "babad" dan kesenian drama wayang kulit, dan wayang orang), baik yang masih dipelihara dalam keraton maupun yang masih hidup di kalangan rakyat dan lain

sebagainya. Untuk itu diperlukan bantuan orang-orang yang ahli. Almarhum Raden Panji Jayapranoto dari Pura Paku Alaman waktu itu menuntun pelajaran bahasa Kawi dan lagu-lagu klasik (tembang gede, tembang madya, dan tembang macapat).

Pimpinan pelajaran gending, wayang orang, dan tari-tarian, teristimewa tari-tarian bedaya dan srimpi, diserahkan kepada pimpinan-pimpinan "Krida Beksa Wirama", yaitu Pangeran Suryadiningrat, Pangeran Tejakusuma dan pembantu-pembantunya. Pada waktu itu Taman Siswa merupakan satu-satunya perguruan yang memasukkan pelajaran tari bedaya, dan srimpi secara sistimatis dengan ijin Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

Untuk kepentingan tersebut Taman Siswa sudah sejak berdirinya tahun 1922 menyiapkan gamelan dan "pendapa agungnya" guna memelihara suasana yang kultural dan klasik secara "integral."

Ternyata kesenian Jawa berpengaruh pula terhadap orang-orang asing. Beberapa orang wanita asing datang ke Yogyakarta untuk mempelajari tari-tarian bedaya dan serimpi (di bawah tuntunan "Krida Beksa Wirama") Pernah Taman Siswa kepondokan Mrs. Swaminadan dengan putrinya Miss Mrinalina dan Tuan Santi Dewa Gose, (guru seni Shanti Niketan). Wanita-wanita tersebut diatas sebenarnya merupakan tamu Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dan Sri Mangkunegoro VII. Miss Mrinali kemudian terkenal sebagai ahli tari yang sering mempertunjukkan tari-tarian Hindu baru

Demikianlah pengaruh timbal-balik antara kebudayaan dan kesenian asing dengan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia khususnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

6.4.2 Pendidikan

Berdasarkan penyelidikan sebelum tahun 1900 di dalam dan di luar kota Yogyakarta, telah ada Sekolah Rakyat, tetapi tidak dapat diketahui dengan pasti, bilamana dan oleh siapa sekolah-sekolah rakyat didirikan, dan seberapa tinggi dan luasnya daftar pelajaran (leerplan)-nya.¹⁷⁾

Pendidikan yang berlaku di Yogyakarta pada masa lampau berupa pendidikan kesejahteraan rumah-tangga, atau dengan kata lain, pendidikan berpusat pada kesejahteraan dan keutuhan hidup bersama antara ibu dan bapak. Telah mejadi adat kebiasaan yang turun-temurun bahwa ibu dan bapaklah yang bertanggung-jawab atas segala hal ikhwal kehidupan anak-anaknya. Dengan adanya kebiasaan itu para ibu dan bapak merasa harus bertindak sebagai contoh (teladan) untuk anak cucu dan keturunan mereka selanjutnya.

Apabila terjadi perselisihan antara ibu dengan bapak bagaimana juga "udara panas" itu tetap merupakan rahasia besar bagi anak-anaknya, hingga di masa anak-anaknya tidak tampak tanda-tanda bahwa ibu atau bapaknya sedang dalam keadaan berselisih. Sehari-hari anak-anaknya melihat keadaan dalam suasana damai dan tenang. Cahayanya muka sang ibu senantiasa memperlihatkan setia dan hormat kepada sang Suami sebaliknya sang Bapak tidak ada terselip tingkah laku yang garang, dan tidak terdengar sepatah kata pun bahasa yang melanggar kesopanan terhadap sang ibu. Sudah menjadi kebiasaan dalam tiap-tiap rumah-tangga bahwa kaum ibu itu merasa wajib melayani segala kemauan/keperluan sang Suami, lagi pula berhati-hati menjaga kehormatan rumahtangga yang menjadi tanggung-jawabnya.

Suasana rumah-tangga yang dilukiskan di atas itu, menjadi kebiasaan pada tiap-tiap rumah-tangga yang tertib dan memperhatikan kepentingan pendidikan keluarganya, karena sungguhpun di masa itu kita masih belum menginjak dunia modern, tetapi pengertian bahwa hidupnya merupakan contoh dan guru lahir dan batin kepada anak-anaknya sudah mendalam.

Unsur-unsur atau dasar pendidikan ke arah perdamaian rumah-tangga adalah caranya membentuk jiwa calon-calon ibu dan calon-calon bapak pula diketahui pula.

Bagi Calon-calon Ibu (gadis-gadis)

Sejak remaja para gadis di kota Yogyakarta dari segala lapisan masyarakat, selalu mendapat nasihat dan petuah-petuah tentang kewajiban kaum ibu yang harus *bekti-laki* (berbakti kepada suaminya)

karena hanya dengan jalan itu saja mereka bisa mendapatkan kebahagiaan hidup.

Guru laki, berarti sang Suami dimisalkan, sebagai gurunya, yang wajib diturut segala kata dan petunjuknya. Sehari-hari sang Istri melayani keperluan suami.

Pada umumnya sang ibu mempunyai sumber penghidupan sendiri, yaitu menjual-beli di pasar, membuka warung bahan makanan, membatik, dan lain-lain. Sungguhpun demikian mereka tidak lupa mendidik anak-anaknya, terutama dalam hal-hal yang bersangkutan dengan sumber mata-pencaharian.

Bagi Calon-calon Bapak

Mata pencaharian orang laki-laki pada umumnya menjadi hamba Keraton, Paku Alaman atau kepada para Pangeran. Inilah sebabnya titik berat pendidikan tentang "Tata-krama" (kesopanan) Jawa diberikan kepada anak laki-laki.

Lain daripada itu, pemuda-pemuda dipimpin ke arah pekerjaan lain yang kelak akan menjadi pokok penghidupannya, seperti menjadi tukang batu, tukang kayu, tukang blek, pandai emas, pandai besi, tukang cat, tukang kulit, tukang jam, tukang payung, gemblak (mengerjakan kuningan loyang perunggu), sayang (mengerjakan tembaga) niyogo, dan lain sebagainya.

Di samping itu umumnya pemuda-pemuda dibiasakan menguasai hawa nafsu dengan jalan mengurangi makan dan tidur.

Pendidikan kerja berjalan terus

Bagi anak-anak perempuan (gadis-gadis) nasihat-nasihat ibu-bapak merupakan pendidikan rumah-tangga. Semuanya dijalankan dengan tertib tetapi keras. Anak-anak perempuan diharuskan selalu membantu pekerjaan ibunya menjalankan urusan rumah-tangga, serta urusan yang berkenaan dengan mata-pencaharian ibunya. Pada waktu itu belum banyak anak perempuan yang pergi ke sekolah.

Anak perempuan dan anak laki-laki yang sudah agak besar, diberi kewajiban mengasuh adik-adiknya. Pendidikan kepada anak laki-laki tidak jauh bedanya dengan sifat pendidikan yang diberikan kepada

anak perempuan. Kepada anak laki-laki diberi kewajiban juga tentang kebersihan rumah-tangga, misalnya menyapu lantai, mengatur dan membersihkan perkakas rumah, menyapu halaman pada waktu pagi dan sore, mengambil air memelihara *karang kitri* (pohon-pohonan yang berbuah). Kecuali itu masih ada lagi yang harus dan pasti dijalankan setiap hari, ialah membuat air teh untuk bapaknya, atau sewaktu-waktu ada tamu. Setelah kewajiban di waktu pagi itu selesai, anak laki-laki pergi ke sekolah untuk, menuntut ilmu pengetahuan umum. Pulang dari sekolah telah disediakan makan sekedarnya berupa nasi dan sayur. Selanjutnya membantu pekerjaan ayahnya atau mengasuh adik-adiknya.

Pendidikan Agama

Sebelum tahun 1900 masyarakat di kota Yogyakarta sebagian besar merupakan masyarakat Islam, meskipun masyarakat itu terpisah menjadi dua golongan yaitu santri putihan dan santri abangan, tetapi mereka bersatu juga apabila ada kepentingan peralatan agama. Yang disebut santri putihan (disingkat santri) umumnya ialah yang menjalankan sholat lima waktu sehari. Yang tidak demikian disebut santri abangan. Oleh karena memeluk agama Islam, tidak mengherankan apabila hampir seluruh kampung terdapat langgar yang dipergunakan untuk :

1. Menunaikan sembahyang.
2. Tempat pengajian yang pertama ialah mulai huruf Hijaiyah (alfabet) hingga Al-Quran.
3. Amal makruf nahi mungkar.
4. Hukum batal, haram, najis.

Pada umumnya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan di waktu habis Magrib berada di langgar menurut pelajaran yang berhubungan dengan agama, sampai waktu sembahyang Isya.

Guru-guru Agama

Tiap malam Jum'at tidak diberikan pelajaran (libur) anak-anak hanya mengulangi pelajaran yang lalu. Yang memberi pelajaran umumnya Lebai (Kaum) di kampung itu. Maka yang belajar di langgar

langgar diwajibkan menyokong paling sedikit satu sen tiap-tiap sepekan. Uang itu diberi nama dengan Urunan tukon lengo, karena uang sokongan itu untuk membeli minyak tanah, untuk pelita, penerangan pada waktu memberikan pelajaran malam hari, sedangkan Lebai atau Kaum yang menjadi Guru Pengajian tidak memungut uang sepeser pun.

Pekerjaan itu dipandang sebagai kewajiban suci.

Pendidikan Rasa Cinta dan Kasih Sayang

Untuk pendidikan rasa cinta dan kasih sayang ini dongeng mempunyai peranan penting sebagai alat pendidikan. Pada saat hampir sembahyang Isya pengajian ditutup, anak-anak pulang dengan gembira, ditengah jalan mereka menghafalkan *nazam* (lahu-lagu) dalam bahasa Arab atau bahasa Jawa. Isi lagu itu mengandung petuah bagi para putra dan putri, untuk kehalusan budi pekerti berdasarkan sari-sari agama Islam.

Setengahnya ada pula yang menyanyikan lagu mocopat (tembang).

Pada waktu akan tidur, anak-anak berkumpul di atas balai-balai panjang, tempat tidur mereka bersama. Sebelum tidur sering kali Ibu/BAPaknya menceritakan dongeng-dongeng yang berisi didikan budi-pekerti. Dongeng itu bersifat cerita pendek. Cerita kancil dipergunakan sebagai alat pendidikan perkembangan akal. Dongeng roman, Raden Putro, sebagai alat pendidikan budi-pekerti. Dongeng-dongeng sejarah Kyai Ageng Selo Kyai Ageng Pengging, Jaka Tingkir dan lain-lain untuk memperdalam adat-istiadat sopan-santun dan bahasa.

Pendidikan Berlagu

Budi-pekerti dan pengetahuan kanak-kanak dapat diberikan lewat rangkaian kata-kata yang dilagukan, belum memerlukan isi, hanya tidak terdapat maksud yang menggambarkan asrama, dan tidak terselip pula kata-kata yang tidak sehaat. Dalam ikatan itu terjalin pilihan kata-kata yang sudah dimengerti oleh alam pikiran kanak-kanak. Ibu/Bapak berlagu lebih duhulu sebagai contoh, lalu disusun anak-anaknya menyanyi bersama. Adapun lagu-lagu yang diajarkan dipilih dari yang

mudah, yang berbait beberapa baris saja. Alat yang dipergunakan menyampaikan pendidikan ini berupa temabang Mocopat; pocung Gambuh, Megatruh, Mijil, Pangkur dan sebagainya.

Kecuali alat-alat yang telah disebut di muka, pendidikan diambilkan juga dari adat-istiadat dan pengalaman sejarah.

Orang-orang yang menjadi pegawai Keraton Kadipaten Paku Alaman, tidak mendapat gaji berupa mata uang, tetapi mendapat pemberian sebidang tanah dan sawah yang hasilnya menjadi pokok penghidupan mereka.

Berhubung dengan perkembangan perusahaan perkebunan asing didaerah Yogyakarta, sebagian besar sawah dan ladang di daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kadipaten Paku Alaman telah disewa oleh perusahaan asing, untuk perkebunan tom (nilai), danlain-lain. Hal ini ada hubungannya dengan Undang-undang Hak tanah tahun 1870. Makin lama perusahaan asing itu memerlukan pegawai yang terdiri dari bangsa Indonesia, dengan gaji yang serendah-rendahnya.

Keadaan itu berpengaruh besar kepada masyarakat Yogyakarta pada umumnya, penduduk kota pada khususnya, karena pengusaha-pengusaha itu kemudian minta bantuan kepada Pemerintah Kesultanan dan Kadipaten Paku Alam :

- I. Supaya Pemerintah Kesultanan mendirikan sekolah-sekolah di dalam dan di luar kota Yogyakarta, segala ongkos-ongkos dipikul oleh pengusaha-pengusaha itu.
- II. Pada thp-tiap rumah-tangga dalam kota Yogyakarta supaya diberi pelajaran mengenal huruf Jawa dan angka seperti halnya pelajaran pada sekolah Tamanan dan sekolah Madyapenganti. Dengan demikian maka kota Yogyakarta mulai timbul sekolah-sekofaii pairtikelir.

Di kampung umumnya ada beberapa orang yang pandai membaca dan menulis. Mereka itu dengan sukarela dan penuh pengabdian memberi pelajaran kepada para jejak yang ingin belajar. Waktu belajar diadakan pada waktu yang terluang, umumnya di waktu sore hari, kira-kira dimulai jam delapan malam.

Kebanyakan guru-guru kampung itu terdiri dari tingkat Mantri ke atas, dari pegawai Keraton reh Kadipaten, Kawedanan Kejaksaan dan Kawedanan Punakawan. Bagi daerah Kadipaten Paku Alaman pejabat Guru Kampung itu terdiri dari pegawai-pegawai Kawedanan Kejaksaan dan para bangsawan, resminya disebut golongan Kanca Rasika.¹⁸⁾

Pendapatan Guru Kampung itu bila dipandang dengan kacamata kebendaan, hampir tidak ada artinya. Meskipun demikian mereka bangga karena tiap hari (Senin dan Kamis) para Guru Kampung itu diperkenankan menghadap ke Keraton atau ke dalam Pura Paku Alaman. Mereka membutuhkan pengiring yang banyaknya setingkat dengan pangkatnya. Pengiring itu harus terdiri dari orang-orang yang sopan, tangkas, dan tahu akan tata-susila. Inilah yang menyebabkan mereka berusaha untuk mendapatkan pengiring dengan jalan membuka pelajaran pemberantasan buta huruf

Demikian pula pada hari pesowanan besar (pada hari Gerebeg tiga kali tiap-tiap tahun dan hari *tingalan* atau hari Jumenengan Dalem. Guru Kampung itu sangat membutuhkan pengiring. Sebaliknya, rakyat biasa pun sangat ingin turut menghadap ke Keraton, untuk mengetahui keadaan pasowanan. Faktor inilah yang mendorong Guru-guru Kampung rajin memberi pelajaran tulis menulis huruf Jawa dengan cuma-cuma, dan rakyat terutama pemuda-pemudanya rajin belajar tulis-menulis juga.

Dengan adanya Guru-guru Kampung itu di dalam kota Yogyakarta, dengan tidak terasa semua lapisan masyarakat turut mengenyam pendidikan budi-pekerti, rasa kebangsaan, dan rasa tanggung-jawab bersama atas kesejahteraan masyarakat. Dari satu pihak kepada pihak yang lain, tertanamlah saling pengertian, artinya dari pihak yang tua, insaf akan tuannya, pihak yang muda selalu menunjukkan hormat dan baktinya. Dan pihak bangsawan dengan riang memberi perlindungan kepada yang lemah.

Pendidikan pekerjaan tangan bagi para putri bangsawan diselenggarakan dalam Keraton (istana) dan Pura Paku Alaman. Pendidikan kerja bagi para putri Raja dan para sentana (kaum kerabat raja-raja), ini meskipun tidak nampak tegas, karena berjalan dengan

cara saling memimpin antara para dayang-dayang (biti-bitu perwara). Pendidikan kerja itu biasanya di bawah pimpinan seorang sentana putri yang telah berusia lanjut dan yang telah banyak pengalamannya. Macam pendidikan kerja yang diutamakan untuk kepandaian putri, antara-lain :

1. Membatik kain, mulai dari membasuh kain putih, ngloyor ngemplong milipit, dan lain-lain. Setelah itu mulai membatik, dengan petunjuk-petunjuk dari pemimpinnya atau dari kawan-kawannya yang sudah berpengetahuan.
2. Memotong dan menjahit baju sendiri.
3. Menyongket perhiasan-perhiasan, alat-alat rumah-tangga, yang terdiri dari kain. Semuanya itu adalah pendidikan untuk para putri bangsawan. Bagi wanita yang bukan golongan tersebut di atas, pendidikan pekerjaan tangan hanya terbatas membatik dan memotong pakaian saja.

Para gadis remaja (pemudi) kebanyakan umumnya mendapat pelajaran pekerjaan tangan dengan jalan membantu pekerjaan ibunya, terutama mengurus rumah-tangga, yang berhubungan pencaharian. keluarga antara lain cuci-mencuci, masak-memasak, merawat adik-adiknya, dan lain-lain.

Pendidikan rokhani

Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, sejak kecil umumnya mendapat didikan untuk mengendalikan hawa nafsu, dengan jalan; berpuasa pada tiap-tiap hari Senin dan Kamis juga pada hari kelahirannya; demikian juga pada bulan Puasa. Di samping itu bagi yang sudah dewasa, dibiasakan “kurang tidur” dengan jalan “masuk tidur setelah jauh malam” dan mereka bangun pagi-pagi benar.

Pendidikan pekerjaan tangan bagi para jejak, umumnya ditujukan untuk mengikuti keahlian orang tuanya. Inilah sebabnya maka sampai sekarang kita masih bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang sejak dahulu tetap dipegang oleh suatu keluarga, secara turun-temurun. Hanya para bangsawan pemuda Dan anak para pegawai Gubernemen yang mengambil langkah lain, untuk mendapatkan penghidupan baru.

Pengajaran Sekolah-sekolah asli di Yogyakarta.

Bersamaan dengan berdirinya keraton Yogyakarta pada tahun 1757 Masehi atau 1682 Jawa di dalam Istana didirikan bangunan gedung sekolah yang disebut "Sekolah Tamanan". Sekolah ini masih ada pada zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Adapun pendidikan dalam Pura Paku Alaman diberikan sendiri oleh Kangjeng Pangeran Notokusumo, berupa pelajaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu tata negara kepada para putera dan sentana.

Pada akhir abad 19, kira-kira 1892 Legiun (prajurit keraton) dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah pembubaran Legiun ini, atas kebijaksanaan KGPAА Paku Alam V, para putera santana Paku Alaman dapat diterima menjadi murid pada sekolah-sekolah Belanda, (Eerste Lagere School atau Twede Europeische School) yang dilanjutkan ke sekolah H B S. (Hogere Burger School) di Jakarta, dan selanjutnya ke Perguruan Tinggi di negeri Belanda.

Bagi anak-anak Pegawai Paku Alaman disediakan sebuah sekolah partikelir yang setingkat dengan sekolah Gubernemen yang ada di luar daerah Yogyakarta. Sekolah tersebut dibawah pimpinan Ngabei Wirohaksoro yang telah memperoleh ijazah Kweekschool di Probolinggo. Kecuali sekolah tersebut ada beberapa sekolah partikelir lainnya yang sengaja disediakan untuk anak-anak rakyat dalam daerah Paku Alaman.

KGPAА Paku Alam VII walaupun berpendidikan secara Barat tetapi berusaha mengembangkan kebudayaan dan kesenian peninggalan para leluhurnya. KGPAА Paku Alam VII selalu aktif dalam perkumpulan amal pengajaran "Neutrale Onderwijs Stichting". Ia menduduki jabatan ketua perkumpulan tersebut sampai wafatnya.

Pada akhir tahun 1900 di kota Yogyakarta hanya ada dua sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekolah semacam itu oleh khalyak ramai diberi nama Sekolah Gubernemen. Dua sekolah itu berderaiat sekolah kelas I dan II bertempat

1. Di Sri Menganti, gedung sekolah itli meminjam sebagian ruang Bangsal Traiumas, yang ada di antara regol Domopratoopo dalam Keraton (Istana Raja)
2. Di Pagelaran, bertempat di bangsa Pengapit sebelah Barat, di ruang Pagelaran, juga meminjam tempat seperti sekolah Sri Menganti tersebut di atas. Sekolah Pagelaran ini berderajat sekolah kelas II, disediakan bagi anak para pegawai menengah dan pegawai rendah.

Untuk membuat perbandingan bagaimana perkembangan pendidikan dan pengajaran di Yogyakarta sebelum tahun 1900 dengan setelahnya dapatlah disimpulkan secara garis besarnya sebagai berikut

Sebelum tahun 1900 dalam kota Yogyakarta ada dua sekolah asli (Tamanan dan Madyopenganti) dua sekolah Gubernemen (Sri Menganti dan Pagelaran) dua sekolah partikelir di daerah Paku Alaman enam sekolah partikelir di daerah Kasultanan. Jadi jumlah semuanya ada 12 buah sekolah. Para pelajar tamatan dari 12 sekolah itu pada umumnya merupakan pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Kasultanan dan Paku Alaman. Yang lain menjadi pegawai perusahaan milik asing karena mereka tidak mendapat tempat di dalam lingkungan pemerintah.

Riwayat Sekolah Kelas II sejak tahun 1901--1919.

Taraf pertama 1901.

Pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda dalam daerah karesidenan Yogyakarta, mulai memperbanyak sekolah kelas dua, bagi segala lapisan rakyat dengan tidak mengingat keturunan. Karena jumlah murid pada sekolah Pagelaran selalu bertambah timbulah masalah kekutangan ruangan dan guru.

Untuk menampung murid-murid didirikan dua sekolah lagi di kampung Margoyasan, dan Jetis.

Gedung sekolah Kelas II yang tertua di Yogyakarta milik Pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1901 di kampung Margoyasan, sehingga sekolah itu disebut Sekolah kelas II

No. 1 Margoyasan. Gedung ini terletak di jalan Wirogunan, sebelah utara rumah Penjara, termasuk dalam daerah Kadipaten Paku Alaman.

Kepala Sekolah dan guru-gurunya pindahan dari sekolah Pagelaran yang masih diketahui nama-namanya.

Kepala sekolah, bernama R. Atmosudiro yang kemudian diangkat menjadi Guru bahasa Jawa di Osvia Magelang. Penggantinya R. Suyitno Martaatmaja.

Guru Pembantu :

1. Somowidagdo
2. Sastrodikromo
3. R M Sukardi Prawirowinarso.

Adapun murid-murid sekolah itu terdiri dari:

- a. Sebagian besar pindahan dari Pagelaran.
- b. Sebagian kecil pindahan dari sekolah partikelir Jero Gede.
- c. Dan lainnya dari sekolah-sekolah partikelir yang lain.

Sekolah Kelas II nomor 2 di Yogyakarta.

Sekolah Jetis ini segala-galanya sama dengan sekolah Margoyasan. Sebabnya dianggap nomor dua karena Kepala Sekolah dan guru pembantunya, hampir seluruhnya dipindahkan dari sekolah Pagelaran. Kepala Sekolah yang pertama pada sekolah Jetis R Darmowinoto, yang sejak tahun 1912 diangkat menjadi Kepala Sekolah kelas I di Kintelan, sampai mendapat pensiun.

Taraf Kedua 1903.

Meskipun ditambah dengan berdirinya Sekolah kelas II no. 2, tetapi sekolah-sekolah partikelir tidak mengalami kemunduran.

Mulai tahun 1903 kota Yogyakarta mendapat tambahan sekolah kelas II no. 3, no. 4 dan no. 5. Tiga sekolah itu didirikan bersama-sama. Sekolah kelas II no. 3 ada di kampung Ngabean dengan nama sekolah Sekolah kelas II No. 3. Sekolah kelas II no. 4, ada gedung Sekolah kelas II no. 1 tersebut di atas, dan gedung Sekolah II no. 1 dipindahkan ke gedung baru, terletak di sebelah barat gedung lama.

Sekolah kelas II no. 4 itu biasa dikatakan orang Sekolah Paku Alaman, sedang Sekolah kelas II no. 1 tetap disebut orang Sekolah Margoyasan, sekolah kelas II no. 5 ada di sebelah timur plengkung

(pintu gerbang) Gading, sebab itu disebut Sekolah Gading. Sekolah ini merupakan sekolah pertama yang ada di sebelah selatan Benteng Keraton. Dengan adanya lima sekolah ini, sekolah-sekolah partikelir gulung tikar semuanya. Karena rakyat telah mengerti, bahwa sekolahh kelas II milik pemerintah itu lebih sempurna penyelenggaraannya.

Perlu diterangkan, bahwa sekolah kelas II no. 3, no. 4 dan no. 5, merupakan sekolah rakyat yang hanya berkelas 3 saja. Para murid yatig tamat pelajarannya mendapat tanda tamat belajar yang ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa. Pada tahun 1906 pelajarannya ditambah setahun lagi. belakangan ditambah lagi setahun, sehingga Sekolah sekolah kelas II di kota Yogyakarta semuanya sampai kelas 5.

Taraf ketiga, 1907 Lahirnya Sekolah Desa.

Pada masa pemerintahan Kg. Suhan Hamengku Buwono VII dalam daerah Karesidenen Yogyakarta mulai timbul Sekolah Kasultanan dan Sekolah Paku Alaman. Sekolah-sekolah ini didirikan di tiap-tiap kawedanan dan kapanewon di luar kota. Biarpun sekolah ini hanya sampai kelas III saja, tetapi merupakan tangga yang pertama bagi rakyat di luar kota, untuk menambah ilmu pengetahuan seperti kawan-kawannya yang ada di dalam kota.

Di Ibukota kabupaten. Wates, Bantul, Wonosari telah didirikan Sekolah kelas II dengan empat kelas.

Karena pengajaran pada sekolah tersebut di atas, hanya merupakan pengajaran rendah, maka guru-gurunya terdiri dari:

- a. Tamatan Sekolah kelas I dan Sekolah kelas II ditambah kursus ilmu guru 6 bulan, atau
- b. Yang berijazah Kweeling, atau
- c. Yang berijazah Guru - Bantu.

Guru-guru tersebut di atas mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri dan mendapat surat keterangan dari pemerintahnya masing-masing. Guru-guru Sekolah Kasultanan mendapat Piagam dari Pemerintah Kapatihan, ditanda tangani oleh Papatih Dalem. Guru-guru Sekolah Paku Alaman mendapat piagam dari Pemerintah Kadipaten Paku Alaman. ditanda tangani oleh Kangjeng Pangeran Arya Notodirejo.

Peraturan gaji Guru Sekolah Kasultanan dan Paku Alaman sama, berdasarkan ijazah. Penjabat Kepala Sekolah bergaji F 15, Guru-guru pembantu bergaji F 7,50 ialah untuk mereka yang berijazah Sekolah Kelas I dan II. Tetapi mereka yang berijazah Kweekeling mendapat tambahan F. 2,50 tiap-tiap bulan, sedang yang berijazah Guru-Bantu mendapat tambahan F. 5,- tiap-tiap bulan.

Taraf Keempat dan Selanjutnya.

Pada tahun 1919--1942 jumlah Sekolah kelas II di dalam kota Yogyakarta ada 13 buah, terbesar di seluruh Kota. Tiap-tiap sekolah itu terdiri dari lima kelas. Kebanyakan kelas I dan II dua kelas (paralel) Untuk jelasnya nama dan nomor sekolah itu sebagai berikut :

Sekolah kelas II	No. 1.	di Margoyasan
	" 2.	di Jetis
	" 3.	di Ngabean
	" 4.	di Paku Alaman.
	" 5.	di Gading
	" 6.	di Sasrawijayan
	" 7.	di Tamansari
	" 8.	di Lempuyangan
	" 9.	di Kintelan
	" 10.	di Kranggan
	" 11.	di Tegalpanggung
	" 12.	di Timuran
	" 13.	di Panembahan

Nyatalah bagi kita bahwa kota Yogyakarta pada zaman penjajahan Belanda mempunyai Sekolah Kelas II 13 tempat banyaknya, dan sebuah Sekolah kelas I di Sri Menganti, jumlah ini tetap saja pada zaman penjajahan Jepang 1942--1945.

Sekolah Rakyat Berbahasa Belanda.

Hollands Inlandsche School (HIS)

Pada tahun 1909 di kota Yogyakarta lahirilah sekolah rakyat yang berkelas enam yang mulai kelas 3 ke atas diberi pelajaran bahasa Belanda. Sekolah itu disebut *Eerste Inlandsche School*, bertempat di kampung Kintelan. Tamatan sekolah ini mudah sekali diterima

menjadi pegawai negeri di pelbagai kantor. Mereka mendapat penghargaan lebih tinggi daripada murid tamatan Sekolah kelas II Akibatnya rakyat Yogyakarta tertarik pada pengajaran bahasa Belanda. Karena dorongan perkumpulan Budi Utomo pada tahun 1915, pemerintah Hindia Belanda memperbanyak berdirinya sekolah-sekolah rendah yang bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Sekolah ini bernama *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) yang masa belajarnya 7 tahun. Gedung HIS ini bertempat di Jetis, sekarang Gedung SPO Negeri. Kemudian *Erste Inlandsche School* di Kintelan dihapuskan, dirubah menjadi Sekolah kelas II.

Kaputran School, HIS yang kedua, Schakel School,

Sekolah Sri Penganti, yang berderajat *Eerste Inlandsche School* pada tahun 1915 juga menjelma menjadi HIS dengan nama Keputran School, dan berpindah tempat ke gedung baru, di sebelah timur Pagelaran.

Adanya sebuah HIS di Jetis dan Keputran School masih belum mencukupi kebutuhan rakyat. Kira-kira pada tahun 1920 di kota Yogyakarta dibuka lagi sekolah HIS yang mula-mula bertempat di Bintaran, di belakang gereja Katolik, kemudian pindah ke pojok beteng wetan di kampung Danudiningratan, yang terkenal dengan nama HIS Tungkak.

Untuk mencukupi kebutuhan anak-anak yang tidak mendapat tempat di HIS atau anak-anak dari Sekolah kelas II yang ingin belajar bahasa Belanda ditampung oleh *Neutrale Onderwijs Stachting*. Lama pelajarannya 4 tahun. Sekolah ini menerima anak-anak murid sekolah kelas II, yang sudah duduk di kelas 3. Jadi jumlah pelajarannya 3 tahun ditambah 4 tahun atau 7 tahun, sama dengan lama pelajaran di HIS.

Schakelschool didirikan kurang lebih pada tahun 1930 di Jalan Semaki. Sekarang gedung sekolah itu dipergunakan untuk asrama Putera Ladang.

Sekolah Tinggi Agama Katolik.

Sejak permulaan misi Katolik telah memberi kesempatan kepada orang Indonesia untuk menjadi Imam (Pastur). Sebelum tahun 1936

tiap orang Indonesia yang mempunyai keinginan menjadi Imam terpaksa meneruskan pelajarannya di luar negeri dan masuk suatu Orde. Namun makin lama makin terasa perlunya menambah jumlah Pastur bangsa Indonesia sehingga didirikanlah suatu sekolah Theologie sendiri di tanah air ini. Akibatnya putera Indonesia yang berminat menjadi Imam dan tidak ingin masuk suatu orde, dapat meneruskan dan menyelesaikan pelajarannya dengan tidak meninggalkan tanah airnya. Untuk keperluan inilah pada tahun 1936 didirikan di Muntiran Perguruan Tinggi Agama Katolik dengan nama Seminari Agung.

Pada tahun 1938, Seminari Agung ini dipindahkan dari Muntiran ke Mertayudan dan pada tahun 1940 dipindahkan lagi ke jalan Code 2 Yogyakarta. Sampai tahun 1952 Seminari Agung telah menghasilkan 43 orang Pastur Indonesia.

Seminari Agung adalah kepunyaan Vikariat Semarang, yang bekerja di bawah pimpinan Vikaris-Apostolik Semarang, almarhum Mgr. A. Sugiyopranoto. Akan tetapi karena banyak Vikariat-vikariat lain yang belum mempunyai Perguruan Tinggi semacam ini, maka calon-calon Imam (Pastur) dari lain-lain tempat kerap kali dikirim ke Yogyakarta.

Pelajaran dari Seminari Agung dibagi atas dua bagian :

1. Philosophia.
2. Theologie.

Dalam pelajaran philosophia masih terbagi lagi ialah Cosmologia, sychologia, Ethica, Theodica, Biologia, dan Antropologia.

Bagian Theologia itu empat tahun lamanya, terdiri dari mata pelajaran: Theologia, Moral, Hukum, Kitab suci, Sejarah Agama, Pengertian tentang Agama lain, Agama Islam, Hindhu, Budha.

Jadi pelajaran di Seminari Agung dapat diselesaikan dalam waktu enam tahun. Sesudah tamat seorang siswa dapat ditasbihkan menjadi imam yang sama derajatnya dengan Pastur-pastur yang lain.

Beberapa Keterangan tentang Sekolah-sekolah Missi Dalam Kotamadya Yogyakarta.

Seminari Agung : Perguruan Tinggi khusus dimaksudkan untuk mendidik calon Imam Katolik selama 6 tahun :

1. Sebagai Perguruan khusus, maka seluruh penyelenggaraan dan pimpinannya berada di bawah naungan Pembesar Gereja Katolik, dan merupakan usaha sesuatu badan partikelir.
2. Seminari Agung dimulai dalam tahun 1936, sementara di Muntidan, atas perintah instansi yang berwajib ketika itu, yaitu Vikaris Apostolik Uskup di Semarang.
3. Kuasa tertinggi atas Seminari Agung terletak pada Vikaris Apostolik/Uskup Semarang, sedang Seminari dipimpin oleh seorang Proeses Seminari dibantu Mahaguru-Mahaguru Seminari, yang memangku jabatan Proses Seminari, pada waktu ini, ialah Prof. Dr. H. E. Rudding S.Y.

Sebelum perang Dunia ke II keadaan pada tanggal 1 Maret 1942.

1. Sekolah-sekolah Missi diselenggarakan oleh Pimpinan Missi Katolik, dalam hal ini Uskup Daerah (dulu Vikaris Apostolik di Jakarta sejak tahun 1940 di bawah Vikaris Apostolik di Semarang).
2. Hanya yang mengusahakan macam-macam sekolah adalah beberapa badan Missi atas persetujuan Uskup setempat.
3. Di Kotamadya Yogyakarta mulai dibuka sekolah Missi dalam tahun 1917.

Keadaan sekolah pada tanggal 1 Maret 1942

	Bersubsudi.	Tak bersubsidi
Sekolah Frobel	-	2
Volk/Vervogschool	16	-
E.L.S.	2	-
H.I.S	3	-
H.C.S	-	1
Scjakel School	1	1
Kleinhandel School	1	-
C.V.O.	2	-
M.U.L.O	2	-

Adapun sekolah-sekolah yang diusahakan Yayasan B.O.,B. K,R.I. (Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia) dan Perguruan Islam (P.I.R.I.) baru diselenggarakan setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah.

Perhatian K.H. Ahmad Dahlan terhadap dunia pendidikan tidak sedikit. Hal ini dibuktikan dengan perhatian dan kegiatan beliau baik sebelum maupun sesudah Muhammadiyah berdiri. Bahkan sesudah berdirinya Muhammadiyah, perhatian dan kegiatan beliau dalam lapangan pendidikan lebih diperhebat. Hal ini dapat dimengerti mengingat bahwa lapangan pendidikan adalah memegang peranan yang penting sekali dalam mempersiapkan kader-kader Islam yang terdidik dan terlatih.

Karena itu sebelum Muhammadiyah berdiri ia sering mendatangi sekolah-sekolah seperti Kweekschool di Jetis, sekolah Pamong Praja (Osvia atau Mosvia) di Magelang dan lain-lain.

Sebab menurut pendapatnya murid-murid Kweekschool ini kelak akan mempunyai murid, sedangkan polisi dan Pamong Praja itu kelak akan mengatur masyarakat, karena itu kepada mereka harus dimasukkan pelajaran dan jiwa ke Islam yang sedalam-dalamnya. Bahkan sesudah Muhammadiyah berdiri, iapun menyelenggarakan pengajian yang diberi nama "*Fathul-Ansorwa Miltahus-Sa'adah*," untuk membimbing pemuda-pemuda yang berumur ± 25 tahun supaya gemar beramal kebaikan dan berani menjadi kader yang membela Muhammadiyah. K.H. Ahmad Dahlan mendidik anak-anak dengan penuh kebijaksanaan. Mula-mula diikutinya segala kemauan dan keinginan mereka, seperti pergi berpiknik bermain musik dan sebagainya, kemudian sedikit demi sedikit dimasukkanlah pendidikan Islam, sehingga akhirnya mereka menjadi pemimpin dan orang-orang yang soleh. Di saat pemerintah Belanda jatuh Muhammadiyah Daerah Yogyakarta mempunyai sekolah yang bersubsidi.

S.R. III (Sekolah Dasar)	100 buah
S.R. IV/V (Sekolah kelas II)	20 buah
HIS	1 buah
Kleinhandel School - MULO	1 buah

Di samping sekolah yang bersubsidi, masih ada beberapa sekolah yang tiada bersubsidi :

HIS	10 buah
Schakelschool	5 buah
MULO	3 buah
HIK	1 buah

Setelah delapan tahun mengenyam kemerdekaan jumlah Sekolah Muhammadiyah dalam daerah Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Bustanul - Athafl (Taman kanak-kanak)	7 buah
S.R. III	5 buah
S.R. VI (Bersubsidi)	10 buah
S.R VI (Masih mendapat sokongan)	10 buah
S.M.P. "Putera" dan "Puteri" (bersubsidi)	2 buah
S.M.P. SOS	3 buah
S.M.A. (Pagi) bagian A dan B	1 buah
S.M.A. (Sore) bagian A. B. dan C	1 buah
S.G.A.	1 buah
Mualimat (Sekolah Guru Agama "Puteri")	1 buah
Mualimin (Sekolah Guru Agama "Putera")	1 buah
Darul Ulama (Sekolah Menengah Agama)	1 buah
Sekolah Pertukangan bagian kayu	1 buah
Sekolah Pertanian	1 buah

SGB I Negeri Yogyakarta.

SGB I Yogyakarta adalah salah satu sekolah yang tertua di Indonesia dibuka tanggal 7 April 1897 yang semula bernama Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijser, terkenal dengan nama Sekolah Guru B II Yogyakarta. Kweekschool di Yogyakarta itu pindahan dari Cilacap.

SGB II Puteri

Pada 7 Nopember 1942 Sekolah Guru B. puteri didirikan di Jetis, dengan nama Sekolah Guru Perempuan. Sekolah dengan asramanya mengambil tempat di gedung yang sekarang dipakai oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Gajah Mada.



pada Normal cursus tersebut, mereka yang telah berijazah Kweekeling. Kursus ini pertama dipimpin oleh almarhum M. Budiarjo yang dibantu para Guru keluaran Kweekschool. Pada tahun 1909 ditambah menjadi 3 buah kursus, dipimpin oleh seorang Guru bangsa Belanda bernama A.H. Waamaar dan A. Van Pic. Dalam perang Dunia I kursus ini dihapuskan.

Sekolah-sekolah Partikelir bahasa Belanda.

Pada tahun ± 1909 almarhum R.M. Rio Gondoatmojo, membuka Sekolah Partikelir yang khusus memberi pelajaran bahasa Belanda.

Sekolah ini dimulai pada jam 4.00 petang hari sampai jam 06.00 pada tiap-tiap hari. Kebanyakan para muridnya terdiri dari putera-putera bangsawan dan orang-orang yang berpangkat.

Sebelum ada sekolah tersebut di atas, telah ada sekolah Partikelir bahasa Belanda, yang dirikan oleh seorang pensiunan Opsir Belanda, yang bernama Bretty. Sekolah ini ada di Lempuyangan Wangi.

Pada tahun 1912 dibuka sekolah bahasa Belanda Partikelir lagi oleh seorang Belanda bernama Landauw, bertempat di Klitren Kidul.

Oleh karena Bretty dan Landauw meninggal dunia, maka kedua Sekolah Partikelir Belanda itu lalu ditutup.

Atas usaha R.M. Suryopranoto, di Bintaran didirikan sekolah Adhi Darmo, berdasar Islam.

Sekolah-sekolah Lanjutan.

Karena usaha dan desakan Organisasi-organisasi Rakyat, maka di Yogyakarta didirikan beberapa Sekolah Lanjutan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sampai pada Perang Dunia I untuk Sekolah Lanjutan dari HIS., ELS dan HCS disediakan sekolah MULO, HIK, dan TS. Untuk tamatan dari MULO disediakan sekolah AMS. bagian Sastra-Barat dan Timur, dan bagian Ilmu Pasti. Pada akhir tahun 1941, sampai permukaan tahun 1942 didirikan Hogere School, untuk anak-anak Belanda. Sekolah-sekolah lanjutan tersebut di atas sebagian besar berada di sekitar Kota Baru.

Untuk tamatan kelas II disediakan Ambachtsschool (Sekolah pertukangan rendah). Normaalschool, sekolah Guru sekolah kelas II dan Sekolah Dagang Kecil.

Bagi anak perempuan tamatan HIS disediakan. Huishschool (Sekolah Kepandaian Puteri) yang sekarang ada di Jalan Lempuyangan Wangi.

Sekolah Lanjutan Partikelir.

Di samping sekolah-sekolah lanjutan yang didirikan oleh Pemerintah, maka beberapa organisasi Rakyat pun berusaha mendirikan sekolah-sekolah Lanjutan dan di antaranya ada yang mendapat subsidi dari Pemerintah.

Sekolah Netral.

Sekolah Netral ini didirikan oleh Panitia *Neutrale Onderwijs Stichting* yang berusaha untuk mendirikan sekolah-sekolah guru untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Panitia ini berhasil mendirikan sebuah sekolah HIS (bagi anak-anak Indonesia) sebuah sekolah ELS (bagi anak Belanda), sebuah sekolah Schakel, dan sebuah sekolah Mulo.

Pada 13 Oktober 1939 diadakan perayaan untuk memperingati ulang tahun yang ke 25 *Neutrale Onderwijs Stichting* tersebut.

Perguruan Taman Siswa.

Taman Siswa dilahirkan pada hari Senen Kliwon tanggal 3 Juli 1922 atau Tahun Hijrah 1340. Nama lengkapnya Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa. Perguruan ini didirikan oleh R.M. Suwardi Suryaningrat, yang kemudian terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Reaksi orang pada waktu lahir Taman Siswa ada 3 macam :

1. Ada yang tertarik, lalu menjadi keluarga Taman Siswa.
2. Ada yang tidak cocok, sebagian besar kaum Guru Pemerintah : Mereka marah-marah mengatakan "Ki Hajar Dewantara menghambat kemajuan Onderwijs".
3. Sebagian besar orang-orang Pemerintah menamakan Taman Siswa sekolah Komunis. Oleh K.H. Dewantara mereka selalu dijawab "Yang setuju, mari kita berjalan dan boleh menyokong, yang tidak setuju atau melawan, tidak akan dihiraukan. Kita mundur hanya

sampai garis untuk lari ke depan (StartOunt). Sebelum itu kita perlu orientasi lebih dahulu, karena jalan-jalan yang kita lalui itu soleh. Kemudian dengan kekuatan baru dan melalui jalan yang benar. "Kita lari cepat menuju ke arah yang murni, untuk kepentingan sang anak, Bangsa dan Negara." Di dalam satu minggu Taman Siswa "Bertapa Diam" dan terus bekerja sekuat-kuatnya; tidak mengadakan propaganda dengan rapat-rapat umum cukup mengadakan pemufakatan di antara orang-orang yang setuju saja.

Pada tanggal 31 Desember 1922 diadakan permufakatan antara para pemimpin untuk menentukan sikap dan program selanjutnya, sebab diketahui Taman Siswa mendapat sambutan besar dari masyarakat. Yang berunding pada waktu itu ialah Ki Hajar Dewantara, R.M. Sutatno Suryokusumo, RMH. Suryoputro dan Ki Pronowidigdo. Keempatnya anggota dari perhimpunan "Slasa Khwon" suatu badan yang mempelajari soal-soal keagamaan, yang diketuai oleh Pangeran Suryomataram.

Setelah berdirinya Taman Siswa, perhimpunan "Slasa Kliwon" dibubarkan.

Pada hari Senin Legi tanggal 22 Oktober 1923 Taman Siswa diumumkan sebagai badan wakaf. Dalam azasnya berisi sendiri pendidikan dan daftar pelajaran.

Pemerintah mengerti bahwa kolonialisme akan terdesak. Berbagai-bagai akal, dijalankan untuk menindasnya. Taman Siswa mempunyai type sendiri "Perguruan dan rumah Guru bersama-sama (Schoolwoning type), dan K.H. Dewantara yang bertempat tinggal di situ, dikenakan pajak rumah tangga. Akan tetapi K.H. Dewantara tidak suka membayarnya, hingga 3 tahun berturut-turut (1922 s/d 1924). Maka pada tanggal 19 Juni 1924, waktu pelajaran masih berjalan, barang-barang Taman Siswa di antaranya bangku, meja, papan tulis dan sebagainya dilelang 5 muka umum. Walaupun barang-barang itu dilelang akan tetapi kemudian dikembalikan kepada Taman Siswa, sebab yang melelang itu para pencinta sendiri. Sebaliknya tindakan itu, K.H. Dewantara mengajukan protes kepada yang berwajib, yang kemudian dengan putusan Pemerintah Kadipaten Pakualaman tanggal

25 September 1924 no. 2424/4, 2415/4, pajak rumah tangga untuk Ki Hajar Dewantara buat tahun 1922 hingga 1924 yang masing-masing berjumlah f. 76,80, f. 54 dan f. 54 dihapuskan.

Mulai pada hari Senen Kliwon tanggal 7 Juni 1924 Taman Siswa membuka bagiannya yang baru, yaitu Mulo Kwekschool (seperti SGB). Mata pelajarannya sama dengan SMP ditambah pendidikan Guru, lamanya 4 tahun sesudah Taman Muda. Dan seperti biasanya orang-orang didikan kolonial selalu mengejek, sebab menurut pikiran mereka hanya orang-orang Belanda saja yang dapat membuka sekolah menengah. Pada penghabisan tahun 1927/1928 lulusan bagian tersebut ikut ujian AMS Negeri, dari 9 anak lulus 5 orang, artinya lebih dari 50%. Pada bulan Agustus 1927 Rabindranath Togore dari Santi Niketan yang masyhur itu dengan Sekretarisnya Dr. Chatterjee, memerlukan mengunjungi Taman Siawa.

Pada tanggal 6 hingga 17 Agustus 1930 sewindu berdirinya Taman Siswa mengadakan konggresnya yang pertama di Yogyakarta.

Pada waktu Taman Siswa mempunyai 52 cabang dengan 6.508 orang anak murid. Dalam konggres tersebut diputuskan perlunya ada persatuan lengkap dengan peraturan-peraturannya.

Azas Taman Siswa ada 7 pasal. Demikian juga sendi pendidikannya yang ditulis dengan jelas. Sedang nama perguruan itu dalam bahasa Indonesia akan menjadi "Terguruan Nasional Taman Siswa" berpusat di Mataram Yogyakarta.

Bagian Mulo Kweekschool, sebelum konggres sudah dipisah menjadi bagian Taman Dewasa dan Taman guru, tetapi sesudah bahagian Taman Gurunya disempurnakan yang diterima lulusan dari Taman Dewasa atau yang sederajat, lama belajarnya 2 tahun itu, mulai tahun 1937 dijadikan 3 tahun.

Pada tanggal 17 September 1932 Pemerintah mengadakan Ordonansi baru, dengan nama "Ordonansi sekolah liar 1932". Dengan singkat isinya memberi kuasa kepada yang berwajib untuk mengawasi ujud dan isi sekolah-sekolah partikelir, misalnya: sebelum sekolah dibuka harus mempunyai ijin lebih dahulu, demikian juga sebelum memberi pelajaran guru harus memenuhi (memiliki) syarat yang sama

dengan sekolah Negeri dan tidak melanggar peraturan Negeri. Ordonansi ini mulai berlaku pada 1 Oktober 1932. Karena Ordonansi itu dianggap melampaui batas, setelah dua hari berunding dengan Majelis Luhur Harian dan Penasehat-penasehatnya Ki Hajar Dewantara mengirim surat kawat kepada Gubernur Jendral di Bogor dalam bahasa Belanda.

Yang terjemahannya sebagai berikut :

“Gubernur Jenderal di Bogor. Ekselensi Ordonasi yang disajikan dengan amat tergesa-gesa dan dijalankan dengan cara paksaan dan mengenai sendi tulangnya masyarakat dan adab sesudahnya rencana pengajaran (dari Flemerintah) dibatalkan (oleh Volksraad), seolah-olah membuktikan kebingungan dan kegetaran pada Pemerintah, ada yang dengan sifat berbahaya salah mengerti dan salah mereka terhadap kepentingan hidup matinya rakyat. Bolehlah saya peringatkan, bahwa walaupun makhluk yang tidak berdaya untuk menjaga diri” dan demikianlah juga boleh jadi kami karena terpaksa akan mengadakan sekuat-kuatnya dan selamalamanya dengan cara tenaga diam (*lijdelijk Verzet*).⁹¹

Dua hari kemudian tanggal 3 Oktober 1932 disusun dengan maklumat kepada segenap Pemimpin pergerakan rakyat, yang memperingatkan adanya bahaya “Ordonansi sekolah liar 1932” itu dan penegasan sikap Taman Siswa. Tanggal 15--16 Oktober 1932 Majelis Luhur Lengkap ialah satu pengurus yang dibentuk pada tahun 1923 mengadakan sidang istimewa di Tosari. Rapat memutuskan :

1. Menyetujui seluruh sikap Ki Hajar Dewantara;
2. Mengadakan Instruksi yang harus dijalankan oleh segenap Cabang;
3. Tidak keberatan jika perlu anggota-anggota Taman Siswa bekerja bersama-sama dengan pihak lain, asal tidak bertentangan dengan instruksi Tanggal 19 Oktober hingga 21 Oktober 1932. Kuasa Pemerintah Mr. Ir. Kiwietde Yoge membujuk Ki Hajar supaya mau berkompromi, akan tetapi Ki Hajar Dewantara mengatakan terus terang, bahwa kompromi harus diartikan “hapusnya soal permintaan ijin untuk mengajar dan mendirikan sekolah-sekolah.”

Pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 1932 diadakan kompromi antar pemimpin di Yogyakarta yang memutuskan :

1. Sikap menolak ordonansi dilanjutkan dan kepada segenap anggota diwajibkan mencegah dalam arti kebatinan dan dengan cara-cara yang sesuai dengan azas Taman Siswa, sedang Majelis Luhur sendirilah yang wajib dan berhak menetapkan sikap yang khusus terhadap sesuatu kejadian atau keadaan.
2. Selama enam bulan dilarang membuka perguruan atau mengangkat guru baru.

Sikap Taman Siswa itu mendapat persetujuan penuh dan bulat dari segenap lapisan rakyat. Mereka sanggup menyokong penuh aksi Taman Siswa lahir batin sehingga dicabutnya kembali ordonansi sekolah liar. Segenap persatuan dan partai, baik yang berkecenderungan kiri maupun kanan, bercorak nasional atau agama, tua atau muda, semuanya menyokong aksi Taman Siswa. Dan guna persediaan selanjutnya disusun tenaga cadangan, dikumpulkan uang, barang dan sebagainya.

Oleh karena itu Pokrol Jenderal lalu membuat maklumat yang isinya melarang pungutan uang dan barang di kalangan umum guna korban-korban "O. O." Meskipun demikian pengumpulan dana terus dijalankan. K.H. Dewantara telah membuat rencana yang ditulis dengan judul. "Timbulnya Perguruan Nasional di atas kubur *Westersch koloniaalschool systeem* " dengan semboyan "tiap-tiap rumah menjadi perguruan, tiap orang menjadi pengajar *met of. zonder ordonansi. Nasional intellectuele mobilisatie tot Zelfinvoering van leerplicht* (mobilisasi kaum cerdas pandai berdasarkan nasional menuntut terlaksananya kewajiban belajar)."

Pada tanggal 8 Desember 1932 anggota Volksraad P.A.A. Wiranatakusuma mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, minta supaya orang cukup memakai sistem yang lamasaja"memberi tahu" tidak minta ijin. " Selanjutnya Pemerintah cukup memakai cara yang represip saja, artinya: "Mengurus jika sudah terjadi kesalahan." Oleh Pemerintah pertanyaan tersebut dijawab: "Sukar untuk diubahnya", karena sudah dibicarakan dalam Voksraad.

Oleh Raad Van Indie pertanyaan tersebut ramai pula diperdebatkan, kalangan yang pro dan anti ordonansi itu adalah sama kuatnya. Kemudian setelah jawaban Pemerintah tidak memuaskan penanya, pada tanggal 10 Januari 1933 oleh tuan Wiranatakusuma dan kawan-kawannya dimajukan usul untuk membuat Undang-Undang yang maksudnya :

1. Menarik kembali ordonansi untuk 1 tahun lamanya.
2. Mengesahkan kembali.ordonansi itu sesudah 1 tahun
3. Mengangkat suatu komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap untuk memajukan kepada Pemerintah dalam 1 tahun.

Dalam pada itu diterangkan, bahwa semua anggota Budi Utomo dan Pasundan yang duduk dalam Raad-raad jika O.O. itu sampai 31 Maret 1933 tidak dicbut serentak akan keluar dari Raad-raad.

Pada tanggal 7 Pebruari 1933 Wiranatakusuma Cs. dengan beberapa perubahan tehnis dengan semufakat Pemerintah diterima dengah tidak dipungut suara. Dan pada 13 Pebruari 1933 keluar ordonansi baru nomor 18 yang maksudnya membatalkan ordonansi 17 September 1932 No.494; undang-undang berlaku mulai 21 Pebruari 1933.²⁰⁾

Tetapi sebagai kelanjutan “O.O.” itu selama 2 tahun mulai tahun 1934 hingga tahun 1936 hujan larangan mengajar “Onderverbod”. Jumlah guru-guru Taman Siswa yang menjadi korban lebih dari 60 orang. Malah ada cabang yang ditutup untuk setahun lainnya. Polisi ikut campur soal pengajaran, murid ditanya macam-macam, perguruan digeledah, rumah Pamong digeledah, juga rumah murid yang sama sekali di luar tanggung jawab Guru. Gambar Diponegoro, bendera Merah Putih, tidak menutup perguruan pada hari Maulid -Wilhelmina dengan keluarganya saja, sudah dijadikan alasan untuk menjatuhkan onderverbod terhadap guru. Jika Guru dan murid Taman Siswa tidak suka memberi hormat pada waktu pegawai bangsa Eropa atau Bumi Putera datang, dikenakan larangan hak mengajar, dan perguruan ditutup.

Tidak hanya itu saja mulai bulan Pebruari 1933 Taman Siswa mendapat cobaan lagi, akibat dikeluarkannya "Kinder toelage," hak orang tua murid pegawai negeri atas tunjangan anaknya yang bersekolah. Pokoknya Taman Siswa mau dipecah belah.

Ada yang boleh memberi surat keterangan *kindertoelage* ada yang tidak. Adapun sikap Taman siswa mengembangkan soal *hindertoelagf* kepada Pemerintah, sebab itu bukan hak Taman Siswa tetapi hak orang tua murid sendiri. Jika tidak semua perguruan Taman Siswa dapat menerima hak atas *kinderteoelage* untuk orang tua murid pegawai negeri, lebih baik tidak menerima sama sekali.

Singkatnya : semua menerima atau semua tidak menerima. Kemudian mulai tahun 1938 peraturan tersebut dicabut.

Bersamaan dengan *kindertoelage*, ada lagi soal "*Vrijkaart* dan *Vrijbeljet*" Anak pegawai Kereta Api mulai tahun 1935 yang berguru pada Taman Siswa tidak mendapat lagi kartu percuma untuk berguru dan biljet percuma guna menengok orang tua waktu liburan. Setelah diperjuangkan, dengan keputusan Inspektur kepala tanggal 20 September 1940 peraturan tersebut dicabut pula.

Tidak hanya sekian cobaan yang diterima taman Siswa. Mulai tahun 1935 itu juga orang-orang Taman Siswa akan dikenakan "Pajak Upah atau *loonbelastin*.

Pada hal Taman Siswa Prinsipil menolak, tidak suka membayar pajak upah, karena dalam Taman Siswa tiada bersifat majikan atau buruh. Sebagai penduduk suka membayar pajak penghasilan, walaupun jumlahnya boleh jadi lebih banyak dari pajak upah. Pada tanggal 17 Desember 1937 K.H Dewantara memaksa diri datang bertemu dengan Gubernur Jendral di Cipanas untuk menjelaskan dengan lisan ujudnya organisasi Taman Siswa yang berdasar atas kekeluargaan dan sama sekali tidak mengenal hubungan majikan dan buruh. Dan selama itu peraturan terus diundur-undur, hingga sampai dicabutnya, orang Taman siswa tetap tidak dikenakan pajak upah. Kemudian dengan surat keputusannya tanggal 15 Juli 1940 N.O.L.B.I./16/6 Direktur keuangan memutuskan orang-orang Taman Siswa dibebaskan dari pajak upah dan seperti biasa dikenakan pajak penghasilan.

Pada waktu yang terpenting, yaitu pada saat Taman Siswa berjuang menentang Ordonansi sekolah liar 1932 dengan berakibat hujannya larangan hak mengajar bagi guru-gurunya, menentang peraturan larangan hak orang tua murid menerima *Kindertoelage* dan kartu serta bilyet percuma untuk anaknya, kemudian menentang pajak upah bagi guru-gurunya, pusat Taman Siswa masih ada di jalan Tanjung, menyewa. Kemudian membeli rumah dan pekampungan di jalan Wirogunan 31/33, dengan cara gotong royong. Pada pekarangan itu kemudian didirikan pendapa dengan sokongan para pencinta, dan “benggol bulanan” dari para murid, yang dibuka resmi bertepatan dengan pembukaan konggres Taman siswa yang ketiga, 16 Nopember 1938.

Demikian sepintas lintas peranan serta perjuangan Taman Siswa dalam menyiapkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan lahir dan batin terlepas dari penjajahan Belanda.

6.5 Alam Fikiran dan Kepercayaan.

6.5.1 Perkembangan Agama.

6.5. 1. 1. Perkembangan Agama Islam.

Dalam suatu negara yang sedang membangun seperti yang tengah berjalan di negara kita ini, maka sasaran serta tujuannya akan tercapai apabila di samping pembangunan yang bersifat material disertai pula pembangunan yang bersifat spiritual. DR. D. De Yong dalam bukunya “Salah satu sikap hidup orang Jawa” mengemukakan, bahwa usaha-usaha pembaharuan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara unsur material dan unsur spiritual akan menghasilkan krisis identitas. Orang-orang yang memandang rendah tradisinya sendiri juga termasuk golongan orang-orang yang terlambat perkembangannya, sekalipun cara mereka berfikir modern. Agama merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Jawa. Dalam suka dan duka kita berjumpa dengan agama. Agama tidak boleh di lemari eskan. Demikian pula sikap hidup kaum priyayi mempunyai latar belakang spiritual yang mendalam.²¹⁾ Agama besar

pengaruhnya di dalam sastra Jawa kuno. Dengan demikian jelas bahwa dasar-dasar agama tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan dalam suatu pembangunan. Agama memegang peranan penting.

Pendapat Dr. D. De Yong di atas sejalan dengan pendapat Cantwell Smith seorang ahli agama Islam Cantwell Smith menegaskan bahwa modernisasi di daerah-daerah Islam dapat gagal, bila para perencana tidak memperhatikan peranan agama di daerah-daerah tersebut. Hari depan negara tidak tergantung pada ideologi-ideologi sekular yang diimport dari Barat, melainkan pada perkembangan agama Islam di daerah-daerah yang berangkutan. Pada hakekatnya modernisasi berarti memperkuat pandangan hidup religius, sehingga pandangan tersebut dapat menerima dan mempergunakan kemungkinan-kemungkinan serta ilmu pengetahuan modern. Peranan agama dalam pembaharuan ini tidak hanya berlaku di daerah Islam saja, melainkan berlaku pula bagi 22 daerah-daerah Hindu-Buddha.

Meskipun ada orang yang menyadari sedalam-dalamnya tentang arti agama dalam suatu pembaharuan atau pembangunan, tetapi ada pula orang yang menganggap bahwa agama sebagai sesuatu yang tidak penting, yang tidak relevan, bahkan agama dianggap tidak penting bagi pembangunan.²³⁾ Demikian Myrdal. Ia tidak dapat mengharapkan banyak dari agama. Dalam pandangannya agama dianggap sebagai agama rakyat yang erat hubungannya dengan sikap-sikap tradisionalists maka dari itu tidak dapat merangsang pembangunan sosial.²⁴⁾

Agama itu sendiri akan tumbuh dengan subur tergantung pada keadaan masyarakat dan pemerintahan yang ada. Di mana suatu pemerintahan memperhatikan agama sebagai sarana dalam pembaharuan diikuti dengan masyarakat yang telah menyadari tentang peranan agama sebagai pegangan hidup dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara, maka agama itu akan berkembang dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa mengenai perkembangan agama khususnya Islam di Jawa telah disiarkan serta dipelopori oleh Wali Sanga. Wali-wali inilah yang merupakan muballigh Islam yang sangat terkenal. Pada jaman kewalian kepercayaan dan keyakinan hidup

masyarakat kita pada umumnya masih berdasarkan animisme, dinamisme dan ajaran-ajaran Hindu/Buddha. Karena itu tidaklah mudah pekerjaan para Wali ketika itu dalam merintis jalan untuk menyiarkan dan mengembangkan agama Islam.

Wali Sanga (sembilan) inilah yang merupakan pimpinan dalam perjuangan menegakkan agama Islam di Jawa. Adapun kesembilan Wali itu kemudian dibagi dalam tiga kelompok besar yang meliputi daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di antara para wali sembilan itu diadakan pembagian tugas sesuai dengan bakat dan kecakapannya masing-masing.

Karena pertimbangan-pertimbangan taktis-psikologis, para Wali dalam menyiarkan serta mengembangkan agama Islam di sini bertindak penuh toleransi, sehingga soal-soal yang sekiranya dapat merintangai usaha untuk mengislamkan rakyat di jauhi sedemikian rupa.¹⁵⁾ Adapun mengenai perkembangan agama Islam pada permulaan abad duapuluh dapat diketahui pula dari keadaan masyarakat pada waktu itu. Masyarakat Islam pada saat itu sedang ditimpa oleh berbagai krisis. Umat Islam telah lupa kepada tuntunan agama yang berdasar atas Quran dan Hadist. Mereka telah berbuat bid'ah, khurafat dan Syirik. Hal inilah yang menyebabkan mereka jauh dari tuntunan agama yang sebenarnya. Akibat dari perbuatan umat Islam sendiri, maka di mana-mana cahaya Islam tampak suram. Ajaran Islam telah bercampur baur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Qur'an dan Hadist. Kepercayaan masyarakat terhadap umat Islam berkurang. Ajaran Islam tidak memberikan dorongan serta rangsangan kepada masyarakat untuk beramal. Dalam segala segi kehidupan Islam tidak menjiwai masyarakat, sebab umat Islam menafsirkan ajaran agama Islam dengan fikiran yang bersifat kolot, ajaran Islam hanya menjadi sesuatu dogma yang mati. Akibat daripada kekolotan dan kebakuan inilah, yang menyebabkan Islam seakan-akan tidak berdaya lagi dalam menghadapi tantangan jaman. Umat Islam menjadi mundur karenanya.

Para pemimpin Islam yang menyadari akan keadaan itu sangat prihatin, kemudian bangkit berusaha memperbaiki serta memajukan agama Islam. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang

bergerak untuk mengembalikan ajaran Islam kepada yang sebenarnya. Muhammadiyah justru timbul untuk membela dan menjunjung tinggi agama Islam. Dalam hubungan ini maka jasa Muhammadiyah kepada agama, diantaranya ialah menyiarkan dan mengembangkan agama Islam secara modern, memberantas perbuatan bid'ah, syirik dan khurafat yang tidak bersumber pada ajaran Islam.

Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu dengan berbagai jalan. Misalnya menyelenggarakan tabligh, kursus-kursus agama, mengajarkan agama pada sekolah-sekolah umum dan sebagainya. Juga diadakan usaha menerbitkan buku-buku dan risalah-risalah agama, penerbitan surat-surat kabar dan majalah-majalah Islam. Dengan cara yang demikian ajaran Islam dapat tersebar pada umum, sehingga umat Islam bertambah maju tidak tenggelam dalam lembah kekolotan. Anjuran Islam kearah modernisme, Reformisme dan itjihadisme tersebar luas.

Atas usaha Muhammadiyah sebagai reformer dalam Islam maka modernisasi Islam telah berkembang di seluruh tanah air Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke berdiri cabangcabang dan ranting-rantingnya.

Perkembangan Islam tidak luput dari tantangan dan rintangan. Pihak-pihak lain sering melontarkan hinaan terhadap agama Islam. Hinaan tersebut diantaranya dikemukakan oleh Pastoor Dr. Zwijmer dalam khotbahnya di beberapa Gereja antara lain di Banjarmasin, Makasar, Surabaya dan Yogyakarta. Pada waktu kedatangannya di Yogyakarta, maka diadakanlah sambutan dengan mengadakan rapat terbuka bertempat di Nganpilan. Dalam rapat ini diadakan suatu acara tanya jawab tentang soal agama, tetapi ia tidak hadir pada rapat tersebut.

Rintangan dan hinaan bukanlah menjadi penyebab mundurnya muballigh Islam, tetapi bahkan menambah gigih dan bersemangat dalam memperjuangkan dan menyiarkan agama yang sudah diyakini akan kebenarannya. Oleh karena itu Islam berkembang luas. Geraknya tidak hanya terbatas dalam bidang agama saja, tetapi dalam bidang pendidikan, politik dan sebagainya.

Pengaruh gerakan Sarekat Islam yang tumbuh dikota Sala telah tersebar pula ke daerah-daerah lainnya termasuk Yogyakarta.

Demikian keadaan perkembangan agama Islam pada permulaan abad dua puluh yang masih diliputi kekolotan, kepicikan dan adanya campur baur dengan ajaran-ajaran Hinduisme dan Buddhisme.

6.5.1.2 Perkembangan Agama Katholik.

Mengenai perkembangan agama Katholik dapat diketahui pula adanya beberapa gereja serta para penganutnya.

Seperti kita maklumi, bahwa di tengah-tengah kota Yogyakarta di mana berdiri kantor pos, kalau orang berjalan-jalan ke arah Timur kira-kira 100 m, akan melihat sebuah gedung, di sebelah Selatan jalan, sebuah gereja. Katolik Gerejani yang pertama di Yogyakarta dan didirikan pada permulaan abad 20. Pada waktu itu gedung inilah satu-satunya Gereja Katholik di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru pada tahun 1925 disusul dengan berdirinya gereja Kotabaru, disusul pula dengan gereja bintaran, Pugeran, kemudian Kumetiran, semuanya ada di dalam kota. Sedang di luar kota juga didirikan gereja Ganjuran (daerah Bantul) Boro dan Nanggulan (kulon Progo Utara), Wates, Kalasan, Mlati dan Somoitan di Sleman Utara, sehingga pada tahun 1952 di daerah Yogyakarta terdapat 21 gereja. Selain itu ada beberapa rumah di pelosok yang dipergunakan sebagai gereja pula sebanyak 26 tempat, tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah orang-orang Katholik adalah sebagai berikut :

Pada tahun	1915	baru ada	300 orang
" "	1925	"	10000 orang
" "	1950	"	20000 orang

Melihat angka-angka di atas, nyata bahwa perkembangan antara tahun 1925--1952 kurang lancar, bila dibandingkan dengan antara tahun 1915--1925. Antara lain disebabkan karena pendudukan Jepang di daerah ini yang sedikit banyak menghambat perkembangan tersebut: Pastoor"pastoor baik yang berkebangsaan Belanda maupun yang bukan, semuanya dimusuhi Jepang, dan karenanya banyak ditangkap, diinternir, dan bahkan pastoor Jawa ada beberapa yang menderita nasib sama dengan pastoor Belanda. Dengan ditangkapnya beberapa pimpinan agama, sudah dengan sendirinya Umat Katholik kekurangan pemimpin. Gedung-gedung sekolah, kediaman broeder-broeder, biara Zuster-Zuster banyak yang diduduki pemerintah Jepang.

Perkembangan kegiatan agama Katholik di Yogyakarta dapat diketahui pula adanya pendirian Seminari Agung pada tahun 1940 yang terletak di Jalan Gede 2, Kota Baru, Yogyakarta, tempat mendidik para Imam Katholik. Sebelum tahun 1936 orang-orang Indonesia yang ingin menjadi Imam terpaksa harus ke luar Negeri, tetapi dengan dibukanya Sekolah Theologie di Muntilan tahun 1936 orang tak perlu ke luar negeri lagi tetapi dapat belajar di sekolah tersebut.

6.5.1.3 Perkembangan Agama Kristen.

Tentang perkembangan agama Kristen yang kegiatannya dilakukan oleh Zending di daerah Yogyakarta tak jauh bedanya dengan perkembangan yang ada di daerah lainnya. Gerakan Zending ini mendapat dukungan dari penguasa yang ada pada waktu itu ialah orang-orang Belanda. Bahkan pada zaman Belanda dilakukan bahwa agama Kristen adalah agama Barat, tetapi pandangan itu sekarang berubah sama sekali hal ini antara lain disebabkan karena banyak putera Indonesia dari pemeluk agama Kristen yang merupakan patriot-patriot pada zaman revolusi; dengan kata lain agama Kristen telah mulai mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat Indonesia.²⁶⁾

Apa yang disebutkan di atas membawa akibat, yaitu perkembangan agama Kristen lebih lancar daripada jaman-jaman yang lampau. Kalau pada jaman yang lampau dikatakan bahwa orang masuk Kristen karena dorongan nasi, pada jaman sekarang karena keinsyafan bathin. Pada tanggal 25-12-1952 ada pembaptisan orang dewasa sejumlah 46 orang di gereja Gondokusuman, dan belum lagi yang terdapat di tempat-tempat lain.²⁷⁾

Di lapangan pendidikan, masyarakat Yogyakarta mengenal BOPKRI (Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia). Badan ini telah banyak mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai SMA Usaha BOPKRI di daerah Yogyakarta muncul setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1951 tercatat 30 buah sekolah dengan 7168 orang murid. Setiap tahun sekolah-sekolah lanjutan BOPKRI yang ada di Yogyakarta senantiasa dibanjiri anak-anak calon murid. Mengenai toleransi antar agama berjalan dengan baik.

6.5.1.4 Aliran-aliran Kebatinan.

Kecuali gerakan yang diusahakan oleh agama Islam Kristen dan Katholik, maka di daerah Istimewa Yogyakarta ada juga gerakan yang dilakukan oleh Aliran Kebatinan.

Di pandang dari masa timbulnya, maka sesungguhnya gerakan aliran kebatinan ini adalah suatu gerakan yang telah lama sekali ada di daerah Yogyakarta khususnya, dan di Indonesia umumnya. Orang-orang kita memang mempunyai pembawaan gemar sekali merundingkan, mempermusyawarahkan, mengadakan orientasi, ramah-tamah (saraseharo dalam hal-hal yang mengenai soal-soal sekitar kebatinan. Banyak sekali tindakan, perkataan-perkataan, tulisan-tulisan, benda-benda dan lain sebagainya, di samping dilihat dari kenyataan atau lahiriahnya, dilihat juga dari batiniah rohaniannya. Sehingga mereka itu senantiasa, bahkan telah menjadi kegemarannya, suka menggambar-gambarkan tentang maksud, arti, tujuan dan hakekat serta jiwa dari sesuatu benda atau barang yang lahir itu.

Orang-orang kita memang suka menafsir-nafsirkan adanya gerhana bulan, gerhana matahari, gunung meletus, gempa bumi, bintang beralih, lahir pada hari Jum'at sore jam 4 orang sedang menjadi mempelai kebetulan hujan lebat dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang semacam itu buat sebagian dari kita menjadi satu ilmu pengetahuan yang tersendiri.

Adapun takhayul (bijgeloof) adalah menunjukkan adanya ikatan-ikatan batin, adanya kepercayaan secara rohaniyah dan lain sebagainya.

Karena itu maka nyatalah, bahwa sesungguhnya timbulnya gelombang aliran-aliran kebatinan itu, pada hakekatnya adalah bukan barang baru bagi kita. Maka adalah suatu hal yang sukar dipecahkan, kalau orang-orang bermaksud hendak menghilangkan aliran atau memberantas aliran. kebatinan itu. Kantor urusan Agama tidak akan memberantas aliran-aliran kebatinan itu sepanjang aliran-aliran kebatinan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Demikian pula pemerintah pusat sulit untuk memberantasnya, karena aliran itu sudah menyelubungi rohaniyah orang-orang kita yang telah berlangsung turun-temurun. Hanya yang perlu diketahui bilamana ada

aliran-aliran kebatinan yang tidak sehat yang berdebat mengganggu ketentuan dan keamanan, mengacaukan pergaulan dan terutama mengacaukan negara maka aliran-aliran kebatinan semacam itu tidak dapat dibenarkan oleh Pemerintah.

6.5.1.5 Bentuk dan sifat aliran Kebatinan.

Sudah menjadi mode bagi para pemimpin atau para guru aliran kebatinan itu, dalam memberikan wejangan tentulah dengan "Sistem rahasia". Di antaranya, cara memberikan wejangan itu dilakukan di kamar gelap, di bawah empat mata saja.

Di samping tempatnya yang serba rahasia, maka diberikan pula keterangan, bahwa siapa-siapa yang mendengarkan wejangan dari sang guru, baik berujud binatang maupun berupa daun, kayu, tumbuh-tumbuhan, batu dan lain sebagainya, pasti akan dapat masuk syurga. Di samping itu telah ditetapkan pula beberapa syarat khusus. Sesudah diadakan wejangan yang serba rahasia, pada tempat yang rahasia, dengan syarat-syarat yang serba tersendiri dan istimewa, maka ditutuplah dengan kata-kata, bahwa seseorang yang telah diwejang itu tidak boleh menerangkan segala sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh sang guru itu. Apabila ia berani membuka atau menceritakan rahasia itu, maka kecelakaan dan kebinasaan akan menimpa dirinya sampai tujuh keturunannya.

Pada diri manusia ada nafsu untuk menyelidiki hal-hal yang belum diketahuinya. Karena pembawaan yang demikian itu, maka sebelum ia mempunyai kepercayaan keagamaan yang telah dapat memberikan bimbingan atau pimpinan kepada akal dan fikiran serta batinnya kepada pandangan yang benar atau kepada suatu agama yang dianggap telah memuaskan, maka mudah mereka itu tertarik kepada orang-orang yang senantiasa mengeluarkan keterangan yang serba rahasia karena itu sangat Susah untuk mengetahui bagaimana maksud atau tujuan yang sesungguhnya terkandung di dalam aliran itu. Bentuk atau aliran-aliran Kebatinan itu diantaranya ada yang semata-mata bersifat takhayul.

Sifat-sifat aliran-aliran itu bermacam-macam. Ada Aliran-aliran yang keislam-islaman, maksudnya aliran-aliran itu di sana sini mengambil dari peraturan-peraturan Islam atau kaidah-kaidahnya.

Soal ketuhanannya dan nama-nama Rosul dan lain sebagainya banyak yang diambil dari Islam. Tentang syarat yang harus dijalankan sengaja dibuat berlainan dengan ajaran Islam, hanya soal-soal yang mengenai kebatinan yang ada persamaannya dengan ajaran Islam. Apabila dilihat dari peraturan-peraturan Islam yang sebenarnya, maka aliran-aliran ini telah sangat jauh menyimpang. Ada pula aliran yang dipandang dari filsafat-filsafatnya, maka aliran itu dapat dikatakan kebatinan yang bercampur dengan Hindu Jawa. Mereka masih mempunyai kepercayaan adanya dewa-dewa dan lain sebagainya. Begitu pula nama sembahannya mereka dan peribadatannya banyak dipergunakan nama-nama Hindu

Di samping aliran yang telah tersebut di muka maka ada pula aliran kebatinan yang menurut bentuk dan sifatnya sudah agak dimodernisasi. Aliran-aliran ini pada dasarnya sama juga dengan aliran-aliran kebatinan lainnya. Hanya cara organisasi atau hubungannya saja yang berbeda.

Demikianlah secara umum aliran-aliran kebatinan itu dipandang dari luar. Di katakan sekedar pandangan dari luar, karena dari dalam sukar sekali mengingat terlalu serba rahasianya aliran-aliran kebatinan itu.

Untuk membimbing kepada aliran kebatinan yang sehat dan menuju kemajuan yang selaras dengan kemajuan cara berfikir dalam fikiran orang-orang sekarang, maka perlu sekali diadakan peperangan-penerangan agama yang mendalam sampai ke pelosok-pelosok. Dengan demikian, maka orang akan membuka fikiran dan akal mereka, hingga tidak mudah mereka itu terpengaruh oleh akal-akalan dari orang-orang yang sengaja membawa faham-faham kebatinan untuk dimasukkan dalam kalangan rakyat untuk itu sesungguhnya diperlukan buku-buku bacaan yang ringan tentang keagamaan dengan bahasa daerah yang mudah untuk dimasukkan, disebarkan di dalam kalangan rakyat.²⁸⁾

Mengenai kelompok aliran kebatinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah tersebar di berbagai Kabupaten-Kabupaten. Di antaranya yang berada di Kotamadya Yogyakarta ialah Perkumpulan Kawula Ngayogyakarta disingkat dengan PKN Perkumpulan ini pada

lahirnya adalah kelanjutan dari P.K.N di jaman penjajahan dulu. Pada mulanya bukanlah merupakan aliran kebatinan. Tetapi karena mendapat pengaruh dari pendirinya yang dipompakan kepada para pengikutnya, maka perkumpulan ini menjadi bercorak kebatinan. Dan akhirnya, kemungkinan atas usaha dari orang-orang yang berkepentingan perkumpulan ini sudah mulai nampak bersifat perkumpulan politik/kenegaraan, meskipun belum ada suatu pengumuman dari yang bersangkutan. Gerakan ini kemudian disebut Cirinda (Gerakan rakyat Indonesia). Berhubung adanya kesalahfahaman sementara para pengikutnya yang berasal dari suatu tempat, maka Pamong Praja terpaksa turut campur dalam urusan mereka.

Demikian sepiantas perkembangan agama di Yogyakarta yang berjalan berdampingan dengan gerakan aliran-aliran kebatinan.

60.2. Perjuangan pergerakan nasional dan motivasi agama.

Perjuangan pergerakan nasional pada hakekatnya tidak dapat terlepas dengan motivasi agama. Justeru landasan agama yang diyakininya itulah yang merupakan dorongan kuat bagi mereka untuk berjuang. Beberapa contoh dapat dijadikan suatu bukti, bahwa banyak para pahlawan kita sejak Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Makasar, Pangeran Dipanegara, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Haji Samanhudi, HOS Tjokroaminoto dan lain sebagainya adalah orang-orang yang taat dan kuat agamanya. Dalam ajaran Islam ada suatu kewajiban bagi para pemeluknya untuk berbuat amal kebaikan, menegakkan kebenaran serta menghancurkan segala kemungkaran dan kedholiman. Kedholiman yang dijalankan pemerintah kolonial berupa pemerasan serta penindasan membuat rendah martabat bangsa kita. Bangsa kita hidup sebagai sapi perahan demi kemakmuran mereka.

Perlakuan kaum penjajah yang demikian itu berlangsung beratus-ratus tahun lainnya. Setiap pejuang pergerakan yang dilandasi oleh dorongan agamanya akan merasa terpenggil untuk berbuat dan berkorban demi kepentingan masyarakat bangsanya. Kesadaran yang tinggi ini sebagian besar dimiliki oleh pemuka-pemuka agama. Mereka berjuang bukan untuk mendapatkan suatu kedudukan tetapi karena panggilan bathinnya.

Melupakan peranan agama dalam perjuangan pergerakan nasional berarti melupakan atau mengikat kenyataan sejarah. Para pemuka agama besar sekali pengabdianya terhadap tegaknya perjuangan bangsa dan negara lepas dari penjajahan.

Gerak langkah perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan keagamaan dalam perjuangannya bukanlah hanya menempuh satu bidang agama saja, melainkan beberapa segi, misalnya perjuangan KH. Ahmad Dahlan di samping bertujuan mengadakan pembaharuan dalam Islam yang dianut oleh masyarakat, bergerak pula pada bidang pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan memegang peranan penting sekali dalam mempersiapkan kader-kader bangsa yang terdidik dan terlatih. Keadaan pendidikan bangsa Indonesia umurnya masih sangat menyedihkan.

Orang yang terdidik akan mudah menyadari perjuangan bangsanya. Pemuda-pemuda dibimbingnya supaya gemar beramal kebaikan dan berani menjadi Kader yang membela bangsa dan negaranya dengan menghindari kebiasaan keroyalan dan kenakalan. Dalam pendidikan ini ditanamkan jiwa keislaman yang sedalam-dalamnya. Dari sedikit demi sedikit mereka inipun dididiknya dengan harapan di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang soleh. KH. Ahmad Dahlan sabar mendidik kaum wanita calon dari pada ibu rumah tangga. Di samping itupun sanggup mendidik anak-anak muda yang nakal sehingga dapat menjadi anak yang baik serta berbina bagi masyarakat. Dengan cara-cara yang demikian inilah kader-kader pejuang bangsa dipersiapkannya.

Politik penjajahan mempunyai maksud untuk menekan kemajuan penduduk asli Indonesia baik dalam bidang spiritual maupun material. Dengan jalan demikian maka kelangsungan penjajahan dapat dijamin. Kaum kolonialis ingin mengabadikan kekuasaannya di bumi Indonesia. Dalam bidang perdagangan mereka menggunakan golongan Tionghoa dan Arab untuk menekan kemajuan para pedagang bumi putra, dengan cara memberikan perlindungan dan hak-hak istimewa kepada golongan-golongan tersebut lebih daripada kepada pedagang Indonesia.

Pada tahun 1900 jumlah orang Tionghoa di pulau Jawa dan Madura 2.777.000, di Indonesia 537.000; jumlah orang Arab di Jawa

dan Madura ialah 18.000; di Indonesia 27.000. Dari jumlah itu pada tahun 1930 sudah meningkat dua kali. Akibat beberapa bidang ekonomi dikuasai oleh pedagang-pedagang Tionghoa maka keadaan ekonomi rakyat sangat suram. Keadaan buruk ini meliputi juga para pedagang batik Indonesia di Kota Surakarta. Maka pada tahun 1911 dibentuklah Sarekat Dagang Islam yang bertujuan membentuk kekuatan untuk melawan taktik para pedagang Tionghoa. Pengaruh Sarekat Dagang Islam berkembang meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Para pedagang Islam di Yogyakarta yang menyadari akan arti pentingnya perjuangan menghadapi kaum kolonialis dari bangsa manapun segera menggabungkan diri dan aktif mengambil bagian dalam Sarekat Dagang Islam. Berdirinya Sarekat Dagang Islam yang berpengaruh itu jelas berdasarkan pertimbangan ekonomi. Oleh karena para pengusaha batik Indonesia itu pada umumnya memeluk agama Islam, maka sarekat dagang itu disebut Sarekat Dagang Islam. Dalam hal kata "Islam" itu identik dengan kata "Indonesia" atau kata "nasional". Kata-kata yang belakangan ini tidak dikenal oleh para pengusaha batik yang pada umumnya hanya pandai membaca huruf Arab dan berbahasa Jawa. Demikianlah sebutan "Islam" lebih mudah dipahami oleh para anggotanya, dan lebih meresap daripada kata-kata "nasional" atau kata "Indonesia". Menurut anggapannya orang Tionghoa bukan orang Islam. Demikianlah sebutan "Islam" itu telah menumpahkan perlawanan dari pihak Indonesia (tegasnya Jawa) terhadap golongan lain yakni golongan Tionghoa.

Berdirinya Sarekat Dagang Islam disambut baik oleh para pengusaha batik yang mengharapkan dapat membeli bahan batik lebih murah. Untuk bergerak secara sah, sarekat dagang itu harus menyusun anggaran dasarnya untuk disahkan oleh pihak pemerintah. Setelah Sarekat Dagang Islam berjalan sekitar satu tahun dirasa terlalu sempit, karena yang tertampung di dalamnya hanyalah khusus pedagang-pedagang saja. Maka perkumpulan itu perlu diperluas keanggotaannya. Gagasan Cokroaminoto diterima oleh Haji Samanhudi. Pada tanggal 10 September 1912 berita tentang berdirinya Sarekat Dagang Islam disampaikan kepada notaris untuk selanjutnya disahkan sebagai badan hukum oleh pihak pemerintah. Karena azas dan tujuan Sarekat Islam itu sangat praktis dan sesuai dengan selera kehidupan kaum muslimin,

maka berdirinya perkumpulan itu disambut gembira oleh golongan muslimin. Dalam waktu singkat perkumpulan itu telah memperoleh anggota yang besar sekali jumlahnya. Timbullah karenanya kekhawatiran pada pihak pemerintah untuk mengakuinya sebagai badan hukum. Demikianlah pada tanggal 30 Desember 1913 diputuskan untuk menolak pengakuan Sarekat Islam, dengan penegasan, bahwa penolakan itu hanya mengenai perkumpulan Sarekat Islam sebagai pusat; cabang-cabangnya dapat diakui sebagai badan hukum.

Konggres Sarekat Islam pertama pada tahun 1916 diadakan di Kota Bandung. Konggres ini sengaja digunakan sebagai gelanggang untuk mengadakan demonstrasi kesatuan kaum muslimin menuju kesatuan segenap penduduk asli Indonesia. Sarekat Islam dengan tegas menyetujui gagasan milisi bumi putra, tetapi dengan mengajukan syarat agar pemerintah harus juga memberikan Dewan Perwakilan Rakyat Sarekat Islam yang semula didirikan atas pertimbangan ekonomis dan keagamaan, dalam konggresnya pertama telah tampil ke muka dengan pembahasan soal-soal politik. Sejak konggresnya yang pertama itu Sarekat Islam telah menunjukkan corak aliran politik religius nasional.

Dalam konggresnya yang kedua, yang diadakan di Jakarta pada tahun 1917 Sarekat Islam menegaskan tujuannya yakni untuk memperoleh pemerintahan sendiri. Dengan melalui Dewan Perwakilan Rakyat dituntutnya agar diberi wewenang legislatif. Lain daripada itu diusulkan, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diperluas dengan pengangkatan anggota-anggota yang mewakili golongan non politik.

Dengan uraian di muka dapatlah kiranya sebagai gambaran sepintas, bahwa organisasi-organisasi yang bercorak agama, tidak hanya berjuang demi pengembangan agamanya, tetapi perjuangan agama Islam memberikan landasan kuat terhadap perjuangan pergerakan nasional melawan penindasan penjajah dalam segala bentuknya. Motivasi agama sangat besar peranannya dalam perjuangan pergerakan nasional baik dalam lapangan politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

6.1.3 *Kehidupan Intelektual*

Pada waktu semangat kebangkitan nasional sedang tumbuh, para intelektual bangsa kita belum merata luas pada masyarakat. Sebagian besar mereka terdiri dari golongan bangsawan dan priyayi, karena hanya pada golongan itulah telah mendapat kesempatan maju. Hal ini dapat kita sadari karena kaum penjajah sengaja membuat bodoh bangsa kita. Pendidikan belum terbuka luas bagi rakyat. Kesempatan memasuki pendidikan dalam sekolah masih terbatas sekali. Melalui pendidikan kesadaran kebangsaan akan mudah tertanam. Hal ini merupakan suatu bahaya bagi kedudukan pemerintah. Maka tidak mengherankan bahwa rakyat kita terbelakang karenanya. Kesadaran kebangsaan baru dimiliki oleh sekelompok kecil orang yang telah mengikuti pendidikan. Hal yang demikian inilah yang mendorong cara intelektual kita harus bekerja giat. Mereka berusaha sekuat tenaga agar perasaan kebangsaan tumbuh dan tersebar luas kepada rakyat. Berbagai cara dan usaha baik melalui pendidikan agama maupun yang bersifat umum mulai dijalankan. Para intelektual kita di antaranya Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kyai Haji Alimad Dahlan, Ki Hajar Dewantara dan lain-lainnya lagi bergerak menurut bidangnya masing-masing. Usaha-usaha ini mereka kerjakan tanpa memperhitungkan risiko yang menimpa pada dirinya. Gerak-gerik para intelektual kita selalu diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Setelah diketahui bahwa nyata-nyata usaha para pemuka-pemuka kita tersebut merupakan suatu bahaya bagi kelangsungan pemerintahan kolonialnya, maka tidak segan-segan pemerintah menekan dengan berbagai peraturan yang dibuatnya. Bahkan para intelektual kita ditangkap dan diintimidasi misalnya yang dialami sendiri oleh Ki Hajar Dewantara.

Bagi seorang pejuang bangsa, memasuki penjara adalah suatu hal yang telah diperhitungkannya. Meskipun kehidupan mereka menderita, tetapi penderitaannya itu untuk kemuliaan bangsa dan negaranya. Himpitan dan tekanan dari pemerintah tidak membuat kaum intelektual kita patah semangat, bahkan mereka bertambah gigih dan berani.

Hasil usaha para intelektual kita dalam menggerakkan massa telah diwujudkan adanya beberapa kongres di antaranya Sumpah Pemuda

pada tanggal 28 Oktober 1928 di kota Jakarta. Demikian pula kongres kaum Ibu di kota Yogyakarta tahun 1922.

Perjuangan para intelektual kita yang bergerak melalui berbagai bidang usaha tersebut mempunyai cita-cita ialah ingin menjadi bangsa yang bebas merdeka terlepas dari penindasan pemerintah kolonial. Dengan demikian mereka ingin rnengangkat lebih tinggi martabat bangsanya serta mengusir penjajahan yang berupa apapun bentuknya dari bumi Indonesia.

6.6. Hubungan ke luar

6.6.1 Bentuk dan sifat hubungan

Karena dalam masa penjajahan kekuasaan pemerintah dimonopoli dalam satu tangan ialah pemerintah kolonial, maka bentuk dan sifat hubungan dengan dunia luar tidak secara bebas terbuka, tetapi selalu dalam pengawasan pemerintah. Hubungan formal dilaksanakan antar pemerintah yang menjajah dengan negara lain. Bila ada hubungan yang diselenggarakan oleh suatu Badan atau suatu Yayasan dari bangsa Indonesia bentuk dan sifatnya informal. Para intelektual kita yang telah maju dari Yogyakarta dengan berbagai cara berusaha agar dapat mengadakan kontak dengan dunia luar, misalnya dengan alasan naik haji lalu menetap di negara yang dituju tersebut, bahkan ada yang lalu menetap di Mesir. Hal ini pernah dilakukan oleh Haji Abdul Kahar Mudzakkir dengan para keluarganya dan juga para intelektual lainnya. Di negara asing itu mereka giat belajar dan berjuang untuk mempersiapkan cita-cita Indonesia merdeka.

6.6.2 Sikap terhadap dunia luar

Usaha-usaha yang telah dirintis dan dipelopori oleh para intelektual kita untuk mengadakan kontak/hubungan dengan dunia luar pada hakekatnya tidak lain dengan tujuan mempersiapkan kekuatan bersama dengan negara-negara sahabat yang mencintai kemerdekaan serta menentang segala bentuk penjajahan. Hubungan ini diwujudkan dengan pengiriman missi kesenian dan tukar menukar kebudayaan, pengiriman para pelajar yang ingin belajar di luar negeri dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan simpati dari negara-negara sahabat tersebut tidak ada lain kecuali bangsa Indonesia sendiri harus menunjukkan sikap yang baik terhadap dunia luar itu. Suatu kenyataan bahwa sikap kita terhadap dunia luar mendapat suatu tanggapan yang baik ialah selama bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan disambut dan diberi bantuan dari negara-negara sahabat tersebut. Misalnya negara-negara India, Birma, Saudi Arabia, Mesir dan lain-lainnya telah menyambut perjuangan kemerdekaan kita. Begitu pula para intelektual kita di negara-negara tersebut mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik.

Sebagai hubungan timbal balik, maka datang pula di Yogyakarta orang-orang dari India, Rusia untuk mengetahui dari dekat dan ingin mempelajari hasil seni budaya bangsa kita. Demikian pula dari negara Australia mengadakan kunjungan ke Yogyakarta. Kunjungan secara timbal balik ini sudah barang tentu membawa akibat bagi kedua belah pihak.

6.6.3 Pengaruh dan akibatnya

Perhubungan kita dengan dunia luar mempunyai pengaruh dan akibat yang saling menguntungkan. Bagi kita bangsa Indonesia akan dikenal di dunia lain baik dalam lapangan hasil seni kebudayaan maupun dalam, tujuan perjuangan kita. Dengan menghayati secara langsung itu, dunia luar menjadi yakin bahwa yang menjadi cita-cita kita ialah hidup sebagai bangsa yang merdeka berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya. Akibatnya negara-negara sahabat bersama-sama berjuang dengan kita untuk menyusun kekuatan dalam menghadapi kaum kolonial.

Begitu pula dengan mengetahui perjuangan bangsa-bangsa lainnya, memberikan suatu kepercayaan pada diri sendiri bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu pula berjuang demi kemerdekaannya. Pengaruh ini datang dari perjuangan Jepang melawan Rusia yang telah mencapai kemenangan gemilang. Dari kemenangan Jepang terhadap Rusia membuka kesadaran bangsa Indonesia yang tengah hangat-hangatnya berjuang melawan pemerintah

penjajah untuk lebih gigih lagi, bahwa bangsa kulit berwarna pun tidak kalah dalam melawan kaum kulit putih. Demikianlah besar pengaruh dan akibat adanya hubungan kita dengan dunia luar tersebut. Namun suatu perhatian yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita pun harus pandai pula menyeleksi dan mengambil manfaat adanya hubungan dengan dunia luar tersebut. Jangan sampai akibat adanya perhubungan itu kita tenggelam dalam lembah kehinaan dan kehancuran.

Catatan :

1. Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun, *Kota Jogjakarta 200 tahun*, Sub Panitia Penerbit, halaman 153.
Sri Sultan Hamengku Buwono VII lahir Senen Legi 4 Pebruari 1839. Setelah bliau turun takhta kemudian Begawan. Pada hari Minggu Legi 30 Januari 1921 pindahke Istana Ngambarukmo. Hari 30 Desember 1931 beliau wafat.
2. *I b i d* hal. 39.
3. J.Ph. Duyvendak, *Inleiding de ethnologic van de Indonesische Archip*, Yayasan Penerbit Gadjah Mada, terjemahan tanpa tahun, hal. 140.
4. Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Beberapa pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat hal. 181.
Kekuasaan atau dalam bahasa aging power, dan wibawa atau authority ini dalam pembicaraan sehari-hari sering dikacaukan satu dengan lain tetapi pemimpin-pemimpin ilmu masyarakat membedakannya dengan tajam. Ada pemimpin-pemimpin yang mempunyai kekuasaan besar, tetapi kewibawaan yang minim; sedangkai ada pula pemimpin-pemimpin yang rnempunyai sedikit kekuasaan tetapi kewibawaan yang besar. Keduanya ada perbedaan. Sementara dikatakan bahwa kekuasaan itu merupakan kekuatan menekan yang nyata dari suatu pimpinan sedangkan kewibawaan itu merupakan sifatsifat resminya. Kekuasaan itu lebih

luas dari kewibawaan, tetapi kekuasaan dari suatu pimpinan itu bertambah kalau kewibawaan besar, dan sebaliknya demikian pula.

5. *Ibid*, hal. 201.
6. *Op cit*, hal. 133.
7. *Ibid*.
8. Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun *op cit* hal.40.
9. *Ibid*, hal. 41.
10. Yunus Salam, *Riwayat hidup KII.A. Dahlan amal dan perjuangannya*, Depot Pengajaran Muhammadiyah, 1968, hal. 32.
11. *Ibid*, hal 33.
12. Moch. Tauchid, *Ki Hajar Dewantara Pahlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional*, hal. 27.
13. *Ibid*.
14. Prof. Sardjito, Lektor Universitas Gadjah Mada dalam kesimpulan penilaian kerjasama antara Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa sebagai berikut:
Ki Hajar berjiwa sebagai perintis dalam 3 lapangan perintis kemerdekaan nasional, perintis pendidikan nasional dan perintis kebudayaan nasional, tentang keterangan di atas lihat *Ibid*, hal. 28.
15. Prof. Dr. Slamet Mulyana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. PN Balai Pustaka, 1969 hal. 193.
16. Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun *op cit*. hal 61
17. *Ibid*, hal. 118.
18. Kanca Rasika berarti : Pegawai sementara yang masih berketurunan Paku Alaman.
19. Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun, *op cit* hal 94.
20. *Ibid*, hal. 95.
21. DR. S.D. Jong, *Salah satu sikap hidup orang Djawa*, yayasan Kanisius, Semarang. 1976 hal. 96.

22. *I b i d*, hal. 98.
23. Menurut pandangan Myrdal, bahwa agama dianggap sebagai agama rakyat, yang erat hubungannya dengan sikap-sikap tradisionalists, maka dari itu tidak dapat merangsang pembangunan, *ibid*, hal. 98.
24. *I b i d*, hal. 97.
25. Junus Salam, *Riwayat hidup K.I.A. Dahlan amal dan perjoangannya*, Depot Pengajaran Muhammadiyah 1968, hal. 3.
26. Kementerian Penerangan RI, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*, hal. 670.
27. *I b i d*, hal. 672.
28. *I b i d*, hal. 675.

BAB VII

ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG

7. 1. Keadaan Pemerintah dan Kenegaraan

7.1.1. Kerajaan-kerajaan

Pada zaman Hindia Belanda di Jawa Tengah terdapat 4 *Self Besturende Landschappen* yaitu Kasultanan Yogyakarta.. Pakualaman, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Kedudukan kerajaan-kerajaan tersebut diatur dengan kontrak politik yang selalu diperbaharui pada tiap-tiap ada pergantian raja. Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Sutakarta diikat dengan *langcontract*, sedang Pakualaman dan Mangkunegaran dengan *korte verklaring*.¹¹

Di samping *Direct Bestuurd Gebied* ada pula wilayah yang tak langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Wilayah-wilayah itu merupakan milik kerajaan-kerajaan.

Di dalam kontraknya, pihak Belanda tetap mengakui kedaulatan kerajaan-kerajaan, tersebut dalam menjalankan pemerintah di daerah wilayahnya. Kontrak-kontrak yang dibuat Belanda dengan kerajaan-kerajaan tersebut dapat dibedakan menjadi : *Lang Contract* dan *Korte Verklaring*. Dalam *Lang Contract* ditetapkan satu persatu kekuasaan Belanda yang ada hubungannya dengan kerajaan yang bersangkutan. Sedangkan dalam *korte verklaring* termuat pernyataan bahwa kerajaan-

kerajaan mengakui kekuasaan Belanda dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

Demikianlah penyelenggaraan desentralisasi pada zaman penjajahan Hindia Belanda yang berlangsung sampai pecahnya perang Pasific pada akhir 1941. Dalam perang tersebut bala tentara Jepang dengan gerak cepat menyerbu Asia Tenggara. Pada awal Maret bala tentara Jepang telah mendarat di Jawa dan akhirnya pada 9 Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah pada pihak Jepang.²⁾

Setelah tentara pendudukan Jepang mulai berkuasa di Indonesia, ditetapkan undang-undang No. 1 tentang pemerintahan bala tentara. Dalam U.U. ini ditentukan bahwa balatentara Jepang untuk sementara melangsungkan pemerintahan militer di daerah-daerah yang telah diduduki. Selanjutnya ditentukan pula bahwa badan pemerintahan dengan kekuasaannya, hukum dan U.U. dari pemerintah Hindia Belanda untuk sementara diakui sah asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang.

Wilayah bekas Hindia Belanda dibagi dalam 3 daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan militer angkatan darat berkedudukan di Jakarta untuk Jawa Madura, untuk Sumatra di Bukittinggi dan akhirnya pemerintahan militer angkatan laut berkedudukan di Makasar untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.

Pemerintah militer itu terdiri atas *Gunseircikan* (Panglima Balatentara Jepang, yang disebut *Saiko Sikikan*) sebagai pucuk pimpinan, dibawah pejabat ini terdapat *Gun sikan* (Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang) dan kepala-kepala berbagai departemen misalnya *Soomubutyoo* (Kepala Departemen Urusan Umum). *Gunsireikan* menetapkan peraturan yang dinamakan *Osamu Scirci*, sedang peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan* disebut *Osamu Kanrei*. Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam *Kan Po* (Berita Pemerintah), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh Gunseikanbu (Kantor Gunseikan) dan bernomor urut dari tahun ke tahun.

Berdasarkan *Kan Po* yang diterbitkan oleh Gunseikanbu di Jakarta dapatlah diketahui tata pemerintahan daerah di Jawa Madura pada

masa pendudukan Jepang. Dalam bulan Agustus 1942 *Gunsireikan* menetapkan undang-undang 1942/27 tentang perubahan tata pemerintahan daerah. Menurut U.U. ini di Jawa dibagi dalam daerah Syun (= residentie zaman Hindia Belanda). Syun dibagi dalam Ken (*regentschap*) dan Si (*stadsgemeente*). Diadakan pula *Tokubetu Si* (*standsgemeente* luar biasa), yaitu kota yang sangat penting dalam lapangan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang khusus ditunjuk oleh Gunseikan. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Jakarta merupakan satu-satunya kota yang ditunjuk sebagai *Tokubetu Si*.

Untuk Syun dan Tokubetu Si kemudian ditetapkan Undang-undang 1942/28 tentang aturan pemerintah Syun dan aturan pemerintahan Tokubetu Si. Sedang untuk Ken dan Si ditetapkan *Osamu Seitei* 1943/12 tentang Ken dan Si dan *Osamu Seirei* 1943/13 tentang peraturan daerah Ken dan Si serta peraturan Zi-Sei-Hi. No. 1616 (Peraturan Keuangan Ken dan Si).³⁾

Dalam garis besarnya peraturan-peraturan di atas memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Syun merupakan daerah tingkat teratas yang mempunyai pemerintahan sebagai suatu kesatuan dalam masa pemerintahan militer Jepang. Syun membawahkan Ken dan Si dalam lingkungan wilayahnya. Tokubetu Si mempunyai kedudukan yang lebih kurang sama seperti Syun, karena itu tidak berada dibawah sesuatu Syun, melainkan langsung dibawah Gunseikan.
2. Untuk masing-masing daerah itu diangkat seorang kepala daerah (*Syuntyookan*, *Tokubetu Sityoo*, *Kentyoo* dan *Sityoo*).
3. Ketentuan-ketentuan dalam *Regentschapsordonnantie* dan *Handsgemeente-ordonantie* dulu tetap berlaku bagi Ken dan Si (termasuk Tokubetu Si)
4. Wewenang-wewenang yang dulu dijalankan oleh *raad* dan *college* pemerintah harian daripada *regentschap* dan *stadsgemeente* kini semuanya dijalankan oleh *Kentyoo* dan *Sityoo*. Sistem pemerintahan tunggal.

5. Sistem pemerintahan tunggal tanpa dewan-dewan perwakilan rakyat dilaksanakan secara konsekwen sampai September 1943. Dalam bulan tersebut ditetapkan peraturan yang mengatur pembentukan dewan-dewan baik di pusat maupun di daerah yang berfungsi sebagai badan penasehat bagi pejabat tunggal. Tetapi dalam lingkungan pemerintahan daerah dewan ini hanya diadakan di Syun dan Tokubetu Si.
6. Si menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dalam lingkungan wilayahnya. Utusan pemerintahan umum (Pangreh praja) yang dalam *stadsgemeente* dulu diurus oleh regent dan pejabat-pejabat bawahannya kini dipegang oleh *Sityoo*.
7. Pengawasan terhadap daerah-daerah otonom yang dulu dipegang oleh Gubernur jenderal dan aparatur pemerintahan provinsi kini semuanya dilakukan oleh *Gunseikan*.⁴⁾

Mengenai persekutuan-persekutuan masyarakat adat dan *zelfbesturende landschappen* di Jawa, pada umumnya tetap dipertahankan seperti keadaan pada zaman Hindia Belanda. Nama-namanya diubah, yaitu desa disebut *Ku* dan *landchap* dinamakan *Kooti*. Para raja *Landschappen* itu melalui pengambilan sumpah dan pelantikan baru memutuskan hubungannya dengan Kerajaan Belanda. Mereka ini disebut *Koo*. Kedudukan *Koo* dianggap sebagai anggota keluarga dari raja Jepang.

Pemerintah Balatentara Jepang yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945 pada umumnya tetap merupakan politik desentralisasi Hindia Belanda. Tetapi pembentukan daerah dihubungkan dengan siasat militer untuk menghadapi pelbagai kemungkinan dalam masa perang. Sebagai daerah yang dianggap terpenting, ialah Syun (termasuk Tokubetu Si dan Kooti) yang diharapkan dapat berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri; terutama pangan apabila sampai terputus hubungannya dengan daerah-daerah lain. Pemerintah daerah Syun dipegang oleh seorang pejabat tunggal, supaya dapat bertindak cepat. Usaha Syunyookan terutama ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerahnya. Semua peraturan, tindakan pemerintah Balatentara Jepang yang mengenai pemerintahan Jepang ditujukan kepada kepentingan dan usaha perang

(war-efford). Dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaan dan mempertahankan penjajahan Jepang di Indonesia.⁵¹

Untuk memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman, sejak zaman Belanda. Jepang sampai kepada zaman Republik Indonesia, dibawah ini diterangkan secara singkat susunan kedua pemerintahan tersebut,

Susunan Pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman di Zaman Belanda dan Jepang

- A. Di zaman Belanda susunan pemerintahan Kasultanan sebagai berikut :

S.P. Kangjeng Sultan
Pepatih Dalem (Ryksbestuurder)
Bupati Patih Kepatihan (Sekretaris I)
Bupati prentah (Sekretaris II)
Kabupaten - kabupaten
Kawedanan-kawedanan
Kelurahan-kelurahan

Susunan pemerintahan di Paku Alaman sebagai berikut :

S.P. Kangjeng Gusti Paku Alam
Bupati Patih
Asisten Wedana Kota, merangkap sekretaris
Kabupaten (Adikarta)
Kapanewon-kapanewon
Kalurahan-kalurahan

Yang tersebut di atas adalah susunan Pamong Praja (Bestuur) yang dulu lazim disebut Pangreh Praja.

Kecuali :

1. Pangreh Praja, pemerintahan pusat juga mempunyai bagian-bagian lain, yaitu:

- II. Pengadilan Daerah Dalem yang dihapuskan pada zaman Kemerdekaan (1947) karena tidak adanya *klassy stitie*
- III. Keuangan yang dibagi lagi menjadi :
 - a. dinas akontan
 - b. urusan begroting
 - c. urusan pajak.
- IV. Perguruan-perguruan; pada zaman Belanda dinas Kasultanan (dan Paku Alaman) hanya sekolah desa saja. Pada zaman Jepang sekolah-sekolah rakyat dan menengah diserahkan Kasultanan.
- V. Kesehatan rakyat; pada zaman Belanda pemimpinnya Gubernur selanjutnya diteruskan oleh Jepang.
- VI. Kemakmuran:
 - a. Pertanian, b. Kehewanan; c. Kerajinan, d. Kehutanan, adalah dinas Gubermen Belanda dan dilanjutkan pada zaman Jepang.
- VII. Pekerjaan umum. Sifatnya lokal, Gubermen hanya menguruskan bangunan-bangunan kepunyaan sendiri, dengan dipimpin oleh seorang Hoofdorpzichter.
- VIII. Penghasilan Negeri;
 - a. Air ledeng; b. Pasar dan c. Perusahaan tanah, tetap sampai sekarang.

Pada zaman Belanda status Kasultanan Yogyakarta diatur dengan *politiek contrac*. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh *Ryksbestuurder* yang diangkat oleh raja, dengan persetujuan Belanda.

Sebelum memangku jabatannya, *Ryksbestuurde* itu harus bersumpah pada Belanda bahwa jika ada konflik antara Belanda dan raja, *Ryksbestuurde* harus memihak kepada Belanda.

B. Perubahan-perubahan penting dalam zaman Jepang.

Bulan April 1945 Kawedanan dihapuskan, di Pusat diadakan Panitiadyati, yang berjumlah 6 yaitu:

1. Sanapanitra (Sekretariat).
2. Wiyatapraja (Pendidikan)

3. Racana Panwara (Perencana Penerangan)
4. Ayahan Umum (sekarang Jawatan Pemerintahan Umum) 276
5. Ekonomi
6. Yayasan umum

Pada tanggal 1 Agustus 1945 jabatan Papatih Dalem (Ryksbestuurder) kosong dan tidak diisi lagi. S.P. Sultan memegang pimpinan sendiri. Diadakan utaradyapati, sebagian pekerjaan yang terlalu besar untuk dimasukkan dalam paniradyapati. Akan tetapi kecil untuk dijadikan paniradyapati sendiri. Tiga udaradya yang diadakan ialah :

1. Uruan Pegawai
2. Pemeriksa Keuangan
3. Sridarmajuki (pengadilan Darah Dalem).⁶⁾

7.1.2. Pemerintahan Jepang

Kota Yogyakarta telah berdiri bersamaan dengan dibangunnya keraton Yogyakarta pada tahun 1755 (M) yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi. Setelah dinobatkan menjadi Sultan, Pangeran Mangkubumi memakai nama Sri Sultan Hamengku Buwono ke-1. Sultan inilah yang menurunkan para Sultan di Yogyakarta hingga yang ke-10 sekarang ini.

Di samping kekuasaan Belanda, di daerah Yogyakarta ada dua kekuasaan lain, ialah pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman.

Daerah Paku Alaman di dalam kota meliputi daerah sekitar kemantren Paku Alaman, dan di luar kota meliputi daerah di sekitar Kabupaten Adikarto. Daerah Kabupaten Adikarto belum lama ini telah digabungkan menjadi satu dengan daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi Kabupaten Kulon Progo. Adanya pemerintahan ini akibat politik pecah belah pemerintahan kolonial Belanda (1813).

Tempat kedudukan pemerintah Daerah (Istimewa) Yogyakarta ialah kota Yogyakarta. Di tengah-tengah kota ini dari Utara ke Selatan melintang Sungai Code. Sebelah Barat sungai merupakan wilayah Kasultanan, sedang sebelah Timur sungai termasuk wilayah Paku Alaman.

Pada zaman Hindia Belanda kota Yogyakarta hanya merupakan daerah district yang termasuk lingkungan Kabupaten Yogyakarta. Dalam tahun 1941 oleh anggota Volksraad Hindia Belanda R.W. Joyo Al-Jimadhudoyo pernah diusulkan kepada Volksraad agar kota ini dijadikan sebuah stadsgemeente. Usul ini ditolak oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, karena pembentukan sebagai stadsgenicente itu akan berarti terlepasnya Kota Yogyakarta dari lingkungan Kasultanan Yogyakarta.⁷⁾

Pada waktu zaman pendudukan Jepang, Yogyakarta juga mengalami beberapa perubahan susunan pemerintahan. Pada bulan April 1945 terjadi suatu perubahan, yaitu Kabupaten Yogya yang dulunya mempunyai urusan meliputi daerah Kalasan, Sleman dan Godean di pecah menjadi 2 (dua) yakni: Kabupaten kota dan Kabupaten Sleman, yang daerahnya meliputi kawedanan-kawedanan Sleman, Kalasan dan Godean. Nama kabupaten dalam bahasa Jepang disebut Si. Kota Yogyakarta tidak mempunyai status Gemeente. Jadi masih tetap dibawah pemerintahan *zelfbestuur* yang berpusat di Kapatihan Danurjan.

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dahulu disebut *Zelfbestuur*, yaitu pemerintanan yang diatur sendiri, mempunyai alat peraturan sendiri dan tidak harus menurut peraturan-peraturan pemerintah jajahan Belanda yang berpusat di Jakarta. Meskipun demikian pemerintahan Kasultanan tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah Belanda.

Para Sultan yang bertahta selama itu berkedudukan sebagai kepala daerah Kasultanan, akan tetapi tidak aktif memegang pemerintahan. Adapun yang memegang tampuk kekuasaan pemerintah adalah Papatih Dalem (Ryksbestuurde), dengan sebutan Raden Aria Adipati Danurejo.⁸⁾

Di Zaman Jepang Kemantren Panembahan dan Kemantren Kadipaten dijadikan satu kemantren Kraton. Selanjutnya Kalurahan Tegalrejo dan Kalurahan Karangwaru menjadi satu kemantren Tegalrejo. Sedangkan Kalurahan Kuncen (ditambah dengan sebagian daerah Kemantren Ngampilan dan sebagian daerah Kemantren Mantrijero yang terletak sebelah Kulon Kali Winongo) menjadi

Kemantren Wirobrajan. Dengan perubahan-perubahan ini maka didalam kota terdapat dua belas kemantren dan dua orang Bupati. Bupati Kota Kasultanan adalah K.R.T. Harjodiningrat dan daerah Kota Paku Alaman dipimpin langsung oleh Bupati Patih Paku Alaman K.P.R. Suryoatmojo.

Wedana dan Asisten Wedana dalam kota dihapuskan dan sebutan mantri Kepala Kampung telah lama diroboh menjadi Mantri

Pangreh Praja. Perubahan ini dibuat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebelum Jepang menduduki Indonesia, dan para Mantri Pangreh Praja berhubungan langsung dengan Bupati kota tersebut.⁹⁾

Dengan adanya reorganisasi Kabupaten-kabupaten pada zaman penjajahan Jepang di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 1945, yang tadinya kota Yogyakarta merupakan bagian dari Kabupaten Yogyakarta yang meliputi kawedanan-kawedanan kota, Sleman dan Kalasan dijadikan Kabupaten yang berdiri sendiri yang dikepalai seorang Bupati Kota dengan sebutan *Shi-Co*. Dengan demikian maka kabupaten Kota tidak dinamakan *Yogyakarta Ken*, melainkan diberi nama *Yogyakarta-Shi* (Shi dalam bahasa Jepang sebenarnya berarti Standsgemeente atau Kota Otonom). Akan tetapi kota Yogyakarta meskipun telah mengalami perubahan nama, tetap merupakan daerah kabupaten yang bersifat administratif yang tidak mempunyai kekuatan otonomi sama sekali. Disamping itu *Yogyakarta Shi-Co* hanya mempunyai kekuasaan atas kota Yogyakarta, yang menjadi bagian dari Kasultanan. Bagian kota Yogyakarta yang menjadi daerah Paku Alaman dipimpin sendiri oleh pemerintah Paku Alaman dengan petugas seorang Bupati. Dengan demikian Kota Yogyakarta pada saat itu mempunyai dua orang Bupati Kota, ialah Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota Paku Alaman.¹⁰⁾

Sejak zaman Jepang pekerjaan Mantri Pamong Praja menjadi makin berat. Di samping urusan administrasi terutama Menteri P.P. berkewajiban menggerakkan rakyat dalam berbagai untuk kepentingan peperangan.

Rukun Tetangga (*Topari Gumi*) dan Rukun Kampung (*Aza*) dibentuk. Badan-badan kemasyarakatan ini dinyatakan sebagai badan

pemerintah yang terbawah serta berkewajiban turut aktif dalam lapangan pemerintahan. Sejak itu maka bagi mantri P.P. tidak mungkin lagi mengadakan hubungan langsung dengan penduduk, melainkan harus melalui Azat Yo dan Tomari Gumityo. Rukun Kampung yang pada zaman Belanda merupakan organisasi masyarakat, yang bekerja dalam lapangan sosial (Gotong royong dalam hal kematian, perkawinan. dll.), pada zaman Jepang kedudukannya diperkuat, karena pemerintah pendudukan Jepang mengerti betul bahwa dalam susunan Rukun Kampung terdapat unsur-unsur yang dapat menjadi kekuatan (potentie) untuk membantu-usaha-usaha peperangan. Nama Rukun Kampung diganti Aza, ketuanya disebut Azatyoo. Sedang Rukun Tetangga disebut Tonari Gumi. Dalam peraturan yang menentukan kedudukan Rukun Kampung yang berlaku di Yogyakarta, disebutkan dengan tegas bahwa Rukun Kampung adalah badan pemerintah yang paling bawah. Setelah diaktifkan maka dalam praktek Rukun Kampung menjadi *verlengstuk* dari Kemantren P P. Tetapi Pengurus Rukun Kampung adalah tenaga yang dipilih oleh rayat dan tidak menerima penghargaan materiel dari Pemerintah, jadi merupakan tenaga perjuangan. Sebelum Jepang masuk ke Yogyakarta nama-nama jalan, tempat dan lain-lain yang mempergunakan nama asing telah diganti oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IIX dengan nama-nama Jawa asli, hingga Pemerintah Balatentara tidak mempunyai alasan untuk menggantikannya dengan nama-nama Jepang, seperti yang terjadi di kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia, terutama Jakarta, Bandung, Semarang dan sebagainya

Demikianlah sedikit gambaran tata pemerintahan daerah di Jawa umumnya dan daerah Yogyakarta khususnya dalam masa pendudukan Jepang sejak tahun 1942 sampai Agustus 1945.

7.1.3 Sikap terhadap Pemerintah Jepang

Dengan pecahnya perang Pasifik, maka oleh Pemimpin-pemimpin nasional sudah diperhitungkan, bahwa peristiwa itu akan membawa masa yang sangat menentukan, bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka. Peristiwa akan meledaknya perang Pasifik, membuka sesuatu bagi bangsa Indonesia. Karena

perang Pasifik membuka kemungkinan-kemungkinan bagi bangsa Indonesia untuk melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan. Hal ini telah sejak tahun dua puluhan oleh pemimpin-pemimpin nasional kita diperingatkan “agar rakyat Indonesia segera menjadi satu Bangsa yang teguh dan Sentosa.”

Bung Karno antara lain mengatakan dalam pembelaannya sendiri yang dituangkan dalam “Indonesia Menggugat”

".....
Kami mengatakan bahwa untuk merebut upah yang begini tingginya itulah, belorong-belorong Imperialis Amerika, Jepang dan Inggris itu akan sampai nekat adu tenaga didalam suatu peperangan untuk soal "to be or not to be" suatu peperangan untuk soal "er op of er onder" suatu soal hidup atau mati. Oleh karena itulah perang Pasifik ini tidak akan berupa perang-perangan kecil saja, tetapi akan berupa perang yang menggerakkan seluruh dunia manusia, menggenjlongkan seluruh daerah Lautan Teduh. Kami sebagai rakyat yang negerinya sangat dekat dengan Lautan Pasifik itu, yang tinggal dipinggir Lautan Teduh itu kami harus mengerti bahwa hebatnya perang Pasifik ini tentu akan terasa pula pengaruhnya di negeri kami, bahwa api yang akan menyala-nyala di Lautan Teduh itu akan terasa pula panasnya dilingkungan negeri kami sendiri. Kami harus mengerti bahwa jikalau rakyat Indonesia itu tidak segera menjadi suatu bangsa yang teguh dan sentosa, jikalau susunan pergaulan hidup Indonesia itu belum diperteguh sedikit-sedikit, kami bisa juga tidak taban atau tidak cukup kekuasaan untuk menderitakan pengaruh peledakan itu bisa juga tidak tahan berdiri kalau umpamanya buntut salah satu belorong ini menyabet mengenai diri kami. Oleh karena itu, maka kami sering-sering memperingatkan rakyat Indonesia itu akan bahaya yang akan mengancam akan dirinya dari arah Lautan Teduh itu, bahkan dengan maksud merusak ketenteraman rakyat, tetapi ialah untuk menggugah keyakinan rakyat Indonesia akan perlunya lekas-lekas menjadi bangsa!

Kami tidak mengatakarn, bahwa perang Pasifik itu tahun ini, akan pecah. Kami tidak pula mengatakan, bahwa ia sebentar lagi akan

meledak. Kami hanyalah akan memperingatkan, bahwa dengan adanya persaingan Amerika, Jepang dan Inggris, peperangan itu akan terjadi.

Ratulangi didalam rapat dewan rakyat 14 Juli 1928 jadi lebih dahulu dari kami membicarakan datangnya perang Pasifik itu juga, Begitulah Dr. Ratulangi berpidato :

"Dalam pada itu, didalam perjuangan adu tenaga antara golongan "sini" dan "sana", oleh golongan-golongan Barat terlampaui dilupakan bahwa keadaan politik Indonesia dikelak kemudian hari adalah juga dan buat sebagian besar, akan dikuasai evolusi selanjutnya dari keadaan internasional di daerah yang disebut Timur Jauh. Secara psikologis bisa dikatakan bahwa orang dengan begitu saja menekan kenyataan, bahwa soal jajahan : Indonesia adalah suatu bagian dari soal-soal Pasifik yang besar, dan bahwa negeri ini tidak bisa melepaskan diri dari nasibnya, barangkali secara aktif, tapi pasti secara pasif akan terlibat dalam pertikaian Pasifik, dalam mana kekuasaan-kekuasaan yang hebat akan tabrakan....."

Demikianlah historis-visioner Bung Karno, yang telah melihat dan menganalisa situasi-situasi revolusioner seperti disebut diatas. Bung Karno telah memperhitungkan dan merencanakan akan mempergunakan situasi revolusioner tersebut untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan sehingga pada tahun 1929 dikatakan oleh Bung Karno sendiri bahwa dengan hati berdebar-debar karena kegembiraan dan yang tak tertahan, didalam tahun 1929 itu terlepaslah dari mulut saya kalimat yang terkenal "Kaum imperialisme awaslah, Awas! Jikalau nanti geledegnya perang Pasifik menyambar-nyambar dan membelah angkasa, jikalau nanti air Samodra Teduh menjadi merah dan bumi disekelilingnya menggempa karena ledakan bom dan dinamit, disitu rakyat Indonesia akan merdeka! "

Dr. Ratulangi yang juga telah memperhitungkan situasi-situasi revolusioner itu dan telah merencanakan akan mempergunakannya, dapat dibaca dalam tulisannya yang berjudul "Indonesia in de Pacific" 1937. Buku tersebut menggambarkan secara terbuka, kemungkinan-kemungkinan bila perang Pacific pecah. Jepang dalam hal ini menjadi

tenaga pendobrak dan yang akan membuka kesempatan-kesempatan yang baik bagi bangsa Indonesia.

Dalam pergolakan dunia waktu itu, jelas sekali kelihatan politik dan strategi Jepang. Asia Tenggara yang menjadi tujuannya terutama Indonesia. Terhadap Indonesia Jepang mempunyai harapan bahwa Indonesia akan dapat memberikan posisi yang strategis dan juga sumber-sumber kekuatan untuk melanjutkan peperangan seterusnya.

Bagi pergerakan kebangsaan Indonesia, akan meletusnya perang Pasifik itu sudah diperhitungkan dan direncanakan untuk membawa perjuangan itu pada tingkatan Nasional: untuk membawa rakyat Indonesia cepat menjadi bangsa. Sehingga dengan demikian tercipta dan dibangunlah Negara Nasional Indonesia Merdeka. Ramalan Joyoboyo telah menyebutkan : akan datangnya bangsa yang berkulit kuning yang akan "Berkuasa seumur jagung". Jelas sudah, seperti yang telah diungkapkan oleh Bung Karno pada rapat-rapat umum didepan kader PNI pada Kongres PNI dalam majalah-majalah maupun dalam brosur-brosur pada tahun 1929 mengenai perihal perhitungan situasi revolusioner itu.

Jadi masalah yang dihadapi: bagaimana membawa perjuangan kebangsaan Indonesia itu ke dalam situasi internasional, yang meledak dengan Perang Dunia ke II itu dalam tingkat pertama, sebenarnya Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia.

Dalam menghadapi pergolakan dunia tadi, perhitungan strategi politik dan militer, jelas memberikan gambaran adanya periode kekosongan kekuasaan. Ini merupakan suatu persoalan yang dihadapi dalam perkembangan Bangsa Indonesia. Dan kesempatan tersebut digunakan oleh pemuda-pemuda Indonesia sehingga untuk pertama kali disaat-saat terakhir kekuasaan Belanda, Bangsa Indonesia mendapat kesempatan untuk perkembangan perjuangan bangsa Indonesia. Kekosongan ini harus diisi dan dipergunakan dengan baik, dikala Jepang sudah berjalan sewaktu Belanda praktis telah kalah. Dalam perkembangan politik, dapat diikuti dan dipahami masalah-masalah Perjuangan Angkatan pencoba, Perjuangan Angkatan Pendobrak dll. mempunyai kekurangan-kekurangan dalam siasat. Tetapi yang jelas dan nyata adalah disebabkan faktor waktu yang amat

pendek itu. Orang tidak mengira begitu cepat Belanda mendapat kekalahan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bergerak. Waktu yang begitu cepat, diluar perhitungan, sehingga sulit menggunakan kekosongan itu. Setelah kekosongan itu tidak dapat diisi dengan baik, maka mudahlah Jepang dapat masuk di seluruh wilayah Indonesia dengan hanya mengambil alih kedudukan Belanda. Kemudian menekan kebangkitan Nasional itu. Jadi penjajahan dari tangan yang satu berpindah ketangan yang lain. Perubahan besar baru datang memjelang keruntuhan kekuasaan Jepang.¹¹⁾

Ketika Jepang datang menduduki tanah air kita, salah satu surat kabar di Surabaya melihat tulisan-tulisan dengan huruf-huruf besar di halaman muka sebagai berikut :

“Sekaranglah tiba sorga dunia bagi Indonesia”.

Mereka yang percaya akan tulisan ini, segera akan menyesal. Harapan baik yang ditatuh bangsa Indonesia kepada Dai Nippon cepat-cepat beralih menjadi suatu kekecewaan yang besar. Apa yang dikatakan Jepang sebagai “Kemakmuran bersama Asia Timur Raya” terbukti hanya kata-kata yang kosong belaka. *Hakkoichi-u* (dunia sebagai satu keluarga besar dengan Dai Nippon’ sebagai kepala keluarga) tak lain hanya Imperialisme Jepang saja. *Hakko-ichi-u* adalah “mission sacre” ala Jepang untuk mengelabui mata bangsa Indonesia. Mula-mula dipropagandakan apa yang disebut gerakan Tiga A (Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia) ‘maka penyebar benih kewibawaan Jepang diantara rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia mau bernaung dibawah kekuasaan Jepang, hingga mudah dijadikan alatnya. Kemudian disusul dengan gerakan “Putera” (Pusat Tenaga Rakyat) untuk dapat mengerahkan seluruh tenaga rakyat untuk kepentingan Jepang.

Di Indonesia perkembangan politik lebih belakangan, kira-kira ditahun 1943 Jepang mulai mengikut sertakan orang-orang Indonesia untuk pertalianan Indonesia. Pada waktu itu dikenal empat serangkai yaitu Sukarno Hatta, Dewantoro dan H. Mansur, untuk menyuslin satu pimpinan nasional dan mulai menyiapkan juga pembangunan tentara : Pembela Tanah Air (PETA). Jepang membentuk tentara PETA, karena didalam siasat pertahanan Jepang pada waktu itu terpaksa membatasi

kekuatannya kepada kekuatan defensif saja. Dengan demikian pertahanan regional, harus dibangun dengan kekuatan di daerah itu sendiri. Akhirnya didirikan gerakan *Jawa Hookokai* (Perhimpunan Kebaktian Rakyat), agar rakyat Indonesia mau mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan Jepang. Ketika itu Jepang telah mengalami kekalahan yang besar di Laut Karang (Guadal ganal) dan mulai didesak mundur oleh Angkatan Perang USA Jenderal Mac Arthur. Makin mendekatnya pertempuran, makin giat Jepang memberikan latihan-latihan militer kepada pemuda-pemuda kita; Sainendan, Keibodan, Peta. Maksudnya agar pemuda-pemuda kita mau mempertahankan Indonesia mati-matian terhadap serangan sekutu, yang berarti pula ikut mempertahankan kepentingan Jepang. Agar pertahanan ini bersifat total maka Jepang tidak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Bantuan dibidang militer tidak mungkin tanpa ada diberikan landasan politik. Karena itulah timbul janji Jepang yang terkenal dengan “Indonesia akan diberi kemerdekaan dikelak kemudian hari”. Tetapi sebelum ini dapat dilaksanakan, Jepang telah jatuh menyerah kepada Sekutu.

Di bawah tekanan hidup yang berat sekali dan penderitaan yang hebat selama pemerintahan imperialisme dan fasisme Jepang, nasionalisme bangsa Indonesia tidaklah sekali-kali mati meskipun tidak nampak secara jelas. Bahkan pendudukan, Jepang ini mempertebal dan memperbesar rasa anti rasialisme dan nasionalisme. Anthithese antara penjajah yang yang dijajah nampak lebih jelas, jika, pemimpin-pemimpin kita (empat serangkai) dan pemuda-pemuda kita menceburkan diri dalam lapangannya masing-masing. Maka ini tidaklah berarti bahwa mereka itu mau menyelenggarakan kepentingan Jepang. Tetapi justru hendak menarik keuntungan-keuntungan sebesar-besarnya dalam kesempatan ini untuk kepentingan bangsa dan tanah airnya. Mereka bukanlah colaborator seperti yang sering dituduhkan. Mereka yang memilih bergerak dibawah tanah pun ada, misalnya Sultan Syahrir. Kita tetap nasionalistis. Karena itu tidaklah mengherankan kalau pemberontakan di Blitar, dibawah pimpinan Supriyadi terhadap Jepang mendapat sambutan baik diantara bangsa Indonesia. Pemberontakan serentak PETA sebetulnya telah

direncanakan seluruh Jawa, tetapi gagal. Meskipun begitu sebagai pendobrak pertama fasis imperialisme Jepang patut mendapat penghargaan. Nasionalisme Indonesia tidak niat di zaman Jepang. Jepang hendak mempererat kita, tetapi lkita pun hendak mempererat mereka.¹²⁾

Pada menjelang keruntuhan Jepang, tidak mudah untuk mengetahui, kapan mulai keruntuhan kekuasaan Jepang Karena pada waktu itu semua radio harus disegel, radio harus dibawa ke kantor Hosokyoku dan di situ ada bagian dinas radio Jepang. Sehingga yang dapat didengar hanya radio tertentu yaitu gelombang-gelombang Jepang saja. Sedangkan gelombang-gelombang lainnya tidak dapat didengar.

Tetapi apabila didengar kabar dan beritanya serta dihubungkan dengan situasi internasional, bahwa di Eropa ofensif Jerman telah buntu di Sovyet Rusia yaitu di Stalingrad tahun 1944. Demikian pula hanya di Pasifik, ofensif Jepang telah buntu setelah mengalami kekalahan berkali-kali dilautan Coral atau pulau Solomon sebelah Timur Australia. Sejak itu mereka mengadakan gerakan mundur. Sehingga piminan nasional di Indonesia mulai memperhitungkan situasi politik dalam dan luarnegeri yang akan memberikan jalan untuk langkah-langkah selanjutnya.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 diumumkan oleh Presiden Truman dari USA dan Perdana Menteri Itlee dari Inggris, bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang terhadap sekutu tersebut, setelah jatuhnya bom atom di Jepang yaitu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus di Nagasaki. Juga dikeluarkan seluruh perlawanan dan memerintah untuk menyerah.

Di Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945 itu terlihat ada suatu kekosongan. Pada awal Agustus 1945 Bung Karno dan kawan-kawan telah kembali di Tanah air, setelah memenuhi panggilan dari markas besar Marsekal Terauci Dalat (Dekat Saigon). Panggilan Bung Karno dan kawan-kawan oleh Marsekal Terauci tersebut guna mendapat janji Jepang, bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Keadaan politik Indonesia sudah jelas. Dengan adanya bermacam-macam inisiatip, seperti yang telah disusun sejak dari tahun-tahun tiga puluhan

(Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebebasan Indonesia, disingkat PPPKD) sampai zaman Jepang dari masa Pusat Tenaga Rakyat) (PUTERA Jawa Hokokay dan BPPKI) berusaha secara langsung ataupun tidak langsung merebut dan memproklamkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada saat yang sempit itu. Sebagaimana telah dirumuskan oleh Dewan Nasional yang menyatakan bahwa "Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia."¹³⁾

Pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamkan Kemerdekaan kita, pada tanggal 17 Agustus 1945, Ibu kota kita (Yogyakarta) adalah daerah yang mengetahui peristiwa penting itu. Oleh Gunsaikanbu, berita penting itu dicegah untuk disiarkan. Tetapi larangan itu barti diterima oleh Sendenbu di Ibukota setelah Proklamasi itu disiarkan Proklamasi itu disiarkan cepat dengan perantaraan Nipon ke Kabupaten-kabupaten, Nicyid Besar dan Mesjid Paku Alaman oleh wartawan-wartawan. Sebab pada hari itu hari Jum'at, maka dengan cepat sekali berita yang sangat penting itu tersiar di seluruh kampung dan desa-desa.

Sekalipun pembesar-pembesa Jepang yang berkuasa di Yogyakarta sudah tahu tentang Proklamasi Indonesia Merdeka, mereka tahu juga bahwa rakyat Indoensia di Yogyakarta bagaikan tertekan, kini meloncat bersemangat merdeka namun mereka enggan memberikan segala kekuasaan kepada rakyat Indonesia. Dan kalau dengan jalan damai jelas kekuasaan itu sukar untuk didapat. Pilihan lain tidak ada, kecuali merebut dengan jalan setengah kekerasan atau kekerasan yang bulat : jalan apa saja harus ditempuh dan kekuasaan Jepang harus direbut oleh rakyat Indonesia.

Dengan demikian terjadilah peristiwa-peristiwa penting dalam merebut kemerdekaan tengah penjajah Jepang di ibukota kita ini. Terjadilah perampasan-perampasan senjata-senjata dari tangan Tentara Jepang dengan korban yang sangat kecil. Karena dengan kebijaksanaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Butaicho Pingit dan Kotabaru, telah datang sendiri menyerahkan semua senjata yang ada dibawah kekuasaannya kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Dalam saat menyerang Butaicho Kotabaru pada malam sebelum menyerah telah mengambil korban jiwa 19 orang pemuda.. Kejadian yang menyedilikan itu disebabkan perbuatan pengacau yang sengaja datang dari lain tempat. Tetapi beberapa diantaranya pada keesokan harinya dapat ditangkap oleh pemuda-pemuda kita. Peristiwa ini dikenal dengan pertempuran kotabaru.

Dalam saat-saat permulaan revolusi itu, peristiwa penting dalam perkembangan politik yang menyangkut ibukota kita adalah sambutan Kepala Daerah Kesultanan dan Kadipaten Paku Alaman dalam menghadapi dan menyambut proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sembilan belas hari kemudian dari tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengumumkan amanatnya dicorong Radio Yogyakarta. Amanat beliau itu disambut dengan penuh semangat dan kegembiraan oleh seluruh penduduk Yogyakarta. Amanat tersebut berisi :

1. Bahwa Megeri Ngayogyakarta-Adiningrat yang bersifat Kerajaan adalah Daerah Isitimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Adiningrat dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan Pemerintah dalam Negeri Ngayogyakarta mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Adiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negara kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.¹⁴⁾

Pada saat yang hampir bersamaan, Sri Paku Alam VIII juga mengumumkan amanatnya yang isi dan jiwanya bersamaan. Dalam sejarah revolusi, ketegasan sikap kedua orang kepala Daerah itu tidak bisa dilewatkan demikian saja Yogyakarta dan Paku Alaman adalah 2 zelfbestuur (Swapraja) pertama yang menyatakan dengan tegas, berdiri dibelakang Proklamasi.

Segenap pegawai kantor-kantor baik kantor negeri maupun partikelir, perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik seluruh Yogyakarta pada tanggal 26 - 9 - 1945, mulai jam 10 pagi menjalankan aksi serentak untuk mengambil alih kekuasaan atau pimpinan yang hingga saat itu masih ditangan Jepang (bangsa lain).

Aksi serentak itu dijalankan dengan kemauan bulat dari segenap pegawai mulai dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Pada jam 10 pagi itu sebagian besar pada perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik timbul pemogokan-pemogokan dari pihak pegawai-pegawainya. Aksi pemogokan ini mendapat bantuan sepenuhnya dari barisan rakyat, pemuda-pemuda BKR yang teratur rapi mengepung masing-masing tempat yang perlu. Dengan kekuatan yang teratur rapi dari pimpinan itu yang bijaksana maka mereka mendesak dengan keras supaya pimpinan dan kekuasaan disahkan kepada pegawai Indonesia. Hingga jam 8 malam pimpinan disemua kantor telah ada ditangan bangsa Indonesia. Hasilnya memuaskan dan walaupun di beberapa terjadi bentrokan agak keras.

Adapun pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang ada disaat itu telah dapat diambil alih kekuasaannya porkan kepada KNI ialah :

1. Pusat Nanyo Kohatsu Yogyakarta dan cabang-cabangnya
2. Jawatan kehutanan
3. Daiken sangyo.
4. Pabrik-pabrik gula Tanjung Tirta.
5. Padokan
6. Beran.
7. Cebongan.
8. Gondanglipuro
9. Plered
10. Gesikan
11. Rewulu
12. Medari
13. Pundong
14. Sewu Galur dan
15. Salakan

Selanjutnya keesokan harinya tanggal 27-9-1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan pengumuman kepada segenap penduduk, bahwa pada tanggal 26--1945 kekuasaan Pemerintah Daerah Yogyakarta seluruhnya telah ada ditangan Bangsa Indonesia. Tidak ada sebuah kantor atau instansi lainnya yang ketinggalan untuk menjalankan aksi tersebut, dan ternyata semua berhasil dengan memuaskan. Selanjutnya diberitahukan bahwa mulai dari tanggal 26-9 itu, kekuasaan pemerintah Daerah telah ada ditangan kedua Sri Paduka dan Komite Nasional. Aksi penduduk merebut kekuasaan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan penduduk bagsa asing di Yogyakarta. Untuk itu Komite Nasional mengeluarkan pengumuman guna menjamin keselamatan penduduk bangsa asing di Yogyakarta, yang isinya sebagai berikut :

"Dipermalukan kepada segenap penduduk Yogyakarta bahwa Komite Nasional bersama-sama rakyat Indonesia menjamin keselamatan penduduk bangsa-bangsa lain yang ada disini. Pertanggungjawaban atas jaminan itu tidak lain ialah jika bangsa-bangsa lain yang bertempat tinggal disini mengindahkan, menghormati dan tunduk pada segala peraturan Negara republik Indonesia serta merasa pula bahwa mereka berada di negeri bangsa asing yang suka merdeka. Juga dengan jalan saling hormat menghormati antara bangsa-bangsa dapatlah keselamatan terjamin serta keamanan umum terjaga".

Yang sangat menggembirakan masyarakat Yogyakarta ialah dengan terbitnya surat kabar : "Kedaulatan Rakyat" pada tanggal 27-9-1945. Dengan demikian segala peristiwa dan pengumuman-pengumuman penting segera dapat disampaikan kepada rakyat. Soal-soal maklumat, amanat dari pemimpin, berita hasil perjuangan yang menggembirakan, peperangan rakyat dengan pidato, dengan bisik-nisik, dengan poster-poster slogan-slogan yang tertulis ditembok-tembok atau toko, didinding kereta api atau mobil, semua itu memperhebat semangat rakyat.

Selanjutnya guna menyempurnakan penjagaan keamanan, maka pada tanggal 28-9-1945 Pusat Pimpinan Keamanan yang berkantor di Kepatihan, diserahkan kepada KNI dan diwah pimpinan Sri Paduka

Sultan. Penyerahan ini dengan maksud untuk lebih tertib dan kuatnya penjagaan keamanan di bawah satu pimpinan. Dalam usahanya menghilangkan kekukasaan asing di Yogyakarta, maka usahanya menghilangkan kekuasaan asing di Yogyakarta, maka pada tanggal 19-10-1945 Barisan Penjaga umum dari KNI dengan bersenjata lengkap dapat menduduki rumah bekas Tyokan YOgyakarta. Setelah dilucuti pada hari itu juga gedung Tyokan, digunakan atau ditempati KNI dan selanjutnya diberi nama "Gedung Nasional".

Guna menyempurnakan organisasi pemerintah, maka pada tanggal 5-10-1945 oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan maklumat Ni. 1 tentang Badan Sensur. Adapun susunannya dibentuk dari pelbagai instansi dan organisasi, yaitu wakil-wakil dari Kesultanan; Paku Alaman; KNI Daerah; Pusat KEpolisian RI daerah Yogyakarta; kantor Polisi Kota; BKR pada badan sensur tersebut adalah mengatur segala macam penerbitan, siaran, percetakan, potret, semboyan, cerita, klise, gambar, lakon wayang (wayang orang, ketoprak, sandiwara), surat-surat dengan perantaraan pos dan kawat dan membicarakan antar telpon. Demikian usaha pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dimulai dari sedikit demi sedikit.

Seperti halnya dilai-lain tempat, banyak pernyataan taat dari rakyat kepada Pemerintah republik Indomesia. Pernyataan serupa di Yogyakarta terjadi pula, seperti dengan adanya :

1. Mosi PEKIK (Pemuda Kita Kasultanan) pada tanggal 27-9-1945, terdiri dari dari pemuda, pegawai Kasultanan, yang isinya menyatakan kebulatan tekadnya untuk memelihara dan mempererat kemerdekaan Indonesia, dengan patuh menjalankan perintah dari Sri Sultan.
2. Mosi para abdi dalem Praja Paku Alaman Yogyakarta yang isinya senada dengan mosi "Pekik".

Sesuai dengan keadaan negara kita, yang telah merdeka yang seharusnya bersih dari pengaruh pemerintah asing, maka oleh pemerintah daerah dikeluarkan maklutnat No. 3; yang antara lain isinya melucuti semua orang dari tanda jasa dan kebesaran dari pemerintah Jepang. Ini penting agar jangan sampai orang terganggu

keamanannya, karena dirumahnya memiliki benda-benda tersebut. Seperti antara lain : barang-barang lambang kebaktian, surat pujian, vandel, tanda-tanda penghargaan lain yang asalnya dari Jepang.¹⁵⁾

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mulailah terjadi perubahan penting terhadap kedudukan Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman. Pada tanggal 19-8-1945 Presiden RI mengeluarkan piagam kedudukan yang menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, pada kedudukannya sebagai Kepala Kasultanan Yogyakarta.

Bagi Sri Paku Alam VIII dikeluarkan pula piagam kedudukan yang sama yaitu sebagai kepala Daerah Paku Alaman. Dalam piagam termaksud kepada kedua beliau itu ditaruh kepercayaan, bahwa masing-masing akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerahnya sebagai sebagian dari Republik Indonesia.

Kedua piagam kedudukan itu diserahkan sendiri oleh menteri-menteri negara Mr. Sartono dan Mr. Marainis yang diutus Presiden Sukarno dan tiba di Yogyakarta pada tanggal 6-9-1945.

Demikianlah tata pemerintahan daerah di Jawa khususnya Daerah Yogyakarta dalam zaman pendudukan Jepang sejak tahun 1942 sampai 1945.

7.2 Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat.

7.2.1 Keadaan Sosial Ekonomi

Menjelang akhir tahun 1944 pemerintah mengeluarkan petunjuk baru serta seruan sebagai berikut "Penyerahan romusha secara efektif harus dilanjutkan dengan cepat dan menurut rencana. Disamping itu, penyerahan romusha harus tidak boleh diabaikan. Dianjurkan agar mempergunakan cara-cara yang tepat di dalam pertanian, misalnya dianjurkan agar lebih banyak digunakan tenaga hewan sehingga jumlah pekerja dapat dikurangi, dan tenaganya dapat digunakan sebagai tenaga romusha. Wanita antara umur 16--25 tahun atau lebih harus juga dapat digunakan untuk keperluan romusha.

Di daerah-daerah dibentuk Panitia Penyerahan Romusha (PPR) yang berkewajiban untuk menyerahkan tenaga romusha berdasarkan apa yang disebut laporan sementara atau daftar sementara. Di dalam

prakteknya daftar ini adalah daftar tunjukkan yang disusun oleh kepala daerah setempat. Penyerahan romusha ini ada yang karena kehendak sendiri untuk menjadi romusha tetapi juga ada yang karena paksaan. Dan propaganda-propagandanya dilakukan oleh anggota-anggota Guoo-Sangiin dan Sangikai karesidenan. Demikian pula dilakukan propaganda lewat Rukun Tetangga atau Tonari Gumi. Maka tidak mengherankan apabila pada tahun itu organisasi Rukun Tetangga disempurnakan. Pada pasal 3 ayat 3 dari peraturan penyempurnaan ini antara lain disebutkan bahwa Rukun Tetangga harus menganjurkan penambahan hasil.

Di samping itu diantara putra-putra petani ini ada yang turut mendaftarkan diri sebagai Haiho, atau pembantu serdadu Jepang. Dalam pada itu keharusan menyerahkan padi kepada Jepang makin lama makin diperkeras.

Di dalam program Tonari Gumi juga dicantumkan tentang penyerahan padi pada negeri dan pengumpulan biji jarak yang sudah masak.

Penyerahan padi kepada pemerintah tentara pendudukan mengakibatkan bertambahnya, kesengsaraan rakyat. Keadaan di kota tidak sama dengan di desa. Tekanan untuk menjadi romusha tidak begitu berat seperti di desa, meskipun di sini juga terdapat kemelaratan dan kesengsaraan. Dari statistik penduduk dapat dikumpulkan bahwa golongan umur antara 20--25 tahun selalu lebih kecil daripada golongan umur di atas dan dibawahnya.¹⁷⁾

Hal ini dapat dimengerti, karena angka kematian pada akhir perang Pasifik meningkat, sedangkan angka kelahiran menurun.

Dalam pada itu keadaan pegawai negeri sebagai kelas konsumen sarigat menyedihkan. Dibandingkan dengan keadaan sebelum perang, gajinya sangat kurang cukup dan terpaksa menjual barang-barang yang tadinya dikumpulkan pada waktu masih makmur. Tenaga mereka tidak dibutuhkan oleh suatu kelas pernasaran, tetapi oleh suatu *anything class*, yang perhitungannya bukan lagi soal untung rugi, tetapi soal mati atau hidup. Mulai zaman Jepang hingga zaman Republik pegawai negeri tidak lagi mendapat fasilitas-fasilitas seperti di zaman lampau, karena

adanya perbedaan di dalam politik dan pandangan hidup daripada pemerintahan masing-masing.¹⁸⁾

Pada masa pendudukan Jepang keadaan ekonomi sosial di dan daerah Yogyakarta khususnya sangat menyedihkan. Sebagai salah satu contoh gambaran mengenai kebobrokan keadsan sosial ekonomi ialah keadaan buruh-buruh pada pertambangan Mangaan di daerah Kulon Progo. Masuknya Jepang ke Indonesia telah menyebabkan ditutupnya tambang mangaan di desa Kuripan. Setelah pertambangan itu dibuka kembali oleh Jepang, banyak dibutuhkan tenaga buruh. Kebutuhan tenaga buruh untuk pertambangan mangaan pada masa Jepang ini sangat banyak dibanding dengan pada masa penjajahan Belanda. Dan dapat kita ketahui pula bahwa kebanyakan pengerahan tenaga buruh ini dilakukan secara paksa Pemberian upah buruh yang sangat rendah, mengakibatkan timbulnya kemelaratan yang merajalela. Kesehatan mereka tidak terjamin. Juga jaminan keamanan terhadap buruh yang sedang beketa Adak ada. Semua hasil-hasil tambang tersebut diangkut ke Jepang. Usaha Jepang ini berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945.¹⁹⁾

Menjelang kedatangan balatentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1942, banyak terjadi perampokan-perampokan yang dilakukan oleh penduduk. Sebagai sasaran perampokan adalah toko-toko dan gudang-gudang serta pabrik-pabrik. Keadaan ini menimbulkan kekacauan di lapangan ekonomi. Di tambah pada masa itu pegawai pemerintah tidak menerima gaji dalam beberapa bulan. Dengan demikian banyak orang menjual barang-barangnya untuk ditukar dengan makanan. Maka timbul perdagangan barang-barang bekas di sepanjang jalan. Harga-harga bahan makanan pokok seperti beras dan gula membubung tinggi. Mulailah orang-orang makan ketela sebagai ganti beras. Kenaikan harga ini kemudian ditindak tegas oleh tentara Jepang. Tetapi ternyata menaikkan harga tersebut tak dapat dikendalikan lagi. Kenaikan barga ini disebabkan jumlah barang-barang kebutuhan sangat terbatas, dan nilai uang merosot. Lebih-lebih setelah tentara sendiri membeli barang-barang bahan makanan, dengan maksud untuk mempertahankan barga pasar dan menolong penduduk desa yang sudah menjual hasil tanamannya.

Pengambilan beras dari desa-desa dilakukan melalui koperasi-koperasi yang pada hakekatnya merupakan badan-badan pemungut pajak di bawah pengawasan Syomin Komici-Sodan Dyo atau Jawatan Penerangan Koperasi dan perdagangan dibantu oleh Jawatan pertanian.

Padi yang telah terkumpul harus dijual ke pabrik beras, tentu saja dengan harga pemerintah. Tetapi keadaan ini hanya berlaku sebentar, karena kemudian pabrik-pabrik padi tidak mau membayar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentara pendudukan, sehingga hal ini sangat merugikan petani. Maka diambil keputusan pemerintah sendiri yang membeli padi dari orang tani, sedang pabrik-pabrik padi diwajibkan membeli padi pemerintah. Tetapi dengan memburuknya keadaan peperangan, tindakan Jepang menjadi lebih kejam. Petani diwajibkan menyerahkan padi kepada pemerintah tanpa ganti kerugian. Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah mengadakan hubungan langsung dengan rakyat, tetapi selalu mempergunakan peraturan-peraturan. Kini pemerintah tentara pendudukan Jepang langsung berhubungan dengan petani, keluar masu desa sendiri. Sehingga dengan demikian pemerintah, Jepang ini langsung, dirasakan oleh masyarakat desa. Keadaan ini berlangsung selama pemerintahan pendudukan Jepang. Setelah zaman kemerdekaan kewajiban petani menyetorkan padi kepada pemerintah ditiadakan.

7.3 Kehidupan Seni Budaya

7.3.1 Pendidikan

Masalah pendidikan dan Pengajaran adalah merupakan suatu alat untuk dapat mengerti seberapa jauh dan dalamnya, baik tentang pengetahuan yang telah dimiliki oleh bangsa. Oleh karena itu orang berpendapat bahwa sejarah pendidikan dan pengajaran bukanlah masalah yang kecil dan bukanlah suatu hal yang berharga.

Sejarah dapat dipelajari dengan mengumpulkan peringatan-peringatan, catatan-catatan yang kongkrit dan abstrak. Dan dikuatkan dengan peninggalan-peninggalan yang mengandung segala pengalaman-pengalaman yang sungguh-sungguh terjadi dalam perjalanan hidup bagi suatu bangsa pada zaman yang telah lampau.

Pengalaman-pengalaman itu dalam kesimpulannya, memberi pengertian dan menjadi suatu petunjuk, tentang kesukaran, penderitaan, perubahan, pertumbuhan, perjuangan yang dialami oleh bangsa itu. Dalam tiap-tiap pengalaman itu, terseliplah soal pendidikan dan pengajaran yang telah meliputi dan meresap dalam darah daging., sehingga mewujudkan adat dan kebiasaan pada suatu bangsa pada masa yang lalu. Perlu diingat dan diketahui dari masa ke masa, sifat dan ujud pendidikan dan pengajarannya itu mengalami juga perubahan-perubahan yang berakibat kemajuan dan kemunduran.

Adapun yang menyebabkan kemajuan dari kemunduran itu ialah buah perjuangan yang diusahakan oleh seluruh lapisan rakyat dan pemerintahannya. Jadi apabila bangsa yang bersifat statis, niscaya soal pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran. Dan sebaliknya bangsa yang bersemangat hidup dinamis, maka dapat dipastikan, bahwa bangsa itu menggalang pendidikan dan pengajaran yang ada di dalam alam kemajuan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Timbul tenggelamnya pendidikan dan pengajaran itu tergantung atas pergerakan sesuatu bangsa dan sangat berhubungan rapat dengan pemerintahan negaranya.¹⁶⁾

Tujuan Pendidikan Umum

Yang dimaksud dengan pendidikan itu ialah memimpin dan membiasakan anak-anak menuju ke arah kesehatan badan dan kesehatan rokhani bangsanya. Sudali barang tentu masing-masing bangsa telah mempunyai konsepsi tentang batas-batas dan kelanjutan pendidikan yang dianggapnya baik dan berfaedah bagi si anak pada hidupnya dimasa depan Indonesia yang merugakan rentetan kepulauan-kepulauan dari Barat sampai ke Timur, mengenai soal pendidikan, biarpun sedikit ada perbedaannya. Perbedaan itu disebabkan atas iklim, kebudayaan dan agama yang berkembang pada tiap-tiap daerah yang bersangkutan.

Rumah Tangga Sebagai Pusat dan Syarat

Masalah pendidikari di Yogya pada masa yang lampau pada umumnya belum memerlukan pendidikan dalam arti biasa, tetapi yang menjadi pusat dan syarat pendidikan ialah berupa kesejahteraan rumah

tangga. Dengan kata lain, pendidikan berpusat pada kesejahteraan dan keutuhan hidup bersama antara ibu dan bapak karena telah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun bahwa ibu dan bapaklah yang bertanggung jawab atas segala hal ikhnlal kehidupan anak-anaknya. Dengan adanya kebiasaan itu para ibu dan bapak merasa harus bertindak sebagai contoh untuk anak cucu dan keturunan selanjutnya.¹⁷⁾

7.3.1 Pendidikan

KGPAA Paku Alam VII, walaupun berpendidikan Barat, tetapi ingin memperkembangkan pendidikan kebangsaan yang berhubungan langsung dengan adat naluri, kebudayaan dan kesenian peninggalan dari para leluhurnya, KGPAA Paku Alam VII adalah ketua perkumpulan amal pengajaran “Netrale Onderwys Srichting” sampai ovaflatnya.

Pada masa KGPAA Paku Adam VIII tahun 1944 didirikan sekolah Rakyat Puro Paku Alaman.

Sekolah Tinggi Agama Katholik

Sejak dari permulaan missi Katolik bagi orang Indonesia telah terbuka kesempatan untuk menjadi Imam (Pastur). Sebelum tahun 1936 tiap orang Indonesia yang mempunyai keinginan menjadi imam, terpaksa meneruskan pelajarannya di luar negeri dan masuk suatu orde. Namun makin lama makin terang, bahwa untuk perkembangan misi apalagi untuk menambah jumlah Pastur Indonesia adalah perlu sekali mendirikan suatu Sekolah Theologi sendiri, sehingga warga Indonesia yang tidak ingin masuk orde dapat meneruskan dan menyelesaikan pelajaran dengan tidak usah meninggalkan tanah air. Untuk keperluan ini pada tahun 1936 telah didirikan di Muntilan Perguruan Tinggi Agama Katholik dengan nama Seminari Agung.

Pada tahun 1938 Seminari Agung ini dipindah dari Muntilan ke Metoyudan dan pada tahun 1940 Seminari Agung dipindahkan ke Jl. Code 2 di Yogya sampai tahun 1953 Seminari Agung telah menghasilkan 43 Pastur Indonesia.

Seminari Agung adalah kepunyaan Vikariat Semarang yang bekerja di bawah pimpinan tertinggi Vikaris Apostolik.

HCS	-	1
Schakil School	1	1
Kleinhandel School	1	-
CVO	2	1
MULO	2	1

Sekolah-sekolah lainnya dalam Kotapraja Yogyakarta :

Selain sekolah-sekolah yang telah ada pada zaman Hindia Belanda pada zaman Jepang didirikan sekolah-sekolah baru seperti S.G.B.II Puteri

Pada 7 Nopember 1942 sekolah Guru B puteri didirikan di Jetis, dengan nama sekolah Guru Perempuan. Sekolah beserta asramanya mengambil tempat di gedung yang sekarang dipakai oleh Fakultas Teknik UGM.

Pelajaran SGB II puteri dapat dicapai dalam 4 tahun. Pada waktu itu sekolah mulai dengan 10 kelas,

yaitu kelas I terdiri 3 bagian
 II terdiri 2 bagian
 III terdiri 2 bagian
 IV terdiri 3 bagian

dengan jumlah muridnya semua ada 300 orang. Mereka berasal dari Normaalschool, HIK van Devenger school dan Inheensche Mulo.

Pada 1 April 1943 S.G.B. itu dipindah ke Jl. Jati 2, dibawah pimpinan Sri Umiyati, adik almarhum Dr. Sutomo Surabaya. Pada tahun 1948 Sri Umiyati meletakkan jabatannya, dan diganti oleh Dien Wongsodjojo. Mulai tahun 1942 hingga 1948 kira-kira ada 300 orang murid, yang lulus dalam ujian penghabisan S.G.B.

Sekolah Teknik Negeri I dan II Yogyakarta

Didirikan pada tanggal 17 Pebruari 1943 dalam pemerintahan pendudukan Jepang Sekolah Teknik Negeri I ini sebagai penjelmaannya Sekolah P.J.S. Jaman Penjajahan Belanda. Menurut keterangan dari Walikota Yogyakarta, Mr.Sudarisman Poerwokoessoemo, kala dihitung sejak P.J.S umur STN sudah 36 tahun.

Sekolah Tehnik Pertama (STP) di Yogyakarta

Pada zaman penjajahan Belanda, STP bernama *Ambachtschool voor Inlanders*, pertama dibuka di Yogyakarta pada tahun 1919, pada tahun 1932 namanya diganti menjadi *Ambachtsleergang*.

Pada zaman Jepang nama sekolah tersebut diganti sekolah Menengah Teknik Pertama (*Koya Gakko*). Keadaannya tidak berubah.

Pada pertengahan tahun 1943 sekolah tersebut diserahkan kepada pemerintah DIY Oleh Kementerian P.P. dan K. nama sekolah tersebut diganti dengan sekolah Pertukangan.

Berdirinya SMP Negeri di Yogyakarta

Jumlah SMP Negeri ada 5 yaitu :

1. SMP I Negeri didirikan pada 11-9-1942 di Jl. Terbantaman 25.
2. SMP II Neg, didirikan pada 12-9-1942 di Secodiningratan
3. SMP III Neg, didirikan pada tahun 1946 di Pajeksan 18.
4. SMP IV Neg, didirikan pada 15-2-1950 di Jl. Pogung.
5. SMP V Neg, didirikan pada 1-4-1944 di Jl. Serayu.
6. SMP No. 1, 2 dan 5 didirikan pada zaman Pemerintahan Jepang.

Perkembangan SMA/A Negeri Yogyakarta

Sebelum zaman Jepang di kota Yogyakarta ada AMS afd B dan AMS afd A (A I bagian Sastra Timur, A.II bagian Sastra Barat). Hanya kota Yogyakarta saja yang pernah mempunyai AMS afd A, di kota lain tidak ada.

Oleh karena itu maka pada zaman Jepang kota Yogyakarta mempunyai Guru bahasa Indonesia bekas Guru AMS afdeling/A.

Setelah sekolah-sekolah lanjutan di Yogyakarta dibuka kembali pada permulaan tahun ajaran 1942--1943 (zaman Jepang) bagian A dan B dipersatukan lagi, selanjutnya disebut SMT.

Pemimpin pertama R.J. Katamsi, lalu R. Sugardo, Dr. Priyono juga telah pernah memimpin SMT tersebut. Perubahan AMS menjadi SMT itu berarti suatu kemunduran, sebab baik bagian A maupun bagian B pelajarannya merosot.

Riwayat Fakultas Teknik

Fakultas inilah yang dibuka di Yogyakarta lebih dulu dari pada fakultas yang lain. Setelah tentara Belanda menyerah kepada tentara Jepang 7 Maret 1942 semua Perguruan Tinggi pemerintah Hindia Belanda ditutup.

Dua tahun sesudah tentara Jepang masuk di Indonesia tanggal 1 April 1944 sekolah Teknik Tinggi Bandung dibuka lagi dengan Koo Gyo Dai Gakko, dengan bagian :

- a. Civil
- b. Kimia;
- c. Listrik dan Mesin

7.3.2 Kesenian

Perkembangan Kebudayaan Daerah Yogyakarta

Untuk keperluan pelajaran seni suara vokal Jawa, Ki Hajar Dewantoro telah menciptakan suatu titi raras yang tidak berdasarkan atas nama wilahan, melainkan atas dasar suara, yang disebut titi raras Sari-swara.

Pada tahun 1942 BPH Pakuningrat mencoba mengubah suatu titi raras yang diberi nama Pana titi raras. Gending-gending yang digunakan dalam pertunjukan wayang orang, seperti : Prabudewa, Prabuwibawa, Prabumanukma dan lain-lain merupakan ciptaan R.T.Purbaningrat. Wedana Parentah Punakawan, seorang ahli kerawitan dan tari-tarian.

KPAA Danureja pencipta kesenian Mandra Wanara, berhasil mengubah gending sekar, artinya Sekar dijadikan gending, dan sekar gending yaitu sekar membarengi srepegan. Kesemuanya tadi sudah diselaraskan dengan langgam dan ragam baru yang berlangsung sampai sekarang. R.W.Larassumbaga, hamba kraton Wedana Kawijayan, telah banyak mengubah bermacam-macam ragam coraknya gending. Gubahannya yang bersifat umum ialah gending Westminster, dan yang terakhir ialah gending Teguh jiwa. Kepandaiannya yang utama mengendan (memainkan kendang).

Tokoh karawitan lainnya yang terkenal, pada masa itu ialah Ki Ngabehi Tjakrawasita, hamba Istana Paku Alaman, mantri Kanijagan. Ia menguasai teori maupun praktek, sehingga orang-orang yang daung berguru kepadanya tidak akan kecewa. Buah gubahannya yang terpenting ialah gending Djajamanggalagita, satu ramuan beragam-ragam gending yang mengandung jalinan jalannya sejarah Indoneta.

Ahli seni suara ragam Yogya sampai dewasa ini yang dapat dikemukakan hanya KRT Madukusuma. Ia memberi pelajaran tembang seperti tembang gede, tengahan, macapat, lagon kekawin dan. odo-odo. Semuanya disusun, diatur, diberi catatan-catatan serta ditulis dalam note-baik. Ia menjadi hamba keraton Yogya sejak Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

R.M.Djajadipura yang sudah dikemukakan di muka dalam seni -suara besar juga jasanya. Beliau mengumpulkan sekalian paugeran-paugeran atau waton-waton dalam pedalangan, seperti janturan beserta apalannya yang hingga kini digunakan di sekolah pedalangan Habiranda Yogyakarta.

Sejak Sri Sultan Hamengku Buwono VIII naik tahta jejak kerawitan (caking kerawitan) sudah seperti sekarang ini. Kendang digembyakkan (tatangan jiblon), memakai gerongan, akhir (suwuh), gending-gending ayak-ayak dan slepegan dengan dibarengi bunyinya gong.

Kursus dalang 1925-1945

Pada tahun 1925 di Yogyakarta telah didirikan kursus dalang bernama "Habiranda" singkatan dari perkataan : Hamurwani, Biwari, Rancangan, Dalang. Kursus ini didirikan atas inisiatif KRT Djajadipura, dengan tunjangan HB VIII, sebagai pelaksananya ialah : BPH Suryadiningrat dan KRT Djajadipura. Setelah segala sesuatu siap maka pada hari Minggu Wage tanggal 5 Muharam tahun ke 1856 atau 1925 diadakan pertemuan untuk merundingkannya.

Sesudah ketua Habiranda, R.M. Riya Gandaatmadja wafat, kegiatan pengurus Habiranda kurang lancar. Fungsi Ketua organisasi berada di tangan R.W. Sastrasuprpta, yang setelah diangkat menjadi Bupati bernama KRT Pantjakoesoema.

Sejak berada di bawah pimpinan KRT Pantjakoesoema RW.Madukusuma tidak lagi memberi pelajaran di kursus tersebut.

Dengan demikian, pelopor Guru Kursus “Habiranda” tersebut hanyalah tinggal RB Cermawicara saja. Sesudah KRT Pantjakoesoema wafat maka ketua pamong dipegang oleh BPH. Pakuningrat almarhum. Dan RB.Cermawicara dibebaskan dari tugasnya.

Sesudah KRT. Pantjakoesoema wafat, BPH Pakuningrat memegang ketua Pengurus Habiranda, dan KRT Madukusuma muncul lagi sebagai Bendahara. Dalam fase ini Habiranda mulai dihidupkan lagi, dengan mengambil tempat kursus diperkapalan alun-alun lor Yogyakarta wayang

Wayang

Krida Beksa Wirama (KBW)

Dorongan untuk mendirikan perkumpulan seni tari Krida Beksa Wirama, ialah tidak adanya orang yang berniat memberi pelajaran seni beksa, sejak berakhirnya Perang Dunia I.

KBW dan Jong Jawa bekerja sama dalam menyelenggarakan seni tari ini. KBW menyediakan guru-gurunya dan Jong Jawa menyediakan murid-muridnya, anak-anak sekolah lanjutan.

Selain memberi pelajaran tari wayang wong, KBW juga memberi pelajaran tari Bedaya Serimpi, dan tidak lupa mengajarkan tari wayang orang, yang digubah setelah mengadakan wayang orang topeng yang dilakukan oleh penari-penari dari desa-desa di bawah pimpinan para dalang.

Di luar daerah Yogyakarta didirikan cabang-cabangnya, seperti di Jakarta dibawah pimpinan Prop. Dr. Priyono dan di Malang di bawah pimpinan Drs. Kuntjaraningrat (bekas wakil ketua Irama Citra). Banyak pertunjukan yang telah diselenggarakan oleh KBW. terutama pada jaman pendudukan Jepang (97 kali). KBW besar pengaruhnya terhadap perkembangan seni tari gaya Yogyakarta hingga dewasa ini.

Pada kira-kira tahun 1943 dimulailah oleh angkatan muda untuk dari sedikit kesedikit meninggalkan tradisi bahari dalam mengadakan tari-tarian bersama putra-putri di dalam peranan tari-tarian wayang,

beksan, petilan dan sebagainya. Pun melancarkan tari-tarian yang berbentuk ceritera atau sebagian dari sesuatu ceritera tidak lagi dari wayang purwa, wayang gedog atau menak, melainkan dari kitab-kitab sejarah atau kesusasteraan seperti Pararaton, Lutung Kasarung dan sebagainya.

Dengan demikian, sejak itu tari-tarian Jawa (Bedaya khususnya) tak dimiliki dan dinikmati sebagian lapisan masyarakat saja, melainkan masyarakat umum mulai melihat, menikmati, memuji dan ikut serta menyelenggarakan Tari golek yang digemari masyarakat tersebar luas sampai ke luar daerah Yogyakarta.

7.3.3 Pengaruh Seni Budaya Jepang

Kita beralasan dan berhak untuk mengutuk kejahatan moral dan penindasan kemanusiaan pemerintahan Jepang pada waktu itu (1942--1945), dengan dijalankannya pemusnahan secara berencana kaum intelektual kita. Yang dijalankan dengan hukum mati, merendahkan taraf kaum intelek kita dengan jalan memerintahkan murid-murid lebih banyak berbaris dan berkinrohoshi (keda paksa) di papirin atau di lapangan dari pada sungguh-sungguh belajar. Meskipun demikian ada satu hal yang berharga yakni timbulnya kesadaran akan kepribadian, bangsa kita, akibat kesengsaraan itu.

Di luar rencana pemerintah Jepang sendiri, alat-alat propaganda Jepang yang disesuaikan untuk menindas cita-cita rakyat Indonesia menjadi satu bangsa, justru menumbuhkan serta meratakan kesadaran itu. Dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan rakyat Indonesia guna melawan pihak sekutu yang mengancam kemenangan Jepang di "Asia Timur Raya". Pada mulanya rakyat Indonesia di perkenankan mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Menjelang berakhirnya Perang Pasifik Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia" dikelak kemudian hari". Hal ini merangsang dengan hebatnya kesadaran kebangsaan Indonesia yang sudah beratus-ratus tahun terbelenggu di bawah penjajahan bangsa-bangsa Portugis, Inggris dan Belanda.

Keadaannya hampir serupa dengan peristiwa lahirnya pergerakan kebangsaan Indonesia yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tahun

1908. Tetapi kalau kesadaran kebangsaan yang berkembang di zaman Belanda masih terbatas pada kaum pergerakan, dan sulit meresap ke dalam lapisan rakyat Indonesia lainnya. Di zaman Jepang kesadaran kita sebagai satu bangsa yang mempunyai watak serta kemauan kepribadian sendiri telah merata ke segenap anggota masyarakat. Kesadaran kebangsaan itu terpupuk oleh propaganda Jepang dan hasil kemenangan Jepang yang memperlihatkan superioritet bangsa Asia di atas bangsa-bangsa Eropa di dalam peperangan. Tetapi tidak kecil pula kebencian kita terhadap penindasan pemerintah Jepang.

Zaman Jepang merupakan masa-masa persiapan bagi pertumbuhan seni dan budaya setelah kemerdekaan. Tokoh-tokoh penting yang memelopori serta mengilhami perkembangan seni dan budaya sampai dewasa ini, pada saat itu sedang membentuk diri. Ada yang sudah sampai kepada penemuan ekspresi pribadinya, ada pula yang benar-benar baru pada tingkat "mengasah pena" dan melakukan coret-coret pertama. Dalam golongan pertama dapat disebut, pelukis-pelukis Sudjojono, Basuki, Resobowo, Henk Ngantung, Burhanuddin, kakak beradik Agus dan Otto Djaja. Emiria Sunassa, komponis-komponis Cornel Simanjuntak, Ismail, Kusbini : penulis : Chairil Anwar, Idrus, Amir Hamzah, Bahrin Rangkuti ; dramawan-dramawan : Usmar Ismail, Kotot Sukardi, nama-nama yang setelah kemerdekaan nanti memberi perwatakan serta suasana kepada perkembangan seni modern kita. Didalam golongan seniman yang masih pada tingkat persiapan pada waktu itu diantaranya ialah pelukis : Barli, pelukis Bakri Siregar, Musikus Syaiful Bakri.

Seniman-seniman dan budayawan di zaman Jepang memiliki tempat-tempat bertemu dan beketja, yang tidak sedikit memberi dorongan kepada semangat mencipta dan membahas. Tempat pertemuan dipusatkan pada Pusat Siaran Radio di Jakarta dan terutama pada lembaga yang banyak mendapat celan sebagai "Kulturkammer" penjajahan Jepang yakni Pusat Kebudayaan atau *Keimin Bunkei Sidoshō*.

Bagaimanapun terkutuknya pengekanan kemerdekaan ekspresi diri di zaman Jepang, yang hendak menjadikan seni dan budaya alat yang berguna bagi "Perang Asia Timur Raya" dan sensor pemerintahan

hanya merelakan satu jenis pengungkapan yang sama semangatnya dengan tujuan kemenangan perang itu. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa di zaman Jepang telah terdapat semangat mencipta yang besar dan menjadi dasar perkembangan selanjutnya di zaman kemerdekaan. Perkembangan seni budaya pada zaman itu adalah di luar rencana pemerintah Jepang, hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil ciptaan yang tetap harus merupakan 99 corat-coret” di bawah tanah dulu, sebelum dapat diterbitkan secara resmi.

Bibit-bibit perkembangan seni dan budaya setelah kemerdekaan, sekitar tahun 1945 sampai tahun 1950, telah tumbuh di zaman Jepang Tetapi ada pula suatu cabang seni yang pada zaman Jepang telah tumbuh kuat, kemudian menunjukkan garis menurun pada permulaan zaman kemerdekaan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, terutama oleh saingan film. Cabang seni tersebut yakni drama, berbagai rombongan sandiwara berkeliling seperti “Bintang Surabaya”.

“Cahaya Timur” telah menanamkan selera serta perhatian seni drama modern kepada lapisan masyarakat luas. Ada yang menyebut zaman Jepang sebagai “musim semi sandiwara”.

Selera serta pengertian kepada seni dan budaya makin tersebar merata melalui pameran-pameran lukisan, pembahasan, ceramah dan diskusi yang diselenggarakan di Pusat Kebudayaan dan oleh rombongan-rombongan sandiwara berkeliling. Pada zaman itu kaum terpelajar tidak segan-segan memasuki dunia seni dan budaya bangsanya. Mereka memandang seni dan budaya merupakan panggilan hidupnya, yang tak kalah terhormatnya dengan kedudukan sosial yang tinggi sebagai pegawai negeri. Pemuda-pemuda pelajar telah membuang mentalitet kolonial itu dengan penuh keyakinan turut mengabdikan pada keluhuran seni dan budaya dalam lapangan seni lukis, seni sastra, seni musik atau seni drama.

Keadaan demikian mempunyai latar belakang kemasyarakatan. Sistem pendidikan zaman Belanda terutama ditujukan untuk mencetak pegawai rendah dan buruh murahan. Kehidupan serta perkembangan intelektual yang sebenarnya tidaklah dipentingkan. Kecakapan kita hanyalah ditujukan untuk memperoleh derajat sekolah yang tinggi, sehingga dapat mencapai kedudukan masyarakat yang patut. Pada masa Belanda orang hanya memikirkan kedudukan sosial. Lain halnya

dengan zaman pemerintah Jepang, orang kurang mementingkan kedudukan sosial dan pendidikan. Akan tetapi lebih memperhatikan tokoh-tokoh masyarakat yang punya hubungan erat dengan rakyat dan punya pengaruh. Kehidupan seni dan budaya tidak mementingkan kedudukan sosial pula, dan tinggi rendahnya nilai tidak ditentukan olehnya. Nilai seni dan budaya hanya ditentukan oleh tinggi rendah kehidupan intelektual yang mendasari. Meskipun pemerintah Jepang mengabaikan dan memerosotkan pendidikan sehingga mengakibatkan kekosongan pertumbuhan pikiran, terutama di sekolah dasar dan menengah, namun pendidikan pada waktu itu lebih demokratis. Pelajar yang telah dewasa tidak segan-segan turut bekerja dan berpikir mengembangkan seni budaya bangsanya.

Sejak itu perkembangan seni budaya Indonesia modern erat hubungannya dengan kaum terpelajar. Hubungan erat antara seni budaya dengan kaum terpelajar ini sebenarnya sudah mulai tampak pada zaman Pujangga Baru (1933), ketika pembentukan persatuan kebudayaan menjadi pokok perbincangan yang penting.

Untuk memahami seni perlu ada kebiasaan mengenai pengertian-pengertian pokok seni budaya dan pengetahuan yang luas mengenai peristiwa bangsa dan dunia. Seni budaya modern tidak dapat dijangkau dengan dasar pengetahuan elementer atau daerah pengalaman hidup yang sempit

Tiga masalah pokok yang dihadapi bangsa kita dalam membentuk dan mengembangkan seni dan budaya yakni :

1. Bagaimana cara menciptakan seni budaya kesatuan Indonesia sejalan dengan apa yang telah diikrarkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan pengakuan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.
2. Bagaimana kita harus menghadapi tantangan budaya modern dari Eropa Barat.
3. Bagaimana acara kita membina kehidupan seni dan budaya di alam merdeka.

Ketiga masalah ini tidak menjadi bahan pemikiran dan diskusi sarjana-sarjana, pendidik-pendidik, kebudayaan dan politikus.

Masalah-masalah ini telah dihadapi oleh seniman dan budayawan pada tahun tiga puluhan, di masa Pujangga Baru. Masalah-masalah ini di zaman Jepang juga menjadi pokok acara dalam ceramah serta diskusi di Pusat Kebudayaan. Sampai zaman kemerdekaan masalah-masalah ini tetap menjadi masaah yang aktual. Ketiga masalah pokok itu timbul karena :

1. Kita menginginkan terciptanya seni dan budaya yang dapat diikuti dan dimengerti oleh segenap bangsa Indonesia.
2. Kita menginginkan terciptanya seni dan budaya yang benar-benar mencerminkan kepribadian kita sebagai satu bangsa.
3. Kita menginginkan lahirnya seni dan budaya, dari kalbu bangsa kita dengan wajar dan tulus. Hanya alam kemerdekaan yang dapat menjamin kelahiran seni dan budaya demikian itu.

Kemerdekaan adalah syarat yang paling asasi bagi pertumbuhan seni dan budaya yang berpribadi dan agung.

Demikianlah masalah yang dihadapi seniman, sarjana, budayawan, pendidik dan politikus dalam hendak membina dan mengembangkan "seni dan budaya Indonesia. Masalah-masalah ini kecuali menjadi masalah seniman dan budayawan, juga menjadi masalahnya politikus karena bertalian erat dengan soal persatuan serta kepribadian bangsa. Penciptaan seni dan budaya Indonesia selalu bergandengan dengan pemikiran dan perjuangan bagi nasib serta cita-cita bangsanya. Kita ingat kepada tokoh-tokoh seniman yang sekaligus menjadi politikus. Seperti Rustam Effendi, Muhammad Yamin, Asmara Hadi, Abu Hanifah, Sutan Takdir Alisjahbana, I.S.Dharta, Buyung Saleh Sudjojono, Hamka dan lain-lain. Sebaliknya diantara tokoh-tokoh politik yang sejak sebelum kemerdekaan telah turut aktif berpikir dan bekerja dalam istilah seni dan budaya ialah : Bung Karno, Hatta, Syahrir dan Ki Hajar Dewantara.

Ketiga pokok masalah tersebut tetap aktual dewasa ini, sebab pemecahannya masih menghadapi kesulitan.

1. Wilayah tanah air kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan kepulauan.

2. Budaya yang datang dari Eropa Barat yang menanamkan pengaruhnya hampir ke seluruh pelosok melalui kemajuan tehnologinya.
3. Masalah kemerdekaan merupakan masalah yang penting dalam membina seni dan budaya Indonesia, baik sebelum maupun sesudah Kemerdekaan.

Seni dan budaya Indonesia dibangun di bawah tekanan masalah-masalah itu yang menuntut pemecahannya sendiri oleh seniman dan budayawan. Seniman dan budayawan harus berjuang dengan batin, pikiran dan jasmaninya untuk mengatasi masalah-masalah itu demi kehidupan seni dan budaya bangsanya. Seperti yang pernah pula dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantoro :

“Menurut timbulnya atau terjadinya, maka kebudayaan adalah hasil perjuangan manusia, yakni perjuangannya terhadap segala pengaruh “Zaman” atau masyarakatnya, yang kedua-duanya alam dan zaman tersebut menyebabkan terus-menerus berganti-ganti “bentuk dan isi kebudayaan di dalam hidupnya tiap-tiap bangsa.”

7.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan

Pada permulaan bulan Juli tahun 1943 diadakan kursus latihan kyai-kyai seluruh Jawa di kota Jakarta. Kyai-kyai itu datang dari 19 syun berjumlah 60 orang. Lama latihan satu bulan. Maksud dan tujuan diadakan latihan tersebut yakni guna mempertinggi dan menambah pengetahuan para kyai. Dalam kursus latihan itu, kyai-kyai seolah-olah mendapat ilmu yang serta baru dan dapat mendatangkan semangat baru seperti yang dikehendaki oleh Balatentara Dai Nippon.

Pada zaman Belanda kesempatan seperti tersebut belum pernah diadakan. Keadaan alam Islam pada zaman Belanda dapat diibaratkan sebagai sekuntum bunga yang layu, tetapi mekar kembali karena kesiram air hujan. Diadakannya kursus latihan tersebut menunjukkan adanya perhatian Balatentara Dai Nippon kepada agama Islam. Jepang ingin mempergunakan pengaruh para kyai untuk memperkuat kedudukannya.

Pelajaran yang diperoleh dari latihan tersebut ialah mengenai alasan-alasan dan maksud peperangan Asia Timur Raya. Maksudnya agar kyai-kyai menjadi insyap akan kesucian cita-cita peperangan. Di samping itu juga mendapat pengertian akan undang-undang dan hukum, untuk menanamkan kesadaran para kyai bahwa hukum dan undang-undang itu bukan untuk menekan agama Islam. Dengan mengadakan kursus bagi para kyai itu Jepang berusaha untuk memikat hati umat Islam.

Tindakan pemerintah Jepang bekerjasama dengan kaum ulama, sungguh tepat, sebab ulama-ulama itu menjadi pemimpin-pemimpin yang disegani masyarakat. Dengan demikian balatentara akan mendapat sokongan yang besar dari umat Islam. Sehingga untung atau celaknya umat Islam pada masa yang akan datang, tergantung pada menang kalahnya Dai Nippon di dalam peperangan ini. Kalau Nippon kalah umat Islam akan ikut jatuh, sebaliknya kalau Nippon menang, ummat Islam akan bahagia dan senang. Dengan diadakannya latihan tersebut, menunjukkan bahwa benar-benar pemerintah Jepang mendekati dan membimbing kaum ulama.

Pemerintah Dai Nippon mengambil tindakan mempersatukan kyai-kyai dan pangreh praja dianjurkan bekerja lebih erat dengan kyai-kyai. Hal ini dimaksudkan agar supaya kyai-kyai itu jangan sampai putus hubungannya dengan pemerintah.

Pada zaman Jepang keadaan yang dialami oleh petugas-petugas misi berlainan dengan yang telah dialami oleh para ulama Islam. Pada akhir pendudukan Jepang Gereja Katolik berada dalam keadaan krisis. Dan krisis itu berlangsung sampai perang kemerdekaan. Perkembangan jumlah pastor Indonesia berjalan dengan lambat.

Pemerintah Jepang menghentikan perkembangan pendidikan dan pengajaran Katolik. Sebab kekuasaan fascist tidak membiarkan pendidikan dan pengajaran dalam tangan swasta, apalagi di tangan Katolik. Meskipun Jepang rnerampas sekolah-sekolah dan gedung-gedung lain, tetapi para pastor untuk sementara dibiarkan melakukan pekerjaannya. Pada bulan Juli dan Agustus 1943 mulai diadakan pengangkatan terhadap pastor, burder dan suster. Dari missionari di Jawa yang berasal dari Nederland hanya seorang yang tetap bebas

selama zaman pendudukan Jepang, yakni J.M. Mgr. Willekens, S.Y, uskup dari Jakarta. Waktu para pastor ditawan, Mgr. Willekens dengan tegas menolak untuk ikut membantu pimpinan balatentara Dai Nippon. Ia menyatakan tidak akan meninggalkan tugas yang diserahkan Bapa Suci di Roma, kecuali jika dipaksa dan diambil dengan kekerasan. Selama pendudukan Jepang beliau bekerja dengan leluasa di kota Jakarta dibantu oleh 3 orang pastur Indonesia. Di Yogyakarta, dan tempat-tempat lain para uskup asing dan pembantu-pembantunya dimasukkan tawanan semuanya. Pekerjaan mereka diteruskan oleh pastor Indonesia.

Di daerah uskup Semarang, keadaannya dapat dikatakan lumayan. Dengan kebijaksanaan yang mendahului perjalanan Sejarah, Takhta Suci pada tanggal 1 Agustus 1940 telah mengangkat Mgr. A.Soegijopranata S.Y. sebagai uskup Indonesia yang pertama untuk wilayah Semarang. Pengangkatan Mgr. A.Soegijopranata S.Y. sebagai uskup sangat penting. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang menempati kedudukan tinggi dalam susunan gereja Katholik. Mgr. A.Soegijopranata S.Y. betul-betul memegang kekuasaan yang tertinggi di wilayah keuskupan Semarang pada waktu itu.

Pada bulan September 1943 ketika semua pastor, bruder dan suster yang berasal dari negara musuh ditawan Jepang umat Katolik daerah uskup Semarang masih tetap mendapat bimbingan dari seorang Uskup yang dibantu sejumlah pastor Indonesia, seorang pastor Jerman dan seorang pastor keturunan Indo. Kecuali itu masih ada juga sejumlah calon-calon pastor (mahasiswa) yang membantu pekerjaan Uskup Semarang. Dengan demikian pendidikan pastor, baik yang berupa Seminari menengah maupun seminari Tinggi dapat berlangsung terus, meskipun dalam keadaan darurat. Pekerjaan Rumah Sakit dan pendidikan anak piatu pun masih berjalan terus di bawah pimpinan suster-suster Indonesia (seperti misalnya : Panti Rapih, Boro Ganjuran dan Semarang).

Keadaan wilayah uskup Semarang, yang kita lukiskan itu tidak boleh menyebabkan kita lupa akan keadaan yang sangat jelek di seluruh Indonesia bagi Gereja Katolik. Hampir semua keuskupan kehilangan pimpinan. Jumlah pastor yang hanya beberapa orang itu

tidak mampu menyelenggarakan perawatan rohani bagi umat Katolik. Pelbagai pekerjaan terpaksa ditinggalkan. Gereja Katolik mengalami krisis, yang sangat berat.²⁴⁾

Demikianlah sedikit gambaran mengenai perkembangan agama dan kehidupan intelektual pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dari uraian tersebut di atas, dapatlah kita ambil kesimpulan, bahwa dari golongan Islam pada zaman Jepang mendapat kedudukan yang lebih baik. Jepang memberikan peluang bagi golongan Islam dalam mengembangkan agamanya. Banyak kyai yang mendapat kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerahnya masing-masing. Tindakan Jepang ini mempunyai maksud-maksud tertentu yakni agar Jepang mendapat dukungan yang lebih besar dari umat Islam. Tindakan Jepang yang sangat lunak terhadap golongan Islam ini, mengingat pula kedudukan Jepang nantinya dalam menghadapi pecahnya perang Pasific. Tetapi bagi Jepang mempunyai pandangan lain terhadap para missionari pada gereja-gereja Katolik. Dipandanginya oleh Jepang kaum missionari itu adalah musuh, sebab kebanyakan dari missionari-missionari itu adalah bangsa Belanda. Telah kita ketahui bahwa bangsa Belanda adalah musuh perangnya. Sehingga bagi Jepang missionari-missionari ini tidaklah akan menguntungkan, apabila diberi kebebasan seperti golongan Islam dalam mengembangkan agama. Dengan demikian diambillah suatu tindakan oleh Jepang menawan pastor-pastor yang berkebangsaan Belanda.

Gerakan perlawanan dengan motivasi agama belum sampai siap dilaksanakan keburu Jepang kalah perang dalam perang dunia II. Dan disusul sesudah 2 hari Jepang kalah tanggal 17 Agustus 1945 dididungkanlah ke penjuru dunia :

" PROKLAMASI KEMERDEKAAN KITA "

Catatan

1. The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jilid I halaman 71.
2. *Ibid*, halaman 25.
3. *Ibid*, halaman 27.
4. *Ibid*, halaman 28.
5. *Ibid*, halaman 30.
6. Kementerian Penerangan Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, halaman.
7. The Liang Gie, *op cit* halaman 80.
8. Banjaransari, Sudomo, *Sejarah Pemerintahan Kota Yogyakarta*, halaman 7.
9. *Ibid*, halaman 10.
10. Kenang-kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia 1962, halaman 14.
11. Nasution AH. (Jendral TNI) *Sejarah Perjuangan Nasional Di Bidang Bersenjata*, halaman 39, 42, 44, 46.
12. Kenang-kenarigan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia. 196 L hatman 57 - 59.
13. Nasution AH, *op cit*, halanian 55, 57.

14. Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun, Kota Yogyakarta 200 tahun, halaman 29 -- 30.
15. Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, halaman.
16. Sosrodihardjo, Sudjito, Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa, 1972, halaman 50.
17. *Ibid*, halaman 51.
18. *Ibid*, halaman 52.
19. Jawatan Penerangan DIY, Daerah Istimewa Tahun 1958, halaman 69.
20. Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun 1956, halaman 51
21. *Ibid*, halaman 55.
22. Kenang-kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia 1961, halaman 118 -- 122.
23. *Ibid*, halaman 96.
21. *Ibid*, halaman 98.
22. *Ibid*, halaman 96
23. *Ibid*, halaman 98

BAB VIII

YOGYAKARTA DALAM ZAMAN KEMERDEKAAN (1945 --1975)

Jika memperhatikan kenyataan historis yang terjadi di daerah Yogyakarta, maka jelas nampak bahwa daerah ini mempunyai keunikan-keunikan tertentu yang membedakannya dengan daerah lainnya di Indonesia. Keunikan yang dimaksud sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan oleh pimpinan tertinggi dari daerah kerajaan ini, yaitu Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku alam. Kedua "raja" ini pada waktu menyambut Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia mempunyai sikap yang sangat berbeda dengan sikap raja-raja Jawa Tengah lainnya. Sultan Hamengku Buwono. dan Paku Alam sejak awal Kemerdekaan telah menunjukkan sikap yang sangat tegas di dalam menghadapi Belanda, yaitu sikap seorang "republikein dan patriot", sikap seperti ini tidak kita jumpai di kerajaan-kerajaan lainnya di Jawa Tengah.

Setelah mendengar Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia kedua raja, penguasa daerah Yogyakarta itu pada tanggal 19 Agustus 1945 mengumumkan bahwa daerah "kerajaan Yogyakarta merupakan wilayah dari negara Republik Indonesia itu.

Proklamasi kemerdekaan kita itu dengan sendirinya melahirkan konsepsi-konsepsi yang harus dihadapi. Salah satu di antaranya ialah

menghadapi kehendak pemerintah Belanda yang ingin melanjutkan usaha penjajahannya di bumi Negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, usaha Belanda ini telah dijalankan dengan segala cara, termasuk di dalamnya menteror pemimpin-pemimpin negara kita.

Kenyataan yang demikian ini jelas sangat menyulitkan kemungkinan jalannya pengaturan pemerintahan negara kita yang ketika itu berpusat di Jakarta. Pada saat itu pihak Belanda di Jakarta telah melakukan tindakan teror terhadap diri pemimpin negara kita, antara lain terhadap diri Sutan Syahrir. Situasi yang demikian dengan sendirinya tidaklah memungkinkan Jakarta tetap dipertahankan sebagai Ibu kota/pusat pemerintahan negara kita. Sebab suasana Jakarta tidak aman bagi pengaturan kehidupan pemerintahan negara Republik yang baru saja diproklamasikan itu.

Ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Sejak itu Yogyakarta menjadi pusat kelangsungan kehidupan negara kita dalam periode revolusi fisik.

8.1 Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan

Sebelum kemerdekaan bentuk pemerintahan daerah Yogyakarta adalah “kerajaan”. Daerah ini terbagi menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman yang masing-masing diperintah oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VII. Di dalam masa kemerdekaan, sistem pemerintahan “kerajaan” dengan Sultan dan Paku Alam sebagai raja masih berlaku di daerah ini. Karena itu daerah ini diberikan kedudukan *Istimewa* oleh pemerintah pusat Republik Indonesia.

Pemberian kedudukan “Istimewa” kepada daerah Yogyakarta beserta kedua orang pimpinannya merupakan kebijaksanaan yang tepat. Kebijakan ini secara psikologis menguntungkan pemerintah negara Republik Indonesia, karena rakyat Yogyakarta sangat menghormati kedua “raja” itu, terutama terhadap Sultan Hamengku Buwono. Demikian pula sejak awal proklamasi kemerdekaan negara R.I., kedua “raja” ini dengan tegas menyatakan sikapnya bahwa daerah

mereka merupakan daerah “kerajaan istimewa” di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Status daerah dari kedudukan kedua “raja” penguasa Yogyakarta itu mendapatkan pengakuan Presiden Republik Indonesia.

8.1.1 Tumbuhnya Pemerintahan Republik Indonesia Di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

Sebagai negara yang baru saja melepaskan diri dari penjajahan, maka dengan melalui pelbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja negara kita masih perlu ditata sedemikian rupa sehingga sistem pemerintahannya secara berangsur-angsur berjalan sebagaimana yang diinginkan bersama. Maka terasa perlu untuk menciptakan suatu bentuk pemerintahan demokratis di dalam negara kita, apalagi sebagai akibat penjajahan di daerah-daerah yang merupakan wilayah negara kita yang masih banyak daerah-daerah yang berstatus “kerajaan”.

Setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia besorta KNIP nya di Yogyakarta pun segera diambil langkah-langkah ke arah pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Susunan Badan Pekerja KNI daerah Yogyakarta sebagai berikut : Muhammad Saleh (ketua), S.Yosodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo (masing-masing Wakil Ketua); selanjutnya dibantu okh 16 orang anggota, yaitu KRT Honggowongso S. Parman, H. Faried Ma’ruf, H. Hajid, Mr. Manu, Mr. Suryocokro, Wiyono, S. Parman, Sarjono, Ir. Dipokusumo, Jalaludin, Mr. S. Purwokusumo, Dr. Syamsudin, Murjodo, Umar Joyo dan Dr. Sardjito. Setelah terbentuknya Badan Pekerja KNI itu pada tanggal 30 Oktober 1945 kedua Kepala Pemerintahan daerah Yogyakarta mengeluarkan pernyataan, yang antara lain mengatakan: “Supaya jalannya pemerintahan di daerah kami berdua selaras dengan dasar-dasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka Badan Pekerja ini merupakan suatu Badan Legislatif yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat daerah kami berdua untuk membikin peraturan dan menentukan haluan jalannya pemerintahan di daerah kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat

Usaha untuk melaksanakan perubahan dalam pemerintahan daerah terus dilaksanakan. Pada tahun 1946 Sultan dan Paku Alam mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur perubahan nama dari beberapa Kapanewon. Nama Kapanewon Kenaran dan Prambanan (gaya lama) menjadi Kapanewon Kalasan dan Prambanan (baru). Perubahan ini dilakukan berdasarkan Maklumat No. 9/1946 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari. Selanjutnya dikeluarkan pula suatu maklumat (No. 10/1946) yang merubah nama Pangreh Praja menjadi Pamong Praja. Perubahan ini didasarkan kepada suatu pendapat yang mengatakan bahwa nama Pangreh Praja mengingatkan rakyat kepada situasi pada jaman penjajah. Guna lebih melancarkan jalannya pemerintahan diadakan perubahan pada instansi-instansi pemerintahan yang diatur di dalam maklumat No. 11/1946. Juga telah ditetapkan kembali badan-badan yang menyangkut badan legislatif sebagai yang diatur di dalam maklumat No. 18/1946.

Di dalam maklumat itu telah diatur pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat. Maklumat itu antara lain menyebutkan bahwa "Tiap-tiap Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Kepala Daerah masing-masing membuat peraturan tentang daerahnya masing-masing, yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan instansi yang lebih tinggi.

Untuk kelancaran pekerjaan masing-masing daerah, maka oleh dan dari anggota Dewan dibentuk Badan Pekerja yang tugas sehari-harinya menjalankan tugas legislatif. Demikian pula oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk Dewan Pemerintahan (eksekutif) yang terdiri dari beberapa anggota yang diketuai oleh Kepala-Kepala Daerah yang bersangkutan, menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dewan Pemerintahan baik seluruhnya maupun seorang-seorang, bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan. Namuh sejauh menyangkut diri Sri Sultan dan Paku Alam pertanggung jawaban yang dimaksud tidak berlaku. Dengan adanya maklumat No. 11/1946 itu, Komite Nasional Indonesia daerah Yogyakarta dibubarkan. Tugasnya diambil alih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kelengkapan-kelengkapan instansi-instansi pemerintahan untuk daerah terus diusahakan, misalnya dengan pembentukan panitia Perumahan. Demikian pula oleh pemerintah Pusat telah dilakukan penyerahan tugas-tugas Kepolisian kepada Sri Sultan. Kedudukan Sultan agak berbeda dengan Kepala Pemerintahan di daerah lainnya di Indonesia. Sebab di dalam penetapan Pemerintahan Pusat itu ditentukan bahwa Sri Sultan langsung bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat. Ketentuan ini tercantum di dalam Penetapan Pemerintah No. 17/SD Tahun 1946. Berdasarkan penetapan itulah pada tanggal 23 September 1946, di Kapatihan telah diadakan upacara penyerahan tugas-tugas Kepolisian dari Gubernur Jawa Tengah kepada Sri Sultan sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Yogyakarta.

Sejalan dengan situasi negara kita waktu itu, yaitu suasana mempertahankan Kemerdekaan, menyebabkan lahirnya suasana genting yang menyangkut persoalan keamanan harus mendapat perhatian seksama. Untuk itulah, maka hal yang menyangkut masalah ini memerlukan pengaturan khusus dari pemerintah. Dengan mendengarkan usul-usul dari pelbagai pihak, dikeluarkan suatu peraturan oleh Sri Paku Alam sebagai Ketua Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta yang menyebutkan: bahwa pembentukan Markas-Markas Pertahanan di seluruh Yogyakarta diserahkan kepada Jawatan Praja Yogyakarta. Sedang pembiayaannya diserahkan kepada Daerah-Daerah otonom yang bersangkutan menurut kebijaksanaan Kepala Jawatan Praja Daerah Yogyakarta.

Tentang pemimpin Markas-Markas Pertahanan itu ditetapkan berada di bawah Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta. Akan tetapi di dalam keadaan yang genting pimpinan itu dipegang oleh Komandan Teritorial tentara Daerah Yogyakarta.

Pada tahun 1945 kota Yogyakarta telah dibentuk dengan wilayah yang meliputi bekas Kawedanan Kota Yogyakarta. Sebelumnya Kota Yogyakarta itu termasuk daerah Kabupaten Yogyakarta. Kemudian Kawedanan Kota berubah menjadi Kabupaten Yogyakarta. Kawedanan Sleman, Kalasan, dan Godean (Kabupaten Bantul), digabungkan menjadi Kabupaten Sleman. Sejalan dengan usaha demokratisasi pemerintahan di seluruh daerah Yogyakarta, maka pada tahun 1946

dibentuklah Dewan Kota yang merupakan perwujudan dari Badan Legislatif sebagai kepala pemerintahan kota diangkatlah Bupati Kasultanan (KRT) Hardjodiningrat) dan Bupati daerah Paku Alaman (KRMT. Suryadiningrat). Untuk menjalankan dan mengendalikan pemerintahan sehari-hari dibentuklah Dewan Pemerintahan. Dewan ini beranggotakan 5 orang yang dipilih oleh dan dari Dewan Kota yang akan bersama-sama dengan Bupati Kota Kasultanan dan Paku Alaman menjalankan tugas pemerintahan. .

Berdasarkan Undang-undang No. 17/1947 dibentuklah komite Kota Yogyakarta yang wilayahnya meliputi Kabupaten Yogyakarta (kesultanan dan Paku Alaman) ditambah dengan sebagian kecil dari daerah bekas wilayah Kabupaten Bantul. Di dalam undang-undang No. 17/1947 itu dijelaskan pula bahwa pembentukan Komite Kota Yogyakarta bersifat "darurat" karena Undang-Undang yang bersifat nasional yang akan mengatur azas-azas otonomi dan desentralisasi belum ada. Untuk menjalankan pemerintahan, ditunjuklah R. Muhammad Enokh sebagai Wali Kota. Dia merupakan wali kota Yogyakarta yang pertama. Beberapa bulan kemudian R. Muhammad Enokh diangkat sebagai Menteri dalam kabinet Amir Syarifuddin. Kedudukannya sebagai Walikota digantikan oleh Mr. KRT Purwokusumo yang ketika itu masih berkedudukan sebagai Kepala Jawatan Penerangan Daerah Yogyakarta.

8.1.2 *Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan*

Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, kedua pimpinan daerah "kerajaan" Yogyakarta, masing-masing Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam, telah mengirimkan telegram kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berisi ucapan selamat atas diucapkannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 1945 Sri Sultan memberikan sambutannya atas pernyataan kemerdekaan bangsanya itu. Ketika itu antara lain Sultan berkata :

"Sekarang kemerdekaan telah berada di tangan kita, telah kita genggam, nasib nusa dan bangsa adalah di tangan kita pula,

tergantung pada kita sendiri. Kita harus menginsafi, bahwa lahirnya Indonesia merdeka itu dalam masa kegentingan. Maka semua, tiada terkecualinya, harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama, ialah, menjaga memelihara, dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa.¹⁾"

Penegasan dikemukakan Sri Sultan seperti di atas itu, jelas menunjukkan kepada bangsanya bahwa ia memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan bangsanya. Pada tanggal 26 September 1945 di Yogyakarta dilakukanlah suatu gerakan serentak dengan tujuan "merebut" kekuasaan dari tangan bangsa Jepang. Gerakan ini berhasil 15 buah pabrik telah direbut dan dikuasai oleh bangsa Indonesia. Pada hari itu juga, telah diduduki *Nampo Gingko*. Di tempat ini didapatkan uang sebanyak Rp. 180.000.000,- yang kemudian diserahkan kepada Sri Sultan. Oleh Sri Sultan uang ini diserahkan lagi kepada pemerintah pusat.²⁾ Keesokan harinya, yaitu 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Yogyakarta mengeluarkan sebuah pengumuman yang menyatakan bahwa semua kekuasaan telah berada di tangan bangsa Indonesia, dan pimpinan pemerintahan telah kembali ke tangan Sri Sultan.

Tetapi walaupun KNI daerah Yogyakarta telah menyatakan pengambil-alihan kekuasaan sebagai yang dikatakan di atas, pertumpahan darah antara pihak Jepang dengan pihak bangsa Indonesia tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 6 Oktober 1945 terjadi "Pertempuran Kota Baru". Kejadian ini berpangkal pada penolakan Jepang untuk menyerahkan garnizunnya yang terletak di Kota Baru. Pasukan-pasukan BKR dan Lsykar Rakyat yang dibantu oleh rakyat menyerbu ke gamizun Kota Baru. Pertempuran ini berlangsung selama kurang lebih 12 jam. Let. Kol. Suharto merupakan salah seorang pimpinan pertempuran. Kedua belah pihak mengalami korban, dan dari pihak kita gugur antara lain perajurit I Dewa Nyoman Oka.³⁾

Dalam suasana yang genting itu, para abdi dalem Kasultanan dan Paku Alaman menyatakan sikapnya, yaitu bersedia membela kemerdekaan bangsa Indonesia dan tetap setia kepada Sri Sultan dan Sri Paku Alam. Pernyataan ini masing-masing ditanda tangani oleh

Suprodjo Samsi dan Gondodiprodjo, pada tanggal 27 September dan 13 Oktober 1945. Pada tanggal 25 Nopember 1945 Yogyakarta telah mendapatkan pemboman dari pesawat-pesawat Sekutu. Akibatnya, Stasiun Radio, dan pabrik Watson mengalami kerusakan serta menimbulkan korban manusia sebanyak 7 orang meninggal dan beberapa orang lainnya luka-luka. Tanggal 27 Nopember kembali Sekutu membom kota Yogyakarta dan berhasil menghancurkan Balai Mataram dan Sonobudoyo.⁶⁾

Sementara itu suasana Jakarta sebagai ibukota/pusat pemerintahan Republik Indonesia makin genting dan kritis. Ini disebabkan oleh karena ketika Sekutu datang ke Indonesia, Belanda juga ikut serta dengan nama NICA dengan tujuan untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Setelah mereka berhasil menyusup masuk ke Indonesia dengan membonceng Sekutu itu, Belanda pun melaksanakan siasatnya untuk mengakhiri kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru saja dinyatakan itu. Untuk maksud itu mereka tidak segan-segan untuk melaksanakan teror-terornya kepada para pemimpin bangsa Indonesia, termasuk kepada Sukarno - Hatta, Syahrir dan lain-lain.

Dengan suasana yang demikian itu para pemimpin kita tidak akan dapat melaksanakan tugasnya untuk mengatur jalannya pemerintahan negaranya dengan tenang. Yogyakarta dianggap lebih tepat untuk menjadi ibukota/pusat pemerintahan Negara pada waktu itu.

Pemindahan ibukota/pusat pemerintahan ke Yogyakarta itu mendorong pula berpindahnya sekian banyak orang, tidak hanya pemimpin-pemimpin dan pegawai-pegawai, tetapi juga sekian banyak republikein untuk melanjutkan perlawanan kepada Belanda. Perpindahan penduduk itu menyebabkan bertambahnya penduduk "kota" Yogyakarta dari 170.000 jiwa menjadi 600.000 jiwa. Berpindahnya ibukota/pusat pemerintahan dengan sendirinya berpindah pulalah instansi-instansi dan jawatan-jawatan pemerintahan ke Yogyakarta. Namun organisasi pemerintahan belum dapat berjalan secara lebih sempurna sebagaimana yang kita kehendaki. Bahkan Bung Karno menggambarkan cara kerja pemerintahan waktu itu seperti sebuah "perkumpulan penggarong". Tentang ini Bung Karno melukiskannya di dalam kata-kata :

„Caranya kami bekerja jauh daripada cara suatu pemerintahan yang wajar, ia lebih mirip dengan cara suatu perkumpulan penggarong. Kami tidak punya apa-apa. Tidak punya mesin tik, tidak punya alat tulis, apalagi pesawat terbang, satu-satunya,, perlengkapan radio yang dapat diselamatkan adalah barang keluaran tahun 1935. Kami pun tidak punya uang. Uang Jepang yang dipakai di Indonesia nilainya sudah merosot. Di hari-hari pertama setelah merdeka Dr. Suharto bertindak sebagai thesaurier Jenderal. Dia bekerja seorang diri dan sudah tentu tidak ada waktunya untuk menghitung uang yang sudah inflasi itu. Akan tetapi Suharto tidak kehilangan akal. Ditimbangnya setumpukan uang kertas, lalu membagi-bagikannya kepada kami secara kiloan.”⁷⁾

Menjadikan kota Yogyakarta sebagai ibukota/pusat pemerintahan ketika itu merupakan suatu pilihan yang tepat. Semangat kemerdekaan yang tinggi dari penduduk dan yang ditunjang oleh sikap tegas dari Sri Sultan merupakan modal yang sangat besar artinya ketika itu. Kota Yogyakarta ketika itu berada dalairn suasana “demam” kemerdekaan. Sehingga nampaklah rakyatnya menyambut peristiwa itu dengan semangat yang tinggi. Tentang ini Ali Swstroamidjojo memberikan gambarannya sebagai berikut :

“Suasana Yogya waktu itu adalah suasana kebebasan dan keamanan. Tetapi terasa sekali sebagai suatu kota yang hidup di tengah-tengah pergolakan revolusi. Banyak pemuda-pemuda berambut gondrong dan bersenjata masih berkeliaran. Pada umumnya pakaiannya compang camping. Sikap dan tingkah laku mereka masih seperti pejuang-pejuang yang baru saja menang perang. Mereka jaya, kuat dan gagah berani menghadapi musuh atau siapa pun yang menentang negara dan bangsanya, atau..... pribadinya sendiri dan golongan atau kelompoknya. Pemuda-pemuda rambut panjang, pejuang-pejuang bersenjata yang tak terkenal. nama-namanya, dan dengan tingkah laku yang serba serampangan inilah yang merupakan kekuatan revolusi kita. Tanpa mereka mungkin sejarah kemerdekaan negara kita akan lain sekah kesudahannya.”⁸⁾

Ketika pemimpin-pemimpin kita pindah ke Yogyakarta, Sutan Syahrir masih tetap menetap di Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kemungkinan dilakukannya kontrak dengan pihak Belanda. Kita berusaha untuk berunding, namun di lain pihak kita pun harus bersiap untuk berperang. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita. Tetapi sikap “bermuka dua” ini tidaklah dapat diterima sepenuhnya oleh sementara pihak. Mereka ini menghendaki konfrontasi total di dalam usaha mengusir penjajahan Belanda di Indonesia. Sebagai akibatnya, lahirlah pertentangan di antara pemimpin kita sendiri. Pihak yang menentang diadakannya perundingan dengan pihak Belanda melakukan oposisi kepada pemerintah dengan pelbagai cara. Usaha mereka berhasil menjatuhkan pemerintah. Kabinet Syahrir I bubar. Tetapi Syah masih dipercaya oleh Presiden. Untuk kedua kalinya dia ditunjuk sebagai formatur kabinet. Terbentuknya kembali sebuah Kabinet dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menterinya (Kabinet Syahrir ke II).

Syahrir sebagai Perdana Menteri melakukan kontak-kontak dengan pihak Belanda lagi. Pendekatan ini ditengahi oleh dua istimewa Inggris, Lord Archibeld Clark Kerr. Kedua belah pihak melakukan tukar menukar nota yang berisi usul-usul mereka masing-masing. Namun beberapa persoalan tidak dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun demikian, kesempatan untuk melakukan perundingan masih terbuka. Tempat perundingannya di Nederland. Untuk maksud itu pada tanggal 4 April 1946 berangkatlah sebuah delegasi Indonesia, bersama-sama dengan van Mook dan Archibeld Clark Kerr, ke Nederland. Susunan delegasi kita terdiri dari Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono dan Abdul Karim Pringgodigdo. Sedang pihak Belanda diwakili oleh Van Mook, Prof. Logeman, Sultan Hamid, Suryo Santoso, Dr. Indenburg, Van Royen dan Prof. Van Asbock. Selama berada di Nederland itu kedua belah pihak, telah melakukan perundingan sebanyak 4 kali di Hooze Volde, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana yang diharapkan.

Langkah-langkah Kabinet Syahrir ke II yang tetap melakukan usaha-usaha penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan itu, kembali mendapat reaksi dari pihak oposisi. Kali ini Tan Malaka muncul sebagai pemimpin oposisi disokong oleh 143 organisasi politik

yang tergabung di dalam “Persatuan Perjuangan”. Persatuan Perjuangan mengambil tindakan-tindakan kekerasan, menculik Perdana Menteri Syahrir dan merencanakan untuk melakukan perebutan kekuasaan. Sebagai akibat dari tindakan-tindakan “Persatuan Perjuangan” ini, lahirlah apa yang terkenal dengan Peristiwa 3 Juli. Tentang peristiwa ini Ali Sastroamijoyo memberikan keterangan sebagai berikut :

“Dalam pada itu keadaan tegang ini berkembang dengan cepat sekali di Yogya. Pada tanggal 3 Juli waktu pagi-pagi benar saya terbangun karena letusan-letusan senjata api di dekat rumah saya di jalan Opak no. 1. Ternyata letusan-letusan itu terjadi di dekat rumah Amir Syarifuddin yang terletak di dekat rumah saya. Selain dari itu saya pun dengar menderu-derunya motor-motor, seperti ada mobil-mobil berkejar-kejaran. Segera setelah letusan-letusan senjata dan suara mobil tidak terdengar lagi, saya pergi ke rumah Amir. Tetapi ia tidak ada di rumah. Menurut keterangan isterinya, Amir yang masih berpakaian piyama dengan medadak keluar dari rumahnya, ketika mendengar tembakan-tembakan tadi. Ajudannya menerangkan bahwa Amir sempat meloncat naik ke atas suatu truk di bagian depan tempat sopir duduk dan semua truk bergerak dengan kecepatan tinggi sekali ke arah jalan Gondolayu. Ketika orang-orang berpakaian seragam yang menembaki rumah Amir mengetahui bahwa Amir berhasil meloloskan diri, mereka mengejarnya dengan truk lain yang ada di situ. Tetapi truk Amir sudah terlampau jauh untuk bisa disusul. Kemudian Amir menceritakan kepada saya bahwa ia berhasil menggertak supir untuk membawanya ke gedung negara. Begitulah Amir sampai di gedung negara dan bersama-sama Bung Karno dan Bung Hatta bisa menghadapi delegasi Persatuan Perjuangan yang datang juga di gedung negara untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya mengenai Kabinet Syahrir kepada Presiden. Tetapi tuntutan supaya kabinet segera diganti ditolak oleh Bung Karno dan Bung Hatta yang dalam hal ini mendapat dukungan kuat dari Arnir. Penolakan ini disertai dengan penangkapan tokoh-tokoh yang dianggap tidak saja mendukung tetapi juga turut mendalangi gerakan untuk

menjatuhkan Kabinet Syahrir. Malahan mereka dituduh juga hendak menjatuhkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk diganti dengan Tan Malaka sebagai Presiden dan orang lain sebagai wakilnya. Selain tokoh minter Sudarsono, yang waktu itu Komandan Devisi III dari TKR di Yogya termasuk juga dalam pimpinan gerakan itu beberapa tokoh-tokoh sipil antara lain Mr. Muhammad Yamin, Mr. Subardjo, Dr. Buntarafi, Mr. Iwa Kusumasumantri.⁹⁾

Dalam menghadapi persoalan yang pelik ini, Presiden Sukarno telah melibatkan Letkol Suharto yang ketika itu memegang kekuasaan pengamanan di kota Yogyakarta. Oleh Presiden, Letkol Suharto diperintahkan untuk menangkap Mayor Jendral Sudarsono yang ketika itu terlibat langsung dalam peristiwa 3 Juli, bahkan Sudarsono lah yang memerintahkan untuk menangkap Perdana Menteri Syahrir. Bagi Suharto perintah yang diterimanya dari Presiden itu merupakan hal yang cukup pelik. Sudarsono merupakan atasan langsung Letkol Suharto ketika itu. Letkol Suharto mencoba menyelesaikan masalah itu melalui perundingan dengan Mayor Jendral Sudarsono; dalam perundingan itu Suharto mengatakan bahwa pasukan-pasukan "Lasykar Kiri" yang cukup kuat sedang berkumpul di luar Yogya, dan siap membela Sutan Syahrir beserta politiknya. Akhirnya kedua pimpinan militer itu (Mayor Jendral Sudarsono dan Letkol Suharto) sepakat untuk melaporkan persoalan ini kepada Panglima Besar Sudirman, dan menunggu perintahnya. Kemudian ternyata bahwa Mayor Jendral Sudarsono tidak memenuhi janjinya. Ia mengadakan rapat dengan komandan-komandan pasukannya yang lain, tanpa mengundang Letkol. Suharto. Rapat yang dipimpin Sudarsono itu bertujuan untuk mendapat kesempatan di dalam membuat suatu pernyataan yang menuntut dibentuknya sebuah Dewan Pimpinan Politik dan membentuk Kabinet Baru.¹⁰⁾

Tetapi apa yang direncanakan oleh Mayor Jendral Sudarsono tidak terwujud. Karena ketika ia sampai di istana Presiden, ia ditangkap oleh pengawal-pengawal Presiden. Penangkapan itu tidak menimbulkan pertumpahan darah karena tindakan-tindakan pengamanan telah dilakukan sebaik-baiknya oleh Letkol. Suharto. Dengan demikian peristiwa 3 Juli berakhir tanpa menimbulkan banyak korban.

Berakhirnya persoalan peristiwa 3 Juli tidak berarti berakhirnya pertentangan di antara para pemimpin politik. Pertentangan-pertentangan ini pada suatu saat tidak dapat diselesaikan pemerintah Syahrir, sehingga bubarlah Kabinet Syahrir yang kedua.

Setelah melalui pelbagai pertimbangan, akhirnya Presiden menunjuk kembali Sutan Syahrir untuk membentuk Kabinet, lahirlah kabinet Syahrir ke III. Syahrir tetap menempuh jalan berunding dengan Belanda di dalam usahanya untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak. Usaha Syahrir membuahkan apa yang dikenal dengan "Persetujuan Linggarjati" yang berisi 17 pasal antara lain :

- 1). Pengakuan Belanda terhadap kekuasaan bangsa Indonesia di pulau-pupau Jawa, Madura dan Sumatra yang sebagian besar berdasarkan kenyataan bahwa pasukan-pasukan Republik Indonesia sudah menduduki daerah itu dengan baik.
- 2). Kerjasama antara kedua pemerintah dalam usaha mendirikan suatu Negara Serikat yang demokratis dan akan diberi nama Negara Indonesia Serikat; dan bahwa NIS ini akan terdiri dari atas tiga negara bagian, yaau Republik Indonesia (yang hanya meliputi pulau Jawa, Madura dan Sumatra), Kalimantan, dan Indonesia Bagian Timur.
- 3). NIS dan Kerajaan Belanda bekerja sama menuju pembentukan persatuan politik atas dasar kedudukan yang sama tinggi, yaitu Uni Indonesia-Belanda yang akan diakui pada tanggal 1 Januari 1949.

Selain itu dituntut pula agar pasukan-pasukan Belanda ditarik secara berangsur-angsur. Inilah yang merupakan kemenangan pokok bagi Republik Indonesia.¹¹⁾

Penanda tangan Persetujuan Linggardati pada tanggal 15 November 1946 itu tidak meredakan keadaan yang genting, malah melahirkan kekeruhan keadaan. Ini terutama sekali oleh adanya dua pihak yang saling bertentangan, mereka yang setuju dengan hasil Linggarjati itu dan mereka yang menolaknya. Dalam pertentangan itu berhadapan dua kekuatan politik yang masing-masing mempunyai pendukung

yang tidak sedikit. PNI Masyumi dan lain-lain berkoalisi di dalam “Benteng Republik Indonesia” merupakan kekuatan oposisi. Sedang Front Sayap Kiri” berdiri sebagai penyokong kebijaksanaan pemerintah. Pihak oposisi terutama sekali mengeritik secara keras ketentuan-ketentuan isi pasal-pasal 2, 6, 8 dan 14 dari perjanjian itu. Mereka tidak menghendaki Uni Indonesia-Belanda berada di bawah Raja Belanda yang berkedudukan sebagai kepala Negara Uni itu. Isi perjanjian yang demikian itu dianggapnya sebagai suatu konsesi politis yang sangat menguntungkan pihak Belanda, dan merugikan pihak Republik Indonesia. Pertentangan yang makin memuncak, memaksa PM Syahrir untuk menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Presiden kemudian menunjuk Mr. Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri.

Sementara itu perbedaan-perbedaan sikap antara Republik Indonesia dengan Belanda makin meruncing dan melahirkan ketegangan yang dapat menimbulkan pertumpahan darah. Kenyataan yang demikian ini mendapat perhatian dari P.B.B. melalui Dewan Keamanannya. Bahkan berhasil mengundang minat Dewan Keamanan untuk mengambil peranan aktif sebagai pihak “penengah”. Terbentuklah Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari tiga negara anggota PBB yaitu Amerika, Australia dan Belgia. Ketiga negara itu diwakili oleh Richard C. Kirby (Australia), Dr. Frank Graham (Amerika) dan Paul van Zeeland dari Belgia. Sejak awal pembentukannya KTN telah bekerja untuk mempertemukan kedua belah pihak. Berbagai pertemuan telah dilakukannya, seperti yang terjadi di Kaliurang pada 13 Januari 1948. KTN berhasil membawa kedua belah pihak untuk berunding tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Perundingan itu dilakukan di atas sebuah kapal milik Amerika, yaitu Renville. Lahirlah apa yang terkenal dengan “Persetujuan Renville”

Akan tetapi persetujuan ini pun menyebabkan timbulnya pertentangan di antara pemimpin-pemimpin dan golongan-golongan bangsa Indonesia. Kembali PNI dan Masyumi menolak perjanjian ini dan tidak bersedia lagi duduk di dalam Kabinet Mr. Amir Syarifuddin itu. Pihak oposisi beranggapan bahwa isi persetujuan Renville jauh lebih merugikan Republik jika dibandingkan dengan hasil Linggarjati.

Tentang hal itu Mr. Muhammad Rum memberikan penilaiannya sebagai berikut :

"Alasan untuk mencabut kepercayaan pada Syahrir ialah, karena menurut Amir, Syahrir sudah terlalu banyak memberi konsesi kepada Belanda, sudah terlalu banyak mengalah.

Sampai sejauh mana mana seorang dapat memberi konsesi dalam perundingan, memang sangat sulit ditentukan. Tetapi waktu pemerintah Amir Syarifuddin meneruskan ia terpaksa bergerak sama jauhnya dengan Syahrir, malah Belanda menuntut sesuatu yang lebih jauh memang menjadi batas yang terakhir bagi R.I.

Yang dituntut Belanda itu adalah agar TNI. diletakkan di bawah Wakil Pemerintah Agung Nederland (Vertegenwoordiger van de Kroon).¹²⁾

Sebagai akibat dari konsesi politik yang dianggap merugikan bangsa Indonesia itu, maka Kabinet Amir Syarifuddin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. P.N.I, dan Masyumi menarik orang-orangnya yang menduduki jabatan-jabatan menteri. Akibatnya Amir Syarifuddin tidak dapat mempertahankan pemerintahan yang dipimpinnya.

Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh Kabinet Hatta. Penunjukkan Hatta sebagai pimpinan pemerintahan waktu itu dilatar belakangi oleh pengaruh yang mungkin ditimbulkan dengan kharisma yang ada pada dirinya. Ketika itu diperlukan seorang pimpinan pemerintahan yang mempunyai wibawa, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Harus dianggap memenuhi persyaratan itu. Kabinet Hatta terbentuk ada 29 Januari 1948. Untuk melaksanakan tugasnya Kabinet Hatta berpegang pada program kerja :

- 1 . Berunding dengan Belanda atas dasar perjanjian Renville.
2. mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat.
3. Rasionalisasi.
4. Pembangunan.

Melaksanakan ke 4 program seperti itu bagi Kabinet Hatta bukanlah sesuatu yang mudah. Perundingan berdasarkan perjanjian Renville bukan tidak mendapat tantangan, dan bahwa perjanjian

Renville oleh pihak oposisi sangat ditentang. Juga mengadukan rasionalisasi, terutama di kalangan Angkatan Perang sangat sulit, karena hal itu merupakan masalah yang sangat sensitive. Tetapi akhirnya wibawa Hatta cukup mampu menghadapi kesulitan itu.

Sementara itu orang-orang yang duduk sebagai anggota K.T.N. telah berubah. Dr. Graham yang terkenal dengan kata-kata bersayapnya : *you are what you are*, telah digantikan oleh Court du Bois dan Australia menunjuk Thomas K. Oritelly untuk menggantikan Kirby. Kedua anggota KTN yang baru itu telah mengajukan usul bdru yang diharapkannya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Rumusan yang terkenal dengan du Bois-Oritchly ini intinya ialah :

"Suatu rencana pemilihan tak langsung dan bertingkat untuk anggota-anggota konstituante yang berfungsi baik sebagai badan legislatif maupun badan pembentuk undang-undang. Badan ini akan bertugas sebagai Parlemen dan akan menentukan jumlah dan batas-batas negara-negara bagian daripada Negara Indonesia Serikat. Juga akan memilih Presiden negara federal itu, yang kelak akan menunjuk seorang Perdana Menteri yang akan memimpin pemerintahan yang bertanggungjawab kepada Parlemen sementara itu. Pemerintah ini mempunyai wewenang penuh sebagai pemerintahan Negara merdeka. Jadi wewenang atas angkatan bersenjata termasuk pula di dalam hak-haknya. Tetapi menurut usul du Bois-Oritchly perwakilan Belanda dalam Negara Indonesia Serikat itu mempunyai hak veto dalam beberapa hal penting dan berhak pula menyatakan keadaan darurat di dalam negeri, sehingga kekuasaan atas angkatan bersenjata akan dipegang Belanda.¹³⁾

Rumusan yang dikemukakan oleh kedua penengah di atas itu diterima oleh P.M. Hatta, karena ia dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan pihak Republik. Sebaliknya Belanda tidak bersedia menerima usul itu. Karena itu pihaknya mencoba melakukan tindakan yang licik, yaitu dengan membocorkan isi usul du Bois-Oritchly itu kepada seorang wartawan, Daniel Shorr. Setelah isi usul itu disebar oleh Daniel Shorr, Belanda menuduh kepada KTN sebagai yang membocorkan rahasia itu. Dengan

sendirinya KTN tidak menerima tuduhan itu. Sebagai akibatnya pertentangan pun makin meruncing, dan jalan buntu pun makin membayang.

Pada tanggal 4 November 1948 Menteri Luar Negeri Belanda, Dirk U. Stikker mengunjungi Yogyakarta dan melakukan perundingan dengan Hatta di Kaliurang. Langkah Stikker ini tidak melalui perantaraan KTN Perundingan antara P.M. Hatta dengan Stikker berlangsung sampai tanggal 9 November. Perundingan antara kedua pemimpin itu juga belum membuka jalan buntu yang dihadapi. Dalam keadaan yang demikian itu, kembali Belanda melalui Stikker melakukan kelicikannya. Caranya ialah dengan menafsirkan sebuah *Aide Memoire* Bung Hatta (Yang menurut Bung Hatta tidak resmi) sebagai tanda persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia, tentang usul-usul Yang diajukan oleh Belanda. Antara lain usul Belanda Yang dianggap telah disetujui berdasarkan aide memoire itu ialah pembentukan pemerintah federal, sebelum Negara Indonesia Serikat itu sendiri terbentuk. Dengan sendirinya penafsiran Yang demikian ini menimbulkan kegoncangan di kalangan pemerintah Republik. Setelah mendengar tentang Aide Memoire Hatta dengan isi yang demikian itu, walaupun Aide imemoire itu diakui sebagai tidak resmi, maka kontan pihak P.N.I. menyatakan dirinya sebagai pihak oposisi. Pada hal tadinya partai ini adalah merupakan salah satu penyokong kuat dari Kabinet Hatta.

Namun, sebelum oposisi itu berwujud dalam tindakan-tindakan, terjadilah suatu peristiwa penting Yang dilakukan oleh Belanda, yaitu bahwa Belanda telah menganggap KTN tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai penengah, dan karena itu K.T.N. menurut Belanda tidak ada lagi gunanya. Pernyataan Belanda yang demikian itu diumumkan pada tanggal 11 Desember 1948. Pengumuman Belanda itu mencemaskan P.M. Hatta dan karena itu ia meminta kepada Narle Cochran untuk mengusahakan kemungkinan diadakannya perundingan antara kedua belah pihak. Pemerintahan P.M. Hatta itu disampaikan kepada Cochran pada tanggal 13 Desember 1948. Tapi usaha itu gagal, karena Belanda telah merencanakan suatu tindakan kekerasan, Yang kemudian dikenal dengan Aksi Militer Belanda kedua.

Agresi Belanda kedua yang dimulai dengan pemboman lapangan terbang Maguwo pada tanggal 19 Desember, merupakan cobaan yang berat bagi pemerintah dan bangsa Indonesia, sebab ketika itu bangsa Indonesia baru saja menyasalkan naskah peristiwa Madiun.

Ketika Belanda menyerang Maguwo, pasukan-pasukan pengawai lapangan udara itu hanya terdiri dari beberapa orang yang dipimpin oleh Kadet Kasmiran. Mereka berusaha menghadapi serangan musuh itu, tetapi karena kekuatan tidak seimbang perlawanan mereka dapat dipatahkan. Kadet Kasmiran beserta beberapa orang rekannya yang lain gugur dalam menjalankan tugasnya. Setelah berhasil menguasai Maguwo, Belanda pun bergerak maju ke arah kota Yogyakarta untuk kemudian mendudukinya. Untuk mendapatkan gambaran situasi pada hari permulaan agresi Belanda itu, di bawah ini dicantumkan keterangan Ali Sastroamijoyo :

"Maka saya segera menilpon saudara Ir. Juanda dan memintanya untuk menjemput kami, saudara Kusnan dan saya, dan bersama-sama naik mobil Ir. Juanda pergi ke gedung Kepresidenan. Mobil dijalankan dengan kencang supaya bisa menghindari tembakan-tembakan pesawat-pesawat pemburu Belanda yang sudah mulai melayang-layang di atas Malioboro dan sekitarnya, memberondong Yogya dari atas dengan senjata mesin. Tetapi dengan selamat kami tiba di gedung Kepresidenan, di mana telah hadir beberapa menteri. Saudara Sutan Syahrir dan beberapa tokoh politik lainnya telah berada di situ juga. Saya melihat mereka dan Presiden duduk di serambi belakang, dan wajah-wajah mereka nampaknya sangat prihatin. Bung Hatta tidak kelihatan hadir dan menurut keterangan Bung Karno beliau berada di Kaliurang. Oleh karena tanpa hadirnya Perdana Menteri, Kabinet tidak bisa bersidang dan mengambil keputusan apa-apa. Presiden minta supaya Bung Hatta segera dijemput. Dengan segera Sultan Hamengku Buwono yang waktu itu menjabat Menteri Negara, mengatakan hendak menjemput Bung Hatta di Kaliurang. Maka Sri Sultan dengan ajudannya segera berangkat. Kami yang berkumpul di Kepresidenan menunggu dengan kecemasan di dalam hati, apalagi ketika Sri Sultan belum kembali dengan Bung Hatta. Dalam pada itu pesawat-pesawat terbang Belanda sudah mulai beterbangan. Tetapi ternyata yang

menjadi sasarannya ialah benteng kuno di depan kepresidenan yang dipakai sebagai asrama T.N.I. tetapi syukur sudah dikosongkan sebelum dibomi.

Akhirnya Sri Sultan tiba kembali dengan Bung Hatta. Mereka menerangkan agak teriambat datangnya karena mobil harus dijalankan dengan hati-hati dan perlahan-lahan. Sebab pesawat-pesawat terbang Belanda sudah berkeliaran di atas jalan Kaliurang ke Yogya.¹⁵⁾

Datangnya agresi Belanda itu sebenarnya memang telah diperkirakan oleh pemimpin kita. Hal jelas seperti yang pernah dikatakan oleh Kolonel Nasution, Panglima Markas Besar Komando Jawa, ketika memberikan briefingnya di Kediri. Beliau menyatakan bahwa tidak tahu kapan serangan itu datang, tapi yakin bahwa musuh akan menyerang lagi. Karena itu di Yogya telah dipersiapkan bagaimana cara untuk menghadapi inusuh nanti.¹⁶⁾

Demikian pula Bung Hatta, ketika menjawab ancaman-ancaman Dr. Beel yang melalui Radio Medan. Bung Hatta menyatakan di depan Radio Bukit Tinggi, bahwa kalau Belanda melakukan aksi militernya maka kita akan mengadakan perlawanan dengan perang gerilya. Dan Bung Hatta yakin bahwa pada akhirnya kitalah yang akan menang, sebab Belanda pasti tidak dapat menghancurkan kita, karena Belanda akan kehabisan tenaga menghadapi kita. Pernyataan itu disampaikan beliau pada 1 Januari 1948.¹⁷⁾

Dengan adanya agresi Belanda II itu, kita melanjutkan perlawanan secara bergerilya. Jendral Sudirman, yang ketika itu masih sakit parah, meninggalkan kota Yogyakarta untuk melanjutkan perjuangan. Jendral Sudirman mengeluarkan sebuah perintah kilat kepada Angkatan Perang yang antara lain berisi : "Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda."¹⁸⁾

Letkol Suharto mengatur perlawanan gerilya di daerah Yogyakarta sebagai kornandan Wehrkreise III. Kolonel Nasution mengatur perlawanan di seluruh Jawa yang bermarkas di sekitar Prambanan.¹⁹⁾

Segera Kolonel Nasution yang tiba di Yogya dari perjalanannya ke Jawa Timur mengatur perlawanan gerilya itu. Salah satu langkah yang diambilnya ialah membentuk Pemerintahan Militer untuk seluruh

Jawa. Alasan yang dikemukakan untuk pembentukan Penyerintahan militer itu ialah :

1. Republik harus tetap berjuang sebagai Negara;
2. Pemerintahan berjalan terus;²⁰⁾
3. Pemerintahan militer satu-satunya alat perjuangan.

Dengan dimulainya perang gerilya, maka seluruh daerah Yogyakarta merupakan daerah tempat-tempat persembunyian dari TNI yang bergerilya. Mereka juga dibantu oleh sekian banyak laskar rakyat, milik organisasi-organisasi politik, seperti Hisbullah.²¹⁾

Jika kita membiarkan Belanda menguasai kota Yogyakarta maka itu berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus menjalankan propagandanya yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sudah hancur dan pemimpin-pemimpinnya sebagian besar telah ditangkap, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Dan mereka tidak ingat bahwa sejak permulaan agresinya telah dibentuk sebuah Pemerintahan Darurat Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Sumatra di bawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Propaganda Belanda ini harus ditunjukkan kebohongannya, baik kepada rakyat Indonesia maupun kepada dunia Internasional. Juga jika Belanda dibiarkan begitu saja, kepercayaan rakyat kepada TNI bisa goyah karena seakan-akan TNI tidak mempunyai kekuatan lagi dan tidak mampu melindungi rakyat. Hal yang demikian ini disadari oleh TNI Karena itu diadakanlah persiapan-persiapan untuk melakukan serangan-serangan ke tempat-tempat kedudukan Belanda, terutama kota Yogyakarta. Oleh Pimpinan T.N.I. dikeluarkan perintah penyerangan untuk :

1. mengadakan serangan malam hari;
2. menghancurkan kekuatan musuh sebanyak-banyaknya;
3. merampas senjata musuh sebanyak-banyaknya;
4. membumi hanguskan tempat-tempat yang dianggap penting.

Pada tanggal 29 Desember 1948 dilakukanlah suatu penyerangan ke kota. Serangan dilakukan dari segala penjuru, dari sekitar Kantor Pos dan Secodiningratan, Patuk, PakuningTatan, Sentul, Pengok dan Gondokusuman. Pertempuran-pertempuran terjadi sampai jam 04.00 pagi.²²⁾

Tindakan-tindakan penyerangan yang dilakukan oleh T.N.I. yang bergerilya, tidak menenangkan kedudukan Belanda. Serrangan-serangan mendadak dan penghadangan-penghadangan hampir setiap hari terjadi. Dan ini dilakukan dengan bantuan penuh dari rakyat. Karena memang rakyat sejak awal perlawanan kita untuk mengusir penjajah telah memberikan sokongan yang penuh. Tidak hanya ikut di dalam perang dengan memanggul senjata dalam bentuk membentuk lasykar-lasykar rakyat ²³⁾ tetapi juga memberikan bantuan material, misalnya mendirikan dapur-dapur umum untuk mengatur makanan para gerilyawan, juga pemondokan untuk para gerilyawan ini sepenuhnya disediakan oleh rakyat di desa tempat gertyanvan itu bersembunyi Bahkan TNI yang bergerilya menyesuaikan diri dengan keadaan rakyat di pedesaan. Serangan mendadak, pengrusakan gedung dan jembatan, penebangan pohon-pohon besar untuk menghambat gerakan musuh dikerjakan oleh rakyat dengan bimbingan pasukan-pasukan TNI Jika kita memperhatikan secara seksama, maka agresi Belanda pada batas-batas tertentu memberikan keuntungan. Ini dapat diketahui dari reaksi internasional terhadap tindakan agresi Belanda itu. Nehru, Perdana Menteri India mengadakan suatu konperensi khusus untuk membicarakan masalah Indonesia yang dihadiri oleh banyak negara.²⁴⁾ Pada konperensi yang diadakan di New Delhi itu Mr. A.A. Maramis dan Dr. Sudarsono telah memberikan memorandum yang menyatakan sikap Indonesia. Hasil yang dicapai oleh konperensi ini sangat memperkuat posisi Indonesia di dunia Internasional. Konperennsi menuntut agar pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditangkap semua dilepaskan. Dipulihkannya pemerintah Indonesia dengan ibu kota Yogyakarta, dan lain-lain.²⁵⁾ Dewan Keamanan pun telah membicarakan masalah Indonesia - Belanda dan hasilnya juga cukup menguntungkan Indonesia. Sedang bangsa Amerika, yang tadinya membantu Belanda, juga telah merubah sikapnya menjadi lebih menguntungkan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berita surat kabar mereka, seperti New York Times yang telah menulis antara lain sebagai berikut :

"Kami mengharapkan bahwa pemerintah Belanda, yang ketidaksabarannya dan kegila-gilaannya sudah menyebabkan banyak penderitaan, akan tunduk demi kepentingan-kepentingan keadilan dan kemanusiaan."²⁷⁾

Belanda agaknya tetap beranggapan bahwa dengan didudukinya Yogyakarta yang merupakan ibukota Republik, maka Negara Indonesia sudah hancur dan tidak punya apa-apa lagi. Untuk mengakhiri pikiran Belanda yang demikian itu, diperlukan suatu tindakan drastis, yakni suatu serangan total ke kota Yogyakarta yang telah dikuasai oleh Belanda itu. Sehubungan dengan itu antara Letkol Suharto dengan Sri Sultan dilakukan perundingan yang matang tentang kemungkinan suatu serangan besar-besaran ke kota Yogyakarta, perundingan ini menghasilkan serangan atas kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal dengan "Serangan Umum 1 Maret "

Tentang serangan ini dapat kita kutipkan keterangan sebagai berikut :

"Pada tanggal 1 Maret 1949, tepat jam 06.00 pagi, ketika sirene meraung-raung menandakan berakhirnya jam malam pasukan gerilya memasuki kota. Suharto berada dalam pasukan yang akan memberikan pukulan, dengan senapan Owen yang berat di tangannya. Prajurit-prajurit menggunakan daun kelapa muda yang digantungkan di bahu sebagai tanda pengenal. Serangan itu berjalan lancar. Pusat kota dapat diduduki, dari pabrik mesiu "Watson" berhasil diangkut (diperoleh) lima ton amunisi dan senjata-senjata ringan.²⁸⁾

Kemudian dilanjutkan dengan :

"Tengah hari bantuan Belanda yang didahului dengan tank-tank dan kendaraan berlapis baja memasuki Yogya. Pasukan itu dipimpin oleh Kolonel Van Zahten, komandan dari pasukan penggempur "Gajah Merah" yang terkenal. Sorenya Suharto memerintahkan untuk mundur kembali ke pangkalan. Korban yang jatuh sedikit. Sasarannya telah kena tujuan telah tercapai - membuktikan kemampuan TNI mengadakan pukulan terhadap tentara yang kuat.²⁹⁾

Setelah melalui pelbagai perundingan, antara lain yang menghasilkan persepakatan Roem-Royen, diadakanlah lagi pertemuan lanjutannya, yaitu sidang formal antara wakil-wakil BFO (Bijzonder Federal Overleg), delegasi Belanda dan delegasi Indonesia di bawah

pengawasan PBB. Hasil pertemuan lanjutan antara ketiga pihak itu ialah :

1. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta;
2. Syarat-syarat dan waktu diadakan konperensi Meja Bundar

Sehubungan dengan penarikan kembali tentara Belanda dari Yogyakarta, maka di Yogyakarta diadakanlah persiapan-persiapan untuk menerima kembali daerah Yogyakarta beserta pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pelaksanaannya diserahkan kepada Sri Sultan, selaku Menteri Negara dan Koordinator Keamanan. Pelaksanaan penarikan mundur pasukan Belanda itu dilakukan dalam 4 tahap/babak.

“Pada babak I, TNI bergerak kurang lebih pada jam 09.00. Setelah team peninjau memberi tanda kepada TNI untuk bergerak masuk kota, gerakan pasukan memasuki kota berjalan dengan teratur.

Dalam babak II, TNI maju dengan teratur. Komandan dipindahkan di Kapatihan. Selanjutnya dalam babak III masuk pula kesatuan TNI di bawah pimpinan Kapten Widodo. Gerak dilakukan dengan teratur menempati posisi sebelah utara jalan Kereta Api dan sebelah barat kali Code. Dalam babak IV di bawah pimpinan Mayor Sarjono bergerak ke utara sampai batas kota. Selanjutnya bermarkas di gedung HBS di Jetis Sedang kesatuan Mobile Brigade Polisi masuk dari sebelah barat dan terus menuju asrama Patuk dan Gayam.³⁰⁾

Jumlah pasukan yang masuk kota ketika itu 2900 orang terdiri dari 1800 TNI dan 1100 Brigade Mobiele polisi.³¹⁾ Sebagian besar dari pasukan-pasukan kita masih tetap diperintahkan untuk melanjutkan perjuangan di desa-desa/gunung-gunung untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diharapkan.

Demikianlah setelah melalui pelbagai perjuangan, baik dalam bentuk perundingan maupun dalam bentuk kekerasan senjata, ibukota Republik Indonesia kembali, pusat pemerintahan kembali ke tangan kita. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta beberapa orang pemimpin lainnya tiba kembali di Yogyakarta. Tanggal 10 Juli rombongan Dr. Leimena, Muhammad Natsir, Dr. Halim dan Mr. Syafruddin Prawiranegara beserta staf

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tiba pula di Yogyakarta. Jendral Sudirman pada tanggal 10 Juli 1949 juga masuk kembali ke Yogyakarta setelah memimpin pasukan gerilya, walaupun dalam keadaan sakit. Dengan kembalinya Yogyakarta ke tangan pemerintah Republik berakhirlah satu babak perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu babak revolusi fisik.

8.1.3 Keadaan sesudah Penyerahan Kedaulatan

Sebagaimana diketahui hasil daripada Konperensi Meja Bundar ialah diakuinya kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia oleh bangsa dan pemerintah Kerajaan Belanda. Persetujuan itu telah membuahkan bentuk negara yang bersifat federalis, sehingga negara kita bernama Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Presiden RIS yang pertama ialah Ir. Sukarno yang disumpah pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta.

Sehubungan dengan itu, maka Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan pusat pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi bagian dari negara RIS. Ketika itu negara Kesatuan RI yang berpusat di Yogyakarta telah mengangkat Mr. Asaat sebagai akting presidennya. Mr. Asaat disumpah sebagai akting Presiden RI pada tanggal 27 Desember 1949. Pada hari itu juga dilakukan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia (kesatuan) kepada Presiden RIS.

Untuk menjalankan pemerintahan di dalam negara RI kesatuan pada tanggal 4 Januari 1950 akting Presiden Mr. Asaat menunjuk 3 orang formatur, pembentuk kabinet, mereka itu ialah Mr. Susanto Tirtoprojo, Muhwnmad Natsir dan Dr. Halim. Akhirnya mereka bertiga bersepakat untuk mengangkat Dr. Halim sebagai perdana Menteri negara RI kesatuan.³²⁾

Berdirinya negara berbentuk federalis di dalam wilayah bekas jahan Belanda ini, menimbulkan banyak pertikaian pendapat. Pertentangan pendapat di antara kita itu kemudian menimbulkan pertumpahan darah seperti pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Ujung Pandang (Makasar) pada tanggal 5 April 1950.³³⁾

Pertentangan itu terjadi antara golongan unitaris yang tetap menghendaki berdirinya negara RI berbentuk kesatuan dengan golongan federalis yang menghendaki tetap dipertahankannya negara berbentuk federal. Di Yogyakarta golongan unitaris menyusun program kerja untuk meneruskan perjuangan guna mewujudkan negara kesatuan. Usaha ini sebenarnya sejalan dengan keinginan dari sebagian terbesar rakyat Indonesia. Karena di dalam penglihatan sebagian besar pemuda dan rakyat Indonesia, perwujudan negara federalis tidak lebih dari usaha untuk memberikan kesempatan kepada bekas Penjajah Belanda untuk kembali ke Indonesia, atau pendirian golongan federalis itu identik dengan usaha langsung dari Belanda untuk mempertahankan bentuk penjajahannya di negara RI yang baru saja diperjuangkan kemerdekaannya itu. (Setidak-tidaknya mereka berpendapat bahwa timbulnya federalis di Indonesia adalah terutama sebagai akibat strategi yang dijalankan Belanda dalam usaha mereka memperlemah kedudukan Republik yang masih muda itu).³⁵⁾

Adanya keadaan seperti di atas itu, mendorong kemungkinan-kemungkinan untuk mempercepat terwujudnya kembali negara kesatuan RI. tial ini dibuktikan dengan adanya usaha dari negara-negara bagian itu sendiri untuk mempercepat terwujudnya maksud itu. Yang pertama melangkah ke jalan itu ialah Jawa Timur, yakni dengan jalan pengunduran diri wali negaranya. Sehubungan dengan itu, Presiden RIS pada tanggal 15 Januari 1950 telah mengeluarkan suatu undang-undang darurat (no.1/1950) untuk mengatur pemerintahan Jawa Timur.

Tindakan seperti yang dilakukan oleh wali negara Jawa Timur itu akhirnya diikuti pula oleh negara-negara lainnya. Namun harus pula diakui bahwa usaha untuk mencapai tujuan itu tidak selamanya berlangsung dengan lancar, terutama sekali di negara-negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur (NIT)..Kedua negara bagian ini mempunyai sikap seperti yang diistilahkan oleh Hamka lain dari yang lain.³⁷⁾ Pembubaran diri begitu saja tidaklah dikehendaki oleh tokoh-tokoh Sumatra Timur dan NIT. Mereka bersandar kepada perjanjian Linggarjati yang memberikan pengakuan terhadap hak hidup mereka.

Walaupun demikian, sikap keras kedua negara bagian itu akhirnya luntur juga, karena pada tanggal 19 Mei 1950 telah dittanda tangani

suatu piagam persetujuan antara pemerintah RIS dengan pemerintah negara kesatuan RI. Dalam hal ini pemerintah RIS juga bertindak atas nama Negara Indonesia Timur. Kedua belah pihak diwakili oleh Drs. Muhammad Hatta (sebagai Perdana Menteri RIS) dan Dr. Halim sebagai perdana Menteri Republik Indonesia Kesatuan. Dalam piagam itu dinyatakan bahwa kedua belah pihak menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai penjelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.³⁹⁾

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan yang disebutkan di atas residen Republik Indonesia (RIS) mengeluarkan sebuah undang-undang (no.20/1950) yang menetapkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini dikeluarkan pada tanggt 14 Agustus 1950.⁴⁰⁾ Kemudian pada esok harinya, yaitu tanggal 15 Agustus, tibalah puncak dari perwujudan keinginan sebagian besar bangsa Indonesia, yakni berupa upacara penyerahan mandat negara Republik Indonesia Kesatuan yang dilakukan oleh Mr. Asaat kepada presiden Sukarno. Pada hal itu juga di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Presiden Sukarno menyatakan terbentuknya (kembali) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada kesempatan itu juga Presiden Sukarno menyatakan pula bahwa para ketua, Wakil ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung akan masuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebagai badan legislatif dari negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹⁾

Dengan adanya perubahan Ketatanegaraan itu, kedudukan daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pun berubah, tidak lagi menjadi ibukota negara RI. Pada tahun 1950 itu, melalui undang-undang no3/1950 kedudukannya sebagai Daerah Istimewa berstatus swatantra I ditetapkan secara tegas. Penetapan ini mengandung konsekwensi, yaitu akan dilanjutkannya usaha-usaha demokratisasi. Dalam rangka itu dibentuklah badan-badan pemerintahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) pembentukan DPRDDIY ini dilakukan berdasarkan undang-undang no.7/1950. Pembentukannya dilakukan berdasarkan pemilihan bertingkat dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang. DPRD ini dibentuk pada tangga 16 Oktober 1951 dan penyempahan

para anggotanya dilakukan pada tanggal 24 Desember 1951. Sebenarnya masa kerja dari DPRD ini hanya sampai 24 Desember 1955, akan tetapi berdasarkan Undang-undang no.9/1955 dan undang-undang darurat No.17/1955 masa kerjanya diperpanjang lagi selama satu tahun. Kemudian berdasarkan undang-undang 14/1956 yunto peraturan Menteri Dalam Negeri no.9/1956 dibentuklah DPRDDIY "peralihan". Jumlah anggotanya sebanyak 40 orang. Kemudian DPRD peralihan ini digantikan oleh DPRD yang dibentuk berdasarkan undang-undang no.19/1956. Pembentukannya dilakukan dengan jalan pemilihan umum, khusus untuk DPRD-DIY. Jumlah anggotanya tidak lagi 40 orang, melainkan 45 orang. DPRD ini bekerja sampai dilakukannya pergantian/perubahan berdasarkan penpres no.6/1959.⁴³⁾

Pada tahun 1957 pemerintah pusat mengeluarkan sebuah undang-undang tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah (nml/1957) yang menentukan sistem pemerintahan daerah di Yogyakarta. Berdasarkan undang-undang itu ditetapkanlah bahwa pemerintahan daerah terdiri atas DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).⁴⁴⁾ Dalam rangka usaha pemantapan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, maka pada tanggal 24--27 Juni telah diadakan suatu konperensi Pendahuluan Antar Daerah Swatantra Tingkat I (KAD-Sw.1) bertempat di Jakarta. Delegasi Yogyakarta ke konperensi itu dipimpin sendiri oleh Sri Sultan, dan sebagai anggota masing-masing Siswosumarto (ketua DPRD), Haman Hasyim, Sutrisno, Sunaryohadi dan Muhammad Jamhari; yang disebut belakangan itu keempat-empatnya adalah anggota DPDDIY. Dalam konperensi itu delegasi DIY telah menyampaikan sebuah prasaran. Dasar-dasar pemilihan yang disampaikan di dalam prasaran itu mendapat tanggapan yang positif beberapa di antaranya telah diterima oleh konperensi sebagai hasil keputusan. Sejalan dengan itu maka di Yogyakarta telah diambil langkah-langkah guna merealisasikan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam undang-undang no. 1 / 1957 dalam waktu yang secepatnya.

Dalam rangka itu dikeluarkanlah surat-surat keputusan no 124/1958 dan noA 41/1958 yang antara lain berisi :

1. Memindahkan KRT Brataningrat, KRT Prawiradiningrat, dan KRT Suryaningrat, yaitu masing-masing bekas Kepala Daerah

Kabupaten-kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo, ke Jawatan Pemerintahan Umum DIY.

2. Menugaskan kepada KRT Joyodiningrat, KRT Sosrodiningrat, KRT Murtodiningrat, masing-masing sebagai Bupati-bupati di daerah tingkat II Gunung Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo.
3. Pejabat-pejabat Bupati tersebut beserta para pegawai pamongpraja supaya tetap mengerjakan tugas-tugas vertikal serta bertanggung jawab kepada atasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Langkah-langkah yang diambil oleh DPD itu dirasa perlu untuk dijelaskan kepada masyarakat secara luas, terutama kepada semua aparat-aparat pemerintahan. Untuk maksud itu DPD menyelenggarakan suatu konperensi dinas pemerintahan daerah swatantra tingkat II, yang diselenggarakan pada tanggal 15, 16, 18, 22, 23 dan 25 Agustus 1958. Kecuali itu sebagai realisasi dari keputusan no.124/1958, DPD telah menginstruksikan kepada Bupati-bupati Bantul, Sleman dan Kulon Progo agar segera pindah ke kantor pemerintah daerah DIY dan segera pula melakukan timbang terima dengan pejabat-pejabat bupati yang telah ditunjuk selambat-lambatnya tanggal 14 September 1958.⁴⁵⁾

Sehubungan dengan instruksi dari DPD yang disebutkan di atas itu, maka timbullah pelbagai reaksi, antara lain ada juga yang tidak menyetujuinya. Reaksi yang dimaksud antara lain berasal dari Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN) Komisariat Yogyakarta. Ketidak setujuan SSKDN itu bersumber pada perbedaan pendapat sebagai berikut :

1. Berbeda dengan pendirian DPD, SSKDN berpendapat bahwa kedudukan *Bupati Anom* (pejabat bupati) dan pegawai-pegawai pamongpraja di daerah swatantra tingkat II tidak merupakan corp yang berdiri berdampingan dengan pemerintah swatantra tingkat II tetapi pegawai tersebut seharusnya diperbantukan kepada pemerintah tingkat II, yang di samping bertugas menjalankan urusan-urusan daerah swatantra tingkat II untuk sementara waktu masih akan menjalankan tugas-tugas pemerintah atasan menurut peraturan yang berlaku. Hanya dengan itu terhindarlah

Dubbelbestuur di daerah-daerah swatantra tingkat II, dan akan terciptalah stabilisasi pemerintahan di daerah-daerah swatantra tingkat II berdasarkan undang-undang no. 1/1957.

2. Berbeda dengan SSKDN, DPD berpendapat bahwa pemerintahan pegawai-pegawai pamongpraja di DIY sepenuhnya wewenang pemerintah daerah -DIY.

Adanya reaksi negatif dari SSKDN itu akan dapat menimbulkan kesalah-pahaman di kalangan masyarakat luas, terutama di kalangan aparat-aparat pemerintahan. Hal ini harus dihindarkan, karena itu DPD mengeluarkan suatu pengumuman (no.4/1958) yang menjelaskan kedudukan tilgram dari Menteri Dalam Negeri noTem/ 1 0/3/27 tertanggal 15 Juli 1958. Pengumuman ini justru mendapat reaksi kembali dari SSKDN sehubungan dengan itu pengurus organisasi ini mengeluarkan pengumumannya pada tanggal 9 September 1958 yang menyatakan bahwa pengumuman DPD no.4/1958 itu merupakan suatu usaha pemutarbalikan kenyataan. Karena SSKDN mengeluarkan ancamannya, yaitu mereka akan mengadakan aksi pemogokan jika keputusan DPD no. 124/1958 sampai tanggal 15 September tidak dicabut.

Ancaman seperti itu tidak dapat dilaksanakan oleh SSKDN, mereka mengeluarkan pernyataan pembatalan rencana itu pada tanggal 14 September 1958. Sementara itu pada tanggal 13 September 1958 DPD menerima kawat dari Menteri Dalam Negeri yang isinya memperkuat tindakan-tindakan yang telah diambil oleh DPD selama ini. Bunyi kawat itu sebagai berikut, "pemindahan pegawai daerah adalah haknya daerah akan tetapi dengan tetap mengingat syarat-syarat yang berlaku dalam mengatur masalah kepegawaian."⁴⁶⁾

Sistem pemerintahan daerah yang diterangkan di atas tidak berjalan lama karena pada tahun 1959 diadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia dan ini tentu saja menyangkut pula sistem pemerintahan daerah di Yogyakarta. Pada tahun 1959 itu dapat dikatakan sebagai awal perubahan sistem kenegaraan di Indonesia, yaitu dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Sejalan dengan itu, presiden mengeluarkan suatu penetapan bernomor 6/1959. Sebagai lealisasi dari Penpres no.6 itu, pada tanggal 17 Nopember ,

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Men. DNOD) melantik anggota-anggota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah DIY. Pelantikan-pelantikan ini kemudian disusul oleh pelantikan-pelantikan anggota DPRD-DPRD Swatantra tingkat II Kotapraja Yogyakarta, Sleman dan Kulon Progo. Pada tanggal 19 Nopember 1959 dilantik pula anggota-anggota DPRD-DPRD Swatantra tingkat II Bantul dan Gunung Kidul. Pelantikan-pelantikan tersebut di atas dilakukan oleh Wakil Kepala Daerah DIY Paku Alam VIII. Ketika itu DPD diganti oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) sebagai aparat eksekutif. Karena itu pelantikan terhadap anggota-anggota BPH dilakukan pula dan ini dilakukan oleh Kepala Daerah DIY, Sri Sultan. Setelah pelantikan itu, oleh Sri Sultan dilantik pula Kepala Daswati II Kulon Progo, Kotapraja Yogyakarta dan Sleman, ini dilakukan pada tanggal 3 Pebruari 1960. Sedang untuk Kdpala Daswati II Bantul dan Gunung Kidul dilakukan oleh Wakepda Paku Alam VIII. Pelantikan ini dapat dikatakan berjalan lancar. 47)

Pada tahun 1961 suatu peristiwa yang cukup berarti terjadi pula, yaitu diubahnya status Yogyakarta dari daerah darurat militer ke daerah darurat sipil. Perubahan tingkat kedaruratan daerah Yogyakarta ini dilakukan berdasarkan surat keputusan presiden no.353/1960. Realisasi keputusan itu dilakukannya upacara timbang terima antara Pangdam VII Diponegoro, Kolonel Pranoto Reksosamudro sebagai penguasa darurat militer kepada Kepala Daerah DIY Sri Sultan sebagai penguasa darurat sipil, timbang terima itu dilakukan pada tanggal 1 April 1961. Sejalan dengan kekuasaan yang ada di tangannya, maka Sri Sultan sebagai Penguasa darurat sipil mengambil tindakan-tindakan untuk melancarkan jalannya pemerintahan DIY. Tindakan itu antara lain berupa pengangkatan beberapa orang pembantunya seperti Sutrisno sebagai Kqpala Staf Padarsipda, Ajunct Komisaris Besar Pohsi RM. Brotomurdokusumo sebagai Kepala Seksi Finansial Ekonomi (Finek) Tolkhakh Mansyur sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan H.J. Sumarto sebagai Sekretaris.

Untuk melancarkan jalannya pembangunan DPRD membentuk suatu badan yang akan merencanakan pembangunan DIY. Sifat dan kegunaan badan itu telah ditentukan di dalam peraturan daerah Istimewa Yogyakarta no.1/1961, yang telah dikeluarkan pada tanggal

23 Pebruari 1961. Pada tahun itu juga DPRD-DIY mengeluarkan suatu surat keputusan yang menetapkan anggaran Dewan Pengawis Bank Pembangunan DIY, dewan itu beranggotakan Suwamo, Aktimad Dahlan dan Muhammad Jamhari.⁴⁹⁾

Di dalam sistem ketatanegaraan “demokrasi” terpimpin telah dilakukan pelbagai perubahan. Perubahan itu antara lain juga menyangkut lembaga-lembaga kenegaraan seperti DPR/DPRD, Pada tanggal 22 Maret 1962 dilakukanlah pelantikan DPRD Gotong-Royong (DPRD-GR) Yogyakarta yang dilakukan oleh Men. DNOD; jumlah anggota DPRD itu sebanyak 45 orang yang terdiri dari bekas-bekas anggota DPRD “gaya” lama juga. Dalam sistem demokrasi terpimpin ini kedudukan ketua diduduki pula oleh Bupati Kepala Daerah, sehingga kedudukan seorang Bupati tidak hanya sebagai pimpinan eksekutif tetapi juga legislatif. Inilah yang merupakan salah satu perbedaan antara sistem demokrasi terpimpin dengan demokrasi liberal. Perbedaan itu juga terdapat pada cara pengangkatan anggota-anggota DPR, yaitu pada sistem demokrasi liberal dilakukan dengan melalui pemilihan umum, sedang pada sistem demokrasi terpimpin keanggotaan diperoleh melalui cara pengangkatan.

Sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi terpimpin itu beljalan terus sampai berakhirnya kekuasaan orde lama (orla). Sebagaimana diketahui berakhirnya kekuasaan orla itu adalah karena berhasilnya kekuatan-kekuatan orde baru (orba) menggagalkan usaha perebutan kekuasaan yang telah dilakukan oleh PKI melalui gerakan 30 September (G.30.S) tahun 1965. Dalam usahanya merebut kekuasaan G.30.S. telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam berupa pembunuhan-pembunuhan terhadap beberapa pemimpin militer angkatan darat, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jendral Ahmad Yani. Kekejaman G.30.S. itu juga dilakukan di Yogyakarta yaitu dengan melakukan pembunuhan terhadap dua orang pejabat teras militer di Yogyakarta, masing-masing terhadap diri Komandan Korem 72 Pamungkas Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya, Letnan Kolonel Sugiono. Keduanya telah dibunuh di dalam kompleks asrama Batahon 403 di Kentungan.

Dalam suasana yang sangat tegang itu, di Yogyakarta telah pula bangkit gerakan-gerakan Maliasiswa yang bertujuan untuk

menggagalkan usaha G.30.S itu. Bangkitnya angkatan 66 di Yogyakarta itu diawali dengan demonstrasi-demonstrasi pelajar/Mahasiswa di Yogyakarta, demonstrasi itu telah mendapat halangan-halangan dari pihak-pihak tertentu yaitu kekuatan Orla yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya bentrokan di antara kekuatan Orla dengan kekuatan Orba. Demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar/mahasiswa itu menyebabkan gugurnya dua orang pelajar demonstran yaitu Aris Munandar dan Margono. Untuk mempersatukan semua potensi kekuatan orba dan untuk lebih mempertinggi kekuatan perlawanan terhadap Orla, dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Konsulat Yogyakarta. Pembentukannya dilakukan pada tanggal 17 Nopember 1965 disponsori oleh organisasi-organisasi mahasiswa (ekstra universitas) yang ada di Yogyakarta, yaitu masing-masing PMII, PMKRI; MAPANCAS, HMI, IMM, GEMPAR, GERMAHII, STMMI. Sejalan dengan itu dibentuk pulalah sebuah organisasi kelasykaran, Lasykar Aris Margono dengan komandan Padamulia Lubis dari IKIP Yogyakarta.

Sejak awal kebangkitan angkatan "66" di Yogyakarta,⁵⁰⁾ dilakukan "pembersihan" di dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan pendidikan dan pendukung-pendukung kekuatan PKI/Orla. Anggota-anggota DPRD yang dianggap terlibat G.30.S dipecat, fron Nasional sebagai lembaga penggalang massa dibekukan karena lembaga ini telah "didominir" oleh kekuatan-kekuatan PKI/Orla. Pada lembaga pendidikan, khususnya di Pendidikan Tinggi negeri dilakukan sekerning terhadap diri mahasiswa pendukung PKI/Orla. Anggota-anggota CGMI dipecat sebagai mahasiswa.

Setelah kekuatan Orba berhasil menguasai keadaan, maka keadaan pun berangsur-angsur baik. Namun tidak pula dapat dilupakan adanya kegiatan parpol untuk menanamkan pengaruhnya di lembaga pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Gajah Mada. Pemilihan Rektor telah memancing pertentangan di antara mahasiswa, yang bahkan juga membawa pengaruh di kalangan kaum politisi baik di pusat maupun di Yogyakarta sendiri. Pertentangan itu sampai-sampai melahirkan demonstrasi besar-besaran, seperti perebutan kunci kantor Rektor Universitas itu. Ini terjadi ketika Drs. Suroso MA diangkat

sebagai Rektor pada tahun 1968. Namun pergolakan-pergolakan itu pada akhirnya dapat diatasi oleh pihak penguasa di Yogyakarta.

Jika kita memasuki tahun-tahun 70-an, yaitu antara tahun-tahun 1970--1974, maka dapat dinamakan bahwa Yogyakarta juga telah mengalami berbagai pergolakan lagi, terutama oleh karena adanya kegiatan mahasiswa di daerah ini. Mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan berupa politik terhadap pemerintah, baik terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diskusi-diskusi yang menyangkut soal kenegaraan dan kemasyarakatan seringkali dilakukan. Salah satu group diskusi yang cukup banyak melakukan kegiatannya ialah Diskusi Antar Generasi. Kegiatan-kegiatan group ini sering mendapat bantuan dari Pangdam VII Diponegoro waktu itu, yaitu Mayor Jenderal Widodo. Pemilihan : umum tahun 1971 di Yogyakarta dimenangkan oleh Golongan Karya (Golkar).⁵¹⁾

8.2 Penyelenggaraan Hidup

8.2.1 Kehidupan Sosial ekonomi pada Masa Revolusi Fisik

Kehidupan sosial ekonomi kita pada masa revolusi fisik sangat buruk. Keadaan ini sudah dimulai sejak zaman Jepang. Perjuangan bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaannya, yang telah dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 lebih situasi itu. Pengaturan ekonomi kita ketika itu bersifat "ekonomi darurat perang". Dalam situasi demikian daerah DIY harus pula menerima konsekuensi sosial ekonomi yang lebih berat karena kedudukannya sebagai ibukota negara Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta harus menerima akibat tindakan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Belanda berusaha untuk menutup jalur-jalur ekonomi DIY yang selama ini menghidupinya. Kecuali itu jumlah penduduk Yogyakarta setiap hari bertambah sebagai akibat berdatangnya pengungsi-pengungsi yang berasal dari lain daerah.

Untuk mengatasi keadaan, pemerintah mengambill beberapa langkah yang patut dicatat dan terpuji. Pemerintah mengeluarkan alat pembayaran resmi yang berlaku di dalam negara kita, yaitu Uang Republik Indonesia (ORI). ORI tidak hanya bermakna politis tetapi

juga dimaksudkan untuk menyehatkan jalannya perekonomian kita, karena uang Jepang ketika itu telah mengalami inflansi yang sangat parah. Makna politik dengan dikeluarkannya ORI itu ialah untuk menjadi alat perjuangan bagi bangsa kita di dalam menghadapi Belanda. Tindakan yang lainnya yang juga menyangkut usaha perbaikan ekonomi ialah didirikan nya Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1946. Di dalam pendirian Bank Negara Indonesia ini jasa dari Margono Joyohadikusumo sangat besar, karena dapat dikatakan bahwa dialah yang merintis berdirinya Bank Negara Indonesia yang merupakan milik pemerintah Republik Indonesia ini. Salah satu tugas utama dari Bank Negara Indonesia ialah untuk mengatur nilai tukar antara ORI dengan nilai valuta asing yang beredar di Indonesia.⁵³⁾

Dimasa perang kemerdekaan dengan ekonomi darurat perang nya, kehidupan ekonomi dalam semua sektor berada di dalam pengendalian pemerintah. Peranan golongan Swasta terdesak. Namun demikian golongan ini tetap berusaha untuk memainkan peranannya di dalam usaha perekonomian negaranya. Sehubungan dengan itu dibawah pimpinan BR. Motik, Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) berusaha menggiatkan kembali peranan golongan swasta. Salah satu usaha yang ditempuhnya ialah mendirikan Bank P.T. di Yogyakarta, modal, pertama Bank ini sebanyak Rp.5.000.000,-⁵⁴⁾ dikatakan diatas keadaan perekonomian belum juga dapat berjalan lebih baik. Barang-barang kebutuhan sehari-hari harganya setiap hari bertambah mahal. Di kota sering terjadi kelaparan. Untuk mengatasi kelaparan itu penduduk terpaksa makan daun-daunan dan buah-buahan mentah sekedar untuk mengganjal perut.⁵⁵⁾

Kekurangan makan dan kebutuhan pokok sehari-hari itu, menimbulkan suasana yang tidak tentram. Suasana demikian makin diperberat oleh adanya tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dari sekelompok orang yang melakukan perampokan perampokan. Mereka melakukan penggarongan-penggarongan terhadap rumah-rumah penduduk yang telah kekosongan karena pemiliknya mengungsi dan juga rumah-rumah penduduk yang masih berpenghuni. Mereka melakukan kegiatan, dengan pelbagai motif. Ada yang melakukannya karena desakan ekonomi, ada juga yang memang pekerjaannya

merampok. Tetapi tidak kurang pula perampokan yang dilakukan oleh karena taktik jahat dari penjajah Belanda. Tujuannya adalah untuk memperlemah kedudukan republik.⁵⁶⁾

8.2.2. *Kehidupan sosial Ekonomi Sesudah Pengakuan Kedaulatan.*

Setelah perang kemerdekaanpun berakhir, pemerintah mulai memperbaiki sarana-sarana kehidupan masyarakat yang wakil perang telah dirusak oleh karena keadaan yang memaksa. Karena itu dilakukan perbaikan jalan, dan perbaikan kembali jembatan-jembatan seperti diketahui dimasa perang kemerdekaan, tidak kurang dari 200 buah jembatan telah rusak.⁵⁷⁾

Perbaikan-perbaikan yang telah dikatakan di atas itu harus ditunjang oleh pengadaan sarana-sarana lainnya seperti sarana pengangkutan agar pengangkutan barang kebutuhan ke dan dari pasar atau tempat-tempat lainnya dapat dilakukan secara lancar. Sehubungan dengan itu, maka peranan kereta Api (K.A) sangatlah pentingnya, demikian pula kendaraan-kendaraan bermotor, terutama bis. Agar sarana ini dapat memenuhi pungsinya lebih baik, pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap perusahaan angkutan K.A. ini, baik dibidang administratifnya maupun dibidang personalianya. Untuk pengangkutan ini dikordinir oleh pemerintah melalui perusahaannya : DAMRI. Banyak juga perusahaan swasta yang bergerak di bidang ini. Pada tahun 1951 di DIY terdapat 12 perusahaan bis dengan jumlah bis-bis yang dimilikinya sebanyak 73 buah.⁵⁸⁾ Keadaan dewasa ini nampak lebih maju, karena alat pengangkutan bis telah memperluas kegiatannya dengan jalan membuka perusahaan-perusahaan bis-bis malam dengan tujuan kepelbagai tempat seperti ke Jakarta Surabaya, Bandung dan Jakarta. Perusahaan seperti Remaja, Gaya Baru, Pemuda dan Agung Expres adalah perusahaan yang sangat ramai dipergunakan oleh rakyat untuk melakukan perjalanannya atau mengirimkan barang-barang.

Selanjutnya yang menyangkut bidang-bidang pertanian dan kooperasi rakyat. Kedua bidang ini tda inendapat perhatian besar dari pemerintah. Usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan para petani telah dilakukan terus menerus. Mereka telah dianjurkan untuk

mempergunakan pupuk agar hasil mereka meningkat dan mutunya pun menjadi lebih baik. Kini bagi petani pupuk bukanlah barang asing lagi. Usaha untuk memperbaiki keadaan petani melalui kooperasi pun terus dilaksanakan. Misalnya dengan mendirikan BUUD/KUD; ide pembentukan jenis kooperasi ini berasal dari seseorang guru besar dari Gajah Mada,

Prof. Ir. Sudarsono Hasil pertanian dan perkebunan mereka dijual melalui BUUD/KUD yang didirikan di setiap Kecamatan dan desa.

Walaupun demikian keadaan sosial ekonomi masyarakat rakyat masih perlu ditingkatkan karena kemelaratan masih juga belum dapat diatasi sepenuhnya. Kemiskinan masih sering kita dengar menjadi bahan pembicaraan yang luas. Salah satu gambaran ‘tentang kemiskinan dan perekonomian desa telah ditulis oleh seorang sarjana Indonesia Singarimbun (Ketua Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada) di desa Sri Harjo.⁵⁹⁾ Erat kaitannya dengan keadaan itu ialah persediaan lapangan kerja. Jumlah penduduk desa tidak seimbang dengan lapangan itu yang terjadi. Malah lapangan Kerja “tradisional” di desa-desa Yogyakarta seperti derep telah mulai terdesak oleh kemajuan teknologi.

Kesulitan-kesulitan hidup ini tidak dapat dilepaskan dengan jumlah penduduk yang terlalu banyak. Karena itu salah satu cara untuk mengatasinya ialah mentransmigrasikan mereka ke luar Pulau Jawa dan pelaksanaan keluarga berencana secara intensif. Kedua usaha ini mendapat prioritas dari pemerintah.⁶¹⁾

8.3 *Kehidupan Pendidikan Dan Seni Budaya.*

8.3.1 *Perkembangan Pendidikan.*

Sejak sebelum perang duani ke II daerah Yogyakarta merupakan tempat pendidikan yang diselenggarakan oleh pelbagai lembaga pendidikan baik yang berazaskan kebangsaan maupun agama. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tujuan tidak hanya untuk mencerdaskan bangsanya tetapi juga untuk

menumbuhkan perasaan nasionalis pada anak-anak asuhannya. Lembaga ini sejak awal berdirinya, telah menempuh jalan "berdikari" tidak pernah bersedia menerima bantuan dari pihak penjajah Belanda. Orang-orang Islam terutama dari Muhammadiyah aktif pula dibidang ini, demikian pula halnya orang-orang yang beragama Kristen, baik yang Katholik maupun Protestan. Semua lembaga Pendidikan itu mendirikan sekolah-sekolah baik tingkat sekolah rakyat (dasar), maupun tingkat menengah. Setelah pengakuan kedaulatan mereka membuka juga lembaga pendidikan tinggi.

a. Pendidikan dasar dan menengah.

Untuk bidang, pendidikan dasar dan menengah ini lembaga pendidikan Kristen, yaitu Badan Oesaha Kristen Republik Indonesia (BOPKRI), telah pula melakukan kegiatan-kegiatannya. Hal itu telah dimulai sejak sebelum perang, lembaga pendidikan ini telah membuka sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah-sekolah tingkat menengah baik tingkat pertama maupun tingkat atas. Dewasa ini BOPKRI telah memiliki 3 buah SMA dan 2 buah SMEA. Golongan Katholik pun telah melakukan kegiatannya dan sekolah-sekolah yang berada di bawah asuhannya juga cukup banyak, mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat Atas. Lembaga pendidikan di bawah orang-orang Katholik terkenal karena mutu disiplinnya. Dari sekian banyak sekolah-sekolah Katholik SMA (Putri) Stella Duce dan SMA (Putra) de Brito yang diakui masyarakat memiliki mutu yang tinggi.

Di lain pihak golongan Islam pun giat di dalam bidang ini. Gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memperhatikan bidang ini. Karena itu Muhammadiyah pun mempunyai sekolah-sekolah yang cukup banyak jumlahnya, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Gerakan Akhmadiyah (Lahore) juga telah menggiatkan diri melalui lembaga pendidikannya, yaitu Perguruan Tinggi Islam Republik Indonesia (PIRI). Golongan ini pun telah memiliki sekolah-sekolah baik yang bersifat umum maupun kejuruan.⁶²⁾

Sejalan dengan usaha pemerintah melakukan perbaikan di bidang pendidikan dasar/menengah ini, maka di Yogyakarta telah didirikan sekolah Pembangunan baik SMA Pembangunan maupun STM Pembangunan. Sekolah-sekolah Pembangunan yang ada di Yogyakarta ini merupakan yang pertama kali didirikan oleh pemerintah. Dewasa ini sekolah-sekolah pembangunan tersebut telah berjalan dengan baik dan telah mengeluarkan lulusan-lulusannya.

b. Pendidikan Tinggi.

Sejak awal kemerdekaan telah dirasa perlunya diselenggarakan perguruan tinggi untuk menampung anak-anak kita yang akan meneruskan pendidikannya. Untuk ini oleh beberapa pemimpin di Yogyakarta dibentuk Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada dengan susunan pengurusnya Mr. Budiarto sebagai Ketua, Dr. Sukiman, Dr. Buntaran dan Dr. Suharto masing-masing sebagai Wakil Ketua Penulis dan Bendahara.⁶⁴⁾ Setelah persiapan-persiapan selesai maka pada 3 Maret. diumumkanlah berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada oleh para pendirinya dengan status partikelir/ swasta.⁶⁵⁾ Setelah mengalami proses akhirnya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada ini diresmikan oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi negeri dengan nama Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949.⁶⁶⁾ Sekarang Universitas Gajah Mada telah berusia 27 tahun. Universitas ini telah melakukan pelbagai kegiatan-kegiatan ilmiah yang berupa seminar-seminar, misalnya seminar Pancasila,⁶⁷⁾ dan lain-lain. Sampai sekarang Universitas Gajah Mada telah menghasilkan sarjana sebanyak 17130 orang dari 18 buah fakultas yang ada di dalam lingkungannya.⁶⁸⁾

Di samping Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta telah berdiri pula beberapa buah universitas dan akademi IKIP negeri IAIN, UII, IKIP Sanata Dharma, STI-PPEP, Universitas Yanabadra, Sekolah Tinggi Teknologi sehingga jumlah keseluruhan perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta tidak kurang dari 35 buah.

Sebagai akibat adanya lembaga pendidikan yang banyak itu dari luar Yogyakarta dan dari luar Pulau Jawa pada setiap awal tahun ajaran sangat besar. Mereka terutama berusaha untuk memasuki Universitas Gajah Mada dan nanti setelah tidak berhasil diterima di Universitas

ini barulah mereka mencari yang lain. Berkumpulnya pelajar/ mahasiswa yang berasal dari berbagai-bagai daerah itu ada keuntungannya di dalam rangka pembinaan bangsa Indonesia, baik sekarang maupun yang akan datang. Namun tidak jarang pula terjadinya hal-hal yang kurang baik seperti perkelahian di antara suku-suku yang berkelompok di kampung-kampung. Bahkan perkelahian itu ada yang sampai menimbulkan korban jiwa. Pertentangan di antara suku itu, tidak jarang pula ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan golongannya..

8.3.2 *Perkembangan Seni Budaya.*

Salah satu unsur penting di dalam kehidupan Masyarakat Yogyakarta adalah bidang seni budaya. Tumbuhnya kehidupan seni budaya dengan subur adalah karena para raja yang memerintah Yogyakarta pada umumnya pencinta seni budaya. Sehubungan dengan itu, menurut S.H. Koesumo, sejak bertahtanya Sultan Hamengku Buwono ke V pertumbuhan seni budaya di Yogyakarta Hadiningrat telah berlangsung secara teratur sampai sekarang.⁷¹⁾

Para Sultan itu telah mencipta tari-tarian seperti yang dilakukan oleh Sultan Hamangku Buwono ke II, yaitu tari Bedoyo Senang. Sehubungan dengan perkembangan seni budaya di Yogyakarta, satu hal yang tidak dapat diabaikan ialah dibukanya Museum Sonobudoyo oleh Sultan Hamengku Buwono ke VIII Sultan ini, memang cukup terkenal karena jasanya terhadap perkembangan seni budaya. Beliau banyak memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga kesenian seperti kepada Seno Budoyo, Krida Bekso Wiromo, Habiranda dan lain-lain. Masyarakat Yogyakarta sangat gemar akan kesenian mereka, baik terhadap wayang, karawitan dan juga tari-tariannya. Adanya kesenian wayang, maka peranan dalang sangatlah besar, Untuk mempertinggi mutu para dalang, maka sejak tahun 1925 telah didirikan kursus dalang yang diberi nama Habiranda.⁷³⁾ Masyarakat Yogyakarta mengenal banyak jenis tari, misalnya tari bedoyo, serimpi, wayang wong, wayang topeng, langen driyo, wireng dan bekso.⁷⁴⁾ Dewasa ini juga telah banyak digemari tarian modern seperti tari ramayana, drama tari yang diciptakan dari epos Ramayana, demikian pula beberapa tari yang diciptakan dari epos Mahabarata.⁷⁵⁾

Di atas dikatakan bahwa seni budaya Yogyakarta, terutama seni tari bersumber dari Kraton. Akan tetapi hal itu kemudian tidak dapat dipertahankan, karena adanya usaha agar tari-tarian dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Usaha ini dipelopori oleh keluarga Kraton sendiri. Pada tanggal 17 Agustus Pangeran-pangeran Suryaningrat dan Tejakusuma mendirikan perkumpulan seni tari yang bernama Krida Beksa Wirama. Perkumpulan inilah yang telah berusaha mengembangkan seni kraton Yogyakarta untuk dinikmati pula oleh masyarakat luas.⁷⁶⁾

Kemudian seni tari di Yogyakarta dewasa ini tidak dapat dipisahkan dengan tokoh-tokoh kreative seperti Bagong Kussudihaijo dan Wisnu Wardhana; demikian pula dengan Drs. Sudarsono dan R.M. Wasisto Suryodiningrat. Mereka ini adalah pencipta-pencipta tari dan sekaligus juga penari-penari yang baik dan bereputasi tinggi, bahkan bertingkat nasional.⁷⁷⁾

Yogyakarta tidak hanya terkenal karena tariannya tetapi juga karena bidang seni lainnya, seperti seni drama dan lukis. Dewasa ini terdapat beberapa perkumpulan seni drama yang cukup temama, misalnya Bengkel Theater dan Theater Alam yang masing-masing dipimpin oleh Rendra dan Azwar A.N. Bengkel theater pimpinan Rendra ini cukup terkenal dan tidak hanya melakukan pementasannya di Yogyakarta akan tetapi malah lebih banyak melakukan pementasannya di Jakarta. Jasanya pun tidak kecil di dalam menciptakan dramawan-dramawan yang cukup terkenal seperti Arifin C.Noor dan Putu Wijaya.. Seperti diketahui kedua orang dewasa ini telah berkembang sebagai dramawan-dramawan yang kreatif. Mereka pun pencipta-pencipta lagu yang kreatif. Sedang di bidang, seni lukis nama-nama Rusli, Affandi, Amri Yahya (dengan lukisan motif batiknya), Saptohudoyo, Abas Ali Basjah dan lain-lain adalah pelukis-pelukis yang kreative dan memulai jenjang kerjanya dari dan di Yogyakarta.

8.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan.

8.4.1 Perkembangan Agama.

Bagi masyarakat Yogyakarta kepercayaan terhadap agama merupakan sesuatu yang tidak ditinggalkannya. Bahkan Sultan-Sultan

mereka mendapat predikat panotogomo yang bernakna pengatur dan pelindung agama. Sejalan dengan itu di Yogyakarta setiap aliran agama, yang mendapat pengakuan dari pemerintah, bebas dan berhak untuk mengembangkan ajaran-ajaran yang dipercayainya. Di daerah ini agama-agama yang paling banyak penganutnya ialah agama Islam, Kristen, baik Katholik maupun Protestan, Hindu dan Budha. Adanya kebebasan untuk menyebarkan ajaran-ajarannya, memberi kemungkinan kepada setiap kelompok agama itu untik mendirikan tempat-tempat ibadah mereka; malah pembangunan tempat-tempat ibadah mereka ini selalu mendapat bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kegiatan untuk maksud itu tidak jarang dilakukan secara bersama, bahkan juga dari agama yang lainnya. Sehubungan dengan itu pada tahun 1952 jumlah mesjid, yang terdapat di DIY adalah sebanyak 496 buah, langgar 3015 buah; sedang Gereja terdapat 64 buah.⁷⁸⁾ Keadaan inii tentu saja telah mengalami perubahan, dalam arti kata jumlah telah bertambah banyak. Di Yogyakarta ada beberapa tempat ibadah yang cukup terkenal karena bentuknya yang menarik, seperti Mesjid Besar di Komplek Kraton dan Gereja Katholik di Kota Baru. Sejak dulu daerah Yogyakarta merupakan tempat subur bagi pertumbuhan aliran-aliran kebatinan. Pada tahun 1952 Gunung kidul terdapat 4 buah organisasi aliran kebatinan, di Bantul sebanyak 21 buah, di Sleman terdapat 3 buah, di Kulon Progo terdapat 4 buah dan di Yogyakarta terdapat 4 buah. Besarnya jumlah anggota dari setiap organisasi kebatinan itu berbedanya jumlah anggota dari setiap organisasi kebatinari itu berbeda-beda; tetapi jumlahnya berkisar dari puluhan orang sampai ribuan orang

Dewasa ini aliran kebatinan yang termasuk apa yang disebut "kepercayaan" makin mendapat tempat di masyarakat oleh karena adanya kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan dirinya. Mereka sudah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, dan setiap tahun yaitu pada tanggal 1 Suro, mereka merayakan hari besar mereka. Juga, sebagaimana agama lainnya, aliran kepercayaan ini telah mendapat hak untuk menyebarkan ajarannya melalui media resmi pemerintah seperti televisi.

8.4.2 *Kehidupan Intelektual.*

Yogyakarta dapat dikatakan sebagai tempat berkumpulnya kaum cerdik pandai atau kaum intelektual. Yogyakarta merupakan salah satu pusat pendidikan tinggi di Indonesia, dan Gajah Mada merupakan salah satu Universitas terbesar di Indonesia dewasa ini. Sehubungan dengan itu banyak sekali orang-orang pandai di bidang masing-masing, seperti bidang ekonomi, bidang-bidang budaya, bidang hukum dan lain-lain. Nama-nama Dr. Mubiyarto, Dr. Sukaji Ranuwihardja (Rektor Universitas Gajah Mada sekarang), Affandi, Rendra, Prof. Sartono Kartodirdjo, Dick Hartoko, Prof. P4otosusanto, Prof. Ir. Dr. H.Johannes, Prof. Dr. Notonegoro S.H. dan lain-lain merupakan sederetan golongan intelektual yang sampai sekarang masih menetap di Yogyakarta dan bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

8.5 *Hubungan dengan Luar Negeri.*

Perkembangan dan peninggalan kebudayaan di daerah ini mampu memancing datangnya para wisatawan ke daerah ini. Setiap tahun Yogyakarta didatangi oleh para wisatawan dari pelbagai negara, seperti Amerika, Inggris, Australia, Kanada, Jepang, Perancis dan lain-lain. Hal ini membawa akibat sosial-ekonomi yang cukup berarti bagi penduduk. Pengusaha-pengusaha di bidang perhotelan makin berkembang, baik penginapan-penginapan kelas rendah maupun kelas tinggi. Kompleks penginapan kelas murah/ rendah di jalan Pasar Kembang sangat ramai dikunjungi mereka. Mereka senang tinggal di sini tidak saja karena sewa penginapan yang murah (sekitar Rp 250--500 permalam), tetapi juga karena mereka bisa secara langsung dapat menikmati kehidupan malam yang terjadi di kompleks.

Adanya lembaga-lembaga pendidikan tinggi juga membuka kemungkinan kerjasama dengan luar negeri di bidang ini. Universitas Gadjah Mada telah sejak lama mengadakan kerjasama dengan beberapa negara misalnya dengan Negeri Belanda dan Amerika, berupa pengiriman tenaga-tenaga pengajarnya ke negara-negara tersebut. Gajah Mada juga kedatangan tenaga pengajar dari negara-negara tersebut. IAIN juga telah mengadakan kerjasama dengan

negara-negara Mesir dan Kanada, demikian pula UII yang telah mengadakan kerjasama dengan negeri Belanda. Universitas Islam ini yang telah mendapat bantuan dari negeri Belanda berupa bangunan sebuah gedung bertingkat di kampusnya, yang terletak di jalan Terban Taman. Dewasa ini kerjasama di pelbagai bidang terus dilanjutkan.

Catatan

1. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*, Kementerian Penerangan Djakarta, 1953, hal. 35.
2. RP Soedarsono "Revolusi Jogya dan Sekitamja" di dalam *Penelitian Sejarah* no.2 Tahun ke II Maret 1961 (Jajasan Lembaga Ilmiah Indonesia Penyelidikan Sejarah Jakarta, 1961, hal. 31
3. Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, *op. cit*, hal. 40.
4. Tentang pertempuran Kota Baru ini ada suatu hal yang menarik untuk dicari kepastiannya, yaitu tentang keterlibatan Let. Kol. Suharto di dalam penyerangan itu. R.P. Sudarsono, salah seorang yang terlibat langsung di dalam pertempuran Kota Baru itu tidak menyebut-nyebut nama Let. Kol. Suharto. Yang disebut malah Umar Slamet, komandan dari Let.Kol. Suharto waktu itu. Sedang O.C. Roeder dengan jelas menyebutkan peranan penting Let.Kol. Suharto di dalam penentuan pelaksanaan penyerbuan ke Markas Jepang di Kota Baru itu. Dan menurut O.C. Roeder, Slamet waktu sedang ke Madiun. Untuk keterangan selanjutnya, lihat R.P.Soedarsono, *Revolusi Jogjakarta Sekitarnya*" di dalam *Penelitian Sedjarah* no.2, Tahun ke II, Maret 1961 (Jajasan Lembaga Ilmiah Indonesia Penyelidikan Sedjarah Djakarta, 1961) hal. 30--35 dan pada majalah yang sama, no.3, hal. 51--53. Sedang keterangan O.C.Roeder dapat dilihat pada O.C.Roeder, *Soeharto dari Prajurit sampai Presiden*, Gunung Agung, Djakarta, 1969, hal. 131--137.

5. I.Dewa Nyoman Oka adalah seorang pemuda berasal dari Bali dan ketika penyerbuan ke Kota Baru dia termasuk sebagai salah seorang anggota lasykar yang tergabung dalam kelompok penyerang. Akan tetapi di dalam pertempuran Kota Baru itu dia termasuk salah seorang dari 19 orang yang gugur di dalam pertempuran itu.
6. Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *op. cit.*, hal. 44.
7. Cindy, Adams, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*, Gunung Agung, Djakarta, 1966, hal. 153.
8. Adi Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perdjalananku*, P.T. Kinta Jakarta, 1974 hal. 198.
9. *Ibid.* hal. 205--206.
10. O.C.Roeder *op cit* hal 142.
11. Mohammad Roem, *Bunga Rampai Dari Sedjarah*, Bulan Bintang, Djakarta, 1972, hal. 129.
12. Ali Sastroamidjojo, *op cit*, hal. 226.
13. Madio, "Peranan Pemuda Yogyakarta Selama Pendudukan Belanda Tahun 1948--1949", *Skripsi Sarjana Muda*, Yogyakarta, 1975, hal. 7.
14. Ali Sastroamidjojo, *op cit* hal. 243.
15. Nugroho Notokusanto, *Markas Besar Komando Djawa*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta 1973, hal. 25.
16. Ketegasan ini dinyatakan beliau di dalam salah satu pidato-pidatonya di Bukit Tinggi untuk menyambut tahun baru. Keterangan selanjutnya lihat Aminuddin Junus, *GarisPolitik Hatta*, Penabur, Bukit Tinggi 1950 hal. 144--145.
17. Solichin Salam, *Djendral Soedirman Pahlawan Kemerdekaan*, Djajamurni, Djakarta 1963, hal. 53.
18. Kedua tokoh militer ini telah mengambil peranan penting selama perang kemerdekaan, termasuk di dalam pengaturan perlawanan di masa pendudukan ibu kota Republik Yogyakarta; tentang keterangan selanjutnya saat O.C.Roeder, *Dari Prajurit sampai Presiden*,

Gunung Agung 1969, passim, lihat juga A.H.Nasution, *Pokok-pokok Gerilya Dan Pertahanan Republik Indonesia Dimasa Jang Lalu Dan Jang Akan Datang*, Pembimbing Djakarta 1954, passim juga Nugroho Nolosusanto *Markas Besar Komando Jawa* Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta 1973 passim.

20. Nugroho Notosusanto, *op cit*, hal. 33.
21. Pada masa perjuangan/perang kemerdekaan oleh pelbagai golongan di dalam masyarakat, telah dibentuk kelasykaran-kelasykaran bersenjata dengan maksud sebagai organisasi perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pembentukan ini merupakan pertanda dari keikutsertaan rakyat di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaannya; salah satu organisasi kelasykaran yang terbesar/terkuat waktu itu ialah *Hisbullah*.
22. *Buku Gerilya Wehrkreise III*, tanpa nama penerbit Yogyakarta, tanpa angka tahun, hal. 12--13.
23. Lihat keterangan yang tertera pada catatan no.21.
24. Mohammad Roem, *op cit*, hal. 94.
25. Ali Sastroamidjojo, *op cit* hal. 251--253.
27. *Ibid* hal. 253.
28. O.G. Roeder, *op cit* hal. 156.
29. *Ibid*.
30. Nugroho Notosusanto, *op cit* hal. 49.
31. *Ibid*. hal. 50.
32. Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, *op cit* hal.
33. Andi Azis adalah seorang bekas Kapten KNIL yang berdasarkan persetujuan pemerintah Republik Indonesia Berikut dengan Pemerintah Belanda telah diresmikan sebagai Anggota APRIS. Akan tetapi pada ketika itu di Makasar (UjungPandang) telah terjadi pergolakan antara golongan Unitaris dengan Federalis, dan agaknya Andi Azis telah pula melibatkan diri secara aktif; dia agaknya berada

di fihak federalis Puncak dari keterlibatannya ialah dengan terjadinya apa yang kini dikenal dengan "peristiwa Andi Azis", yang terjadi pada tanggal 5 April 1950. Akan tetapi perlawanannya terhadap pemerintah pusat (Yogyakarta) tidak berlangsung lama karena akhirnya dia memenuhi panggilan pemerintah pusat. Di Yogyakarta dia dihadapkan ke depan pengadilan militer dan dijatuhi hukuman. Penyelesaian persoalan Andi Azis waktu itu, secara militer, telah pula dilakukan oleh Let. Kol. Suharto dengan Brigade Mataramnya. Tentang bentuk penyelesaian persoalan Andi Azis, lihat a.l. Bardosono, *Peristiwa Sulawesi Selatan*, 1950, Pustaka Militer, Jakarta, 1955 passim.

34. Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta *op cit.* hal. 326.
35. Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif suatu penyelidikan Hukum Tatanegara*, C.V. Calindra, Djakarta 1965 hal. 105.
36. Sutomo, *Himpunan Peraturan Pendjelamaan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, U.P. Indonesia N.V. Jogja 1954 hal. 15.
37. *Hamka, Tjahaja Baru*, Pustaka Nasional, Medan 1950. hal. 36.
39. Sutomo, *op cit.* hal. 76.
40. *Ibid*, hal. 82--83.
41. *Ibid*, hal. 126.
42. *Fungsi Desa Dalam Arus Revolusi*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 1966, hal. 139.
43. *Ibid* hal. 144--145.
44. *DPRD Kabupaten Sleman Buku Dokumentasi*, Panitia Penerbitan Buku Dokumentasi DPRD Kabupaten Sleman, Sleman 1958, hal. 16.
45. *Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1958*, Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, hal.10--11
46. *Ibid*, hal. 12.
47. *Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1960*, Djawatan Penerangan Daerah Istitnewa Jogjakarta, Jogjakarta, 1960 hal. 5-15.

48. Darah Istinevva Joyakars Tahun 1961, Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta 1961, hal. 21.
49. *Ibid* hal. 38.
50. Gambaran tentang kebangkitan Angkatan 66 di Yogyakarta ini, antara lain dapat dilihat pada Siti Fatimah "Gerakan Mahasiswa di UGM Pada Sekitar Tahun 1966" *Skripsi Sariana* Muda, Yogyakarta, 1975, *passim*.
51. Pelbagai hal tentang pemilihan umum ini antara lain dapat diketahui pada buku yang disusun oleh Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia di Jakarta, *Seri Berita & Pendapat Pemilihan Umum 1971*, Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, Djakarta, 1972 *passim*.
52. Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *op cit*. hal. 408.
53. Nugroho Notosusanto, (cd) *Sejarah Nasional Indonesia* (jilid VI), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1975, hal. 218.
54. *Ibid*. hal. 224.
55. Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, *op cit* hal. 413.
- 51 *Ibid*, hal, 411
- 52 *Ibid*, hal, 421
58. *Ibid*.
59. Tentang hasil lengkap dari penelitian Dr. Masri Singarimbun secara lengkap. Lihat Masri Singarimbun dan D.H.Penny, *Penduduk dan Kemiskinan* Bhataara Karya Aksara, Jakarta 1976, *passim*.
60. Kenyataan seperti ini telah diungkapkan di dalam salah satu diskusi yang diadakan oleh Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada pada bulan Desember 1976. Keterangan lebih lanjut tentang masalah ini dapat dilihat pada Sjafri Sjairin, *Pekerjaan Dosen di Pedesaan DIY dan Beberapa Masalahnya*, stencilan, s no. 54 *passim*.
61. Tentang pelaksanaan Keluarga Berencana ini di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan pelbagai kegiatan oleh BKKBN dan juga oleh Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada, terutama di bidang penelitiannya. Kedua Lembaga ini bekerjasama

secara erat untuk merealisasikan tujuan pelaksanaan keluarga berencana ini. Hasil yang telah dicapainya, antara lain dapat dilihat di dalam Masri Singarimbun & Kasto, *Proyek Dwikarti*, Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, *passim*.

62. Kota Jogjakarta 200 tahun, Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun, *op cit* hal. 81--86.
63. Nugroho Notosusanto, (cd) Sejarah Nasional..... *op cit*, hal 267
64. Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, *op cit* hal 732.
- 65: *Ibid*.
66. *Ibid*.
67. Hasil-hasil dari Seminar Pancasila ini dapat dilihat di dalam *Seminar Pantja Sila Ke 116 Pebruari s/d 20 Pebruari '59* di Jogjakarta, Panitia seminar Pantja Sila, Jogjakarta, 1959 *passim*.
68. Kompas. Kemis 23 Desember 1976.
69. Dari Kantor Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Yogyakarta dan Jawa Tengah Bagian Selatan.
70. Keadaan yang demikian diakui juga oleh Sudarisman Purwokusumo yang beberapa tahun pernah menjabat Walikota Kotapraja Yogyakarta. Akan hal itu dapat dilihat S.Poerwokoesoemo. *Pengaruh Timbal balik* antara Universitas Gajah Mada dan Masyarakat, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1956. *passim*.
71. Kota Jogjakarta 200 Tahun, *op cit* hal. 114.
72. *Ibid* hal. 118.
73. *Ibid* hal. 129--130.
74. Soedarsono, *Djawa Dan Bali Dua Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisionil di Indonesia*, Gajah Mada University Press Jogjakarta, 1972, hal. 58--74.
75. Tentang jenis-jenis tarian yang dimaksud itu, lihat *Ibid*. hal. 75--109.

76. *Ibid*, hal. 76.
77. Banyak sudah kreasi-kreasi baru yang dilahirkan oleh Bagong Kussudiardjo dan Drs. R.M. Wisnu Wardhana, dan itu kedua penari dan pencipta tari ini cukup mempunyai reputasi, juga bahkan untuk tingkat nasional. Juga tidak dapat dilupakan jasa-jasa Drs. R.M. Soedarsono (direktur ASTI), yang juga cukup memiliki reputasi, khususnya di dalam penciptaan/ pembinaan kader-kader penari kita dewasa ini.
78. Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, *op cit*, hal. 669--672.
79. *Ibid*, hal. 680--681.



PENUTUP

Di dalam tulisan ini telah dibuktikan bahwa cara hidup manusia itu meliputi bidang filsafat, ilmu pengetahuan dan seni. Ketiga tiganya tumbuh berkembang dalam ruang yang karena adanya sifat deperensiasi (perbedaan) terbatas pada iklim, alam dan zaman mewujudkan adanya penggolongan manusia menjadi bangsa dan merupakan satu masyarakat yang hidup dalam satu daerah wilayah tertentu.

Dengan demikian terjadilah suatu kebudayaan bangsa yang menampung perkembangan kegiatan hidup berfilsafat, berilmu pengetahuan dan berkesenian. Khusus bangsa Indonesia kegiatan hidupnya meluas serta mendalam sampai pada bidang keagamaan dan kepercayaan-kepercayaan lainnya (religi).

Cara hidup manusia Indonesia yang menjadi bangsa Indonesia dengan ciri kebudayaan Indonesia tidak akan lepas daripada cara-cara yang penuh dengan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan hidup selaras dengan kepercayaan serta fijsafatnya. Bentuk daripada keseniannyapun menjadi perwujudan sifat-sifat hidup kejiwaannya.

Cara hidup dengan sifat-sifatnya seperti tersebut di atas berjalan turun temurun dari generasi ke generasi, adapun segala akibat perubahan alam dan zaman adalah suatu konsekwensi hidup berkebudayaan.

Kelangsungan hidup kebudayaan berarti kesempurnaan hidup filsafat, seni dan ilmu pengetahuan bagi sesuatu bangsa. Bentuk kesempurnaan ini dapat dilihat pada cara hidup bangsa dalam hal politik, ekonomi dan sosial. Di sini maka ilmu pengetahuan bukanlah alat kesempurnaan hidup manusia melainkan alat kelangsungan hidup menurut teori “tri-teraf” tersebut di muka.

Di sini ilmu pengetahuan merupakan rangkaian hidup bukan penentuan. Begitu pula agama dan kepercayaan-kepercayaan lain adalah suatu “*pulag up higher*” juga daripada cara hidup yang khas bagi bangsa Indonesia,.

Apabila perbatasan (definisi) mengenai cara hidup bangsa Indonesia seperti yang diutarakan di atas itu dapat dipahami, maka, tiada satupun kegiatan hidup yang dominan atas lainnya. Baik filsafat, seni maupun ilmu dan agama semuanya bergerak sejajar mempercepat proses dinamika perkembangan suatu bangsa.

Cara hidup berkebudayaan seperti di atas memberikan ciri khas bagi bangsa Indonesia. Bentuk dan sifatnya berubah menurut gerak perubahan alam dan zaman teristimewa di Indonesia silih berganti melalui percampuran kebudayaan dari bangsa-bangsa dan agama lain. Silih berganti tanpa menimbulkan antithese berjalan “*Smoothly*” dengan penuh toleransi. Percampuran yang demikian itu merupakan satu “akulturasi” kebudayaan yang saling isi mengisi tanpa ada dominasi satu atas lainnya. Dengan demikian berkembanglah kebudayaan bangsa Indonesia dengan bentuk cara hidup yang khas pula dari abad ke abad. Atas proses dinamika yang demikian maka terjadi manusia Indonesia.¹⁾

Benda-benda purbakala dapat sekedar menunjukkan satu pikiran dalam permulaan cara hidup. Diantara banyak penemuan terdapat rangka manusia di desa Trinil dekat Sala. Yang dinamai Homo Soloensis dan diperkirakan hidup pada 2000 tahun sebelum Masehi. Benda tersebut dianggap dapat memberi petunjuk adanya kehidupan manusia di tanah air kita sejak zaman purba yang telah mempunyai cara hidup walaupun tidak dapat digambarkan dengan pasti apa sifatnya dan apa bentuknya. Mungkin cara hidupnya belum merupakan keadaan dan belum berbentuk suatu kebudayaan, namun ada gerak

hidup melalui proses evolusi menurut dyanamika kodrat alam yang pada permulaan bersifat "instinctip" sebagai taraf pertama adanya pendidikan.²⁾ dan sudah menjadi kodrat bahwa proses pertumbuhan bangsa Indonesia bergerak melalui fase zaman seperti zaman Purba, zaman pertengahan, zaman baharu (penjajahan Belanda dan Jepang) dan demikian penginjak alam revolusi dengan segala akibatnya. Alam dan zanian membawa perubahan pada bentuk sifat hidup kebudayaan bangsa.³⁾

Seperti halnya di dalam penulisan pencatatan sejarah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya, bahwasanya Yogyakarta adalah merupakan salah satu Daerah Negara Republik Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam proses sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Kemerdekaan adalah hak azasi manusia. Manusia dilahirkan bebas kata J.J. Rousseau dalam bukunya yang terkenal "Du Contract Social". Memang kebebasan atau kemerdekaan adalah salah satu hak azasi manusia yang tak dapat disangkal, diingkan maupun dihapus. Terikatnya manusia di dunia ini oleh sebab adanya kelaliman dan ketamakan pada manusia. Jika manusia tidak dapat mengekang kelaliman dan ketamakan yang ada pada dirinya, mudahlah ia mengikat orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini kita alami ketika Belanda bercokol selama tiga setengah abad di bumi Indonesia ini. Dan terjadi pula ketika bangsa Jepang menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun.⁴⁾

Dengan demikian Kotapraja Yogyakarta dilahirkan sebagai kotapraja atau kota Otonom atau sebagai Stadsgemeente, baru di zaman kemerdekaan. Jika kota-kota seperti Magelang, Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, Madiun dan lain-lain sudah menjadi Stadsgenicente pada zaman penjajahan Belanda, kemudian dikatakan pada zaman penjajahan Jepang. Tetapi tidak demikian halnya dengan Kotapraja Yogyakarta. Dengan tegas dapat dikemukakan di sini bahwa Kotapraja Yogyakarta baru dilahirkan oleh undang-undang no. 17 tahun 1947, yang membentuk kota Yogyakarta sebagai Stadsetneente Atau Haminte Kota atau Kota Otonom atau Kotapraja. Undang-undang itu dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 1947.

Dengan demikian dapatlah kita ambil kesimpulan, bahwa Kotapraja Yogyakarta bukan dilahirkan oleh penjajah, melainkan lahir di alam kemerdekaan, lahir dari kancah Revolusi.⁵⁾

Sebagai akhir tulisan dalam pencatatan sejarah perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditinjau dari seosegi pemerintahan, pihak, ekononitsosial budaya/seni dan agama, maka diharapkan sebagai gudang data khususnya untuk disiplin ilmu sejarah, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan di lapangan pembangunan, baik pembangunan yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual, dan akan tambah kesempurnaan, serta kelancaran jalannya pemerintahan sehingga bermanfaat sebaik-baiknya bagi kepentingani Negara dan Bangsa.

Sejak itu juga bermaksud untuk membuka pandangan baru dan melengkapi pengetahuan masyarakat terutama generasi muda, dengan cara menunjukkan data. Bahwa kebudayaan mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan negara.

Catatan

1. Mangunpranoto, Sarino, *Perkembangan Pendidikan/Pengetahuan dan Hubungannya dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana*. Kenang-kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan RI Tahun 1961, halaman 61.
2. *Ibid* halaman 62.
3. *Ibid* halaman 66.
4. Subantardjo, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Kenang-kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan RI Tahun 1961, halaman 28.
5. Poerwokoesoemo, Soedarisman, *Tri Panca Warsa Kotapraia Yogyakarta*, 7 Juni 1947 - 7 Juni 1962 halaman 13.

Daftar Bacaan Bab II

1. Goenadi Nitihaminoto, (Drs)
Unsur-unsur Prehistrorik pada gerabah Gunung Wingko,
Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta 1970
2. Goenadi Nitihaminoto, (Drs)
"Ruang pikiran rakyat Pembaca" Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober 1976, Yogyakarta
3. Koetjaraningrat, (Drs)
Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid I, RI Yogyakarta, 1956
4. Loncoln Barnett
The Epic of Man, Part II, Life 1956, Internasional Edition.
5. Soedarsono, (Drs)
Beberapa catatan tentang Seni pertunjuk Indonesia,
Konservation Tari Indonesia, Yogyakarta 1974.
6. Soekmono, (Drs)
Pengantar Sejarah kebudayaan Indonesia, Jilid I Nasional
Prapanca, Jakarta 1955, (cetakan I dan ke 3)
7. Van der Hoop, A.N.J. Th.a.Th.
Ragam-ragam Perhiasan Indonesia, K.B.G. van Kunsten en
Wettenschappen, Jakarta, 1949.
8. Van der Hoop, A.N.J. Th.a. TH.
Krom, Prof Dr N.J.

Kun, R.A.

Gexhiedenis var, Nederlandasch Indie, dul I. Joost van den Vonden, Amsterdam, 1938.

9. Van Hukeren, H.R.

Penghidupan dalam zaman Prasejarah di Indonesia Lembaga Kebudayaan Indonesia Jakarta 1955.

10. Van Stein Callenfels, (Dr.P.V)

Pedoman singkat untuk Pengumpulan Prasejarah, lembaga Kebudayaan Indonesia Jakarta 1955.

K.G.B. van Kunsten en Wetenschappen

A.C. Nix & Co, bandung, 1950

Daftar Bacaan Bab III

1. Berg, C.C. *Kidung Sundayana*, De Bliksem, Surakarta 1928.
2. Bernet Kempers, Prof. Dr. A. Y. dan Soekomo, Dr. *Candi-candi disekitar Prambanan*, Seri Peninggalan Purbakala III, Ganaco NV. Bandung Jakarta, 1974.
3. Bosch, Dr. F. D. K. "De Inscriptie van Kelurak," *Tijdschrift voor Ind. Taal-Land en Volkenkunde, Kon Bat Gen. van Kusten en Wetenschappen*, deel LXVIII, alf. I en 2 1928, Albrecht & Co Batavia.
4. Brandes, Dr. J. L. A. "Oud Javaansche Oorkonden," *Verth v/h Bat. Genvam Kusten en Wetenschaappen*. Deel LX. Berste stuk. Albercht & Co Batavia 1913.
5. De Casparis, Dr. J. G. "Sedikit tentang golongan-golongan di dalam masyarakat Jawa Kuno" *Amerta* 2, Dinas Purbakala Republik Indonesia. 1954.
6. Groeneveldt W. P. *Historical notes on Indonesia and Malaya compiled from Chines Sources* CV. Bharata Jakarta, 1960.
7. Jasmin S. U. pendeta, *Saduran kitab suci Sang Hyang Kamahayanikan*, UPD Perbuddhi Jawa Tengah, Semarang 1971.
8. Kats, J. *Het Ramayana op Javansche Tempel Reliefs of The Ramayana as-shown in the Prambanan group of temples*.

9. Kats, J. *Sang Hyang Kamahayanikan*, Kon.Inst. voor de Taal, Land-en Volkenkunde van Ned Indie. Martinus Nyhoff. 's Gravenhage 1910
10. Kern H.Dr, *Sanskrit inscriptie van Canggal (Kedu) Uit 654 Saka, Vers.Ges. zevende deel*, Bydr tot de Taal-Land-en Volkenkunde van Ned Indie 4 e Volgreeks. Deel X 's Gravenhage, 1885.
11. Kern H, *Verspreide Geschriften, zevende deel*, Martinus Nyhoff's Gravenhage, 1917.
12. Kunst, Mr.J. *Hindoe-Javansche Muziek Instrumenten*, Kon.Bat. gen.van Kusten en Wetenschappen, G. Kolf & Co Weltevreden, 1926.
13. *Kursus Sejarah Tertulis*, nomor 13,14,15,16, Kementerian Pendidikan,Pengajaran, Kebudayaan, Jakarta.
14. Norder J. *Inteideing tot de oude geschiedenis van den Indris chen Archipel*, H.P. Leopolds Uitgeverij My. N.V. Deen Haag, 1948.
15., *Oudheidekunding verslag 1925, Eest en Tweede Kwar taal*. Kon. Bat. Gen. van Kunsten en Wetenschappen. Albrecht &Co, Weltevreden, 1926.
16., *Oudheidekunding verslag 1938*, Kon Bat.Gen van Kunsten en Wetenschappen, Batavia,1939.
17., *Oudheidekunding Verslad 1948*, Kon Bat.Gen van Kunstentent..Wetenschappen.A.C.Nix & Co, Bandung,1950.
18., *Petunjuk Museum Sanabudaja*, peng. Museum Sanabudaya, Yogya, 1954.
19. Poerbatjaraka, Prof.Dr.K.M.Ng. *Kapustakaan Djawi*, Pen. Djambatan, Djakarta,1952.
20. Soedarsono. Drs.Beberapa catatan tentang Seni Pertunjukan Indonesia, Konservatori Tari Indonesia,Yogyakarta.1974.
21. *Stutterheim, Dr.w.f. Inscriptie op een zuiltje van Papringan*, Tijdschrift voor Indische Taal-Land-en Volhenkunde, 1933, Deel LXXIII alf.1.

22. Stutterhiem, Dr. w.f. *Een belangrijke oorkonde uit de Kedu*, Tijdscheift voor de Taal, Land en Volkenkunde, Kon. Bat. Gen. van Kusten en Wetenschappen, Deel LXVIII afl. 1 en 2 1927. Albrecht & Co Batavia .
23. Stutterheim, Dr. W.F. *De stichter der Prambanan Temples* Tijdscheift van het Java institut "Djawa" Twintigste Jaargang, Java-Institut Yogyakarta, Nomor : 1 Tahun 1940.
24. Sutijpto Wirjosuparto, Drs. *Sejarah bangunan Kuno Dieng Kalimosodo*, Djakarta 1957.
25. Sutipto Wirjosuparto, M.A. PhD Prof Dr. R.M. *Glimpses of cultural history of Indonesia, India*, Djakarta 1964.
26. Van der Hoop, A.N. Th. a Th. *Ragam-ragam Perhiasan Indonesia*, Kon Bat Gen van Kunsten en Wetenschappen N.V/ v/h A.C. Nix & Co Bandung 1949.
27. Zoetmulder, P.J. *Triwarga dalam kesusteraan Jawa Kuno* Majalah "sana budaya" Tahun ke I Nomor 1. Yogyakarta, 1955.

Daftar Bacaan pada Bab V

1. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah IV. Laporan Politik tahun 1837 (Staatkundig Oversicht van Ned-Indie 1837)* Jakarta, 1971.
2. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Penerbitan Sumber-sumber Sejarah V Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1837--1848*, Jakarta, 1973.
3. Berg, H.J. van den H. Krockamp, *Asia Dan Dunia Sedjak tahun 1500*, J.B. Wolters Jakarta, 1954.
4. Burger, D.H. dan Prajudi. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, I.J.B. Wolter, Jakarta, 1957.
5. Harun Hadilyono, *Kebatinan Jawa Dalam Abad 19*. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
6. Moh. Ali. *Perdjuangan Feodal*, Ganaco N.V. Jakarta, 1963
7. Pitono, I Njoman Dekker, Hagiono, *Sejarah Indonesia II* Penerbit Utama, Malang, 1972.
8. Poerbatjaraka dan Tardjan Hadidjaja, *Kepustakaan Djawa*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1952.
9. Rahmat Subagyo, *Kepercayaan Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan Dan Agama*. Reprint dari Majalah Spektrum 3) 1973.

10. Soedarsono, *Beberapa Catatan Tentang Seni Pertunjukan Indonesia*, Konservatori Tari Indonesia, Yogyakarta, 1974.
11. Soekanto, *Sekitar Jogjakarta, Mahabarata*, Jakarta 1952.
12. Satari Iman Bernadi, *Pengantar Sejarah Pendidikan I*, Yayasan Penerbit FIP-IKIP Yogyakarta 1975.
13. Sutjipto. F.A. Struktur Birokrasi Mataram "*Madjalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesa* no. I & II Maret Juni 1968.
14. Wirjosaparto Sutjipto, *Bunga Rampai Sejarah Budaya Indonesia*,
15. Wirjosaparto Sutjipto, *Dari Lima Zaman Pendjadjahan Menuju Zaman Kemerdekaan*, Indhi, 1953.

Daftar Bacaan pada Bab VI

1. Agus Salim, Haji, *Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia* Tinta Mas, Jakarta 1962.
2. Burger, Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I dan II, Pradjaparamita, Jakarta 1962.
3. De Yong, *Salah satu sikap orang Djawa*, Yayasan Kanisius Semarang, 1976.
4. Duyvendak, *Inleiding de ethnologic van de Indonesisch Archipel* Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, tt, terjemahan.
5. Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, *Daerah Istimewa Jogjakarta*, Yogyakarta, 1962.
6. Djamawi Hadikusumo, *Aliran Pembaharuan dari Djamaludin Alafghani sampai K.H. Ahmad Dahlan*, Persatuan Yogyakarta, tt.
7. Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, *Daerah Istimewa Jogjakarta 1960*, Jawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1960.
8. Junus Salam, *Riwayat hidup K.H.A. Dahlan Amal dan Perjuangannya*, Depot Pengajaran Muhammadiyah, Djakarta, 1968.
9. Kementerian Penerangan RI, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta, 1953.

10. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakjat Jakarta, tt.
11. Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun, *Kota Jogjakarta 200 tahun*, Sub Panitia Penerbit Jogjakarta, 1956.
12. Pluvir, J.M. *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari tahun 1930--1942* Amsterdam,
13. Ruslan Abdulgani, *Almarhum Dr. Soetomo yang saya kenal* Yayasan Idayu, Jakarta, 1974.
14. Soekamto, *Sekitar Jogjakarta 1755--1855* (perdjandjian Gianti - Perang Dipanegara), Mahabarata, Djakarta, 1952.
15. Shalaby Ahmad, *Perkembangan Keagamaan Dalam Islam dan Masehi*, AB. Sitti Sjamsijah, Jogjakarta, 1960.
16. Slamet Mulyana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, jilid I dan II PN Balai Pustaka, Jakarta 1969.
17. Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*. PT Pembangunan Djakarta 1962.,
18. Stodard. L. *Dunia Baru Islam* (The New World of Islam) Panitia Penerbit Koordinator Kementerian Kesedjahteraan, Jakarta, 1966.
19. Tauchid, Moch. *Ki Hajar Dewantara Pahlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional*, Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa Jogjakarta, Jogjakarta 1968.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak H.A.B. Fachrudin pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal 29 September 1976.

Daftar Bacaan Bab VII

1. Bandjaransari, Sudomo, *Sejarah Pemerintahan Kota Yogyakarta Jawatan Penerangan Kotapraja Yogyakarta*.
2. Darmosugito, *Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756 -- 7 Oktober 1956 Yogyakarta 1956*.
3. Jawatan Penerangan DIY *Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958, Jawatan Penerangan DIY*.
4. Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta*.
5. Majalah Panji Pustaka No. 226, 15 Agustus 2603 (1943) Tahun XXI.
6. NASUTION A.H. (Jendral TNI) *Sejarah Perjuangan Nasional Di Bidang Bersenjata, Jakarta 1966*.
7. Sosrodihardjo, Sudjito, *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa, Yogyakarta 1972*.
8. Panitia Pekan Raya, *Kenang-kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan RI Tahun 1961 di Yogyakarta. 6 Juli -- 24 Agustus 1961*.
9. Panitia, *Peringatan Tri Panca Warsa Kotapraja Yogyakarta, 7 Juni 1947 -- 7 Juni 1962*.
10. Tauchid, Moch, Ki Hajar Dewantara (pahlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional) *Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa-Yogyakarta*.
11. The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI. Jilid I. Jakarta 196*

10. Tauchid, Moch. Ki Hajar Dewantara (pahlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional) Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa-Yogyakarta.
11. The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI*. Jilid I. Jakarta 196

Daftar Bacaan Bab VIII

1. A.H. Nasution, Pokok-pokok Gerilja Dan Pertahanan Republik Indonesia Dimasa Lalu dan Jang Akan Datang, Pembimbing Djakarta, 1954.
2. A.H. Nasution (Jenderal TNI) Sejarah Perjuangan Nasional Dibidang Bersenjata, Jakarta, 1966.
3. Adam, Cindy, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Gunung Agung, Djakarta, 1962.
4. Agus Salim, Haji, Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia, Tinta Mas, Jakarta, 1962.
5. Ali Sastroamodjojo, Tonggak-tonggak di PerjalananKu - PT. Kinta, Jakarta, 1974.
6. Aminuddin Junus, Garis Politik Hatta, Penabur, Bukit Tinggi, 1950.
7. Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah IV, Laporan Politik tahun 1837. (Staatkundig Oversicht van Ne-Indie 1837) Jakarta, 1971.
8. Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah V Ichtisar Keadaan Politik Hindia belanda Tahun 1837--1848, Jakarta, 1973.
9. Bandjaransari, Sudomo, Sejarah Pemerintahan Kota Yogyakarta, Jawatan Penerangan Kotapraja Yogyakarta.

10. Berg. H.J. van den H. Krockamp, Asia Dan Dunia Sedjak tahun 1500, J.B. Wolters Jakarta 1954.
11. Berg, C.C. Kidung Sundayana, De Bliksem, Surakarta 1928.
12. Bernet Kempers, Prof. Dr. A.Y. dan Soekmono, Dr. Candi-candi di sekitar Prambanan, Seri Peninggalan Purbakala III, Ganaco NV. Bandung Jakarta, 1974.
13. Bosch, Dr. F.D.K. "De Inscriptie van kelurrak," Tijdschrift voor Ind. Taal-Land en Volkenkunde, Kon Bat Gen, van Kusten en Wetenschappen, deel LXVIII, alf. 1 en 2 1928. Albrecht & Co Batavia.
14. Brandes, Dr. J.L.A. "Oud Javaaansche Oorkonden, "Verh v/h Bat. Gencan Kusten en Wetenschaappen. Deel LX. Berste stuk. Albrecht & Co Batavia 1913.
15. Buku Dokumentasi DPRDP Kabupaten Sleman, Panitia Penyusunan Dokumentasi DPRDP Sleman, Sleman 1958.
16. Buku Gerilja Wehrkreise III, Tanpa nama penerbit, Jogjakarta, tt.
17. Burger, D.H. dan Prajudi. Sedjarah Ekonomis sosiologis Indonesia, I.J.B. Wolter, Jakarta, 1957.
18. Daerah Istimewa Yogyakarta 1958, Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogjakarta 1958.
19. Daerah Istimewa jogyakarta 1960, Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogjakarta 1960.
20. Daerah Istimewa Yogyakarta 1961, Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogjakarta 1961
21. Daerah Istimewa Yogyakarta 1962, Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogjakarta 1962.
22. Darmosugito, Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756 - 7 Oktober 1956 Yogyakarta 1956.
23. de Casparis, Dr. J.G. "Sedikit tentang golongan-golongan di dalam masyarakat Jawa Kuno" Amerta , Dinas Purbakala Republik Indonesia 1954.

24. De Yong, Salah Satu Sikap Orang Djawa. Yayasan Kanisius, Semarang 1976.
25. Djarnawi Hadikusumo, Aliran Pembaharuan dari Djamaluddin Alafghani sampai K.H. Ahmad Dahlan, Persatuan Yogyakarta, tt.
26. Duyvendak, Inleiding de Ethnologie van de Indonesisch Archipel, Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, tt, terjemahan.
27. Fungsi Desa Dalam Arus Revolusi\Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogjakarta 1966.
28. Grooneveldt W.P. Historical notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese Sources. CV. Bhatara, Jakarta, 1960.
29. Harun Hadiwijono, Kebatinan Jawa Dalam Abad 19. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
30. Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia di Djakarta, Berita & Pendapat Pemilihan Umum 1971 Lembaga Pendidikan Dan Konsultasi Pers, Djakarta, 1972.
31. Ismail Suny, Pergeseran Kekuatan Eksekutif, C.V. Calindra Djakarta, 1965.
32. Jasmin S.U. pendeta, Saduran kita suci Sang Hyang Kamahayanikan, UPD Perbhuddhi Jaaawa Tengah, Semarang, 1971.
33. Kats J. Het Ramayana op. Javaansche Tempel Reliefs, The Ramayana as-shown in the reliefs of the Prambanan group of tempels.
34. Kats. J. Sang Hyang Kamahayanikan, Kon. Inst. voor de Taal, Land- en Volkenkunde van Ned Indie, Martinus Nyhoff. 's Gravenhage, 1910.
35. Kern H. Dr, Sanskrit inscriptic Cangga (Kedu) Uit 654 Saka, Vers. Ges. zevende deel. Bydr tot de taal-landen Volkenkunde van Ned Indie 4 e Volgreeks. Deel X 's Gravenhage, 1885.
36. Kern H, Verspeide Geschriften, zevende deel, Martinus Nyhoff, 's Gravenhage, 1917.

37. Kunst, Mr. J. Hindoe-Javaansche Muziek Instrumenten, Kon.bat. Gen. van Kusten en Wetenschappen. G. Kolf & Co Weltevreden, 1926.
38. Kursus Sejaaaarah Tertulis, nomor 13, 14, 15, 16, Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Jakarta.
39. Majalah Panji Pustaka No. 226, 5 Agustus 2603 (1943) Tahun XXI.
40. Marzuki Arifin, Peristiwa 15 Januari 1974, Publising House Indonesia Djakarta, 1974.
41. Masri Singarimbum dan D.H. Penny, Penduduk & Kemiskinan Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1976.
42. Masri Singarimbum & Kasto, Proyek Dwikarti, Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1976.
43. Menuju Yogyakarta, Gabungan SwastaRepublik Indonesia di Jogjakarta, Jogjakarta 1872.
44. Mohammad Roem, Bunga Rampai dari Sedjarah, Bulan Bintang, Djakarta, 1972.
45. Norder J. Inleideing tot de oude geschiedenis van den Indischen Archipel, H.P. Leopolds Uitgeverij My. N.V. Den Haag, 1948.
46. -- Oudheidkunding verslag 1925 Eerst en Tweede Kwartaal. Kon. Bat. Gen. van Kunsten en Wetenschappen. Albrecht & Co, Weltevreden, 1926.
47. -- Oudheidkunding verslag 1938, Kon, Bat. Gen van kusten en Wetenschappen, Batavia 1939.
48. -- Oudheidkunding verslag 1948, Kon, Bat. Gen van kusten en Wetenschappen, A.C. Nix & Co, Bandung, 1950.
49. -- Petunjuk Museuma Sanabudaja, Peng. Museum Sanabudaya, Yogya, 1954.
50. Nugroho Notosusanto, (col) Markas Besar Komando Jawa, Departemen Pertahan Keamanan Pusat sejarah ABRI Jakarta, 1973

51. Nugroho Notosusanto, (col) Sedjarah Revolusi Indonesia (jilid VI) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
52. Panitia Munas III Alumni Universitas Islam Indonesia, Buku Kenang-kenangan Pertama Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1974.
53. Panitia Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapraja Jogjakarta, Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapraja Jogjakarta 7 Djuni 1947--7 Djuni 1962 Jogjakarta, 1962.
54. Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 220 tahun, Kota Jogjakarta 200 tahun, Sub Panitia Penerbit Jogjakarta, 1956.
55. Panitia Pekan Raya, Kenang-kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan RI Tahun 1961 di Yogyakarta 6 Juli - 24 Agustus 1961.
56. Panitia Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapraja Jogjakarta, Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapraja Jogjakarta 7 Djuni 1947--7 Djuni 1962 Jogjakarta, 1962.
57. Peraturan-Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tentang Hak Atas Tanah, Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tt.
58. Pluvir, J.M. Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari tahun 1930--1942 Amsterdam.
59. Pitono, I Njoman Dekker, hagiono, Sejarah Indonesia II. Penerbit Utama, Malang, 1972.
60. Poerbatjaraka, Prof. Dr. K.M. Ng. Kepustakaan Djawi, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1952.
61. Poerbatjaraka dan Taaardjan Hadidjaja, Kepustakaan Djawi, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1952.
62. Rahmat Subagyo, Kepercayaan kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama Reprint dari majalah Spektrum 3) 1973.
63. Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, Kementrian Penerangan, Djakarta, 1953.

64. R.M. Wasisto Surjaningrat, Gamelan Tari Wayang di Jogjakarta, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta 1970.
65. Roeder, O.G. Soeharto dari Prajurit sampai Presiden, Gunung Agung, Djakarta, 1969.
66. R.P. Soedarsono, "Revolusi Djoko dan Sekitarnja" bagian ke I Penelitian Sedjarah no. 2 Tahun ke II 1961 (Jajasan Lembaga Ilmiah Indonesia Penjelidikan Sedjarah, Djakarta, 1961.
67. R.P. Soedarsono, "Revolusi Djoko dan Sekitarnja" bagian ke I Penelitian Sedjarah no. 2 Tahun ke II 1961 (Jajasan Lembaga Ilmiah Indonesia Penjelidikan Sedjarah, Djakarta, 1961.
68. Ruslan Abdulgani, Almarhum Dr. Soetomo yang saya kenal Yayasan Idayu, Jakarta, 1974.
69. Satari Iman Bernadi, Pengantar Sejarah Pendidikan I, Yayasan Penerbit FIP-IKIP Yogyakarta, 1975.
70. Soedarsono, Beberapa Catatan Tentang Seni Pertunjukan Indonesia, Konservatori Tani Indonesia, Yogyakarta, 1974.
71. Soekanto, Sekitar Jogjakarta, Mahabrata, Jkarta 1952.
72. Sutjipto, F.A. Stuktur Birokrasi Mataram "Madjalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia" no. I & II Maret, Juni 1968.
73. Shalaby Ahmad, Perkembangan Keagamaan Dalam Islam dan Masehi, AB. Sitti Sjamsjah, Jogjakarta, 1960.
74. Slamet Mulyana, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia, Jilid I dan II PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1969.
75. Susaanto Tirtoprodjo, Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia. PT. Pembangunan Djakarta, 1962
76. Stidard. L. Dunia Baru Islam (The New World of Islam) Panitia Penerbit Koordinator Kementrian Kesedjahteraan, Djakarta, 1966.
77. Stutterheim, Dr. w.f. Inscriptie op een zuiltje van Papringan, Tijdschrift voor Indische Taal-Land-en Volhenkunde, 1933, Deel LXXIII alf. 1.

78. Stutterheim, Dr. w.f. Een Belangrijke oorkonde uit de kedu, Tijdscheift voor de Taal, Land en Vorkenkunde, kon. Bat. Gen. van Kunsten en Wetenschappen, Deel LXVIII afl. 1 en 2 1927. Albrecht & Co Batavia.
79. Stutterheim, Dr. W.F. De stichter der Prambanan Tempels Tijdscheift van bet Java Institut "Djawa" Twintigste Jaargang, Java-Instituut Yogyakarta, Nomor : 1 Tahun 1940.
80. Sutjipto Wirjosuparto, Drs. Sejarah Bangunan Kuno Dieng Kalimosodo, Djakarta 1957.
81. Sutjipto Wirjosuparto, M.A. Phd. Prof. Dr. R.M. Glimpses of cultural history of Indonesia, Indira, Djakarta 1964.
82. Sosrodihardjo, Sudjito, Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa, Yogyakarta 1972.
83. Sutjipto, F.A. Struktur Birokrasi Mataram "Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia" no. I & II Maret, Juni 1968.
84. Seminar Pantjasila ke I 16 Februari s/d 20 Februari 1959 di Yogyakarta, Panitia Seminar Pantjasila Jogjakarta, 1959.
85. Siti Fatimah "Geraka Mahasiswa di UGM Pada Sekitar Tahun 1966" Skripsi Sarjana Muda Sejarah, Yogyakarta, 1975.
86. Solichin Salam, Djendral Soedirman Pahlawan Kemerdekaan Djajamurni, Djakarta, 1963.
87. Soedarsono, Djawa dan Bali Dua Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisional, Gajah Mada University Press Yogyakarta, Jogjakarta, 1972.
88. Soedomo Bandjarasari, Sejarah Pemerintah Kota Jogjakarta, Djawatan Penerangan Kotapraja Jogyakarta, Jogjakata 1952.
89. Soedarsiman Poerwokoesoemo, Pengaruh Timbal-balik antara Universitas Gajah Madah dan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1956.
90. Sulastri, "Tinjau Terhadap Soal-soal yang Menyebabkan kelemahan Perekonomian Desa Kaliginting, Skripsi Sarjana Muda Antropologi Jogjakarta, 1972.

91. Suryati Supangat, " Perjuangan Rakyat Kabupaten Bantul pada Masa Pendudukan Belanda tahun 1948--1949" Skripsi Sarjana Muda Sejarah, Yogyakarta, 1967.
92. Sutomo, Himpunan Peraturan-Peraturan Pendjelmaan Negara Kesatuan Republik Indonesia UP Indonesia, NV. Jogja, 1954.
93. Tauchid, Moch. Ki Hajar Dewantara Pahlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional, Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa Jogjakarta, Jogjakarta, 1968.
94. The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara RI. Jilid I. Jakarta 1967.
95. Van der Hoop. A.N. th. a. Th. Ragam-ragam Perhiasan Indonesia, Kon. Bat Gen van Kunsten en Wetenschappen N.V. v/h A.C. Nix & Co Bandung 1949.
96. Wirjosaparto utjipto, Bunga Rampai Sejarah Budaya Indonesia,
97. Wirjosaparto Sitjipto, Dari Lima Zaman Pendjajaahan Menuju Zaman Kemerdekaan, Indira, 1953.
98. Zoetmilder. P.J. Triwarga dalam kesusasteraan Jawa Konu Majalah "Sana Budaaya" Tahun ke I Nomor 1, Yogyakarta, 1955.

3. Racana Panwara (Perencana Penerangan)
4. Ayahan Umum (sekarang Jawatan Pemerintahan Umum) 276
5. Ekonomi
6. Yayasan umum

Pada tanggal 1 Agustus 1945 jabatan Papatih Dalem (Ryksbestuurder) kosong dan tidak diisi lagi. S.P. Sultan memegang pimpinan sendiri. Diadakan utaradyapati, sebagian pekerjaan yang terlalu besar untuk dimasukkan dalam paniradyapati. Akan tetapi kecil untuk dijadikan paniradyapati sendiri. Tiga udaradya yang diadakan ialah :

1. Uruan Pegawai
2. Pemeriksa Keuangan
3. Sridarmajuki (pengadilan Darah Dalem).⁶⁾

7.1.2. Pemerintahan Jepang

Kota Yogyakarta telah berdiri bersamaan dengan dibangunnya keraton Yogyakarta pada tahun 1755 (M) yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi. Setelah dinobatkan menjadi Sultan, Pangeran Mangkubumi memakai nama Sri Sultan Hamengku Buwono ke-1. Sultan inilah yang menurunkan para Sultan di Yogyakarta hingga yang ke-10 sekarang ini.

Di samping kekuasaan Belanda, di daerah Yogyakarta ada dua kekuasaan lain, ialah pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman.

Daerah Paku Alaman di dalam kota meliputi daerah sekitar kemantren Paku Alaman, dan di luar kota meliputi daerah di sekitar Kabupaten Adikarto. Daerah Kabupaten Adikarto belum lama ini telah digabungkan menjadi satu dengan daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi Kabupaten Kulon Progo. Adanya pemerintahan ini akibat politik pecah belah pemerintahan kolonial Belanda (1813).

Tempat kedudukan pemerintah Daerah (Istimewa) Yogyakarta ialah kota Yogyakarta. Di tengah-tengah kota ini dari Utara ke Selatan melintang Sungai Code. Sebelah Barat sungai merupakan wilayah Kasultanan, sedang sebelah Timur sungai termasuk wilayah Paku Alaman.

Pada zaman Hindia Belanda kota Yogyakarta hanya merupakan daerah district yang termasuk lingkungan Kabupaten Yogyakarta. Dalam tahun 1941 oleh anggota Volksraad Hindia Belanda R.W. Joyo Al-Jimadhudoyo pernah diusulkan kepada Volksraad agar kota ini dijadikan sebuah stadsgemeente. Usul ini ditolak oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, karena pembentukan sebagai stadsgenicente itu akan berarti terlepasnya Kota Yogyakarta dari lingkungan Kasultanan Yogyakarta.⁷⁾

Pada waktu zaman pendudukan Jepang, Yogyakarta juga mengalami beberapa perubahan susunan pemerintahan. Pada bulan April 1945 terjadi suatu perubahan, yaitu Kabupaten Yogya yang dulunya mempunyai urusan meliputi daerah Kalasan, Sleman dan Godean di pecah menjadi 2 (dua) yakni: Kabupaten kota dan Kabupaten Sleman, yang daerahnya meliputi kawedanan-kawedanan Sleman, Kalasan dan Godean. Nama kabupaten dalam bahasa Jepang disebut Si. Kota Yogyakarta tidak mempunyai status Gemeente. Jadi masih tetap dibawah pemerintahan *zelfbestuur* yang berpusat di Kapatihan Danurjan.

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dahulu disebut *Zelfbestuur*, yaitu pemerintahan yang diatur sendiri, mempunyai alat peraturan sendiri dan tidak harus menurut peraturan-peraturan pemerintah jajahan Belanda yang berpusat di Jakarta. Meskipun demikian pemerintahan Kasultanan tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah Belanda.

Para Sultan yang bertahta selama itu berkedudukan sebagai kepala daerah Kasultanan, akan tetapi tidak aktif memegang pemerintahan. Adapun yang memegang tampuk kekuasaan pemerintah adalah Papatih Dalem (*Ryksbestuurde*), dengan sebutan Raden Aria Adipati Danurejo.⁸⁾

Di Zaman Jepang Kemantren Panembahan dan Kemantren Kadipaten dijadikan satu kemantren Kraton. Selanjutnya Kalurahan Tegalrejo dan Kalurahan Karangwaru menjadi satu kemantren Tegalrejo. Sedangkan Kalurahan Kuncen (ditambah dengan sebagian daerah Kemantren Ngampilan dan sebagian daerah Kemantren Mantrijero yang terletak sebelah Kulon Kali Winongo) menjadi

Kemantren Wirobrajan. Dengan perubahan-perubahan ini maka didalam kota terdapat dua belas kemantren dan dua orang Bupati. Bupati Kota Kasultanan adalah K.R.T. Harjodiningrat dan daerah Kota Paku Alaman dipimpin langsung oleh Bupati Patih Paku Alaman K.P.R. Suryoatmojo.

Wedana dan Asisten Wedana dalam kota dihapuskan dan sebutan mantri Kepala Kampung telah lama dirobah menjadi Mantri

Pangreh Praja. Perubahan ini dibuat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebelum Jepang menduduki Indonesia, dan para Mantri Pangreh Praja berhubungan langsung dengan Bupati kota tersebut.⁹⁾

Dengan adanya reorganisasi Kabupaten-kabupaten pada zaman penjajahan Jepang di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 1945, yang tadinya kota Yogyakarta merupakan bagian dari Kabupaten Yogyakarta yang meliputi kawedanan-kawedanan kota, Sleman dan Kalasan dijadikan Kabupaten yang berdiri sendiri yang dikepalai seorang Bupati Kota dengan sebutan *Shi-Co*. Dengan demikian maka kabupaten Kota tidak dinamakan *Yogyakarta Ken*, melainkan diberi nama *Yogyakarta-Shi* (Shi dalam bahasa Jepang sebenarnya berarti Standsgemeente atau Kota Otonom). Akan tetapi kota Yogyakarta meskipun telah mengalami perubahan nama, tetap merupakan daerah kabupaten yang bersifat administratif yang tidak mempunyai kekuatan otonomi sama sekali. Disamping itu *Yogyakarta Shi-Co* hanya mempunyai kekuasaan atas kota Yogyakarta, yang menjadi bagian dari Kasultanan. Bagian kota Yogyakarta yang menjadi daerah Paku Alaman dipimpin sendiri oleh pemerintah Paku Alaman dengan petugas seorang Bupati. Dengan demikian Kota Yogyakarta pada saat itu mempunyai dua orang Bupati Kota, ialah Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota Paku Alaman.¹⁰⁾

Sejak zaman Jepang pekerjaan Mantri Pamong Praja menjadi makin berat. Di samping urusan administrasi terutama Menteri P.P. berkewajiban menggerakkan rakyat dalam berbagai untuk kepentingan peperangan.

Rukun Tetangga (*Topari Gumi*) dan Rukun Kampung (*Aza*) dibentuk. Badan-badan kemasyarakatan ini dinyatakan sebagai badan

pemerintah yang terbawah serta berkewajiban turut aktif dalam lapangan pemerintahan. Sejak itu maka bagi mantri P.P. tidak mungkin lagi mengadakan hubungan langsung dengan penduduk, melainkan harus melalui Azat Yo dan Tomari Gumityo. Rukun Kampung yang pada zaman Belanda merupakan organisasi masyarakat, yang bekerja dalam lapangan sosial (Gotong royong dalam hal kematian, perkawinan. dll.), pada zaman Jepang kedudukannya diperkuat, karena pemerintah pendudukan Jepang mengerti betul bahwa dalam susunan Rukun Kampung terdapat unsur-unsur yang dapat menjadi kekuatan (potentie) untuk membantu-usaha-usaha peperangan. Nama Rukun Kampung diganti Aza, ketuanya disebut Azatyoo. Sedang Rukun Tetangga disebut Tonari Gumi. Dalam peraturan yang menentukan kedudukan Rukun Kampung yang berlaku di Yogyakarta, disebutkan dengan tegas bahwa Rukun Kampung adalah badan pemerintah yang paling bawah. Setelah diaktipkan maka dalam praktek Rukun Kampung menjadi *verlengstuk* dari Kemantren P P. Tetapi Pengurus Rukun Kampung adalah tenaga yang dipilih oleh rayat dan tidak menerima penghargaan materiel dari Pemerintah, jadi merupakan tenaga perjuangan. Sebelum Jepang masuk ke Yogyakarta nama-nama jalan, tempat dan lain-lain yang mempergunakan nama asing telah diganti oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan nama-nama Jawa asli, hingga Pemerintah Balatentara tidak mempunyai alasan untuk menggantikannya dengan nama-nama Jepang, seperti yang terjadi di kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia, terutama Jakarta, Bandung, Semarang dan sebagainya

Demikianlah sedikit gambaran tata pemerintahan daerah di Jawa umumnya dan daerah Yogyakarta khususnya dalam masa pendudukan Jepang sejak tahun 1942 sampai Agustus 1945.

7.1.3 Sikap terhadap Pemerintah Jepang

Dengan pecahnya perang Pasifik, maka oleh Pemimpin-pemimpin nasional sudah diperhitungkan, bahwa peristiwa itu akan membawa masa yang sangat menentukan, bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka. Peristiwa akan meledaknya perang Pasifik, membuka sesuatu bagi bangsa Indonesia. Karena

003303.5

G3.1